



M. BOBBY AFIF NASUTION, SE., MM.
GUBERNUR SUMATERA UTARA

H. SURYA, B.SC.
WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA

RPJMD 2025 2029

PROVINSI SUMATERA UTARA



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



KOLABORASI
SUMUT BERKAH



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappelitbang adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penelitian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
10. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Sumatera Utara.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
13. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Daerah ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
15. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
24. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
25. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah /perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

26. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
27. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
28. Asta Cita adalah misi dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029 yang merupakan Prioritas Pembangunan Nasional.
29. Program Hasil Terbaik Cepat yang selanjutnya disingkat PHTC adalah program strategis yang secara langsung menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan implementasi dari misi pembangunan.
30. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
31. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
32. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
33. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RPJMD meliputi:
 - a. Visi, Misi, dan Program Prioritas Gubernur;
 - b. Tujuan, Sasaran, Strategi Pembangunan;

- c. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. Program Perangkat Daerah; dan
 - e. Rencana Kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) Maksud Penetapan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam:
- a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. penyusunan RKPD; dan
 - c. penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Tujuan Penetapan RPJMD adalah:
- a. menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran;
 - c. menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran serta perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - d. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 3

RPJMD merupakan:

- a. penjabaran visi, misi dan program Gubernur ke dalam strategi pembangunan Daerah Provinsi, kebijakan umum, program prioritas Gubernur, dan arah kebijakan keuangan Daerah Provinsi, dengan mempertimbangkan RPJPD dan RTRWP; dan
- b. dokumen perencanaan Daerah Provinsi yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJMD, meliputi:

a. BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan yang menjabarkan arah perencanaan, diikuti dengan sistematika penulisan yang menunjukkan bagaimana setiap bab pada RPJMD mendukung pencapaian RPJPD secara bertahap.

b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH

Memuat analisis kondisi daerah, analisis evaluasi capaian pembangunan lima tahun terakhir, potensi sumber daya, daya dukung lingkungan, ketahanan terhadap bencana, serta kondisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Analisis Daya saing daerah melalui kualitas SDM, transformasi digital, ekonomi hijau, dan integrasi ekonomi domestik dan global. identifikasi permasalahan utama dan isu strategis, baik dari lingkungan global, nasional, maupun regional, serta potensi daerah untuk menjadi fondasi pembangunan jangka menengah yang berkelanjutan.

c. BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Gubernur yang menjadi fondasi transformasi pembangunan tahap pertama untuk jangka panjang daerah.

d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat alokasi program perangkat daerah yang mencakup rencana program dari tahun 2026 hingga 2030, dengan penekanan bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan

daerah, sebagai dasar penyusunan RKPD Tahun 2030 untuk kepala daerah periode 2030-2034. Program perangkat daerah ini mencakup seluruh program dalam Renstra Perangkat Daerah, termasuk program penunjang urusan pemerintahan daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah akan diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD) yang berlaku dari tahun 2025 hingga 2030, dengan tahun 2030 menjadi tahun transisi.

e. BAB V : PENUTUP

Memuat rangkuman kaidah pelaksanaan RPJMD Sumatera Utara 2025-2029, termasuk konsistensi perencanaan dan pendanaan, serta kaitannya dengan perencanaan pembangunan lainnya. Dibahas juga skema pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, mekanisme perubahan, dan komunikasi publik. Bab ini juga menjelaskan pembiayaan pembangunan dan diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi untuk pelaksanaan RPJMD yang berkelanjutan dan terukur.

BAB IV

ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya.

- (2) Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Gubernur dan DPRD Provinsi Sumatera Utara melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup Provinsi dan antar Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. pengendalian terhadap kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.

- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, pandemi, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50), sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Agustus 2025
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 28 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

TOGAP SIMANGUNSONG
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

APRILLA H. SIREGAR
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19690421 199003 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses strategis untuk merancang tahapan kegiatan yang bertujuan memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Dalam rangka mendukung tercapainya visi jangka panjang Provinsi Sumatera Utara yaitu "Sumatera Utara Unggul, Maju, dan Berkelanjutan", Pemerintah Daerah melakukan perencanaan melibatkan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Hal itu dilakukan dalam rangka menyinkronkan usulan masyarakat dan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimulai dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun Provinsi Sumatera Utara 2025-2045 (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 (RPJMD) yang merupakan tahap pertama dari empat tahapan implementasi RPJPD dengan menyesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah (PD). Dokumen RPJPD dijabarkan oleh dokumen RPJMD dan Renstra PD, selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Penyusunan RPJMD dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD. Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi serta program Bapak Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., dan Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara Bapak H. Surya, B.Sc., yang telah dilantik oleh Presiden RI Bapak Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025 berdasarkan hasil pemilukada serentak pada tanggal 27 November 2024. Penyusunan RPJMD disusun berpedoman pada RPJPD. RPJMD tersebut diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi manusia bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipasi, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD yaitu dengan pendekatan teknokratik, pendekatan partisipasi, pendekatan politis, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Penyusunan RPJMD harus memperhatikan hubungan antar dokumen yang merupakan bagian integral dari proses sinergitas antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang diharapkan dapat mendorong transformasi daerah menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan.

Penyusunan RPJMD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap I RPJPD dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah. Selanjutnya RPJMD nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kemudian, pelaksanaan RPJMD ini nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari RKPD yang menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Dalam pelaksanaan tahunannya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

RPJMD disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. sebagai pedoman dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
2. sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD;
3. menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
4. menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
5. memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi dan kolaborasi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah, sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 dan pedoman dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. RPJMD sebagai perwujudan dari visi-misi Kepala Daerah yang akan diimplementasikan melalui program dan kegiatan dengan tolok ukur indikator yang menjadi acuan dalam penentuan arah keberhasilan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 80

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM.....	5
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....	7
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RPJMD	13
1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	14
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH.....	22
2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	22
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	22
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	94
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah.....	145
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum.....	174
2.2. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	240
2.2.1. Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu	240
2.2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	259
2.2.3. Proporsi Penggunaan Anggaran	260
2.2.4. Analisis Pembiayaan	261
2.2.5. Kerangka Pembiayaan	265
2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	282
2.3.1. Permasalahan.....	282
2.3.2. Isu Strategis.....	311
BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	345
3.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	345
3.1.1. Visi Dan Misi.....	345
3.1.2. Tujuan Dan Sasaran.....	352
3.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS.....	381
3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan	381
3.2.2. Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Daerah.....	403
3.2.3. Program Prioritas Daerah.....	404
3.3. ARAH PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN.....	511
3.3.1. Arah Pengembangan Kewilayahan Berdasarkan Highlight Intervensi Nasional.....	511
3.3.2. Arah Pengembangan Kewilayahan Berdasarkan Highlight Intervensi Provinsi Sumatera Utara	520
3.4. STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	679
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	691
4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH	691
4.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	719
4.2.1. Penyelarasan Indikator Makro Sasaran Utama Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan RPJMN dengan RPJMD.....	719
4.2.2. Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara	735
4.3. INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	737

4.3.1. Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	737
4.3.2. Indikator Kinerja Daerah, Program, dan Pagu Indikatif untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar.....	780
BAB V PENUTUP.....	786
5.1. KAIDAH PELAKSANAAN	786
5.1.1. Pengarusutamaan Pembangunan.....	786
5.1.2. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan	790
5.1.3. Kerangka Pengendalian.....	792
5.1.4. Sistem Insentif.....	806
5.1.5. Mekanisme Perubahan	807
5.1.6. Komunikasi Publik.....	807
5.2. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN.....	808
5.3. KESIMPULAN	810

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.	Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	24
Tabel 2. 2.	Wilayah Sungai di Provinsi Sumatera Utara.....	28
Tabel 2. 3.	Cekungan Air Tanah (CAT) di Provinsi Sumatera Utara	29
Tabel 2. 4.	Sumber Daya Air Permukaan	30
Tabel 2. 5.	Perubahan Penggunaan Lahan Utama Provinsi Sumatera Utara.....	32
Tabel 2. 6.	Kondisi Daya Dukung Pangan Sumatera Utara	41
Tabel 2. 7.	Proyeksi Ketersediaan Pangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.....	42
Tabel 2. 8.	Proyeksi Kebutuhan Pangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.....	43
Tabel 2. 9.	Perkiraan Status Daya Dukung Pangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	45
Tabel 2. 10.	Ketersedian Air Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	47
Tabel 2. 11.	Kebutuhan Air Domestik dan Penggunaan Lahan Provinsi Sumatera Utara.....	48
Tabel 2. 12.	Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	49
Tabel 2. 13.	Status Ketersediaan Air Kabupaten/Kota Sumatera Utara..	50
Tabel 2. 14.	Proyeksi Kebutuhan Air Domestik Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	51
Tabel 2. 15.	Proyeksi Total Kebutuhan Air Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.....	52
Tabel 2. 16.	Proyeksi Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.....	52
Tabel 2. 17.	Proyeksi Perbandingan Luasan Status Air Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	53
Tabel 2. 18.	Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	55
Tabel 2. 19.	Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	56
Tabel 2. 20.	Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	57
Tabel 2. 21.	Luas Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara....	58
Tabel 2. 22.	Jumlah serta Proyeksi Timbunan Sampah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	60
Tabel 2. 23.	Akumulasi Beban Pencemaran Sungai di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	62
Tabel 2. 24.	Tingkat Kerawanan Bencana Longsor di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	63
Tabel 2. 25.	Tingkat Kerawanan Bencana Bahaya Banjir di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.....	65
Tabel 2. 26.	Tingkat Kerawanan Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.....	66

Tabel 2. 27.	Tingkat Kerawanan Bencana Gelombang Ekstrim di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.....	67
Tabel 2. 28.	Tingkat Kerawanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.....	69
Tabel 2. 29.	Tingkat Kerawanan Bencana Kekeringan di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara	70
Tabel 2. 30.	Tingkat Kerawanan Bencana Gempa Bumi di Kabupateb/ Kota Provinsi Sumatera Utara	71
Tabel 2. 31.	Tingkat Kerawanan Bencana Tsunami di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	73
Tabel 2. 32.	Jenis dan Luas Perizinan Kehutanan di Sumatera Utara	74
Tabel 2. 33.	Tumpang Tindih Izin Kehutanan dengan Izin Pertambangan	75
Tabel 2. 34.	Jenis dan Luas Hutan Berdasarkan Fungsinya di Sumatera Utara.....	76
Tabel 2. 35.	RKTN 2019 di Sumatera Utara	77
Tabel 2. 36.	Indikator Ketahanan Energi dan Air Provinsi Sumatera Utara.....	78
Tabel 2. 37.	Indikator Kemandirian Pangan Provinsi Sumatera Utara	79
Tabel 2. 38.	Perbandingan Indikator Kemandirian Pangan Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota.....	80
Tabel 2. 39.	Indikator Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.....	82
Tabel 2. 40.	Jumlah Bencana Alam di Provinsi Sumatera Utara.....	84
Tabel 2. 41.	Indikator Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim Provinsi Sumatera Utara	85
Tabel 2. 42.	Indeks Ketahanan Daerah dan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.....	86
Tabel 2. 43.	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara	89
Tabel 2. 44.	Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Sumatera Utara	90
Tabel 2. 45.	Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	91
Tabel 2. 46.	Proyeksi Penduduk Provinsi Sumatera Utara.....	92
Tabel 2. 47.	Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur Provinsi Sumatera Utara.....	93
Tabel 2. 48.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Lapangan Usaha.....	96
Tabel 2. 49.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara.....	97
Tabel 2. 50.	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara	98
Tabel 2. 51.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	100
Tabel 2. 52.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara	101
Tabel 2. 53.	PDRB per Kapita Provinsi Sumatera Utara	103
Tabel 2. 54.	Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota Sumatera Utara ...	107
Tabel 2. 55.	Rasio Gini Kabupaten/Kota Sumatera Utara	108

Tabel 2. 56.	Perbandingan Indeks Modal Manusia Nasional dan Provinsi Sumatera Utara	110
Tabel 2. 57.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	112
Tabel 2. 58.	UHH Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	115
Tabel 2. 59.	Prevalensi Stunting Provinsi Sumatera Utara	117
Tabel 2. 60.	Perkembangan Penemuan dan Pengobatan TBC	119
Tabel 2. 61.	Angka Kesakitan/Morbiditas Provinsi Sumatera Utara	120
Tabel 2. 62.	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	123
Tabel 2. 63.	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara	125
Tabel 2. 64.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Sumatera Utara.....	127
Tabel 2. 65.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sumatera Utara.....	128
Tabel 2. 66.	Indeks Kerukunan Umat Beragama Sumatera Utara	129
Tabel 2. 67.	Indeks Pembangunan Kebudayaan Sumatera Utara	130
Tabel 2. 68.	Produk Tersertifikasi Halal di Sumatera Utara.....	131
Tabel 2. 69.	Aset Perbankan Syariah terhadap PDRB Sumatera Utara ...	132
Tabel 2. 70.	Indeks Zakat Nasional Sumatera Utara	133
Tabel 2. 71.	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.....	139
Tabel 2. 72.	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.....	141
Tabel 2. 73.	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.....	143
Tabel 2. 74.	Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Sumatera Utara.....	145
Tabel 2. 75.	Angka Ketergantungan Provinsi Sumatera Utara	146
Tabel 2. 76.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Sumatera Utara	148
Tabel 2. 77.	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Sumatera Utara.....	149
Tabel 2. 78.	Deviden BUMD kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	153
Tabel 2. 79.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Sumatera Utara.....	154
Tabel 2. 80.	PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Provinsi Sumatera Utara.....	156
Tabel 2. 81.	Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Utara	157
Tabel 2. 82.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Sumatera Utara	159
Tabel 2. 83.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	162
Tabel 2. 84.	Indeks Masyarakat Digital Indonesia Provinsi Sumatera Utara.....	162
Tabel 2. 85.	Pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi Sumatera Utara.....	164
Tabel 2. 86.	Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Utara	165
Tabel 2. 87.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Provinsi Sumatera Utara.....	166

Tabel 2. 88.	Jumlah dan Persentase Desa Mandiri Provinsi Sumatera Utara.....	169
Tabel 2. 89.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara.....	170
Tabel 2. 90.	Perbandingan Inflasi Sumatera Utara, Nasional dan Wilayah Penghitung Inflasi di Sumatera Utara.....	172
Tabel 2. 91.	Indeks Reformasi Birokrasi Sumatera Utara	175
Tabel 2. 92.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Sumatera Utara	176
Tabel 2. 93.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.....	177
Tabel 2. 94.	Indeks Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Utara.....	178
Tabel 2. 95.	Indeks Integritas/Survei Penilaian Integritas (SPI) Provinsi Sumatera Utara	180
Tabel 2. 96.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara.....	181
Tabel 2. 97.	Persentase Penegakan Perda Provinsi Sumatera Utara.....	182
Tabel 2. 98.	Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Sumatera Utara	183
Tabel 2. 99.	Indikator Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	187
Tabel 2. 100.	Sekolah Unggulan Bersama di Provinsi Sumatera Utara	188
Tabel 2. 101.	Ruangan Kelas Rusak di Provinsi Sumatera Utara.....	188
Tabel 2. 102.	Data Peserta Didik Sekolah Menengah Negeri di Provinsi Sumatera Utara.....	190
Tabel 2. 103.	Data Sekolah Menengah di Provinsi Sumatera Utara	191
Tabel 2. 104.	Indikator Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	191
Tabel 2. 105.	Universal Health Coverage Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	192
Tabel 2. 106.	Sebaran Dokter Spesialis Kabupaten/Kota Sumatera Utara.....	195
Tabel 2. 107.	Rumah Sakit Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.....	199
Tabel 2. 108.	Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem Provinsi Sumatera Utara.....	200
Tabel 2. 109.	Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Haji Medan	201
Tabel 2. 110.	Indikator Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ...	201
Tabel 2. 111.	Persentase Jalan Provinsi Permukaan Aspal dengan Kondisi Baik Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	203
Tabel 2. 112.	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.....	204
Tabel 2. 113.	Progres RTRW Kabupaten/Kota.....	205
Tabel 2. 114.	Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang dan Pelaksanaan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara.....	207
Tabel 2. 115.	Capaian Indikator Satpol PP Provinsi Sumatera Utara	208
Tabel 2. 116.	Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.....	208
Tabel 2. 117.	Daerah Kawasan Narkoba di Provinsi Sumatera Utara.....	209
Tabel 2. 118.	Capaian Indikator Sosial Provinsi Sumatera Utara	210
Tabel 2. 119.	Daftar Panti Sosial dan UPTD Provinsi Sumatera Utara	210

Tabel 2. 120.	Jumlah Tempat Ibadah di Provinsi Sumatera Utara.....	212
Tabel 2. 121.	Capaian Indikator Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara...	213
Tabel 2. 122.	Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Tahun dan Keluarga Berencana.....	213
Tabel 2. 123.	Capaian Indikator Ketahanan Pangan dan Produksi Peternakan Provinsi Sumatera Utara.....	215
Tabel 2. 124.	Capaian Indikator Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	216
Tabel 2. 125.	Capaian Indikator Perhubungan Provinsi Sumatera Utara..	217
Tabel 2. 126.	Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.....	217
Tabel 2. 127.	Capaian Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ...	218
Tabel 2. 128.	Capaian Indikator Penanaman Modal	219
Tabel 2. 129.	Capaian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga.....	220
Tabel 2. 130.	Perolehan Medali Provinsi Sumatera Utara pada PON XXI Sumut-Aceh 2024	220
Tabel 2. 131.	Data Statistik Sektorial Yang Terintegrasi.....	221
Tabel 2. 132.	Capaian Indikator Urusan Persandian.....	222
Tabel 2. 133.	Capaian Indikator Kebudayaan	224
Tabel 2. 134.	Jumlah Perpustakaan Terakreditasi di Provinsi Sumatera Utara.....	225
Tabel 2. 135.	Capaian Indikator Kearsipan	226
Tabel 2. 136.	Capaian Indikator Pariwisata.....	226
Tabel 2. 137.	Capaian Indikator Perkebunan Provinsi Sumatera Utara ...	227
Tabel 2. 138.	Capaian Indikator Kehutanan	228
Tabel 2. 139.	Kondisi Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Sumatera Utara.....	228
Tabel 2. 140.	Capaian Indikator Kelautan dan Perikanan	229
Tabel 2. 141.	Capaian Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	231
Tabel 2. 142.	Capaian Bidang Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.....	232
Tabel 2. 143.	Capaian Indikator Pengelolaan Keuangan Provinsi Sumatera Utara.....	233
Tabel 2. 144.	Capaian Indikator Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	234
Tabel 2. 145.	Indikator Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	235
Tabel 2. 146.	Capaian Indikator Kepegawaian Daerah	235
Tabel 2. 147.	Capaian Indikator Badan Penghubung	236
Tabel 2. 148.	Capaian Indikator Pengawasan.....	236
Tabel 2. 149.	Capaian Indikator Sekretariat Dewan	237
Tabel 2. 150.	Capaian Indikator Sekretariat Daerah	238
Tabel 2. 151.	Realisasi Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara	243
Tabel 2. 152.	Kinerja Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara (dalam miliar Rupiah).....	248
Tabel 2. 153.	Kinerja Pembiayaan Daerah Sumatera Utara (miliar rupiah)	253
Tabel 2. 154.	Neraca Keuangan Provinsi Sumatera Utara	256

Tabel 2. 155.	Hasil Perhitungan Rasio Keuangan Neraca Daerah Provinsi Sumatera Utara	257
Tabel 2. 156.	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sumatera Utara	260
Tabel 2. 157.	Defisit Riil Anggaran Sumatera Utara (miliar rupiah)	262
Tabel 2. 158.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran (dalam miliar rupiah dan persen).....	264
Tabel 2. 159.	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara	275
Tabel 2. 160.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (dalam miliar rupiah).....	276
Tabel 2. 161.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (dalam miliar rupiah).....	278
Tabel 2. 162.	Perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi	283
Tabel 2. 163.	Perbandingan Indeks Resiko Bencana Indonesia	285
Tabel 2. 164.	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Lain di Pulau Sumatera...	287
Tabel 2. 165.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Lain di Pulau Sumatera...	288
Tabel 2. 166.	Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB per kapita Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Lain di Pulau Sumatera...	290
Tabel 2. 167.	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Lain di Pulau Sumatera...	291
Tabel 2. 168.	Perbandingan Rasio Gini Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Lain di Pulau Sumatera	295
Tabel 2. 169.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Lain di Pulau Sumatera.....	300
Tabel 2. 170.	Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender	302
Tabel 2. 171.	Penetapan Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara	341
Tabel 3. 1.	Keterkaitan Visi RPJMD Sumatera Utara dengan RPJPD Sumatera Utara dan RPJMN	347
Tabel 3. 2.	Sasaran Utama Pembangunan RPJMD Sumatera Utara	348
Tabel 3. 3.	Keterkaitan Misi RPJMD Sumatera Utara dengan RPJPD Sumatera Utara dan RPJMN.....	350
Tabel 3. 4.	Struktur Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Sumatera Utara 2025-2029	364
Tabel 3. 5.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara	375
Tabel 3. 6.	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD	380
Tabel 3. 7.	Misi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029	395
Tabel 3. 8.	Arah Kebijakan Tahunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030	403
Tabel 3. 9.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Outcome, Indikator dan Program Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara.....	469
Tabel 3. 10.	Pencapaian Visi melalui Pencapaian Kinerja Indikator	492
Tabel 3. 11.	Arah Pengembangan Kawasan Pertumbuhan.....	512

Tabel 3. 12.	Arah Pengembangan Kawasan Komoditi Unggulan	514
Tabel 3. 13.	Arah Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi	515
Tabel 3. 14.	Arah Pengembangan Kawasan Afirmasi	516
Tabel 3. 15.	Arah Pengembangan Kawasan Konservasi/Rawan Bencana	517
Tabel 3. 16.	Keselarasan 17 Program Prioritas Nasional dengan 17 Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara	522
Tabel 3. 17.	Deskripsi / Rencana Lokus Pelaksanaan PHTC RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029	538
Tabel 3. 18.	Deskripsi / Rencana Lokus Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029	549
Tabel 3. 19.	Penyelarasan PHTC/PSD/KUPD Provinsi Sumatera Utara terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) RPJMN	647
Tabel 3. 20.	Industri Unggulan Provinsi Sumatera Utara	669
Tabel 3. 23.	Target PAD/Deviden BUMD kepada Pemerintah	674
Tabel 3. 26.	Target Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota Sumatera Utara Tahun 2025-2029	676
Tabel 4. 1.	Program Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030	693
Tabel 4. 2.	Penyelarasan Indikator Makro Sasaran Utama Pembangunan RPJMN dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029	720
Tabel 4. 3.	Penyelarasan Indikator Emas (IE) RPJMN dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029	721
Tabel 4. 4.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	736
Tabel 4. 5.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	738
Tabel 4. 6.	Indikator Kinerja Daerah, Program, dan Pagu Indikatif untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar	781
Tabel 5. 1.	Proses Pengendalian dan Evaluasi RPJMD	799
Tabel 5. 2.	Risiko dan Rencana Mitigasi	801

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainny..... 12

Gambar 2. 1. Peta Wilayah Administrasi 25

Gambar 2. 2. Kawasan Geopark Kaldera Toba 36

Gambar 2. 3. Destinasi Super Prioritas Danau Toba 37

Gambar 2. 4. Peta Destinasi Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Utara..... 39

Gambar 2. 5. Proporsi Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Provinsi Sumatera Utara 54

Gambar 2. 6. Proporsi Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih Provinsi Sumatera Utara..... 56

Gambar 2. 7. Proporsi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Provinsi Sumatera Utara..... 57

Gambar 2. 8. Proporsi Luas Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam Provinsi Sumatera Utara..... 58

Gambar 2. 9. Proyeksi Potensi Timbulan Sampah di Provinsi Sumatera Utara..... 59

Gambar 2. 10. Proyeksi Potensi Timbulan Tinja di Provinsi Sumatera Utara..... 60

Gambar 2. 11. Total akumulasi proyeksi potensi beban pencemar sungai di Provinsi Sumatera Utara 61

Gambar 2. 12. Proporsi Luas Kerentanan Perubahan Iklim Provinsi Sumatera Utara..... 75

Gambar 2. 13. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Hasil Sensus Penduduk (SP) Provinsi Sumatera Utara..... 88

Gambar 2. 14. Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 89

Gambar 2. 15. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara 96

Gambar 2. 16. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara..... 99

Gambar 2. 17. Angka Pengangguran, Menurut Jenis Kelamin, dan Wilayah di Provinsi Sumatera Utara 105

Gambar 2. 18. Angka Pengangguran Menurut Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara.....106

Gambar 2. 19. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara..111

Gambar 2. 20. UHH Provinsi Sumatera Utara 113

Gambar 2. 21. Persentase Penduduk Provinsi Sumatera Utara yang Menderita Sakit.....121

Gambar 2. 22. Persentase Penduduk Provinsi Sumatera Utara yang pernah Rawat Inap 122

Gambar 2. 23. Perkembangan Indeks Perlindungan Anak Sumatera Utara.....135

Gambar 2. 24. Indeks Pembangunan Keluarga Sumatera Utara.....138

Gambar 2. 25. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Sumatera Utara 139

Gambar 2. 26. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sumatera Utara 141

Gambar 2. 27. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sumatera Utara.....	143
Gambar 2. 28. Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara	147
Gambar 2. 29. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Utara.....	150
Gambar 2. 30. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Sumatera Utara.....	150
Gambar 2. 31. Jumlah UMKM di Provinsi Sumatera Utara	152
Gambar 2. 32. Jumlah Koperasi Aktif di Provinsi Sumatera Utara	152
Gambar 2. 33. Skor pilar Provinsi Sumatera Utara	161
Gambar 2. 34. Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	185
Gambar 2. 35. Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara	243
Gambar 2. 36. Distribusi Komponen Pendapatan Daerah (dalam persen).244	
Gambar 2. 37. Distribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (persen).....	246
Gambar 2. 38. Kinerja Belanja Daerah (dalam miliar rupiah)	249
Gambar 2. 39. Distribusi Komponen Belanja Daerah (dalam persen)	251
Gambar 2. 40. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara dengan Nasional	287
Gambar 2. 41. Perbandingan Tingkat Pengangguran Sumatera Utara dan Nasional	289
Gambar 2. 42. Perbandingan TPAK Provinsi Sumatera Utara	290
Gambar 2. 43. Rasio Gini Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.....	296
Gambar 2. 44. RLS Sumatera Utara dan Nasional	298
Gambar 2. 45. HLS Sumatera Utara dan Nasional	299
Gambar 2. 46. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Sumatera Utara dan Nasional	301
Gambar 2. 47. Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Sumatera Utara dan Nasional.....	303
Gambar 2. 48. Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Sumatera Utara dan Nasional.....	304
Gambar 2. 49. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Pulau Sumatera.....	309
Gambar 3. 1. Lokasi Arah Kebijakan Kewilayahan RPJMN di Provinsi Sumatera Utara.....	518
Gambar 3. 2. Tema/Program Nasional	519
Gambar 5. 1. Pengarusutamaan Pembangunan	787
Gambar 5. 2. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan	791
Gambar 5. 3. Kerangka Kerja MRPN	793
Gambar 5. 4. Tahapan Manajemen Risiko untuk Mencapai Target RPJMD	794

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung tercapainya visi jangka panjang Provinsi Sumatera Utara yaitu "Sumatera Utara Unggul, Maju, dan Berkelanjutan," maka RPJMD 2025-2029 merupakan tahap pertama dari empat tahapan implementasi RPJPD Sumatera Utara 2025-2045. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD ini memiliki peran yang sangat strategis dalam meletakkan fondasi bagi pembangunan sosial, ekonomi, tata kelola, dan lingkungan di wilayah Sumatera Utara. Tahap awal ini merupakan bagian integral dari proses transformasi jangka panjang yang telah dirancang dalam RPJPD 2025-2045, dengan tujuan untuk memastikan konsistensi kebijakan dan pencapaian target-target pembangunan yang terarah, sejalan dengan visi dan misi yang telah disusun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan

pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, mulai dari Rancangan Teknokratik (Rantek) RPJMD. Penyusunan RPJMD harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih.

Penyusunan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Provinsi Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Provinsi Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Provinsi Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi dan misi, program kepala daerah Bapak Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, SE, MM dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Bapak H. Surya, B.Sc yang telah dilantik oleh Presiden RI Bapak Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025 berdasarkan hasil Pemilukada Serentak pada tanggal 27 November 2024, yang diangkat dengan Keputusan Presiden Republik Nomor 24/P Tahun 2025. Penyusunan RPJMD disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun untuk menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih selama masa jabatan

atau periodisasi 2025–2030. Dokumen ini menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun pertama masa kepemimpinan kepala daerah yang baru. Hubungan antara RPJMD dan masa jabatan kepala daerah sangat erat, karena RPJMD tidak hanya disusun sebagai instrumen teknokratis, tetapi juga sebagai penjabaran politik pembangunan yang mengikat secara formal. Dalam konteks tersebut, RPJMD berperan sebagai panduan resmi yang mencerminkan komitmen kepala daerah untuk memenuhi janji politiknya kepada masyarakat, yang telah dituangkan dalam visi-misi saat pencalonan.

Meski masa bakti kepala daerah berlangsung selama lima tahun penuh (2025–2030), penyusunan RPJMD dilakukan pada awal masa jabatan dan berlaku untuk rentang waktu 2025–2029 sesuai dengan siklus perencanaan nasional. Hal ini untuk menjamin keselarasan dengan dokumen RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan memudahkan evaluasi akhir periode pembangunan nasional dan daerah secara simultan. Tahun terakhir masa jabatan kepala daerah (tahun 2030) nantinya akan dijabarkan dalam RKPD transisi yang disusun berdasarkan prinsip keberlanjutan dan capaian kinerja RPJMD. Dengan demikian, RPJMD menjadi dokumen utama yang menghubungkan antara arah kebijakan strategis kepala daerah selama satu periode jabatan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, serta menjadi instrumen pengendali dan pengukur kinerja pemerintahan daerah di masa bakti 2025–2030. Selain itu, RPJMD menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renstra OPD), penganggaran (APBD), serta pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipasi, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, adalah: pendekatan teknokratik; pendekatan partisipasi; pendekatan politis; pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; pendekatan holistik-tematik; pendekatan integratif; dan pendekatan spasial. Hal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 yaitu:

1. RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029.
2. RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029.

3. RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Provinsi Tahun 2025-2029.
4. Data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029.
5. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029.
6. Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.

Penyusunan dan pentahapan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang merupakan pemutahiran dan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga berkomitmen dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan mengintegrasikan prinsip dan tujuan SDGs ke dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sehingga diharapkan RPJMD menjadi penentu arah dalam mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat melalui akselerasi pembangunan daerah, untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

1.2. DASAR HUKUM

Adapun yang menjadi dasar hukum dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2025-2029 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap I Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2025-2029 dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang daerah. Selanjutnya RPJMD nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kemudian, pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 ini nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Dalam pelaksanaan tahunannya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

1) Hubungan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah, sehingga dalam penyusunannya memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 melalui penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Hubungan antara RPJMD dan RPJMN bersifat vertikal dan fungsional. RPJMN 2025–2029 menetapkan visi nasional “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang dijabarkan ke dalam delapan misi pembangunan atau Asta Cita. RPJMD Sumatera Utara 2025–2029 mengadopsi dan mengadaptasi misi nasional tersebut melalui visi daerah “Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan

Berkelanjutan.” Visi tersebut bukan hanya simbolik, tetapi dikristalisasi menjadi lima misi strategis daerah yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi daerah berbasis potensi unggulan, tata kelola pemerintahan yang efisien dan bersih, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, serta pelestarian budaya dan ketahanan sosial masyarakat. Sinkronisasi dengan RPJMN juga tampak dalam integrasi program-program nasional seperti pengembangan Kawasan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara ke dalam program prioritas daerah. Ini menunjukkan bahwa RPJMD menjadi wadah implementasi RPJMN di tingkat provinsi, melalui penerjemahan yang disesuaikan dengan konteks lokal dan aspirasi masyarakat daerah.

2) Hubungan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD

RPJMD memiliki keterkaitan hierarkis dan temporal dengan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2045. RPJPD merupakan dokumen rencana induk pembangunan daerah selama 20 tahun yang memuat visi pembangunan jangka panjang daerah. RPJMD menjadi mekanisme realisasi bertahap dari RPJPD melalui tahapan lima tahunan. Dengan demikian, RPJMD 2025–2029 tidak hanya bersifat responsif terhadap tantangan aktual, tetapi juga proaktif dalam membangun fondasi transformasi jangka panjang yang konsisten dengan arah RPJPD. Hal ini mencakup peningkatan produktivitas ekonomi berbasis hilirisasi komoditas unggulan, reformasi kelembagaan daerah, serta transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik.

Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap I Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang daerah.

Selanjutnya RPJMD nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kemudian, pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 ini nantinya akan dijabarkan ke dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Dalam pelaksanaan tahunannya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

3) Hubungan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan RTRW Provinsi Sumatera Utara

Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara juga berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara 2017-2037 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037, melalui penyelarasan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang maupun jangka menengah Daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. Hubungan antara RPJMD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bersifat spasial dan fungsional sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. RTRW berfungsi sebagai kerangka acuan spasial yang mengatur arah pengembangan wilayah, struktur ruang, dan pola ruang daerah. Dalam konteks perencanaan pembangunan, RTRW memberikan batasan dan peluang pemanfaatan ruang untuk kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, RPJMD harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan RTRW. Dalam RPJMD Sumut 2025–2029, pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan (*spatial-based development*) menjadi instrumen penting dalam mengarahkan investasi dan intervensi pembangunan secara efisien dan tepat sasaran. Pembangunan berbagai kawasan strategis sebagai zona prioritas intervensi pembangunan sesuai dengan zonasi ruang. Ini tidak hanya menciptakan keterpaduan pembangunan antarwilayah, tetapi juga mempercepat pemerataan hasil pembangunan, mengurangi ketimpangan, serta mendorong daya saing wilayah secara kolektif.

4) Hubungan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Sumatera Utara

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar

pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan. Keterpaduan antara RPJMD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi aspek kritis dalam memastikan dimensi keberlanjutan. KLHS tidak hanya berperan sebagai prasyarat administratif dalam penyusunan RPJMD, melainkan sebagai alat bantu pengambilan keputusan strategis yang memastikan bahwa setiap rencana, program, dan kegiatan telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam konteks RPJMD Sumatera Utara 2025–2029, KLHS menjadi jembatan antara kebijakan pembangunan dengan prinsip kehati-hatian lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang. Kajian KLHS juga mengintegrasikan indikator-indikator RPJMD dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta mengidentifikasi risiko ekologis yang harus dimitigasi seperti deforestasi, degradasi DAS, hingga ancaman perubahan iklim. Ini memperkuat posisi RPJMD sebagai dokumen pembangunan yang tidak hanya berpihak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kelestarian ekosistem dan keadilan lingkungan antar generasi.

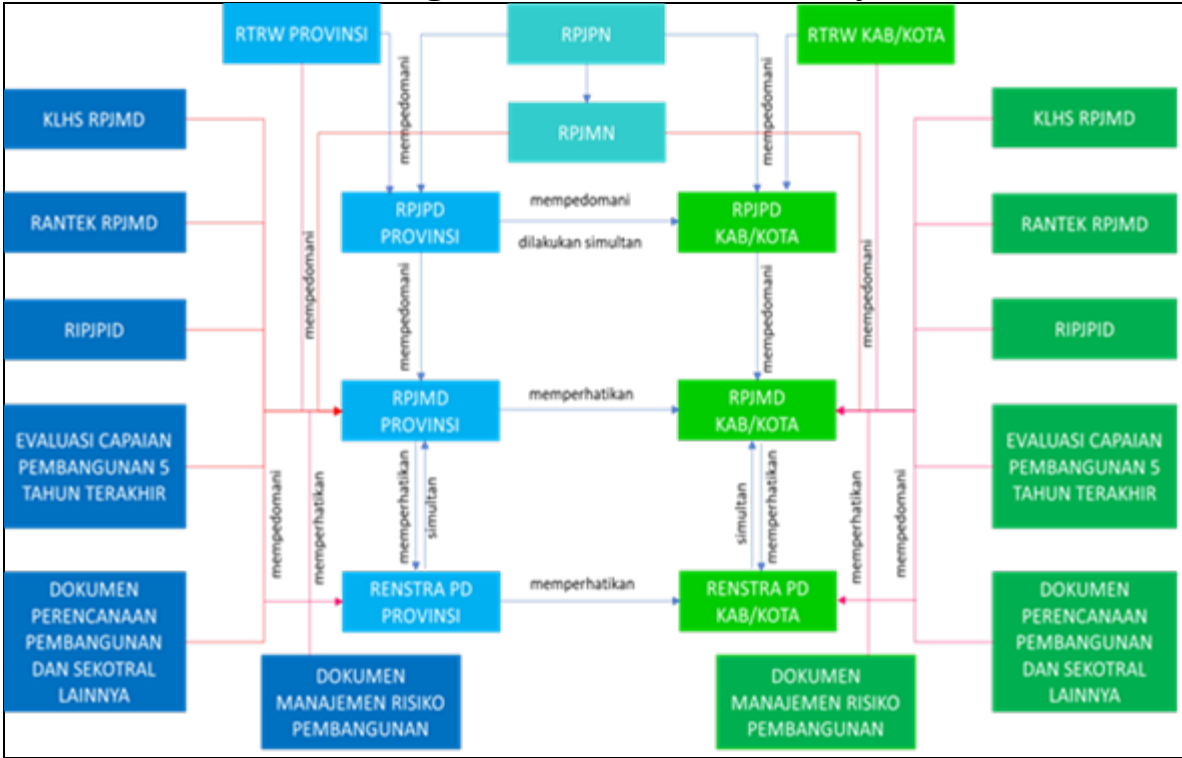
5) Hubungan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID) Provinsi Sumatera Utara

RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 mengacu pada RIPJPID sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan yang berhubungan dengan inovasi dan teknologi daerah sebagaimana diatur dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Dokumen RIPJPID memberikan pedoman strategis untuk pengembangan sistem informasi dan transformasi digital di Provinsi Sumatera Utara. Dengan menjadikan RIPJPID sebagai acuan, RPJMD Sumatera Utara 2025-2029 dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan peta jalan pemajuan teknologi, mendukung kemajuan daerah secara berkelanjutan dan meningkat daya saing Sumatera Utara dalam menghadapi kemajuan teknologi secara jangka menengah maupun panjang.

Diagram berikut menggambarkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang saling terintegrasi dan mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)

berfungsi sebagai payung jangka panjang selama 20 tahun yang mengarahkan visi dan arah pembangunan daerah. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) bertindak sebagai bingkai nasional yang mengatur prioritas pembangunan nasional yang harus diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) berfungsi sebagai peta spasial yang menggambarkan alokasi ruang dan penggunaan lahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung pembangunan yang terencana dan terarah. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) menjadi jaminan bahwa perencanaan pembangunan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan dampak ekologis dari berbagai kebijakan. Selain itu, dokumen lainnya seperti RIPJPID (Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah) memberikan arahan dalam pengembangan inovasi dan teknologi, serta dokumen evaluasi capaian pembangunan untuk memastikan implementasi perencanaan yang efektif. Semua dokumen ini saling melengkapi dan mendukung pembangunan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Gambar 1. 1. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Dengan integrasi lintas dokumen yang kuat ini, RPJMD Sumatera Utara Tahun 2025–2029 tidak hanya menjadi instrumen perencanaan daerah, melainkan berperan sebagai pusat orkestrasi pembangunan yang menjamin konektivitas antara perencanaan sektoral, spasial, dan kelembagaan. Ia juga menjadi mekanisme untuk menjembatani antara arah kebijakan pusat dan

kebutuhan serta kekhasan daerah, dengan tetap menjaga keberlanjutan, keadilan sosial, serta efektivitas tata ruang dan tata kelola. Pada akhirnya, RPJMD menjadi peta jalan transformasi daerah yang relevan, partisipatif, dan akuntabel, serta menjadi kontribusi strategis Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dari wilayah barat Nusantara.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RPJMD

Maksud penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, dunia usaha, dan *stakeholder* lainnya) dalam mewujudkan visi misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih, dalam rangka tercapainya cita-cita masyarakat Sumatera Utara Unggul, Maju Dan Berkelanjutan.

Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, adalah :

1. **Menjabarkan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara.** RPJMD disusun untuk menerjemahkan visi, misi, dan program Gubernur Sumatera Utara dalam dokumen perencanaan yang sistematis, terukur, dan terarah, guna menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama 2025-2029.
2. **Mengintegrasikan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah.** RPJMD Provinsi Sumatera Utara menjadi jembatan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta memperhatikan arah kebijakan strategis nasional, termasuk misi pembangunan nasional (ASTA CITA), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), dan visi Indonesia Emas 2045;
3. **Menjadi Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah.** Dokumen RPJMD berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, sehingga seluruh proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah bersifat konsisten dan terukur;
4. **Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD** dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan

5. **Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi dan kolaborasi** baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
6. **Mengakomodasi Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Daerah.** RPJMD menyajikan analisis situasi, isu strategis, dan proyeksi tantangan yang akan dihadapi Provinsi Sumatera Utara dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, lingkungan, tata ruang, dan kelembagaan.
7. **Menetapkan Target Pembangunan Jangka Menengah.** RPJMD menetapkan indikator makro dan target kinerja pembangunan daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, peningkatan daya saing, dan pengurangan emisi karbon, yang menjadi dasar evaluasi pencapaian kinerja pembangunan pemerintah daerah.
8. **Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan dan Inklusif.** Melalui integrasi dengan KLHS, RPJMD menjamin bahwa pembangunan Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan, ketahanan wilayah terhadap bencana, serta pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh dan adil.

RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 dan Pedoman dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025–2029 sebagai perwujudan dari visi-misi Kepala Daerah yang akan diimplementasikan melalui Program dan Kegiatan dengan tolok ukur indikator yang menjadi acuan dalam penentuan arah keberhasilan pembangunan

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 sesuai Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 disusun sebagai bagian pembuka yang memberikan landasan konseptual, hukum, dan strategis terhadap keseluruhan isi dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan. Secara substansi, struktur dan isi Bab I telah dirancang sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yang menekankan pentingnya RPJMD sebagai dokumen jangka menengah yang

terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Bab I diawali dengan penjelasan latar belakang, yang menjabarkan urgensi penyusunan RPJMD dalam rangka menerjemahkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih untuk masa bakti 2025–2030. RPJMD ini menjadi dokumen utama dalam merumuskan arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, dan sekaligus menjadi tahapan awal dari implementasi RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2025–2045. Dokumen ini tidak hanya sebagai perwujudan teknokrasi pembangunan, tetapi juga instrumen politik yang sah dalam menjalankan mandat konstitusional kepala daerah.

Selanjutnya, disampaikan landasan hukum yang memperkuat dasar penyusunan RPJMD, mulai dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, hingga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai pedoman terbaru penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.

Bab ini juga memuat keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, baik vertikal maupun horizontal. RPJMD berfungsi menjembatani antara arah jangka panjang yang ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2025–2045 dan arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029. Selain itu, RPJMD juga terintegrasi dengan dokumen sektoral dan tematik lainnya seperti RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), dan RIPJPID (Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Inovasi Daerah) yang memperkuat dimensi spasial, lingkungan, dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya dijelaskan maksud dan tujuan penyusunan RPJMD, yaitu untuk menjadi pedoman utama dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah selama masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Dokumen ini bertujuan mewujudkan pembangunan yang inklusif,

terukur, dan berbasis hasil, serta memastikan konsistensi antara perencanaan dan implementasi kebijakan publik.

Sebagai bagian akhir, Bab I menyajikan sistematika penulisan dokumen, yang terdiri dari lima bab utama dan lampiran-lampiran yang mendukung pelaksanaan RPJMD secara teknis. Sistematika ini memberikan gambaran menyeluruh tentang isi dokumen, mulai dari pendahuluan, kondisi daerah, arah kebijakan, rencana program perangkat daerah, hingga strategi pelaksanaan dan pengendalian.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab II RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai landasan analitis yang menyajikan potret menyeluruh mengenai kondisi objektif dan strategis daerah. Bab ini membahas secara mendalam berbagai dimensi pembangunan melalui empat aspek utama, yaitu geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan umum, yang secara kolektif memberikan kerangka pemahaman utuh terhadap tantangan dan peluang pembangunan daerah.

Analisis dimulai dari aspek geografi dan demografi, dengan menggambarkan karakteristik topografi, iklim, kependudukan, dan penyebaran wilayah, sebagai faktor fundamental yang membentuk dinamika pembangunan wilayah. Selanjutnya, aspek kesejahteraan masyarakat dievaluasi melalui data dan tren capaian pembangunan selama periode 2020–2024, termasuk pencapaian indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, ketimpangan sosial, indeks pembangunan manusia (IPM), dan kondisi ketenagakerjaan. Aspek ini juga menyoroti kondisi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta akses terhadap layanan dasar sebagai indikator kualitas hidup masyarakat.

Aspek daya saing daerah dianalisis dari perspektif kualitas sumber daya manusia, kapasitas inovasi dan digitalisasi, penguatan ekonomi hijau dan biru, serta integrasi dengan rantai nilai domestik dan global. Fokus khusus diberikan pada kemampuan daerah dalam melakukan transformasi ekonomi melalui hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan UMKM, dan peningkatan konektivitas infrastruktur sebagai pendorong efisiensi dan produktivitas wilayah. Dari sisi pelayanan umum, pembahasan mencakup evaluasi kualitas dan jangkauan layanan publik yang diberikan oleh

pemerintah provinsi, serta tantangan dalam mewujudkan tata kelola yang efektif, transparan, dan inklusif.

Salah satu bagian krusial dari Bab II adalah gambaran kondisi keuangan daerah, yang memuat analisis realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama lima tahun terakhir serta menyajikan proyeksi fiskal dan kapasitas keuangan daerah untuk periode 2026–2029. Hal ini menjadi instrumen penting dalam menjamin konsistensi antara perencanaan dan pembiayaan pembangunan daerah secara jangka menengah.

Selain menyajikan data dan tren historis, Bab II juga mengidentifikasi permasalahan pokok dan isu strategis utama yang bersumber dari dinamika lingkungan global (seperti perubahan iklim dan geostrategi ekonomi), nasional (arah kebijakan pemerintah pusat), maupun regional (perubahan struktur ekonomi dan sosial di kawasan Sumatera dan sekitarnya). Melalui pendekatan analitis dan proyeksi strategis, bab ini merumuskan sejumlah tantangan krusial dan potensi unggulan yang akan menjadi basis penyusunan kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab III RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 merupakan bagian fundamental dari dokumen perencanaan daerah yang memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan lima tahunan, berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Bab ini menyajikan kerangka berpikir strategis yang menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah secara terarah, terpadu, dan terukur.

Bab ini diawali dengan pemaparan visi pembangunan daerah, yang merupakan rumusan ideal tentang kondisi masa depan Provinsi Sumatera Utara yang ingin dicapai pada akhir periode RPJMD. Visi ini disusun berdasarkan aspirasi masyarakat, kondisi faktual daerah, serta mengacu pada visi jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD Sumatera Utara 2025–2045 dan sinkron dengan visi nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029 dan Asta Cita Presiden. Visi tersebut menjadi landasan dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang progresif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, dijabarkan misi pembangunan daerah sebagai bentuk penjabaran visi ke dalam langkah-langkah strategis yang bersifat lebih operasional. Setiap misi dirancang untuk menjawab isu-isu strategis yang telah diidentifikasi pada bab sebelumnya, sekaligus menjadi kerangka arah kebijakan dalam pembangunan lintas sektor. Misi ini menjadi pijakan untuk menyusun tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta menentukan prioritas program pembangunan.

Dari misi tersebut kemudian diturunkan tujuan pembangunan daerah, yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara umum dalam lima tahun ke depan. Tujuan ini bersifat strategis dan menjadi orientasi utama dalam pelaksanaan pembangunan. Turunan dari tujuan tersebut adalah sasaran pembangunan daerah, yang dirumuskan lebih spesifik dan terukur, serta disusun dengan pendekatan SMART (*Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*), sehingga memudahkan proses monitoring dan evaluasi pembangunan.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan, bab ini juga menetapkan indikator kinerja utama daerah, yang meliputi indikator makro seperti peningkatan PDRB per kapita, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan IMM, peningkatan daya saing daerah, serta penurunan emisi gas rumah kaca. Setiap indikator dilengkapi dengan target kuantitatif lima tahunan yang sejalan dengan target RPJMN dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana tahunan dan pengukuran kinerja pemerintah daerah.

Bab III menyajikan peta keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran, yang dituangkan dalam bentuk matriks atau diagram. Peta ini berfungsi untuk memperjelas hubungan logis antar komponen perencanaan strategis dan sebagai dasar dalam menyusun program prioritas serta arah kebijakan sektor-sektor pembangunan. Dengan struktur sistematis dan keterhubungan logis yang kuat, Bab III menjadi acuan utama dalam membangun sinergi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan RPJMD menuju pencapaian visi “Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan”.

Bab ini juga menekankan pentingnya penyelarasan program dengan prioritas pembangunan daerah, termasuk integrasi dengan 17 Program Prioritas Daerah dan 6 Program Quick Wins (PHTC) yang dirancang untuk memberikan dampak nyata dan langsung kepada masyarakat. Selain itu, terdapat pula sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) dan prioritas yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029, agar pembangunan daerah sejalan dengan agenda nasional.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IV RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 merupakan bagian penting yang menjembatani arah strategis pembangunan daerah dengan implementasi operasional melalui program perangkat daerah. Bab ini memuat rencana program pembangunan yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah, serta menjelaskan bagaimana program-program tersebut disusun untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya.

Pembahasan Bab IV diawali dengan penyajian program-program, indikator yang melekat dan pagu indikatif pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang harus dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang relevan dengan karakteristik serta kebutuhan masyarakat daerah.

Setiap program dikembangkan untuk mendukung pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan dirancang secara spesifik oleh organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Untuk memastikan akuntabilitas dan pengukuran kinerja, bab ini menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKU merupakan indikator terpilih yang bersifat makro, yang merefleksikan ultimate outcome kinerja Kepala Daerah. IKD sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan secara menyeluruh, yang memuat indikator tujuan dan sasaran

RPJMD serta IKU per urusan, yang mencakup capaian PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, indeks Modal manusia (IMM), indeks daya saing daerah (IDSD), indeks risiko bencana, serta indikator makro lainnya yang dijadikan sebagai acuan evaluatif dan dasar pelaporan kinerja daerah secara nasional. Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai refleksi pencapaian outcome pembangunan disajikan dalam setiap urusan pemerintahan. Target capaian dirinci secara tahunan untuk memudahkan pelacakan kinerja secara periodik.

Untuk memperjelas hubungan antara sasaran pembangunan, program, indikator, dan perangkat pelaksana, bab ini menyajikan peta program perangkat daerah dalam bentuk matriks atau tabel yang menunjukkan keterkaitan logis antar elemen perencanaan. Peta ini menjadi acuan penting dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Bab IV juga menguraikan Indikator Kinerja Daerah, Program, dan Pagu Indikatif untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar, sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan demikian, Bab IV menjadi pedoman operasional yang mengintegrasikan arah kebijakan strategis dengan pelaksanaan program pembangunan daerah secara terukur, terpadu, dan berorientasi pada hasil.

BAB V PENUTUP

Bab V RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai bagian penutup yang merangkum secara sistematis seluruh kerangka pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Bab ini tidak hanya menyimpulkan arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam bab-bab sebelumnya, tetapi juga menetapkan prinsip-prinsip penting untuk memastikan implementasi yang konsisten, terarah, dan berkelanjutan. Beberapa fokus utama dalam bab ini adalah pengarusutamaan pembangunan yang diintegrasikan ke dalam setiap kebijakan dan program, penegasan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sebagai syarat mutlak agar seluruh program yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat dijalankan secara efektif.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan yang realistis dan terukur, Bab V juga membahas skema pendanaan pembangunan daerah dari

optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non-pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Tujuannya adalah untuk memperkuat keberlanjutan fiskal dalam menghadapi dinamika kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks dan multidimensional.

Lebih lanjut, bab ini menguraikan kerangka pengendalian dan sistem evaluasi, yang dirancang untuk mengukur efektivitas pelaksanaan RPJMD melalui pendekatan berbasis indikator kinerja dan penguatan sistem akuntabilitas. Bab ini juga menekankan pentingnya mekanisme perubahan RPJMD, yang diperlukan untuk menjamin fleksibilitas kebijakan dalam menghadapi perubahan situasi yang bersifat mendesak, seperti perubahan regulasi nasional, bencana alam, krisis ekonomi, atau dinamika politik. Penyesuaian dokumen RPJMD tetap dilakukan secara terstruktur dan legal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar tetap menjamin kepastian arah pembangunan.

Selain itu, komunikasi publik menjadi elemen penting dalam Bab V sebagai bagian dari strategi implementasi. RPJMD harus dikomunikasikan secara luas kepada masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, agar tercipta dukungan kolektif dan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan program pembangunan. Bab V juga menjelaskan mengenai usaha peningkatan kapasitas pembiayaan pembangunan yang dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan di sektor publik dan non-publik.

Bab ini ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi strategis, yang menegaskan kembali komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjadikan RPJMD sebagai pedoman utama pembangunan daerah selama periode 2025–2029.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan pembangunan yang merupakan suatu upaya strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian, dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Terletak di bagian utara Pulau Sumatera, provinsi ini memiliki berbagai potensi alam dan sumber daya manusia yang besar. Oleh karena itu, pembangunan di Sumatera Utara mencakup berbagai sektor yang saling terintegrasi.

Pembangunan Sumatera Utara yang telah dilaksanakan melalui proses yang dinamis dan membutuhkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, serta keberlanjutan lingkungan, Sumatera Utara dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk menjadi provinsi yang lebih maju dan sejahtera. Melalui upaya-upaya ini, Optimisme Sumatera Utara dalam menghadapi tantangan dan permasalahan pembangunan yang akan dihadapi kedepan dapat dilaksanakan dengan Perencanaan yang lebih baik dengan memperhatikan segala aspek untuk dapat tercapai, dan Sumatera Utara dapat menjadi salah satu daerah yang unggul di Indonesia.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan karakteristik suatu wilayah, seperti lokasi, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, berketahanan energi, air dan kemandirian pangan, lingkungan hidup berkualitas, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim serta demografi. Secara keseluruhan, aspek geografi dan demografi membantu kita memahami dinamika hubungan antara alam dan manusia, serta bagaimana keduanya saling memengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan.

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur. Berdasarkan karakteristik wilayahnya terdiri dari daerah

pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur dari Utara ke Selatan. Provinsi Sumatera Utara berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dengan posisi strategis itu, Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi keuntungan geografis menjadi penghubung jalur perdagangan internasional, yang dampaknya akan menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah lain di pulau Sumatera. Berdasarkan Badan Informasi Geospasial Tahun 2021 dan Revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Tahun 2022, total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara kurang lebih sebesar 11.131.141,3 Ha (111.311,41 km²) yang terdiri dari luas daratan 7.246.258,89 Ha (65,10%) dan luas lautan sebesar 3.884.882,38 Ha (34,90%).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, secara administratif Provinsi Sumatera Utara terbagi menjadi 33 kabupaten/kota, terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota, 455 Kecamatan, 5.417 Desa dan 693 Kelurahan. Jika dilihat dari luas wilayah daerah menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, luas wilayah daerah terbesar adalah Kabupaten Mandailing Natal dengan wilayah daratan terluas yaitu: 654.656,70 Ha (6.546,57 km²) atau 8,90% dari total wilayah daratan Sumatera Utara diikuti Kabupaten Langkat dengan wilayah daratan terluas kedua yaitu: 614.207,20 Ha (6.142,07 km²) atau 8,47% dari total wilayah daratan Sumatera Utara, sedangkan wilayah daratan terkecil adalah Kota Sibolga dengan luas 1.264,50 Ha (12,65 km²) atau sekitar 0,02% dari total luas daratan Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara terbagi menjadi 4 zona wilayah berdasarkan karakteristik geografis kewilayahan, yakni:

1. Wilayah Pantai Timur
2. Wilayah Pantai Barat
3. Wilayah Dataran Tinggi
4. Wilayah Kepulauan Nias

Pembagian wilayah berdasarkan karakteristik geografisnya bertujuan untuk memudahkan dalam hal menentukan tema pembangunan pada tiap wilayah yang dikelompokkan. Selanjutnya rincian luas wilayah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1. Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara					
Kabupaten/Kota	Ibukota	Kec	Desa	Kel	Luas Wilayah (Km2)
Nias	Gido	10	170	0	903
Mandailing Natal	Panyabungan	23	377	27	6.547
Tapanuli Selatan	Sipirok	15	211	37	4.201
Tapanuli Tengah	Pandan	20	159	56	2.308
Tapanuli Utara	Tarutung	15	241	11	3.896
Toba	Balige	16	231	13	2.292
Labuhan Batu	Rantau Prapat	9	75	23	2.772
Asahan	Kisaran	25	177	27	3.738
Simalungun	Pamatang Raya	32	386	27	4.601
Dairi	Sidikalang	15	161	8	2.084
Karo	Kabanjahe	17	259	10	2.207
Deli Serdang	Lubuk Pakam	22	380	14	2.581
Langkat	Stabat	23	240	37	6.142
Nias Selatan	Teluk Dalam	35	459	2	2.532
Humbang Hasundutan	Dolok sanggul	10	153	1	2.352
Pakpak Bharat	Salak	8	52	0	1.366
Samosir	Pangururan	9	128	6	1.850
Serdang Bedagai	Sei Rampah	17	237	6	1.950
Batu Bara	Limapuluh	12	141	10	889
Padang Lawas Utara	Gunung Tua	12	386	2	3.914
Padang Lawas	Sibuhuan	17	303	1	3.914
Labuhan Batu Selatan	Kota Pinang	5	52	2	3.080
Labuhan Batu Utara	Aek Kanopan	8	82	8	3.687
Nias Utara	Lotu	11	112	1	1.240
Nias Barat	Lahomi	8	105	0	465
Kota Sibolga	Sibolga	4	0	17	13
Kota Tanjung Balai	Tanjung Balai	6	0	31	60
Kota Pematangsiantar	Pematangsiantar	8	0	53	76
Kota Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	5	0	35	39
Kota Medan	Medan	21	0	151	279
Kota Binjai	Binjai	5	0	37	94
Kota Padangsidimpuan	Padangsidimpuan	6	42	37	159
Kota Gunungsitoli	Gunungsitoli	6	98	3	209
Sumatera Utara		455	5417	693	72.438

Sumber : Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025

Setiap kabupaten dan kota di Sumatera Utara memiliki karakteristik geografis dan potensi sumber daya alam yang berbeda, yang berkontribusi

dengan Samudera Hindia. Berbatasan dengan wilayah laut, Selat Malaka di Timur dan Samudera Hindia di bagian Barat menjadikan Sumatera Utara memiliki dua pantai sekaligus di kedua sisi kiri dan kanan wilayahnya, yang sering disebut Pantai Barat dan Pantai Timur. Provinsi Sumatera Utara termasuk 10 provinsi terluas di Indonesia, dengan daratan sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu serta beberapa pulau kecil di perairan bagian Barat maupun di bagian Timur Pulau Sumatera.

Sumatera Utara juga menjadi gerbang maritim yang menjadikannya sebagai pintu masuk bagi kapal-kapal internasional ke Indonesia dari arah barat dan berperan penting dalam rantai logistik global. Provinsi Sumatera Utara yang bertetangga dan cukup dekat dengan negara-negara di Selat Malaka seperti Singapura, Malaysia dan Thailand menjadi titik penting dalam hubungan diplomatik dan ekonomi regional. Pantai barat Sumatera Utara yang menghadap langsung ke Samudera Hindia membuat Sumatera Utara memiliki akses langsung ke Samudera Hindia, hal ini memberi peluang untuk pengembangan pelabuhan dan industri maritim di masa depan.

Wilayah Sumatera Utara sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh bentang alam yang terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur ditengah-tengah dari Utara ke selatan. Kemiringan tanah antara 0 – 12 persen seluas 47.810 km², antara 12 – 40 persen seluas 6.305 km² dan diatas 40 persen seluas 17.719 km², sedangkan luas wilayah danau toba 1.129,20 Ha atau 1,57 persen. Ketinggian lahan di Provinsi Sumatera Utara bervariasi mulai dari 0 – 2.200 mdpl. Terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu bagian timur dengan keadaan relatif datar, bagian tengah bergelombang sampai berbukit dan bagian barat merupakan dataran bergelombang.

Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 24.921,99 km² atau 34,77 persen dari luas wilayah Sumatera Utara adalah daerah yang subur, kelembapan tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Banjir juga sering melanda wilayah tersebut akibat berkurangnya pelestarian hutan, erosi dan pandangkalan air disebabkan kondisi hutan yang kritis. Wilayah dataran tinggi dan wilayah pantai barat seluas 46.758,69 km² atau 65,23 persen dari luas wilayah sumatera utara, sebagian besar merupakan pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi dan kontur serta daerah yang struktur tanahnya labil. Beberapa danau, sungai, air terjun dan gunung berapi dijumpai di Sumatera Utara serta

sebagian wilayahnya tercatat sebagai daerah gempa tektonik dan vulkanik. topografi Sumatera Utara menciptakan kondisi alam yang sangat mendukung keberagaman aktivitas manusia, dari pertanian, industri, hingga pariwisata, dengan beberapa tantangan alam yang harus dihadapi seperti bencana alam dan infrastruktur yang perlu terus ditingkatkan.

Wilayah Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh sejarah geologi yang sangat panjang dan kompleks, karena wilayah ini berada di zona pertemuan antara beberapa lempeng tektonik utama dunia, seperti Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Hal ini membuat provinsi ini memiliki beragam formasi geologi yang unik, termasuk gunung berapi, lapisan batuan, dan struktur tektonik yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti potensi sumber daya alam, bencana alam, serta kondisi tanah untuk pertanian. Formasi batuan di Provinsi Sumatera Utara terdiri atas:

- Batuan beku hasil pendinginan magma dengan daya dukung batuan tinggi; Batuan beku hasil erupsi gunung api dengan daya dukung cukup tinggi;
- Batuan malihant atau metamorf, dengan daya dukung kuat tidak berlapis;
- Batuan sedimen dari non clastic, dengan daya dukung kecil atau sedang; dan
- Batuan sedimen dengan porositas kecil.

Kondisi batuan hasil aktivitas tektonik tektonik yang terus-menerus terjadi, yang menghasilkan berbagai formasi geologi seperti gunung berapi, batuan vulkanik, sedimen, dan metamorf. Potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan mineral lainnya, menjadikan Sumatera Utara sebagai wilayah yang sangat penting dari segi geologi. Namun, wilayah ini juga menghadapi tantangan besar, seperti ancaman bencana alam yang disebabkan oleh aktivitas tektonik, yang harus dikelola dengan hati-hati untuk mengurangi dampak buruk bagi masyarakat.

Hidrologi Sumatera Utara mempelajari pola pergerakan air, distribusi curah hujan, sistem sungai, dan kondisi sumber daya air di provinsi ini. Wilayah Sumatera Utara memiliki banyak sungai besar, danau, serta sumber air yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat, pertanian, dan industri. Di sisi lain, hidrologi di daerah ini juga dipengaruhi oleh faktor geografi, topografi, dan perubahan iklim yang bisa memengaruhi ketersediaan dan kualitas air.

Hidrologi Provinsi Sumatera Utara terbagi atas 360 DAS meliputi dari 67 DAS yang masuk dalam pengelolaan BPDAS Wampu Sei Ular, dan 293 DAS yang masuk BPDAS Asahan Barumon. Daerah Aliran Sungai di Sumatera Utara dikelompokkan menjadi dua kelompok prioritas penanganan berdasarkan kondisi daya dukungnya, yaitu: DAS Prioritas (DAS yang dipulihkan daya dukungnya) sebesar 11,67 persen dan DAS Prioritas II (DAS yang dipertahankan daya dukungnya) sebesar 88,33 persen. DAS yang perlu penanganan adalah DAS yang dipulihkan daya dukungnya. Di Provinsi Sumatera Utara, ada 7 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara untuk penanganannya yakni:

- 1. Daerah Aliran Sungai (DAS) Asahan Toba
- 2. Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru
- 3. Daerah Aliran Sungai (DAS) Nias
- 4. Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Gadis
- 5. Daerah Aliran Sungai (DAS) Wampu
- 6. Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli, dan
- 7. Daerah Aliran Sungai (DAS) Padang

Pengelompokan Wilayah Sungai (WS) di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 11 (sebelas) WS, yakni:

Tabel 2. 2. Wilayah Sungai di Provinsi Sumatera Utara

No	Wilayah Sungai	Jumlah DAS	Debit Andalan M3/DTK	Keterangan
1	Alas – Singkil	8	21.36	Lintas Provinsi
2	Batang Natal – Batang Batahan	40	18.55	Lintas Provinsi
3	Rokan	15		Lintas Provinsi
4	Belawan – Ular – Padang	11	29.23	Strategis Nasional
5	Toba – Asahan	1	1.48	Strategis Nasional
6	Batang Angkola – Batang Gadis	5	5.93	Lintas Kab/Kota
7	Wampu – Besitang	13	1.32	Lintas Kab/Kota
8	Bah Bolon	5	8.76	Lintas Kab/Kota
9	Barumon – Kualuh	3	83.70	Lintas Kab/Kota
10	Nias	43	0.54	Lintas Kab/Kota
11	Sibundong – Batang Toru	16	19.66	Lintas Kab/Kota
12	Lain-lain	200		

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (WS)

Beberapa sungai utama di Provinsi Sumatera Utara memiliki debit air yang cukup besar seperti Sungai Wampu, Sungai Ular, Sungai Barumon, Sungai Silau, Sungai Asahan, Sungai Bah Bolon, Sungai Belawan, Sungai Padang, Sungai Mola dan Sungai Batang Gadis yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air baku irigasi, air bersih dan air minum selain itu juga sebagai sumber pembangkit tenaga listrik (PLTA), sehingga perlu dilakukan upaya konservasi air dengan menjaga tutupan hutan dan pengendalian kegiatan budidaya di Daerah Aliran Sungai. Di samping sungai Provinsi Sumatera Utara juga memiliki danau dengan debit air cukup besar yang berpotensi bagi pengembangan sistem pengairan, penyediaan air baku dan sumber energi baru terbarukan. Selain itu terdapat potensi air tanah berupa Cekungan Air Tanah (CAT) di Provinsi Sumatera Utara yang tersebar yakni:

Tabel 2. 3. Cekungan Air Tanah (CAT) di Provinsi Sumatera Utara

No.	Nama CAT	Luas (ha)	Lokasi
1	Langsa	85.300	Kab. Langkat dan Aceh
2	Medan	1.978.600	Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematangsiantar, Kab. Langkat, Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Karo, Kab. Asahan, Kab. Batubara, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, dan Kab. Labuhanbatu Utara.
3	Kutacane	35.100	Kab. Karo dan Aceh
4	Sibulus Salam	363.200	Kab. Tapanuli Tengah dan Aceh
5	Sidikalang	243.800	Kab. Dairi , Kab. Tapanuli Utara, Kab. Samosir, dan kab. Humbang Hasundutan, Kab. Pakpak Bharat
6	Samosir	64.800	Kab. Samosir
7	Porsea-Prapat	48.300	Kab. Toba Samosir, Simalungun
8	Tarutung	87.500	Kab. Tapanuli Utara, Humbang hasundutan dan Toba Samosir
9	Onolimbu/Gunung Sitoli	4.200	Kota Gunungsitoli, Kab. Nias, dan Kab. Nias Selatan
10	Lahewa	2.000	Kab. Nias Utara
11	Sirombu	1.700	Kab. Nias Utara dan Kab. Nias Barat
12	Kuala Batangtoru	79.500	Kab. Tapanuli Tengah dan Kab. Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan
13	Teluk Durian/ Pekanbaru	2.179.900	Kab. Labuhanbatu, kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Padang Lawas, dan Kab. Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan dan Provinsi Riau
14	Banjarampa	21.100	Kab. Mandailing Natal dan Kab. Tapanuli Selatan
15	Panyabungan	24.200	Kab. Mandailing Natal, Tapanuli Selatan
16	Pasaribuhuan	22.500	Kab. Padang Lawas Tapanuli Selatan
17	Padangsidimpuan	24.000	Kota Padangsidimpuan dan Kab. Tapanuli Selatan
18	Natal-Ujunggading	282.500	Kab. Mandailing Natal dan Provinsi Sumatera Barat
19	Lubuk Sikaping	21.700	Kab. Mandailing Natal dan Provinsi Sumatera Barat
	Total	5.569.900	

Sumber: Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037

Di Provinsi Sumatera Utara terdapat sumber daya air permukaan berupa rawa, data rawa sebagai air permukaan dan sebagai tutupan lahan diberikan oleh tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 4. Sumber Daya Air Permukaan

NO	TUTUPAN LAHAN (RAWA)	LUAS (Ha)
1	Belukar Rawa	31.617
2	Hutan Rawa Sekunder	31.617
3	Rawa	4.548
TOTAL		55.093

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, 2024

Dari luasan tutupan lahan berupa rawa tersebut, mampu mengairi Daerah Irigasi seluas 78.871 Ha dengan jumlah 51 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri dari: 6 DI kewenangan Pemerintah, 14 DI kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 31 DI kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. (Sumber: SK Menteri PUPR Nomor: 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi).

Provinsi Sumatera Utara termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin Pasat dan angin Muson. Dikutip dari Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2020 berdasarkan Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat berdasarkan pengamatan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I Suhu/Temperature minimum sebesar 22,2-23,2,8 derajat celcius sementara suhu maksimum: 34,8-33,2 derajat celcius atau rata-rata sebesar 27,4-26,7, kelembaban/humidity minimum sebesar 43-53 persen dan kelembaban maksimum 98 persen atau rata-rata sebesar 86.9 persen. Kecepatan angin maksimum berkisar 13-23 meter per detik, sementara rata-rata tekanan udara berkisar antara 1005,0-1007,1 mb, jumlah curah hujan 208-319 milimeter dengan jumlah hari hujan 12-24 hari dan penyinaran matahari sebesar 2,70-4,51 persen. Temperatur cenderung panas dan lembap, dengan variasi suhu yang lebih sejuk di daerah dataran tinggi. Keberadaan pegunungan, danau vulkanik seperti Danau Toba, serta pantai yang berbatasan dengan Samudra Hindia memberikan pengaruh besar terhadap iklim mikro di berbagai wilayah provinsi ini. Pemahaman terhadap aspek klimatologi ini sangat penting untuk perencanaan tata ruang, pertanian, pengelolaan sumber daya alam, serta mitigasi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

Penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh kegiatan perkebunan seluas 2.946.512 Ha atau sekitar 41 persen dan hutan seluas 2.381.013 Ha atau sekitar 33 persen. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian terbesar berada di wilayah Pantai Timur, yaitu meliputi areal seluas 57 persen dari luas areal pertanian Sumatera Utara. Sebagian besar lahan hutan berada di wilayah Pantai Barat, yaitu seluas 69 persen dari luas hutan di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pertanian mendominasi wilayah Pantai Timur, sedangkan wilayah Pantai Barat didominasi oleh kegiatan pertanian dan hutan. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan non pertanian, seperti: industri, transportasi dan pertambangan tidak terlalu besar mengubah pemanfaatan ruang yang ada. Sementara itu luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara (Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara) adalah seluas 3.055.795 Ha atau $\pm 42,87\%$ dari luas total daratan wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kawasan Hutan tersebut dengan fungsi Hutan Konservasi seluas ± 427.008 Ha; Hutan Lindung seluas $\pm 1.206.881$ Ha; Hutan Produksi Terbatas seluas ± 641.769 Ha, Hutan Produksi Tetap seluas ± 704.452 Ha dan Hutan Produksi Konversi seluas ± 75.684 Ha.

Berdasarkan data Rekapitulasi Luas Penutupan Lahan Hutan dan Non Hutan Menurut Provinsi Tahun 2014–2022 (BPS, 2024), perbandingan luas tutupan lahan Hutan dan Non-Hutan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 adalah sebesar 27% berbanding 73%. Kondisi tersebut diperoleh dengan peningkatan luas tutupan lahan Hutan sebesar 1,3% yang pada tahun 2014 seluas 25,7%. Berdasarkan data spasial tutupan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016–2022 dengan *updating* dan penyesuaian kenampakan Citra Satelit Spot 6 tahun 2022 (LAPAN) diperoleh penggunaan lahan yang paling dominan pada tahun 2016 didominasi oleh penggunaan ladang (lahan kering) sebesar 30,73%, kemudian penggunaan lahan hutan berupa hutan rimba sebesar 21,55% dan penggunaan lahan perkebunan sebesar 19,48%.

Sedangkan pada tahun 2022 penggunaan lahan kering (ladang) berkurang sebesar 12,07% sehingga menjadi 18,66%. Sedangkan untuk penggunaan lahan hutan rimba bertambah sebesar 1,13% sehingga menjadi 24,33% dan penggunaan lahan perkebunan bertambah sebesar 8,38% sehingga menjadi 27,86%. Berdasarkan gambaran tersebut, perubahan penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Utara dari yang sebelumnya berupa

ladang kini dimanfaatkan menjadi perkebunan, kehutanan, dan dan juga ladang. Penggunaan lahan untuk permukiman masih kurang dari 2% dari luas Provinsi Sumatera Utara. Rincian penggunaan lahan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 5. Perubahan Penggunaan Lahan Utama Provinsi Sumatera Utara

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas Penggunaan Tanah (Ha)			
		2016	%	2022	%
1	Badan Air	152.891,22	2,11	151.106,76	2,09
2	Bandara	1.016,02	0,01	2.522,68	0,03
3	Belukar	596.770,46	8,24	391.961,40	5,41
4	Belukar Rawa	50.696,34	0,70	31.766,03	0,44
5	Hutan Rawa	62.730,77	0,87	18.854,84	0,26
6	Hutan Rimba	1.561.252,24	21,55	1.643.460,09	22,68
7	Hutan Tanaman	145.218,17	2,00	167.633,92	2,31
8	Kebun Campuran	328.163,23	4,53	938.600,09	12,95
9	Ladang	2.226.753,61	30,73	1.351.978,00	18,66
10	Lahan Terbuka	256.980,08	3,55	33.867,62	0,47
11	Mangrove	38.815,11	0,54	37.851,77	0,52
12	Perkebunan	1.411.775,95	19,48	2.018.867,41	27,86
13	Permukiman	81.181,33	1,12	118.542,83	1,64
14	Pertambangan	10,04	0,00	419,67	0,01
15	Rawa	8.102,99	0,11	4.512,96	0,06
16	Sawah	294.311,61	4,06	311.095,25	4,29
17	Tambak	29.538,10	0,41	23.165,94	0,32
Total		7.246.207,27	100	7.246.207,27	100

Sumber: Analisis GIS dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dianugerahi dengan kondisi alam seperti gambaran aspek geografis di atas, menjadikan potensi sumber daya alam Provinsi Sumatera Utara cukup berlimpah, di antaranya komoditas hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, bahan tambang dan mineral, pariwisata, serta industri.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi Sumber Daya Alam Sumatera Utara sangat besar dan beragam, mencakup sektor-sektor ekonomi utama yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan daerah.

1) Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Potensi sumber daya alam Provinsi Sumatera Utara cukup berlimpah, di antaranya komoditas hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura,

perkebunan, peternakan, perikanan, bahan tambang dan mineral, pariwisata, serta industri. Komoditas unggulan pertanian tanaman pangan antara lain padi, jagung, dan ubi kayu. Tanaman hortikultura komoditas unggulannya berupa cabai, bawang merah, bawang putih, jeruk, pisang. Komoditas unggulan perkebunan antara lain sawit, karet, kopi, kakao, tembakau dan kelapa. Potensi untuk pengembangan sapi, kerbau, ternak kambing dan domba, unggas seperti ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur, dan itik juga cukup besar. Potensi sumber daya ikan (SDI) yang meliputi perikanan tangkap dan budidaya perikanan, baik di perairan laut maupun perairan darat dan perairan umum seperti sungai, danau, tambak juga cukup besar. Pesisir Pantai Barat jenis ikan unggulannya berupa tuna, tongkol, cakalang, kerapu, kakap, kembung, tenggiri, teri dan ikan hias. Budidaya kelautan antara lain berupa teripang, rumput laut serta potensi terumbu karang. Pesisir Pantai Timur SDI-nya mencapai 276.030 ton/tahun dengan jenis ikan unggulan seperti di Pesisir Pantai Barat ditambah dengan ikan baronang, japuh, biji nangka, senangin, teri dan pari.

Potensi sumber daya alam pertanian khususnya tanaman pangan ini membuat indeks ketahanan pangan (IKP) Provinsi Sumatera Utara 75,97 (pada tahun 2023). Angka tersebut meningkat dari tahun 2022 sebesar 71,22. Peningkatan tersebut membuat Provinsi Sumatera Utara pindah dari ketahanan pangan dengan kategori agak tahan ke dalam kelompok provinsi yang memiliki ketahanan pangan paling baik atau sangat tahan (lebih besar dari 74,40). Namun perlu diwaspadai kabupaten yang masuk kategori agak rentan ketahanan pangannya yaitu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan IKP sebesar 56,18 (pada tahun 2023). Kategori sangat tahan dalam ketahanan pangan ini perlu dipertahankan, untuk itu perlu dijaga agar jangan sampai ketahanan pangan ini menurun seperti yang dialami oleh Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Padanglawas Utara. Pada tahun 2022 IKP kedua kabupaten ini sudah mencapai 87,15 dan 71,74 namun menurun pada tahun 2023 menjadi 86,81 dan 70,40.

Meskipun IKP Provinsi Sumatera Utara sudah kategori sangat tahan, namun prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) di provinsi ini masih di atas angka nasional. PoU Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 sebesar 8,60% sementara nasional 8,35%. Hal ini menggambarkan masih ada 8,60% penduduk Sumatera Utara yang mengkonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk memenuhi energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat. Pencapaian

terbaik Sumatera Utara terkait PoU ini adalah pada tahun 2019 yaitu sebesar 4,84%.

Defisit air pada beberapa wilayah dapat menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan. Secara umum ketersediaan air di Sumatera Utara melebihi kebutuhan (surplus) namun ketersebarannya tidak selalu bersesuaian dengan ketersebaran kebutuhan, hal inilah yang menyebabkan defisit air pada beberapa wilayah, dan status defisit ini akan mempengaruhi ketahanan pangan. Dari aspek ketersediaan pangan, Sumatera Utara juga masih surplus, hal ini turut ditopang oleh keanekaragaman hayati yang tinggi di Sumatera Utara. Kondisi kekurangan pangan di beberapa wilayah di Sumatera Utara dapat dipengaruhi oleh jasa lingkungan penyediaan pangan yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah yang terdapat pada wilayah barat Sumatera Utara. Kerentanan wilayah yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim juga dapat mempengaruhi produksi pangan.

2) Pertambangan

Potensi yang cukup besar juga terdapat di sektor pertambangan. Potensi ini berupa tambang panas bumi, tambang minyak bumi, tambang batu bara, tambang mineral dan bahan galian air tanah. Potensi panas bumi sebagai energi alternatif tersebar di beberapa tempat antara lain di Gunung Sibayak Kecamatan Tigapanah di Kabupaten Karo; Kecamatan Pahae Jahe Kabupaten Tapanuli Utara; Kecamatan Sipirok di Kabupaten Tapanuli Selatan. Indikasi kandungan minyak di Pangkalan Susu Kabupaten Langkat di Gunungsitoli/Kabupaten Nias. Bahan tambang batubara tersebar di Kabupaten Mandailing Natal, Kota Padangsidempuan, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Langkat, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Nias, dan Kota Gunungsitoli.

Potensi radioaktif di Provinsi Sumatera Utara terdapat di Desa Aekhabil Kecamatan Sibolga Kota Sibolga, yakni berupa Radium (Ra). Bahan tambang mineral logam seperti Antimoni, Arsen, Barit, Bauksit, Belerang, Besi, Bismuth, Kromium, Emas, Perak, Tembaga, Florit, Mangan, Merkuri, Molibdenum, Niobium, Platina, Tellurium, Seng, Timbal, dan Wolfram tersebar di beberapa kabupaten/kota, begitu juga bahan tambang batuan/bukan logam seperti bentonit, batu gamping/batu kapur, zeolit, dolomit, marmer, travertin, diatomea, trass, andesit, granit, felspar, kaolin, batu mulia, batu apung, perlit, kalsit, kuarsa, fosfat, pasir kuarsa, kuarsit, grafit, mika, oker, talk, serpentinit, lempung, pasir dan batu (sirtu), dan pasir laut tersebar di beberapa kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Potensi

geografi dan sumber daya alam di mengindikasikan bahwa Sumatera Utara memiliki potensi energi terbarukan seperti panas bumi dan potensi *hydro*.

Selain itu juga terdapat potensi dari biomassa baik dari limbah pabrik kelapa sawit maupun limbah pabrik tapioka, selain itu terdapat juga potensi dari limbah ternak mengingat Provinsi Sumatera Utara merupakan penghasil ternak potong di Pulau Sumatera. Semua potensi yang ada tersebut menghasilkan energi listrik bagi memenuhi kebutuhan energi di Provinsi Sumatera Utara.

3) Pariwisata

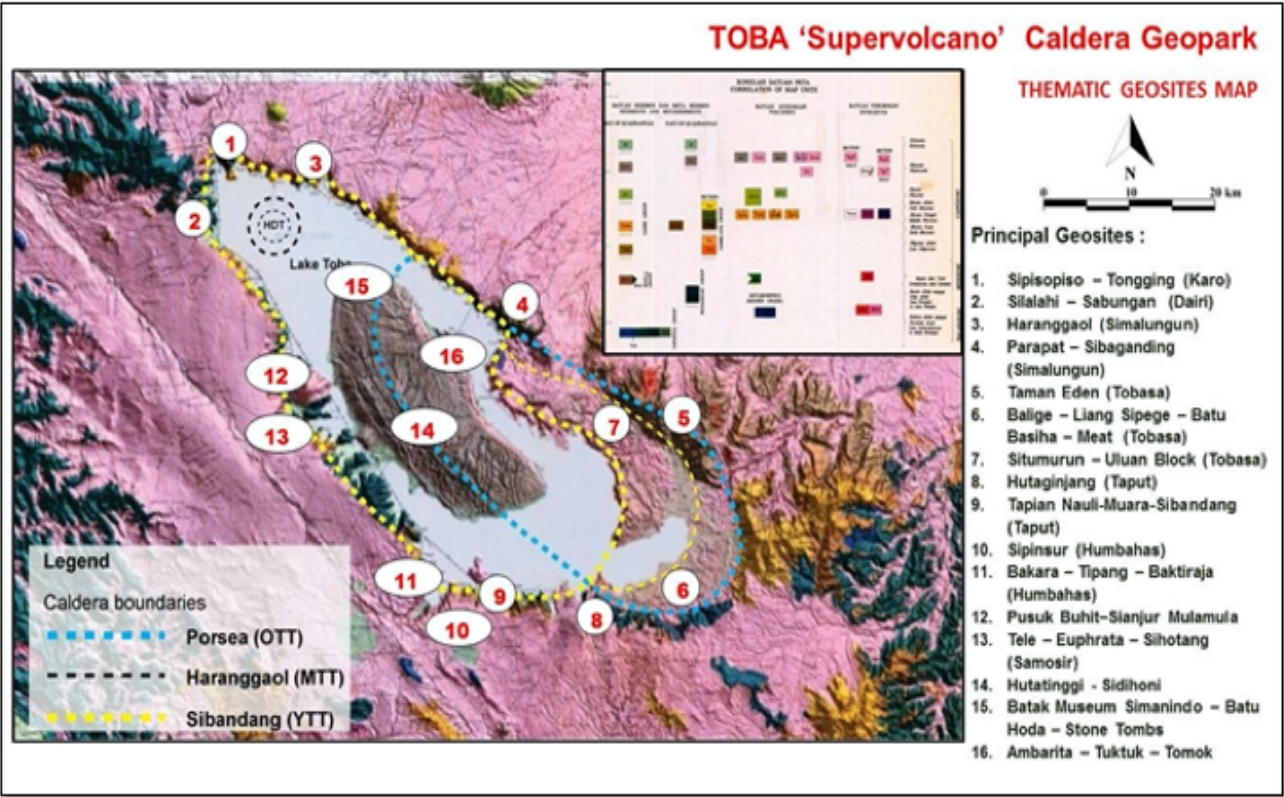
Potensi sumberdaya lainnya di Sumatera Utara adalah berbagai tempat pariwisata yang menarik untuk dikunjungi para wisatawan. Sumatera Utara, dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Terletak di ujung barat Indonesia, provinsi ini menawarkan berbagai destinasi wisata yang memikat, dari pesona alam hingga warisan budaya yang kental. Dengan keberagaman tersebut, Sumatera Utara memiliki potensi untuk berkembang menjadi tujuan pariwisata utama di Indonesia. Pemerintah setempat dan sektor swasta semakin gencar melakukan pengembangan infrastruktur dan promosi untuk menarik lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun internasional. Seiring dengan upaya tersebut, Sumatera Utara siap menjadi destinasi wisata yang menarik, yang tak hanya memanjakan mata tetapi juga memperkaya pengalaman budaya dan alam bagi setiap pengunjung.

Jenis wisata di Sumatera Utara antara lain wisata alam, wisata kebudayaan, dan wisata minat khusus. Objek wisata alam menjadi andalan dalam menarik wisatawan, di antaranya, yaitu:

1. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba dan Geopark Kaldera Toba. Kawasan Geopark Kaldera Toba adalah contoh pengembangan kawasan peruntukan pariwisata yang menggabungkan unsur wisata dengan pendidikan, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat. Situs geologi yang terdapat di kawasan Geopark Kaldera Toba terdiri dari 16 Geosites (enam belas), situs geologi utama yang dapat menceritakan tema Geopark Kaldera Toba sebagai Supervolcano. Keindahan alam sekitar danau, dengan hamparan air biru yang luas dan pegunungan hijau yang mengelilinginya, menjadikannya sebagai tempat yang ideal untuk wisata alam dan relaksasi. Pulau Samosir, yang terletak di tengah Danau Toba, juga kaya akan kebudayaan Batak

yang khas, menawarkan berbagai tradisi, rumah adat, dan upacara lokal yang mempesona wisatawan.

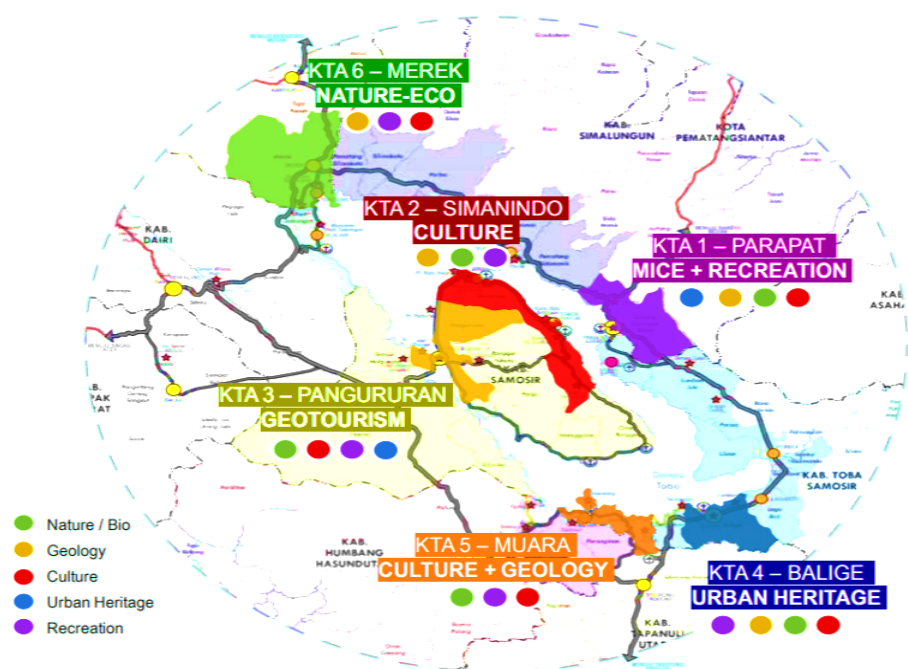
Gambar 2. 2. Kawasan Geopark Kaldera Toba



Sumber: <https://calderatobageopark.org/geosite/>

2. Pemandian air panas Pangururan, Pusuk Buhit, Danau Sidihoni, Tomok, Tuktuk, Aek Sipitudai, Kebun Raya Simanindo, Taman Bumi di Kecamatan Sianjur Mula-mula di Kabupaten Samosir;
3. Sumatera Utara juga memiliki berbagai destinasi alam lainnya, seperti Bukit Lawang, yang terkenal dengan konservasi orangutan Sumatera. Wisatawan dapat trekking melalui hutan tropis yang lebat, menjelajahi alam liar, dan melihat langsung orangutan di habitat asli mereka.
4. Provinsi Sumatera Utara juga kaya akan tradisi dan kuliner yang menggoda. Kota Medan, sebagai ibu kota provinsi, adalah pusat kuliner dengan berbagai makanan khas, seperti nasi goreng Medan, durian, dan soto Medan. Kota ini juga memiliki bangunan bersejarah seperti Istana Maimun dan Masjid Raya, yang memperlihatkan kemegahan arsitektur Melayu.
5. Berastagi, air terjun Sipiso-piso, pemandian air panas Rajaberne, Taman Hutan Rakyat Bukit Barisan, Kawasan Wisata Alam di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, dan lainnya.

Gambar 2. 3. Destinasi Super Prioritas Danau Toba



Sumber: Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Danau Toba, 2020

Posisi beberapa destinasi KSPN Danau Toba yang digambarkan sebagai Destinasi Super Prioritas Danau Toba dengan *key tourism area* (KTA) tiap destinasi di atas dapat dilihat pada gambar di atas. Sumatera Utara juga memiliki potensi yang cukup besar di sektor ekowisata. Beberapa kawasan ekowisata yang berada di Sumatera Utara antara lain:

1. Kawasan Ekowisata Tangkahan dan Bukit Lawang. Tangkahan terletak di antara dua desa yaitu Namo Sialang dan Sei Serdang yang juga berada di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang terletak di Kabupaten Langkat. Selain panorama alam yang dapat dinikmati, di kawasan ekowisata Tangkahan juga terdapat tempat rehabilitasi satwa langka Orangutan Sumatera serta konservasi Gajah. Selain itu terdapat Desa wisata Bukit Lawang, terletak di Kecamatan Bahorok, yang menawarkan berbagai fasilitas bagi pengunjung. Ini termasuk *jungle trekking* di Taman Nasional Gunung Leuser, arung jeram di Sungai Bahorok yang airnya sangat bersih. Selain itu, terdapat *tour* ke gua dan jalur untuk lari dan bersepeda di desa tersebut. Bukit Lawang merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan kawasan konservasi orangutan.
2. Kawasan Ekowisata Karo. Kabupaten Karo yang juga termasuk daerah penyangga Destinasi Super Prioritas Danau Toba, menyimpan banyak potensi wisata. Banyak tujuan wisata dapat dikunjungi di wilayah ini,

yaitu wisata Agro Berastagi, Tongging, Gundaling Peak, Danau Lau Kavar, Mata Air Panas alami Lau Sidebuk, dan banyak lainnya.

3. Beberapa objek wisata budaya juga menarik untuk dikunjungi di antaranya:

- Istana kerajaan dan rumah kediaman Istana Maimun, Masjid Raya, Masjid Osmani, Kawasan Kesawan, Kediaman Tjong A Fie, Rumah Dinas Walikota dan Gedung Pusat AVROS/BKS PPS, situs bersejarah Kota Cina di Kota Medan;
- Cagar Budaya Stasiun Kereta Api Binjai;
- Kawasan situs bersejarah religi Islam di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Kawasan situs bersejarah Kota Rintang di Kabupaten Deli Serdang;
- Kawasan situs bersejarah Bawomataluo di Desa Bawomataluo, Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, dan lainnya.

3. Selain itu juga ada wisata minat khusus antara lain:

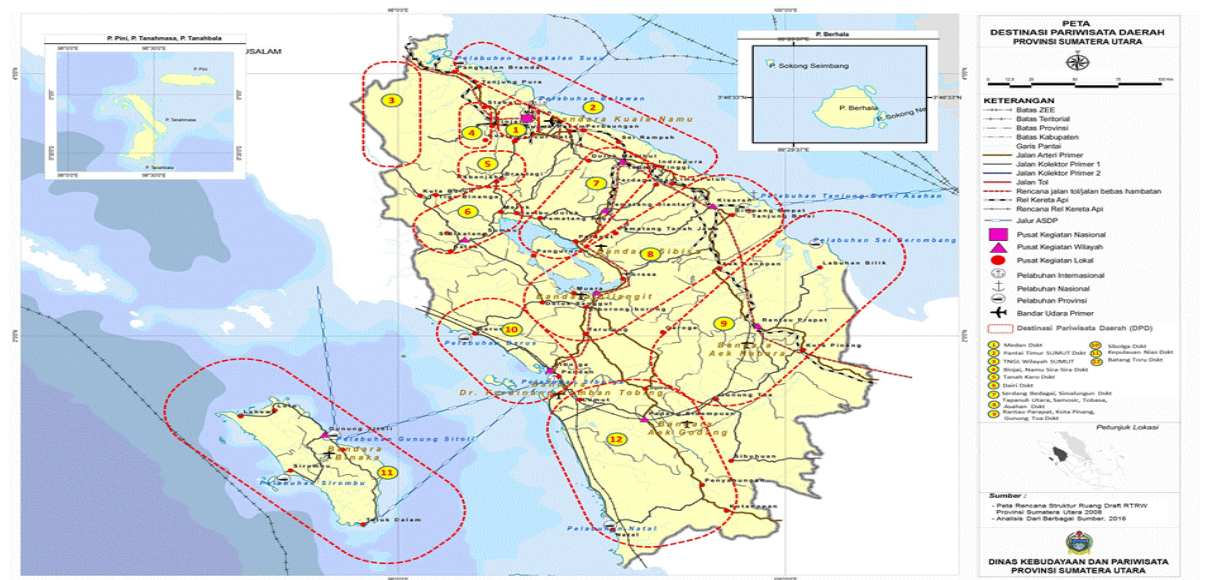
- Museum dan Kebun Binatang di Kota Medan dan Kota Pematangsiantar;
- Arung Jeram di Sei Asahan - Toba dan Sei Bingei, Sei Wampu di Langkat;
- Olahraga Air di Sorake, Lagundri, Sigolong Golong, Teluk Dalam, Wisata menyelam di Perairan Pulau-pulau Batu di Nias Selatan, dan lainnya;
- Petualangan (*Adventure*), Desa wisata Seribu Gua Banuarea terletak di lereng Gunung Pinapan, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Desa ini dikenal dengan keindahan alamnya yang asri dan alami, serta memiliki banyak gua dan air terjun yang menakjubkan. Dengan hampir ribuan gua yang memiliki keindahan tersendiri, Banuarea berpotensi menjadi destinasi wisata.

Secara umum destinasi pariwisata provinsi (DPP) di Provinsi Sumatera Utara terdapat di seluruh kabupaten/kota meliputi:

- DPP Medan dan sekitarnya;
- DPP Pantai Timur Sumatera Utara;
- DPP Kawasan TNGL Wilayah Sumatera Utara;
- DPP Binjai, Langkat, Namusira-sira dan sekitarnya;
- DPP Tanah Karo dan sekitarnya;
- DPP Dairi dan sekitarnya;

- DPP Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun dan sekitarnya;
- DPP Tapanuli Utara, Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, Asahan dan sekitarnya;
- DPP Labuhan Batu Utara, Rantauprapat, Kota Pinang, Gunung Tua, dan sekitarnya;
- DPP Tapanuli Tengah dan sekitarnya;
- DPP Kepulauan Nias;
- DPP Tapanuli Bagian Selatan dan sekitarnya.

Gambar 2. 4. Peta Destinasi Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Utara



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, 2025

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan hidup

Jasa lingkungan hidup, atau juga biasa disebut dengan jasa ekosistem/jasa lingkungan, merupakan fungsi lingkungan yang dimanfaatkan oleh manusia, baik yang berbentuk nyata dan langsung (tangible) maupun tidak langsung (intangibile). Jasa lingkungan dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menilai kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH). DDDTLH sendiri merupakan kapasitas jasa ekosistem dalam mendukung perikehidupan makhluk hidup di suatu wilayah ekoregion. Ketika nilai DDDTLH pada suatu ekoregion semakin tinggi, maka semakin baik pula kualitas ekoregion tersebut dalam menyediakan jasa ekosistemnya (Riqqi, et al., 2018). Berdasarkan Millennium Ecosystem Assessment (2005), terdapat empat jasa ekosistem, antara lain layanan penyediaan (provisioning), pengaturan (regulating), budaya (cultural), dan pendukung (supporting).

a. Daya Dukung Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Daya dukung pangan merupakan kemampuan lingkungan untuk menyediakan bahan pangan bagi penduduk di suatu wilayah. Kondisi daya dukung pangan dibedakan menjadi sudah terlampaui dan belum terlampaui, yang ditentukan berdasarkan selisih antara kebutuhan dan ketersediaan pangan yang dikonversikan kedalam bentuk energi dengan satuan kalori. Ketersediaan pangan di Sumatera Utara dihitung berdasarkan produksi komoditas pangan sebagai berikut:

- Komoditas perkebunan, antara lain: lada, pala, tebu, pinang, aren, kemiri, kulit manis, cengkeh, kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao dan andaliman.
- Komoditas peternakan, antara lain: sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi.
- Komoditas unggas, antara lain: ayam, itik, burung puyuh, baik daging maupun telur.
- Komoditas tanaman pangan, antara lain: beras, ubi, kacang-kacangan dan jagung.
- Komoditas perikanan, antara lain: patin, lele, nila, ikan mas, kakap, bandeng, udang, cakalang, tongkol, tuna, dan lainnya.
- Komoditas hortikultura, antara lain: buah-buahan, tanaman biofarmaka, serta tanaman sayuran.

Produksi pangan yang dihasilkan dari wilayah perkotaan di Sumatera Utara umumnya sangat sedikit, tidak mencapai 1% dari total produksi pangan Sumatera Utara secara keseluruhan, hal ini sesuai dengan tipologinya yang merupakan pusat jasa dan perdagangan. Selain wilayah perkotaan terdapat beberapa wilayah kabupaten yang menghasilkan bahan pangan dibawah 1% dari total produksi bahan pangan keseluruhan, yaitu Kabupaten Nias Barat, Nias Utara, Samosir, Nias Selatan, dan Pakpak Bharat. Kota Sibolga menghasilkan bahan pangan paling sedikit untuk sektor perkebunan, pertanian, dan hortikultura, sedangkan bahan pangan dari sektor peternakan dan perikanan masing-masing paling sedikit dihasilkan oleh Kabupaten Samosir dan Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan data tahun 2021 dan 2022, hampir setengah dari bahan pangan dari hortikultura dan perikanan dihasilkan oleh Kabupaten Simalungun. Produksi hortikultura Kabupaten Simalungun didominasi oleh hasil tanaman sayuran dan biofarmaka, seperti jahe, kunyit, serai, bawang,

dan lain-lain, sedangkan produksi perikanan Kabupaten Simalungun didominasi oleh ikan mas dan nila. Bahan pangan yang bersumber dari pertanian dan peternakan paling banyak dihasilkan oleh Kabupaten Deli Serdang dengan komoditas pertanian utama berupa padi dan komoditas peternakan utama berupa sapi dan ayam. Bahan pangan yang bersumber dari perkebunan paling banyak dihasilkan oleh Kabupaten Asahan, dengan komoditas utama berupa kelapa sawit dan kelapa.

Hasil perhitungan ketersediaan pangan digunakan untuk melakukan pemodelan distribusi ketersediaan pangan, sedangkan pemodelan kebutuhan pangan (dalam satuan energi) dilakukan dengan menggunakan Angka Kecukupan Energi (AKE) per orang (2.100 kkal/hari). Kebutuhan energi bahan pangan dipengaruhi oleh variabel jumlah penduduk, sehingga model kebutuhan energi bahan pangan ini cenderung memiliki pola yang sama dengan pola distribusi populasi. Kebutuhan pangan terbesar terkonsentrasi pada wilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, yaitu Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

Setelah diketahui ketersediaan dan kebutuhan energi pangan, dihitung selisih keduanya untuk mengindikasikan wilayah yang daya dukung pangannya belum terlampaui atau sudah terlampaui. Secara umum, hampir seluruh wilayah Sumatera Utara memiliki daya dukung yang belum terlampaui dalam hal penyediaan pangan, sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah. Kota Sibolga memiliki persentase luas wilayah dengan daya dukung pangan terlampaui paling tinggi, disusul oleh Kota Tebing Tinggi dan Kota Medan.

Tabel 2. 6. Kondisi Daya Dukung Pangan Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	Ketersediaan (10 ³ Juta Kkal)	Kebutuhan (10 ³ Juta Kkal)	Status Daya Dukung Pangan			
				Belum Terlampaui		Terlampaui	
				Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
1	Nias	186	114	82.263	99,99	10	0,01
2	Mandailing Natal	1.500	372	641.142	100,00	29	0,00
3	Tapanuli Selatan	1.137	236	430.650	100,00	20	0,00
4	Tapanuli Tengah	601	287	228.712	99,98	40	0,02
5	Tapanuli Utara	1.558	244	389.655	99,99	28	0,01
6	Toba	858	163	229.098	99,99	15	0,01
7	Labuhanbatu	1.213	389	270.927	99,98	43	0,02
8	Asahan	3.628	604	373.537	99,99	35	0,01
9	Simalungun	13.006	783	459.203	99,99	47	0,01
10	Dairi	2.005	242	208.136	99,99	27	0,01
11	Karo	6.037	318	219.670	99,99	31	0,01
12	Deli Serdang	2.525	1.498	256.817	99,87	333	0,13
13	Langkat	2.393	797	613.251	99,99	63	0,01
14	Nias Selatan	325	286	245.518	99,99	21	0,01

No	Kabupaten/Kota	Ketersediaan (10 ³ Juta Kkal)	Kebutuhan (10 ³ Juta Kkal)	Status Daya Dukung Pangan			
				Belum Terlampaui		Terlampaui	
				Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
15	Humbang Hasundutan	1.095	155	234.287	100,00	12	0,00
16	Pakpak Bharat	487	42	136.903	100,00	2	0,00
17	Samosir	323	107	185.253	99,99	13	0,01
18	Serdang Bedagai	2.828	512	195.192	99,96	74	0,04
19	Batu Bara	755	319	88.300	99,95	49	0,05
20	Padang Lawas Utara	1.300	205	393.204	100,00	12	0,00
21	Padang Lawas	1.265	205	384.105	100,00	16	0,00
22	Labuhanbatu Selatan	1.323	246	306.517	99,99	22	0,01
23	Labuhanbatu Utara	2.481	300	367.346	99,99	21	0,01
24	Nias Utara	166	116	117.911	100,00	5	0,00
25	Nias Barat	58	70	45.116	99,99	6	0,01
26	Sibolga	2	69	671	93,51	47	6,49
27	Tanjungbalai	23	138	5.868	99,31	41	0,69
28	Pematangsiantar	59	210	7.632	99,02	75	0,98
29	Tebing Tinggi	30	136	3.771	97,93	80	2,07
30	Medan	55	1.912	27.568	98,03	554	1,97
31	Binjai	88	230	9.041	99,73	24	0,27
32	Padangsidempuan	231	177	15.720	99,56	69	0,44
33	Gunungsitoli	67	105	27.573	99,96	12	0,04
SUMATERA UTARA		49.608	11.586	7.200.558	99,97	1.875	0,03

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Jika jumlah produksi tersebut dikonversi menjadi energi berdasarkan wilayah administrasi, maka produksi energi untuk kebutuhan pangan pada masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Utara adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 7. Proyeksi Ketersediaan Pangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	Ketersediaan Pangan (10 ³ Juta Kkal)					
		2022	2025	2026	2027	2028	2029
1	Nias	186	178	175	173	171	168
2	Mandailing Natal	1.500	1.498	1.499	1.499	1.500	1.502
3	Tapanuli Selatan	1.137	1.092	1.078	1.065	1.052	1.040
4	Tapanuli Tengah	601	592	589	586	584	581
5	Tapanuli Utara	1.558	1.460	1.430	1.400	1.371	1.343
6	Toba	858	825	814	804	794	785
7	Labuhanbatu	1.213	1.260	1.276	1.292	1.309	1.326
8	Asahan	3.628	3.753	3.798	3.843	3.890	3.937
9	Simalungun	13.006	12.063	11.770	11.487	11.215	10.952
10	Dairi	2.005	1.839	1.787	1.737	1.688	1.641
11	Karo	6.037	5.517	5.355	5.198	5.046	4.899
12	Deli Serdang	2.525	2.493	2.484	2.475	2.467	2.459
13	Langkat	2.393	2.432	2.446	2.461	2.477	2.494
14	Nias Selatan	325	316	313	310	307	304
15	Humbang Hasundutan	1.095	1.017	993	969	946	924

No	Kabupaten/Kota	Ketersediaan Pangan (10 ³ Juta Kkal)					
		2022	2025	2026	2027	2028	2029
16	Pakpak Bharat	487	446	433	420	408	397
17	Samosir	323	304	298	292	287	281
18	Serdang Bedagai	2.828	2.726	2.694	2.664	2.635	2.607
19	Batu Bara	755	754	755	755	756	757
20	Padang Lawas Utara	1.300	1.322	1.330	1.338	1.347	1.356
21	Padang Lawas	1.265	1.307	1.322	1.337	1.353	1.369
22	Labuhanbatu Selatan	1.323	1.390	1.412	1.436	1.459	1.484
23	Labuhanbatu Utara	2.481	2.586	2.622	2.659	2.697	2.736
24	Nias Utara	166	164	163	162	162	161
25	Nias Barat	58	57	56	56	56	55
26	Sibolga	2	2	2	2	2	2
27	Tanjungbalai	23	21	21	20	20	19
28	Pematangsiantar	59	57	56	56	55	54
29	Tebing Tinggi	30	28	28	27	27	26
30	Medan	55	54	54	54	54	53
31	Binjai	88	85	84	84	83	82
32	Padangsidempuan	231	220	216	213	210	206
33	Gunungsitoli	67	65	65	64	63	63
SUMATERA UTARA		49.608	47.923	47.418	46.940	46.489	46.064

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan pangan di Sumatera Utara juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan menggunakan angka kecukupan kalori sebesar 2.100 kkal/kapita/hari, maka kebutuhan energi masyarakat Sumatera Utara pada tahun 2022 dan proyeksi kebutuhan hingga tahun 2029 ditunjukkan pada Tabel 2.8.

Tabel 2. 8. Proyeksi Kebutuhan Pangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	Kebutuhan Pangan (10 ³ Juta Kkal)					
		2022	2025	2026	2027	2028	2029
1	Nias	114	118	119	121	122	123
2	Mandailing Natal	372	389	395	401	407	413
3	Tapanuli Selatan	236	245	248	251	254	257
4	Tapanuli Tengah	287	301	306	310	315	320
5	Tapanuli Utara	244	252	255	258	261	263
6	Toba	163	171	174	177	180	183
7	Labuhanbatu	389	410	417	424	431	438
8	Asahan	604	629	638	647	656	665
9	Simalungun	783	828	843	859	875	892
10	Dairi	242	251	255	258	261	265
11	Karo	318	331	336	341	345	350
12	Deli Serdang	1.498	1.531	1.543	1.554	1.565	1.577
13	Langkat	797	812	817	822	827	832
14	Nias Selatan	286	305	312	318	325	332
15	Humbang Hasundutan	155	162	164	166	168	171
16	Pakpak Bharat	42	45	46	47	49	50
17	Samosir	107	111	112	114	115	117
18	Serdang Bedagai	512	527	532	538	543	548
19	Batu Bara	319	327	330	333	336	339

No	Kabupaten/Kota	Kebutuhan Pangan (10 ³ Juta Kkal)					
		2022	2025	2026	2027	2028	2029
20	Padang Lawas Utara	205	214	217	221	224	227
21	Padang Lawas	205	214	217	220	223	226
22	Labuhanbatu Selatan	246	254	258	261	264	267
23	Labuhanbatu Utara	300	313	317	321	326	331
24	Nias Utara	116	121	122	124	126	128
25	Nias Barat	70	72	73	73	74	75
26	Sibolga	69	70	71	71	72	72
27	Tanjungbalai	138	143	145	147	149	151
28	Pematangsiantar	210	218	221	224	227	230
29	Tebing Tinggi	136	143	146	148	151	153
30	Medan	1.912	1.996	2.025	2.055	2.085	2.115
31	Binjai	230	242	246	250	254	258
32	Padangsidempuan	177	186	189	192	195	198
33	Gunungsitoli	105	108	109	109	110	111
SUMATERA UTARA		11.586	12.040	12.195	12.353	12.513	12.675

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Mengingat ketersediaan pangan di Sumatera Utara didukung oleh keanekaragaman hayati yang tinggi, maka kelestarian keanekaragaman hayati ini menjadi sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan kedepan. Selain hal tersebut, dampak perubahan iklim akan sangat berpengaruh terhadap ketersediaan pangan, suhu yang semakin meningkat dan curah hujan yang semakin menurun berpotensi ketersediaan pangan, oleh sebab itu dibutuhkan upaya penguatan ketahanan pangan di Sumatera Utara.

Adapun perkiraan status daya dukung pangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2. 9. Perkiraan Status Daya Dukung Pangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	Status Daya Dukung Pangan					
		2022	2025	2026	2027	2028	2029
1	Nias	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
2	Mandailing Natal	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
3	Tapanuli Selatan	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
4	Tapanuli Tengah	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
5	Tapanuli Utara	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
6	Toba	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
7	Labuhanbatu	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
8	Asahan	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
9	Simalungun	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
10	Dairi	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
11	Karo	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
12	Deli Serdang	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
13	Langkat	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
14	Nias Selatan	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui
15	Humbang Hasundutan	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
16	Pakpak Bharat	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
17	Samosir	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
18	Serdang Bedagai	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
19	Batu Bara	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
20	Padang Lawas Utara	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
21	Padang Lawas	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
22	Labuhanbatu Selatan	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
23	Labuhanbatu Utara	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
24	Nias Utara	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
25	Nias Barat	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui
26	Sibolga	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui
27	Tanjungbalai	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui
28	Pematangsiantar	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui

No	Kabupaten/Kota	Status Daya Dukung Pangan					
		2022	2025	2026	2027	2028	2029
29	Tebing Tinggi	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui
30	Medan	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui
31	Binjai	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui
32	Padangsidempuan	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
33	Gunungsitoli	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui
SUMATERA UTARA		Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

b. Daya Dukung Air

Ketersediaan air di Sumatera Utara dimodelkan menggunakan peta wilayah aliran sungai. Sebaran ketersediaan air akan dilakukan melalui sistem grid ukuran 30” x 30” atau 0.9 km x 0.9 km. Total ketersediaan air di Sumatera Utara mencapai 78.497.133.430,94 m3/tahun, yang terdistribusi pada wilayah kabupaten/kota sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 10. Ketersedian Air Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten	Kesediaan Air (m³/tahun)	No	Kabupaten	Kesediaan Air (m³/tahun)
1	Mandailing Natal	8.558.666.155,96	18	Nias Utara	2.016.994.441,17
2	Langkat	6.648.425.544,48	19	Toba	1.894.403.643,50
3	Tapanuli Selatan	4.955.748.347,59	20	Serdang Bedagai	1.788.128.875,96
4	Tapanuli Utara	4.803.323.181,92	21	Samosir	1.719.742.247,56
5	Simalungun	4.455.502.055,45	22	Pakpak Bharat	1.515.191.992,93
6	Labuhanbatu Utara	3.871.340.689,72	23	Nias	1.236.517.904,79
7	Padang Lawas	3.798.096.541,91	24	Nias Barat	873.628.319,70
8	Nias Selatan	3.779.035.502,17	25	Batu Bara	846.901.704,59
9	Padang Lawas Utara	3.646.342.765,83	26	Kota Medan	253.980.887,16
10	Tapanuli Tengah	3.035.794.439,77	27	Kota Padangsidempuan	229.835.256,50
11	Labuhanbatu Selatan	3.027.860.340,62	28	Kota Gunungsitoli	209.888.852,95
12	Labuhanbatu	2.887.779.100,41	29	Kota Binjai	100.828.149,54
13	Asahan	2.713.779.811,22	30	Kota Pematangsiantar	78.710.571,84
14	Humbang Hasundutan	2.638.151.081,75	31	Kota Tanjung Balai	39.046.080,00
15	Deli Serdang	2.336.964.359,99	32	Kota Tebing Tinggi	36.795.553,52
16	Dairi	2.263.310.355,08	33	Kota Sibolga	24.979.093,05
17	Karo	2.211.439.582,30	Sumatera Utara		78.497.133.430,94

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Beberapa kabupaten dengan ketersediaan air tinggi antara lain Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Simalungun, sedangkan yang memiliki ketersediaan air paling rendah adalah Kota Sibolga, diikuti dengan Kota Tebing Tinggi, Kota Tanjungbalai, Kota Pematangsiantar, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Padangsidempuan, dan Kota Medan.

Dari aspek kebutuhan air, kebutuhan air yang diperhitungkan meliputi kebutuhan air domestik dan kebutuhan air untuk lahan. Kebutuhan air domestik atau rumah tangga didistribusikan berdasarkan hasil model distribusi penduduk dengan grid, menentukan kebutuhan air rumah tangga dengan cara mengkalikan populasi penduduk dengan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar 43,2 m3/tahun/kapita. Sementara itu, kebutuhan air untuk lahan yang diperhitungkan meliputi tutupan lahan sawah,

perkebunan, ladang, dan tambak. Kebutuhan air kabupaten/kota di Sumatera Utara ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 2. 11. Kebutuhan Air Domestik dan Penggunaan Lahan Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)		
	Penutupan Lahan	Domestik	Total
Langkat	3.050.819.319,10	88.964.352,00	3.139.783.671,10
Simalungun	2.693.518.378,82	85.555.008,00	2.779.073.386,82
Asahan	2.375.167.973,71	66.573.360,00	2.441.741.333,71
Mandailing Natal	2.257.815.906,34	40.845.254,40	2.298.661.160,74
Labuhanbatu Utara	2.246.624.890,04	33.012.576,00	2.279.637.466,04
Labuhanbatu Selatan	2.161.724.216,58	27.180.316,80	2.188.904.533,38
Labuhanbatu	1.972.365.564,96	42.670.195,20	2.015.035.760,16
Padang Lawas Utara	1.926.253.048,06	22.500.720,00	1.948.753.768,06
Deli Serdang	1.761.211.091,30	166.855.766,40	1.928.066.857,70
Padang Lawas	1.816.641.777,25	22.566.729,60	1.839.208.506,85
Serdang Bedagai	1.774.267.251,85	56.796.249,60	1.831.063.501,45
Tapanuli Selatan	1.389.173.226,42	25.968.124,80	1.415.141.351,22
Tapanuli Utara	1.085.738.167,44	27.028.771,20	1.112.766.938,64
Tapanuli Tengah	1.052.068.347,18	31.547.664,00	1.083.616.011,18
Karo	812.447.049,09	34.993.036,80	847.440.085,89
Batu Bara	806.415.337,15	35.481.110,40	841.896.447,55
Nias Selatan	783.743.082,36	31.194.201,60	814.937.283,96
Humbang Hasundutan	785.088.612,58	17.101.238,40	802.189.850,98
Dairi	702.820.711,05	26.661.225,60	729.481.936,65
Toba	703.042.261,55	17.830.454,40	720.872.715,95
Nias Utara	654.235.046,27	12.746.505,60	666.981.551,87
Nias	406.336.807,44	12.679.632,00	419.016.439,44
Samosir	311.115.938,16	11.777.875,20	322.893.813,36
Nias Barat	270.891.223,15	7.777.036,80	278.668.259,95
Kota Medan	39.902.913,78	210.408.451,20	250.311.364,98
Kota Padangsidimpuan	148.526.990,92	19.449.417,60	167.976.408,52
Pakpak Bharat	137.576.302,53	4.534.272,00	142.110.574,53
Kota Pematangsiantar	51.967.645,04	23.177.059,20	75.144.704,24
Kota Binjai	47.135.673,75	25.215.062,40	72.350.736,15
Kota Gunungsitoli	54.967.333,00	11.753.683,20	66.721.016,20
Kota Tanjung Balai	21.539.929,32	15.208.128,00	36.748.057,32
Kota Tebing Tinggi	17.765.351,84	14.932.771,20	32.698.123,04
Kota Sibolga	6.607.249,11	7.739.884,80	14.347.133,91
Sumatera Utara	34.325.514.617,15	1.278.726.134,40	35.604.240.751,55

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Kebutuhan air yang lebih besar direpresentasikan warna lebih coklat, cenderung terdapat di Wilayah Pesisir Timur hingga ke Labuhanbatu Selatan dan Padang Lawas dan hampir seluruh Pulau Nias. Secara akumulatif kebutuhan air di Provinsi Sumatera Utara adalah 35.604.240.751,55 m3/tahun dengan kebutuhan air untuk lahan sebesar 34.325.514.617,15 m3/tahun dan kebutuhan air untuk domestik sebesar 1.278.726.134,40 m3/tahun.

Tabulasi selisih ketersediaan dan kebutuhan air di Provinsi Sumatera Utara ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 12. Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	Kesediaan Air (m³/tahun)	Kebutuhan Air (m³/tahun)	Selisih (m³/tahun)
Serdang Bedagai	1.788.128.875,96	1.831.063.501,45	- 42.934.625,49
Kota Tanjung Balai	39.046.080,00	36.748.057,32	2.298.022,68
Kota Pematangsiantar	78.710.571,84	75.144.704,24	3.565.867,60
Kota Medan	253.980.887,16	250.311.364,98	3.669.522,18
Kota Tebing Tinggi	36.795.553,52	32.698.123,04	4.097.430,48
Batu Bara	846.901.704,59	841.896.447,55	5.005.257,04
Kota Sibolga	24.979.093,05	14.347.133,91	10.631.959,14
Kota Binjai	100.828.149,54	72.350.736,15	28.477.413,39
Kota Padangsidimpuan	229.835.256,50	167.976.408,52	61.858.847,98
Kota Gunungsitoli	209.888.852,95	66.721.016,20	143.167.836,75
Asahan	2.713.779.811,22	2.441.741.333,71	272.038.477,51
Deli Serdang	2.336.964.359,99	1.928.066.857,70	408.897.502,29
Nias Barat	873.628.319,70	278.668.259,95	594.960.059,76
Nias	1.236.517.904,79	419.016.439,44	817.501.465,35
Labuhanbatu Selatan	3.027.860.340,62	2.188.904.533,38	838.955.807,24
Labuhanbatu	2.887.779.100,41	2.015.035.760,16	872.743.340,25
Toba	1.894.403.643,50	720.872.715,95	1.173.530.927,55
Nias Utara	2.016.994.441,17	666.981.551,87	1.350.012.889,30
Karo	2.211.439.582,30	847.440.085,89	1.363.999.496,42
Pakpak Bharat	1.515.191.992,93	142.110.574,53	1.373.081.418,40
Samosir	1.719.742.247,56	322.893.813,36	1.396.848.434,21
Dairi	2.263.310.355,08	729.481.936,65	1.533.828.418,44
Labuhanbatu Utara	3.871.340.689,72	2.279.637.466,04	1.591.703.223,67
Simalungun	4.455.502.055,45	2.779.073.386,82	1.676.428.668,63
Padang Lawas Utara	3.646.342.765,83	1.948.753.768,06	1.697.588.997,77
Humbang Hasundutan	2.638.151.081,75	802.189.850,98	1.835.961.230,77
Tapanuli Tengah	3.035.794.439,77	1.083.616.011,18	1.952.178.428,59
Padang Lawas	3.798.096.541,91	1.839.208.506,85	1.958.888.035,06
Nias Selatan	3.779.035.502,17	814.937.283,96	2.964.098.218,21
Langkat	6.648.425.544,48	3.139.783.671,10	3.508.641.873,37
Tapanuli Selatan	4.955.748.347,59	1.415.141.351,22	3.540.606.996,37
Tapanuli Utara	4.803.323.181,92	1.112.766.938,64	3.690.556.243,29
Mandailing Natal	8.558.666.155,96	2.298.661.160,74	6.260.004.995,22
Sumatera Utara	78.497.133.430,94	35.604.240.751,55	42.892.892.679,39

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air, dapat diperoleh selisih ketersediaan terhadap kebutuhan air untuk melihat wilayah yang telah terlampaui (kekurangan air/defisit) dan belum terlampaui (kelebihan air/surplus). Secara keseluruhan ketersediaan air di Sumatera Utara mencapai 78.497.133.430,94 m3/tahun sedangkan kebutuhan mencapai 35.604.240.751,55 m3/tahun dengan demikian masih terdapat selisih surplus sebesar 42.892.892.679,39 m3/tahun, namun jika dilihat dari selisih ketersediaan dan kebutuhan air masing-masing kabupaten/kota hanya Kabupaten Serdang Bedagai yang mengalami defisit, artinya ketersediaan air Kabupaten Serdang Bedagai tidak cukup memenuhi seluruh kebutuhannya.

Sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya ketersediaan air masih cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya, sehingga daerah-daerah yang terlampaui terjadi karena distribusi yang tidak merata.

Wilayah dengan selisih ketersediaan air negatif (terlampaui) direpresentasikan dengan warna merah dan warna hijau menunjukkan selisih positif (belum terlampaui). Wilayah dengan status terlampaui umumnya berada pada wilayah pantai timur, sebagian wilayah Kabupaten Toba dan daerah perbukitan bukit barisan. Luas wilayah pada masing-masing kabupaten/kota yang selisih ketersediaan air dan kebutuhannya belum terlampaui atau terlampaui ditunjukkan pada Tabel dibawah.

Tabel 2. 13. Status Ketersediaan Air Kabupaten/Kota Sumatera Utara

No.	Kabupaten/Kota	Belum Terlampaui		Terlampaui		Luas Total
		(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)
1	Kota Tanjung Balai	2,219.37	38.24	3,585.11	61.76	5,804.48
2	Kota Medan	14,078.93	50.47	13,815.67	49.53	27,894.60
3	Asahan	208,029.76	55.70	165,436.65	44.30	373,466.42
4	Batu Bara	55,889.17	62.49	33,550.51	37.51	89,439.68
5	Kota Pematangsiantar	5,035.25	67.05	2,475.00	32.95	7,510.25
6	Serdang Bedagai	140,632.07	72.08	54,476.27	27.92	195,108.35
7	Kota Padangsidimpuan	12,473.14	77.25	3,673.58	22.75	16,146.73
8	Kota Tebing Tinggi	3,071.35	78.26	853.15	21.74	3,924.50
9	Deli Serdang	206,455.91	80.23	50,874.01	19.77	257,329.92
10	Kota Sibolga	1,571.65	82.14	341.67	17.86	1,913.32
11	Toba	197,238.35	88.98	24,419.68	11.02	221,658.03
12	Kota Binjai	8,529.76	89.29	1,023.56	10.71	9,553.31
13	Simalungun	421,088.48	91.42	39,515.05	8.58	460,603.52
14	Langkat	579,937.74	94.41	34,359.42	5.59	614,297.16
15	Humbang Hasundutan	222,028.43	94.48	12,979.37	5.52	235,007.80
16	Tapanuli Utara	365,704.10	95.43	17,506.79	4.57	383,210.89
17	Labuhanbatu	269,145.40	97.10	8,027.38	2.90	277,172.78
18	Karo	214,642.46	97.48	5,547.76	2.52	220,190.22
19	Samosir	177,833.65	97.52	4,524.80	2.48	182,358.45
20	Tapanuli Tengah	227,934.75	97.55	5,717.78	2.45	233,652.53
21	Padang Lawas Utara	379,690.10	97.91	8,116.70	2.09	387,806.80
22	Tapanuli Selatan	415,981.35	97.95	8,714.27	2.05	424,695.62
23	Dairi	206,246.17	98.33	3,500.13	1.67	209,746.30
24	Labuhanbatu Utara	364,627.56	98.34	6,148.00	1.66	370,775.56
25	Padang Lawas	385,585.37	98.37	6,408.88	1.63	391,994.24
26	Mandailing Natal	648,982.46	99.04	6,308.26	0.96	655,290.72
27	Nias Barat	57,916.45	99.27	427.53	0.73	58,343.97
28	Nias Selatan	253,882.70	99.36	1,624.33	0.64	255,507.03
29	Nias Utara	129,321.56	99.47	683.94	0.53	130,005.50
30	Labuhanbatu Selatan	316,919.82	99.65	1,110.70	0.35	318,030.52
31	Nias	76,999.80	99.78	170.95	0.22	77,170.75
32	Kota Gunungsitoli	13,345.98	100.00		0.00	13,345.98
33	Pakpak Bharat	137,302.97	100.00		0.00	137,302.97
Sumatera Utara		6,720,341.99	92.74	525,916.90	7.26	7,246,258.89

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Secara keseluruhan terdapat 7,26% wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan status ketersediaan air defisit, dan persentase luas wilayah defisit pada masing-masing kabupaten/kota. Persentase luasan terlampaui terbesar adalah di Kota Tanjungbalai, menyusul Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Serdang Bedagai,

Kota Tebingtinggi, Kabupaten Deli Serdang dan Kota Sibolga, sedangkan kabupaten/kota yang tidak memiliki daerah terlampau yaitu Kota Gunungsitoli, dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Tabel 2. 14. Proyeksi Kebutuhan Air Domestik Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	Kebutuhan Air Domestik (m³/tahun)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Kabupaten					
Asahan	70.888.435	71.890.791	72.882.884	73.888.667	74.900.160
Batu Bara	3.693.600	3.725.477	3.757.516	3.789.830	3.820.694
Dairi	28.330.992	28.700.920	29.074.032	29.451.995	29.821.910
Deli Serdang	172.595.491	173.877.335	175.164.028	176.460.242	177.790.205
Humbang Hasundutan	18.214.762	18.463.610	18.718.408	18.976.722	19.234.454
Karo	37.336.637	37.854.342	38.384.303	38.921.683	39.469.334
Labuhanbatu	46.176.739	46.954.993	47.753.228	48.565.033	49.448.189
Labuhanbatu Selatan	28.756.944	29.028.545	29.376.888	29.729.410	30.028.061
Labuhanbatu Utara	35.227.958	35.724.202	36.227.913	36.738.727	37.237.277
Langkat	91.478.074	92.062.078	92.623.657	93.188.661	93.813.120
Mandailing Natal	43.819.402	44.481.349	45.153.017	45.834.828	46.507.910
Nias	13.320.029	13.455.946	13.599.925	13.745.444	13.885.430
Nias Barat	8.115.898	8.190.009	8.266.176	8.343.051	8.422.013
Nias Selatan	34.371.907	35.139.052	35.891.027	36.659.095	37.406.966
Nias Utara	13.602.730	13.783.259	13.978.981	14.177.482	14.406.422
Padang Lawas	24.104.390	24.451.699	24.803.804	25.160.978	25.527.312
Padang Lawas Utara	24.134.026	24.509.601	24.877.245	25.250.404	25.613.971
Pakpak Bharat	5.088.874	5.210.062	5.340.835	5.474.890	5.622.912
Samosir	12.505.795	12.667.035	12.829.173	12.993.386	13.161.571
Serdang Bedagai	59.438.448	60.010.932	60.599.039	61.192.910	61.784.122
Simalungun	93.326.688	95.057.465	96.835.040	98.645.855	100.512.835
Tapanuli Selatan	27.549.936	27.937.532	28.295.132	28.657.310	29.025.994
Tapanuli Tengah	33.921.158	34.445.113	34.982.456	35.528.183	36.084.010
Tapanuli Utara	28.460.938	28.742.475	29.058.642	29.378.287	29.645.741
Toba	19.290.874	19.614.471	19.949.878	20.291.021	20.628.864
Kota					
Binjai	27.232.934	27.685.250	28.144.825	28.612.029	29.087.683
Gunungsitoli	12.150.259	12.238.096	12.327.434	12.417.424	12.508.560
Medan	225.036.490	228.300.859	231.611.221	234.969.584	238.377.341
Padangsidempuan	20.926.080	21.255.685	21.591.525	21.932.671	22.278.845
Pematangsiantar	24.613.978	24.933.936	25.258.077	25.586.432	25.919.136
Sibolga	7.941.802	7.987.164	8.032.691	8.078.477	8.124.365
Tanjungbalai	16.129.411	16.334.320	16.541.765	16.751.846	16.964.381
Tebing Tinggi	16.157.491	16.432.085	16.711.430	16.995.525	17.284.406
Sumatera Utara	1.323.939.168	1.341.145.686	1.358.642.195	1.376.388.083	1.394.344.195

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Kebutuhan air domestik akan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk seperti ditampilkan pada tabel diatas. Jika diasumsikan kebutuhan air lahan tetap (tidak mempertimbangkan perubahan tutupan lahan), maka proyeksi kebutuhan air Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 hingga tahun 2029 adalah ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 15. Proyeksi Total Kebutuhan Air Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	Total Kebutuhan (m³/tahun)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Kabupaten					
Asahan	2.446.056.409	2.447.058.764	2.448.050.857	2.449.056.641	2.450.068.134
Batu Bara	810.108.937	810.140.814	810.172.853	810.205.167	810.236.032
Dairi	731.151.703	731.521.631	731.894.743	732.272.706	732.642.621
Deli Serdang	1.933.806.582	1.935.088.427	1.936.375.119	1.937.671.333	1.939.001.296
Humbahas	803.303.374	803.552.223	803.807.021	804.065.335	804.323.067
Karo	849.783.686	850.301.391	850.831.352	851.368.732	851.916.383
Labuhanbatu	2.018.542.304	2.019.320.558	2.020.118.793	2.020.930.598	2.021.813.754
Labusel	2.190.481.161	2.190.752.762	2.191.101.104	2.191.453.627	2.191.752.277
Labura	2.281.852.848	2.282.349.092	2.282.852.803	2.283.363.617	2.283.862.167
Langkat	3.142.297.393	3.142.881.397	3.143.442.976	3.144.007.980	3.144.632.439
Mandailing Natal	2.301.635.308	2.302.297.255	2.302.968.924	2.303.650.734	2.304.323.817
Nias	419.656.836	419.792.753	419.936.732	420.082.251	420.222.238
Nias Barat	279.007.121	279.081.232	279.157.399	279.234.274	279.313.236
Nias Selatan	818.114.990	818.882.134	819.634.110	820.402.178	821.150.049
Nias Utara	667.837.776	668.018.305	668.214.027	668.412.529	668.641.469
Padang Lawas	1.840.746.168	1.841.093.476	1.841.445.581	1.841.802.756	1.842.169.089
Paluta	1.950.387.074	1.950.762.650	1.951.130.294	1.951.503.452	1.951.867.019
Pakpak Bharat	142.665.176	142.786.365	142.917.137	143.051.192	143.199.215
Samosir	323.621.733	323.782.973	323.945.111	324.109.325	324.277.509
Serdang Bedagai	1.833.705.700	1.834.278.184	1.834.866.291	1.835.460.161	1.836.051.373
Simalungun	2.786.845.067	2.788.575.844	2.790.353.418	2.792.164.234	2.794.031.214
Tapanuli Selatan	1.416.723.162	1.417.110.758	1.417.468.358	1.417.830.536	1.418.199.220
Tapanuli Tengah	1.085.989.506	1.086.513.460	1.087.050.804	1.087.596.530	1.088.152.357
Tapanuli Utara	1.114.199.105	1.114.480.642	1.114.796.809	1.115.116.454	1.115.383.908
Toba	722.333.135	722.656.732	722.992.140	723.333.283	723.671.126
Kota					
Binjai	74.368.608	74.820.924	75.280.499	75.747.703	76.223.357
Gunungsitoli	67.117.592	67.205.429	67.294.767	67.384.757	67.475.893
Medan	264.939.403	268.203.773	271.514.135	274.872.498	278.280.255
Padangsidempuan	169.453.071	169.782.676	170.118.516	170.459.662	170.805.836
Pematangsiantar	76.581.623	76.901.581	77.225.722	77.554.077	77.886.781
Sibolga	14.549.051	14.594.413	14.639.940	14.685.726	14.731.614
Tanjung Balai	37.669.341	37.874.249	38.081.695	38.291.775	38.504.310
Tebing Tinggi	33.922.843	34.197.437	34.476.782	34.760.877	35.049.758
Sumatera Utara	35.649.453.785	35.666.660.304	35.684.156.812	35.701.902.700	35.719.858.812

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Dengan mengasumsikan ketersediaan air tetap (tanpa memperhitungkan faktor perubahan tutupan lahan dan perubahan iklim) maka selisih ketersediaan dan kebutuhan air Provinsi Sumatera Utara secara total masih surplus sebesar 42.777.274.619 m3/tahun pada tahun 2029. Selisih ketersediaan pada kabupaten/kota ditunjukkan pada Tabel di bawah

Tabel 2. 16. Proyeksi Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	Selisih (m³/tahun)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Asahan	267.723.402	266.721.047	265.728.954	264.723.170	263.711.678
Batu Bara	36.792.767	36.760.891	36.728.852	36.696.537	36.665.673
Dairi	1.532.158.652	1.531.788.724	1.531.415.612	1.531.037.649	1.530.667.734
Deli Serdang	403.157.777	401.875.933	400.589.241	399.293.027	397.963.064
Humbahas	1.834.847.708	1.834.598.859	1.834.344.061	1.834.085.747	1.833.828.015
Karo	1.361.655.896	1.361.138.191	1.360.608.231	1.360.070.850	1.359.523.199
Binjai	26.459.541	26.007.226	25.547.651	25.080.447	24.604.793
Gunungsitoli	142.771.261	142.683.424	142.594.086	142.504.096	142.412.960
Medan	-10.958.516	-14.222.886	-17.533.248	-20.891.611	-24.299.367
Padangsidempuan	60.382.186	60.052.581	59.716.741	59.375.595	59.029.421
Pematangsiantar	2.128.949	1.808.991	1.484.850	1.156.495	823.791
Sibolga	10.430.042	10.384.680	10.339.153	10.293.367	10.247.479

Kabupaten/Kota	Selisih (m ³ /tahun)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Tanjung Balai	1.376.739	1.171.831	964.385	754.305	541.770
Tebing Tinggi	2.872.710	2.598.117	2.318.771	2.034.677	1.745.795
Labuhanbatu	869.236.796	868.458.542	867.660.307	866.848.502	865.965.347
Labusel	837.379.180	837.107.579	836.759.236	836.406.714	836.108.063
Labura	1.589.487.841	1.588.991.598	1.588.487.887	1.587.977.073	1.587.478.523
Langkat	3.506.128.152	3.505.544.147	3.504.982.568	3.504.417.564	3.503.793.105
Mandailing Natal	6.257.030.848	6.256.368.901	6.255.697.232	6.255.015.422	6.254.342.339
Nias	816.861.069	816.725.151	816.581.173	816.435.654	816.295.667
Nias Barat	594.621.199	594.547.088	594.470.921	594.394.045	594.315.084
Nias Selatan	2.960.920.513	2.960.153.368	2.959.401.392	2.958.633.324	2.957.885.453
Nias Utara	1.349.156.665	1.348.976.136	1.348.780.414	1.348.581.912	1.348.352.972
Padang Lawas	1.957.350.374	1.957.003.066	1.956.650.961	1.956.293.786	1.955.927.453
Paluta	1.695.955.692	1.695.580.116	1.695.212.472	1.694.839.314	1.694.475.747
Pakpak Bharat	1.372.526.817	1.372.405.628	1.372.274.856	1.372.140.801	1.371.992.778
Samosir	1.396.120.514	1.395.959.274	1.395.797.136	1.395.632.923	1.395.464.738
Serdang Bedagai	-45.576.824	-46.149.308	-46.737.415	-47.331.285	-47.922.497
Simalungun	1.668.656.989	1.666.926.212	1.665.148.637	1.663.337.822	1.661.470.841
Tapanuli Selatan	3.539.025.185	3.538.637.590	3.538.279.989	3.537.917.811	3.537.549.128
Tapanuli Tengah	1.949.804.934	1.949.280.980	1.948.743.636	1.948.197.910	1.947.642.083
Tapanuli Utara	3.689.124.077	3.688.842.540	3.688.526.373	3.688.206.727	3.687.939.274
Toba	1.172.070.508	1.171.746.911	1.171.411.504	1.171.070.361	1.170.732.518
Sumatera Utara	42.847.679.646	42.830.473.127	42.812.976.619	42.795.230.731	42.777.274.619

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Secara spasial terdapat wilayah-wilayah yang selisih ketersediaan dan kebutuhan bernilai negatif (ketersediaan air lebih kecil dari kebutuhan (defisit)). Pada tahun 2029 wilayah yang defisit mencapai 7,38% dari wilayah Sumatera Utara dan dominan berada di wilayah Pantai Timur Sumatera Utara.

Tabel 2. 17. Proyeksi Perbandingan Luasan Status Air Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	Belum Terlampaui		Terlampaui	
	Ha	%	Ha	%
Kota Medan	6.314	22,65	21.566	77,35
Kota Tanjung Balai	1.962	33,82	3.839	66,18
Kota Tebing Tinggi	207.497	55,59	165.779	44,41
Asahan	58.623	65,58	30.771	34,42
Kota Pematangsiantar	5.033	67,05	2.474	32,95
Batu Bara	140.305	71,95	54.704	28,05
Serdang Bedagai	2.985	76,09	938	23,91
Kota Padangsidimpuan	12.381	76,72	3.757	23,28
Kota Sibolga	205.754	80,00	51.445	20,00
Deli Serdang	1.571	82,14	341	17,86
Kota Binjai	8.440	88,39	1.108	11,61
Toba	196.114	88,52	25.431	11,48
Simalungun	420.362	91,31	40.007	8,69
Langkat	579.472	94,38	34.512	5,62
Humbang Hasundutan	221.830	94,44	13.058	5,56
Tapanuli Utara	365.433	95,41	17.583	4,59
Labuhanbatu	268.923	97,07	8.109	2,93
Samosir	177.658	97,47	4.608	2,53
Karo	214.533	97,48	5.545	2,52
Tapanuli Tengah	227.819	97,55	5.715	2,45
Padang Lawas Utara	379.497	97,91	8.113	2,09

Kabupaten/Kota	Belum Terlampaui		Terlampaui	
	Ha	%	Ha	%
Tapanuli Selatan	415.770	97,95	8.710	2,05
Dairi	206.141	98,33	3.498	1,67
Labuhanbatu Utara	364.442	98,34	6.145	1,66
Padang Lawas	385.389	98,37	6.406	1,63
Mandailing Natal	648.652	99,04	6.305	0,96
Nias Barat	57.887	99,27	427	0,73
Nias Selatan	253.754	99,36	1.624	0,64
Nias Utara	129.256	99,47	684	0,53
Labuhanbatu Selatan	316.759	99,65	1.110	0,35
Nias	76.961	99,78	171	0,22
Kota Gunungsitoli	13.339	100,00		0,00
Pakpak Bharat	137.233	100,00		0,00
Sumatera Utara	6.708.089	92,62	534.484	7,38

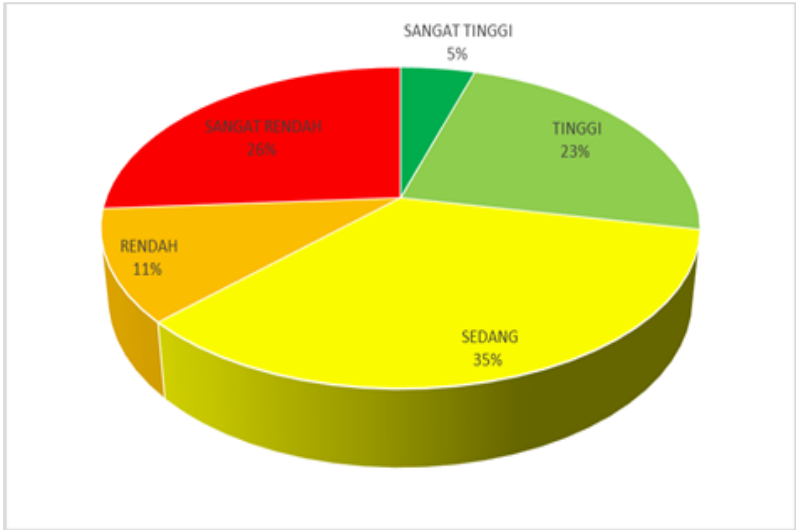
Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Pada tahun 2029 Kota Medan dan Kabupaten Serdang Bedagai akan mengalami defisit air (Tabel 3.22). Jika dilihat dari luasan defisit lebih dari 50% adalah Kota Medan (77,35%) dan Kota Tanjung Balai (66,18%).

c. Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan

Jasa lingkungan penyediaan pangan di Provinsi Sumatera Utara dominan memiliki kategori sedang (35%) dan hanya 28% wilayah yang memiliki jasa penyediaan pangan dengan kategori tinggi hingga sangat tinggi. Wilayah dengan jasa penyediaan sangat rendah juga tergolong tinggi, mencapai 26% dari luas wilayah. Jika ditinjau penyediaan pangan berdasarkan wilayah administrasi, terlihat Kabupaten Asahan memiliki persentase wilayah terbesar penyediaan pangan dengan kategori tinggi hingga sangat tinggi, sedangkan proporsi wilayah dengan penyediaan berkategori rendah dan sangat rendah terbesar adalah Sibolga.

Gambar 2. 5. Proporsi Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Provinsi Sumatera Utara



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029

Persebaran jasa lingkungan penyediaan pangan di Sumatera Utara ditunjukkan pada tabel dibawah ini. Dari peta terlihat bahwa wilayah Pantai Timur Sumatera Utara dominan memiliki jasa penyediaan pangan berkategori tinggi hingga sangat tinggi, wilayah dataran tinggi dominan memiliki jasa penyediaan pangan berkategori sangat rendah hingga sedang, sedangkan wilayah Pantai Barat dominan memiliki jasa penyediaan berkategori sangat rendah.

Tabel 2. 18. Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

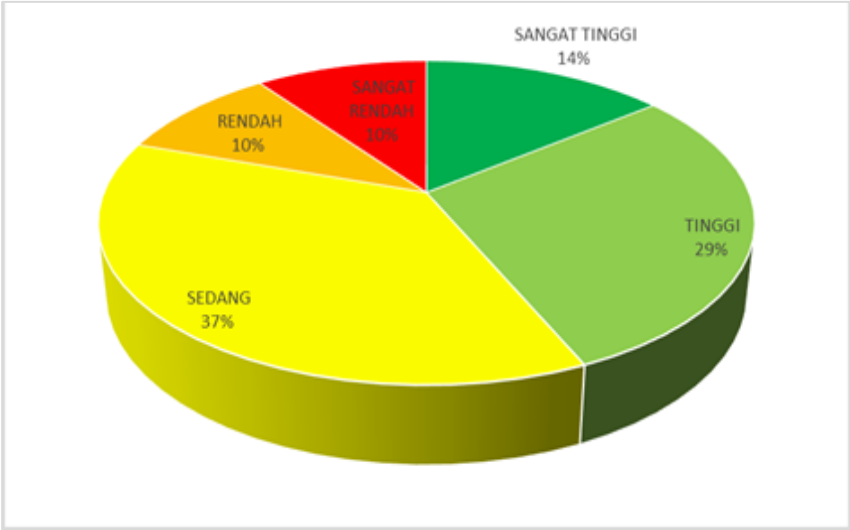
NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS (Ha) TINGKAT JASA EKOSISTEM					TOTAL LUAS (Ha)
		SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	
1	ASAHAN	9.179,32	197.310,64	91.271,00	45.232,54	36.668,50	379.662,00
2	BATUBARA	10.280,77	65.287,17	10.828,30	3.296,50	1.455,70	91.148,44
3	BINJAI	1.778,42	4.767,58	3.020,46	-	-	9.566,46
4	DAIRI	6.422,40	3.168,20	121.068,28	8.292,43	65.666,65	204.617,96
5	DELI SERDANG	27.275,57	124.490,14	55.745,46	23.177,00	31.941,22	262.629,40
6	GUNUNGSITOLI	1.159,48	773,83	19.257,92	102,96	6.226,31	27.520,50
7	HUMBANG HASUNDUTAN	11.477,90	32.773,90	136.206,74	25.267,53	43.513,40	249.239,47
8	KARO	10.319,03	17.075,63	92.995,33	14.893,17	86.675,32	221.958,48
9	LABUHANBATU	5.949,81	115.375,79	42.170,92	99.600,56	14.889,07	277.986,15
10	LABUHANBATU SELATAN	7.834,31	178.242,53	54.030,95	59.708,11	28.466,79	328.282,70
11	LABUHANBATU UTARA	9.869,30	108.358,64	116.438,56	80.353,96	55.314,57	370.335,03
12	LANGKAT	15.461,13	158.078,93	273.715,85	106.933,10	79.994,55	634.183,56
13	MANDAILING NATAL	32.881,50	117.960,55	31.112,85	50.260,35	419.341,55	651.556,80
14	MEDAN	1.793,04	9.267,99	13.366,34	2.569,92	2.571,63	29.568,92
15	NIAS	4.407,23	17.398,13	34.336,33	12.223,19	18.212,96	86.577,85
16	NIAS BARAT	2.943,22	10.295,29	24.426,79	1.466,37	8.082,06	47.213,73
17	NIAS SELATAN	5.688,16	10.331,12	78.564,64	8.857,16	143.301,39	246.742,47
18	NIAS UTARA	4.934,28	19.174,80	64.366,95	2.119,08	30.629,62	121.224,74
19	PADANGSIDIMPUAN	2.958,11	3.554,10	5.929,93	2.230,81	1.587,21	16.260,17
20	PADANGLAWAS	9.999,60	59.265,70	153.375,03	20.417,80	151.446,53	394.504,66
21	PADANGLAWAS UTARA	13.979,99	106.480,83	148.022,53	13.691,64	107.960,50	390.135,50
22	PAKPAK BHARAT	1.129,39	20.850,60	32.780,89	5.357,46	78.072,06	138.190,41
23	PEMATANGSIANTAR	2.467,98	1.075,85	1.657,85	2.965,18	-	8.166,86
24	SAMOSIR	10.489,85	8.815,92	33.323,05	10.079,95	67.411,19	130.119,97
25	SERDANG BEDAGAI	36.209,73	83.897,90	59.329,08	18.041,47	1.532,55	199.010,73
26	SIBOLGA	-	9,11	5,94	232,77	395,04	642,87
27	SIMALUNGUN	33.080,52	61.021,16	240.273,99	82.940,51	29.094,94	446.411,13
28	TANJUNG BALAI	143,70	4.423,58	165,16	1.502,11	-	6.234,54
29	TAPANULI SELATAN	16.165,38	74.290,04	164.016,29	33.397,75	157.118,86	444.988,31
30	TAPANULI TENGAH	13.169,40	43.656,89	71.048,80	36.526,36	66.191,55	230.593,00
31	TAPANULI UTARA	17.243,70	16.987,09	209.146,10	35.326,01	108.731,45	387.434,35
32	TEBINGTINGGI	390,22	2.075,50	1.402,49	100,10	-	3.968,31
33	TOBA	20.554,80	15.619,36	120.206,75	5.911,03	47.291,50	209.583,43
	TOTAL	347.637,27	1.692.154,47	2.503.607,56	813.074,91	1.889.784,68	7.246.258,89

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

d. Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih

Secara umum wilayah Sumatera Utara dengan jasa lingkungan penyediaan air bersih berkategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 43%, dan hanya 20% luas wilayah yang memiliki jasa penyediaan air bersih berkategori rendah hingga sangat rendah, dominan memiliki jasa penyediaan air bersih dengan kategori sedang (37%). Kota Binjai dan Kota Tebing Tinggi memiliki proporsi luas wilayah terbesar dalam penyediaan air bersih dengan kategori tinggi hingga sangat tinggi, sedangkan Kabupaten Labuhanbatu dan Padang Lawas merupakan wilayah dengan proporsi terbesar yang memiliki jasa penyediaan air bersih berkategori rendah hingga sangat rendah.

Gambar 2. 6. Proporsi Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih Provinsi Sumatera Utara



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029

Persebaran jasa lingkungan penyediaan air bersih di Sumatera Utara ditunjukkan pada tabel dibawah ini. Jasa lingkungan penyediaan air kategori tinggi umumnya terdapat pada bagian timur Sumatera Utara, pada bagian tengah umumnya memiliki jasa dengan kategori sedang berpadu dengan kategori sangat tinggi, demikian juga dengan wilayah barat Sumatera Utara.

Tabel 2. 19. Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

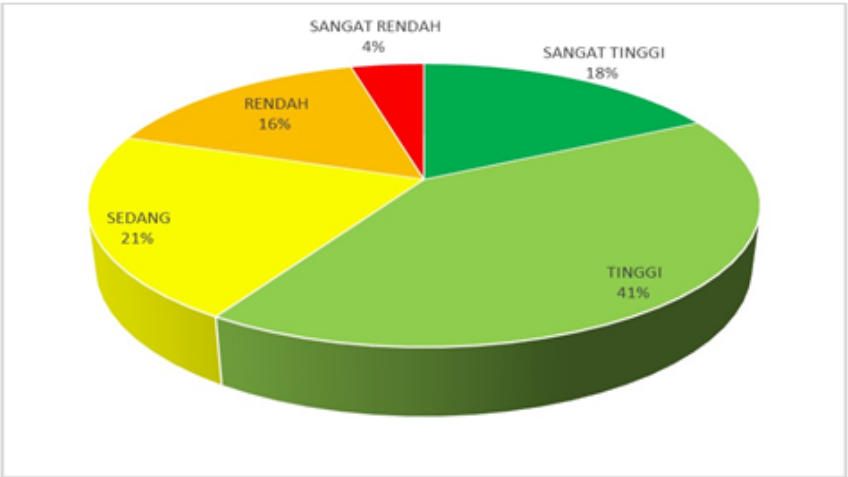
NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS (Ha) TINGKAT JASA EKOSISTEM					TOTAL LUAS (Ha)
		SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	
1	ASAHAN	18.510,28	177.107,27	84.224,75	77.851,84	21.967,86	379.662,00
2	BATUBARA	2.743,46	52.447,63	29.168,53	1.979,46	4.809,37	91.148,44
3	BINJAI	1.483,46	8.083,00	-	-	-	9.566,46
4	DAIRI	12.065,68	40.924,96	126.115,04	6.628,33	18.883,96	204.617,96
5	DELI SERDANG	12.305,11	154.753,87	52.893,68	33.892,71	8.784,02	262.629,40
6	GUNUNGSITOLI	6.994,94	12.218,65	5.490,72	101,60	2.714,58	27.520,50
7	HUMBANG	108.932,21	36.882,52	87.750,09	11.987,17	3.687,46	249.239,47
7	HASUNDUTAN						
8	KARO	5.412,53	61.453,17	119.866,76	10.040,84	25.185,18	221.958,48
9	LABUHANBATU	5.988,09	61.179,32	70.046,15	45.322,78	95.449,81	277.986,15
10	LABUHANBATU SELATAN	12.105,97	194.392,90	32.301,05	28.109,06	61.373,72	328.282,70
11	LABUHANBATU UTARA	51.915,14	95.011,10	90.141,97	58.564,00	74.702,82	370.335,03
12	LANGKAT	142.512,10	218.982,39	121.270,54	120.507,57	30.910,97	634.183,56
13	MANDAILING NATAL	5.986,47	127.384,43	473.440,59	9.644,68	35.100,64	651.556,80
14	MEDAN	2.534,63	19.708,44	3.560,54	819,49	2.945,82	29.568,92
15	NIAS	26.384,54	39.389,47	19.510,45	4,21	1.289,19	86.577,85
16	NIAS BARAT	3.856,63	26.694,60	15.543,27	179,32	939,90	47.213,73
17	NIAS SELATAN	49.211,48	15.378,97	169.735,63	1.029,03	11.387,36	246.742,47
18	NIAS UTARA	24.616,75	44.537,03	43.990,22	1.755,10	6.325,63	121.224,74
19	PADANGSIDIMPUAN	2.074,15	9.064,02	3.330,29	1.577,50	214,21	16.260,17
20	PADANGLAWAS	9.512,97	58.619,74	154.075,99	53.237,92	119.058,04	394.504,66
21	PADANGLAWAS UTARA	37.586,88	89.803,05	146.080,18	13.386,68	103.278,71	390.135,50
22	PAKPAK BHARAT	29.757,29	7.532,94	71.980,68	4.614,43	24.305,08	138.190,41
23	PEMATANGSIANTAR	-	4.754,83	-	3.412,03	-	8.166,86
24	SAMOSIR	11.171,41	5.420,88	95.671,06	8.711,17	9.145,45	130.119,97
25	SERDANG BEDAGAI	4.043,72	116.916,20	28.985,21	40.500,36	8.565,24	199.010,73
26	SIBOLGA	5,00	138,91	431,11	-	67,84	642,87
27	SIMALUNGUN	29.061,18	204.383,28	54.940,88	147.746,44	10.279,34	446.411,13
28	TANJUNG BALAI	439,60	1.520,68	4.274,26	-	-	6.234,54
29	TAPANULI SELATAN	130.523,05	67.658,57	221.125,95	6.462,75	19.217,99	444.988,31
30	TAPANULI TENGAH	64.212,03	54.847,80	95.410,39	5.322,27	10.800,51	230.593,00
31	TAPANULI UTARA	151.617,55	74.890,89	147.939,66	4.954,72	8.031,52	387.434,35
32	TEBINGTINGGI	67,78	3.746,65	102,67	51,22	-	3.968,31
33	TOBA	74.948,62	15.958,96	103.952,21	328,16	14.395,49	209.583,43
	TOTAL	1.038.580,70	2.101.787,11	2.673.350,53	698.722,84	733.817,71	7.246.258,89

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

e. Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

Sumatera Utara memiliki proporsi luas wilayah pengaturan iklim dengan kategori tinggi hingga sangat tinggi sebesar 59%, dan 20% wilayah yang memiliki jasa pengaturan dengan kategori rendah hingga sangat rendah. Mandailing Natal dan Langkat merupakan wilayah dengan proporsi wilayah terbesar yang memiliki jasa pengaturan iklim berkategori tinggi hingga sangat tinggi, sedangkan Samosir memiliki proporsi wilayah terbesar dengan jasa pengaturan iklim kategori sangat rendah disusul oleh Kota Sibolga.

Gambar 2. 7. Proporsi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Provinsi Sumatera Utara



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029

Persebaran jasa lingkungan pengaturan iklim di Sumatera Utara ditunjukkan pada gambar dibawah ini. Pesisir Timur Sumatera Utara dominan memiliki jasa pengaturan iklim rendah hingga sangat rendah, berangsur tinggi hingga sangat tinggi ke bagian tengah dan Pesisir Barat Sumatera Utara.

Tabel 2. 20. Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS (Ha) TINGKAT JASA EKOSISTEM					TOTAL LUAS (Ha)
		SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	
1	ASAHAN	35.415,28	212.720,17	42.052,06	3.387,76	18.508,99	379.662,00
2	BATUBARA	-	33.977,74	7.702,71	4.564,61	11.063,46	91.148,44
3	BINJAI	-	1.832,94	543,42	-	-	9.566,46
4	DAIRI	44.799,59	38.555,96	53.084,52	-	-	204.617,96
5	DELI SERDANG	23.185,97	117.613,88	35.232,74	5.973,92	26.789,96	262.629,40
6	GUNUNGSITOLI	18.130,76	3.137,86	167,11	309,24	2.290,64	27.520,50
7	HUMBANG HASUNDUTAN	127.766,71	47.933,65	24.655,81	-	-	249.239,47
8	KARO	25.428,56	90.404,90	80.234,65	106,07	964,57	221.958,48
9	LABUHANBATU	661,38	49.007,35	135.919,40	5.016,73	19.549,96	277.986,15
10	LABUHANBATU SELATAN	200,16	154.608,16	114.710,35	1.191,98	7.848,51	328.282,70
11	LABUHANBATU UTARA	42.099,66	96.757,63	156.728,90	2.940,54	20.499,86	370.335,03
12	LANGKAT	141.548,38	214.845,25	172.018,62	3.509,43	29.993,85	634.183,56
13	MANDAILING NATAL	25.011,48	467.007,84	96.285,95	1.022,53	13.742,48	651.556,80
14	MEDAN	-	2.651,43	892,44	1.892,03	2.420,40	29.568,92
15	NIAS	36.116,53	16.659,20	414,60	3.145,70	17.437,74	86.577,85
16	NIAS BARAT	20.957,60	12.718,48	1.742,79	490,04	2.557,93	47.213,73
17	NIAS SELATAN	58.767,02	104.994,85	11.925,13	1.754,41	6.889,55	246.742,47
18	NIAS UTARA	61.768,46	24.023,87	3.684,67	1.812,82	10.624,37	121.224,74
19	PADANG SIDIMPUAN	2.034,84	6.171,77	2.640,30	-	-	16.260,17
20	PADANGLAWAS	636,14	183.747,88	88.862,65	6.225,21	26.454,73	394.504,66
21	PADANGLAWAS UTARA	28.991,61	184.910,89	31.515,25	7.572,48	25.254,57	390.135,50
22	PAKPAK BHARAT	29.635,99	95.934,86	5.741,44	-	-	138.190,41

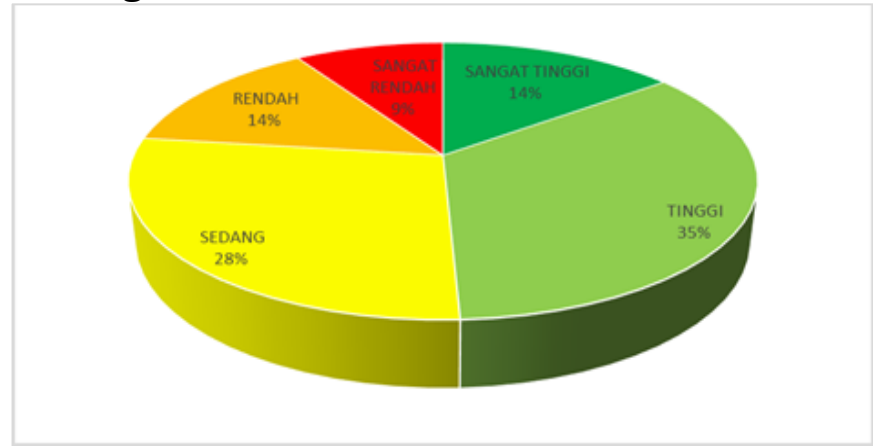
NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS (Ha) TINGKAT JASA EKOSISTEM					TOTAL LUAS (Ha)
		SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	
23	PEMATANGSIANTAR	-	1.812,99	6.353,87	-	-	8.166,86
24	SAMOSIR	43.748,14	14.300,83	61.323,98	11,38	142,55	130.119,97
25	SERDANG BEDAGAI	984,19	108.024,90	11.083,83	7.553,51	34.782,05	199.010,73
26	SIBOLGA	3,11	183,42	288,05	0,45	166,52	642,87
27	SIMALUNGUN	52.752,90	269.951,06	119.878,85	-	-	446.411,13
28	TANJUNG BALAI	-	-	25,44	1.476,09	2.614,50	6.234,54
29	TAPANULI SELATAN	132.002,86	209.143,07	72.430,61	412,71	8.016,47	444.988,31
30	TAPANULI TENGAH	62.124,50	92.276,02	39.273,01	1.177,20	10.488,12	230.593,00
31	TAPANULI UTARA	161.767,86	114.153,45	89.491,60	138,67	2.863,96	387.434,35
32	TEBINGTINGGI	-	1.236,47	7,77	122,99	197,25	3.968,31
33	TOBA	101.633,42	20.578,84	74.196,52	19,25	320,52	209.583,43
	TOTAL	1.278.173,09	2.991.877,58	1.541.109,01	61.827,77	302.483,51	7.246.258,89

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

f. Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam

Wilayah Sumatera Utara yang memiliki jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam dengan kategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 49%, yang memiliki jasa sedang 28% sedangkan yang memiliki jasa rendah hingga sangat rendah yakni 23%. Kabupaten/kota yang memiliki proporsi wilayah dengan jasa rendah hingga sangat rendah tertinggi adalah Kota Sibolga, sedangkan yang memiliki proporsi wilayah katergori tinggi hingga sangat tinggi terbesar adalah Kabupaten Mandailing Natal.

Gambar 2. 8. Proporsi Luas Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam Provinsi Sumatera Utara



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029

Persebaran jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam di Sumatera Utara ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Pada sisi timur Sumatera Utara terbentang wilayah dengan jasa yang sangat rendah, sedangkan pada sisi barat Sumatera Utara, dominan memiliki jasa dengan kategori tinggi dan sangat tinggi, walau pada beberapa wilayah memiliki jasa sangat rendah, umumnya pada pesisir pantai.

Tabel 2. 21. Luas Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS (Ha) TINGKAT JASA EKOSISTEM					TOTAL LUAS (Ha)
		SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	
1	ASAHAN	353,92	104.137,18	196.764,66	17.173,36	61.232,87	379.662,00
2	BATUBARA	43,66	11.424,29	16.648,75	28.811,26	34.220,49	91.148,44
3	BINJAI	-	1.977,64	7.588,82	-	-	9.566,46
4	DAIRI	27.706,77	54.160,67	45.020,45	77.728,60	1,47	204.617,96
5	DELI SERDANG	5.456,69	84.312,50	107.625,92	34.375,57	30.858,71	262.629,40
6	GUNUNGSITOLI	18.130,76	2.651,84	1.658,02	4.091,43	988,46	27.520,50

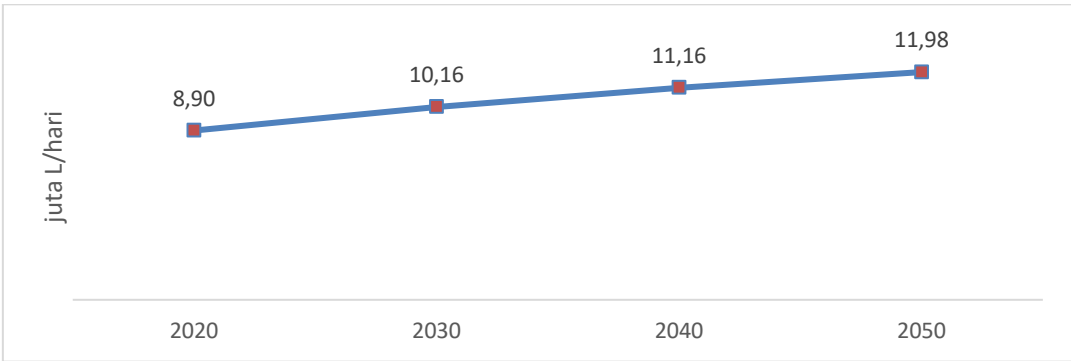
NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS (Ha) TINGKAT JASA EKOSISTEM					TOTAL LUAS (Ha)
		SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	
7	HUMBANG						
8	HASUNDUTAN	108.964,23	89.776,54	29.035,61	21.343,20	119,89	249.239,47
9	KARO	5.299,93	113.444,32	56.271,71	45.228,26	1.714,26	221.958,48
10	LABUHANBATU	663,28	19.351,74	53.940,88	60.492,59	143.537,66	277.986,15
11	LABUHANBATU SELATAN	6,78	47.158,74	150.965,76	88.167,57	41.983,85	328.282,70
12	LABUHANBATU UTARA	41.287,87	76.628,76	60.561,93	96.490,73	95.365,74	370.335,03
13	LANGKAT	137.099,69	184.247,66	113.576,65	137.414,51	61.845,05	634.183,56
14	MANDAILING NATAL	2.456,20	452.211,92	100.375,95	56.934,44	39.578,28	651.556,80
15	MEDAN	1.049,40	2.173,86	22.630,14	10,37	3.705,15	29.568,92
16	NIAS	36.116,53	17.711,57	19.705,74	3.353,90	9.690,11	86.577,85
17	NIAS BARAT	20.957,60	9.477,06	9.613,29	5.030,70	2.135,08	47.213,73
18	NIAS SELATAN	61.478,78	107.498,09	45.765,19	29.778,10	2.222,31	246.742,47
19	NIAS UTARA	62.424,48	21.145,67	16.579,91	18.624,45	2.450,22	121.224,74
20	PADANG SIDIMPUAN	2.034,84	7.715,13	2.599,28	3.910,91	-	16.260,17
21	PADANGLAWAS	1.373,44	139.115,32	136.866,52	93.447,51	23.701,87	394.504,66
22	PADANGLAWAS UTARA	29.124,06	104.510,27	206.536,55	43.941,58	6.023,04	390.135,50
23	PAKPAK BHARAT	29.635,99	59.937,01	44.951,00	3.666,41	-	138.190,41
24	PEMATANGSIANTAR	-	3.823,78	4.343,08	-	-	8.166,86
25	SAMOSIR	11.629,30	87.799,24	27.705,85	2.336,00	649,58	130.119,97
26	SERDANG BEDAGAI	935,16	34.005,44	82.377,08	46.685,31	35.007,73	199.010,73
27	SIBOLGA	3,11	274,94	200,15	50,86	113,80	642,87
28	SIMALUNGUN	26.141,54	185.835,19	211.638,17	22.757,90	38,33	446.411,13
29	TANJUNG BALAI	-	-	932,97	226,95	5.074,63	6.234,54
30	TAPANULI SELATAN	131.545,54	189.376,57	71.756,87	28.577,71	23.731,63	444.988,31
31	TAPANULI TENGAH	62.975,29	84.878,11	35.799,95	15.900,97	31.038,67	230.593,00
32	TAPANULI UTARA	153.928,21	154.466,05	69.549,61	8.420,37	1.070,11	387.434,35
33	TEBINGTINGGI	-	565,51	52,89	3.141,63	208,28	3.968,31
34	TOBA	78.451,20	61.693,63	65.157,44	1.849,85	2.431,32	209.583,43
35	TOTAL	1.057.274,23	2.513.486,23	2.014.796,80	999.963,04	660.738,59	7.246.258,89

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

g. Potensi Timbulan Sampah dan Lumpur Tinja

Salah satu dampak dan risiko lingkungan hidup yang diakibatkan oleh penduduk adalah timbulan sampah yang akan meningkat setiap tahunnya seiring pertambahan penduduk. Secara umum, pola persebaran potensi timbulan sampah mengikuti pola persebaran penduduk. Diprediksi jumlah timbulan sampah di Provinsi Sumatera Utara akan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,04% per 10 tahun hingga tahun 2050. Grafik proyeksi timbulan sampah ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 2. 9. Proyeksi Potensi Timbulan Sampah di Provinsi Sumatera Utara

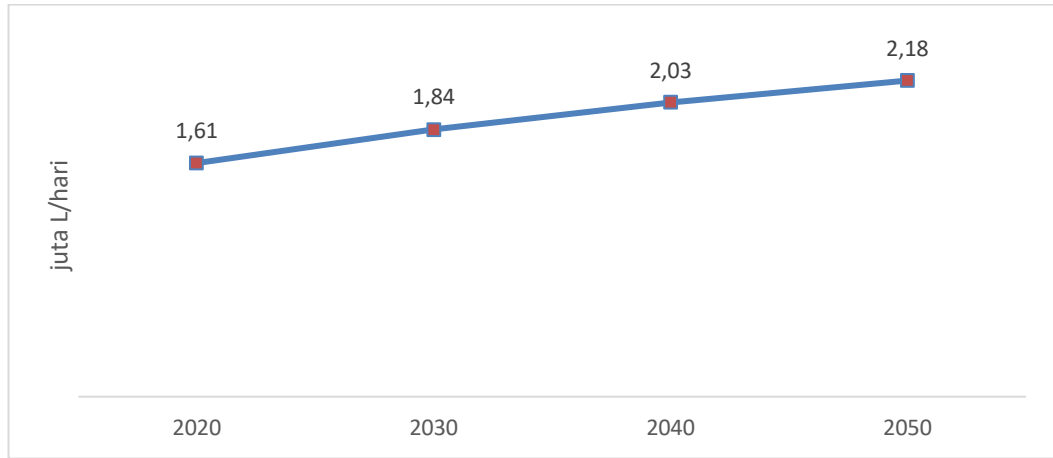


Sumber: KLHS RTRW Provinsi Sumatera Utara 2024-2044

Dampak dan risiko lingkungan lain yang disebabkan oleh penduduk adalah timbulan lumpur tinja yang dipetakan menggunakan nilai timbulan lumpur tinja per kapita yang disajikan secara spasial berbasis grid. Sama halnya seperti hasil pemodelan timbulan sampah, secara umum pola

persebaran timbulan lumpur tinja juga mengikuti pola persebaran penduduk. Potensi timbulan lumpur tinja yang tinggi sebagian besar tersebar wilayah perkotaan dan sekitarnya disebabkan tingginya tingkat kepadatan penduduk. Grafik proyeksi timbulan lumpur tinja ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 2. 10. Proyeksi Potensi Timbulan Tinja di Provinsi Sumatera Utara



Sumber: KLHS RTRW Provinsi Sumatera Utara 2024-2044

Sama halnya seperti timbulan sampah, timbulan lumpur tinja juga mengalami kenaikan pada semua kabupaten/kota. Kondisi ini diakibatkan adanya kenaikan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Berdasarkan kajian proyeksi, jumlah lumpur tinja di Provinsi Sumatera Utara berpotensi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,06% per 10 tahun hingga tahun 2050.

Tabel 2. 22. Jumlah serta Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kab/Kota	Lumpur Tinja (Ribu m3/hari)				Rata-rata peningkatan/ 10 tahun
	2020	2030	2040	2050	
Asahan	80.51	85.26	85.26	85.26	0.20%
Batu Bara	46	52.25	58.57	63.7	1.15%
Dairi	31.27	43.06	51.17	57.72	2.31%
Deli Serdang	244.66	226.037	239.9102	253.7834	0.01%
Humbang Hasundutan	20.99	32.97	43.01	51.15	3.55%
Karo	46.18	51.83	58.24	63.43	1.12%
Kota Binjai	30.58	41.6	50	56.77	2.33%
Kota Gunungsitoli	15.74	27.28	38.43	47.43	4.59%
Kota Medan	251.3	226.037	239.9102	253.7834	0.04%
Kota Padangsidimpuan	24.58	35.49	45.06	52.79	2.95%
Kota Pematangsiantar	28.15	39.38	48.2	55.32	2.57%
Kota Sibolga	9.61	23.05	35.02	44.69	7.31%
Kota Tanjung Balai	19.38	30.97	41.41	49.85	3.80%
Kota Tebing Tinggi	18.19	30.73	41.22	49.69	4.12%
Labuhanbatu	54.87	60	64.84	68.88	0.79%
Labuhanbatu Selatan	37.7	43.48	51.63	58.15	1.56%
Labuhanbatu Utara	40.11	49.77	56.59	62.14	1.59%
Langkat	114.8	119.15	125.0977	131.0454	0.06%
Mandailing Natal	49.47	58.08	63.23	67.25	1.09%

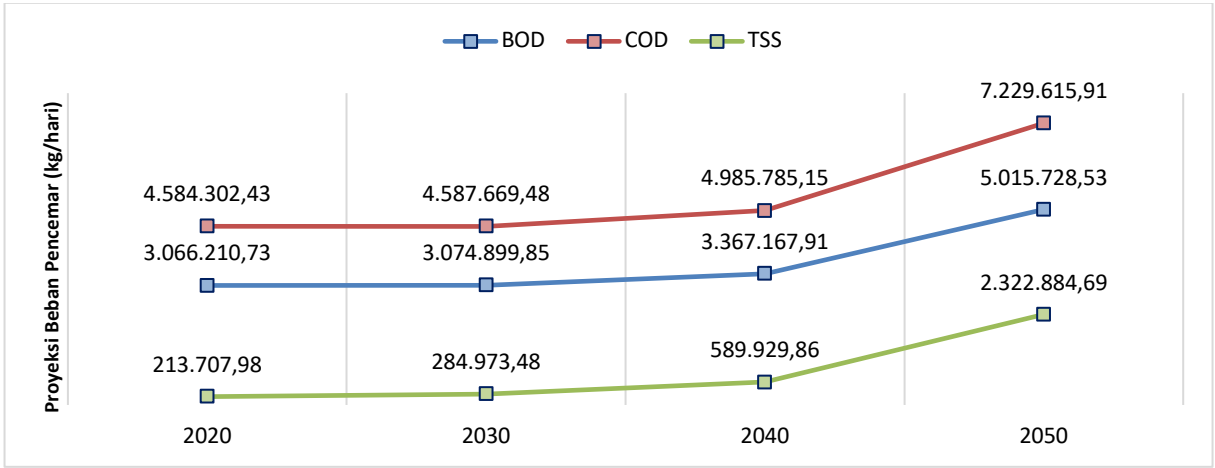
Kab/Kota	Lumpur Tinja (Ribuan m3/hari)				Rata-rata peningkatan/ 10 tahun
	2020	2030	2040	2050	
Nias	15.76	28.28	39.24	48.09	4.69%
Nias Barat	9.03	23.12	35.07	44.71	7.84%
Nias Selatan	35.32	48.02	55.11	60.95	2.04%
Nias Utara	15.2	28.35	39.32	48.13	4.92%
Padang Lawas	31.44	38.7	47.66	54.78	2.04%
Padang Lawas Utara	30.42	38.78	47.64	54.92	2.19%
Pakpak Bharat	5.46	19.75	32.39	42.5	11.89%
Samosir	13.88	27.36	38.52	47.52	5.38%
Serdang Bedagai	67.66	74.69	76.67	78.31	0.51%
Simalungun	95.43	105.53	101.53	98.5	0.13%
Tapanuli Selatan	31.03	42.35	50.58	57.24	2.30%
Tapanuli Tengah	41.92	48.29	55.39	61.1	1.34%
Tapanuli Utara	33.26	43.41	51.43	57.9	2.05%
Toba	20.2	33.77	43.69	51.69	3.83%
Sumatera Utara	1610.14	1841.42	2027.82	2178.49	1.06%

Sumber: KLHS RTRW Provinsi Sumatera Utara 2024-2044

h. Potensi Beban Pencemar Air Sungai

Potensi beban pencemar pada air sungai dapat dilihat dari kadar BOD (Biological Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), dan TSS (Total Suspended Solid). Potensi beban pencemar untuk masing-masing parameter tersebut merupakan akumulasi dari pencemaran yang berasal dari kegiatan domestik, pertanian, maupun penggunaan lahan. Potensi beban pencemar yang berasal dari domestik akan dipengaruhi oleh pola distribusi penduduk dan jaraknya terhadap sungai, beserta beberapa faktor lain seperti rasio ekuivalen kota dan faktor emisi masing-masing zat pencemar.

Gambar 2. 11. Total akumulasi proyeksi potensi beban pencemar sungai di Provinsi Sumatera Utara



Sumber: KLHS RTRW Provinsi Sumatera Utara 2024-2044

Sedangkan potensi beban pencemar yang berasal dari kegiatan pertanian dan penggunaan lahan dipengaruhi oleh jenis tutupan lahan dan faktor emisi masing-masing zat pencemar. Tutupan lahan yang dikategorikan sebagai pertanian yaitu sawah, tegalan, ladang, dan kebun atau perkebunan.

Sedangkan tutupan lahan yang menjadi sumber potensi beban pencemar penggunaan lahan mencakup lahan terbangun dan hutan. Berdasarkan model proyeksi tekanan penduduk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2050, pertumbuhan penduduk dan perubahan penggunaan lahan memiliki kontribusi pada peningkatan potensi beban pencemar. Pola spasial peningkatan potensi beban pencemar air sungai diprediksi akan lebih tinggi pada wilayah yang dihuni oleh penduduk dan mengalami tekanan penduduk yang tinggi. Potensi peningkatan pencemaran tersebut perlu menjadi perhatian dalam hal pengelolaan air limbah domestik sebelum dibuang ke badan air penerima.

Tabel 2. 23. Akumulasi Beban Pencemaran Sungai di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kab/Kota	COD (Kg/hari)	BOD (Kg/hari)	TSS (Kg/hari)
Asahan	301.037,70	201.153,80	13.429,68
Batu Bara	110.995,70	74.265,92	5.193,88
Dairi	113.925,22	76.132,10	4.862,92
Deli Serdang	286.446,17	192.374,68	21.257,41
Humbang Hasundutan	91.130,05	60.874,35	3.099,84
Karo	158.848,12	106.164,65	6.254,83
Kota Binjai	17.108,87	11.572,10	2.010,06
Kota Gunungsitoli	9.323,53	6.312,02	1.138,24
Kota Medan	37.689,45	27.178,68	23.461,68
Kota Padangsidimpuan	19.891,03	13.408,19	1.849,10
Kota Pematangsiantar	20.913,09	14.138,87	2.317,68
Kota Sibolga	1.145,04	829,92	758,77
Kota Tanjung Balai	6.775,26	4.658,27	1.725,59
Kota Tebing Tinggi	6.326,42	4.332,06	1.372,02
Labuhanbatu	243.788,51	162.844,34	10.452,81
Labuhanbatu Selatan	253.397,65	169.149,69	10.669,13
Labuhanbatu Utara	264.374,89	176.481,27	9.499,91
Langkat	341.723,62	228.494,33	17.141,46
Mandailing Natal	257.032,05	171.642,63	8.204,95
Nias	31.495,84	21.092,62	1.491,86
Nias Barat	18.372,84	12.303,22	1.009,34
Nias Selatan	54.298,35	36.401,07	3.101,05
Nias Utara	27.627,94	18.507,77	1.571,42
Padang Lawas	245.689,63	163.975,27	8.661,96
Padang Lawas Utara	246.252,37	164.344,26	9.108,17
Pakpak Bharat	27.638,57	18.458,05	1.053,72
Samosir	82.029,09	54.765,54	1.817,89
Serdang Bedagai	317.513,64	212.073,82	9.009,22
Simalungun	461.072,71	307.929,28	15.001,09
Tapanuli Selatan	163.591,37	109.239,48	4.985,84
Tapanuli Tengah	101.994,78	68.239,07	4.646,23
Tapanuli Utara	116.796,35	78.053,82	4.423,20
Toba	148.056,60	98.819,59	3.127,01
Sumatera Utara	4.584.302,43	3.066.210,73	213.707,98

Sumber: KLHS RTRW Provinsi Sumatera Utara 2024-2044

i. Dampak dan Resiko Bencana

Aspek bencana yang dinilai meliputi bencana longsor, bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gempa bumi, dan tsunami. Resiko bencana diperoleh dari Peta RTRW Sumatera Utara sedangkan dampak yang timbulkan oleh bencana dapat berupa korban jiwa, kerugian materi, kerusakan fasilitas umum maupun pribadi, kerusakan sumber mata pencaharian dan berbagai risiko yang merugikan lainnya.

Longsor

Berdasarkan data spasial mengenai tingkat kerawanan bencana longsor di Provinsi Sumatera Utara, dapat diidentifikasi bahwa mayoritas wilayah provinsi ini, sekitar 76,58% atau setara dengan 5.549.149,67 hektar, dikategorikan memiliki tingkat kerawanan rendah. Proporsi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar lanskap Sumatera Utara relatif stabil terhadap ancaman longsor. Namun demikian, analisis lebih lanjut mengungkapkan adanya zona-zona dengan kerawanan yang signifikan. Area dengan tingkat kerawanan sedang tercatat seluas 203.915,20 hektar (2,81%), sementara yang lebih krusial adalah keberadaan wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi yang mencapai 1.493.194,03 hektar, merepresentasikan 20,61% dari total luas provinsi yang berada di Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan serta Langkat. Daerah rawan longsor ini terbentang pada sisi barat Sumatera Utara serta bagian tengah. Dominan wilayah Sumatera Utara memiliki tingkat kerawanan longsor dengan kategori rendah, seperti terlihat pada Tabel di bawah.

Tabel 2. 24. Tingkat Kerawanan Bencana Longsor di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	Luas (Ha) Tingkat Kerawanan Bencana Longsor						
	Rendah	%	Sedang	%	Tinggi	%	Total
Asahan	349,057.34	6.29	-	-	24,728.31	1.66	373,791.94
Batu Bara	88,812.66	1.60	-	-	-	-	88,814.26
Dairi	130,092.07	2.34	12,100.75	5.93	66,169.09	4.43	208,370.19
Deli Serdang	235,911.35	4.25	2,535.25	1.24	19,679.20	1.32	258,131.30
Humbang Hasundutan	160,189.29	2.89	6,834.66	3.35	68,129.15	4.56	235,159.34
Karo	146,347.87	2.64	8,331.07	4.09	66,010.25	4.42	220,695.92
Kota Binjai	9,377.07	0.17	-	-	-	-	9,377.24
Kota Gunungsitoli	23,968.15	0.43	957.42	0.47	3,541.60	0.24	28,468.07
Kota Medan	27,929.25	0.50	-	-	-	-	27,929.75
Kota Padangsidimpuan	14,041.62	0.25	298.82	0.15	1,589.51	0.11	15,930.35
Kota Pematangsiantar	7,591.91	0.14	-	-	-	-	7,592.05
Kota Sibolga	486.40	0.01	-	-	745.52	0.05	1,231.93
Kota Tanjung Balai	6,007.25	0.11	-	-	-	-	6,007.36
Kota Tebing Tinggi	3,917.00	0.07	-	-	-	-	3,917.07
Labuhanbatu	275,556.29	4.97	-	-	1,684.05	0.11	277,245.31
Labuhanbatu Selatan	305,517.42	5.51	-	-	2,445.76	0.16	307,968.68
Labuhanbatu Utara	289,004.31	5.21	5,559.40	2.73	74,040.17	4.96	368,611.81
Langkat	441,543.93	7.96	717.17	0.35	171,912.01	11.51	614,181.42
Mandailing Natal	419,029.34	7.55	21,942.73	10.76	204,047.72	13.67	645,038.11

Kabupaten/Kota	Luas (Ha) Tingkat Kerawanan Bencana Longsor						
	Rendah	%	Sedang	%	Tinggi	%	Total
Nias	62,536.98	1.13	5,125.16	2.51	14,979.44	1.00	82,645.22
Nias Barat	39,955.98	0.72	3,499.84	1.72	2,814.79	0.19	46,273.05
Nias Selatan	190,050.08	3.42	31,182.97	15.29	31,928.29	2.14	253,180.05
Nias Utara	119,970.55	2.16	1,846.09	0.91	1,906.01	0.13	123,725.72
Padang Lawas	289,403.70	5.22	15,707.00	7.70	86,333.42	5.78	391,457.04
Padang Lawas Utara	296,119.84	5.34	12,467.26	6.11	85,971.51	5.76	394,570.06
Pakpak Bharat	59,123.88	1.07	20,019.78	9.82	57,418.04	3.85	136,572.59
Samosir	148,620.61	2.68	4,051.35	1.99	32,332.86	2.17	185,009.49
Serdang Bedagai	192,660.79	3.47	145.69	0.07	2,113.41	0.14	194,923.44
Simalungun	419,894.84	7.57	1,972.31	0.97	38,277.87	2.56	460,153.55
Tapanuli Selatan	215,289.77	3.88	25,273.48	12.39	189,253.78	12.67	429,833.30
Tapanuli Tengah	154,398.40	2.78	10,322.57	5.06	66,177.97	4.43	230,906.78
Tapanuli Utara	288,341.14	5.20	12,213.31	5.99	89,008.75	5.96	389,574.38
Toba	138,402.60	2.49	811.09	0.40	89,955.54	6.02	229,172.13
Sumatera Utara	5,549,149.67	76.58	203,915.20	2.81	1,493,194.03	20.61	7,246,458.89

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara persentase lebih kecil dari area kerawanan rendah, seperlima dari total wilayah Sumatera Utara menghadapi risiko longsor yang substansial. Konsentrasi area berkerawanan tinggi ini memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan tata ruang, pengembangan infrastruktur, dan implementasi program mitigasi bencana. Identifikasi lokasi-lokasi spesifik dalam kategori kerawanan tinggi ini menjadi fundamental untuk mengoptimalkan upaya pencegahan, sistem peringatan dini, serta respons darurat guna meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul akibat peristiwa longsor di masa mendatang.

Banjir

Berdasarkan data spasial mengenai tingkat kerawanan bencana banjir di Provinsi Sumatera Utara, dapat diidentifikasi bahwa mayoritas wilayah provinsi ini, sekitar 78,72% atau setara dengan 5.704.466,19 hektar, dikategorikan memiliki tingkat kerawanan rendah. Proporsi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar lanskap Sumatera Utara relatif stabil terhadap ancaman banjir. Namun demikian, analisis lebih lanjut mengungkapkan adanya zona-zona dengan kerawanan yang signifikan. Area dengan tingkat kerawanan sedang tercatat seluas 750.471,49 hektar (10,36%), sementara yang lebih krusial adalah keberadaan wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi yang mencapai 791.321,22 hektar, merepresentasikan 10,92% dari total luas provinsi yang berada di Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Langkat. Dominan wilayah Sumatera Utara memiliki kerawanan bencana banjir dengan kategori rendah. Wilayah dengan persentase tertinggi dengan risiko rendah adalah Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Langkat.

Tabel 2. 25. Tingkat Kerawanan Bencana Bahaya Banjir di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	Luas (Ha) Tingkat Kerawanan Bencana Bahaya Banjir						
	Rendah	%	Sedang	%	Tinggi	%	Total
Asahan	236,027.25	4.14	59,234.78	7.89	78,523.62	9.92	373,797.68
Batu Bara	25,279.44	0.44	22,834.37	3.04	40,698.85	5.14	88,816.14
Dairi	196,838.37	3.45	3,740.50	0.50	7,783.05	0.98	208,365.86
Deli Serdang	153,232.46	2.69	45,220.44	6.03	59,672.90	7.54	258,134.52
Humbang Hasundutan	223,968.26	3.93	9,253.89	1.23	1,930.94	0.24	235,158.26
Karo	208,990.17	3.66	9,100.60	1.21	2,598.43	0.33	220,694.07
Kota Binjai	4,832.19	0.08	3,000.14	0.40	1,544.75	0.20	9,377.56
Kota Gunungsitoli	25,608.02	0.45	2,108.54	0.28	750.61	0.09	28,467.90
Kota Medan	7,227.85	0.13	9,020.19	1.20	11,681.20	1.48	27,930.57
Kota Padangsidimpuan	14,890.75	0.26	871.93	0.12	167.27	0.02	15,930.33
Kota Pematangsiantar	5,933.46	0.10	1,595.09	0.21	63.36	0.01	7,592.23
Kota Sibolga	1,101.17	0.02	93.99	0.01	36.75	0.00	1,231.95
Kota Tanjung Balai	310.71	0.01	1,965.95	0.26	3,730.59	0.47	6,007.52
Kota Tebing Tinggi	1,806.46	0.03	1,466.17	0.20	644.36	0.08	3,917.22
Labuhanbatu	110,886.38	1.94	60,312.71	8.04	106,041.26	13.40	277,250.33
Labuhanbatu Selatan	217,371.82	3.81	50,700.75	6.76	39,890.55	5.04	307,973.70
Labuhanbatu Utara	202,688.08	3.55	55,732.95	7.43	110,182.85	13.92	368,614.86
Langkat	444,304.16	7.79	83,393.65	11.11	86,475.30	10.93	614,192.01
Mandailing Natal	581,947.64	10.20	43,282.98	5.77	19,789.18	2.50	645,035.77
Nias	66,314.35	1.16	10,571.99	1.41	5,755.23	0.73	82,644.15
Nias Barat	37,622.98	0.66	5,512.31	0.73	3,135.32	0.40	46,272.00
Nias Selatan	223,169.33	3.91	22,145.70	2.95	7,846.31	0.99	253,168.20
Nias Utara	98,803.50	1.73	16,183.38	2.16	8,735.77	1.10	123,726.54
Padang Lawas	352,340.78	6.18	33,528.11	4.47	5,575.24	0.70	391,454.77
Padang Lawas Utara	361,383.66	6.34	28,215.00	3.76	4,960.00	0.63	394,568.75
Pakpak Bharat	135,388.93	2.37	1,142.05	0.15	30.73	0.00	136,564.23
Samosir	127,766.49	2.24	7,837.96	1.04	49,400.38	6.24	185,008.11
Serdang Bedagai	110,176.08	1.93	44,182.91	5.89	40,560.90	5.13	194,927.71
Simalungun	373,442.88	6.55	58,862.14	7.84	27,840.00	3.52	460,159.41
Tapanuli Selatan	401,999.96	7.05	20,244.33	2.70	7,572.75	0.96	429,826.77
Tapanuli Tengah	183,764.42	3.22	20,853.12	2.78	26,281.40	3.32	230,904.94
Tapanuli Utara	367,057.52	6.43	12,554.56	1.67	9,951.12	1.26	389,571.30
Toba	201,990.67	3.54	5,708.30	0.76	21,470.26	2.71	229,173.53
Sumatera Utara	5,704,466.19	78.72	750,471.49	10.36	791,321.22	10.92	7,246,458.89

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara persentase lebih kecil dari area kerawanan rendah, lebih dari sepersepuluh dari total wilayah Sumatera Utara menghadapi risiko banjir yang substansial. Konsentrasi area berkerawanan sedang dan tinggi ini memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan tata ruang, pengembangan infrastruktur, dan implementasi program mitigasi bencana. Identifikasi lokasi-lokasi spesifik dalam kategori kerawanan tinggi ini menjadi fundamental untuk mengoptimalkan upaya pencegahan, sistem peringatan dini, serta respons darurat guna meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul akibat peristiwa banjir di masa mendatang.

Cuaca Ekstrem

Berdasarkan data spasial mengenai tingkat kerawanan bencana cuaca ekstrem di Provinsi Sumatera Utara, dapat diidentifikasi bahwa mayoritas wilayah provinsi ini, sekitar 60,31% atau setara dengan 4.370.470,84 hektar, dikategorikan memiliki tingkat kerawanan rendah. Proporsi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar lanskap Sumatera Utara relatif stabil

terhadap ancaman cuaca ekstrem. Namun demikian, analisis lebih lanjut mengungkapkan adanya zona-zona dengan kerawanan yang signifikan. Area dengan tingkat kerawanan sedang tercatat seluas 1.488.405,22 hektar (20,54%), sementara yang lebih krusial adalah keberadaan wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi yang mencapai 1.387.382,82 hektar, merepresentasikan 19,15% dari total luas provinsi. Wilayah dengan persentase terbesar yang memiliki kerawanan tinggi adalah Kabupaten Simalungun (12.58%) dan Kabupaten Langkat (12.34%), sementara kabupaten/kota yang paling aman dari cuaca ekstrim adalah Pakpak Bharat, seluruh wilayah ini memiliki risiko dengan tingkat rendah.

Tabel 2. 26. Tingkat Kerawanan Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	Luas (Ha) Tingkat Kerawanan Bencana Cuaca Ekstrim						
	Rendah	%	Sedang	%	Tinggi	%	Total
Asahan	149,774.81	3.43	143,882.95	9.67	80,127.89	5.78	373,798.75
Batu Bara	466.76	0.01	30,638.57	2.06	57,707.32	4.16	88,814.72
Dairi	169,869.56	3.89	18,232.63	1.22	20,259.72	1.46	208,367.02
Deli Serdang	55,949.87	1.28	79,044.27	5.31	123,131.67	8.88	258,132.40
Humbang Hasundutan	224,258.72	5.13	5,603.75	0.38	5,290.63	0.38	235,158.60
Karo	150,430.24	3.44	18,553.18	1.25	51,705.78	3.73	220,693.89
Kota Binjai	-	-	1,710.25	0.11	7,666.82	0.55	9,377.19
Kota Gunungsitoli	27,534.95	0.63	-	-	932.22	0.07	28,467.80
Kota Medan	118.47	0.00	726.32	0.05	27,084.46	1.95	27,929.30
Kota Padangsidempuan	11,067.20	0.25	841.82	0.06	4,020.93	0.29	15,930.26
Kota Pematangsiantar	3.22	0.00	67.67	0.00	7,521.02	0.54	7,591.91
Kota Sibolga	951.91	0.02	4.77	0.00	275.24	0.02	1,231.94
Kota Tanjung Balai	-	-	50.26	0.00	5,956.99	0.43	6,007.25
Kota Tebing Tinggi	-	-	153.63	0.01	3,763.36	0.27	3,917.01
Labuhanbatu	48,289.38	1.10	183,798.78	12.35	45,152.18	3.25	277,253.80
Labuhanbatu Selatan	76,506.14	1.75	204,393.80	13.73	27,063.21	1.95	307,978.64
Labuhanbatu Utara	121,917.62	2.79	201,229.44	13.52	45,456.81	3.28	368,620.19
Langkat	256,843.82	5.88	186,130.91	12.51	171,198.37	12.34	614,191.49
Mandailing Natal	500,759.20	11.46	14,248.15	0.96	130,012.45	9.37	645,032.21
Nias	52,022.98	1.19	4,359.60	0.29	26,259.00	1.89	82,643.06
Nias Barat	37,696.22	0.86	79.95	0.01	8,494.44	0.61	46,271.48
Nias Selatan	251,632.67	5.76	38.90	0.00	1,489.77	0.11	253,167.09
Nias Utara	112,461.34	2.57	1,754.05	0.12	9,507.26	0.69	123,725.34
Padang Lawas	285,803.25	6.54	37,985.78	2.55	67,655.09	4.88	391,453.22
Padang Lawas Utara	225,220.75	5.15	112,965.15	7.59	56,372.74	4.06	394,571.38
Pakpak Bharat	136,561.71	3.12	-	-	-	-	136,564.83
Samosir	164,345.35	3.76	17,002.01	1.14	3,657.46	0.26	185,009.73
Serdang Bedagai	4,899.35	0.11	92,724.27	6.23	97,296.27	7.01	194,926.24
Simalungun	162,994.07	3.73	122,626.72	8.24	174,524.23	12.58	460,156.98
Tapanuli Selatan	374,949.12	8.58	4,780.29	0.32	50,087.63	3.61	429,825.93
Tapanuli Tengah	154,671.72	3.54	3,594.55	0.24	72,632.66	5.24	230,902.72
Tapanuli Utara	384,357.97	8.79	791.96	0.05	4,413.27	0.32	389,572.04
Toba	228,112.47	5.22	390.83	0.03	665.93	0.05	229,174.48
Sumatera Utara	4,370,470.84	60.31	1,488,405.22	20.54	1,387,382.82	19.15	7,246,458.89

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara persentase lebih kecil dari area kerawanan rendah, hampir 40% dari total wilayah Sumatera Utara menghadapi risiko cuaca ekstrem yang substansial. Konsentrasi area berkerawanan sedang dan tinggi ini memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan tata ruang, pengembangan infrastruktur, dan implementasi program mitigasi bencana. Identifikasi lokasi-lokasi spesifik dalam kategori

kerawanan tinggi ini menjadi fundamental untuk mengoptimalkan upaya pencegahan, sistem peringatan dini, serta respons darurat guna meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul akibat peristiwa cuaca ekstrem di masa mendatang.

Gelombang Ekstrim

Gelombang ekstrim terjadi pada wilayah pantai, dengan demikian wilayah-wilayah yang rawan terhadap gelombang ekstrim adalah yang berbatasan dengan pantai. Di antara kabupaten/kota yang berbatasan dengan laut, Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki proporsi wilayah hampir 45% memiliki kerawanan tinggi, kemudian Kabupaten Serdang Bedagai (20.30%), dan Kabupaten Mandailing Natal (9.11%).

Tabel 2. 27. Tingkat Kerawanan Bencana Gelombang Ekstrim di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	Luas (Ha) Tingkat Kerawanan Bencana Gelombang Ekstrim						
	Rendah	%	Sedang	%	Tinggi	%	Total
Asahan	372,702.84	5.17	1,076.88	3.13	5.92	0.31	373,793.95
Batu Bara	87,649.45	1.22	1,051.60	3.06	111.60	5.92	88,816.93
Dairi	208,361.91	2.89	-	-	-	-	208,364.80
Deli Serdang	257,174.14	3.57	918.06	2.67	33.61	1.78	258,132.04
Humbang Hasundutan	235,153.10	3.26	-	-	-	-	235,156.36
Karo	220,689.20	3.06	-	-	-	-	220,692.26
Kota Binjai	9,377.07	0.13	-	-	-	-	9,377.20
Kota Gunungsitoli	27,715.15	0.38	752.02	2.19	-	-	28,469.74
Kota Medan	27,855.87	0.39	0.62	0.00	72.76	3.86	27,929.63
Kota Padangsidempuan	15,929.95	0.22	-	-	-	-	15,930.17
Kota Pematangsiantar	7,591.91	0.11	-	-	-	-	7,592.02
Kota Sibolga	1,069.95	0.01	75.67	0.22	86.30	4.58	1,232.15
Kota Tanjung Balai	6,007.25	0.08	-	-	-	-	6,007.33
Kota Tebing Tinggi	3,917.00	0.05	-	-	-	-	3,917.05
Labuhanbatu	276,353.68	3.83	789.14	2.29	97.53	5.18	277,246.47
Labuhanbatu Selatan	307,963.18	4.27	-	-	-	-	307,967.45
Labuhanbatu Utara	368,112.44	5.11	416.33	1.21	75.11	3.99	368,610.20
Langkat	611,417.60	8.48	2,749.13	7.99	6.38	0.34	614,189.58
Mandailing Natal	642,592.08	8.91	2,256.00	6.56	171.72	9.11	645,035.27
Nias	81,628.49	1.13	1,013.09	2.95	-	-	82,645.66
Nias Barat	44,888.46	0.62	1,382.15	4.02	-	-	46,275.25
Nias Selatan	239,863.41	3.33	13,297.93	38.67	-	-	253,203.33
Nias Utara	120,160.87	1.67	3,561.78	10.36	-	-	123,734.68
Padang Lawas	391,444.12	5.43	-	-	-	-	391,449.55
Padang Lawas Utara	394,558.61	5.47	-	-	-	-	394,564.08
Pakpak Bharat	136,561.71	1.89	-	-	-	-	136,563.60
Samosir	185,004.82	2.57	-	-	-	-	185,007.39
Serdang Bedagai	193,834.95	2.69	702.33	2.04	382.61	20.30	194,924.62
Simalungun	460,145.02	6.38	-	-	-	-	460,151.40
Tapanuli Selatan	429,564.56	5.96	252.47	0.73	-	-	429,823.72
Tapanuli Tengah	225,965.61	3.13	4,092.42	11.90	840.91	44.62	230,913.97
Tapanuli Utara	389,563.20	5.40	-	-	-	-	389,568.60
Toba	229,169.23	3.18	-	-	-	-	229,172.41
Sumatera Utara	7,209,986.82	99.50	34,387.61	0.47	1,884.46	0.03	7,246,458.89

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029

Provinsi Sumatera Utara memiliki dua garis pantai utama dengan karakteristik oseanografi yang berbeda. Kawasan pantai timur berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang umumnya memiliki gelombang yang

lebih tenang karena merupakan perairan dangkal dan terlindungi oleh daratan Semenanjung Malaysia. Sebaliknya, kawasan pantai barat serta gugusan Kepulauan Nias berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, sebuah perairan luas yang dikenal dengan dinamika gelombang yang tinggi dan potensi gelombang ekstrem yang signifikan, termasuk gelombang pasang dan tsunami.

Oleh karena itu, meskipun data menunjukkan persentase kerawanan tinggi yang kecil secara keseluruhan, area-area pesisir di pantai barat dan Kepulauan Nias kemungkinan besar merupakan kontributor utama terhadap kategori kerawanan sedang dan tinggi tersebut. Hal ini mengimplikasikan bahwa upaya mitigasi bencana gelombang ekstrem harus difokuskan secara spesifik pada wilayah-wilayah pesisir yang terpapar langsung Samudera Hindia, dengan mempertimbangkan karakteristik batimetri, topografi pantai, serta kepadatan populasi di area tersebut. Identifikasi mikro-zonasi kerawanan di wilayah-wilayah pesisir ini menjadi fundamental untuk mengoptimalkan sistem peringatan dini, perencanaan evakuasi, dan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana guna meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul akibat peristiwa gelombang ekstrem di masa mendatang.

Kebakaran Hutan dan Lahan

Berdasarkan data spasial mengenai tingkat kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Sumatera Utara, dapat diidentifikasi bahwa mayoritas wilayah provinsi ini, sekitar 55,12% atau setara dengan 3.994.515,14 hektar, dikategorikan memiliki tingkat kerawanan rendah. Proporsi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar lanskap Sumatera Utara relatif stabil terhadap ancaman karhutla. Namun demikian, analisis lebih lanjut mengungkapkan adanya zona-zona dengan kerawanan yang signifikan. Area dengan tingkat kerawanan sedang tercatat seluas 2.105.707,22 hektar (29,06%), sementara yang lebih krusial adalah keberadaan wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi yang mencapai 1.146.036,53 hektar, merepresentasikan 15,82% dari total luas provinsi. Wilayah yang memiliki kerawanan tinggi secara persentase terdapat di Labuhanbatu Selatan (21.19%), Labuhanbatu (14.37%) dan Padang Lawas Utara (10.70%). Pada sisi barat Sumatera Utara wilayah yang memiliki kerawanan tinggi terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Tabel 2. 28. Tingkat Kerawanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	Luas (Ha) Tingkat Kerawanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan						
	Rendah	%	Sedang	%	Tinggi	%	Total
Asahan	71,994.92	1.80	215,834.15	10.25	85,956.58	7.50	373,797.70
Batu Bara	18,188.80	0.46	61,061.12	2.90	9,562.74	0.83	88,816.01
Dairi	198,060.65	4.96	9,108.70	0.43	1,192.57	0.10	208,367.30
Deli Serdang	134,522.35	3.37	112,758.14	5.35	10,845.31	0.95	258,134.53
Humbang Hasundutan	201,000.82	5.03	23,065.89	1.10	11,086.38	0.97	235,159.22
Karo	197,362.97	4.94	21,763.71	1.03	1,562.52	0.14	220,695.17
Kota Binjai	6,367.59	0.16	3,009.48	0.14	-	-	9,377.38
Kota Gunungsitoli	27,583.10	0.69	884.07	0.04	-	-	28,467.90
Kota Medan	25,493.93	0.64	2,314.93	0.11	120.39	0.01	27,929.99
Kota Padangsidempuan	15,566.15	0.39	363.81	0.02	-	-	15,930.36
Kota Pematangsiantar	7,591.91	0.19	-	-	-	-	7,592.10
Kota Sibolga	1,158.55	0.03	72.99	0.00	0.38	0.00	1,231.95
Kota Tanjung Balai	4,229.73	0.11	1,777.51	0.08	-	-	6,007.44
Kota Tebing Tinggi	2,342.39	0.06	1,556.84	0.07	17.76	0.00	3,917.13
Labuhanbatu	36,611.57	0.92	75,886.15	3.60	164,742.63	14.37	277,244.87
Labuhanbatu Selatan	11,346.80	0.28	53,765.69	2.55	242,850.67	21.19	307,965.99
Labuhanbatu Utara	91,252.17	2.28	155,115.79	7.37	122,235.92	10.67	368,613.53
Langkat	304,184.12	7.62	250,980.45	11.92	59,008.54	5.15	614,192.64
Mandailing Natal	425,811.38	10.66	150,147.58	7.13	69,060.83	6.03	645,037.59
Nias	57,586.97	1.44	24,945.00	1.18	109.61	0.01	82,644.20
Nias Barat	36,031.80	0.90	9,208.20	0.44	1,030.61	0.09	46,271.95
Nias Selatan	186,445.67	4.67	57,982.72	2.75	8,732.94	0.76	253,168.76
Nias Utara	55,960.86	1.40	64,652.47	3.07	3,109.32	0.27	123,727.12
Padang Lawas	133,975.75	3.35	151,921.18	7.21	105,547.19	9.21	391,454.69
Padang Lawas Utara	130,339.65	3.26	141,536.34	6.72	122,682.64	10.70	394,568.62
Pakpak Bharat	131,417.72	3.29	4,834.34	0.23	309.64	0.03	136,565.23
Samosir	131,312.54	3.29	42,841.71	2.03	10,850.58	0.95	185,010.15
Serdang Bedagai	37,439.98	0.94	131,117.20	6.23	26,362.71	2.30	194,927.06
Simalungun	238,730.59	5.98	187,167.24	8.89	34,247.19	2.99	460,159.88
Tapanuli Selatan	342,463.36	8.57	59,865.70	2.84	27,487.96	2.40	429,828.45
Tapanuli Tengah	173,029.19	4.33	45,326.95	2.15	12,542.79	1.09	230,905.42
Tapanuli Utara	351,738.14	8.81	27,780.80	1.32	10,044.25	0.88	389,573.32
Toba	207,373.01	5.19	17,060.35	0.81	4,735.87	0.41	229,175.23
Sumatera Utara	3,994,515.14	55.12	2,105,707.22	29.06	1,146,036.53	15.82	7,246,458.89

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara persentase lebih kecil dari area kerawanan rendah, hampir 45% dari total wilayah Sumatera Utara menghadapi risiko karhutla yang substansial. Konsentrasi area berkerawanan sedang dan tinggi ini memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan tata ruang, pengelolaan lahan, dan implementasi program mitigasi bencana. Identifikasi lokasi-lokasi spesifik dalam kategori kerawanan tinggi ini menjadi fundamental untuk mengoptimalkan upaya pencegahan, sistem peringatan dini, serta respons darurat guna meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul akibat peristiwa karhutla di masa mendatang.

Kekeringan

Berdasarkan data spasial mengenai tingkat kerawanan bencana kekeringan di Provinsi Sumatera Utara, dapat diidentifikasi bahwa mayoritas wilayah provinsi ini, sekitar 85,31% atau setara dengan 6.181.625,06 hektar, dikategorikan memiliki tingkat kerawanan rendah. Proporsi yang sangat dominan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar lanskap Sumatera Utara relatif stabil terhadap ancaman kekeringan. Namun demikian, analisis lebih lanjut mengungkapkan adanya zona-zona dengan kerawanan sedang yang signifikan, mencakup 1.064.633,8 hektar atau sekitar 14,69% dari total luas wilayah.

Tabel 2. 29. Tingkat Kerawanan Bencana Kekeringan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	Luas (Ha) Tingkat Kerawanan Bencana Kekeringan						Total
	Rendah	%	Sedang	%	Tinggi	%	
Asahan	373,785.65	6.05	-	-	-	-	373,791.70
Batu Bara	88,812.66	1.44	-	-	-	-	88,814.09
Dairi	208,361.91	3.37	-	-	-	-	208,365.29
Deli Serdang	30,636.28	0.50	227,489.53	21.37	-	-	258,147.67
Humbang Hasundutan	208,496.49	3.37	26,656.61	2.50	-	-	235,158.97
Karo	220,680.48	3.57	8.71	0.00	-	-	220,692.77
Kota Binjai	2,048.01	0.03	7,329.07	0.69	-	-	9,377.80
Kota Gunungsitoli	28,467.17	0.46	-	-	-	-	28,467.63
Kota Medan	48.62	0.00	27,880.63	2.62	-	-	27,931.86
Kota Padangsidimpuan	10,572.73	0.17	5,357.22	0.50	-	-	15,930.63
Kota Pematangsiantar	7,591.91	0.12	-	-	-	-	7,592.03
Kota Sibolga	1,231.92	0.02	-	-	-	-	1,231.94
Kota Tanjung Balai	6,007.25	0.10	-	-	-	-	6,007.35
Kota Tebing Tinggi	3,917.00	0.06	-	-	-	-	3,917.06
Labuhanbatu	277,240.35	4.48	-	-	-	-	277,244.83
Labuhanbatu Selatan	307,963.18	4.98	-	-	-	-	307,968.16
Labuhanbatu Utara	368,603.88	5.96	-	-	-	-	368,609.85
Langkat	453,180.44	7.33	160,992.67	15.12	-	-	614,195.56
Mandailing Natal	407,679.98	6.60	237,339.82	22.29	-	-	645,048.69
Nias	82,641.58	1.34	-	-	-	-	82,642.91
Nias Barat	46,270.61	0.75	-	-	-	-	46,271.36
Nias Selatan	253,161.33	4.10	-	-	-	-	253,165.43
Nias Utara	120,897.07	1.96	2,825.58	0.27	-	-	123,724.87
Padang Lawas	384,563.75	6.22	6,880.37	0.65	-	-	391,450.99
Padang Lawas Utara	389,453.86	6.30	5,104.75	0.48	-	-	394,565.39
Pakpak Bharat	98,411.97	1.59	38,149.74	3.58	-	-	136,566.88
Samosir	185,004.82	2.99	-	-	-	-	185,007.82
Serdang Bedagai	82,021.10	1.33	112,898.79	10.60	-	-	194,931.82
Simalungun	440,739.58	7.13	19,405.43	1.82	-	-	460,153.97
Tapanuli Selatan	287,305.84	4.65	142,511.19	13.39	-	-	429,835.06
Tapanuli Tengah	187,095.22	3.03	43,803.72	4.11	-	-	230,906.08
Tapanuli Utara	389,563.20	6.30	-	-	-	-	389,569.50
Toba	229,169.23	3.71	-	-	-	-	229,172.94
Sumatera Utara	6,181,625.06	85.31	1,064,633.8	14.69	-	-	7,246,458.8

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029

Keberadaan hampir 15% wilayah dengan kerawanan sedang memerlukan perhatian serius dalam perencanaan tata ruang dan pengelolaan

sumber daya air. Identifikasi lokasi-lokasi spesifik dalam kategori kerawanan sedang ini menjadi fundamental untuk mengoptimalkan upaya mitigasi, seperti pengembangan sistem irigasi yang efisien, konservasi air, serta program adaptasi bagi sektor-sektor yang rentan terhadap kekeringan, guna meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul akibat peristiwa kekeringan di masa mendatang.

Gempa bumi

Berdasarkan data spasial mengenai tingkat kerawanan bencana gempa bumi di Provinsi Sumatera Utara, dapat diidentifikasi bahwa sekitar 52,31% atau setara dengan 3.790.622,45 hektar wilayah provinsi ini dikategorikan memiliki tingkat kerawanan rendah. Meskipun demikian, proporsi yang signifikan berada pada kategori kerawanan sedang dan tinggi. Area dengan tingkat kerawanan sedang mencakup 2.038.647,38 hektar (28,13%), sementara wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi mencapai 1.416.989,05 hektar (19,55%). Secara kolektif, hampir separuh (47,68%) dari total luas wilayah Sumatera Utara menghadapi risiko gempa bumi yang substansial. Daerah-daerah yang rawan gempa ini terdapat di Kabupaten Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Gunungsitoli, Padangsidimpuan, Sibolga, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Toba, yakni daerah-daerah yang berada pada jalur Patahan Semangko.

Tabel 2. 30. Tingkat Kerawanan Bencana Gempa Bumi di Kabupateb/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	Luas (Ha) Tingkat Kerawanan Bencana Gempa Bumi						
	Rendah	%	Sedang	%	Tinggi	%	Total
Asahan	373,232.22	9.85	553.43	0.03	-	-	373,795.53
Batu Bara	88,812.66	2.34	-	-	-	-	88,815.00
Dairi	1,388.77	0.04	58,622.53	2.88	148,350.61	10.47	208,364.83
Deli Serdang	235,183.90	6.20	22,941.90	1.13	-	-	258,133.13
Humbang Hasundutan	28,628.77	0.76	142,827.82	7.01	63,696.52	4.50	235,160.86
Karo	58,176.20	1.53	124,379.01	6.10	38,133.98	2.69	220,696.83
Kota Binjai	71.83	0.00	9,305.25	0.46	-	-	9,377.53
Kota Gunungsitoli	134.92	0.00	-	-	28,332.25	2.00	28,467.17
Kota Medan	17,712.62	0.47	10,216.63	0.50	-	-	27,930.21
Kota Padangsidimpuan	-	-	1,276.32	0.06	14,653.63	1.03	15,930.01
Kota Pematangsiantar	7,591.91	0.20	-	-	-	-	7,592.11
Kota Sibolga	182.04	0.00	1,048.57	0.05	1.31	0.00	1,231.97
Kota Tanjung Balai	6,007.25	0.16	-	-	-	-	6,007.41
Kota Tebing Tinggi	3,917.00	0.10	-	-	-	-	3,917.10
Labuhanbatu	276,515.72	7.29	724.63	0.04	-	-	277,247.68
Labuhanbatu Selatan	306,191.16	8.08	1,772.01	0.09	-	-	307,971.34
Labuhanbatu Utara	368,377.79	9.72	226.09	0.01	-	-	368,613.61
Langkat	469,071.72	12.37	144,541.80	7.09	559.59	0.04	614,192.57
Mandailing Natal	152,245.25	4.02	373,386.74	18.32	119,387.81	8.43	645,042.13
Nias	170.43	0.00	-	-	82,471.14	5.82	82,641.58
Nias Barat	145.21	0.00	-	-	46,125.40	3.26	46,270.61
Nias Selatan	1,686.48	0.04	-	-	251,474.86	17.75	253,161.38
Nias Utara	729.59	0.02	-	-	122,993.06	8.68	123,722.67

Kabupaten/Kota	Luas (Ha) Tingkat Kerawanan Bencana Gempa Bumi						
	Rendah	%	Sedang	%	Tinggi	%	Total
Padang Lawas	159,210.09	4.20	216,874.69	10.64	15,359.35	1.08	391,458.96
Padang Lawas Utara	246,969.42	6.52	126,663.27	6.21	20,925.92	1.48	394,571.34
Pakpak Bharat	7,734.28	0.20	101,602.61	4.98	27,224.82	1.92	136,566.90
Samosir	19,750.95	0.52	74,918.28	3.67	90,335.59	6.38	185,009.02
Serdang Bedagai	194,919.89	5.14	-	-	-	-	194,925.04
Simalungun	410,732.06	10.84	39,716.70	1.95	9,696.26	0.68	460,157.80
Tapanuli Selatan	116,883.86	3.08	195,043.28	9.57	117,889.89	8.32	429,829.68
Tapanuli Tengah	26,317.41	0.69	150,613.62	7.39	53,967.91	3.81	230,907.02
Tapanuli Utara	48,443.61	1.28	190,177.77	9.33	150,941.83	10.65	389,573.80
Toba	163,487.45	4.31	51,214.44	2.51	14,467.35	1.02	229,176.06
Sumatera Utara	3,790,622.45	52.31	2,038,647.38	28.13	1,416,989.05	19.55	7,246,458.89

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029

Kondisi geologis ini dimana kawasan Sumatera Utara merupakan bagian integral dari Cincin Api Pasifik (*Ring of Fire*) dan dilintasi oleh beberapa sesar patahan aktif, seperti Sesar Semangko dan juga kawasan Megatrust. Keberadaan sesar-sesar aktif ini secara langsung berkorelasi dengan tingginya potensi kejadian gempa bumi tektonik di wilayah tersebut. Oleh karena itu, area-area yang teridentifikasi dalam kategori kerawanan sedang dan tinggi kemungkinan besar berlokasi di sepanjang jalur sesar aktif atau di zona-zona yang secara geologis rentan terhadap transmisi energi seismik. Implikasi dari kerawanan ini sangat besar, terutama bagi perencanaan pembangunan, infrastruktur, dan mitigasi bencana. Diperlukan upaya komprehensif dalam pemetaan mikrozonasi, penerapan standar bangunan tahan gempa, edukasi publik mengenai kesiapsiagaan, serta pengembangan sistem peringatan dini yang efektif untuk meminimalisir dampak destruktif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas seismik di masa mendatang.

Tsunami

Berdasarkan data spasial mengenai tingkat kerawanan bencana tsunami di Provinsi Sumatera Utara, dapat diidentifikasi bahwa mayoritas mutlak wilayah provinsi ini, sekitar 99,30% atau setara dengan 7.195.809,45 hektar, dikategorikan memiliki tingkat kerawanan rendah. Proporsi yang sangat dominan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar daratan Sumatera Utara relatif aman dari dampak langsung tsunami. Namun demikian, analisis lebih lanjut mengungkapkan adanya zona-zona dengan kerawanan yang signifikan, meskipun dalam persentase yang sangat kecil. Area dengan tingkat kerawanan sedang tercatat seluas 4.339,72 hektar (0,06%), sementara wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi mencapai 46.109,72 hektar, merepresentasikan 0,64% dari total luas provinsi. Tingkat kerawanan tsunami beserta luas wilayah untuk tingkat kerawanan rendah, sedang dan tinggi serta persebarannya di tunjukkan pada Tabel di bawah.

Tabel 2. 31. Tingkat Kerawanan Bencana Tsunami di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	Luas (Ha) Tingkat Kerawanan Bencana Tsunami						
	Rendah	%	Sedang	%	Tinggi	%	Total
Asahan	373,785.65	5.19	-	-	-	-	373,790.85
Batu Bara	88,812.66	1.23	-	-	-	-	88,813.89
Dairi	208,361.91	2.90	-	-	-	-	208,364.81
Deli Serdang	258,125.81	3.59	-	-	-	-	258,129.39
Humbang Hasundutan	235,153.10	3.27	-	-	-	-	235,156.36
Karo	220,689.20	3.07	-	-	-	-	220,692.26
Kota Binjai	9,377.07	0.13	-	-	-	-	9,377.20
Kota Gunungsitoli	26,639.44	0.37	109.46	2.52	1,718.27	3.73	28,470.06
Kota Medan	27,929.25	0.39	-	-	-	-	27,929.63
Kota Padangsidimpuan	15,929.95	0.22	-	-	-	-	15,930.17
Kota Pematangsiantar	7,591.91	0.11	-	-	-	-	7,592.02
Kota Sibolga	1,210.60	0.02	0.56	0.01	20.76	0.05	1,231.95
Kota Tanjung Balai	6,007.25	0.08	-	-	-	-	6,007.33
Kota Tebing Tinggi	3,917.00	0.05	-	-	-	-	3,917.05
Labuhanbatu	277,240.35	3.85	-	-	-	-	277,244.20
Labuhanbatu Selatan	307,963.18	4.28	-	-	-	-	307,967.46
Labuhanbatu Utara	368,603.88	5.12	-	-	-	-	368,609.00
Langkat	614,173.11	8.54	-	-	-	-	614,181.64
Mandailing Natal	639,065.79	8.88	848.02	19.54	5,105.99	11.07	645,048.22
Nias	77,449.75	1.08	430.34	9.92	4,761.48	10.33	82,652.57
Nias Barat	40,499.82	0.56	465.70	10.73	5,305.09	11.51	46,281.90
Nias Selatan	238,254.55	3.31	655.08	15.09	14,251.70	30.91	253,179.74
Nias Utara	114,729.17	1.59	510.37	11.76	8,483.12	18.40	123,736.01
Padang Lawas	391,444.12	5.44	-	-	-	-	391,449.56
Padang Lawas Utara	394,558.61	5.48	-	-	-	-	394,564.09
Pakpak Bharat	136,561.71	1.90	-	-	-	-	136,563.61
Samosir	185,004.82	2.57	-	-	-	-	185,007.40
Serdang Bedagai	194,919.89	2.71	-	-	-	-	194,922.60
Simalungun	460,145.02	6.39	-	-	-	-	460,151.41
Tapanuli Selatan	429,505.77	5.97	34.69	0.80	276.57	0.60	429,823.80
Tapanuli Tengah	223,426.69	3.10	1,285.50	29.62	6,186.75	13.42	230,931.66
Tapanuli Utara	389,563.20	5.41	-	-	-	-	389,568.61
Toba	229,169.23	3.18	-	-	-	-	229,172.42
Sumatera Utara	7,195,809.45	99.30	4,339.72	0.06	46,109.72	0.64	7,246,458.89

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029

Kondisi ini menjadi krusial ketika dikaitkan dengan informasi geografis tambahan mengenai potensi megathrust di sepanjang wilayah Kepulauan Nias. Meskipun persentase area kerawanan tinggi secara keseluruhan tergolong kecil, keberadaan potensi megathrust di Samudera Hindia, khususnya di dekat Kepulauan Nias, mengindikasikan bahwa wilayah pesisir barat Sumatera Utara dan pulau-pulau terluarnya memiliki risiko tinggi terhadap kejadian tsunami yang dipicu oleh gempa bumi megathrust. Peristiwa tsunami Aceh tahun 2004 dan Nias tahun 2005 menjadi bukti nyata akan dampak destruktif dari aktivitas megathrust di wilayah ini. Oleh karena itu, area-area yang teridentifikasi dalam kategori kerawanan sedang dan tinggi kemungkinan besar terkonsentrasi di wilayah pesisir barat Sumatera Utara dan Kepulauan Nias. Hal ini mengimplikasikan bahwa upaya mitigasi bencana tsunami harus difokuskan secara spesifik pada wilayah-wilayah pesisir yang

terpapar langsung Samudera Hindia, dengan mempertimbangkan karakteristik batimetri, topografi pantai, serta kepadatan populasi di area tersebut. Identifikasi mikro-zonasi kerawanan di wilayah-wilayah pesisir ini menjadi fundamental untuk mengoptimalkan sistem peringatan dini, perencanaan evakuasi, dan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana guna meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul akibat peristiwa tsunami di masa mendatang.

j. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dapat dilihat dari tumpang tindih perizinan dalam pemanfaatan sumber daya alam di Sumatera Utara. Adapun tumpang tindih perizinan yang ditinjau adalah perzinan bidang kehutanan, perizinan bidang perkebunan dan perizinan bidang pertambangan. Masing-masing perizinan tersebut ditumpang susunkan untuk mengetahui ada tidaknya tumpang tindih. Perizinan yang tumpang tindih dan saling bertentangan merupakan indikasi pemanfaatan sumber daya alam yang tidak efisien.

Tabel 2. 32. Jenis dan Luas Perizinan Kehutanan di Sumatera Utara

No	Jenis Izin	Luas (Ha)	%
1	Izin Hutan Adat	2,445.73	0.29
2	Izin Hutan Desa	4,237.37	0.50
3	Izin Hutan Kemasyarakatan	40,171.63	4.77
4	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	3,231.74	0.38
5	Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam	245,011.49	29.11
6	Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri	347,686.89	41.31
7	Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Rakyat	9,580.60	1.14
8	Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus	4,399.06	0.52
9	Pelepasan Hutan Untuk Pertanian	151,289.54	17.98
10	Pelepasan Hutan Untuk Transmigrasi	33,515.20	3.98
Luas Total		841,569.24	100.0

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029

Terdapat tujuh jenis perizinan kehutanan di Sumatera Utara, satu jenis kawasan hutan untuk tujuan khusus dan dua jenis pelepasan kawan hutan dengan total luas 841,569.24 (Ha) atau 27.85% dari total luas hutan di Sumatera Utara. Perizinan yang paling luas adalah untuk Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (Hutan Tanaman Industri) mencapai 41.31% dari total perizinan, diikuti oleh Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Karu (Hutan Alam) mencapai 29.11% dari total perizinan, sedangkan yang paling kecil adalah Izin Hutan Adat, hanya mencapai 2,445.73 Ha (0.29%), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut. Perizinan kehutanan dominan berada pada dataran tinggi dan bagian barat Sumatera Utara.

Tabel 2. 33. Tumpang Tindih Izin Kehutanan dengan Izin Pertambangan

Jenis Izin Kehutanan	Luas (Ha)Tumpang Tindih Izin Pertambangan			
	IUP	KK	WIUP	Total
Izin Hutan Kemasyarakatan		3,039.84		3,039.84
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	203.44	781.79	4.17	989.40
Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam		22,185.49		22,185.49
Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri	11.47	5,918.58	0.28	5,930.32
Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Rakyat		0.01		0.01
Pelepasan Hutan Untuk Pertanian			15.11	15.11
Total	214.91	31,925.72	19.55	32,160.18

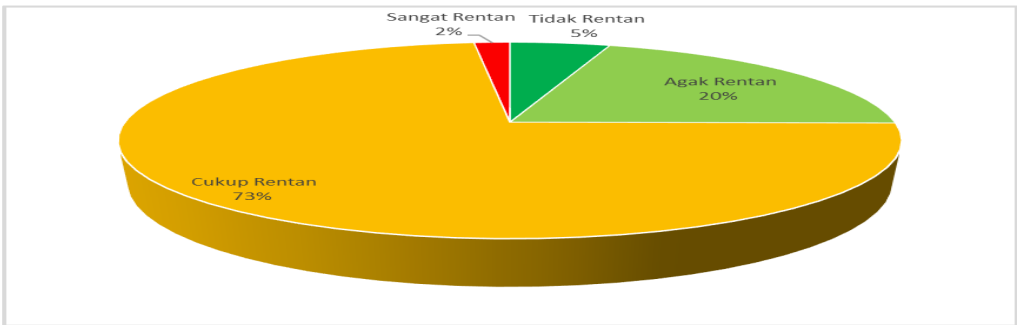
Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029

Izin kehutanan dengan izin pertambangan juga banyak yang tumpang tindih, namun mengingat pertambangan dapat dilakukan dengan cara tambang bawah tanah, maka tumpang tindih kedua perizinan ini dimungkinkan terjadi. Walau demikian jika pertambangan dilakukan secara terbuka, hal tersebut dapat merusak pemanfaatan izin kehutanan seperti pemanfaatan hasil hutan berupa kayu. Jenis izin kehutanan yang tumpang tindih dengan izin pertambangan ditunjukkan pada Tabel.

k. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Kerentanan terhadap Perubahan Iklim

Terkait dengan kondisi iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Perubahan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data dan informasi kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia. Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Peta persebaran kerentanan perubahan iklim di Sumatera Utara, ditunjukkan pada Gambar di bawah.

Gambar 2. 12. Proporsi Luas Kerentanan Perubahan Iklim Provinsi Sumatera Utara



Sumber : KLHS RPJMD Sumatera Utara 2025-2029

Berdasarkan data SIDIK KLHK 73% wilayah Sumatera Utara cukup rentan terhadap perubahan iklim, agak rentan 20%, tidak rentan 5% dan ada 2% sangat rentan. Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara memiliki luasan paling besar untuk daerah yang tidak rentan, sedangkan Kabupaten Nias Selatan, Nias Utara dan Nias merupakan kabupaten dengan luas kerentanan perubahan iklim sangat rentan terbesar.

1. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Kawasan merupakan salah satu lokus perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati. Ekosistem hutan yang sangat beragam, mejadi rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.6609/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Sumatera Utara, luas kawasan hutan beserta fungsinya adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel di bawah.

Tabel 2. 34. Jenis dan Luas Hutan Berdasarkan Fungsinya di Sumatera Utara

No.	Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi di Sumatera Utara	Luas (Ha)
1	Taman Nasional (TN)	244,640.39
2	Hutan Lindung (HL)	1,201,304.40
3	Cagar Alam (CA)	16.64
4	Hutan Suaka Alam (HAS)	140,506.40
5	Suaka Margasatwa (SM)	40,073.40
6	Taman Buru (TB)	44.94
7	Taman Wisata Alam (TWA)	215.64
8	Hutan Produksi (HP)	679,657.42
9	Hutan Produksi Tetap (HPT)	623,790.39
10	Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)	91,092.97
	Luas Total	3,021,342.59

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) merupakan arahan makro indikatif sebagai acuan untuk penyusunan rencana pembangunan, rencana investasi dan rencana kerja usaha berbagai skala geografis, jangka waktu dan fungsi-fungsi pokok kawasan hutan. Tekanan terhadap sumber daya hutan telah menyebabkan semakin terdegradasinya sumber daya hutan. RKTN memberikan arah pengurusan hutan ke depan melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara adil dan berkelanjutan, potensi multi fungsi hutan untuk kesejahteraan masyarakat serta untuk mencapai posisi penting Kehutanan Indonesia di tingkat nasional, regional dan global di tahun 2030 melalui optimalisasi dan pemantapan kawasan hutan, peningkatan produktifitas dan nilai sumber daya hutan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, peningkatan riset dan teknologi kehutanan, mewujudkan

kelembagaan bagi tata kelola kehutanan secara efisien dan efektif serta mengoptimalkan komparatif kehutanan Indonesia.

Berdasarkan RKTN Tahun 2019, yang diperoleh dari BPKHTL Wilayah I Medan, di Sumatera Utara terdapat 3 juta hektar lebih kawasan hutan dengan berbagai fungsi serta peruntukan, sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah.

Tabel 2. 35. RKTN 2019 di Sumatera Utara

Fungsi Hutan	Prioritas Rehabilitasi	Konservasi	Non Kehutanan	Pemanfaatan Hutan berbasis Korporasi	Pemanfaatan Hutan berbasis Masyarakat	Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut	Total
CA	1.44	15.20					16.64
HL	196,629.40		119,414.25	48,792.00	75,309.15	762,386.11	1,202,530.91
HP	15,014.13		48,781.60	371,186.74	213,633.88	33,236.29	681,852.64
HPK	291.51		51,378.12	69.90	7,872.44	19,569.78	79,181.76
HPT	37,118.68		3,445.84	277,411.35	285,094.84	39,266.19	642,336.91
HSA	9,519.04	130,933.58					140,452.62
KK		0.00					0.00
SM	5,197.81	31,102.08					36,299.89
Tahura	0.06	0.28					0.34
TB		44.94					44.94
TN	5,019.66	233,109.27					238,128.93
Total	268,791.74	395,205.35	223,019.82	697,459.99	581,910.31	854,458.38	3,020,845.59
%	8.89	13.08	7.38	23.08	19.26	28.28	100

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029

Berdasarkan RKTN tersebut, dominan kawasan hutan diperuntukan untuk perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut yakni 28.28% disusul oleh pemanfaatan hutan berbasis korporasi mencapai 23.08%, sedangkan untuk konservasi hanya mencapai 13.08%. Perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut, serta peruntukan untuk konservasi sangat berperan penting untuk mendukung ketahanan keanekaragaman hayati. Ditinjau dari aspek fungsi hutan, kawasan hutan di Sumatera Utara dominan merupakan hutan lindung mencapai 1.2 juta lebih.

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Pada era modern ini, isu ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan semakin menjadi perhatian utama dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan. Ketiga aspek tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan hidup manusia serta mendukung perekonomian suatu negara. Ketahanan energi mencakup kemampuan untuk memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, sedangkan ketahanan air berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang efisien dan merata. Sementara itu, kemandirian pangan merupakan upaya untuk memproduksi pangan secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada. Ketiga hal ini saling terkait dan menjadi kunci utama

dalam menciptakan suatu sistem yang dapat menjaga keseimbangan alam serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 2. 36. Indikator Ketahanan Energi dan Air Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Listrik yang Didistribusikan	GWh	11.192,85	11.748,40	12.059,81	12.472,84	N/A
Kapasitas Produksi Potensial Perusahaan Air Bersih	liter per detik	11.782	14.336	14.270	14.078	N/A
Konsumsi Listrik per Kapita	kWh/kapita	N/A	778	810	800	N/A
Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik	Persen	98,72	99,16	99,49	99,52	99,73
Penggunaan Gas Rumah Tangga	Rasio	85,37	88,12	91,20	92,62	N/A
Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak	Persen	89,68	90,89	92,13	92,19	92,94

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas mengenai indikator ketahanan energi dan air di Provinsi Sumatera Utara, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait perkembangan sektor ini. Distribusi listrik di Sumatera Utara meningkat dari 11.192,85 GWh pada tahun 2020 menjadi 12.472,84 GWh pada tahun 2023. Meskipun data tahun 2024 belum tersedia, tren ini menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dalam pasokan energi listrik. Konsumsi listrik per kapita juga meningkat dari 778 kWh pada tahun 2021 menjadi 810 kWh pada tahun 2022, sebelum sedikit menurun menjadi 800 kWh pada tahun 2023. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh efisiensi energi yang lebih baik atau perubahan dalam pola konsumsi masyarakat.

Persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik meningkat dari 98,72% pada tahun 2020 menjadi 99,73% pada tahun 2024, menunjukkan hampir seluruh rumah tangga di provinsi ini telah memiliki akses terhadap listrik. Penggunaan gas rumah tangga juga menunjukkan tren positif, meningkat dari rasio 85,37 pada tahun 2020 menjadi 92,62 pada

tahun 2023, mencerminkan pergeseran menuju sumber energi yang lebih bersih dan efisien.

Kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih meningkat dari 11.782 liter per detik pada tahun 2020 menjadi 14.078 liter per detik pada tahun 2023. Meskipun terjadi sedikit penurunan dari puncaknya pada tahun 2021 sebesar 14.336 liter per detik, kapasitas ini tetap lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, menunjukkan peningkatan kapasitas penyediaan air bersih.

Akses rumah tangga terhadap air minum layak juga mengalami peningkatan dari 89,68% pada tahun 2020 menjadi 92,94% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperluas layanan air bersih kepada masyarakat, yang penting untuk kesehatan dan kesejahteraan.

Tabel 2. 37. Indikator Kemandirian Pangan Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	71,84	72,25	71,22	75,97	73,35
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Persen	6,73	6,33	8,70	8,60	7,54

Sumber: *satudata.badanpangan.go.id dan BPS Indonesia, 2025*

Indeks Ketahanan Pangan menunjukkan tren yang fluktuatif namun secara keseluruhan mengalami peningkatan dari 71,84 pada 2020 menjadi 75,97 pada 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat ketahanan pangan, meskipun ada penurunan kecil pada 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki ketahanan pangan di tingkat provinsi, meskipun tantangan tetap ada.

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan mengalami fluktuasi yang lebih jelas. Angka prevalensi ini mengalami kenaikan dari 6,73% pada 2020 menjadi 8,70% pada 2022, namun kemudian menurun menjadi 7,54% pada 2024. Meskipun terdapat penurunan pada tahun 2024, angka prevalensi yang relatif tinggi ini menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan konsumsi pangan yang cukup bagi seluruh penduduk, dan menunjukkan perlunya intervensi lebih lanjut untuk mengatasi ketidacukupan pangan.

Di Sumatera Utara, data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, IKP mengalami penurunan menjadi 71,22 dari 72,25 pada tahun sebelumnya, sementara Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan meningkat tajam menjadi 8,70% dari 6,33%. Fenomena ini mengindikasikan bahwa penurunan ketahanan pangan berdampak langsung pada peningkatan jumlah penduduk

yang mengalami kekurangan konsumsi pangan. Sebaliknya, pada tahun 2023, IKP meningkat signifikan menjadi 75,97, dan meskipun Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan hanya sedikit menurun menjadi 8,60%, tren ini menunjukkan bahwa perbaikan dalam ketahanan pangan mulai berdampak positif pada konsumsi pangan masyarakat. Pada tahun 2024, IKP sedikit menurun menjadi 73,35, namun PoU menurun lebih signifikan menjadi 7,54%, menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi dalam IKP, upaya-upaya perbaikan ketahanan pangan mulai menunjukkan hasil yang lebih nyata dalam menurunkan ketidacukupan konsumsi pangan.

Tabel 2. 38. Perbandingan Indikator Kemandirian Pangan Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Persen)	Indeks Ketahanan Pangan
Nias	6,24	72,41
Mandailing Natal	7,10	70,54
Tapanuli Selatan	7,68	77,29
Tapanuli Tengah	6,66	73,81
Tapanuli Utara	6,64	78,14
Toba	7,72	84,33
Labuhan Batu	7,07	76,96
Asahan	7,64	76,65
Simalungun	8,34	82,42
Dairi	6,72	82,50
Karo	6,13	82,28
Deli Serdang	7,46	86,20
Langkat	8,82	79,92
Nias Selatan	7,81	65,87
Humbang Hasundutan	6,18	81,16
Pakpak Bharat	6,13	75,32
Samosir	5,31	80,35
Serdang Bedagai	8,46	85,35
Batu Bara	7,45	78,37
Padang Lawas Utara	6,16	75,14
Padang Lawas	5,53	76,75
Labuhan Batu Selatan	6,65	57,85
Labuhan Batu Utara	7,08	80,30
Nias Utara	6,73	73,17
Nias Barat	6,96	65,35
Kota Sibolga	8,53	81,03
Kota Tanjung Balai	6,30	74,59
Kota Pematangsiantar	7,24	89,82
Kota Tebing Tinggi	9,54	77,31
Kota Medan	7,27	90,25
Kota Binjai	7,63	88,22
Kota Padangsidimpuan	6,99	71,32
Kota Gunungsitoli	7,43	66,12

Sumber: satudata.badanpangan.go.id dan BPS Indonesia, 2025

Secara umum, terdapat hubungan negatif yang konsisten antara kedua indikator tersebut, di mana semakin tinggi prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan suatu daerah, maka kecenderungan nilai indeks ketahanan pangannya semakin rendah. Hal ini tercermin pada beberapa kabupaten/kota

seperti Nias Selatan dan Labuhan Batu Selatan yang memiliki prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan relatif tinggi (masing-masing 7,81% dan 6,65%) dan indeks ketahanan pangan yang rendah (65,87 dan 57,85). Sebaliknya, kota-kota seperti Medan dan Pematangsiantar menunjukkan pencapaian optimal, dengan indeks ketahanan pangan masing-masing sebesar 90,25 dan 89,82, serta prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi (7,27% dan 7,24%). Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan ketahanan pangan daerah sangat berkorelasi dengan penurunan ketidakcukupan konsumsi pangan masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa pengecualian, seperti Kota Tebing Tinggi yang mencatat prevalensi tertinggi sebesar 9,54 persen tetapi tetap memiliki indeks ketahanan pangan di atas rata-rata provinsi (77,31), yang mengisyaratkan adanya determinan lain yang turut memengaruhi ketahanan pangan, seperti stabilitas harga, infrastruktur distribusi, dan efektivitas program intervensi pangan daerah. Dengan demikian, upaya penguatan ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota perlu mempertimbangkan kedua indikator ini secara terintegrasi dan kontekstual.

Keterkaitan ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor. Pertama, peningkatan IKP mencerminkan perbaikan dalam produksi dan distribusi pangan, yang meningkatkan ketersediaan pangan di pasar. Kedua, kebijakan pemerintah yang mendukung aksesibilitas pangan, seperti subsidi pangan dan program bantuan sosial, dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap pangan bergizi. Ketiga, edukasi tentang gizi dan pola konsumsi sehat dapat meningkatkan pemanfaatan pangan yang tersedia secara optimal oleh masyarakat.

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan yang berkelanjutan, karena kualitas lingkungan secara langsung mempengaruhi kesehatan, kesejahteraan, dan produktivitas masyarakat. Pemeliharaan dan perbaikan kondisi lingkungan hidup yang baik tidak hanya berhubungan dengan perlindungan alam dan keanekaragaman hayati, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab. Dalam upaya menciptakan kehidupan yang harmonis antara manusia dan alam, penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan memperhatikan dampak lingkungan serta mengimplementasikan solusi ramah lingkungan. Bagian ini akan mengulas berbagai indikator dan langkah-langkah yang diambil untuk menjaga dan

meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam.

Perubahan capaian indikator lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh faktor struktural, kebijakan intervensi, dan tekanan ekologis yang bersifat multisektor. Secara umum, capaian ini mencerminkan adanya kemajuan dalam beberapa aspek pembangunan berkelanjutan, namun juga menyoroti tantangan sistemik dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel berikut mengenai indikator lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara, dapat dianalisis beberapa perkembangan penting terkait kualitas lingkungan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari 69,90 pada 2020 menjadi 74,11 pada 2022, meskipun sedikit menurun menjadi 72,80 pada 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan lingkungan hidup di provinsi tersebut, meskipun perlu terus diwaspadai agar tidak terjadi penurunan kualitas yang lebih besar di masa depan.

Tabel 2. 39. Indikator Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	69,90	71,15	74,11	72,80	73,96
Indeks Kualitas Air	Indeks	53,33	53,72	61,20	60,27	61,09
Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,22	89,55	89,69	90,90	92,26
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	47,69	48,89	48,90	49,77	50,26
Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	73,87	81,43	85,19	68,56	70,82
Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak	Persen	81,08	82,02	82,30	84,18	85,73
Timbulan Sampah Tahunan	Juta Ton	1,335	2,092	2,062	1,895	1,045
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Ribu Ton	570,75	806,31	921,35	911,12	601,45

Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2025

Peningkatan awal tersebut dapat dikaitkan dengan penguatan kerangka kebijakan lingkungan pasca-Undang-Undang Cipta Kerja, yang memberikan ruang bagi efisiensi birokrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Di sisi lain, penurunan pada tahun 2023 berpotensi mencerminkan beban lingkungan yang meningkat akibat pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip ekonomi hijau. Secara teoretis, hal ini

sejalan dengan pandangan Daly (1996) mengenai *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan kapasitas daya dukung ekologis yang sering kali menimbulkan degradasi lingkungan jika tidak diimbangi dengan inovasi teknologi ramah lingkungan. Indeks Kualitas Air juga mengalami peningkatan yang cukup baik dari 60,27 pada 2023 menjadi 61,09 pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan perbaikan meskipun masih ada tantangan terkait dengan pengelolaan dan perlindungan sumber daya air di wilayah ini. Di sisi lain, Indeks Kualitas Udara menunjukkan angka yang sangat tinggi dan stabil, dengan sedikit peningkatan dari 90,90 pada 2023 menjadi 92,26 pada 2024, yang menandakan bahwa kualitas udara di provinsi ini cenderung baik dan terjaga dengan baik.

Pada Indeks Kualitas Tutupan Lahan, terdapat sedikit fluktuasi, dengan angka meningkat dari 47,69 pada 2020 menjadi 59,80 pada 2023 dan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 50,26. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang lebih baik dalam menjaga dan memperbaiki tutupan lahan, yang penting untuk kelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Sedangkan Indeks Kualitas Air Laut menunjukkan fluktuasi yang lebih signifikan, dengan peningkatan dari 73,87 pada 2020 menjadi 85,19 pada 2022, namun kemudian mengalami penurunan menjadi 68,56 pada 2023 dan meningkat lagi pada tahun 2024 menjadi 70,82. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kualitas air laut, yang bisa disebabkan oleh faktor polusi laut atau perubahan kondisi lingkungan laut. Secara keseluruhan, meskipun ada peningkatan pada beberapa indikator kualitas lingkungan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama pada kualitas air laut dan tutupan lahan, yang memerlukan upaya lebih lanjut dalam pengelolaannya.

2.1.1.6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai potensi besar terjadinya bencana alam, seperti bencana gempa bumi dan letusan gunung api. Hal ini disebabkan karena Provinsi Sumatera Utara mempunyai 4 (empat) ruas patahan yang menjadi sumber gempa, yakni patahan Renun, patahan Toru, patahan Angkola dan patahan Barumon. Selain itu, di wilayah Sumatera Utara terdapat beberapa gunung api aktif. Salah satunya adalah Gunung Sinabung yang meletus sejak tahun 2013 dan menyebabkan masyarakat mengungsi hingga saat ini.

Berdasarkan Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, bencana yang paling banyak terjadi di Provinsi Sumatera Utara adalah bencana tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan dan banjir. Dari angka kejadian tersebut, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan daerah yang paling banyak terjadi bencana alam yang mencatatkan 80 dan 50 kejadian, Kabupaten Karo dan Kabupaten Mandailing Natal juga masuk daerah tertinggi yang dilanda bencana alam dengan mencatatkan 48 dan 41 kejadian, selanjutnya Kabupaten Langkat dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan masing masing tercatat mengalami bencana alam sebanyak 31 kejadian, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Padang Lawas Utara juga masing masing 29 kejadian, Kabupaten Dairi dan Labuhanbatu 28 kejadian, Kabupaten Samosir 26 kejadian, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Padang Lawas 22 kejadian, Kota Medan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Asahan masing- masing tercatat 21 kejadian, Kota Pematangsiantar 20 kejadian, Kota Sibolga 17 kejadian, Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Tapanuli Utara 15 kejadian, Kabupaten Toba 12 kejadian, Tapanuli Tengah, Kabupaten Serdang Berdagai, Kabupaten Batubara 10 kejadian. Padangsidimpuan 7, Humbang Hasundutan dan Binjai 6, Tebing Tinggi 5, Tanjung Balai 4, Nias Selatan 3, Nias, Nias Utara, Nias Barat 2 kejadian bencana alam. Namun demikian di tahun ini angka ini terus menurun (semakin baik) dari tahun ke tahun.

Tabel 2. 40. Jumlah Bencana Alam di Provinsi Sumatera Utara

Jenis Bencana	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Longsor	8	23	6	19	10
Banjir	53	83	71	112	101
Kekeringan	-	-	-	-	1
Kebakaran hutan dan Lahan	9	13	-	41	25
Cuaca Ekstrem	18	54	28	44	26
Gelombang Pasang/Abrasi	1	-	-	-	1
Gempa Bumi	1	-	2	1	-
Letusan Gunung Berapi	2	-	-	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel berikut mengenai jumlah bencana alam di Provinsi Sumatera Utara, dapat dianalisis bahwa terdapat fluktuasi jumlah kejadian bencana alam yang bervariasi dari tahun ke tahun. Secara umum, banjir menjadi jenis bencana alam yang paling sering terjadi, dengan jumlah kejadian yang terus meningkat dari 53 kasus pada 2020 menjadi 112 kasus pada 2023, meskipun menurun sedikit menjadi 101 kasus pada 2024. Peningkatan jumlah bencana banjir ini mencerminkan adanya masalah terkait dengan pengelolaan drainase, curah hujan yang

tinggi, serta perubahan iklim yang mempengaruhi intensitas dan frekuensinya.

Jenis bencana tanah longsor mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan jumlah kejadian yang meningkat pada tahun 2021 (23 kasus) namun menurun drastis pada tahun 2022 (6 kasus), dan kembali meningkat pada tahun 2023 (19 kasus). Kebakaran hutan dan lahan juga menunjukkan angka yang cukup tinggi pada 2023 dengan 41 kejadian, berbanding dengan 9 kejadian pada 2020, yang mencerminkan peningkatan aktivitas kebakaran yang perlu diwaspadai terkait dengan faktor pengelolaan lahan dan kondisi cuaca yang ekstrem.

Selain itu, cuaca ekstrem mengalami penurunan signifikan dari 54 kejadian pada 2021 menjadi 26 kejadian pada 2024, yang dapat menunjukkan perubahan pola cuaca yang lebih stabil, namun tetap perlu diperhatikan untuk mencegah potensi dampak yang lebih besar. Gelombang pasang/abrasi serta gempa bumi tercatat dengan kejadian yang relatif rendah, sementara letusan gunung berapi menunjukkan angka yang sangat fluktuatif, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat penurunan jumlah bencana alam pada beberapa jenis, jenis bencana seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan masih menjadi masalah utama yang memerlukan perhatian lebih dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Perubahan nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Sumatera Utara dalam periode 2020 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan penurunan risiko secara bertahap, yakni dari 145,18 pada tahun 2020 menjadi 139,84 pada tahun 2024. Tren penurunan ini mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas adaptif dan mitigatif pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya terhadap potensi ancaman bencana yang bersifat alamiah maupun antropogenik. Analisis ini relevan jika dikaitkan dengan pendekatan Disaster Risk Reduction (DRR) yang menekankan pentingnya investasi jangka panjang dalam pengurangan kerentanan dan peningkatan ketangguhan masyarakat terhadap bencana.

Tabel 2. 41. Indikator Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana	Indeks	145,18	143,83	142,51	140,65	139,84
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	22.07	24.99	25,16	29,05	25,47

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari sisi kebijakan, tren penurunan IRB juga merefleksikan efektivitas pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Risiko Bencana (RAD PRB) dan penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dukungan lintas sektor melalui mekanisme pendanaan seperti Dana Siap Pakai dan Dana Desa untuk kegiatan mitigasi struktural dan non-struktural juga turut memperkuat pencapaian ini. Konvergensi antar kebijakan sektoral di bidang lingkungan hidup, kehutanan, energi, dan infrastruktur turut memperkuat resiliensi daerah terhadap tekanan iklim dan kejadian ekstrem.

Namun demikian, meskipun IRB menunjukkan tren menurun, nilainya yang masih berada pada angka di atas 130 mengindikasikan bahwa tingkat risiko bencana di Sumatera Utara tetap signifikan. Pendekatan berbasis risiko yang adaptif dan partisipatif masih perlu dikembangkan, termasuk peningkatan partisipasi komunitas lokal dalam sistem kewaspadaan dini dan pemulihan berbasis komunitas (community-based disaster management). Selain itu, tantangan baru akibat perubahan iklim global, seperti intensifikasi curah hujan dan naiknya muka air laut, menuntut inovasi dalam perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dan pengembangan infrastruktur hijau.

Data capaian indikator penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020 hingga 2024. Terlihat adanya tren peningkatan dari tahun 2020 sebesar 22,07 menjadi 29,05 pada tahun 2023, meskipun pada tahun 2022 dan 2024 terjadi sedikit penurunan masing-masing menjadi 25,16 dan 25,47. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penurunan emisi gas rumah kaca mengalami fluktuasi namun secara umum menunjukkan peningkatan capaian yang signifikan selama periode tersebut, dengan puncak realisasi pada tahun 2023. Data ini mencerminkan komitmen Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola lingkungan hidup dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Tabel 2. 42. Indeks Ketahanan Daerah dan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Risiko Bencana
Nias	Tidak menilai	211,70
Mandailing Natal	0,29	214,80
Tapanuli Selatan	0,53	141,20
Tapanuli Tengah	0,37	181,49
Tapanuli Utara	0,35	115,33
Toba	0,27	107,20
Labuhanbatu	0,28	151,20
Asahan	0,35	148,57

Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Risiko Bencana
Simalungun	0,22	80,07
Dairi	0,43	116,00
Karo	0,48	110,22
Deli Serdang	Tidak menilai	121,26
Langkat	0,27	142,62
Nias Selatan	0,24	193,97
Humbang Hasundutan	0,33	127,20
Pakpak Bharat	0,42	105,26
Samosir	0,30	114,00
Serdang Bedagai	0,34	124,00
Batu Bara	0,27	143,20
Padang Lawas Utara	0,30	137,70
Padang Lawas	Tidak menilai	152,76
Labuhanbatu Selatan	0,25	131,20
Labuhanbatu Utara	0,29	155,20
Nias Utara	Tidak menilai	214,00
Nias Barat	Tidak menilai	210,80
Kota Sibolga	0,33	165,92
Kota Tanjung Balai	0,37	107,26
Kota Pematangsiantar	0,24	91,20
Kota Tebing Tinggi	0,44	90,05
Kota Medan	0,70	84,50
Kota Binjai	0,22	103,20
Kota Padangsidempuan	0,38	122,57
Kota Gunungsitoli	0,39	199,01
Sumatera Utara	0,29	139,84

Sumber: Badan Penganggulangan Bencana Daerah, 2025

Berdasarkan data indeks ketahanan daerah dan risiko bencana Provinsi Sumatera Utara tahun 2024, dapat dianalisis bahwa tingkat ketahanan daerah di berbagai kabupaten/kota sangat bervariasi. Beberapa daerah seperti Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, dan Kota Medan memiliki nilai indeks ketahanan yang relatif tinggi, menunjukkan kapasitas yang lebih baik dalam menghadapi bencana. Sebaliknya, beberapa daerah seperti Nias, Deli Serdang, Padang Lawas, Nias Utara, dan Nias Barat tidak memiliki penilaian indeks ketahanan, yang bisa mengindikasikan kurangnya data atau kapasitas ketahanan yang belum terukur dengan baik.

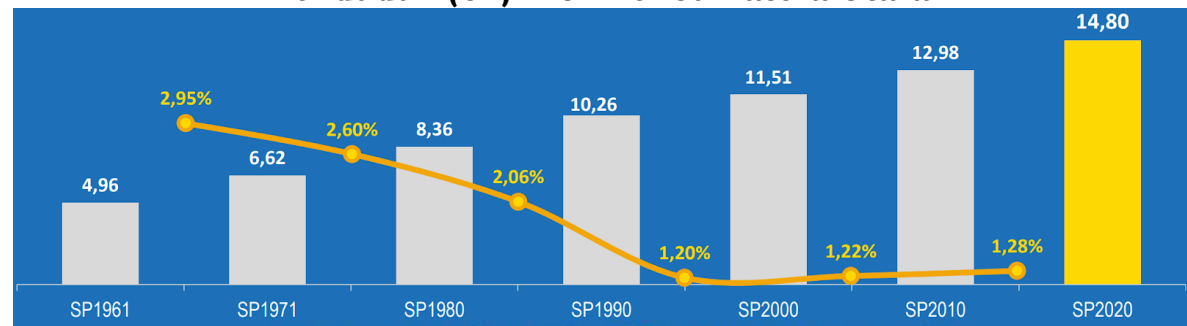
Sementara itu, risiko bencana di sebagian besar daerah masih cukup tinggi, terutama di Mandailing Natal (214,80), Nias Selatan (193,97), dan Kota Gunungsitoli (199,01), yang menandakan bahwa potensi terjadinya bencana di wilayah tersebut cukup besar dan membutuhkan perhatian khusus. Meskipun Kota Medan memiliki indeks ketahanan tertinggi (0,70), risiko bencananya relatif rendah (84,50), menandakan adanya upaya mitigasi yang efektif. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara memiliki indeks ketahanan daerah rata-rata 0,29 dengan risiko bencana rata-rata sebesar 139,84. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa daerah dengan

ketahanan yang baik, risiko bencana secara umum masih cukup tinggi dan memerlukan peningkatan upaya mitigasi serta kesiapsiagaan di seluruh kabupaten/kota untuk mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi.

2.1.1.7. Demografi

Sumatera Utara merupakan Provinsi keempat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2020, penduduk Tahun 2023 berjumlah 15.386.640 jiwa. Sementara itu hasil sensus penduduk pada tahun 2020 mencapai 14.799.361 jiwa. Provinsi Sumatera Utara sebesar 1,28 persen per tahun pada tahun 2020–2023 menjadi 1,43 persen per tahun. Pada Tahun 2023 penduduk Sumatera Utara berjumlah 15.386.640 jiwa yang terdiri dari 7.721.314 jiwa penduduk laki-laki dan 7.665.326 jiwa perempuan atau dengan ratio jenis kelamin/sex ratio sebesar 100,73.

Gambar 2. 13. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Hasil Sensus Penduduk (SP) Provinsi Sumatera Utara



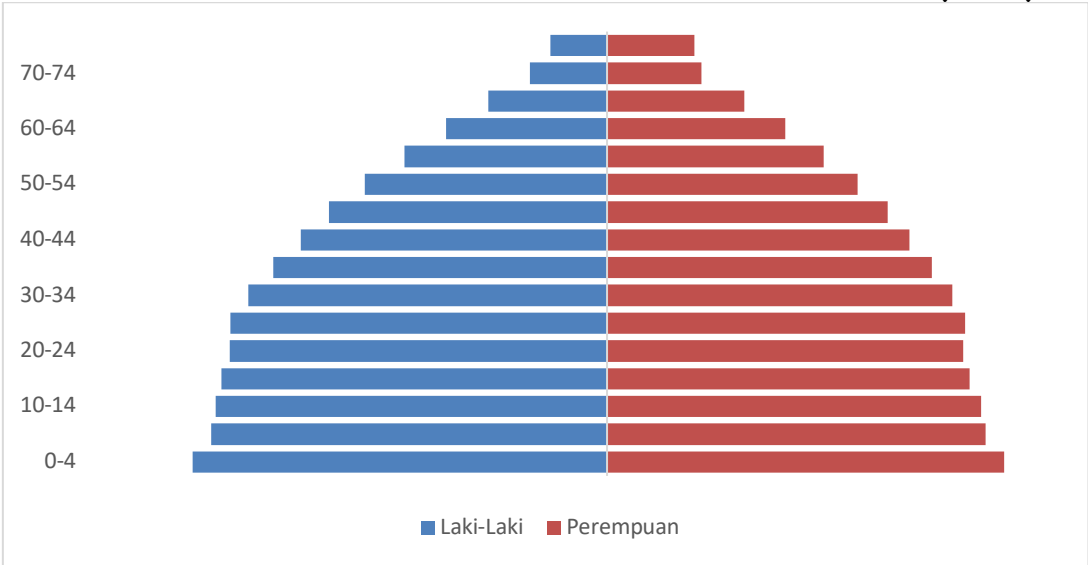
Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020 Sumatera Utara, BPS Provinsi Sumatera Utara

Pertumbuhan penduduk ini meningkat terus sejak 1990, namun jika dilihat kembali dapat diketahui bahwa angkanya tidak sebesar periode 1961-1980. Namun pertumbuhan yang terus meningkat ini dapat diwaspadai dalam rangka untuk tetap sesuai dengan program/target perencanaan penduduk (keluarga berencana). Sumatera Utara merupakan Provinsi keempat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kota Medan merupakan wilayah dengan penduduk terbanyak di Provinsi Sumatera Utara, yakni 16,4% dari total penduduk. Kemudian, Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah penduduk dengan proporsi 13,1%, Kabupaten Langkat 7,1%, dan Kabupaten Simalungun 6,6%. Masing-masing kabupaten/kota tersebut adalah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk di atas 1 juta jiwa atau sekitar 6,5% dari total penduduk Sumatera Utara.

Meskipun didominasi usia produktif, saat ini Sumatera Utara belum mengalami bonus demografi, seperti yang ditampilkan dalam piramida

penduduk Sumatera Utara yang masih termasuk tipe ekspansif. Piramida tipe ekspansif dapat dilihat dari pola piramida yang melebar di bagian bawah dan cembung di bagian tengah yang merupakan penduduk usia muda kemudian Sementara di bagian atas yang merupakan penduduk usia tua meruncing. Jumlah penduduk usia 0-4 tahun adalah yang terbanyak, yakni mencapai 1.417.593 jiwa.

Gambar 2. 14. Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 (Jiwa)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2025

Kabupaten/kota yang jumlah penduduknya kurang dari 1 persen dari total penduduk Sumatera Utara (atau kurang dari 150 ribu jiwa) adalah Kabupaten Nias, Kabupaten Samosir, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Pakpak Bharat. Kabupaten Pakpak Bharat adalah kabupaten yang paling sedikit penduduknya sekitar kurang dari 60 ribu jiwa.

Tabel 2. 43. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten Kota	Penduduk menurut Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
Nias	79.577	76.052	155.629
Mandailing Natal	253.287	252.073	505.360
Tapanuli Selatan	157.066	159.420	316.486
Tapanuli Tengah	195.707	199.203	394.910
Tapanuli Utara	163.148	163.845	326.993
Toba	108.319	108.401	216.720
Labuhan Batu	256.398	264.147	520.545
Asahan	402.582	411.138	813.720
Simalungun	522.307	529.538	1.051.845
Dairi	164.649	165.937	330.586
Karo	214.935	211.536	426.471
Deli Serdang	1.018.951	1.029.529	2.048.480
Langkat	534.008	544.668	1.078.676
Nias Selatan	193.712	196.245	389.957
Humbang Hasundutan	103.236	103.840	207.076
Pakpak Bharat	27.792	28.420	56.212
Samosir	71.487	71.584	143.071
Serdang Bedagai	343.438	348.200	691.638

Kabupaten Kota	Penduduk menurut Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
Batu Bara	217.395	219.965	437.360
Padang Lawas Utara	137.622	142.973	280.595
Padang Lawas	139.811	140.953	280.764
Labuhanbatu Selatan	165.064	171.513	336.577
Labuanbatu Utara	201.651	207.098	408.749
Nias Utara	79.814	78.862	158.676
Nias Barat	49.893	47.358	97.251
Sibolga	45.645	46.102	91.747
Tanjungbalai	91.715	93.932	185.647
Pematangsiantar	140.048	137.006	277.054
Tebing Tinggi	90.959	90.018	180.977
Medan	1.248.681	1.237.602	2.486.283
Binjai	153.589	153.581	307.170
Padangsidempuan	118.361	121.706	240.067
Gunungsitoli	74.279	70.954	145.233
Sumatera Utara	7.765.126	7.823.399	15.588.525

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2025

Kepadatan penduduk pada tahun 2020 adalah 203 jiwa per km² kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 212 jiwa per km². Kota-kota otonom seperti Sibolga, Tanjungbalai, Pematangsiantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, Padangsidempuan, dan Gunungsitoli adalah daerah dengan kepadatan penduduk di atas 500 jiwa per km². Kota Medan adalah daerah yang paling padat dan bahkan sudah mendekati 9.000 jiwa per km², disusul dengan Kota Sibolga dengan kepadatan mendekati 8.000 jiwa per km².

Tabel 2. 44. Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Kepadatan Penduduk	ribu Jiwa	202,78	204,66	208,60	212,34	215,13
Rasio Jenis Kelamin	Persen	100,61	100,67	100,73	100,73	100,75

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan pembagian wilayah di Provinsi Sumatera Utara, wilayah pantai barat menunjukkan kepadatan penduduk yang bervariasi mulai dari rendah hingga sedang dengan kecenderungan rasio jenis kelamin lebih banyak laki-laki, yang mungkin berkaitan dengan aktivitas ekonomi berbasis pesisir. Wilayah pantai timur memiliki kepadatan penduduk yang cenderung tinggi terutama di kota-kota besar seperti Medan dan Binjai, dengan rasio jenis kelamin yang relatif seimbang, mencerminkan struktur urban yang beragam. Di wilayah pegunungan, kepadatan penduduk umumnya rendah hingga sedang dengan rasio gender yang seimbang, menggambarkan kondisi geografis yang menantang dan populasi yang stabil. Sementara itu, di wilayah kepulauan Nias, kepadatan penduduk termasuk sedang dengan rasio jenis kelamin yang cenderung didominasi perempuan, yang bisa dipengaruhi oleh migrasi laki-laki atau faktor sosial budaya setempat.

Tabel 2. 45. Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
	jiwa/km ²	persen
Nias	172,46	95,57
Mandailing Natal	77,19	99,52
Tapanuli Selatan	75,34	101,50
Tapanuli Tengah	171,13	101,79
Tapanuli Utara	83,94	100,43
Toba	94,57	100,08
Labuhan Batu	187,76	103,02
Asahan	217,70	102,13
Simalungun	228,59	101,38
Dairi	158,66	100,78
Karo	193,25	98,42
Deli Serdang	793,61	101,04
Langkat	175,68	102,00
Nias Selatan	154,03	101,31
Humbang Hasundutan	88,06	100,59
Pakpak Bharat	41,16	102,26
Samosir	77,33	100,14
Serdang Bedagai	354,84	101,39
Batu Bara	492,44	101,18
Padang Lawas Utara	71,12	103,89
Padang Lawas	71,73	100,82
Labuhanbatu Selatan	109,29	103,91
Labuanbatu Utara	110,89	102,70
Nias Utara	128,17	98,81
Nias Barat	209,49	94,92
Sibolga	7.998,17	101,00
Tanjungbalai	3.090,41	102,42
Pematangsiantar	3.649,34	97,83
Tebing Tinggi	4.620,30	98,97
Medan	8.902,16	99,11
Binjai	3.275,78	99,99
Padangsidempuan	1.507,03	102,83
Gunungsitoli	695,95	95,52
Sumatera Utara	215,13	100,75

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2025

Sumatera Utara mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan dengan peningkatan jumlah penduduk hingga mencapai 15,6 juta jiwa pada tahun 2024, dengan laju pertumbuhan yang melambat namun tetap positif. Struktur usia penduduk menunjukkan basis yang cukup lebar di kelompok usia muda, menandakan potensi bonus demografi. Namun, ketimpangan kepadatan penduduk antar kabupaten/kota cukup besar, dengan kota Medan dan Sibolga memiliki kepadatan yang sangat tinggi dibandingkan daerah lain. Rasio jenis kelamin cenderung seimbang, sedikit lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Untuk perencanaan pembangunan jangka menengah 2025-2029, fokus perlu diarahkan pada pengelolaan urbanisasi dan

penyediaan infrastruktur di daerah dengan kepadatan tinggi, peningkatan pelayanan dasar dan fasilitas untuk kelompok usia muda agar potensi demografi dapat dimanfaatkan optimal, serta pengembangan wilayah yang padat penduduk untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan secara merata. Strategi pembangunan juga harus memperhatikan distribusi gender dan kebutuhan spesifik tiap daerah untuk hasil pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.1.7.1 Proyeksi Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara diproyeksikan terus mengalami peningkatan dari tahun 2025 hingga 2030. Pada tahun 2025 jumlahnya mencapai 15.785,84 ribu jiwa, dan meningkat secara konsisten setiap tahun hingga mencapai 16.703,60 ribu jiwa pada tahun 2030. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya tren demografis positif yang mengindikasikan peningkatan populasi secara bertahap. Hal ini dapat memberikan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang memadai.

Rasio ketergantungan juga menunjukkan tren kenaikan dari 48,75% pada tahun 2025 menjadi 49,26% pada tahun 2030. Rasio ketergantungan menggambarkan besarnya beban ekonomi penduduk usia produktif untuk menopang penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia). Peningkatan ini, meskipun tidak terlalu tajam, dapat mengindikasikan bahwa populasi usia non-produktif perlahan meningkat. Hal ini dapat berdampak pada perencanaan kebijakan sosial dan ekonomi, terutama dalam sektor ketenagakerjaan dan perlindungan sosial.

Tabel 2. 46. Proyeksi Penduduk Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Penduduk	ribu Jiwa	15.785,84	15.978,64	16.167,04	16.350,77	16.529,66	16.703,60
Rasio Ketergantungan	Persen	48,75	48,85	48,95	49,06	49,16	49,26
Rasio Jenis Kelamin	Persen	100,76	100,75	100,74	100,73	100,72	100,70
Total Fertility Rate	Persen	2,35	2,34	2,32	2,30	2,29	2,27

Sumber: Proyeksi Penduduk Provinsi Sumatera Utara 2020-2035, BPS

Rasio jenis kelamin menunjukkan penurunan tipis dari 100,76 pada tahun 2025 menjadi 100,70 pada tahun 2030. Rasio ini menunjukkan bahwa jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan dalam setiap 100 penduduk perempuan. Meskipun fluktuasinya kecil, data ini tetap relevan

untuk kebijakan gender dan pembangunan inklusif yang merata, termasuk dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan layanan kesehatan.

TFR atau Angka Kelahiran Total menunjukkan penurunan dari 2,35 pada tahun 2025 menjadi 2,27 pada tahun 2030. Penurunan ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita dalam masa reproduksinya semakin menurun. Tren ini bisa menjadi indikasi keberhasilan program keluarga berencana dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan perencanaan keluarga. Namun, jika penurunan ini berlanjut dalam jangka panjang, bisa menjadi perhatian untuk menjaga keseimbangan demografis dan produktivitas penduduk.

Jumlah penduduk usia 0–14 tahun mengalami sedikit fluktuasi tetapi cenderung meningkat secara perlahan dari 4.161,47 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 4.204,94 ribu jiwa pada tahun 2030. Kenaikan ini relatif kecil dan stabil, menunjukkan bahwa meskipun angka kelahiran sedikit menurun (sejalan dengan tren TFR di Tabel 2.11), jumlah anak-anak tetap bertumbuh secara perlahan. Ini mengisyaratkan bahwa kebutuhan layanan pendidikan dasar dan kesehatan anak masih akan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan.

Tabel 2. 47. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur Provinsi Sumatera Utara

Tahun	0 - 14 Tahun	15 - 64 Tahun	65+ tahun	Jumlah
2025	4.161,47	10.612,33	1.012,04	15.785,84
2026	4.156,83	10.752,31	1.069,50	15.978,64
2027	4.185,03	10.853,98	1.128,03	16.167,04
2028	4.193,56	10.969,72	1.187,49	16.350,77
2029	4.199,91	11.081,96	1.247,79	16.529,66
2030	4.204,94	11.677,04	1.623,09	16.703,60

Sumber: Proyeksi Penduduk Provinsi Sumatera Utara 2020-2035, BPS

Penduduk usia produktif meningkat signifikan dari 10.612,33 ribu jiwa pada 2025 menjadi 11.677,04 ribu jiwa pada tahun 2030. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya potensi bonus demografi di Sumatera Utara, di mana proporsi penduduk usia kerja lebih besar dibandingkan yang non-produktif. Kondisi ini merupakan peluang besar bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan syarat tersedianya lapangan kerja, pendidikan, dan pelatihan vokasi yang memadai.

Kelompok lansia menunjukkan pertumbuhan yang paling signifikan secara persentase, dari 1.012,04 ribu jiwa pada 2025 menjadi 1.623,09 ribu jiwa pada 2030. Ini adalah indikasi nyata dari proses penuaan penduduk (*aging population*), yang dapat menjadi tantangan besar bagi sektor kesehatan, jaminan sosial, dan pelayanan kesejahteraan lansia. Pemerintah perlu mulai

merancang kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lansia, termasuk infrastruktur ramah lansia dan sistem pensiun yang berkelanjutan.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, namun juga menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perekonomian, akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Secara ekonomi, Sumut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti kelapa sawit, karet, dan hasil pertanian lainnya, yang dapat mendorong sektor pertanian dan perkebunan sebagai penyumbang utama perekonomian. Namun, ketergantungan pada sektor primer ini perlu diimbangi dengan pengembangan sektor industri dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih beragam. Meski begitu, masih ada ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, dengan daerah-daerah tertentu yang mengalami kesulitan dalam mengakses pasar, pendidikan, dan layanan kesehatan. Akses terhadap pendidikan di Sumut juga menjadi salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun terdapat sejumlah universitas dan sekolah tinggi di kota-kota besar seperti Medan, banyak daerah terpencil yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan potensi pembangunan jangka panjang.

Di sektor kesehatan, meskipun beberapa rumah sakit dan fasilitas kesehatan sudah tersedia di kota-kota besar, wilayah-wilayah terpencil sering kali kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Ini berisiko meningkatkan angka kemiskinan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan akses transportasi yang terbatas.

Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, listrik, dan konektivitas internet, juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan infrastruktur di daerah-daerah terisolasi dapat membuka peluang ekonomi dan mempermudah distribusi barang serta layanan sosial lainnya. Namun, salah satu tantangan terbesar adalah ketimpangan sosial-ekonomi yang masih cukup besar di Provinsi Sumut. Beberapa daerah, khususnya yang lebih pedesaan, masih bergumul dengan masalah kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, serta rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang fokus

pada pemerataan pembangunan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas layanan sosial akan sangat berdampak pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumut.

Meskipun Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi besar, untuk mencapai kesejahteraan yang merata, dibutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri, dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah ini.

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, PDRB per Kapita Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini dan Indeks Pembangunan Manusia.

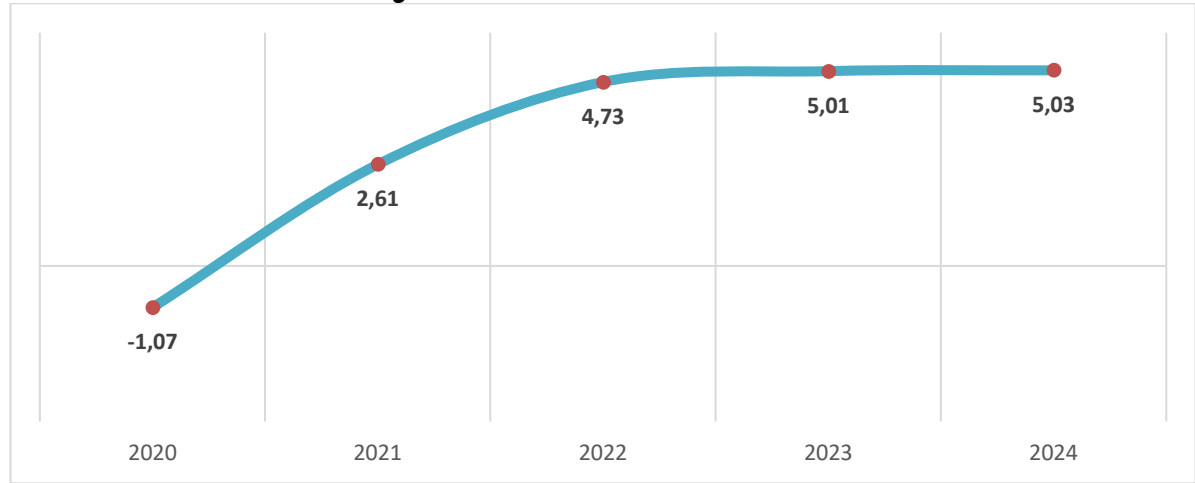
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang sangat penting dalam merencanakan arah pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam periode RPJMD 2025-2029. Sebagai tolok ukur keberhasilan ekonomi, indikator ini tidak hanya mencerminkan seberapa cepat perekonomian tumbuh, tetapi juga menggambarkan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD, laju pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama yang akan mengarahkan kebijakan dan strategi pembangunan di berbagai sektor. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diharapkan Sumatera Utara dapat mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, serta mampu memperkuat posisi ekonomi daerah di tingkat nasional maupun global.

Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 24,44 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,79 persen; Industri Pengolahan sebesar 18,36 persen; Konstruksi sebesar 12,99 persen; serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,01 persen. Seiring dengan proses pemulihan perekonomian nasional, tren pemulihan ekonomi Sumatera Utara terus berlanjut dan semakin menguat di tengah kondisi ketidakpastian global. Pulihnya mobilitas dan daya beli masyarakat yang terjaga menjadi pendorong aktivitas ekonomi. Kondisi ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara pada

Tahun 2024 sebesar 5,03 persen. Berikut perkembangan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

Gambar 2. 15. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Secara agregat, Sumatera Utara menunjukkan pemulihan paling konsisten di antara provinsi-provinsi Sumatera, setelah kontraksi -1,07 % pada 2020 (lebih ringan dibanding Kep. Riau -3,80 % dan Kep. Bangka Belitung -2,29 %, namun sedikit lebih dalam daripada Aceh -0,37 %), laju pertumbuhan Sumut melonjak ke 2,61 % di 2021 dan terus naik menjadi 4,73 % (2022) serta 5,01 % (2023).

Tabel 2. 48. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Khutanan dan Perikanan	1,95	3,87	5,03	3,04	3,73
Pertambangan dan Penggalian	-2,31	1,92	2,62	3,53	4,03
Industri Pengolahan	-0,84	1,43	1,98	3,42	4,65
Pengadaan Listrik dan Gas	3,16	4,93	4,81	2,17	2,66
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,79	3,62	2,17	2,87	2,57
Konstruksi	-3,42	2,18	3,03	6,40	6,52
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,87	3,62	6,57	5,80	4,44
Transportasi dan Pergudangan	-12,77	-3,63	12,96	13,12	6,33
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-9,62	-0,81	7,26	10,23	11,98
Informasi dan Komunikasi	6,17	6,51	7,60	7,81	7,41
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,29	4,46	3,81	5,50	3,87
Real Estate	1,57	2,50	4,53	3,19	5,41
Jasa Perusahaan	-4,71	-0,14	8,78	6,69	5,12
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,37	2,08	-0,73	1,92	6,08
Jasa Pendidikan	1,52	3,05	5,14	7,38	5,66
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-2,46	0,25	4,83	6,44	5,12
Jasa Lainnya	-3,74	1,43	8,72	9,47	6,54
Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara	-1,07	2,61	4,73	5,01	5,03

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menunjukkan perbaikan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Setelah mengalami kontraksi di 2020, seperti pada sektor Transportasi dan Pergudangan (-12,77%) dan Akomodasi dan Makan Minum (-9,62%), berbagai sektor mulai pulih. Sektor Informasi dan Komunikasi mencatat pertumbuhan stabil di atas 6%, sementara sektor Transportasi dan Akomodasi mengalami lonjakan signifikan sejak 2022. Sektor Konstruksi dan Perdagangan juga menunjukkan pemulihan yang kuat, masing-masing tumbuh 6,52% dan 4,44% pada 2024. Dari sisi produksi, Tiga sektor Lapangan Usaha yang tumbuh tertinggi adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum yaitu sebesar 11,98 persen; sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 7,41 persen; dan sektor Jasa Lainnya sebesar 6,54 persen. Lapangan usaha yang memiliki peran penting terhadap perekonomian Sumatera Utara adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 3,73 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,44 persen; Industri Pengolahan sebesar 4,65 persen; dan Konstruksi sebesar 6,52 persen.

Tabel 2. 49. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pengeluaran

Kategori Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-2,83	2,16	4,55	5,59	5,43
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-4,02	-2,59	5,47	9,27	11,79
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-1,69	3,46	-3,34	3,98	4,01
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-1,17	3,46	3,83	4,48	4,95
Perubahan Inventori	-	-7,09	10,11	7,79	-23,78
Ekspor Luar Negeri	-10,3	14,44	11,48	-0,4	11,22
Impor Luar Negeri	-14,85	18,32	11,22	-1,72	12,12
Sumatera Utara	-1,07	2,61	4,73	5,01	5,03

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-LNPRT yang tumbuh sebesar 11,79 persen. Komponen Pengeluaran Konsumsi RT tumbuh sebesar 5,43 persen, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 4,95 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 4,01 persen. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Perekonomian Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh Konsumsi LNPRT dan lapangan usaha pertanian yang merupakan pangsa terbesar dari sisi pengeluaran dan produksi, relatif termoderasi. Meskipun demikian, kinerja ekspor masih menjadi motor penggerak ekonomi utama Sumatera Utara. Hal ini juga turut ditopang oleh tetap kuatnya permintaan domestik, khususnya investasi sejalan dengan masih berlangsungnya akselerasi pembangunan berbagai proyek strategis.

Sebagian besar sektor utama seperti perdagangan, industri dan transportasi juga mencatatkan akselerasi.

Tabel 2. 50. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
Nias	1,80	2,21	3,06	3,82	3,89	2,96
Mandailing Natal	-0,94	3,20	4,34	4,93	4,83	3,27
Tapanuli Selatan	0,39	3,24	4,78	5,11	5,12	3,73
Tapanuli Tengah	-0,76	2,56	4,18	4,23	4,15	2,87
Tapanuli Utara	1,50	3,54	4,25	4,75	4,77	3,76
Toba	-0,27	2,92	4,24	4,93	4,84	3,33
Labuhan Batu	0,09	3,85	4,80	5,03	5,06	3,77
Asahan	0,21	3,73	4,66	4,87	4,68	3,63
Simalungun	1,01	3,70	4,68	5,07	4,89	3,87
Dairi	-0,94	2,05	4,21	5,04	4,97	3,07
Karo	-0,80	2,25	4,22	5,06	4,22	2,99
Deli Serdang	-1,78	2,23	4,70	5,34	5,36	3,17
Langkat	-0,86	3,08	4,69	4,93	4,98	3,36
Nias Selatan	0,61	2,02	3,08	3,65	3,82	2,64
Humbang Hasundutan	-0,13	2,02	4,21	4,38	4,79	3,05
Pakpak Bharat	-0,18	2,54	4,27	5,10	5,02	3,35
Samosir	-0,59	2,65	4,48	5,03	5,02	3,32
Serdang Bedagai	-0,44	2,87	4,46	5,03	5,01	3,39
Batu Bara	-0,31	2,35	4,07	4,08	4,12	2,86
Padang Lawas Utara	1,14	3,26	4,12	4,92	4,99	3,69
Padang Lawas	1,18	3,83	4,61	5,14	5,02	3,96
Labuhanbatu Selatan	0,80	3,82	4,74	4,94	4,89	3,84
Labuanbatu Utara	0,27	3,83	4,62	4,76	4,24	3,54
Nias Utara	1,58	2,02	3,03	3,79	3,64	2,81
Nias Barat	1,66	2,26	3,01	3,72	3,89	2,91
Sibolga	-1,36	2,10	4,15	4,20	3,92	2,60
Tanjungbalai	-0,47	2,35	3,94	4,86	4,91	3,12
Pematangsiantar	-1,89	1,25	3,47	4,22	4,61	2,33
Tebing Tinggi	-0,70	2,51	4,01	3,98	3,37	2,63
Medan	-1,98	2,62	4,71	5,04	5,07	3,09
Binjai	-1,83	2,23	4,18	4,75	4,66	2,80
Padangsidempuan	-0,73	2,75	4,77	5,09	5,01	3,38
Gunungsitoli	0,38	2,25	3,11	3,69	3,84	2,65

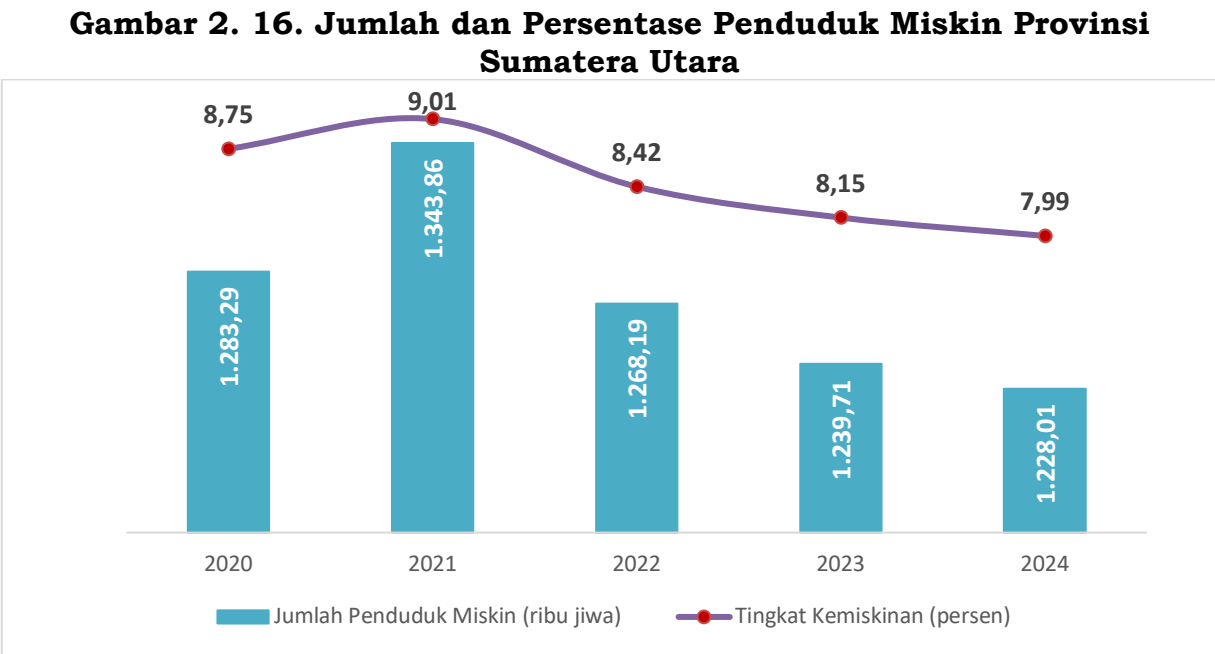
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020–2024, terlihat bahwa secara umum seluruh wilayah mengalami tren pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan capaian pertumbuhan yang positif dan cenderung meningkat, selaras dengan arah pertumbuhan ekonomi provinsi. Namun demikian, terdapat disparitas laju pertumbuhan antardaerah yang cukup mencolok. Beberapa wilayah seperti Deli Serdang, Padang Lawas, dan Labuhan Batu menunjukkan kinerja

yang konsisten tinggi dengan rata-rata pertumbuhan di atas rata-rata provinsi (3,61%), yang turut menopang pencapaian pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara secara agregat. Sebaliknya, daerah seperti Pematangsiantar, Gunungsitoli, dan Sibolga mencatat rata-rata pertumbuhan terendah, di bawah 2,7%, mengindikasikan perlunya intervensi dan dukungan pembangunan ekonomi yang lebih merata. Meskipun secara umum tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota menunjukkan arah positif dan stabil, upaya penguatan struktur ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan tetap menjadi prioritas untuk menyeimbangkan kontribusi antarwilayah terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara secara keseluruhan.

2. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi tantangan besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Di berbagai daerah, kemiskinan dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat, menghambat akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Sebagai dampak dari kondisi ekonomi yang sulit, kemiskinan juga memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Pemerintah dan berbagai pihak berupaya keras untuk menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program bantuan sosial, guna menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Di Sumatera Utara, misalnya, perkembangan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas upaya pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin mencapai angka tertinggi, yaitu 1.343,86 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,01%. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk miskin terus menurun, dan pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 1.228,01 ribu jiwa. Penurunan ini menunjukkan adanya upaya yang lebih baik dalam mengurangi jumlah masyarakat miskin di wilayah ini.

Selain itu, tingkat kemiskinan di Sumatera Utara juga menunjukkan tren penurunan yang stabil dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,01%, yang merupakan angka tertinggi selama periode tersebut. Namun, pada tahun 2024, tingkat kemiskinan turun menjadi 7,99%, menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini mencerminkan keberhasilan program-program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di Sumatera Utara.

Tabel 2. 51. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Nias	16,60	16,82	16,00	15,10	14,89
Mandailing Natal	9,18	9,49	8,92	8,86	8,69
Tapanuli Selatan	8,47	8,80	8,07	7,01	6,92
Tapanuli Tengah	12,38	12,67	11,71	11,50	11,80
Tapanuli Utara	9,37	9,72	8,93	8,54	8,21
Toba	8,71	8,99	8,89	8,04	8,07
Labuhan Batu	8,44	8,74	8,26	7,99	7,84
Asahan	9,04	9,35	8,64	8,21	8,12
Simalungun	8,46	8,81	8,26	7,87	7,72
Dairi	8,04	8,31	7,88	7,47	7,10
Karo	8,70	8,79	8,17	7,98	7,37
Deli Serdang	3,88	4,01	3,62	3,44	3,44
Langkat	9,73	10,12	9,49	9,23	9,04
Nias Selatan	16,74	16,92	16,48	16,39	16,32
Humbang Hasundutan	9,36	9,65	8,86	8,69	8,44
Pakpak Bharat	9,28	9,35	8,66	7,54	6,87
Samosir	12,48	12,68	11,77	11,66	11,63
Serdang Bedagai	7,97	8,30	7,82	7,44	6,97
Batu Bara	11,88	12,38	11,53	11,38	10,94
Padang Lawas Utara	9,70	9,92	8,94	8,79	8,97
Padang Lawas	8,37	8,69	8,05	7,89	7,87
Labuhanbatu Selatan	8,34	8,53	8,09	8,06	7,73
Labuanbatu Utara	9,53	10,02	9,09	9,08	8,98

Kabupaten Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Nias Utara	25,07	25,66	23,40	21,79	21,50
Nias Barat	25,69	26,42	24,75	22,81	22,68
Sibolga	11,95	12,33	11,47	11,42	11,39
Tanjungbalai	13,33	13,40	12,45	12,21	11,97
Pematangsiantar	8,27	8,52	7,88	7,24	7,20
Tebing Tinggi	9,85	10,30	9,59	9,49	8,79
Medan	8,01	8,34	8,07	8,00	7,94
Binjai	5,71	5,81	5,10	4,79	4,75
Padangsidempuan	7,40	7,53	6,89	6,85	6,23
Gunungsitoli	16,41	16,45	14,81	14,78	14,72

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan data perkembangan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2020–2024, secara umum menunjukkan tren penurunan yang positif dan selaras dengan capaian provinsi, di mana angka kemiskinan berhasil diturunkan dari 9,71 persen pada tahun 2020 menjadi 7,99 persen pada tahun 2024. Namun demikian, disparitas antarwilayah masih menjadi isu utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. Beberapa kabupaten/kota seperti Nias Utara, Nias Barat, dan Nias Selatan secara konsisten mencatatkan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, masing-masing mencapai 21,50 persen, 22,68 persen, dan 16,32 persen pada tahun 2024, jauh di atas rata-rata provinsi. Di sisi lain, sejumlah kota seperti Binjai (4,75%), Medan (7,94%), dan Pematangsiantar (7,20%) menunjukkan capaian yang relatif lebih baik dan stabil. Fenomena ini mencerminkan ketimpangan pembangunan dan akses terhadap layanan dasar yang masih belum merata antarwilayah. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan di Sumatera Utara ke depan perlu diarahkan pada pendekatan berbasis kewilayahan yang lebih responsif terhadap karakteristik lokal, dengan memperkuat program pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan konektivitas dan infrastruktur dasar di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi.

Tabel 2. 52. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

PROV/KABUPATEN/KOTA	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Sumatera Utara	1,39	1,41	0,78	0,54
Nias	1,80	3,11	1,75	0,65
Mandailing Natal	1,17	1,08	1,48	0,72
Tapanuli Selatan	2,49	0,26	0,34	0,59
Tapanuli Tengah	3,07	2,73	1,92	0,56
Tapanuli Utara	0,81	0,73	0,69	0,49
Toba	1,65	1,16	0,94	0,51
Labuhan Batu	0,94	0,46	1,51	0,55

PROV/KABUPATEN/KOTA	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Asahan	3,23	1,52	0,00	0,48
Simalungun	1,20	2,19	1,40	0,46
Dairi	1,48	0,00	0,47	0,51
Karo	1,92	1,58	0,82	0,48
Deli Serdang	0,59	0,84	0,00	0,32
Langkat	0,75	2,08	0,97	0,50
Nias Selatan	2,70	3,58	2,89	1,74
Humbang Hasundutan	1,51	2,26	0,00	0,47
Pakpak Bharat	0,86	2,32	0,00	0,48
Samosir	3,78	2,09	1,95	0,50
Serdang Bedagai	0,00	0,92	0,73	0,52
Batu Bara	2,23	2,03	1,42	0,87
Padang Lawas Utara	0,72	0,24	0,20	0,83
Padang Lawas	2,03	0,46	0,87	0,69
Labuhan Batu Selatan	1,46	1,16	0,79	0,31
Labuhan Batu Utara	1,07	1,43	0,85	0,60
Nias Utara	6,96	8,82	2,40	4,32
Nias Barat	3,95	3,09	1,85	0,25
Kota Sibolga	2,09	0,46	0,72	0,68
Kota Tanjungbalai	0,95	1,66	1,03	0,53
Kota Pematangsiantar	1,01	1,31	0,44	0,40
Kota Tebing Tinggi	0,94	1,97	1,29	0,47
Kota Medan	1,28	1,23	0,59	0,39
Kota Binjai	0,24	0,25	0,00	0,36
Kota Padangsidimpuan	1,60	0,19	0,39	0,34
Kota Gunungsitoli	2,67	3,18	1,93	0,72

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara dan Satgas P3KE Kemenko PKM, 2025

Perbandingan tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota di dalamnya menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam empat tahun terakhir. Secara umum, angka kemiskinan ekstrem di Sumatera Utara menurun dari 1,39% pada tahun 2021 menjadi 0,54% pada tahun 2024. Penurunan ini terlihat di sebagian besar kabupaten/kota, dengan beberapa wilayah mengalami penurunan yang tajam. Sebagai contoh, Kabupaten Nias, yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi pada 2021 sebesar 1,80%, mengalami penurunan yang signifikan menjadi 0,65% pada 2024. Demikian juga dengan Tapanuli Selatan yang sempat mencatatkan angka kemiskinan ekstrem 2,49% pada 2021, kini berkurang drastis menjadi 0,59% pada 2024.

Meskipun ada penurunan di hampir seluruh wilayah, beberapa daerah tetap menunjukkan tantangan besar dalam pengurangan kemiskinan ekstrem. Misalnya, Nias Utara dan Nias Selatan yang memiliki angka yang cukup tinggi, meskipun sedikit menurun, tetap menunjukkan angka kemiskinan ekstrem yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Di sisi lain, kota-kota besar seperti Medan, Tebing Tinggi, dan Binjai

menunjukkan penurunan yang lebih stabil dan relatif lebih rendah, dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang sudah mencapai angka di bawah 1% pada 2024. Perkembangan ini mencerminkan upaya yang semakin efektif dalam mengatasi kemiskinan ekstrem, meskipun tantangan di daerah-daerah tertentu masih memerlukan perhatian khusus untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata.

3. PDRB Per Kapita

Pada tahun 2024, PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar Rp73,57 juta. Angka ini mencerminkan kontribusi ekonomi setiap individu di provinsi ini terhadap perekonomian regional. PDRB per kapita adalah indikator penting dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, yang mengukur rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap orang di suatu wilayah. Perkembangan PDRB per kapita ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif meskipun tantangan global dan nasional. Peningkatan PDRB per kapita juga mencerminkan kemajuan dalam sektor-sektor ekonomi utama di Sumatera Utara, seperti pertanian, industri pengolahan, dan jasa.

Sebagai provinsi dengan kontribusi signifikan terhadap PDRB Pulau Sumatera, dengan kontribusi sekitar 23,55% pada Tahun 2024, Sumatera Utara menunjukkan peran penting dalam perekonomian regional. Sektor-sektor seperti pertanian, industri pengolahan, dan sektor jasa—termasuk pariwisata dan perdagangan—menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi provinsi ini, berkontribusi pada peningkatan PDRB per kapita yang lebih baik. Peningkatan PDRB per kapita ini juga mencerminkan upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup, infrastruktur, dan sektor ekonomi di Sumatera Utara. Ke depan, diharapkan angka ini terus meningkat, seiring dengan upaya pengembangan sektor ekonomi yang lebih beragam dan pemerataan pembangunan yang lebih merata di seluruh kabupaten/kota di provinsi ini.

Tabel 2. 53. PDRB per Kapita Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	Nilai (juta Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai (juta Rp)	Pertumbuhan (%)
2020	54,98	0,66	36,18	-1,82
2021	57,44	4,47	36,58	1,11
2022	62,92	9,54	37,78	3,28
2023	68,31	8,56	39,14	3,60
2024	73,57	7,71	40,58	3,67

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Pada Harga Berlaku, nilai PDRB per kapita menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari 54,98 juta Rp pada tahun 2020 menjadi 73,57 juta Rp pada tahun 2024. Ini menggambarkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif, dengan nilai PDRB per kapita yang meningkat dari tahun ke tahun. Namun, angka pertumbuhannya tidak selalu stabil. Pertumbuhan yang tercatat pada 2021 adalah 4,47%, kemudian mencapai angka tertinggi pada 2022 dengan 9,54%. Meskipun demikian, pada 2024, angka pertumbuhannya sedikit melambat menjadi 7,71%. Secara keseluruhan, ini menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki kinerja ekonomi meskipun ada fluktuasi.

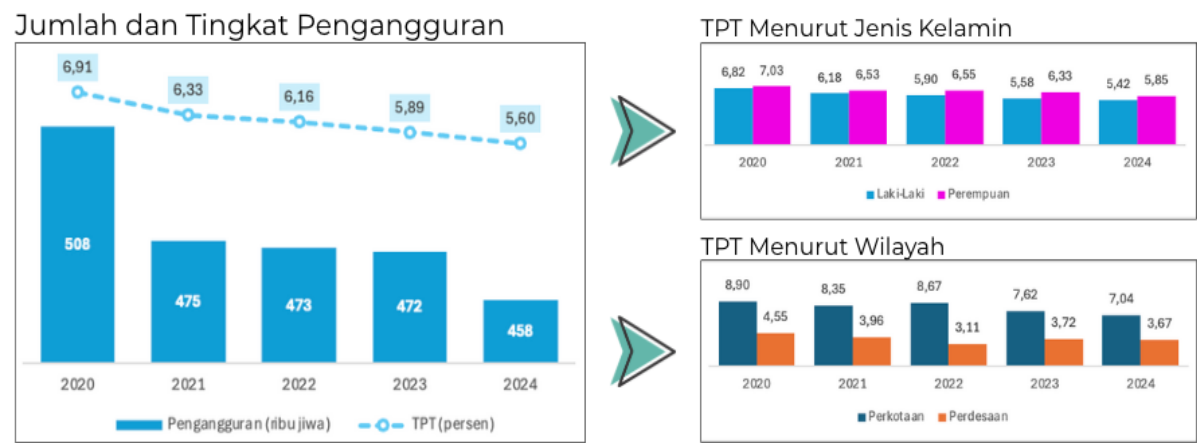
Pada Harga Konstan, nilai PDRB per kapita juga menunjukkan peningkatan yang stabil, mulai dari 36,18 juta Rp pada tahun 2020 dan meningkat hingga 40,58 juta Rp pada tahun 2024. Angka pertumbuhannya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan harga berlaku, dengan penurunan yang tajam pada tahun 2020 yang tercatat sebesar -1,82%. Namun, setelah tahun 2020, pertumbuhannya kembali positif dan meningkat secara konsisten, dengan pertumbuhan yang signifikan pada 2022 (3,28%) dan 2023 (3,60%). Peningkatan pada Harga Konstan lebih mencerminkan pertumbuhan yang tidak terpengaruh oleh inflasi atau perubahan harga, sehingga lebih dapat menggambarkan sejauh mana sektor ekonomi riil (nyata) di Provinsi Sumatera Utara berkembang. Tren positif ini menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi inflasi atau harga yang memengaruhi angka nominal, sektor ekonomi riil tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam periode 2021–2024. Tren positif ini menunjukkan daya saing ekonomi Sumatera Utara yang semakin menguat, sekaligus mencerminkan keberhasilan dalam mendorong aktivitas ekonomi produktif dan memperkuat fondasi pemulihan pasca krisis pandemi.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Provinsi Sumatera Utara, dengan jumlah penduduk lebih dari 14 juta jiwa, menghadapi tantangan besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai untuk semua angkatan kerja. Penyebab utama tingginya tingkat pengangguran terbuka di provinsi ini seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik struktural maupun konjunktural. Salah satu faktor utama adalah ketidaksesuaian antara jumlah lulusan pendidikan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Banyak lulusan perguruan tinggi atau pendidikan vokasi yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai

dengan bidang keahlian mereka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini salah satunya disebabkan karena semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia. Pada tahun 2020 TPT di Sumatera Utara meningkat tajam dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid 19 yang mengakibatkan banyak lapangan pekerjaan tutup. Jika dilihat, Penduduk yang bekerja pada Agustus 2024 sebanyak 7.723 ribu orang, naik sebanyak 173 ribu orang dari Agustus 2023. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 91 ribu orang. persentase penduduk yang bekerja di sektor formal selalu lebih rendah apabila dibandingkan dengan penduduk yang bekerja pada sektor informal maupun penduduk yang bekerja di sektor formal.

Gambar 2. 17. Angka Pengangguran, Menurut Jenis Kelamin, dan Wilayah di Provinsi Sumatera Utara

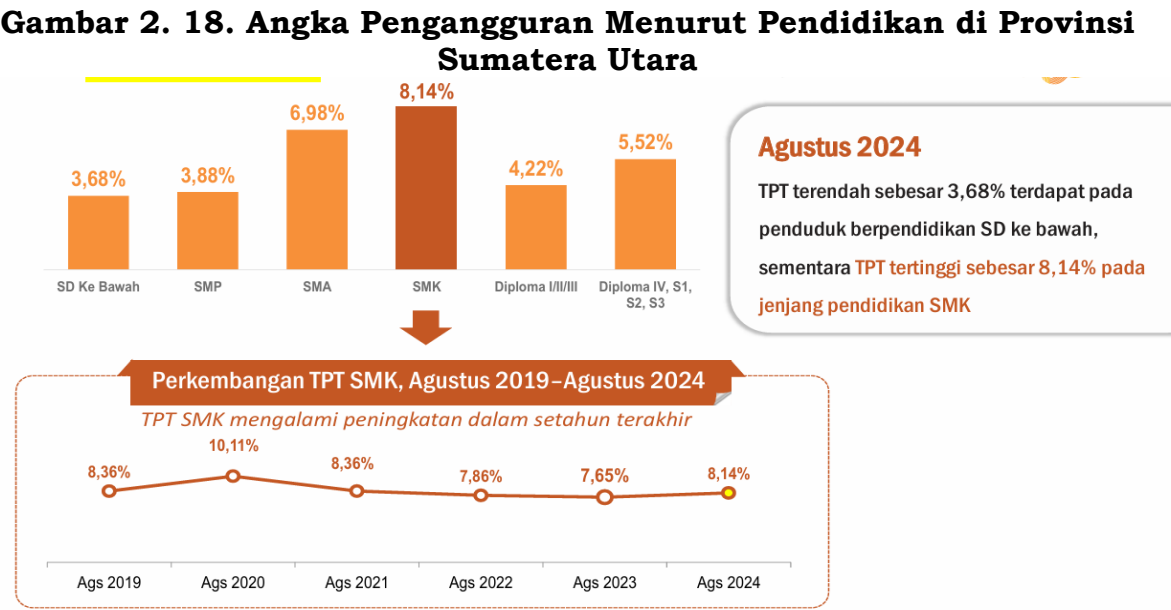


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Pada Agustus 2024 sebanyak 3.294 ribu orang (42,65 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 1,17 persen poin dibanding Agustus 2023. kemudian, Persentase setengah pengangguran pada Agustus 2024 naik sebesar 1,99 persen poin, sementara pekerja paruh waktu turun sebesar 1,09 persen poin dibanding Agustus 2023. Pada umumnya penduduk yang bekerja di sektor formal memiliki upah yang lebih stabil dibanding penduduk yang bekerja di sektor informal. Sehingga selain dari TPT yang rendah, salah satu keberhasilan di sektor ketenagakerjaan adalah tingginya persentase.

Tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan adanya kecenderungan yang signifikan terkait dengan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh angkatan kerja. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk yang besar, Sumatera Utara menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang

pendidikan penduduknya. Pengangguran terbuka ini dapat dilihat lebih rinci berdasarkan kelompok pendidikan yang dimiliki oleh pencari kerja.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah (SD hingga SMA/SMK), angka pengangguran terbuka cenderung lebih tinggi, meskipun mereka yang memiliki pendidikan di tingkat ini lebih mudah untuk memasuki pasar tenaga kerja dibandingkan dengan mereka yang hanya memiliki pendidikan dasar. Namun, faktor yang memengaruhi pengangguran di kalangan lulusan SMA/SMK adalah kurangnya keterampilan teknis yang dibutuhkan oleh dunia kerja, terutama di sektor-sektor yang lebih spesifik, seperti manufaktur dan teknologi.

Pemerintah juga terus mendorong peningkatan sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, seperti pariwisata, manufaktur, dan sektor digital. Program-program kewirausahaan dan pelatihan keterampilan teknis juga menjadi langkah penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang memiliki keterbatasan dalam menyerap tenaga kerja. Secara keseluruhan, tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan di Sumatera Utara menggambarkan tantangan besar dalam menciptakan kesempatan kerja yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan angkatan kerja. Namun, dengan kebijakan yang tepat, peningkatan keterampilan, serta pengembangan sektor-sektor unggulan yang dapat menyerap tenaga kerja terdidik, diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan membuka peluang lebih besar bagi masyarakat.

Tabel 2. 54. Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota Sumatera Utara

Kabupaten Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Nias	3,49	3,12	2,81	2,31	2,10
Mandailing Natal	6,50	6,12	7,64	7,45	7,22
Tapanuli Selatan	4,42	4,00	3,65	3,49	3,41
Tapanuli Tengah	7,54	7,24	7,97	7,81	7,45
Tapanuli Utara	2,94	1,54	1,07	1,03	1,21
Toba	2,50	0,83	1,39	1,30	1,09
Labuhan Batu	6,05	5,66	6,90	5,99	5,90
Asahan	7,24	6,39	6,26	6,12	5,94
Simalungun	4,58	4,17	5,51	5,35	5,17
Dairi	1,75	1,49	0,88	1,23	1,43
Karo	1,83	1,95	2,71	2,63	2,40
Deli Serdang	9,50	9,13	8,79	8,62	8,02
Langkat	7,02	5,12	6,88	6,33	6,08
Nias Selatan	4,15	3,91	3,69	3,48	3,03
Humbang Hasundutan	0,84	1,94	0,42	0,84	0,92
Pakpak Bharat	1,93	1,36	0,26	0,45	0,97
Samosir	1,20	0,70	1,16	1,03	0,89
Serdang Bedagai	5,54	3,93	4,98	4,97	4,88
Batu Bara	6,48	6,62	6,21	5,88	5,75
Padang Lawas Utara	3,11	3,19	4,31	4,42	3,99
Padang Lawas	4,11	4,07	5,90	5,75	5,47
Labuhanbatu Selatan	4,90	4,71	3,15	3,43	3,24
Labuanbatu Utara	6,82	5,74	3,75	4,84	4,60
Nias Utara	4,54	3,00	2,59	2,57	2,82
Nias Barat	1,71	0,74	0,53	0,80	1,00
Sibolga	8,00	8,72	7,05	6,79	6,52
Tanjungbalai	6,97	6,59	4,62	4,47	4,08
Pematangsiantar	11,50	11,00	9,36	8,62	8,00
Tebing Tinggi	9,98	8,00	6,39	6,24	6,18
Medan	10,74	10,81	8,89	8,67	8,13
Binjai	8,67	7,86	6,36	6,10	5,44
Padangsidempuan	7,45	7,18	7,76	7,57	7,17
Gunungsitoli	5,94	4,80	3,65	3,67	3,30
Sumatera Utara	6,91	6,33	6,16	5,89	5,60

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari Tabel diatas, Tingkat Pengangguran Terbuka pada Kabupaten/Kota di tahun 2023 menunjukkan penurunan pada tahun 2024. sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Utara mengalami penurunan

TPT selama periode 2020–2024. Penurunan ini mencerminkan proses pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 dan adanya peningkatan kesempatan kerja, baik formal maupun informal, di berbagai wilayah. Wilayah perkotaan cenderung memiliki tingkat pengangguran terbuka yang lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan. Kota-kota seperti Pematangsiantar (8,00%), Medan (8,13%), dan Deli Serdang (8,02%) masih mencatat angka TPT di atas rata-rata provinsi tahun 2024. Sebaliknya, beberapa kabupaten seperti Humbang Hasundutan (0,92%), Pakpak Bharat (0,97%), dan Nias Barat (1,00%) mencatat TPT yang sangat rendah. Dengan demikian, meskipun menunjukkan tren perbaikan, Sumatera Utara masih memiliki tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk menurunkan tingkat pengangguran secara lebih kompetitif dibandingkan wilayah lain di Sumatera.

5. Indeks Gini

Rasio Gini merupakan ukuran tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang banyak digunakan di berbagai negara. Selama periode 2020–2024, Sumatera Utara mencatat penurunan Indeks Gini yang cukup konsisten, dari 0,316 pada tahun 2020 menjadi 0,297 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat di provinsi tersebut. Sementara itu, tingkat ketimpangan nasional relatif stagnan, dengan kisaran nilai antara 0,381 hingga 0,388 dalam periode yang sama. Artinya, meskipun secara nasional ketimpangan belum menunjukkan perbaikan signifikan, Sumatera Utara justru berhasil mencatat kemajuan yang lebih progresif dalam aspek pemerataan ekonomi.

Tabel 2. 55. Rasio Gini Kabupaten/Kota Sumatera Utara

Kabupaten Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Nias	0,251	0,245	0,275	0,279	0,247
Mandailing Natal	0,248	0,240	0,244	0,249	0,250
Tapanuli Selatan	0,202	0,256	0,209	0,219	0,206
Tapanuli Tengah	0,335	0,292	0,233	0,241	0,234
Tapanuli Utara	0,287	0,277	0,242	0,262	0,242
Toba	0,290	0,272	0,305	0,295	0,348
Labuhan Batu	0,272	0,256	0,278	0,244	0,251
Asahan	0,261	0,244	0,255	0,260	0,248
Simalungun	0,295	0,264	0,262	0,295	0,257
Dairi	0,271	0,227	0,221	0,241	0,215
Karo	0,271	0,233	0,236	0,240	0,214
Deli Serdang	0,312	0,263	0,270	0,295	0,262

Kabupaten Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Langkat	0,238	0,238	0,260	0,257	0,260
Nias Selatan	0,287	0,241	0,223	0,261	0,247
Humbang Hasundutan	0,246	0,304	0,258	0,256	0,302
Pakpak Bharat	0,248	0,242	0,274	0,251	0,262
Samosir	0,318	0,274	0,298	0,251	0,238
Serdang Bedagai	0,262	0,229	0,240	0,225	0,242
Batu Bara	0,259	0,240	0,243	0,255	0,258
Padang Lawas Utara	0,228	0,255	0,245	0,241	0,223
Padang Lawas	0,265	0,253	0,227	0,225	0,224
Labuhanbatu Selatan	0,194	0,232	0,247	0,231	0,212
Labuanbatu Utara	0,262	0,243	0,276	0,238	0,239
Nias Utara	0,251	0,236	0,239	0,228	0,234
Nias Barat	0,234	0,224	0,210	0,208	0,219
Sibolga	0,291	0,276	0,346	0,246	0,313
Tanjungbalai	0,272	0,248	0,245	0,238	0,236
Pematangsiantar	0,336	0,308	0,321	0,329	0,297
Tebing Tinggi	0,334	0,344	0,334	0,317	0,335
Medan	0,320	0,402	0,399	0,373	0,356
Binjai	0,324	0,290	0,302	0,318	0,312
Padangsidempuan	0,354	0,310	0,275	0,267	0,296
Gunungsitoli	0,322	0,317	0,303	0,308	0,277
Sumatera Utara	0,316	0,315	0,312	0,309	0,297

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Beberapa daerah menunjukkan tren penurunan ketimpangan, seperti Labuhanbatu Selatan yang turun dari 0,194 (2020) ke 0,212 (2024), menandakan pemerataan ekonomi yang tidak membaik. Sebaliknya, Toba mencatat lonjakan drastis dari 0,290 ke 0,348, mencerminkan meningkatnya ketimpangan. Kota-kota besar seperti Medan dan Tebing Tinggi secara konsisten mencatat Rasio Gini yang tinggi di atas 0,33, mengindikasikan disparitas pendapatan yang mencolok di kawasan perkotaan. Di sisi lain, beberapa daerah seperti Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan Nias Barat mempertahankan Rasio Gini yang relatif rendah (<0,23), menandakan ketimpangan yang lebih kecil meski bukan berarti tingkat kesejahteraan tinggi. Rata-rata provinsi Sumatera Utara sendiri menurun dari 0,316 (2020) menjadi 0,297 (2024), menandakan perbaikan kecil dalam hal distribusi pendapatan secara keseluruhan. Namun, fluktuasi signifikan di tingkat kabupaten/kota menunjukkan bahwa kebijakan pemerataan ekonomi belum sepenuhnya merata dampaknya di seluruh wilayah provinsi.

Penurunan Indeks Gini di Sumatera Utara mencerminkan dampak dari berbagai intervensi sosial ekonomi pemerintah daerah, seperti bantuan sosial berskala luas, program pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan UMKM, serta penguatan ekonomi perdesaan. Penurunan ini juga mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam periode pemulihan pasca-pandemi cukup inklusif dan mampu menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam konteks Sumatera Utara, sektor seperti pertanian, perdagangan mikro, serta jasa informal yang padat tenaga kerja berperan penting dalam menciptakan peluang pendapatan bagi kelompok bawah. Selain itu, jika ditinjau dari perspektif spasial, kebijakan pemerataan pembangunan antarwilayah (kota-desa, pusat-daerah) juga turut memengaruhi menurunnya ketimpangan pendapatan.

5. Indeks Modal Manusia

Indeks Modal Manusia (IMM) atau Human Capital Index (HCI) adalah indikator yang dikembangkan oleh Bank Dunia untuk mengukur potensi produktivitas generasi mendatang berdasarkan kualitas kesehatan dan pendidikan. Nilai IMM berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai 1 menunjukkan potensi produktivitas maksimal.

Tabel 2. 56. Perbandingan Indeks Modal Manusia Nasional dan Provinsi Sumatera Utara

IMM	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	0,54	0,53	0,53	0,53	0,54
Sumatera Utara	0,53	0,53	0,53	0,52	0,53

Sumber: World Bank, 2024 (*data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pada tahun 2024, capaian Indeks Modal Manusia Provinsi Sumatera Utara diperkirakan berada pada angka sekitar 0,53 (53%). Artinya, seorang anak yang lahir di Sumatera Utara pada tahun ini diproyeksikan hanya akan mencapai 53 persen dari potensi produktivitas maksimalnya apabila memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang optimal sepanjang masa tumbuh kembangnya. Jika dibandingkan dengan capaian nasional (Indonesia) sebesar 0,54, maka posisi Sumatera Utara relatif setara dengan rata-rata nasional, menandakan bahwa tantangan kualitas pendidikan dan kesehatan di Sumatera Utara masih serupa dengan permasalahan yang dihadapi Indonesia secara keseluruhan. Dengan IMM Sumut 2024 yang masih relatif rendah, pemerintah harus fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak serta remaja, sambil memastikan perlindungan sosial keluarga miskin. Kombinasi ini akan menurunkan stunting, meningkatkan capaian belajar, dan memperkuat kesehatan produktif diseluruh Kabupaten/Kota sehingga Indeks

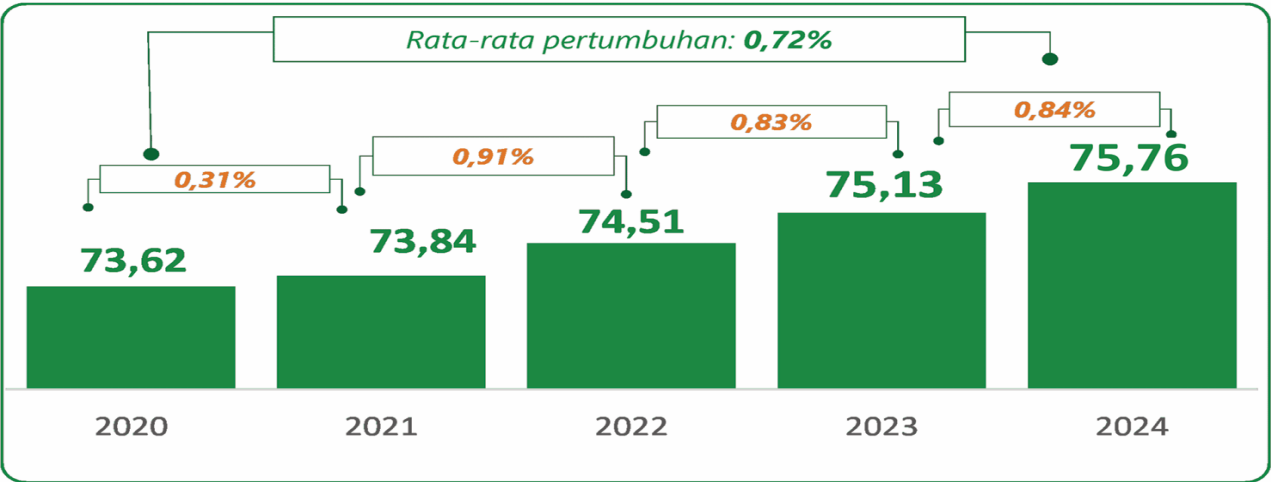
Modal Manusia bisa naik mendekati target IMM 0,73 pada tahun 2045 (target Visi Indonesia Emas 2045).

6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Utara adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup masyarakat di daerah ini. IPM mencakup tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Dengan memantau IPM, dapat terlihat sejauh mana perkembangan sosial dan ekonomi yang terjadi di Sumatera Utara serta tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini mengacu pada konsep Pembangunan Manusia melalui pengukuran keberhasilan pembangunan dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu indikator pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Sumatera Utara sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020-2024, IPM Sumatera Utara rata-rata meningkat sebesar 0,72 persen per tahun, dari 73,62 pada tahun 2020 menjadi 75,76 pada tahun 2024.

Gambar 2. 19. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Meskipun IPM di Sumatera Utara menunjukkan tren yang positif, tantangan besar masih ada dalam mengatasi ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Infrastruktur yang belum merata, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan berkualitas di daerah terpencil, serta rendahnya pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja menjadi beberapa tantangan utama yang harus diatasi.

Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Pada dimensi pengetahuan, harapan

lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,1 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,48 menjadi 13,49 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,11 tahun, dari 9,82 tahun menjadi 9,93 tahun pada tahun 2024. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret dan Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 411 ribu rupiah (3,72 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

**Tabel 2. 57. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara**

KABUPATEN/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
Nias	62,55	63,37	64,30	65,15	66,13
Mandailing Natal	70,89	71,31	72,17	72,65	73,44
Tapanuli Selatan	73,16	73,37	73,96	74,58	75,18
Tapanuli Tengah	71,10	71,48	72,18	72,77	73,34
Tapanuli Utara	75,77	76,06	76,43	76,86	77,48
Toba	76,81	77,03	77,58	77,83	78,44
Labuhan Batu	73,08	73,16	73,96	74,70	75,20
Asahan	72,35	72,55	73,18	73,59	74,17
Simalungun	74,19	74,33	74,68	75,17	75,88
Dairi	73,63	73,89	74,60	75,18	75,88
Karo	75,40	75,81	76,37	76,88	77,49
Deli Serdang	76,11	76,21	76,86	77,16	77,56
Langkat	73,14	73,50	74,03	74,33	74,85
Nias Selatan	62,78	63,24	64,05	64,98	65,87
Humbang Hasundutan	70,70	71,28	72,05	72,49	73,33
Pakpak Bharat	70,30	70,65	71,57	72,30	73,09
Samosir	71,56	71,75	72,57	72,93	73,77
Serdang Bedagai	71,93	72,25	72,89	73,40	74,15
Batu Bara	70,57	70,80	71,75	72,56	73,14
Padang Lawas Utara	71,69	71,96	72,77	73,45	74,16
Padang Lawas	70,08	70,48	71,41	72,16	73,10
Labuhanbatu Selatan	72,86	73,15	73,59	74,23	75,11
Labuanbatu Utara	73,47	73,73	74,61	75,45	76,20
Nias Utara	63,17	63,63	64,55	65,44	66,42
Nias Barat	62,58	63,05	63,96	64,68	65,66
Sibolga	75,56	75,87	76,69	77,07	77,52
Tanjungbalai	73,48	73,78	74,73	75,42	75,95
Pematangsiantar	78,75	79,17	79,71	80,46	81,17
Tebing Tinggi	76,40	76,65	77,39	78,17	78,68
Medan	81,31	81,58	82,13	82,61	83,23
Binjai	76,45	76,57	77,50	78,11	78,67
Padangsidempuan	76,93	77,19	77,73	78,10	78,61

KABUPATEN/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
Gunungsitoli	70,22	70,51	71,11	71,55	72,30
Sumatera Utara	73,62	73,84	74,51	75,13	75,76

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Untuk meningkatkan IPM, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam menyediakan akses yang lebih baik ke layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Pengembangan sektor-sektor unggulan, seperti pariwisata, agribisnis, dan industri kreatif, juga dapat membuka peluang ekonomi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, perhatian terhadap kualitas pendidikan, kesehatan, serta pemerataan ekonomi, Sumatera Utara dapat terus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia-nya dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakatnya. Peningkatan IPM di tingkat Provinsi juga tercermin pada level Kabupaten/Kota. Jika dilihat pada periode 2020-2023, IPM di seluruh Kabupaten/Kota mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Sumatera Utara mencatat kemajuan yang stabil, masih terdapat gap yang perlu dikejar untuk menyamai provinsi-provinsi dengan IPM lebih tinggi di kawasan Sumatera, khususnya Kepulauan Riau dan Sumatera Barat.

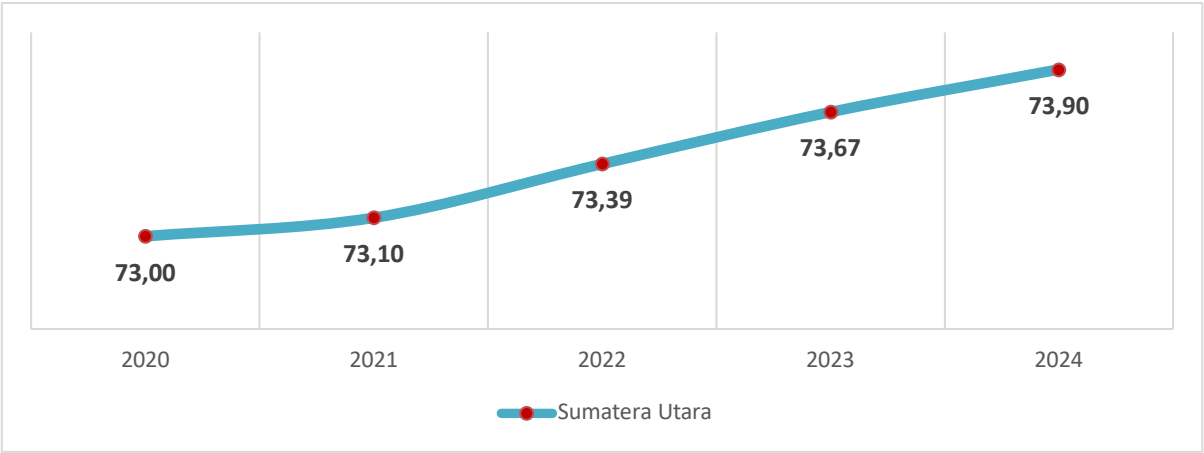
2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua

Menjelaskan kondisi kesehatan semua penduduk Provinsi Sumatera Utara pada seluruh siklus hidup dan kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan yang meliputi Umur Harapan Hidup, Indeks Keluarga Sehat dan Prevalensi Stunting.

1. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH Sumatera Utara meningkat sebesar 0,9 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,31 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Sumatera Utara sebesar 73,00 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 73,90 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,23 tahun (0,38 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,27 persen per tahun). Meningkatnya Usia Harapan Hidup menyebabkan meningkatnya penduduk Lanjut Usia (Lansia) sehingga Rasio Ketergantungan semakin meningkat. Selain itu untuk merespons berbagai perubahan yang terjadi perlu penguatan peningkatan layanan Kesehatan Mental.

Gambar 2. 20. UHH Provinsi Sumatera Utara



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (menggunakan hasil Long Form SP2020)

Peningkatan UHH di Sumatera Utara mencerminkan peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, baik dari sisi kuratif maupun preventif. Program nasional dan daerah seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), revitalisasi Puskesmas, peningkatan cakupan imunisasi, serta penurunan angka kematian bayi dan ibu turut berkontribusi terhadap kenaikan usia harapan hidup. Selain itu, peningkatan sanitasi dan akses air bersih, sebagaimana terlihat pada indikator lingkungan lainnya, telah membantu menurunkan risiko penyakit menular.

Faktor lain yang turut mendukung adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat, terutama di perkotaan, yang didorong oleh kampanye publik mengenai konsumsi makanan bergizi, olahraga, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan tingkat pendidikan, sebagaimana ditunjukkan dalam indikator sosial-ekonomi lainnya, juga berkorelasi positif dengan peningkatan UHH karena kelompok masyarakat yang lebih sejahtera umumnya memiliki akses dan kapasitas yang lebih baik dalam menjaga kesehatannya. Namun demikian, masih adanya disparitas akses layanan kesehatan antar wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil atau kepulauan, serta tingginya beban penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung, menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk mendorong kenaikan UHH yang lebih merata dan berkelanjutan.

Data Usia Harapan Hidup (UHH) pada tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren peningkatan yang positif selama periode 2020 hingga 2024. Rata-rata provinsi meningkat dari 73,00 tahun pada 2020 menjadi 73,90 tahun pada 2024. Beberapa daerah seperti Kota Medan, Pematangsiantar, dan Binjai mencatatkan capaian tertinggi dengan UHH masing-masing mencapai 75,09 tahun, 75,03 tahun, dan 74,45 tahun pada 2024. Sementara itu, beberapa daerah seperti Padang Lawas, Mandailing Natal, dan Nias Selatan berada di kelompok bawah dengan UHH berkisar

antara 71,67 hingga 71,88 tahun. Peningkatan usia harapan hidup ini mencerminkan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi yang cukup merata, meskipun masih terdapat kesenjangan antarwilayah.

Tabel 2. 58. UHH Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Nias	71,27	71,29	71,52	71,74	71,89
Mandailing Natal	70,95	71,00	71,35	71,72	71,88
Tapanuli Selatan	71,00	71,06	71,35	71,61	71,77
Tapanuli Tengah	71,07	71,16	71,47	71,76	71,96
Tapanuli Utara	73,35	73,48	73,85	74,10	74,36
Toba	73,44	73,64	74,07	74,22	74,54
Labuhan Batu	72,20	72,21	72,55	72,88	73,13
Asahan	72,64	72,74	73,07	73,39	73,65
Simalungun	73,21	73,34	73,70	74,08	74,30
Dairi	73,35	73,53	73,94	74,13	74,38
Karo	73,44	73,64	74,14	74,16	74,39
Deli Serdang	73,13	73,17	73,44	73,65	73,81
Langkat	73,35	73,54	74,02	74,14	74,39
Nias Selatan	70,88	70,98	71,29	71,61	71,77
Humbang Hasundutan	73,31	73,60	73,82	74,07	74,27
Pakpak Bharat	71,46	71,68	72,16	72,61	72,95
Samosir	73,31	73,44	73,8	74,10	74,35
Serdang Bedagai	72,27	72,40	72,76	73,11	73,39
Batu Bara	71,68	71,86	72,29	72,63	72,97
Padang Lawas Utara	71,00	71,04	71,32	71,57	71,74
Padang Lawas	70,98	71,01	71,27	71,52	71,67
Labuhanbatu Selatan	71,76	71,84	72,14	72,46	72,71
Labuanbatu Utara	73,41	73,50	73,81	74,06	74,23
Nias Utara	71,39	71,50	71,81	72,12	72,30
Nias Barat	71,56	71,65	71,91	72,3	72,55
Sibolga	72,97	73,21	73,75	74,02	74,19
Tanjungbalai	73,08	73,25	73,70	74,01	74,18
Pematangsiantar	73,55	73,77	74,27	74,75	75,03
Tebing Tinggi	73,42	73,49	73,78	74,07	74,29
Medan	73,81	73,97	74,32	74,76	75,09
Binjai	73,55	73,62	73,92	74,18	74,45
Padangsidempuan	72,86	72,93	73,23	73,54	73,73
Gunungsitoli	73,22	73,34	73,69	74,03	74,23
Sumatera Utara	73,00	73,10	73,39	73,67	73,90

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Peningkatan UHH ini didorong oleh sejumlah faktor. Pertama, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dasar dan rujukan yang disertai dengan program nasional seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan fasilitas Puskesmas, dan penurunan angka kematian ibu dan bayi telah memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat. Kedua, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi layak di berbagai wilayah juga turut menurunkan risiko penyakit menular yang biasanya berdampak besar pada mortalitas dini. Ketiga, faktor sosial-ekonomi seperti menurunnya tingkat kemiskinan dan peningkatan pendidikan masyarakat berkontribusi terhadap pola hidup yang lebih sehat dan penggunaan layanan kesehatan yang lebih optimal. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola makan sehat, olahraga, dan pemeriksaan kesehatan berkala juga merupakan faktor pendukung penting yang tidak dapat diabaikan.

Namun demikian, masih terdapat disparitas yang mencolok dalam capaian UHH antarwilayah. Sebagai contoh, terdapat selisih lebih dari tiga tahun antara UHH di Kota Medan dan Kabupaten Padang Lawas. Ketimpangan ini sebagian besar disebabkan oleh perbedaan tingkat ketersediaan fasilitas kesehatan, jumlah dan kualitas tenaga medis, serta infrastruktur dasar di wilayah tersebut. Wilayah yang memiliki akses terbatas, seperti daerah pegunungan atau kepulauan, sering kali kesulitan dalam menyediakan layanan kesehatan yang memadai secara merata. Selain itu, ketimpangan ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, dan masih tingginya prevalensi stunting juga menjadi faktor struktural yang memengaruhi perbedaan usia harapan hidup.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mendorong peningkatan UHH secara lebih merata ke depan, terdapat beberapa kebijakan strategis yang perlu dilaksanakan. Pertama, pemerintah daerah perlu memperluas cakupan layanan kesehatan primer yang berkualitas di wilayah tertinggal, dengan memperbanyak fasilitas Puskesmas dan layanan kesehatan keliling, serta mendorong pemanfaatan teknologi seperti telemedicine untuk menjangkau daerah terpencil. Kedua, program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan jantung harus diperkuat melalui edukasi masyarakat dan integrasi layanan promotif dan preventif dalam layanan kesehatan. Ketiga, intervensi terhadap gizi masyarakat, khususnya pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), harus diperluas di daerah dengan angka stunting tinggi agar generasi mendatang

tumbuh sehat dan produktif. Keempat, pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan transportasi di daerah dengan UHH rendah perlu ditingkatkan agar kualitas hidup masyarakat lebih baik. Terakhir, kolaborasi lintas sektor—kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan perlindungan sosial—perlu diperkuat untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat hidup lebih sehat dan lebih lama.

Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis data, Sumatera Utara memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan usia harapan hidup secara berkelanjutan dan lebih merata di seluruh kabupaten dan kota. Kunci keberhasilannya terletak pada integrasi antara investasi jangka panjang di bidang kesehatan dan pendidikan serta kebijakan publik yang responsif terhadap tantangan lokal. Mewujudkan usia harapan hidup yang tinggi dan merata bukan hanya indikator kesehatan masyarakat, tetapi juga cerminan dari pembangunan manusia yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting merujuk pada persentase anak yang mengalami stunting dalam suatu populasi tertentu, biasanya berdasarkan kelompok usia tertentu seperti balita (0-59 bulan). Stunting diukur dengan perbandingan tinggi badan anak terhadap usia yang lebih rendah dari standar pertumbuhan yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Prevalensi stunting digunakan untuk menggambarkan sejauh mana masalah kekurangan gizi kronis mempengaruhi populasi anak di suatu wilayah atau negara. Angka prevalensi yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak dalam suatu populasi yang terhambat pertumbuhannya akibat kekurangan gizi atau faktor lingkungan lainnya, seperti sanitasi yang buruk atau penyakit infeksi. Menurunkan prevalensi stunting menjadi fokus penting dalam upaya kesehatan masyarakat karena stunting dapat berdampak jangka panjang terhadap kemampuan kognitif, kesehatan, serta kualitas hidup anak di masa depan.

Tabel 2. 59. Prevalensi Stunting Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Stunting	Persen	29,20	25,80	21,10	18,90	22,00

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2025

Data prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Utara pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, dengan tren penurunan yang jelas pada awalnya namun kemudian diikuti oleh sedikit kenaikan pada tahun terakhir. Pada tahun 2020, prevalensi stunting berada

pada angka 29,20%, kemudian menurun secara konsisten menjadi 25,80% pada 2021, 21,10% pada 2022, dan 18,90% pada 2023. Namun, pada tahun 2024, prevalensi stunting mengalami kenaikan kembali menjadi 22,00%. Meskipun secara keseluruhan terjadi penurunan sebesar 7,2 poin persentase selama lima tahun, kenaikan di tahun terakhir menandakan adanya tantangan yang perlu dicermati lebih dalam.

Penurunan yang terjadi antara 2020 hingga 2023 merupakan hasil dari peningkatan berbagai program intervensi spesifik dan sensitif yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, antara lain pemberian makanan tambahan (PMT), kampanye edukasi gizi, peningkatan cakupan imunisasi, serta intervensi kesehatan ibu dan anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kebijakan seperti pendirian posyandu aktif, peningkatan anggaran desa untuk program gizi, serta pendampingan oleh tim pendamping keluarga (TPK) juga turut berperan dalam percepatan penurunan stunting. Selain itu, perbaikan sanitasi lingkungan, penyediaan air bersih, dan peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar memberikan kontribusi tidak langsung dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Namun, kenaikan kembali prevalensi stunting pada tahun 2024 menjadi 22,00% mengindikasikan bahwa upaya penurunan belum sepenuhnya stabil dan berkelanjutan. Terdapat beberapa kemungkinan penyebab dari kenaikan tersebut. Pertama, bisa jadi terjadi gangguan pada pelaksanaan program intervensi, baik karena keterbatasan anggaran, hambatan logistik, maupun lemahnya koordinasi lintas sektor di tingkat lapangan. Kedua, faktor sosial-ekonomi seperti inflasi harga pangan pokok, krisis global, dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi dapat memengaruhi daya beli masyarakat, terutama keluarga miskin, sehingga berdampak pada asupan gizi anak. Ketiga, kurangnya keberlanjutan edukasi perubahan perilaku masyarakat terkait pola makan dan perawatan anak juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks ini, program tidak hanya memerlukan cakupan luas, tetapi juga pendalaman kualitas layanan dan perubahan perilaku secara konsisten.

Kenaikan angka stunting ini juga menegaskan pentingnya pemantauan dan evaluasi program yang lebih ketat, serta perlunya strategi adaptif terhadap perubahan kondisi lokal dan nasional. Intervensi penanganan stunting harus lebih terintegrasi antara sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta perencanaan wilayah. Selain intervensi gizi langsung, perlu pula ditingkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga,

peningkatan kualitas pendidikan ibu, serta pendampingan keluarga miskin yang berisiko tinggi memiliki anak stunting.

Dengan demikian, meskipun Sumatera Utara telah menunjukkan capaian yang positif dalam menurunkan angka stunting selama periode 2020–2023, tantangan yang muncul pada tahun 2024 menjadi sinyal bahwa penurunan stunting bukan hanya tentang cakupan, tetapi juga tentang keberlanjutan, konsistensi, dan kualitas intervensi yang dilakukan. Strategi ke depan harus difokuskan pada penguatan tata kelola program, peningkatan akuntabilitas lintas sektor, dan penyusunan kebijakan berbasis data yang responsif terhadap kondisi lapangan.

3. Prevalensi Tuberkulosis

Data perkembangan penemuan dan pengobatan Tuberkulosis (TBC) di Sumatera Utara selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan perbaikan dalam sistem deteksi kasus, namun juga menyoroti tantangan dalam mempertahankan keberhasilan pengobatan. Cakupan penemuan kasus TBC mengalami peningkatan signifikan, dari hanya 36,00% pada tahun 2020 menjadi 71,30% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya aktif dalam skrining, pelacakan kontak erat, dan pelaporan kasus mulai membuahkan hasil. Perluasan program deteksi dini melalui pemanfaatan teknologi digital, pelibatan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), dan edukasi masyarakat tampaknya menjadi faktor kunci yang mendorong peningkatan penemuan kasus.

Sementara itu, capaian dalam pengobatan TBC justru menunjukkan tren yang sedikit menurun. Pada awalnya, tingkat keberhasilan pengobatan mencapai 90,20% pada 2020 dan relatif stabil hingga 2022. Tetapi, sejak 2023 terjadi penurunan menjadi 85,00%, dan angka ini stagnan pada 2024. Penurunan ini bisa mengindikasikan berbagai permasalahan, seperti kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan jangka panjang, kendala logistik dalam distribusi obat, atau lemahnya pemantauan pengobatan di tingkat komunitas. Selain itu, bertambahnya jumlah kasus yang ditemukan juga dapat memperbesar beban layanan kesehatan, yang jika tidak disertai peningkatan kapasitas sistem, bisa menyebabkan penurunan kualitas pelayanan pengobatan.

Tabel 2. 60. Perkembangan Penemuan dan Pengobatan TBC

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tuberkulosis (Penemuan)	Persen	36,00	37,00	59,00	60,00	71,30
Tuberkulosis (Pengobatan)	Persen	90,20	90,30	90,00	85,00	85,0

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2025

Untuk itu, strategi penguatan sistem pengobatan menjadi sangat krusial. Program manajemen kasus TBC perlu diperkuat dengan pengawasan ketat terhadap pasien, peningkatan dukungan psikososial, serta penguatan pemantauan digital dan pelibatan keluarga atau kader kesehatan. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, peningkatan penemuan kasus dapat diimbangi dengan keberhasilan pengobatan yang tinggi, sehingga target eliminasi TBC nasional pada 2030 dapat tercapai.

4. Angka Kesakitan (Morbiditas)

Angka kesakitan atau morbiditas adalah ukuran yang menunjukkan banyaknya penduduk yang mengalami penyakit atau keluhan kesehatan dalam periode tertentu, baik dalam bentuk kasus baru (insidens) maupun seluruh kasus yang ada (prevalensi), sehingga dapat menggambarkan beban penyakit serta kebutuhan pelayanan kesehatan di suatu wilayah. Kondisi morbiditas yang baik seharusnya ditunjukkan dengan angka kesakitan yang rendah dan cenderung menurun dari waktu ke waktu. Artinya, hanya sedikit penduduk yang mengalami keluhan atau penyakit dalam periode tertentu. Hal ini idealnya dicapai melalui pola hidup sehat, lingkungan yang bersih, gizi yang cukup, serta akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Dengan morbiditas yang rendah, beban pelayanan kesehatan berkurang, produktivitas masyarakat meningkat, dan kualitas hidup penduduk menjadi lebih baik. Kondisi Angka Kesakitan/Morbiditas Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

Tabel 2. 61. Angka Kesakitan/Morbiditas Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kesakitan/Morbiditas	Persen	12.24	8.78	12.98	10.1	10.08

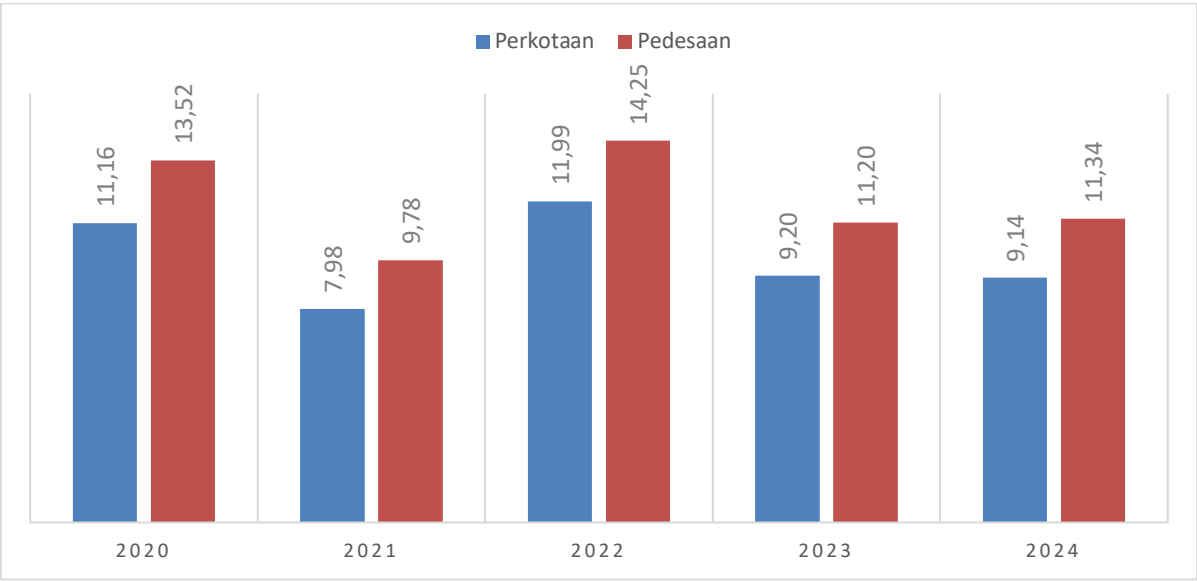
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan grafik Angka Kesakitan/Morbiditas Provinsi Sumatera Utara tahun 2021–2024 diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 angka kesakitan tercatat sebesar 12.24 meningkat pada tahun 202 sebesar 8,78%, hal ini menunjukkan proporsi penduduk yang sakit relatif rendah. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan yang cukup tajam hingga mencapai 12,98%, menandakan meningkatnya beban penyakit di masyarakat yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pandemi COVID-19, perubahan perilaku kesehatan, maupun peningkatan pencatatan kasus. Setelah itu, pada tahun 2023 angka morbiditas menurun menjadi 10,1%, dan sedikit turun kembali di tahun 2024 menjadi 10,08%.

Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa morbiditas di Sumatera Utara bersifat fluktuatif. Meskipun sempat mengalami penurunan setelah puncaknya di tahun 2022, angka kesakitan masih berada pada level sekitar 10%, sehingga mengindikasikan bahwa tantangan kesehatan masyarakat tetap cukup besar. Hal ini menegaskan perlunya peningkatan upaya promotif dan preventif, perbaikan akses layanan kesehatan, serta pengendalian penyakit menular maupun tidak menular agar angka kesakitan dapat terus ditekan secara konsisten.

Angka kesakitan/morbiditas mencerminkan proporsi penduduk yang mengalami sakit dalam suatu periode tertentu. Di Sumatera Utara, meskipun trennya fluktuatif pada periode 2021–2024, rata-rata sekitar 1 dari 10 penduduk mengalami keluhan kesehatan. Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk Sumatera Utara yang mencapai lebih dari 15 juta jiwa, maka persentase tersebut berarti ratusan ribu bahkan jutaan orang setiap tahunnya mengalami sakit. Kondisi ini menegaskan bahwa morbiditas bukan sekadar angka statistik, tetapi benar-benar menggambarkan beban nyata penyakit yang dialami penduduk, terutama di pedesaan yang konsisten menunjukkan angka lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Oleh karena itu, pengendalian faktor risiko penyakit, peningkatan akses layanan kesehatan, serta upaya promotif dan preventif menjadi sangat penting untuk menurunkan jumlah penduduk yang jatuh sakit.

Gambar 2. 21. Persentase Penduduk Provinsi Sumatera Utara yang Menderita Sakit

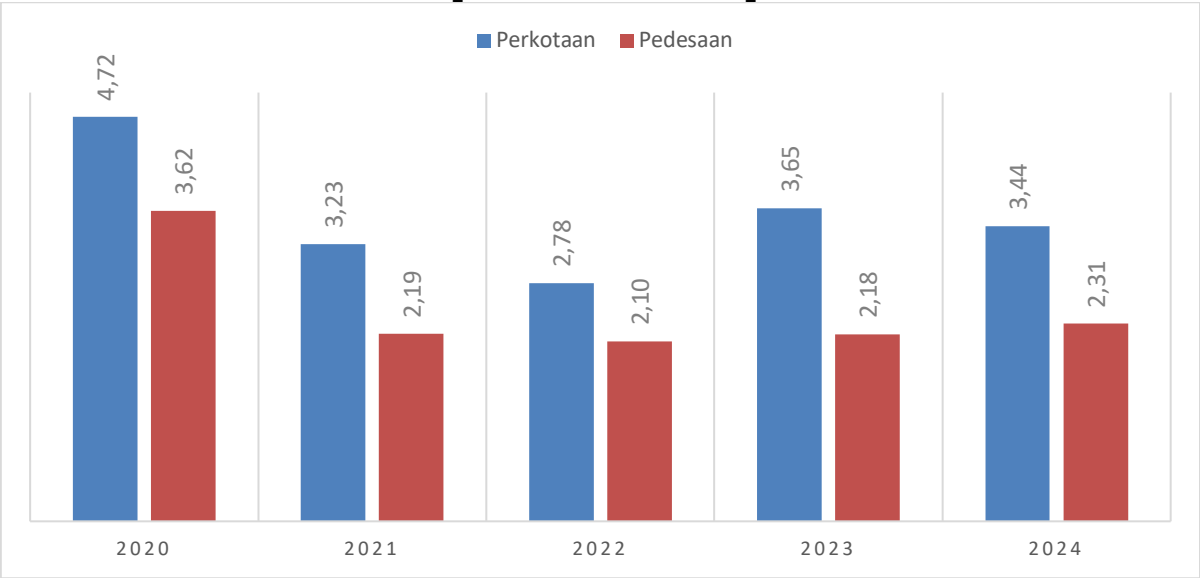


Sumber: BPS, Susenas 2020-2024

Gambar di atas menunjukkan persentase penduduk Provinsi Sumatera Utara yang mengalami sakit berdasarkan data BPS Susenas 2020-2024. Gambar tersebut membandingkan dua kategori, yaitu perkotaan (dengan warna biru) dan pedesaan (dengan warna merah), untuk setiap tahun dari

2020 hingga 2024. Terlihat bahwa persentase penderita sakit di pedesaan umumnya lebih tinggi dibandingkan di perkotaan sepanjang periode yang ditampilkan, dengan puncak tertinggi pada tahun 2022, yaitu 14,25% di pedesaan dan 11,99% di perkotaan. Angka-angka ini mencerminkan perbedaan kondisi kesehatan yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti akses ke fasilitas kesehatan dan faktor sosial ekonomi.

Gambar 2. 22. Persentase Penduduk Provinsi Sumatera Utara yang pernah Rawat Inap



Sumber: BPS, Susenas 2020-2024

Gambar di atas menggambarkan persentase penduduk Provinsi Sumatera Utara yang pernah menjalani perawatan inap, dengan perbandingan antara daerah perkotaan dan pedesaan dari tahun 2020 hingga 2024. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa persentase penduduk perkotaan yang pernah rawat inap cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2020, persentase penduduk perkotaan yang rawat inap mencapai 4,72%, sementara pada pedesaan hanya 3,62%. Meskipun ada fluktuasi antara tahun-tahun berikutnya, kesenjangan ini tetap terlihat, meskipun persentase rawat inap pada pedesaan mengalami sedikit peningkatan pada 2024 (2,31%). Grafik ini menunjukkan adanya kecenderungan perbedaan akses atau kebutuhan perawatan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Sumatera Utara.

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Menjelaskan kondisi pendidikan masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang memiliki peranan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat.

1. Rata-Rata lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat pendidikan suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan jumlah tahun pendidikan yang ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas, yang secara langsung menggambarkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Pada tahun 2024, rata-rata lama sekolah di Sumatera Utara tercatat mencapai 9,93 tahun. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar 9,82 tahun. Peningkatan tersebut sebesar 0,11 tahun, yang meskipun terlihat kecil, namun memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Peningkatan RLS ini menjadi salah satu faktor penting dalam kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara, yang mencapai angka 75,76 pada tahun 2024. Angka IPM ini mencerminkan kualitas hidup masyarakat yang semakin membaik, termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Peningkatan RLS sendiri menunjukkan bahwa masyarakat Sumatera Utara semakin mampu mengakses pendidikan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan daya saing mereka di pasar kerja. Untuk capaian pada kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabe; berikut:

Tabel 2. 62. Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Nias	5,36	5,64	5,88	6,14	6,40
Mandailing Natal	8,62	8,63	8,76	8,84	9,11
Tapanuli Selatan	9,28	9,29	9,34	9,51	9,56
Tapanuli Tengah	8,62	8,84	8,86	8,87	8,92
Tapanuli Utara	9,85	9,99	10,00	10,09	10,31
Toba	10,52	10,57	10,58	10,59	10,77
Labuhan Batu	9,24	9,25	9,40	9,49	9,50
Asahan	8,79	8,80	8,82	8,83	8,85
Simalungun	9,60	9,61	9,63	9,72	9,73
Dairi	9,58	9,59	9,72	9,88	9,89
Karo	9,79	10,00	10,02	10,03	10,12
Deli Serdang	10,09	10,10	10,27	10,28	10,29
Langkat	8,65	8,66	8,68	8,73	8,74
Nias Selatan	5,85	6,06	6,23	6,48	6,52
Humbang Hasundutan	9,54	9,71	10,00	10,01	10,13
Pakpak Bharat	9,03	9,14	9,39	9,61	9,73
Samosir	9,43	9,44	9,46	9,47	9,61
Serdang Bedagai	8,54	8,69	8,71	8,85	9,12

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Batu Bara	8,06	8,07	8,26	8,50	8,51
Padang Lawas Utara	9,37	9,38	9,46	9,55	9,82
Padang Lawas	9,01	9,02	9,31	9,43	9,63
Labuhan Batu Selatan	8,75	8,90	8,92	8,93	9,19
Labuhan Batu Utara	8,40	8,41	8,64	8,87	9,14
Nias Utara	6,58	6,77	6,78	6,85	7,05
Nias Barat	6,49	6,69	6,97	7,07	7,26
Kota Sibolga	10,40	10,41	10,43	10,44	10,45
Kota Tanjungbalai	9,44	9,45	9,55	9,68	9,69
Kota Pematangsiantar	11,16	11,29	11,31	11,58	11,82
Kota Tebing Tinggi	10,31	10,44	10,65	10,86	10,87
Kota Medan	11,39	11,48	11,50	11,62	11,79
Kota Binjai	10,93	10,94	11,18	11,19	11,20
Kota Padangsidimpuan	11,00	11,09	11,11	11,12	11,13
Kota Gunungsitoli	8,61	8,62	8,64	8,65	8,76
SUMATERA UTARA	9,54	9,58	9,71	9,82	9,93

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari Tabel di atas, Angka Rata-rata Lama Sekolah pada Kabupaten/Kota di tahun 2023 menunjukkan peningkatan pada tahun 2024. dengan angka ralisasi tertinggi berada pada Kota Pematangsiantar dengan capaian 11,82% dan Daerah terendah yaitu Kabupaten Nias dengan capaian 6,40%. Peningkatan rata-rata lama sekolah di Sumatera Utara menjadi salah satu indikator positif dalam perjalanan pembangunan daerah, yang tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan daya saing wilayah ini dalam konteks nasional maupun global.

Rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar kabupaten dan kota. Kota Pematangsiantar mencatatkan rata-rata lama sekolah tertinggi sebesar 11,82 tahun, diikuti oleh Kota Medan dan Binjai yang juga berada di atas 11 tahun. Sementara itu, daerah-daerah seperti Nias, Nias Selatan, dan Nias Utara mencatatkan rata-rata lama sekolah terendah, yakni sekitar 6,40 hingga 7,26 tahun. Secara umum, daerah perkotaan cenderung memiliki rata-rata lama sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan atau kepulauan, mencerminkan ketimpangan akses terhadap pendidikan formal di Sumatera Utara.

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur ekspektasi jumlah tahun pendidikan yang dapat ditempuh oleh anak-anak yang baru lahir, berdasarkan kondisi saat ini.

Indikator ini menggambarkan seberapa besar peluang generasi mendatang untuk mendapatkan pendidikan formal yang lebih lama, yang tentunya berhubungan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan potensi pembangunan suatu daerah. Pada tahun 2024, Harapan Lama Sekolah di Sumatera Utara tercatat mencapai 13,55 tahun. Angka ini menggambarkan bahwa anak-anak yang lahir di tahun tersebut diharapkan dapat menempuh pendidikan hingga tingkat menengah atas, bahkan mungkin lebih tinggi lagi, bergantung pada keberlanjutan program pendidikan dan kebijakan yang diterapkan di wilayah tersebut.

Tabel 2. 63. Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Nias	12,57	12,84	13,04	13,30	13,31
Mandailing Natal	13,32	13,61	13,85	13,86	13,87
Tapanuli Selatan	13,24	13,35	13,37	13,58	13,72
Tapanuli Tengah	13,06	13,07	13,24	13,49	13,50
Tapanuli Utara	13,69	13,70	13,72	13,73	13,74
Toba	13,45	13,46	13,58	13,59	13,60
Labuhan Batu	12,73	12,74	12,95	13,25	13,26
Asahan	12,60	12,61	12,63	12,64	12,65
Simalungun	12,78	12,79	12,81	12,82	13,09
Dairi	13,10	13,11	13,24	13,32	13,53
Karo	12,76	12,77	12,95	13,25	13,26
Deli Serdang	13,35	13,36	13,38	13,39	13,40
Langkat	13,05	13,24	13,26	13,27	13,28
Nias Selatan	12,23	12,27	12,48	12,78	12,92
Humbang Hasundutan	13,28	13,29	13,31	13,32	13,46
Pakpak Bharat	13,86	13,87	13,89	13,90	13,91
Samosir	13,47	13,48	13,50	13,51	13,52
Serdang Bedagai	12,60	12,61	12,63	12,64	12,65
Batu Bara	12,63	12,64	12,93	13,11	13,12
Padang Lawas Utara	12,87	13,04	13,23	13,53	13,54
Padang Lawas	13,03	13,27	13,41	13,70	13,87
Labuhan Batu Selatan	13,00	13,01	13,12	13,42	13,53
Labuhan Batu Utara	13,04	13,19	13,29	13,57	13,58
Nias Utara	13,03	13,04	13,06	13,36	13,37
Nias Barat	12,94	12,95	12,97	12,98	12,99
Kota Sibolga	13,16	13,28	13,30	13,42	13,43
Kota Tanjungbalai	12,50	12,62	12,90	13,14	13,15
Kota Pematangsiantar	14,45	14,57	14,59	14,60	14,61

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Tebing Tinggi	12,72	12,73	12,91	13,12	13,13
Kota Medan	14,74	14,75	14,77	14,78	14,79
Kota Binjai	13,62	13,63	13,87	14,17	14,18
Kota Padangsidimpuan	14,54	14,56	14,58	14,59	14,62
Kota Gunungsitoli	13,74	13,75	13,77	13,78	13,79
SUMATERA UTARA	13,23	13,27	13,31	13,48	13,49

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari Tabel di atas, Angka Harapan Lama Sekolah pada Kabupaten/Kota di tahun 2023 menunjukkan peningkatan pada tahun 2024. dengan angka ralisasi tertinggi berada pada Kota Medan dengan capaian 14,61% dan Daerah terendah yaitu Kabupaten Asahan dan Kabupaten Serdang Bedagai dengan capaian 16,65%. Dengan Harapan Lama Sekolah yang terus meningkat, diharapkan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Utara akan semakin membaik, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kemajuan daerah secara keseluruhan. HLS yang tinggi memberikan harapan besar bagi masa depan Sumatera Utara, di mana generasi mendatang akan lebih terampil, berpendidikan tinggi, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Pada tahun 2020, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI telah melakukan kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan, mulai dari aspek sebaran perpustakaan, koleksi perpustakaan, tenaga perpustakaan, pustaka, dan anggota perpustakaan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Yang menjadi instrumen kajian IPLM adalah pemerataan layanan perpustakaan, perpustakaan ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP), ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat/hari, anggota perpustakaan, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai indeks ini tercatat cukup tinggi yaitu 9,75, yang mengindikasikan bahwa tingkat literasi masyarakat pada tahun tersebut relatif baik. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan tajam menjadi hanya 0,4, yang mengindikasikan adanya penurunan drastis dalam upaya pengembangan literasi masyarakat, kemungkinan besar disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti pandemi

atau gangguan lainnya yang menghambat aktivitas literasi. Capaian Indikator perpustakaan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 64. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Sumatera Utara

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	9.75	0.40	20.7	16.5	13.10

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, 2025

Setelah itu, pada tahun 2022, indeks kembali melonjak menjadi 20,7, yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam program-program literasi yang dijalankan pada tahun tersebut. Kenaikan ini bisa mencerminkan pemulihan atau peningkatan upaya pemerintah atau lembaga terkait dalam mendorong budaya baca masyarakat, mungkin dengan berbagai inisiatif yang dilaksanakan setelah masa sulit di tahun 2021. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, terjadi penurunan kembali ke 16,5 dan 13,10 secara berturut-turut. Meskipun nilai tersebut lebih tinggi daripada 2021, tren penurunan ini patut dicermati. Penurunan tersebut bisa menandakan adanya masalah dalam keberlanjutan program literasi, atau faktor lainnya yang menghalangi pertumbuhan yang lebih konsisten, seperti anggaran, kebijakan yang kurang mendukung, atau kurangnya akses terhadap sumber daya pendidikan yang memadai.

Secara keseluruhan, meskipun ada lonjakan yang signifikan pada 2022, fluktuasi dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam menciptakan keberlanjutan dalam program literasi. Peningkatan yang tidak konsisten perlu ditanggapi dengan perencanaan dan strategi yang lebih solid, serta evaluasi yang lebih mendalam untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada agar tujuan pembangunan literasi dapat tercapai dengan lebih stabil dalam jangka panjang.

4. Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemampuan individu atau kelompok dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan aman. Literasi digital mencakup pemahaman dan keterampilan dalam mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi yang tersedia di dunia digital, serta kemampuan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara daring. Selain itu, literasi digital juga mencakup pemahaman tentang aspek keamanan dan etika dalam beraktivitas di dunia maya, seperti perlindungan data pribadi, menghindari penipuan *online*, serta mengelola dampak negatif dari penggunaan teknologi. Indeks ini penting untuk melihat seberapa siap suatu masyarakat dalam

menghadapi perkembangan teknologi yang pesat dan menggunakannya untuk meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, serta partisipasi dalam berbagai bidang, seperti ekonomi dan sosial. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, indeks literasi digital menjadi indikator penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dan memanfaatkan dunia digital secara optimal.

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Menjelaskan kondisi perlindungan sosial warga Provinsi Sumatera Utara yang menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif sehingga semua warga Provinsi Sumatera Utara memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik.

1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kepesertaan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan upaya yang dirancang untuk memberikan perlindungan sosial kepada para pekerja melalui berbagai jenis jaminan, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Program ini bertujuan untuk memastikan keamanan finansial dan melindungi pekerja dari berbagai risiko sosial, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Di Indonesia, program ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang menyediakan layanan guna mengurangi dampak dari kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, maupun ketidakpastian masa pensiun.

Tabel 2. 65. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sumatera Utara

Tahun	Potensi Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan			Realisasi Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan			Persentase Universal Coverage Jamsostek (UJC)		
	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	Total	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	Total	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	Total
2020	2.691.674	2.266.115	4.957.793	1.467.255	94.171	1.561.426	54,51	4,16	31,49
2021	2.691.674	2.266.115	4.957.793	1.541.923	154.646	1.696.569	57,28	6,82	34,21
2022	2.691.674	2.266.115	4.957.793	1.749.909	295.587	2.045.496	65,01	13,04	41,26
2023	2.858.613	2.303.320	5.161.933	1.899.706	579.853	2.479.559	66,46	25,17	48,04
2024	2.962.556	2.346.232	5.308.788	2.010.843	622.009	2.632.852	67,88	26,51	49,59

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Utara, 2025

Kepesertaan dalam jaminan sosial tenaga kerja sangat penting untuk menjamin akses pekerja terhadap manfaat kesehatan dan keuangan di masa mendatang, sehingga turut meningkatkan kesejahteraan mereka. Program ini mewajibkan perusahaan dan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya serta membayar iuran secara rutin. Meski tingkat partisipasi pekerja dalam program ini sudah cukup tinggi, kesadaran akan pentingnya kepesertaan

masih perlu ditingkatkan, khususnya di kalangan pekerja sektor informal dan pekerja kontrak. Potensi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara terus mengalami Peningkatan, hal ini dapat di lihat dari Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) dalam memastikan seluruh pekerja, baik formal maupun informal, terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Cakupan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dengan Persentase Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Sumatera Utara menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, cakupan total UJC sebesar 31,49%, kemudian meningkat menjadi 34,21% pada 2021, 41,26% pada 2022, 48,04% pada 2023, dan diproyeksikan mencapai 49,59% pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang terus menerus dalam memperluas perlindungan sosial bagi tenaga kerja di wilayah tersebut, baik untuk penerima upah maupun bukan penerima upah. Terutama, persentase cakupan bagi penerima upah mengalami kenaikan signifikan dari 54,51% pada 2020 menjadi 67,88% pada 2024, menunjukkan keberhasilan program dalam menjangkau pekerja formal. Namun, cakupan bagi bukan penerima upah masih relatif rendah dan fluktuatif, menandakan perlunya perhatian lebih untuk menjangkau kelompok pekerja informal agar perlindungan sosial dapat lebih merata.

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Menjelaskan kondisi penguatan peran agama sebagai landasan spritual, etika, moral dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jadi diri bangsa yang meresap pada warga di Provinsi Sumatera Utara.

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat harmoni dan toleransi antar umat beragama di suatu wilayah. Indeks ini biasanya dihitung berdasarkan beberapa indikator utama seperti toleransi, kerja sama antar umat beragama, dan kesetaraan dalam menjalankan ibadah serta hak-hak keagamaan.

Tabel 2. 66. Indeks Kerukunan Umat Beragama Sumatera Utara

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kerukunan Umat Beragama	67,46	75,52	74,98	77,10	80,88

Sumber : Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari data Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Sumatera Utara tahun 2020 hingga 2024, terlihat tren peningkatan yang jelas, dari 67,46 pada 2020 menjadi 80,88 pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kerukunan antarumat beragama di provinsi ini secara keseluruhan terus membaik, meskipun terdapat sedikit fluktuasi pada tahun 2022. Peningkatan tersebut mencerminkan efektivitas berbagai upaya pemerintah, termasuk penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pembangunan dialog antarumat beragama, dan program moderasi beragama yang dijalankan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan capaian ini, Sumatera Utara menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga toleransi dan stabilitas sosial, sekaligus menjadi modal penting bagi pembangunan daerah yang inklusif dan harmonis di tengah keberagaman masyarakat.

2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan alat ukur yang berfungsi untuk menilai tingkat kemajuan kebudayaan di suatu daerah atau negara. Indeks ini menilai berbagai aspek budaya, termasuk pelestarian warisan budaya, penguatan identitas budaya, serta keterlibatan dan akses masyarakat terhadap aktivitas kebudayaan. IPK kerap dijadikan indikator untuk menunjukkan kualitas dan keberlanjutan kehidupan budaya dalam masyarakat, mencakup bidang seperti seni, literasi, tradisi, pendidikan budaya, hingga pemanfaatan media dan teknologi dalam mendukung ekspresi budaya. Pembangunan kebudayaan yang dimaksud tidak hanya berorientasi pada pelestarian semata, melainkan juga pada upaya mendorong perkembangan dan penyesuaian budaya terhadap dinamika zaman, dengan tetap menjaga nilai-nilai utamanya. IPK memiliki peran penting dalam menilai efektivitas kebijakan budaya pemerintah serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan budaya mereka.

Tabel 2. 67. Indeks Pembangunan Kebudayaan Sumatera Utara

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Kebudayaan	50,33	48,74	52,47	54,28	-

Sumber : Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2025

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Sumatera Utara tahun 2020–2024 menunjukkan adanya fluktuasi capaian selama periode tersebut. Pada tahun 2020, IPK tercatat sebesar 50,33 dan mengalami sedikit penurunan menjadi 48,74 pada tahun 2021. IPK Sumatera Utara untuk tahun 2022 meningkat menjadi 52,47 dan pada tahun 2023 tercatat peningkatan menjadi 54,28. Hal ini mengindikasikan adanya pemulihan dan penguatan program-program pembangunan kebudayaan setelah sempat menurun. Peningkatan

tersebut dapat mencerminkan keberhasilan intervensi kebijakan yang mendukung pelestarian nilai budaya, peningkatan akses terhadap fasilitas budaya, atau peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan. Meski demikian, ketersediaan data yang tidak konsisten menjadi tantangan dalam mengevaluasi kinerja secara berkelanjutan dan menyeluruh di bidang kebudayaan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 tercatat sebesar 54,28, berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 57,13. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh lemahnya kinerja pada dua dimensi utama, yaitu dimensi ekonomi budaya dan dimensi ekspresi budaya. Untuk meningkatkan IPK di atas rata-rata nasional, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu memberikan perhatian khusus pada penguatan kedua dimensi tersebut melalui pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis budaya serta pelestarian dan fasilitasi ruang ekspresi budaya yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Jumlah Produk Tersertifikasi Halal

Produk tersertifikasi halal memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang memperhatikan aspek kehalalan dalam setiap produk yang mereka konsumsi. Sertifikasi halal menjadi jaminan bahwa suatu produk telah melalui serangkaian proses pengujian dan pemeriksaan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dalam era globalisasi ini, kesadaran akan pentingnya kehalalan suatu produk semakin meningkat, baik di kalangan konsumen Muslim maupun non-Muslim. Oleh karena itu, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai tanda kehalalan, tetapi juga sebagai indikator kualitas dan keamanan produk yang dapat diterima oleh masyarakat luas.

Tabel 2. 68. Produk Tersertifikasi Halal di Sumatera Utara

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Produk	674	6.206	697	59.727	68.342

Sumber: app.halal.go.id

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel mengenai jumlah produk yang tersertifikasi halal di Sumatera Utara pada periode 2020 hingga 2024, terlihat adanya perkembangan yang signifikan dalam jumlah produk bersertifikat halal. Pada tahun 2020, tercatat hanya sebanyak 674 produk yang mendapatkan sertifikat halal. Namun, jumlah ini mengalami lonjakan yang luar biasa pada tahun 2021, mencapai 6.206 produk, yang menunjukkan adanya peningkatan lebih dari 800% dalam satu tahun. Angka ini sedikit mengalami penurunan pada tahun 2022, dengan jumlah produk

yang bersertifikat halal menjadi 697 produk, namun masih tetap lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan yang sangat signifikan kembali terjadi pada tahun 2023 dan 2024, dengan jumlah produk bersertifikat halal masing-masing tercatat 59.727 dan 68.342 produk, menandakan adanya tren positif yang terus berlanjut dalam upaya mendapatkan sertifikasi halal. Peningkatan tajam pada periode 2023-2024 mengindikasikan bahwa sektor produk halal di Sumatera Utara semakin berkembang pesat, seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri terhadap pentingnya sertifikasi halal.

4. Aset Perbankan Syariah terhadap PDRB

Aset perbankan syariah memiliki peran yang semakin signifikan dalam perekonomian suatu daerah, termasuk dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebagai salah satu sektor yang mengusung prinsip keuangan yang bebas dari riba dan mengutamakan keadilan, perbankan syariah berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Dalam konteks ini, PDRB yang mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah, dapat dipengaruhi oleh sejauh mana sektor perbankan syariah mampu mendukung sektor-sektor ekonomi yang ada. Melalui pembiayaan berbasis prinsip syariah, perbankan syariah tidak hanya memberikan akses keuangan yang inklusif bagi masyarakat, tetapi juga mendorong investasi dan pengembangan usaha, sehingga turut berkontribusi dalam peningkatan PDRB suatu daerah. Penelitian mengenai aset perbankan syariah terhadap PDRB menjadi sangat relevan untuk mengukur dampak nyata sektor ini terhadap perekonomian daerah, serta mengevaluasi potensi pertumbuhannya di masa mendatang.

Tabel 2. 69. Aset Perbankan Syariah terhadap PDRB Sumatera Utara

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Aset Perbankan Syariah	2,48	2,68	2,58	2,79	2,86

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK 2020-2024

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel mengenai rasio aset perbankan syariah terhadap PDRB Sumatera Utara dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, rasio tersebut tercatat sebesar 2,48%, yang kemudian meningkat menjadi 2,68% pada tahun 2021. Meskipun sedikit menurun pada tahun 2022 menjadi 2,58%, angka ini kembali menunjukkan peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 2,79% pada 2023 dan diperkirakan mencapai 2,86% pada tahun 2024.

Peningkatan rasio ini menggambarkan perkembangan positif dalam kontribusi sektor perbankan syariah terhadap perekonomian Sumatera Utara, yang tercermin dari PDRB. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan signifikan dalam sektor perbankan syariah, baik dari sisi aset maupun kontribusinya terhadap ekonomi daerah. Namun, meskipun ada tren peningkatan, rasio yang masih berada di bawah angka 3% menunjukkan bahwa potensi sektor perbankan syariah di Sumatera Utara masih bisa dikembangkan lebih lanjut untuk memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian daerah. Tentu saja, ini membutuhkan perhatian lebih dalam kebijakan dan strategi pengembangan sektor ini.

5. Indeks Zakat Nasional

Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat di Indonesia. Indeks ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan perekonomian nasional. Zakat sebagai salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam, memiliki potensi yang sangat besar untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mempercepat pemerataan kesejahteraan. Dengan adanya IZN, diharapkan dapat tercipta pemetaan yang lebih jelas mengenai sejauh mana zakat telah dikelola dan didistribusikan secara efektif, serta sejauh mana masyarakat telah memanfaatkannya dalam membantu sesama. Selain itu, IZN juga menjadi alat evaluasi dalam upaya memperbaiki sistem manajemen zakat, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih optimal bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 2. 70. Indeks Zakat Nasional Sumatera Utara

No	Wilayah	Estimate Growth	Baseline	
			2024	Interpretasi
1	Prov. Sumatera Utara	0,01	0,80	Growth/Bertumbuh
2	Kab. Tapanuli Tengah	0,02	0,52	Stable/Stabil
3	Kab. Tapanuli Utara	0,02	0,00	Beginer/Pemula
4	Kab. Tapanuli Selatan	0,02	0,34	Developing/Berkembang
5	Kab. Nias	0,02	0,00	Beginer/Pemula
6	Kab. Langkat	0,02	0,33	Developing/Berkembang
7	Kab. Karo	0,02	0,16	Beginer/Pemula
8	Kab. Deli Serdang	0,02	0,35	Developing/Berkembang
9	Kab. Simalungun	0,02	0,00	Beginer/Pemula
10	Kab. Asahan	0,02	0,62	Growth/Bertumbuh
11	Kab. Labuhanbatu	0,02	0,33	Developing/Berkembang
12	Kab. Dairi	0,02	0,00	Beginer/Pemula
13	Kab. Toba	0,02	0,32	Developing/Berkembang

No	Wilayah	Estimate Growth	Baseline	
			2024	Interpretasi
14	Kab. Mandailing Natal	0,02	0,49	Stable/Stabil
15	Kab. Nias Selatan	0,02	0,00	Beginer/Pemula
16	Kab. Pakpak Barat	0,02	0,00	Beginer/Pemula
17	Kab. Humbang Hasundutan	0,02	0,00	Beginer/Pemula
18	Kab. Samosir	0,02	0,00	Beginer/Pemula
19	Kab. Serdang Bedagai	0,02	0,39	Developing/Berkembang
20	Kab. Batu Bara	0,02	0,36	Developing/Berkembang
21	Kab. Padang Lawas Utara	0,02	0,00	Beginer/Pemula
22	Kab. Padang Lawas	0,02	0,45	Stable/Stabil
23	Kab. Labuhanbatu Selatan	0,02	0,00	Beginer/Pemula
24	Kab. Labuhanbatu Utara	0,02	0,41	Stable/Stabil
25	Kab. Nias Utara	0,02	0,00	Beginer/Pemula
26	Kab. Nias Barat	0,02	0,00	Beginer/Pemula
27	Kota Medan	0,02	0,54	Stable/Stabil
28	Kota Pematangsiantar	0,02	0,00	Beginer/Pemula
29	Kota Sibolga	0,02	0,47	Stable/Stabil
30	Kota Tanjungbalai	0,02	0,00	Beginer/Pemula
31	Kota Binjai	0,02	0,47	Stable/Stabil
32	Kota Tebing Tinggi	0,02	0,00	Beginer/Pemula
33	Kota Padangsidimpuan	0,02	0,34	Developing/Berkembang
34	Kota Gunungsitoli	0,02	0,00	Beginer/Pemula

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

Berdasarkan data proyeksi indeks zakat nasional di wilayah Sumatera Utara pada tahun 2024, menunjukkan perkembangan yang beragam dalam pengelolaan zakat. Provinsi Sumatera Utara diperkirakan mengalami pertumbuhan zakat yang cukup baik dengan angka estimasi 0,01 dan baseline 0,80, yang mencerminkan kondisi yang berkembang atau bertumbuh. Beberapa kabupaten/kota lainnya, seperti Kabupaten Asahan dan Kabupaten Mandailing Natal, juga menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan kategori "Growth/Bertumbuh".

Namun, masih ada sejumlah kabupaten yang berada dalam kategori "Beginer/Pemula", seperti Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Nias, dan Kota Pematangsiantar, yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di wilayah-wilayah ini masih dalam tahap awal atau belum berkembang dengan signifikan. Beberapa kabupaten lain seperti Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang Bedagai masuk dalam kategori "Developing/Berkembang", yang menandakan adanya upaya yang lebih intensif dalam pengelolaan zakat meskipun belum mencapai tahap yang optimal.

Sedangkan beberapa wilayah dengan kategori "Stable/Stabil", seperti Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kota Medan,

menunjukkan kondisi stabil yang menggambarkan adanya pengelolaan zakat yang cukup baik namun belum ada peningkatan yang signifikan dalam jangka waktu yang pendek. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa wilayah yang masih dalam tahap pengembangan dan pemula, terdapat tanda-tanda positif dalam pengelolaan zakat di Sumatera Utara yang berpotensi untuk berkembang lebih lanjut jika diiringi dengan peningkatan sistem distribusi, regulasi, dan partisipasi masyarakat.

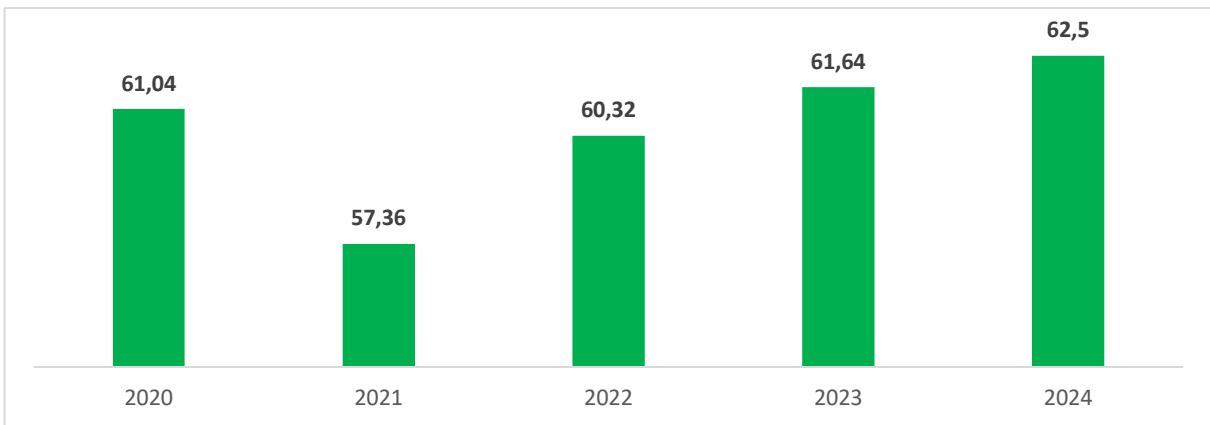
2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Keluarga berkualitas menciptakan dasar yang kuat bagi perkembangan individu, dengan memberikan akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kesetaraan gender memastikan bahwa pria dan wanita memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Sementara itu, masyarakat inklusif mendorong penerimaan terhadap keberagaman, termasuk hak-hak kelompok marginal seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya, untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan mengedepankan ketiga hal ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera.

1. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana kondisi dan kebijakan di suatu negara atau daerah dapat memastikan hak-hak anak terpenuhi, serta melindungi mereka dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan. Indeks ini mencakup berbagai indikator, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikologis, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Meningkatkan Indeks Perlindungan Anak adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak, yang pada gilirannya berkontribusi pada pembangunan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.

Gambar 2. 23. Perkembangan Indeks Perlindungan Anak Sumatera Utara



Sumber: Kemen PPPA, 2025

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Sumatera Utara dari tahun 2020 ke 2021, yakni dari 61,04 menjadi 57,36 (-3,68 poin). Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh gangguan layanan perlindungan anak akibat pandemi COVID-19, seperti terbatasnya akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial. Pada periode 2021–2022, terjadi pemulihan, di mana IPA meningkat menjadi 60,32 (+2,96 poin). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan layanan perlindungan anak, termasuk program pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus yang mulai berjalan lebih optimal. Selanjutnya, dari tahun 2022 hingga 2024, terjadi kenaikan berkelanjutan. Tren ini menandakan stabilisasi dan peningkatan kualitas layanan perlindungan anak, serta implementasi kebijakan yang lebih terkoordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Secara keseluruhan, IPA Sumatera Utara menunjukkan tren positif dari 2021 hingga 2024. Pencapaian 62,50 pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan perlindungan anak secara bertahap, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan agar mendekati target ideal (≥ 70). Ke depan, fokus sebaiknya diarahkan pada penguatan layanan perlindungan khusus anak, pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh, serta pemerataan layanan di seluruh kabupaten/kota agar peningkatan dapat lebih signifikan dan merata.

2. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) merupakan ukuran strategis untuk menilai kualitas keluarga secara keseluruhan, mencakup ketentraman, kemandirian, dan kesejahteraan di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota. IPKK menjadi Indikator IE 45 dalam RPJPD karena menjadi tolok ukur strategis untuk merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi pembangunan kualitas keluarga, yang berimplikasi langsung pada pembangunan manusia dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Hingga saat ini, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) masih dalam tahap pengembangan dan implementasi terbatas di tingkat provinsi.

IPKK merupakan indikator penting dalam menilai kualitas keluarga dan peranannya dalam pembangunan nasional. Meskipun telah ada upaya untuk mengintegrasikan IPKK dalam perencanaan pembangunan daerah, implementasinya masih dalam tahap awal dan terbatas. Diperlukan komitmen dan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta penyediaan sumber daya yang memadai untuk memastikan bahwa IPKK dapat diimplementasikan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan data yang tersedia, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) untuk Provinsi Sumatera Utara hanya tersedia pada tahun 2021 tercatat sebesar 72,83. Angka ini menempatkan Sumatera Utara di posisi menengah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Namun, data terbaru atau capaian IPKK untuk tahun 2022 dan seterusnya belum tersedia secara publik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun IPKK telah diukur, implementasi dan pemantauan lebih lanjut di tingkat daerah, termasuk Sumatera Utara, masih perlu ditingkatkan.

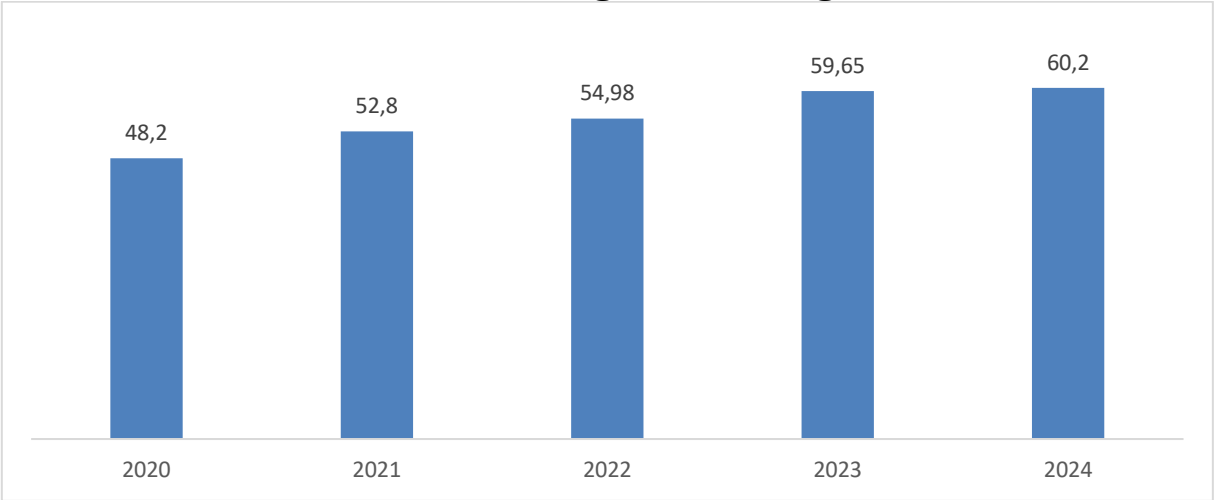
3. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui 3 dimensi yaitu ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Hasil pengukuran iBangga adalah status capaian pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang, dan rentan. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori adalah iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70 dan iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70. iBangga berbeda dengan IPKK. IPKK menilai kualitas keluarga secara luas, sedangkan iBangga menilai efektivitas program Bangga Kencana secara spesifik.

Konteks pembangunan dan peningkatan kualitas SDM tidak bisa terlepas dari pentingnya peran keluarga. Keluarga sebagai institusi sosial memiliki peran sentral dalam pembangunan manusia, pembinaan generasi baru, serta pemenuhan kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan. Pembangunan SDM yang berkualitas dan unggul harus dimulai dari penyiapan peran keluarga sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu berperan penting dalam

perekonomian, politik, dan peningkatan kesejahteraan bangsa. IBangga merupakan indikator yang menggambarkan keluarga yang sehat, mandiri, terlindungi, sejahtera, dan berdaya, serta mendorong pembentukan generasi yang berkualitas. Berdasarkan gambar berikut, dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Keluarga di Sumatera Utara mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024.

Gambar 2. 24. Indeks Pembangunan Keluarga Sumatera Utara



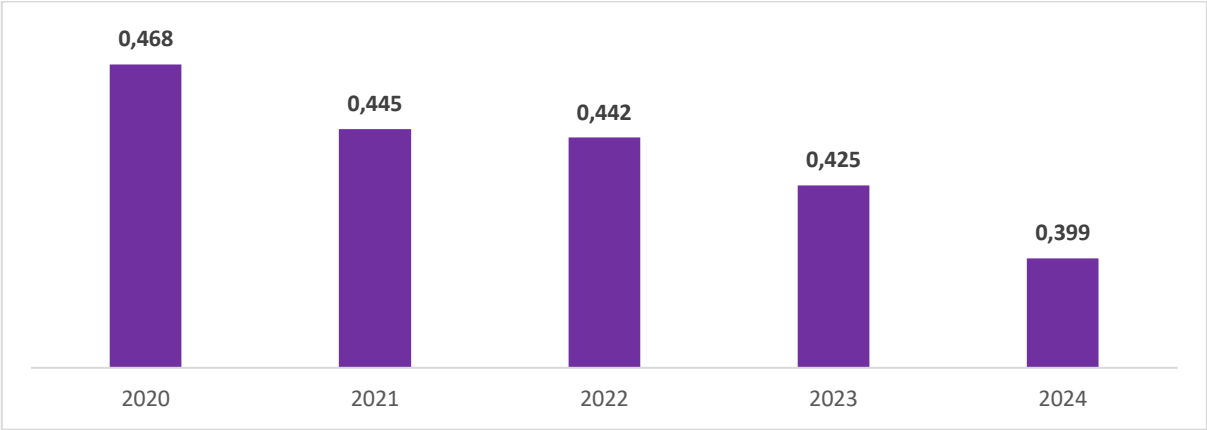
Sumber: BKKBN, 2025

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa iBangga menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Nilai iBangga meningkat dari 48,2 pada 2020 menjadi 60,2 pada 2024. Hal ini menandakan adanya perbaikan yang konsisten dalam indikator pembangunan keluarga selama lima tahun terakhir. Peningkatan terbesar terjadi antara 2022 ke 2023, yaitu dari 54,98 menjadi 59,65 (sekitar 4,67 poin). Pertumbuhan iBangga cenderung stabil tetapi melambat pada 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun masih ada peningkatan, laju pertumbuhan tahun terakhir relatif kecil. Walaupun demikian peningkatan iBangga dari 2020 hingga 2024 menunjukkan keberhasilan program pembangunan keluarga dan intervensi kebijakan yang mendukung kesejahteraan keluarga. Namun, perlunya perhatian lebih pada strategi yang bisa mendorong percepatan capaian agar target pembangunan keluarga dapat lebih optimal pada tahun-tahun mendatang.

4. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana kesenjangan antara pria dan wanita dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi politik. IKG memberikan gambaran tentang ketidaksetaraan gender dalam masyarakat, dengan mengukur perbedaan akses dan peluang yang dimiliki oleh kedua gender.

Gambar 2. 25. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Sumatera Utara



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024

Berdasarkan data yang ditampilkan pada gambar, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengalami tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, IKG tercatat sebesar 0,468 dan menurun secara bertahap setiap tahun menjadi 0,399 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender, meskipun tingkat ketimpangan masih perlu mendapatkan perhatian lebih untuk mencapai kesetaraan yang optimal. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan kemajuan positif dalam mengurangi ketimpangan gender selama lima tahun terakhir. Meskipun demikian, upaya konsolidasi dan replikasi kebijakan berbasis data yang terbukti efektif masih diperlukan guna memastikan bahwa penurunan ketimpangan gender berlangsung secara merata di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2. 71. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Nias	0,5970	0,5900	0,5660	0,5630	0,5550
Mandailing Natal	0,5330	0,5120	0,5240	0,5150	0,5180
Tapanuli Selatan	0,4960	0,5290	0,5070	0,5140	0,5230
Tapanuli Tengah	0,4680	0,3820	0,4350	0,4530	0,4380
Tapanuli Utara	0,4210	0,4380	0,4270	0,2920	0,3350
Toba	0,5200	0,4930	0,5350	0,5050	n/a
Labuhan Batu	0,4670	0,4100	0,4750	0,4270	0,4030
Asahan	0,4100	0,4130	0,4060	0,4470	0,4440
Simalungun	0,5130	0,4720	0,4790	0,4020	0,4350
Dairi	0,4450	0,3950	0,4160	0,3410	0,3190
Karo	0,4080	0,3330	0,3560	0,2910	0,3040
Deli Serdang	0,4060	0,4180	0,4120	0,3250	0,2940
Langkat	0,4070	0,4080	0,4240	0,2310	0,3340
Nias Selatan	0,5760	0,5700	0,5760	0,5650	0,5940

Kabupaten Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Humbang Hasundutan	0,3830	0,3580	0,3540	0,2910	0,3480
Pakpak Bharat	0,2990	0,2770	0,3420	0,1520	0,3320
Samosir	0,3200	0,2870	0,2650	0,2440	0,1230
Serdang Bedagai	0,4550	0,3320	0,4110	0,4340	0,3800
Batu Bara	0,4900	0,4370	0,4440	0,4460	0,3900
Padang Lawas Utara	0,5590	0,5570	0,5670	0,5550	0,5370
Padang Lawas	0,6270	0,6120	0,5940	0,5850	0,8130
Labuhanbatu Selatan	0,5630	0,5330	0,5140	0,5000	0,5240
Labuanbatu Utara	0,6010	0,6040	0,5920	0,5610	0,5650
Nias Utara	0,5680	0,5820	0,5820	0,5750	0,5930
Nias Barat	0,5440	0,5300	0,5600	0,5290	0,4990
Sibolga	0,2140	0,3630	0,2970	0,2590	0,1460
Tanjungbalai	0,2720	0,1990	0,3740	0,2440	0,3430
Pematangsiantar	0,1690	0,3460	0,4490	0,3170	0,2820
Tebing Tinggi	0,4650	0,3540	0,2700	0,2560	0,1880
Medan	0,3170	0,3190	0,2780	0,2320	0,1600
Binjai	0,1800	0,2680	0,2780	0,1420	0,2990
Padangsidimpuan	0,1930	0,3480	0,2860	0,2600	0,1920
Gunungsitoli	0,4250	0,4190	0,3710	0,4800	0,3680
Sumatera Utara	0,4680	0,4450	0,4420	0,4250	0,3990

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

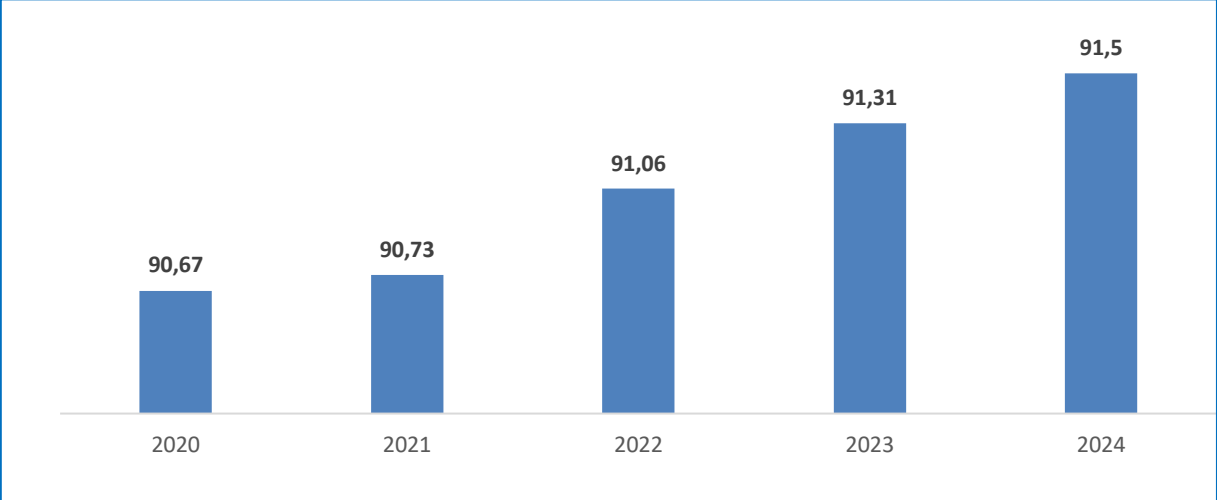
Berdasarkan data Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2020–2024, sejumlah daerah menunjukkan capaian yang relatif positif, seperti Kota Tebing Tinggi (0,1880), Kota Pematangsiantar (0,2820), Kota Medan (0,1600), Kota Binjai (0,2990), Kota Padangsidimpuan (0,1920), dan Kota Sibolga (0,1460) yang secara konsisten mencatat nilai IKG rendah pada tahun 2024. Sebaliknya, beberapa daerah yang memerlukan perhatian dan intervensi strategis dari Pemerintah Provinsi adalah Kabupaten Padang Lawas yang mengalami lonjakan IKG drastis menjadi 0,8130 pada tahun 2024—tertinggi di seluruh provinsi—serta Kabupaten Nias Selatan (0,5940), Labuhanbatu Utara (0,5650), dan Nias (0,5550) yang menunjukkan nilai IKG tinggi dan relatif stagnan selama lima tahun terakhir. Nilai-nilai tinggi ini mengindikasikan masih tingginya kesenjangan gender, terutama dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Oleh karena itu, intervensi terpadu diperlukan dalam bentuk penguatan program pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan daerah, serta

perluasan akses terhadap layanan publik dan pelatihan keterampilan produktif bagi perempuan di daerah-daerah dengan IKG tinggi tersebut.

5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan gender dalam berbagai dimensi pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi. IPG menghitung sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap peluang dan sumber daya yang mendukung pembangunan.

Gambar 2. 26. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sumatera Utara



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang lebih cepat. Pada tahun 2020, IPG Sumatera Utara adalah 90,67, namun Sumatera Utara mulai menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih pesat setelah itu. Pada tahun 2024, IPG Sumatera Utara mencapai 91,50. Meskipun mengalami peningkatan, laju kenaikan IPG Sumatera Utara lebih stabil dan signifikan, menunjukkan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan atau program yang mendukung kesetaraan gender. Namun hal ini mengindikasikan bahwa Sumatera Utara masih perlu memperkuat upaya untuk mencapai IPG yang lebih tinggi untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik.

Tabel 2. 72. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Asahan	90.81	91.25	91.28	91.05	91.22
Mandailing Natal	93.24	93.47	93.42	93.68	93.88
Tapanuli Selatan	90.86	90.74	90.99	90.63	90.75
Tapanuli Tengah	94.85	94.93	94.95	95.23	95.38
Tapanuli Utara	97.98	97.93	98.16	97.75	97.69
Toba	97.96	98.06	98.51	98.32	98.24
Labuhan Batu	90.86	90.88	90.81	90.74	90.85

Kabupaten Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Asahan	91.51	91.66	91.93	91.91	92.06
Simalungun	93.02	93.05	93.16	93.09	93.41
Dairi	98.02	98.05	98.15	98.44	98.37
Karo	96.19	95.9	96.38	96.36	96.49
Deli Serdang	91.29	91.18	91.61	91.92	92.15
Langkat	89.24	89.02	89.03	88.77	89.05
Nias Selatan	87.58	88.28	89.19	89.68	89.84
Humbang Hasundutan	97.38	97.32	97.65	97.45	97.42
Pakpak Bharat	99.02	98.89	99.25	98.99	99.2
Samosir	96.51	96.59	96.76	96.74	96.93
Serdang Bedagai	88.74	89	89.19	88.87	89.07
Batu Bara	83.08	83.22	83.51	83.76	84.06
Padang Lawas Utara	87.92	88.06	88.1	88.26	88.47
Padang Lawas	85.75	85.94	86.24	86.56	86.97
Labuhan Batu Selatan	87.43	87.61	87.98	88.34	88.88
Labuhan Batu Utara	89.8	89.96	90.13	90.43	90.6
Nias Utara	79.37	79.63	80.12	80.51	80.92
Nias Barat	86.67	86.79	87.02	87.33	87.57
Kota Sibolga	97.63	97.89	97.9	98.01	98
Kota Tanjungbalai	89.69	90.02	90.28	90.53	90.89
Kota Pematangsiantar	95.65	95.82	95.96	95.94	96.65
Kota Tebing Tinggi	93.53	93.32	93.62	93.64	93.89
Kota Medan	94	93.76	93.85	94.13	94.49
Kota Binjai	90.57	90.63	90.64	90.99	91.38
Kota Padangsidimpuan	97.67	97.87	97.92	97.53	97.46
Kota Gunungsitoli	89.31	89.4	89.69	89.92	90.24
SUMATERA UTARA	90.67	90.73	91.06	91.31	91.5

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

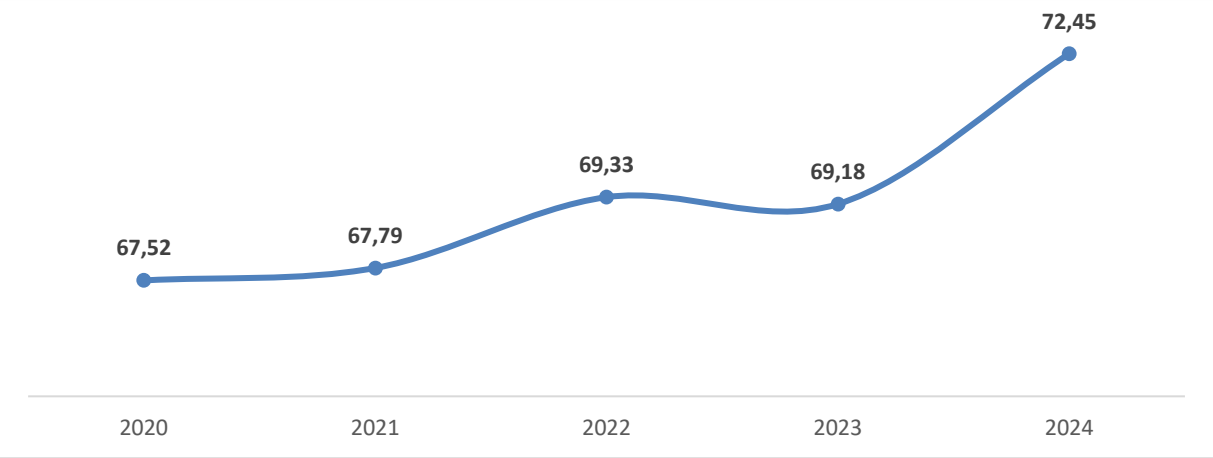
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa secara umum seluruh daerah mengalami kecenderungan peningkatan IPG, meskipun beberapa daerah menunjukkan fluktuasi kecil dari tahun ke tahun. Kabupaten/kota dengan IPG tertinggi secara konsisten berada di wilayah Tapanuli Utara, Toba Samosir, Dairi, dan Pakpak Bharat, menunjukkan pencapaian kesetaraan gender yang relatif lebih baik. Sementara itu, daerah seperti Nias Utara, Batu Bara, dan Padang Lawas mencatat IPG lebih rendah dibanding rata-rata provinsi, menandakan perlunya perhatian lebih dalam program pembangunan gender. Secara agregat, IPG Sumatera Utara meningkat dari 90,67 pada 2020 menjadi 91,5 pada 2024, mencerminkan perbaikan moderat dalam upaya kesetaraan gender.

6. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana perempuan memiliki akses dan kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan,

ekonomi, dan partisipasi politik (IDG) mencakup berbagai indikator yang menggambarkan tingkat pemberdayaan perempuan, termasuk akses terhadap pekerjaan yang layak, posisi kepemimpinan, serta kontrol terhadap sumber daya ekonomi.

Gambar 2. 27. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sumatera Utara



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2020–2024, terlihat adanya tren peningkatan yang cukup konsisten. Pada tahun 2020 IDG berada di angka 67,52 dan perlahan naik hingga 69,33 di tahun 2022, meskipun sempat sedikit menurun ke 69,18 pada 2023. Namun, capaian tahun 2024 menunjukkan lonjakan signifikan menjadi 72,45. Capaian IDG menunjukkan perbaikan yang semakin kuat dalam pemberdayaan gender, dengan akselerasi yang cukup tinggi pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan peran, akses, serta kesempatan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan. Walaupun terjadi peningkatan masih terdapat tantangan untuk mencapai kesetaraan penuh. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor dan mengurangi kesenjangan gender yang ada. Sementara capaian Kabupaten Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 73. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Nias	62,03	60,33	64,53	61,45	64,57
Mandailing Natal	70,01	71,90	73,56	73,73	66,37
Tapanuli Selatan	69,61	69,25	70,95	71,61	66,10
Tapanuli Tengah	74,05	74,39	74,56	76,81	79,25
Tapanuli Utara	65,84	66,36	63,20	63,82	63,80
Toba	60,07	59,51	60,66	61,53	71,96
Labuhan Batu	71,52	71,96	72,24	70,39	59,07
Asahan	67,48	68,54	68,37	71,05	60,54
Simalungun	61,49	62,40	62,53	62,35	62,42

Kabupaten Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Dairi	61,14	61,11	62,57	62,34	63,27
Karo	77,75	81,53	82,28	82,74	75,96
Deli Serdang	54,42	55,14	54,72	59,68	54,79
Langkat	66,55	66,04	67,50	67,16	62,24
Nias Selatan	66,70	67,04	69,03	69,45	64,56
Humbang Hasundutan	72,27	72,76	73,12	70,85	74,55
Pakpak Bharat	66,49	66,97	67,11	67,90	61,66
Samosir	78,20	78,75	81,05	80,13	69,98
Serdang Bedagai	65,73	65,49	65,98	67,48	62,85
Batu Bara	63,18	63,16	66,84	66,23	66,24
Padang Lawas Utara	67,99	68,14	68,98	67,41	67,49
Padang Lawas	55,43	57,61	56,37	58,95	54,35
Labuhanbatu Selatan	63,24	64,56	66,45	61,03	61,04
Labuanbatu Utara	47,27	46,14	48,77	45,52	47,74
Nias Utara	66,93	67,03	62,19	69,40	65,11
Nias Barat	64,55	65,88	66,61	66,95	72,40
Sibolga	73,03	71,84	72,84	75,14	65,89
Tanjungbalai	63,28	63,46	64,80	66,84	72,61
Pematangsiantar	61,58	62,43	62,65	62,96	68,93
Tebing Tinggi	53,58	53,78	54,15	54,63	63,45
Medan	63,89	63,91	64,31	62,35	68,88
Binjai	69,85	68,32	70,65	70,54	68,54
Padangsidempuan	65,72	65,99	66,43	66,85	76,54
Gunungsitoli	66,94	63,28	63,59	64,20	72,62
Sumatera Utara	67,52	67,79	69,33	69,18	72,45

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Padang Lawas secara konsisten menempati posisi terbawah, dengan angka (IDG) yang cenderung stagnan dan belum mencapai skor 60 pada beberapa tahun (misalnya Labuhanbatu Utara hanya 47,74 pada 2024 dan Padang Lawas turun ke 54,35). Selain itu, Deli Serdang, Nias Selatan, dan Nias juga menunjukkan angka (IDG) yang rendah dan tidak stabil dalam rentang lima tahun terakhir, mencerminkan adanya kesenjangan signifikan dalam akses perempuan terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan di wilayah tersebut. Intervensi yang dibutuhkan meliputi penguatan kapasitas perempuan dalam pendidikan, ekonomi, dan kepemimpinan lokal, penyediaan program afirmatif berbasis gender, serta pengembangan layanan publik yang responsif terhadap kebutuhan perempuan. Dukungan lintas sektor dan keberpihakan dalam alokasi anggaran daerah sangat penting untuk memastikan bahwa kesenjangan

gender dapat diminimalkan dan pemberdayaan perempuan di daerah-daerah tertinggal ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

7. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana kondisi dan peluang yang tersedia bagi pemuda dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, partisipasi politik, ekonomi, dan sosial. Indeks ini menggambarkan tingkat pemberdayaan dan kualitas hidup pemuda di suatu daerah atau negara, serta mencerminkan akses mereka terhadap sumber daya yang mendukung perkembangan potensi mereka. Peningkatan indeks ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan generasi muda, yang pada gilirannya berkontribusi pada masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Tabel 2. 74. Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Sumatera Utara

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	52,50	52,50	56,83	56,33

Sumber : Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan data mengenai Indeks Pembangunan Pemuda Sumatera Utara tahun 2020-2024, terlihat bahwa pada tahun 2020 indeks tersebut tidak tersedia. Namun, mulai tahun 2021 hingga 2024, indeks pembangunan pemuda menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil dengan nilai 52,50 pada tahun 2021 dan 2022, kemudian meningkat menjadi 56,83 pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 56,33 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam pembangunan pemuda di Sumatera Utara selama periode tersebut, meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun terakhir, namun secara keseluruhan perkembangan masih positif.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merujuk pada kemampuan suatu wilayah untuk bersaing dengan daerah lain, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam berbagai aspek yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat dan perekonomian wilayah tersebut. Daya saing ini mencakup daya saing Sumber Daya manusia, Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi, Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, dan Stabilitas Ekonomi Makro.

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia (SDM) sangat dipengaruhi oleh angka ketergantungan dan produktivitas tenaga kerja. Tingkat ketergantungan menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang tidak bekerja dengan tenaga kerja aktif, di mana semakin rendah tingkat ketergantungan, semakin besar potensi tenaga kerja yang produktif. Sementara itu, produktivitas tenaga kerja mencerminkan efisiensi serta kontribusi tenaga kerja terhadap perekonomian, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, keterampilan, teknologi, dan kualitas lingkungan kerja. Meningkatkan produktivitas SDM dan mengurangi angka ketergantungan sangat penting untuk memperkuat daya saing daerah.

1. Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 – 64 tahun). Semakin tinggi *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus di tanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif.

Tabel 2. 75. Angka Ketergantungan Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Ketergantungan	Persen	48,32	48,35	48,40	48,56	48,65

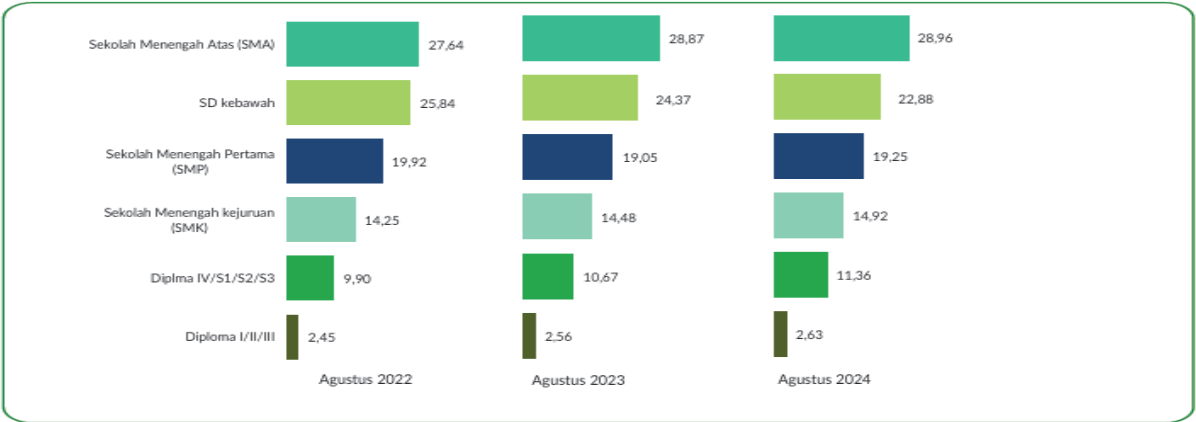
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Tabel yang menunjukkan angka ketergantungan di Sumatera Utara dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa persentase ketergantungan penduduk di provinsi ini mengalami sedikit peningkatan sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2020, angka ketergantungan berada di 48,32%, dan secara bertahap meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 48,65% pada tahun 2024. Angka ketergantungan yang lebih tinggi menunjukkan semakin banyaknya penduduk yang bergantung pada angkatan kerja aktif, baik dari segi pendapatan maupun sumber daya lainnya. Peningkatan angka ketergantungan ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk meningkatnya jumlah penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia), sementara jumlah angkatan kerja aktif tidak tumbuh secepat itu. Ini juga bisa mencerminkan tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk di Sumatera Utara, yang pada gilirannya meningkatkan beban ekonomi pada angkatan kerja produktif.

2. Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi. Data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara bahwa nilai Produktivitas Tenaga Kerja Sumatera Utara Tahun 2023 tercatat sebesar Rp 79,77 Juta/Tenaga Kerja. Produktivitas Tenaga Kerja Sumatera Utara hingga tahun 2023 masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai nasional dengan capaian nilai nasional sebesar Rp 87,96 Juta/Tenaga Kerja.

Gambar 2. 28. Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Data tingkat produktivitas tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan bahwa pekerja dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki produktivitas tertinggi dan cenderung meningkat dari 27,64 pada 2022 menjadi 28,96 pada 2024. Sebaliknya, produktivitas pekerja dengan pendidikan SD kebawah mengalami penurunan dari 25,84 menjadi 22,88 dalam periode yang sama. Kelompok pekerja dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil dengan sedikit peningkatan pada SMK. Sementara itu, produktivitas tenaga kerja dengan pendidikan Diploma IV/S1/S2/S3 dan Diploma I/II/III juga menunjukkan tren kenaikan yang konsisten meskipun dalam angka yang lebih rendah dibandingkan tingkat pendidikan SMA. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung berkontribusi pada produktivitas kerja yang lebih baik di wilayah tersebut.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Membahas peran Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), inovasi, dan produktivitas ekonomi dalam mendorong pertumbuhan dan daya saing suatu daerah. Kemajuan di bidang Iptek dan inovasi menjadi kunci utama dalam

meningkatkan efisiensi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong produktivitas yang berkelanjutan dalam perekonomian.

1. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan

Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB adalah indikator yang dapat mengindikasikan sejauh mana sektor lapangan usaha industri berkembang dan mempengaruhi perekonomian suatu daerah. Sebagai salah satu sektor terbesar penyumbang PDRB di Provinsi Sumatera Utara, kontribusi Industri Pengolahan diharapkan 20 (dua puluh) tahun ke depan terus meningkat, walaupun kondisi saat ini kontribusi sektor Industri Pengolahan cenderung stagnan bahkan menurun. Tabel yang menunjukkan kontribusi sektor industri pengolahan Sumatera Utara dari tahun 2020 hingga 2024 memberikan gambaran mengenai perkembangan PDRB sektor ini, baik dalam hal kontribusi terhadap ekonomi regional maupun pertumbuhannya. PDRB sektor industri pengolahan (ADHB) mengalami kenaikan signifikan dari Rp 156,50 triliun pada 2020 menjadi Rp 210,61 triliun pada 2024. Kontribusinya terhadap total PDRB juga menunjukkan fluktuasi, dengan kontribusi pada 2020 sebesar 19,29% yang kemudian sedikit menurun menjadi 18,13% pada 2022 dan diperkirakan akan berangsur kembali meningkat menjadi 18,36% pada 2024.

Tabel 2. 76. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Sumatera Utara						
Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB	Triliun Rp	156,50	167,95	182,74	193,74	210,61
PDRB ADHK	Triliun Rp	96,55	97,93	99,87	103,29	108,09
Kontribusi	Persen	19,29	19,53	18,13	18,43	18,36
Pertumbuhan	Persen	-0,84	1,43	1,98	3,42	4,65

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Pertumbuhan sektor ini mengalami kenaikan yang signifikan terutama pada tahun 2023 dan 2024, dengan angka pertumbuhan berturut-turut sebesar 3,42% dan 4,65%. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan yang kuat dan peningkatan kinerja sektor industri pengolahan, setelah penurunan yang terjadi pada tahun 2020 (yang tercatat -0,84%). Penurunan pada tahun 2020 kemungkinan disebabkan oleh dampak dari pandemi COVID-19 yang menghantam hampir seluruh sektor ekonomi, namun sejak 2021, sektor ini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang solid. Pemulihan ini bisa jadi dipengaruhi oleh peningkatan investasi di sektor manufaktur, pengolahan komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan karet, serta dorongan kebijakan pemerintah untuk memperkuat sektor industri pengolahan di Sumatera Utara.

2. Kontribusi Sektor Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan dapat memberikan manfaat pembangunan yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat namun sekaligus sektor yang memiliki VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) yang cukup tinggi, sehingga sedikit saja perubahan global akan berdampak terhadap pariwisata. Seperti yang terjadi pada tahun 2019 yang lalu, akibat melandanya Pandemi Covid-19, merubah paradigma wisatawan dalam berwisata. Provinsi Sumatera Utara dengan kekayaan potensi wisatanya diharapkan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan akan menjadi salah destinasi wisata global. Hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri melihat kondisi daya saing pariwisata Sumatera Utara yang masih rendah, tercermin dari kontribusi sektor Akomodasi Makan-Minum di mana rerata kontribusinya masih cukup rendah yaitu di bawah 3%.

Tabel yang menunjukkan kontribusi sektor akomodasi dan makan minum di Sumatera Utara dari tahun 2020 hingga 2024 menggambarkan dampak signifikan dari pandemi COVID-19 terhadap sektor ini, serta proses pemulihannya. Pada tahun 2020, PDRB sektor ini tercatat Rp 17,69 triliun, dengan kontribusi terhadap PDRB Sumatera Utara sebesar 2,18%. Namun, sektor ini mengalami penurunan tajam pada tahun 2020 (-9,26%) akibat pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi yang mempengaruhi sektor pariwisata dan jasa akomodasi, yang terdampak langsung oleh pandemi.

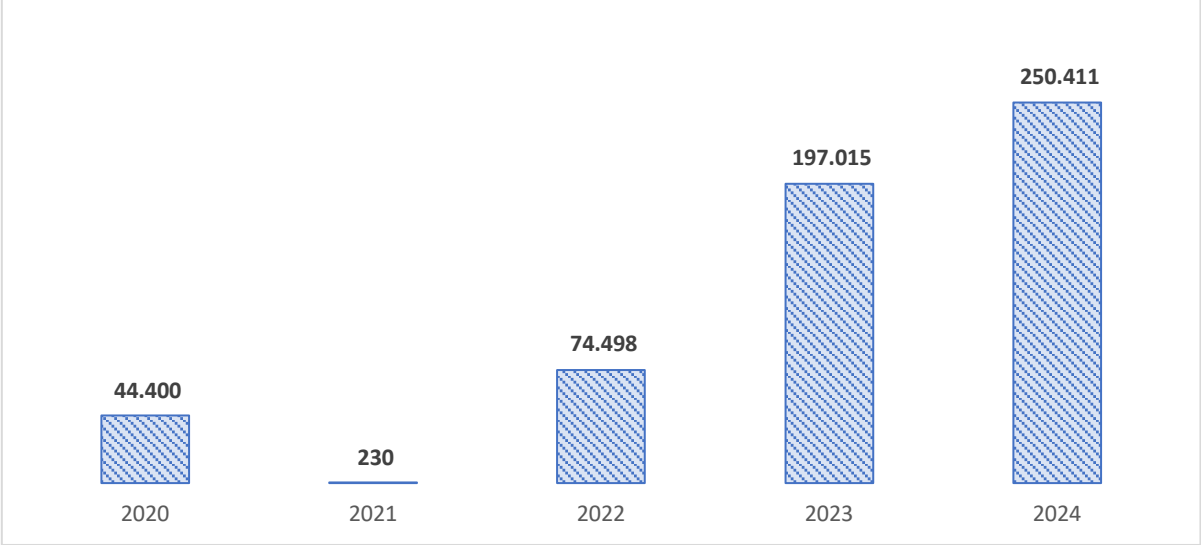
Tabel 2. 77. Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Sumatera Utara

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB	Triliun Rp	17,69	17,66	19,51	11,16	15,33
PDRB ADHK	Triliun Rp	11,99	11,89	12,75	14,06	15,74
Kontribusi	Persen	2,18	2,05	2,04	2,11	2,21
Pertumbuhan	Persen	-9,26	-0,81	7,26	10,23	11,98

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Setelah tahun 2020, sektor ini mulai menunjukkan pemulihan. Pada tahun 2022, kontribusinya meningkat menjadi 2,04% dengan PDRB sektor ini mencapai Rp 19,51 triliun. Pada 2023 dan 2024, sektor ini mengalami pertumbuhan yang lebih stabil, masing-masing sebesar 10,23% dan 11,98%, meskipun kontribusinya terhadap PDRB sedikit menurun menjadi 2,11% dan 2,21%. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan sektor yang kuat pada tahun-tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya aktivitas pariwisata dan konsumerisme setelah pelonggaran pembatasan pandemi. Pemulihan ini dapat dikaitkan dengan kembali meningkatnya jumlah wisatawan dan pembukaan sektor ekonomi yang terdampak, seperti restoran, hotel, dan tempat makan.

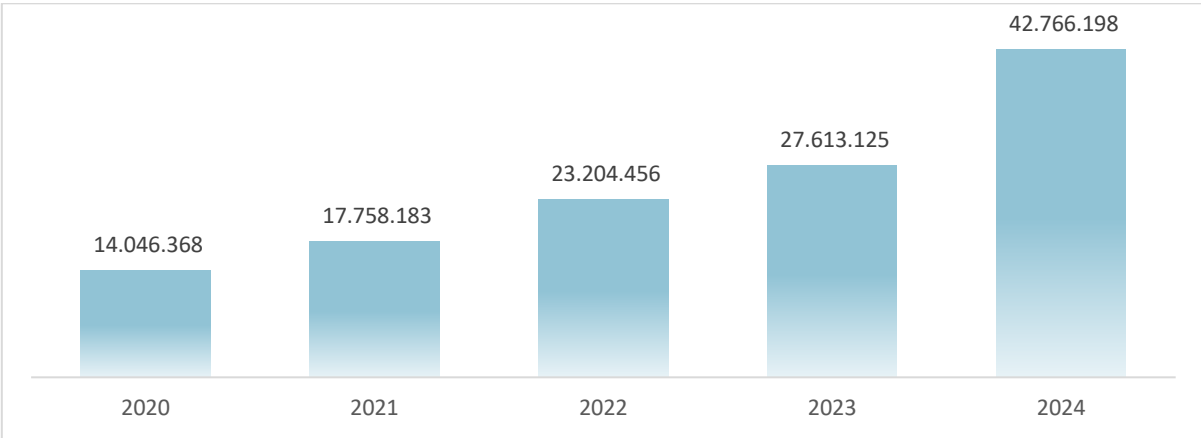
Gambar 2. 29. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Utara



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Sedangkan jika dilihat dari jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Sumatera Utara, rerata kunjungan masih di bawah 300.000 wisman. Pada tahun 2024, jumlah wisman yang berkunjung di Sumatera Utara naik 27,13 persen bila dibandingkan pada tahun 2023, yaitu dari 196.961 kunjungan pada tahun 2024 naik menjadi 250.409 kunjungan pada periode 2024.

Gambar 2. 30. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Sumatera Utara



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Jumlah perjalanan wisatawan Nusantara dengan tujuan Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020 sampai dengan 2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah Wisatawan Nusantara yang datang ke Sumatera Utara sebanyak 14,05 juta orang, dan meningkat 204,47% pada tahun 2024 atau sebanyak 42,77 juta orang.

Tenaga Kerja sektor pariwisata terdiri dari tenaga kerja pada lapangan usaha penyediaan jasa akomodasi bagi wisatatawan, penyediaan jasa makan minum, penyediaan persewaan kendaraan, penyediaan jasa olahraga dan rekreasi, agen perjalanan dan reservasi lainnya. Menurut data dari Kementerian Pariwisata, jumlah tenaga kerja sektor pariwisata di Provinsi

Sumatera Utara pada tahun 2020 sebanyak 1.016.434 orang dan meningkat sebesar 10,08% pada tahun 2022 atau sebanyak 1.118.911 orang, sedangkan untuk tahun 2023-2024, data belum tersedia.

3. Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif

Ekonomi Kreatif (Ekraf) merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu menjadi kekuatan baru ekonomi nasional yang berkelanjutan dan menekankan pada penambahan nilai barang lewat daya pikir serta kreativitas manusia. Saat ini, ekonomi kreatif menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Kontribusi ekonomi kreatif Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010-2016, masih berada di bawah capaian Nasional dengan rata-rata kontribusi masih di bawah 5% setiap tahunnya. Hal ini disebabkan masih kurangnya ekosistem industri ekonomi kreatif dan akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif. Data terkait kontribusi ekonomi kreatif Sumatera Utara dari tahun 2020 hingga saat ini belum tersedia.

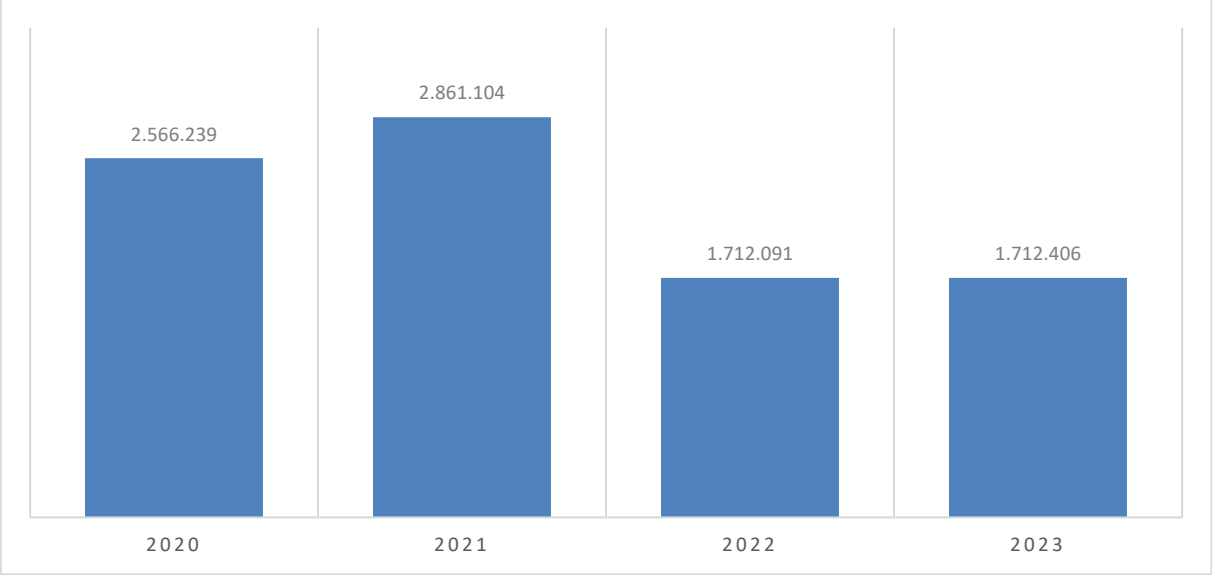
Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren yang cukup stabil dari tahun 2020 hingga 2022. Pada 2020, jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif tercatat sebanyak 841.703 orang, yang meningkat menjadi 985.308 orang pada 2021, dan mencapai angka tertinggi sebesar 1.071.702 orang pada 2022, namun data tahun 2023-2024 tidak tersedia. Informasi ini menggambarkan Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi ekonomi kreatif yang cukup besar. Untuk meningkatkan kontribusi dan nilai tambah dari sektor ini diperlukan ekosistem ekonomi kreatif yang layak, namun saat ini di Provinsi Sumatera Utara ekosistem ekonomi kreatif tersebut belum berjalan secara maksimal, maka diperlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai stakeholders untuk mewujudkan ekosistem ekonomi kreatif yang layak.

4. Produktivitas UMKM, Koperasi, dan BUMD

Produktivitas menggambarkan tingkat efisiensi dalam menghasilkan output. Tingkat produktivitas yang tinggi menunjukkan bahwa suatu organisasi atau sistem mampu menghasilkan lebih banyak output dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit atau sama. Meningkatnya produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD diharapkan mampu mendorong peningkatan perekonomian suatu daerah. Semakin banyak jumlah UMKM, Koperasi dan BUMD diasumsikan akan meningkatkan produktivitasnya. Pertumbuhan jumlah UMKM dan Koperasi dapat memperlihatkan iklim usaha

di suatu daerah cukup meningkat. Jumlah UMKM di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 sebanyak 1.712.406 unit.

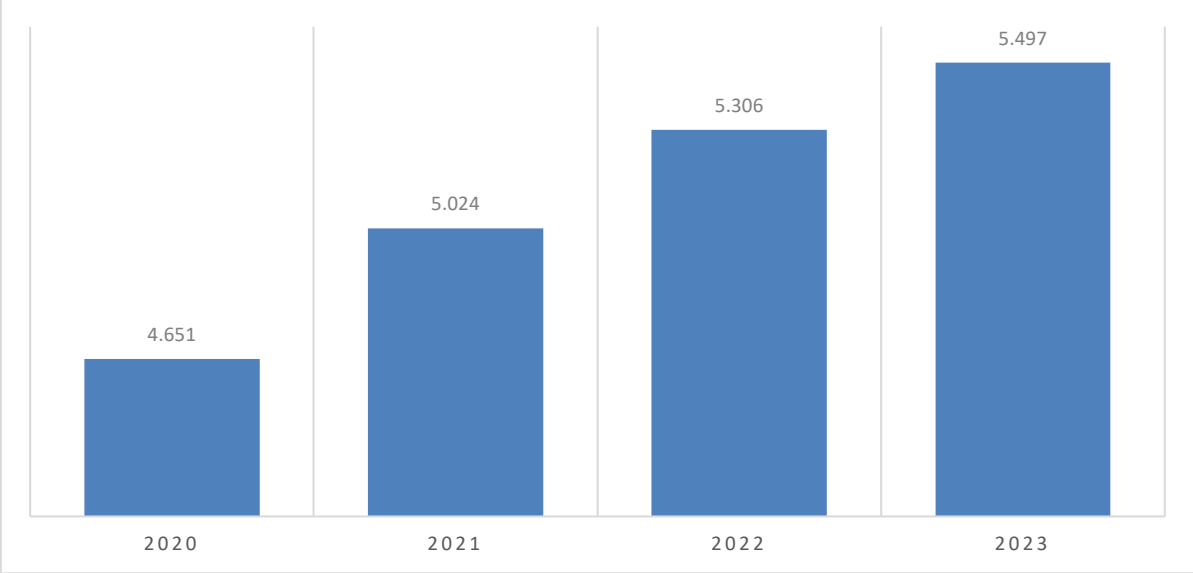
Gambar 2. 31. Jumlah UMKM di Provinsi Sumatera Utara



Sumber: BPS) Provinsi Sumatera Utara, 2024

Sedangkan jumlah koperasi aktif di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 sebanyak 5.497 koperasi meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 5.306 koperasi. Kondisi ini masih belum optimal untuk mendorong peningkatan ekonomi Provinsi Sumatera Utara, hal ini terlihat dari porsi usaha mikro yang masih cukup besar (68,17%) jika dibandingkan dengan usaha kecil dan menengah.

Gambar 2. 32. Jumlah Koperasi Aktif di Provinsi Sumatera Utara



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 7 BUMD, dimana dari tahun 2020 hingga tahun 2024 yang terus memberikan kontribusi terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara hanya 3 BUMD, sedangkan 2 BUMD tidak memberikan kontribusi

terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara dan 2 BUMD lainnya tidak secara konsisten berkontribusi terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2. 78. Deviden BUMD kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

No	BUMD	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1.	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	188.037.661.330	357.099.174.514	269.964.828.615	265.798.013.692	275.982.152.535
2.	Perumda Tirtanadi	48.461.724.366	26.673.011.899	30.250.000.000	31.500.000.000	35.000.000.000
3.	PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda)	1.118.597.653	568.015.508	983.607.100	2.008.999.195	7.632.901.513
4.	PD. Aneka Industri dan Jasa Provsu	0	0	106.481.456	58.750.920	50.000.000
5.	PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda)	0	0	807.553.114	0	0
6.	PT. Dhirga Surya Sumatera Utara	0	0	0	0	0
7.	PT. Jamkrida Sumut (Perseroda)	0	0	0	0	0
Jumlah Total		237.617.983.349	384.340.201.921	302.112.470.285	299.365.763.807	318.665.054.048

Sumber: Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2025

Kontribusi total dari 7 BUMD tersebut terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan trend yang berfluktuasi, dimana pada tahun 2020 berkontribusi sebesar Rp 237 milyar yang kemudian meningkat menjadi Rp 384 milyar pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi Rp 302 milyar di tahun 2022 dan kembali turun menjadi Rp 299 milyar pada tahun 2023 sebelum meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp 318 milyar.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa permasalahan utama BUMD mencakup rendahnya pemenuhan modal dasar, ketidakjelasan fokus usaha, serta pemanfaatan aset yang belum optimal. Keterbatasan penyertaan modal daerah menyebabkan kapasitas keuangan BUMD lemah dan ruang pengembangan usaha terbatas. Di sisi lain, banyak BUMD belum memiliki fokus bisnis yang jelas sehingga terjadi inefisiensi dan tumpang tindih antarunit usaha. Aset-aset produktif belum dimanfaatkan secara maksimal, bahkan dalam kerja sama dengan pihak ketiga sering kali skema bagi hasilnya tidak proporsional dan minim kajian kelayakan bisnis. Lemahnya posisi tawar dan pengawasan terhadap perjanjian kerja sama juga meningkatkan risiko kehilangan aset strategis daerah. Selain itu, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) masih belum konsisten, terlihat dari lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme pengelolaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh dalam tata kelola, manajemen, dan pembiayaan BUMD agar benar-benar mampu berperan sebagai penggerak

ekonomi daerah dan berkontribusi lebih baik bagi peningkatan PAD Provinsi Sumatera Utara.

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah penduduk yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan terhadap total jumlah penduduk usia kerja dalam suatu wilayah. TPAK mengukur seberapa besar proporsi penduduk yang berkontribusi secara aktif dalam pasar tenaga kerja. Indikator ini penting untuk memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Semakin tinggi TPAK, semakin besar proporsi penduduk yang berpartisipasi dalam ekonomi, baik melalui pekerjaan atau pencarian kerja aktif. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Meskipun pada tahun 2020 kondisi pandemi sempat mempengaruhi dinamika ketenagakerjaan, TPAK tetap mampu bertahan dan mulai mengalami perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Peningkatan ini mencerminkan membaiknya kondisi pasar tenaga kerja dan bertambahnya jumlah penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Secara keseluruhan, tren positif ini mengindikasikan bahwa Sumatera Utara berhasil menjaga tingkat partisipasi angkatan kerjanya di tengah tantangan ekonomi yang dinamis.

Tabel 2. 79. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Nias	81,16	81,79	84,50	81,68	82,45
Mandailing Natal	65,94	69,79	71,15	63,07	64,42
Tapanuli Selatan	78,54	74,38	74,53	75,64	75,68
Tapanuli Tengah	70,91	75,05	76,51	74,52	75,72
Tapanuli Utara	82,18	82,63	81,07	81,20	83,69
Toba	81,21	80,38	79,04	80,87	82,57
Labuhan Batu	64,91	61,84	63,51	64,84	65,46
Asahan	59,62	63,02	65,68	69,53	67,64
Simalungun	71,83	72,55	69,91	72,15	71,31
Dairi	70,22	85,73	85,01	84,81	83,80
Karo	83,93	84,56	85,11	83,86	84,13
Deli Serdang	67,23	66,78	66,84	67,62	67,57
Langkat	69,92	69,12	71,51	75,87	76,30
Nias Selatan	77,14	72,25	78,54	79,29	78,83
Humbang Hasundutan	87,13	84,17	85,83	86,67	86,52
Pakpak Bharat	88,95	87,70	86,20	85,95	85,43
Samosir	52,17	84,38	83,57	86,89	85,59
Serdang Bedagai	69,82	66,75	67,59	67,65	67,75
Batu Bara	69,10	70,00	73,50	72,94	72,01

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Padang Lawas Utara	66,04	76,82	70,33	73,41	73,01
Padang Lawas	76,93	75,23	75,10	78,14	77,52
Labuhanbatu Selatan	60,94	66,38	66,76	73,2	71,92
Labuanbatu Utara	68,08	65,73	65,31	64,68	64,87
Nias Utara	73,71	74,27	77,75	81,27	79,70
Nias Barat	51,83	82,08	84,63	81,08	81,18
Sibolga	70,38	71,19	65,85	71,18	70,83
Tanjungbalai	65,84	66,57	70,77	69,79	69,57
Pematangsiantar	70,45	68,80	65,27	70,96	71,82
Tebing Tinggi	69,27	67,19	77,26	65,70	66,48
Medan	63,62	62,16	62,23	64,67	66,44
Binjai	65,14	62,77	58,61	62,79	64,22
Padangsidempuan	73,24	68,69	64,41	68,9	68,53
Gunungsitoli	62,82	62,95	66,11	67,77	71,12
Sumatera Utara	68,67	69,10	69,53	71,06	71,36

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2020–2024, terlihat bahwa sebagian besar wilayah mengalami fluktuasi dalam tingkat partisipasi angkatan kerja. Beberapa daerah dengan TPAK yang relatif rendah dan memerlukan intervensi lebih lanjut untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja adalah Kabupaten Samosir (52,17% pada 2020), Kabupaten Nias Barat (51,83% pada 2020), serta Kota Binjai yang memiliki TPAK yang terus menurun pada 2024 (58,61%). TPAK yang rendah di daerah ini mencerminkan rendahnya keterlibatan angkatan kerja dalam kegiatan ekonomi, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor seperti terbatasnya lapangan kerja, kualitas pendidikan yang rendah, serta kurangnya keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, intervensi yang diperlukan mencakup peningkatan pelatihan keterampilan kerja, peningkatan akses pendidikan vokasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri lokal, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi produktif di wilayah tersebut. Selain itu, perlu adanya dorongan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru melalui investasi di sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, seperti pariwisata, agribisnis, dan industri kreatif, yang dapat meningkatkan TPAK secara berkelanjutan di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian khusus ini.

6. Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda motor

PDRB dari sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor, mencerminkan kontribusi aktivitas jual beli barang secara

grosir dan eceran, sekaligus layanan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotor. Sektor ini memegang peranan penting karena berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat sehari-hari dan kebutuhan mobilitas kendaraan. Kegiatan perdagangan besar dan eceran mencakup berbagai produk seperti bahan pangan, elektronik, pakaian, dan barang konsumsi lainnya, sementara layanan reparasi kendaraan mendukung kelancaran sistem transportasi. Selain itu, sektor ini membuka banyak peluang kerja, baik di bidang ritel maupun di bengkel perawatan kendaraan, serta memberikan dampak besar terhadap rantai pasok dan sektor lain seperti manufaktur dan distribusi. Pertumbuhan PDRB pada sektor ini umumnya mencerminkan tingginya daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi yang positif, sekaligus menjadi indikator utama dalam menganalisis pola konsumsi dan dinamika ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2. 80. PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Provinsi Sumatera Utara

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB	Milyar Rp	153.226,38	162.578,56	181.413,59	200.530,11	215.493,94
PDRB ADHK	Milyar Rp	95.120,46	98.560,07	105.037,72	111.128,79	116.065,40
Pertumbuhan	Persen	-1,87	3,62	6,57	5,80	4,44
Rasio	Persen	18,89	18,91	18,99	19,08	18,79

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Sumatera Utara menunjukkan tren pertumbuhan positif selama periode 2020–2024. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) meningkat dari Rp153.226,38 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp215.493,94 miliar pada tahun 2024, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) bertambah dari Rp95.120,46 miliar menjadi Rp116.065,40 miliar. Setelah mengalami kontraksi sebesar -1,87% pada tahun 2020, sektor ini pulih dengan pertumbuhan positif berturut-turut hingga mencapai 4,44% pada 2024. Rasio kontribusi sektor ini terhadap total PDRB juga stabil, berkisar antara 18,89% hingga 19,08%, menandakan peran penting sektor perdagangan dalam menopang perekonomian Sumatera Utara.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru mengacu pada konsep pembangunan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Ekonomi hijau berfokus pada pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan dengan mendorong sektor-sektor seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sementara itu, ekonomi biru berfokus pada

pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, termasuk sektor perikanan, pariwisata laut, dan energi laut, dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem laut. Penerapan kedua konsep ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, mengurangi kerusakan alam, dan memastikan keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

1. Indeks Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau adalah sebuah model pembangunan ekonomi yang berfokus kepada investasi, modal infrastruktur, pekerjaan, dan keterampilan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan lingkungan berkelanjutan. Performa ekonomi hijau harus dilacak sesuai kemajuan terhadap target nasional dan pembangunan global sehingga aspek keberlanjutan ekonomi dapat diukur berdasarkan aksi. Untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara tangible, representatif, dan akurat maka disusun Indeks Ekonomi Hijau sebagai instrumen pengukuran.

Tabel 2. 81. Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Utara					
Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
Indeks Ekonomi Hijau	Persen	47,57	48,62	60,26	64,86

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Data Indeks Ekonomi Hijau Sumatera Utara menunjukkan tren meningkat pada 2020–2023, naik dari 47,57% menjadi 64,86%. Kenaikan besar pada 2022 menandai kemungkinan terjadinya pergeseran struktural seperti percepatan program energi bersih, penguatan pengelolaan limbah dan rehabilitasi lahan, serta mulai berjalannya insentif investasi ramah lingkungan dan praktik ekonomi sirkular di sektor industri dan perkebunan. Pergerakan Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Utara bergerak ke arah yang benar, dengan periode akselerasi pada 2022 sebagai titik balik dimana prioritas ke depan adalah menjaga konsistensi kebijakan lintas kabupaten/kota, memperluas insentif fiskal berbasis kinerja hijau, memperkuat kemitraan swasta dengan UMKM, serta meningkatkan kualitas data dan monitoring agar kenaikan indeks ini berkelanjutan dan semakin inklusif.

2. Indeks Ekonomi Biru

Indeks Ekonomi Biru adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana Provinsi Sumatera Utara mengembangkan dan menerapkan prinsip ekonomi biru, yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ekonomi

biru mencakup berbagai sektor, seperti perikanan, kelautan, pariwisata pesisir, energi terbarukan berbasis laut, dan pelestarian ekosistem laut. Indeks ini mengukur kinerja suatu wilayah dalam mengelola sumber daya laut, termasuk dalam hal keberlanjutan lingkungan, pengelolaan sampah laut, serta perlindungan terhadap biodiversitas laut. Peningkatan indeks ekonomi biru menunjukkan bahwa suatu wilayah semakin sukses dalam mengoptimalkan potensi kelautan tanpa merusak lingkungan, yang penting untuk mendukung kesejahteraan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem laut. Indeks ini menjadi indikator penting dalam menilai kebijakan dan implementasi ekonomi biru di tingkat nasional maupun daerah, serta untuk memastikan bahwa sektor kelautan berkembang dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Indeks Ekonomi Biru Sumatera Utara tahun 2023 yang tercatat 45,77 menegaskan bahwa implementasi ekonomi biru masih berada pada fase awal dengan tantangan utama pada tata kelola pesisir-laut, kualitas dan keterpaduan data, pendanaan biru, adopsi praktik perikanan berkelanjutan oleh UMKM, serta penegakan terhadap pencemaran dan penangkapan destruktif. Angka ini dapat dijadikan baseline untuk merumuskan target tahunan yang terukur, sambil mendorong “quick wins” seperti rehabilitasi mangrove dan perlindungan kawasan pesisir prioritas, pengurangan sampah plastik di aliran sungai-pelabuhan, peningkatan efisiensi rantai dingin perikanan, sertifikasi keberlanjutan, dan pengembangan wisata bahari rendah emisi. Di sisi kelembagaan, diperlukan penguatan koordinasi lintas dinas dan kabupaten/kota, skema pembiayaan inovatif (mis. kemitraan publik-swasta dan instrumen keuangan biru), serta sistem monitoring berbasis komunitas dan teknologi untuk mempercepat perbaikan skor. Sinergi dengan agenda ekonomi hijau khususnya pengelolaan limbah, energi bersih untuk pelabuhan, dan tata guna lahan yang akan membantu menaikkan indeks ekonomi biru secara konsisten dan inklusif.

3. Porsi Energi Baru Terbarukan

Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer mengacu pada persentase kontribusi energi yang berasal dari sumber terbarukan, seperti tenaga surya, angin, biomassa, panas bumi, dan energi laut, terhadap total konsumsi energi primer di suatu negara atau wilayah. Bauran energi primer mencerminkan kombinasi berbagai sumber energi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar energi, termasuk energi fosil (seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara) serta energi terbarukan.

Peningkatan porsi EBT dalam bauran energi primer menjadi salah satu fokus global untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan mempercepat emisi gas rumah kaca. Dengan memperluas penggunaan EBT, suatu negara dapat mempercepat peralihan menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi dampak perubahan iklim serta membuka peluang baru dalam pengembangan teknologi energi terbarukan. Indikator ini penting untuk mengukur kemajuan negara atau daerah dalam mencapai ketahanan energi dan keberlanjutan lingkungan. Saat ini, data mengenai porsi EBT dalam bauran energi primer untuk Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 82. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Sumatera Utara

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	14,34	21,97	36,44	40,45	42,04
Jumlah PLTS	Unit	2	1	1	3	2

Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2025

Porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer di Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2020 hingga 2024, dengan nilai sebesar 14,34% pada 2020, meningkat menjadi 42,04% pada 2024. Kenaikan porsi EBT sejalan dengan agenda nasional dalam mendorong dekarbonisasi sektor energi, khususnya melalui pemanfaatan potensi energi hidro, panas bumi (geothermal), biomassa, dan surya yang cukup besar di Sumatera Utara. Peningkatan tersebut bisa dikaitkan dengan sejumlah proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan panas bumi yang mulai beroperasi, serta dorongan investasi dalam energi bersih melalui kemitraan publik-swasta. Dimana terdapat sejumlah inisiatif yang menunjukkan komitmen Provinsi Sumatera Utara dalam mendorong pengembangan energi terbarukan. Salah satu contohnya adalah pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun, yang diolah menjadi biomassa untuk proses co-firing di PLTU Pangkalan Susu, sehingga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mendukung target net zero emission. Peningkatan tersebut bisa dikaitkan dengan sejumlah proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan panas bumi yang mulai beroperasi, serta dorongan investasi dalam energi bersih melalui kemitraan publik-swasta.

Dalam konteks ini, rekomendasi kebijakan yang perlu diperkuat ke depan antara lain adalah: mempercepat penyelesaian proyek-proyek EBT, menyederhanakan proses perizinan energi bersih, serta memperkuat skema pembiayaan hijau melalui kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga

donor. Selain itu, pemerintah provinsi dapat mengembangkan peta jalan transisi energi daerah (Energy Transition Roadmap) yang memuat target tahunan, proyek prioritas, dan skenario investasi rendah karbon. Penting pula untuk memperluas program energi terbarukan berbasis masyarakat, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala rumah tangga, yang juga dapat mendukung pemberdayaan ekonomi lokal dan ketahanan energi daerah dan juga mendukung komitmen nasional terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dan pencapaian target Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat, Sumatera Utara perlu memastikan bahwa transisi energi dilakukan secara konsisten, progresif, dan inklusif di seluruh lapisan masyarakat.

2.1.3.4 Transformasi Digital

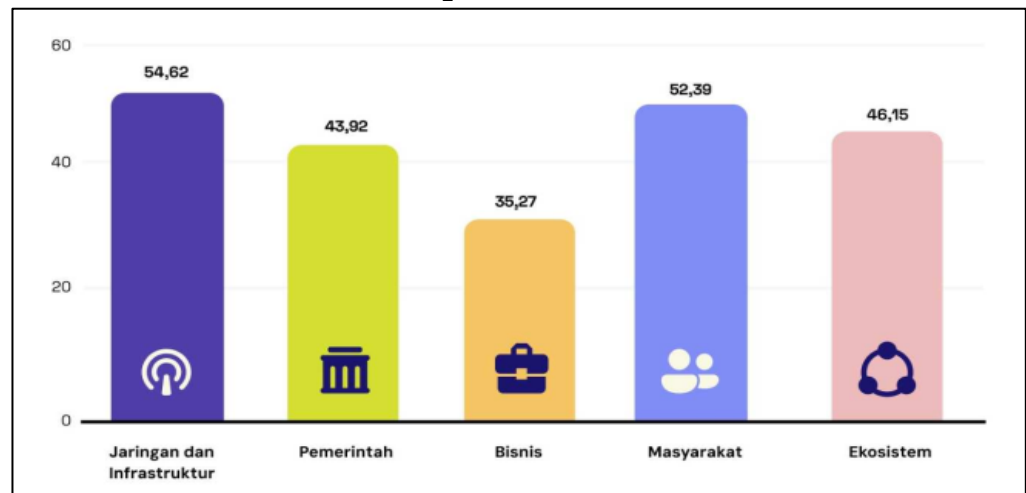
1. Indeks Transformasi Digital

Dalam rangka mendukung percepatan implementasi transformasi digital nasional, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan percepatan transformasi digital pada bidang (1)Infrastruktur digital, (2)Pemerintahan digital, (3)Ekonomi digital, (4)Masyarakat digital. Percepatan penerapan transformasi digital di pemerintah daerah dilakukan dengan menyusun rencana dan anggaran SPBE, menyelenggarakan provinsi cerdas dan kabupaten dan/atau kota cerdas, perumusan/penyusunan, dan penerapan kebijakan publik serta dalam penggunaan/pemanfaatan layanan publik berbasis digital.

Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Sumatera Utara berada pada posisi ke 21 dengan klasifikasi C dan skor pada tahun 2022 sebesar 47,00. Meskipun demikian Provinsi Sumatera Utara menunjukkan peningkatan ke arah yang positif selama periode 2018-2022, menandakan adanya upaya yang terus dilakukan dalam pembangunan digital. Dilihat dari seluruh pilar dalam Indeks Transformasi Digital Nasional, Pilar yang memperoleh capaian cukup baik ditahun 2022 adalah Jaringan Infrastruktur dengan skor 54,62 atau berada dalam klasifikasi B (Baik). Pilar ini didukung oleh perkembangan infrastruktur jaringan digital yang mendorong pertumbuhan pengguna internet dan pelanggan seluler di Provinsi Sumatera Utara. Pilar Masyarakat juga menunjukkan kinerja pada Klasifikasi B (Baik) di tahun 2022 dengan Skor 52,39. Kemampuan guru dalam mengajar berbagai ketrampilan digital dan critical thinking pada siswa, serta peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Sumatera Utara berdampak pada peningkatan kemampuan digital masyarakat. Pilar Bisnis belum menunjukkan hasil yang optimal, berdasarkan hasil analisis, indikator aliran

modal masih memiliki skor yang relatif rendah, keterbatasan modal berdampak pada keterbatasan bisnis untuk melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk dapat bersaing di era digital saat ini, pelaku usaha dituntut untuk terus dapat melakukan inovasi berkelanjutan dan memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi serta daya saing. Selanjutnya Pilar Pemerintah juga masih menunjukkan kinerja yang belum optimal ditandai dengan perolehan skor di angka 43,92 dan berada pada Klasifikasi C (Cukup), Skor E-government indeks di Provinsi Sumatera Utara sudah menunjukkan angka yang baik, tetapi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-government masih tergolong rendah, sebagaimana terlihat dari skor e-participation indeks yang masih relatif rendah.

Gambar 2. 33. Skor pilar Provinsi Sumatera Utara



Sumber : IndeksTDN

Transformasi digital merupakan isu strategis yang harus segera ditangani melalui kebijakan yang terencana, kolaboratif, dan terukur. Transformasi digital di Provinsi Sumatera Utara diarahkan pada penguatan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas SDM digital, pengembangan layanan publik berbasis teknologi, integrasi sistem informasi lintas sektor, serta penguatan tata kelola data dan keamanan siber. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Sumatera Utara dapat mewujudkan pemerintahan digital yang inklusif, efisien, dan berdaya saing.

2. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan ukuran standar tingkat pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di suatu wilayah yang dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah. Selain itu IP-TIK juga mampu mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur GAP digital atau kesenjangan digital antarwilayah serta mengukur potensi pembangunan TIK. Dalam perhitungannya terdapat 11 indikator penyusun IP-TIK yang terbagi menjadi 3 sub indeks yaitu sub indeks akses

dan infrastruktur TIK, sub indeks penggunaan TIK, dan sub indeks keahlian TIK. Pembangunan TIK Provinsi Sumatera Utara menunjukkan perkembangan positif dari tahun 2020 dengan nilai indeks IP-TIK sebesar 5,44 poin meningkat dengan nilai menjadi 6,04 poin pada tahun 2023.

Tabel 2. 83. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,44	5,75	5,90	6,04	na

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Skor Digital Competitiveness Index (DCI) Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 menunjukkan capaian yang bervariasi di setiap indikator. Pada kategori input, skor tertinggi dicapai oleh penggunaan TIK sebesar 58,8, diikuti sumber daya manusia 49,9 dan pengeluaran untuk TIK 40,1. Sementara itu, pada kategori output, skor tertinggi berada pada ketenagakerjaan dengan 40,3, disusul kewirausahaan dan produktivitas 35,9, serta perekonomian 29,5. Untuk kategori penunjang, infrastruktur dan regulasi serta kapasitas pemerintah daerah menunjukkan skor yang cukup tinggi masing-masing sebesar 67,2 dan 67,4, sedangkan sektor keuangan mencatat skor 45,9.

IMDI atau Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun tingkat pekerjaannya. Pengukuran IMDI telah dilaksanakan sejak tahun 2022 dan dilaksanakan setiap tahun. IMDI merupakan indeks pengganti muktahir bagi IP-TIK yang digunakan oleh kabupaten/kota, dengan pengukuran cakupan yang lebih luas dan atribut yang lebih relevan dalam era digital saat ini. Pemerintah daerah kini memiliki kerangka terukur untuk mengevaluasi kondisi masyarakat digitalnya sendiri, sehingga kebijakan pembangunan dapat disesuaikan dengan tantangan dan potensi masing-masing wilayah.

Tabel 2. 84. Indeks Masyarakat Digital Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	2022	2023	2024
Nias	19.89	45.87	39.90
Mandailing Natal	36.69	38.31	38.30
Tapanuli Selatan	39.17	46.24	36.56
Tapanuli Tengah	40.31	43.45	40.34
Tapanuli Utara	34.71	44.50	41.97
Toba	31.35	47.86	39.37
Labuhan Batu	42.01	46.76	45.78
Asahan	28.65	46.30	44.84
Simalungun	40.47	39.10	43.71

Kabupaten/Kota	2022	2023	2024
Dairi	29.48	44.91	40.22
Karo	39.21	47.12	39.99
Deli Serdang	40.63	48.18	44.33
Langkat	45.82	40.76	44.46
Nias Selatan	37.04	46.14	37.79
Humbang Hasundutan	30.59	40.62	42.11
Pakpak Bharat	29.95	42.43	37.42
Samosir	31.63	41.05	44.51
Serdang Bedagai	41.72	47.24	41.28
Batu Bara	33.08	41.05	37.63
Padang Lawas Utara	38.24	40.32	36.16
Padang Lawas	39.22	47.20	40.18
Labuhanbatu Selatan	24.50	38.03	39.44
Labuanbatu Utara	37.40	43.71	41.54
Nias Utara	30.49	45.69	39.68
Nias Barat	35.21	37.55	33.75
Sibolga	31.13	40.89	39.25
Tanjungbalai	28.96	44.45	44.33
Pematangsiantar	43.13	42.96	43.33
Tebing Tinggi	47.85	49.20	44.43
Medan	52.35	51.47	49.93
Binjai	30.75	50.24	43.88
Padangsidempuan	42.19	44.19	41.45
Gunungsitoli	39.94	47.08	42.42

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Provinsi Sumatera Utara menggambarkan tingkat perkembangan masyarakat digital di 33 kabupaten/kota yang dapat dibandingkan antar waktu dan wilayah. Secara umum, capaian IMDI menunjukkan peningkatan signifikan pada 2023 dibandingkan 2022, meskipun pada 2024 sebagian daerah mengalami penurunan. Pada 2022, indeks tertinggi dicapai Kota Medan dengan nilai 52,35, diikuti Tebing Tinggi (47,85) dan Langkat (45,82), sementara nilai terendah berada di Nias (19,89) dan Labuhanbatu Selatan (24,50). Tahun 2023 mencatat peningkatan hampir di seluruh daerah, dengan Medan (51,47), Binjai (50,24), dan Tebing Tinggi (49,20) berada di posisi teratas. Namun, pada 2024 meski Medan tetap memimpin dengan nilai 49,93 dan Labuhanbatu (45,78), sedangkan daerah lain seperti Asahan (44,78) dan Samosir (44,51) menempati peringkat berikutnya, sementara nilai terendah tercatat di Nias Barat (33,75) dan Nias Selatan (37,79). Perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun transformasi digital mengalami kemajuan pada 2023, upaya peningkatan berkelanjutan masih diperlukan agar capaian indeks tidak mengalami fluktuasi di tahun-tahun berikutnya.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur total investasi dalam barang modal yang berfungsi dalam produksi barang dan jasa di suatu perekonomian. PMTB meliputi pembelian maupun perbaikan aset tetap seperti bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, serta berbagai infrastruktur lain yang digunakan dalam kegiatan produksi. Investasi ini mencakup kontribusi dari sektor publik dan swasta, serta mencerminkan upaya suatu negara atau wilayah dalam memperluas kapasitas produksi dan meningkatkan daya saing ekonominya. Kenaikan PMTB umumnya menunjukkan pertumbuhan investasi yang mendorong perkembangan sektor ekonomi, membuka peluang kerja baru, dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, PMTB berperan sebagai indikator utama dalam menilai prospek ekonomi ke depan, karena investasi dalam aset tetap sangat penting untuk memperbesar kapasitas ekonomi dalam jangka panjang. Sebaliknya, penurunan PMTB bisa menjadi tanda menurunnya minat investasi, yang berpotensi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi suatu daerah.

Tabel 2. 85. Pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi Sumatera Utara

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB	Milyar Rp	248.510,59	262.865,94	282.469,79	310.220,67	328.629,53
PDRB ADHK	Milyar Rp	161.327,64	166.914,74	173.314,81	181.084,18	190.051,10
Pertumbuhan	Persen	-1,17	3,46	3,83	4,48	4,95
Rasio	Persen	30,64	30,57	29,57	29,52	28,65

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Sumatera Utara mengalami pertumbuhan positif sepanjang periode 2020 hingga 2024. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) meningkat dari Rp248.510,59 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp328.629,53 miliar pada tahun 2024, sementara PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) bertambah dari Rp161.327,64 miliar menjadi Rp190.051,10 miliar. Pertumbuhan sektor ini membaik setelah sempat mengalami kontraksi sebesar -1,17% pada tahun 2020, lalu meningkat secara bertahap hingga mencapai 4,95% di tahun 2024. Meskipun demikian, rasio kontribusi PMTB terhadap total PDRB sedikit menurun dari 30,64% pada tahun 2020 menjadi 28,65% pada tahun 2024, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam mendorong investasi untuk menjaga kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Ekspor barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa merupakan elemen kunci dalam perekonomian suatu daerah, yang mencerminkan nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri dan dijual ke pasar di luar daerah maupun internasional. Ekspor secara langsung berkontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan pendekatan pengeluaran, yang mencakup keseluruhan pengeluaran dalam ekonomi, seperti konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, serta ekspor neto (selisih antara ekspor dan impor). Dalam kaitannya dengan PDRB, ekspor barang dan jasa berperan penting sebagai pendorong permintaan eksternal, yang berdampak pada produksi dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Peningkatan ekspor mendorong permintaan terhadap barang dan jasa domestik, sehingga memperkuat sektor produksi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, penurunan ekspor dapat menghambat pertumbuhan ekonomi akibat melemahnya permintaan eksternal, yang berdampak pada berkurangnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor terkait. Oleh sebab itu, sektor ekspor menjadi salah satu pilar utama yang menopang stabilitas dan keberlanjutan ekonomi suatu daerah atau negara, sekaligus berkontribusi dalam pembentukan PDRB berdasarkan pengeluaran.

Tabel 2. 86. Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Utara

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB	Milyar Rp	60.983,03	79,861,52	107.146,98	117.119,15	144.065,68
PDRB ADHK	Milyar Rp	53.969,26	56.253,33	63.137,14	65.307,10	70.994,75
Rasio	Persen	7,52	9,29	11,22	11,14	12,56

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Ekspor barang dan jasa di Provinsi Sumatera Utara mengalami pertumbuhan yang signifikan sepanjang periode 2020 hingga 2024. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) meningkat dari Rp60.983,03 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp144.065,68 miliar pada tahun 2024, sementara PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) juga naik dari Rp53.969,26 miliar menjadi Rp70.994,75 miliar. Rasio kontribusi ekspor terhadap total PDRB menunjukkan tren positif, naik dari 7,52% di tahun 2020 menjadi 12,56% di tahun 2024. Data ini mencerminkan bahwa sektor ekspor menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dalam beberapa tahun terakhir, didukung oleh peningkatan volume perdagangan barang dan jasa ke pasar internasional.

2.1.3.6 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana infrastruktur yang ada di suatu daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti kualitas dan ketersediaan layanan transportasi, air bersih, energi, sanitasi, komunikasi, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan. Infrastruktur yang berkualitas sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mempercepat pembangunan. Indeks ini memberikan gambaran mengenai seberapa baik infrastruktur yang ada dalam menyediakan layanan yang efisien, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Peningkatan kualitas layanan infrastruktur akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas, aksesibilitas, serta kesejahteraan sosial. Sebaliknya, infrastruktur yang buruk dapat menjadi hambatan besar dalam pertumbuhan ekonomi dan mengurangi daya saing suatu daerah. Oleh karena itu, Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur menjadi indikator penting untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan infrastruktur di suatu wilayah.

2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Proporsi rumah tangga dengan akses hunian layak adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap tempat tinggal yang memenuhi standar kesehatan dan kualitas hidup. Hunian layak tidak hanya mencakup ketersediaan tempat tinggal yang cukup, tetapi juga melibatkan aspek-aspek seperti sanitasi yang baik, ventilasi yang memadai, pasokan air bersih, serta fasilitas dasar lainnya yang mendukung kenyamanan dan kesehatan penghuni. Proporsi ini mengacu pada persentase rumah tangga yang tinggal di rumah dengan kondisi yang sesuai dengan standar tersebut dibandingkan dengan total rumah tangga dalam suatu wilayah. Semakin tinggi proporsi rumah tangga dengan akses hunian layak, semakin baik kondisi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Indikator ini sangat penting dalam menilai kesejahteraan sosial, karena hunian yang tidak layak dapat berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan produktivitas masyarakat. Peningkatan proporsi rumah tangga dengan akses hunian layak mencerminkan kemajuan dalam pembangunan perumahan yang mendukung kualitas hidup yang lebih baik.

Tabel 2. 87. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	67,44	69,48	67,26	70,95	73,47

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Data dalam tabel tersebut menunjukkan perkembangan persentase rumah tangga dengan akses hunian layak di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020 hingga 2024. Terlihat adanya peningkatan secara keseluruhan selama periode tersebut, mulai dari 67,44% pada tahun 2020, naik menjadi 69,48% pada tahun 2021, sedikit menurun menjadi 67,26% pada tahun 2022, kemudian kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2023 menjadi 70,95%, dan mencapai angka tertinggi sebesar 73,47% pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan adanya perbaikan akses hunian layak bagi rumah tangga di wilayah tersebut, meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2022 yang kemudian segera teratasi pada tahun-tahun berikutnya.

Rumah tangga dengan akses hunian layak di Sumatera Utara menunjukkan tren positif yang harus diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan, karena hunian layak berdampak langsung pada kesehatan masyarakat (terutama fasilitas air minum dan sanitasi) sehingga meningkatkan produktivitas, penurunan kemiskinan dan menciptakan ketahanan bencana. Perencanaan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara perlu mengintegrasikan penataan kawasan kumuh, penyediaan prasarana dasar permukiman, skema pembiayaan terjangkau bagi MBR (subsidi/KPR mikro/rumah swadaya), serta koordinasi lintas sektor-wilayah agar capaian terus naik dan kesenjangan antar wilayah menyempit.

3. Persentase Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Desa mandiri mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memiliki infrastruktur yang memadai, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Perkembangan jumlah dan persentase desa mandiri di Sumatera Utara menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam periode 2020 hingga 2024. Berdasarkan data yang tersedia, pada tahun 2020, jumlah desa mandiri di Sumatera Utara tercatat sebanyak 9 desa, yang merepresentasikan 0,17% dari total 5417 desa. Angka ini mengalami peningkatan yang substansial setiap tahunnya. Pada tahun 2021, jumlah desa mandiri meningkat menjadi 16 desa (0,30%), kemudian melonjak

menjadi 30 desa (0,55%) pada tahun 2022, dan mencapai 72 desa (1,33%) pada tahun 2023. Puncak peningkatan terjadi pada tahun 2024 dengan 168 desa mandiri, atau sekitar 3,10% dari total desa di provinsi tersebut.

Secara kuantitatif, tingkat pertumbuhan desa mandiri di Sumatera Utara menunjukkan akselerasi yang impresif. Pertumbuhan dari tahun 2020 ke 2021 adalah sebesar 77,78%, diikuti oleh pertumbuhan 87,50% dari 2021 ke 2022. Laju pertumbuhan semakin cepat pada periode 2022-2023 dengan 140,00%, dan berlanjut dengan 133,33% dari 2023 ke 2024. Secara keseluruhan, dari tahun 2020 hingga 2024, jumlah desa mandiri di Sumatera Utara mengalami pertumbuhan kumulatif sebesar 1766,67%. Peningkatan yang drastis ini mengindikasikan keberhasilan program pemberdayaan desa dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola potensi dan sumber daya lokal untuk mencapai kemandirian. Meskipun demikian, persentase desa mandiri terhadap total desa di Sumatera Utara masih relatif kecil (3,10% pada tahun 2024), menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang luas untuk pengembangan lebih lanjut dan upaya akselerasi dalam mencapai target kemandirian desa yang lebih tinggi di masa mendatang.

Peningkatan jumlah dan persentase desa mandiri di Sumatera Utara dalam lima tahun terakhir adalah capaian yang patut diapresiasi. Namun, untuk mencapai kemandirian desa yang lebih merata dan berkelanjutan, diperlukan upaya yang lebih intensif dan terarah. Pembangunan desa yang berfokus pada penguatan ekonomi desa, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur dasar, dan penguatan tata kelola pemerintahan desa diharapkan dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam merumuskan strategi pembangunan desa jangka menengah. Dengan implementasi kebijakan yang konsisten dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, visi desa mandiri yang sejahtera dan berdaya saing di Sumatera Utara dapat terwujud.

Tabel 2. 88. Jumlah dan Persentase Desa Mandiri Provinsi Sumatera Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	TOTAL JUMLAH DESA	JUMLAH DESA MANDIRI (TAHUN)					PERSENTASE DESA MANDIRI				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	Asahan	177	0	0	0	1	4	0,00	0,00	0,00	0,56	2,26
2	Batubara	141	2	5	11	16	19	1,42	3,55	7,80	11,35	13,48
3	Dairi	161	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Deli Serdang	380	2	4	9	17	27	0,53	1,05	2,37	4,47	7,11
5	Humbang Hasundutan	153	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Karo	259	1	1	1	5	6	0,39	0,39	0,39	1,93	2,32
7	Gunungsitoli	98	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
8	Padangsidempuan	42	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Labuhanbatu	75	0	0	0	2	5	0,00	0,00	0,00	2,67	6,67
10	Labuhanbatu Selatan	52	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Labuhanbatu Utara	82	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00
12	Langkat	240	0	0	0	6	27	0,00	0,00	0,00	2,50	11,25
13	Mandailing Natal	377	2	3	3	6	6	0,53	0,80	0,80	1,59	1,59
14	Nias	170	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Nias Barat	105	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Nias Selatan	459	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Nias Utara	112	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Padang Lawas	303	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33
19	Padang Lawas Utara	386	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
20	Pakpak Bharat	52	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Samosir	128	0	0	0	3	6	0,00	0,00	0,00	2,34	4,69
22	Serdang Bedagai	237	0	1	4	10	43	0,00	0,42	1,69	4,22	18,14
23	Simalungun	386	2	2	2	2	11	0,52	0,52	0,52	0,52	2,85
24	Tapanuli Selatan	211	0	0	0	2	9	0,00	0,00	0,00	0,95	4,27
25	Tapanuli Tengah	159	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Tapanuli Utara	241	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Toba	231	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sumatera Utara		5.417	9	16	30	72	168	0,17	0,30	0,55	1,33	3,10

Sumber: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, 2025

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB adalah indikator yang mengukur sejauh mana penerimaan pajak daerah berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Indikator ini memberikan gambaran tentang seberapa besar bagian dari total pendapatan daerah yang berasal dari sektor pajak dibandingkan dengan keseluruhan aktivitas ekonomi daerah. Rasio ini penting karena menunjukkan kapasitas daerah dalam memungut pajak dan ketergantungan ekonomi daerah terhadap penerimaan pajak. Semakin tinggi rasio pajak daerah terhadap PDRB, semakin besar kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah, yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Sebaliknya, rasio yang rendah dapat menunjukkan bahwa daerah tersebut masih bergantung pada sumber pendapatan lain, seperti transfer dari pemerintah pusat, atau kurang optimal dalam pemungutan pajak. Oleh karena itu, rasio ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan fiskal daerah dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.

Tabel 2. 89. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Provinsi	Persen	0,96	1,05	1,10	1,04	0,98

Sumber: Kemenkeu dan BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Pada tahun 2020, rasio pajak daerah terhadap PDRB tercatat sebesar 0,96 persen. Nilai ini kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 1,05 persen, dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 1,10 persen. Peningkatan ini dapat ditafsirkan sebagai hasil dari membaiknya aktivitas ekonomi pasca-pandemi COVID-19, serta adanya intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan daerah yang dilakukan pemerintah provinsi melalui optimalisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pajak lainnya yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu, penggunaan sistem digital dalam pengelolaan pajak daerah serta kampanye kepatuhan pajak juga turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan rasio pada periode tersebut.

Namun demikian, pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan rasio menjadi masing-masing 1,04 persen dan 0,98 persen. Penurunan ini menandakan adanya pelemahan dalam kapasitas pemungutan pajak relatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Terdapat beberapa kemungkinan

penyebab penurunan tersebut. Pertama, adanya pemulihan ekonomi yang tidak sepenuhnya paralel dengan peningkatan penerimaan pajak, di mana sektor-sektor yang mendominasi pertumbuhan PDRB merupakan sektor yang tidak sepenuhnya terjangkau oleh instrumen pajak daerah. Kedua, lemahnya sinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dalam pemungutan pajak bersama serta potensi kebocoran dalam sistem administrasi pajak juga dapat menjadi faktor penghambat. Ketiga, perubahan regulasi atau kebijakan nasional terkait perpajakan dan transfer ke daerah juga mungkin memengaruhi ruang fiskal yang tersedia di tingkat provinsi.

Rasio pajak daerah terhadap PDRB yang rendah menunjukkan masih terbatasnya kontribusi sektor perpajakan daerah dalam mendorong kemandirian fiskal. Menurut Musgrave dan Musgrave (1989), rasio pajak terhadap PDRB yang ideal pada tingkat daerah seharusnya mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran publiknya secara berkelanjutan. Dengan demikian, fluktuasi dan penurunan rasio ini mengindikasikan perlunya reformasi dalam sistem pengelolaan pajak daerah.

Untuk meningkatkan rasio pajak daerah terhadap PDRB ke depan, terdapat beberapa strategi kebijakan yang dapat direkomendasikan. Pertama, peningkatan kualitas basis data wajib pajak dan integrasi sistem perpajakan digital secara menyeluruh akan memperkuat akurasi penetapan dan pemungutan pajak. Kedua, diperlukan inovasi dalam penggalian sumber-sumber pajak baru, misalnya melalui pengenaan pajak terhadap aktivitas ekonomi digital dan pengelolaan sumber daya lokal yang memiliki potensi fiskal tinggi. Ketiga, penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam hal sumber daya manusia, regulasi, serta koordinasi dengan pemerintah pusat.

Dengan demikian, meskipun rasio pajak daerah terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara masih berada di bawah 1,5 persen selama lima tahun terakhir, upaya berkelanjutan dalam memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, serta memperbaiki tata kelola fiskal daerah akan sangat menentukan kinerja fiskal provinsi di masa mendatang. Keberhasilan peningkatan rasio ini tidak hanya mencerminkan efisiensi administrasi perpajakan, tetapi juga menjadi indikator penting bagi kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah.

2. Tingkat Inflasi

Laju inflasi di Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu indikator penting dalam menggambarkan kondisi perekonomian daerah tersebut.

Inflasi, yang merujuk pada kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu, memiliki dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Inflasi Year-on-Year (Y-o-Y) di Sumatera Utara pada 2024 menggambarkan tren inflasi yang cenderung stabil meskipun ada fluktuasi bulanan. Inflasi Y-o-Y pada 2024 tercatat sebesar 2,12%, dengan beberapa komponen penyumbang utama seperti Makanan dan Minuman (yang berkontribusi 1,26%), serta Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (yang memberikan andil sebesar 0,37%). Komponen lain seperti pakaian dan alas kaki, serta transportasi, menunjukkan kontribusi yang relatif kecil terhadap inflasi tahunan.

Tabel 2. 90. Perbandingan Inflasi Sumatera Utara, Nasional dan Wilayah Penghitung Inflasi di Sumatera Utara

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57
Sumatera Utara	1,96	1,71	6,12	2,25	2,12
Sibolga	2,42	1,86	6,43	2,80	2,94
Pematangsiantar	2,78	2,12	6,16	2,30	2,86
Medan	1,76	1,70	6,10	2,19	2,12
Padangsidempuan	3,27	1,49	6,40	2,95	2,46
Gunungsitoli	5,32	0,54	5,74	2,35	3,10
Labuhanbatu					3,36
Karo					1,33
Deli Serdang					1,80

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Tingkat inflasi sepanjang tahun juga menunjukkan fluktuasi, dengan puncaknya tercatat pada bulan April (4,26%) dan penurunan signifikan pada bulan Agustus (1,59%). Hal ini mungkin mencerminkan variasi harga komoditas, terutama makanan, yang lebih volatil sepanjang tahun. Dari segi distribusi, inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Labuhanbatu (3,36%), sementara inflasi terendah tercatat di Kabupaten Karo (1,33%), yang mungkin menunjukkan perbedaan dalam dinamika ekonomi lokal dan harga komoditas di kedua wilayah tersebut.

Salah satu komoditas utama penyumbang inflasi di Sumatera Utara adalah cabai (Pratomo dkk, 2023). Sampai saat ini pengolahan pasca panen yang masih belum optimal dalam penggunaan teknologi menyebabkan harga cabai menjadi murah dan berdampak terhadap deflasi di Sumatera Utara. Kondisi sebaliknya terjadi ketika cabai langka akan menyebabkan harga cabai mahal dan memberikan sumbangsih terhadap peningkatan inflasi di wilayah Sumatera Utara. Kondisi ini mencerminkan perlunya optimalisasi teknologi pasca panen untuk komoditas cabai sehingga bisa memberikan sumbangsih terhadap stabilitas harga dan stabilitas inflasi di Sumatera Utara.

Pada tahun 2020, inflasi Sumatera Utara tercatat 1,96%, sedikit lebih tinggi dibandingkan nasional yang hanya 1,68%. Pada tahun 2024, inflasi Sumatera Utara yaitu 2,25%, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat 1,57%. Di tingkat wilayah, beberapa daerah di Sumatera Utara menunjukkan angka inflasi yang jauh lebih tinggi. Misalnya, Gunungsitoli memiliki inflasi yang sangat tinggi pada tahun 2020 (5,32%) yang kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi 3,10%. Wilayah lain seperti Labuhanbatu dan Sibolga juga mencatatkan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya, pada tahun 2024. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh faktor lokal seperti harga komoditas yang fluktuatif, tingkat ketersediaan barang dan jasa yang terbatas, atau perbedaan dalam tingkat permintaan dan penawaran di masing-masing wilayah.

3. Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah

Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi adalah alat ukur penting untuk memahami tingkat fluktuasi harga dan stabilitas pasar suatu komoditas. Koefisien Variasi juga yang digunakan untuk mengukur sebaran harga sebagai ukuran stabilitas harga, baik antar waktu maupun antar wilayah. Semakin tinggi nilai KV, semakin besar variasi harga antar wilayah, yang dapat mengindikasikan ketidakstabilan harga dan potensi kesenjangan ekonomi antar daerah. Dalam konteks Sumatera Utara, nilai KV sebesar 11,26% pada tahun 2024 menunjukkan adanya variasi harga yang signifikan antar wilayah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan infrastruktur, aksesibilitas distribusi barang, dan tingkat permintaan serta penawaran yang berbeda di setiap daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus bisa memberikan jaminan kestabilan harga komoditas pangan untuk bisa menurunkan koefisien variasi harga antar wilayah yang masuk dalam kategori tinggi. Wilayah Sumatera Utara yang merupakan salah satu sentra komoditas pangan sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk bisa menjaga keseimbangan antara produktivitas pertanian, kestabilan harga dan peningkatan kesejahteraan petani. Melalui strategi dan juga program khusus terkait stabilitas harga komoditas pangan diharapkan mampu melindungi pendapatan petani dari fluktuasi harga pasar serta memastikan ketersediaan komoditas tersebut bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau sepanjang tahun.

Untuk memahami lebih lanjut mengenai variasi harga antar wilayah, berikut adalah beberapa komoditas pangan dengan Koefisien Variasi Harga Pangan Tingkat Konsumen pada tahun 2024:

- Beras Premium KV: 2,25%. Menunjukkan variasi harga yang relatif rendah antar wilayah.
- Beras Medium KV: 2,05%. Menunjukkan variasi harga yang relatif rendah antar wilayah.
- Jagung KV: 17,95%. Menunjukkan variasi harga yang tinggi antar wilayah.
- Kedelai KV: 9,56%. Menunjukkan variasi harga yang cukup tinggi antar wilayah.
- Cabai Merah Keriting KV: 20,55%. Menunjukkan variasi harga yang sangat tinggi antar wilayah

Penting untuk dicatat bahwa nilai KV yang tinggi pada komoditas tertentu, seperti cabai merah keriting, menunjukkan adanya ketidakstabilan harga yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Untuk mengurangi variasi harga antar wilayah, diperlukan upaya peningkatan infrastruktur distribusi, penguatan sistem logistik, dan kebijakan yang menjamin kestabilan harga komoditas pangan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara produktivitas pertanian, kestabilan harga dan peningkatan kesejahteraan petani karena adanya perlindungan terhadap fluktuasi harga pasar serta memastikan ketersediaan komoditas strategis bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau sepanjang tahun.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas. Indeks Reformasi Hukum ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang telah disusun menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang kemudian menjadi dasar pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Indeks Reformasi Hukum Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 sebesar 85,9 yang masuk dalam skala nilai “A” dengan kategori sangat baik, mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola regulasi, memperkuat kepastian hukum, dan meningkatkan kualitas layanan publik berbasis hukum. Capaian ini memberi sinyal positif bagi iklim investasi dan dunia usaha karena proses perizinan lebih transparan dan prediktabel, harmonisasi peraturan daerah makin tertata, serta koordinasi penegakan hukum kian efektif. Indeks Reformasi Hukum yang sudah baik ini harus bisa terus meningkat, fokus perlu diarahkan pada konsistensi implementasi di seluruh kabupaten/kota, pemangkasan regulasi tumpang tindih, perluasan akses bantuan hukum bagi kelompok rentan, penguatan digitalisasi pelayanan dan data penegakan hukum, serta pelibatan masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian, Indeks Reformasi Hukum Sumatera Utara 2024 menjadi fondasi nyata bagi pembangunan hukum yang adil, inklusif, dan berkelanjutan untuk perodesasi perencanaan pembangunan saat ini dan masa mendatang.

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi diarahkan agar hadirnya birokrasi sebagai jembatan terhadap dampak, yang menyasar pada percepatan penyelesaian masalah-masalah utama pembangunan. Semangatnya, regulasi disusun untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, bukan justru menjadi beban dalam penyelesaian masalah (KemenpanRB RI, 2024). Indeks reformasi birokrasi sebagai alat ukur sejauh mana instansi mampu menerjemahkan visi melalui langkah-langkah strategis tata kelola yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Tabel 2. 91. Indeks Reformasi Birokrasi Sumatera Utara

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	61,77	-	66,87	75,18	80,87

Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2025

Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, indeks berada di angka 61,77, dan meningkat menjadi 66,87 pada 2022. Kemajuan yang lebih tajam terlihat pada tahun 2023 dengan capaian 75,18, dan terus naik menjadi 80,87 pada tahun 2024. Data tahun 2021 tidak tersedia, namun secara keseluruhan, tren ini mencerminkan adanya perbaikan yang konsisten dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah provinsi.

Peningkatan indeks ini menandakan bahwa berbagai aspek tata kelola pemerintahan seperti manajemen kinerja, pelayanan publik, akuntabilitas, dan efektivitas kelembagaan mengalami perbaikan yang terukur. Capaian 80,87 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Sumatera Utara telah masuk ke dalam kategori “baik” dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Ini dapat diartikan sebagai hasil dari komitmen pimpinan daerah, perbaikan sistem digitalisasi administrasi, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi. Ke depan, tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi kualitas birokrasi dan memastikan bahwa perbaikan sistem benar-benar dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan responsif.

3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik digunakan untuk mengukur tingkat kematangan level penerapan SPBE di Provinsi Sumatera Utara hal ini dilakukan untuk membentuk Pemerintahan Digital yang bertujuan menyederhanakan birokrasi, mempercepat layanan, dan mengurangi biaya dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pemerintahan digital juga didukung dengan regulasi, standar, pedoman serta kebijakan. Pengembangan Arsitektur SPBE juga memperhatikan integrasi dan interoperabilitas system informasi pemerintah. Berdasarkan laporan pelaksanaan evaluasi SPBE Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nilai Indeks SPBE Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan yang sebelumnya pada tahun 2023 dengan nilai indeks sebesar 3,21 menjadi 3,86 pada tahun 2024 yang termasuk ke dalam kategori predikat “Sangat Baik”.

Tabel 2. 92. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,96	2,77	2,81	3,21	3,86

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2024

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Sumatera Utara adalah langkah penting dalam menuju pemerintahan yang lebih modern, transparan, efisien, dan responsif. Meskipun ada tantangan terkait infrastruktur dan keterampilan, dengan langkah-langkah strategis dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, SPBE dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat

pembangunan daerah. Indeks SPBU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara ditampilkan di bawah ini.

**Tabel 2. 93. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara**

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024
Nias	2.05	2.62	2.62	3.72
Mandailing Natal	2.58	2.83	2.83	2.89
Tapanuli Selatan	2.68	2.69	2.69	3.14
Tapanuli Tengah	1.65	1.87	1.87	2.38
Tapanuli Utara	2.39	2.69	2.69	2.85
Toba	1.89	2.16	2.16	2.95
Labuhan Batu	1.85	2.94	2.94	2.69
Asahan	1.51	1.97	1.97	2.86
Simalungun	1.77	2.32	2.32	2.37
Dairi	2.08	2.67	2.67	2.85
Karo	2.42	2.57	2.57	3.04
Deli Serdang	3.32	3.47	3.47	3.57
Langkat	3.02	3.03	3.03	3.66
Nias Selatan	1.37	1.81	1.81	2.90
Humbang Hasundutan	1.87	2.30	2.30	2.80
Pakpak Bharat	2.43	2.41	2.41	2.66
Samosir	2.62	2.69	2.69	2.70
Serdang Bedagai	1.92	2.59	2.59	2.65
Batu Bara	2.21	2.34	2.34	2.27
Padang Lawas Utara	1.84	1.98	1.98	2.26
Padang Lawas	1.72	2.02	2.02	2.17
Labuhanbatu Selatan	1.86	1.94	1.94	1.93
Labuanbatu Utara	2.47	2.69	2.69	2.78
Nias Utara	1.48	1.51	1.51	2.41
Nias Barat	1.82	1.80	1.80	1.80
Sibolga	1.76	2.24	2.24	2.41
Tanjungbalai	2.30	2.80	2.80	3.24
Pematangsiantar	2.35	2.84	2.84	3.06
Tebing Tinggi	2.04	3.01	3.01	3.79
Medan	2.76	2.77	2.77	3.67
Binjai	1.82	2.98	2.98	3.12
Padangsidempuan	1.95	2.49	2.49	2.66
Gunungsitoli	2.01	2.13	2.13	2.23

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2024

Tabel tersebut menampilkan perkembangan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2021–2024. Secara umum, sebagian besar daerah menunjukkan tren peningkatan nilai indeks, dengan lonjakan cukup signifikan pada 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2021, nilai tertinggi dicapai Kabupaten Langkat (3,02), Deli Serdang (3,32), dan Medan (2,76), sedangkan nilai terendah berada di Nias Selatan (1,37), Asahan

(1,51), dan Nias Utara (1,48). Tahun 2022 menunjukkan peningkatan di hampir seluruh daerah, meskipun kenaikannya relatif kecil. Pada 2023, capaian indeks cenderung stagnan karena sebagian besar kabupaten/kota memiliki nilai sama dengan tahun sebelumnya.

Tahun 2024 menjadi titik lonjakan terbesar, di mana Nias mencapai peningkatan signifikan dari 2,62 pada 2023 menjadi 3,72, menempatkannya sebagai daerah dengan nilai tertinggi, disusul Tebing Tinggi (3,79) dan Medan (3,67). Sementara itu, Nias Barat menjadi satu-satunya daerah yang tidak mengalami kenaikan selama periode 2021–2024, dengan nilai tetap di kisaran 1,80. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun perkembangan SPBE di Sumatera Utara cukup positif, masih terdapat kesenjangan antar daerah yang perlu diatasi agar pemerataan transformasi digital pemerintahan dapat tercapai.

4. Indeks Pelayanan Publik

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas atau prima merupakan salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Instansi pemerintah memiliki tugas mendasar untuk memberikan pelayanan prima (excellent service) dan harus memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dalam rangka menjaga pelayanan publik yang berkualitas dan transparan serta memenuhi harapan masyarakat, diperlukan penilaian terhadap instansi pemerintah tersebut. Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik	na	3,80	4,00	3,51	3,90

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2025

Berdasarkan data Indeks Pelayanan Publik Sumatera Utara tahun 2020–2024 yang bersumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terlihat adanya dinamika kinerja pelayanan publik di daerah ini. Data tahun 2020 tidak tersedia, namun pada tahun 2021 indeks tercatat sebesar 3,80 dan mengalami peningkatan menjadi 4,00 pada tahun 2022. Sayangnya, capaian ini menurun kembali pada tahun 2023

menjadi 3,51 sebelum akhirnya naik lagi menjadi 3,90 di tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam kualitas pelayanan publik yang diberikan, yang kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kebijakan, kapasitas sumber daya manusia, atau tantangan operasional lainnya. Meskipun begitu, kenaikan pada tahun 2024 memberi sinyal positif atas upaya perbaikan dan reformasi birokrasi yang terus dilakukan untuk meningkatkan kepuasan dan kualitas layanan bagi masyarakat.

5. Indeks Integritas Nasional di Provinsi Sumatera Utara

Indeks Integritas Nasional merupakan ukuran yang disusun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menilai tingkat integritas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Indeks ini dihitung melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan setiap tahun. Melalui survei tersebut, dihimpun persepsi dan pengalaman responden mengenai praktik integritas, risiko korupsi, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik.

Hasil survei kemudian diolah menjadi Indeks Integritas (II) dengan skala 0–100, di mana semakin tinggi skor menunjukkan semakin rendah risiko korupsi dan semakin baik tata kelola integritas pada instansi yang bersangkutan. Indeks ini tidak hanya mengukur kementerian dan lembaga di tingkat nasional, tetapi juga pemerintah daerah, termasuk provinsi, kabupaten, dan kota. Dengan demikian, Indeks Integritas Nasional memberikan gambaran umum mengenai integritas birokrasi di Indonesia, sementara Indeks Integritas pada tingkat provinsi menunjukkan kondisi spesifik di tiap daerah. Indeks ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi kinerja, upaya pengendalian korupsi, dan peningkatan tata kelola pemerintahan.

Dalam konteks pemerintahan, Indeks Integritas sangat penting karena dapat menunjukkan sejauh mana sektor publik dapat dipercaya oleh masyarakat dalam memberikan layanan, mengelola anggaran, serta membuat keputusan yang adil dan transparan. Peningkatan Indeks Integritas sering kali berkaitan dengan reformasi birokrasi, penegakan hukum yang lebih tegas, serta kebijakan yang mendukung budaya anti-korupsi dan pelayanan publik yang berkualitas. Sebaliknya, Indeks Integritas yang rendah dapat menjadi indikator adanya praktik korupsi, ketidaktransparanan, dan kelemahan dalam sistem pengawasan yang perlu segera ditangani.

Pada tingkat provinsi, Indeks Integritas diukur melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh KPK. Hasil survei menghasilkan skor integritas sebagai cerminan tingkat integritas dan risiko korupsi di pemerintah provinsi. Di Provinsi Sumatera Utara, capaian SPI menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, sebagaimana terlihat pada tabel beriku

Tabel 2. 95. Indeks Integritas/Survei Penilaian Integritas (SPI) Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Integritas	na	58,50	66,20	66,37	58,50

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025

Data di atas menunjukkan indeks integritas Sumatera Utara dari tahun 2020 hingga 2024. Terlihat bahwa pada tahun 2020, indeks integritas tidak tersedia (na). Mulai tahun 2021, indeks integritas mengalami peningkatan dari 58,5 menjadi 66,2 pada tahun 2022, dan mencapai puncak tertinggi pada tahun 2023 yaitu 66,73. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan indeks integritas kembali ke angka 58,5, sama seperti pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi dalam tingkat integritas di Sumatera Utara selama periode tersebut, dengan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023 diikuti oleh penurunan yang cukup tajam pada tahun berikutnya. Penurunan ini dapat menjadi sinyal perlunya evaluasi dan upaya lebih lanjut dalam menjaga dan meningkatkan integritas di wilayah tersebut.

6. Opini BPK

Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah penilaian atau pendapat yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan suatu entitas, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun badan publik lainnya. Opini ini mencerminkan sejauh mana laporan keuangan tersebut mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan prinsip-prinsip transparansi serta akuntabilitas. Terdapat beberapa jenis opini BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini WTP menunjukkan laporan keuangan yang disusun dengan baik, sementara opini WDP dan TW menunjukkan adanya masalah dalam penyusunan laporan keuangan. Opini TMP berarti BPK tidak dapat memberikan penilaian karena keterbatasan dalam informasi yang tersedia. Opini BPK menjadi alat penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan negara atau daerah.

Tabel 2. 96. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, 2025

Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa provinsi ini mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) setiap tahunnya. Opini WTP adalah hasil tertinggi yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan tidak ada masalah material yang ditemukan.

Pencapaian opini WTP selama lima tahun berturut-turut (2020 hingga 2024) menunjukkan adanya transparansi dan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah di Sumatera Utara. Hal ini juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran dan laporan keuangan di tingkat provinsi. Pencapaian ini tentu akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan perencanaan fiskal yang lebih baik di masa mendatang.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

1. Persentase Penegakan Perda

Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana peraturan daerah yang telah disahkan dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat serta aparat pemerintah. Indikator ini mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam menegakkan aturan yang telah dibuat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Penegakan perda melibatkan pengawasan, tindakan sanksi bagi pelanggaran, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan tersebut. Semakin tinggi persentase penegakan perda, semakin baik pelaksanaan dan kepatuhan terhadap hukum daerah, yang mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sebaliknya, persentase yang rendah bisa menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan, penegakan hukum, atau penerimaan masyarakat terhadap peraturan yang ada. Dengan

demikian, persentase penegakan perda menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas hukum dan ketertiban di suatu daerah.

Data persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, tingkat penegakan Perda tercatat cukup tinggi yaitu sebesar 90,2%, namun mengalami penurunan menjadi 75,00% pada tahun 2021. Setelah sempat naik kembali menjadi 80,00% di tahun 2022, angkanya kembali turun menjadi 74,00% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, capaian ini melonjak tajam hingga mencapai 100,00%, menjadi angka tertinggi selama lima tahun terakhir.

Tabel 2. 97. Persentase Penegakan Perda Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Perda	90,2	75,00	80,00	74,00	100,00

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

Fluktuasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan Perda tidak berjalan secara stabil dari tahun ke tahun. Penurunan pada tahun 2021 dan 2023 bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia aparaturnya penegak perda (seperti Satpol PP), rendahnya koordinasi lintas sektor dalam implementasi regulasi, atau lemahnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perda di lapangan. Selain itu, perubahan prioritas pemerintahan atau terbatasnya anggaran operasional juga dapat berdampak pada menurunnya efektivitas penegakan aturan.

Di sisi lain, lonjakan capaian pada tahun 2024 hingga 100% menunjukkan bahwa pemerintah provinsi telah melakukan perbaikan yang sangat signifikan dalam pengawasan, pelaporan, dan eksekusi terhadap pelanggaran Perda. Hal ini kemungkinan besar didorong oleh peningkatan kesadaran hukum, penguatan kapasitas aparaturnya Satpol PP, dan mungkin juga didukung oleh sistem pelaporan kinerja elektronik (*e-monitoring*) yang membuat pelaksanaan penegakan lebih terukur dan transparan.

Ke depan, agar capaian ini tetap terjaga secara konsisten, perlu dilakukan penguatan kelembagaan dan peningkatan profesionalisme aparat penegak Perda, baik dari aspek kapasitas hukum maupun etika pelayanan publik. Diperlukan pula peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Perda serta sosialisasi yang lebih efektif agar kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah meningkat tanpa harus selalu bergantung pada penindakan administratif. Sinergi antarorganisasi perangkat daerah dan dukungan politik dari pimpinan daerah juga sangat

penting dalam menciptakan tata kelola hukum daerah yang tertib, adil, dan berkelanjutan.

2. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Sumatera Utara

Indeks Demokrasi Indonesia adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas demokrasi di suatu daerah berdasarkan berbagai indikator yang mencakup aspek politik, kebebasan sipil, partisipasi politik, serta fungsi pemerintahan. Indeks ini memberikan gambaran tentang sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan. Indeks Demokrasi Indonesia sering kali dihitung berdasarkan data tentang pemilu yang bebas dan adil, kebebasan pers, tingkat partisipasi politik masyarakat, serta efektivitas lembaga-lembaga demokrasi dalam menjalankan fungsinya. Berdasarkan hasil pengukuran ini, negara atau daerah dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis sistem demokrasi, mulai dari "demokrasi penuh," "demokrasi cacat," hingga "otoriter." Indeks ini sangat penting karena mencerminkan seberapa baik demokrasi berfungsi dalam menjaga kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan sosial, serta dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan untuk meningkatkan kualitas sistem pemerintahan dan partisipasi masyarakat.

Tabel 2. 98. Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Demokrasi Indonesia	65,13	77,60	79,53	80,34	80,19

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020 hingga 2024 memperlihatkan tren yang sangat positif. Pada tahun 2020, IDI Sumatera Utara berada di angka 65,13, yang menunjukkan kondisi demokrasi yang cukup baik. Namun, seiring berjalannya waktu, angka ini terus meningkat, mencapai 77,60 pada tahun 2021, kemudian 79,53 pada tahun 2022, dan mencapai 80,34 pada tahun 2023. Indeks Demokrasi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 terkoreksi tipis menjadi 80,19.

Peningkatan IDI Provinsi Sumatera Utara periode 2020-2024 ini menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam aspek-aspek demokrasi di Sumatera Utara, seperti partisipasi politik, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia. Peningkatan tersebut juga mencerminkan meningkatnya kesadaran politik masyarakat dan keterlibatan mereka dalam proses demokrasi, baik dalam pemilihan umum maupun dalam pengambilan keputusan politik di tingkat lokal. Selain itu, peningkatan ini bisa

dihubungkan dengan adanya reformasi dan penguatan kelembagaan yang mendukung sistem demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel di tingkat provinsi.

3. Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan dan kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat di suatu wilayah. Indeks ini mengukur persepsi masyarakat terhadap tingkat ancaman atau bahaya yang ada di sekitarnya, baik yang berkaitan dengan kejahatan, bencana alam, atau faktor lainnya yang memengaruhi rasa aman. Indeks Rasa Aman sering kali diperoleh melalui survei atau polling yang melibatkan masyarakat setempat, di mana mereka diminta untuk menilai sejauh mana mereka merasa aman dalam aktivitas sehari-hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks ini meliputi tingkat kriminalitas, responsivitas aparat keamanan, keberadaan fasilitas publik yang aman, serta upaya pencegahan dan penanggulangan risiko. Semakin tinggi indeks rasa aman, semakin besar keyakinan masyarakat bahwa mereka dapat hidup dalam lingkungan yang bebas dari ancaman. Sebaliknya, indeks yang rendah menunjukkan adanya ketidaknyamanan atau kecemasan yang tinggi terhadap faktor-faktor yang mengancam keselamatan, yang sering kali berkaitan dengan masalah ketertiban dan efektivitas sistem keamanan. Indeks ini menjadi penting untuk menentukan arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memastikan terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif.

4. Indeks Ketentraman dan Ketertiban

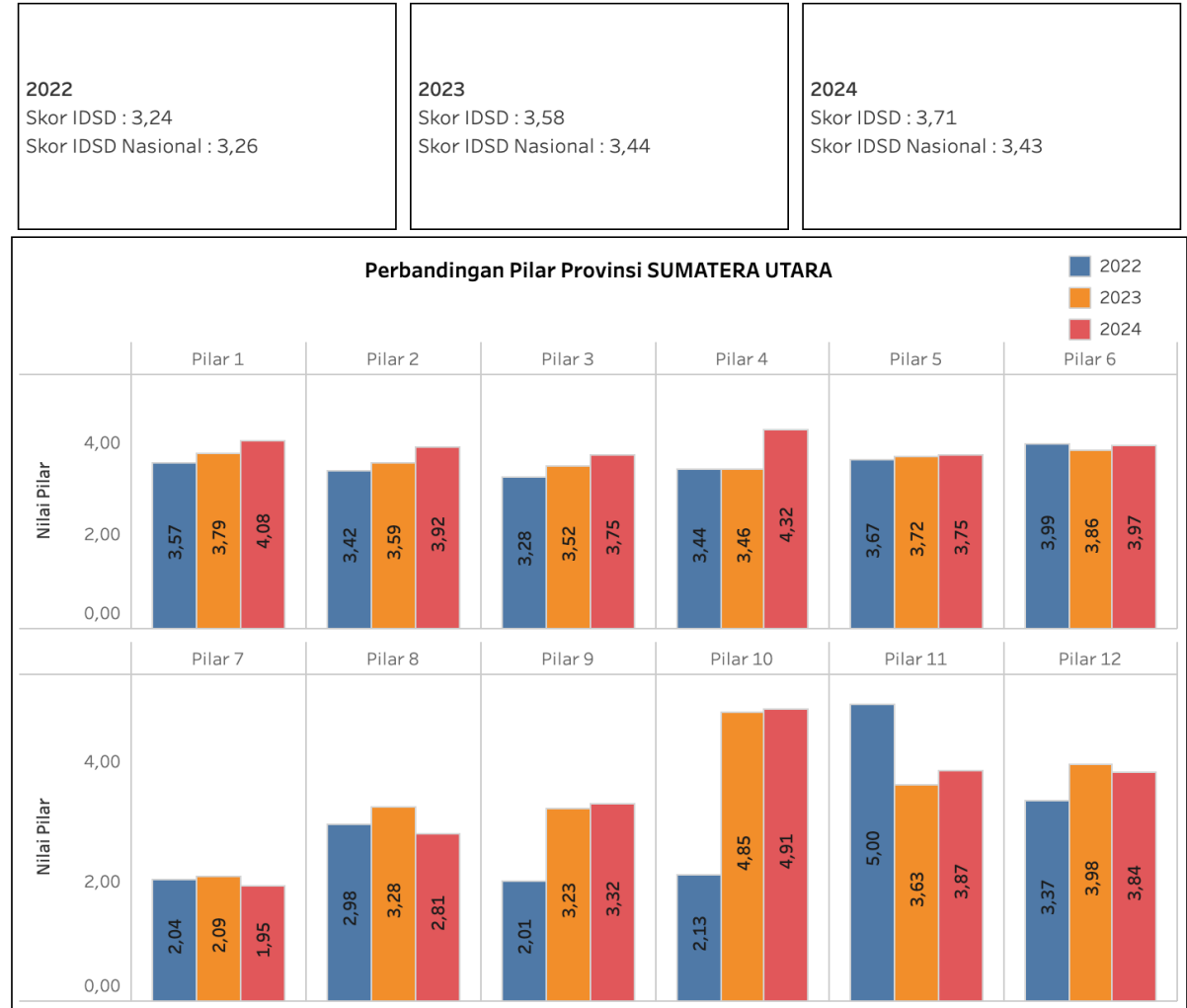
Indeks Ketentraman dan Ketertiban adalah indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu daerah atau masyarakat dapat menciptakan suasana yang aman, tertib, dan damai. Indeks ini mencakup aspek-aspek terkait dengan pengendalian sosial, pengamanan, penegakan hukum, serta stabilitas politik dan sosial. Faktor yang mempengaruhi indeks ini meliputi tingkat kriminalitas, kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi aturan, serta kemampuan aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban umum. Selain itu, indeks ini juga mencerminkan tingkat toleransi sosial, penyelesaian konflik secara damai, dan keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari ketegangan sosial. Semakin tinggi indeks ketentraman dan ketertiban, semakin besar kemungkinan daerah tersebut untuk memiliki suasana yang kondusif bagi aktivitas sosial dan ekonomi. Sebaliknya, rendahnya indeks ini menunjukkan adanya gangguan dalam stabilitas sosial yang dapat berdampak pada kualitas hidup masyarakat.

Indeks ini menjadi indikator penting dalam merancang kebijakan keamanan dan ketertiban di suatu wilayah, serta untuk menilai keberhasilan upaya pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang aman dan damai.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen yang dirancang untuk mengukur produktivitas suatu daerah yang pada akhirnya merefleksikan kemampuan daerah tersebut dalam bersaing, baik di kancan nasional maupun global. Perbandingan skor IDSD (Indeks Daya Saing Daerah) Sumatera Utara untuk tahun 2022 hingga 2024 menggambarkan progres yang cukup baik dalam peningkatan daya saing provinsi Sumatera Utara.

Gambar 2. 34. Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Sumatera Utara



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Pada tahun 2022, Sumatera Utara memiliki skor IDSD sebesar 3,24, yang sedikit lebih rendah dibandingkan skor nasional (3,26). Namun, pada tahun 2023, skor IDSD Sumut meningkat signifikan menjadi 3,58, melampaui skor nasional yang berada pada 3,44. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan yang lebih baik dalam beberapa pilar daya saing daerah. Tahun 2024 menunjukkan sedikit penurunan skor IDSD menjadi 3,71, meskipun masih lebih tinggi dari skor nasional yang tercatat pada 3,43. Grafik pilar-

pilar IDSD mengungkapkan pilar-pilar yang menjadi kekuatan dan tantangan bagi Sumatera Utara. Beberapa pilar, seperti Pilar 4 (infrastruktur) dan Pilar 10 (kesehatan), menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan skor mendekati 4,00, sementara pilar lainnya seperti Pilar 7 (kemiskinan) dan Pilar 8 (akses pendidikan) menunjukkan skor yang lebih rendah, menunjukkan area yang perlu diperbaiki lebih lanjut untuk meningkatkan daya saing. Peningkatan di tahun 2023 dan 2024 dapat dikaitkan dengan upaya-upaya penguatan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang terus ditingkatkan oleh pemerintah daerah.

2.1.4.4 Kinerja Urusan Pemerintah Daerah

Secara keseluruhan, pelayanan umum di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan adanya kemajuan, namun masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kepada seluruh masyarakat. Pemerintah perlu terus berupaya untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta memastikan pemerataan akses terhadap layanan dasar di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah yang lebih terpencil. Dengan peningkatan dalam aspek pelayanan umum, kualitas hidup masyarakat Sumut dapat semakin berkembang dan mendukung kemajuan provinsi ini secara keseluruhan.

1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

Fokus layanan urusan pemerintahan wajib memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Dengan melaksanakan urusan pemerintahan wajib dengan baik, pemerintah daerah tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menciptakan landasan yang kuat bagi kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, pemerintah harus terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat sistem pendukung, dan memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan hak-hak mereka tanpa terkecuali.

a. Pendidikan

Salah satu pengukuran kualitas Pendidikan di Sumatera Utara adalah melalui Indeks Pendidikan. Dimana Indeks Pendidikan sering digunakan sebagai alat untuk memantau kemajuan dan perbandingan antar negara atau wilayah dalam mencapai tujuan pendidikan, serta untuk merancang kebijakan dan intervensi yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan

aksesibilitas pendidikan. Indeks Pendidikan sering kali mencakup berbagai faktor, seperti:

1. Aksesibilitas: Persentase anak-anak usia sekolah yang terdaftar di institusi pendidikan, tingkat partisipasi siswa dari kelompok kelompok rentan, dan jarak fisik antara sekolah dengan rumah siswa.
2. Kualitas Pengajaran: Ini mencakup kualifikasi guru, rasio siswa-guru, dukungan pembelajaran, dan pembaruan kurikulum.
3. Hasil Akademik: Nilai tes standar, tingkat kelulusan, tingkat kelulusan, dan pencapaian siswa lainnya dalam hal pengetahuan dan keterampilan akademik.
4. Kesetaraan: Ini mencakup kesetaraan gender dalam akses dan partisipasi pendidikan, serta kesetaraan dalam hasil pendidikan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda.
5. Efisiensi: Efisiensi sistem pendidikan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti anggaran pendidikan, fasilitas fisik, dan waktu pengajaran.
6. Inklusivitas: Sejauh mana sistem pendidikan mengakomodasi siswa dengan kebutuhan khusus, termasuk siswa dengan disabilitas.

Pada Tahun 2019 sampai Tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 0,52 poin, Tahun 2020 sampai Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 0,21 poin, tahun 2021 sampai 2022 meningkat sebesar 0,55 point dan 2022-2023 meningkat sebesar 0,84 point. Kenaikan indeks pendidikan periode 2020-2021 lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan pada periode 2019-2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemik covid-19 yang terjadi sehingga aktivitas sangat terganggu. Namun di tahun 2022 sampai tahun 2023 meningkat diposisi tertinggi selama 5 tahun terakhir. Kondisi kinerja perangkat daerah bidang pendidikan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 99. Indikator Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pendidikan	68,55	68,79	69,34	70,18	70,57
APK SM Sederajat	105.12	106.07	97,23	105	97,43
APM SM Sederajat	73.69	72.53	68,27	71,72	97.68
Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4	96.61	96,80	100	100	100
Persentase Guru SMA/SLB bersertifikasi	48.97	49,46	54,30	54,30	N/A

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pendidikan	68,55	68,79	69,34	70,18	70,57
Persentase Guru SMK berkualifikasi Akademik S1/D4	93.55	94,33	100	100	100
Persentase Guru SMK bersertifikasi	38.72	41,34	45,50	49,77	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2025

Jika dilihat dari tabel di atas, maka hampir semua capaian Indikator Pendidikan Provinsi Sumatera Utara capaiannya masih belum di rilis oleh Kemendikbud. Penetapan angka realisasi akan dilakukan pada bulan Maret Tahun 2025. namun pada IKU APK SM sederajat dan APM SM Sederajat angka realisasi sudah dipublikasikan.

Tabel 2. 100. Sekolah Unggulan Bersama di Provinsi Sumatera Utara

No.	Nama Sekolah	Kabupaten/Kota
Negeri		
1	SMAN 1 Plus Matauli Pandan	Kab. Tapanuli Tengah
2	SMAN 2 Plus Balige	Kab. Toba
3	SMAN 3 Plus Sipirok	Kab. Tapanuli Selatan
4	SMAN 2 Lintong Nihuta	Kab. Humbang Hasundutan
5	SMAN 2 Plus Panyabungan	Kab. Mandailing Natal
6	SMAN 1 Plus Raya	Kab. Simalungun
Swasta		
1	SMAS Plus Del	Kab. Toba
2	SMAS CT Foundation	Kab. Deli Serdang
3	SMAS Plus Sedayu Nusantara	Kota Medan
4	SMAS Plus Azkia	Kota Medan

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2025

Terdapat enam sekolah unggulan negeri dan empat sekolah unggulan swasta yang tersebar di berbagai kabupaten/kota Sumatera Utara. Sekolah-sekolah ini berperan sebagai pusat pembelajaran yang berbasis mutu dan inovasi di wilayah masing-masing. Meskipun demikian, masih dibutuhkan pengembangan sekolah unggulan di lebih banyak kabupaten/kota lainnya, guna memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik dan merata di seluruh Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2. 101. Ruang Kelas Rusak di Provinsi Sumatera Utara

No	Sekolah Negeri	Jumlah Ruang Kelas Rusak
1	SMA	335
2	SMK	197
3	SLB	0

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan data yang ada, tercatat 335 ruang kelas rusak pada jenjang SMA Negeri, sementara pada jenjang SMK Negeri terdapat 197 ruang kelas yang juga mengalami kerusakan. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan yang tegas dan cepat dalam memperbaiki kondisi ruang kelas ini, guna memastikan

pelayanan pendidikan yang terbaik dan mendukung kualitas proses belajar mengajar yang optimal.

Tabel 2. 102. Data Peserta Didik Sekolah Menengah Negeri di Provinsi Sumatera Utara

No	Wilayah	SMA			SMK			SLB		
		Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P
1	Kota Medan	47,809	22,186	25,623	33,397	17,595	15,802	1,214	738	476
2	Kab. Deli Serdang	25,930	11,298	14,632	28,206	17,182	11,024	884	562	322
3	Kota Binjai	10,385	4,779	5,606	8,050	4,581	3,469	400	248	152
4	Kab. Langkat	20,746	8,720	12,026	20,106	11,905	8,201	189	104	85
5	Kota Tebing Tinggi	4,325	1,865	2,460	4,001	2,158	1,843	274	167	107
6	Kab. Serdang Bedagai	9,160	3,952	5,208	7,674	4,650	3,024	127	78	49
7	Kab. Karo	8,846	3,905	4,941	3,326	2,099	1,227	151	91	60
8	Kab. Dairi	7,539	3,456	4,083	4,603	2,632	1,971	24	15	9
9	Kab. Pakpak Barat	1,484	679	805	283	161	122	23	19	4
10	Kab. Asahan	10,465	4,755	5,710	8,334	4,640	3,694	255	154	101
11	Kab. Batubara	5,410	2,201	3,209	5,316	3,061	2,255	167	95	72
12	Kota Tanjungbalai	3,869	1,652	2,217	822	625	1,699	97	56	41
13	Kota Pematangsiantar	10,024	4,566	5,458	7,164	3,895	3,269	236	142	94
14	Kab. Simalungun	13,361	5,990	7,371	9,108	5,276	3,832	124	71	53
15	Kab. Labuhan Batu	8,057	3,504	4,553	6,389	3,628	2,761	74	45	29
16	Kab. Labuhan Batu Selatan	4,106	1,707	2,399	3,575	2,087	1,488	-	-	-
17	Kab. Labuhan Batu Utara	5,707	2,514	3,193	4,138	2,498	1,640	91	49	42
18	Kab. Toba	5,989	2,849	3,140	3,354	1,876	1,478	69	42	27
19	Kab. Samosir	4,067	1,841	2,226	1,368	850	518	-	-	-
20	Kab. Tapanuli Utara	9,052	4,141	4,911	4,123	2,593	1,530	65	43	22
21	Kab. Humbang Hasundutan	5,886	2,645	3,241	3,297	1,920	1,377	76	45	31
22	Kota Sibolga	2,780	1,193	1,587	2,203	1,278	925	64	42	22
23	Kab. Tapanuli Tengah	7,120	3,406	3,714	3,821	2,275	1,546	34	19	15
24	Kab. Tapanuli Selatan	3,216	1,393	1,823	3,061	1,806	1,255	189	115	74
25	Kota Padangsidempuan	4,759	2,214	2,545	4,160	2,275	1,885	128	82	46
26	Kab. Mandailing Natal	5,309	2,326	2,983	3,992	2,239	1,753	99	68	31
27	Padang Lawas	2,214	1,090	1,124	2,562	1,543	1,019	-	-	-
28	Padang Lawas Utara	2,815	1,331	1,484	929	578	351	79	46	33
29	Kab. Nias	4,384	2,068	2,316	4,216	2,180	2,036	-	-	-
30	Kota Gunungsitoli	5,252	2,542	2,710	4,804	2,675	2,129	189	115	74
31	Kab. Nias Utara	5,004	2,662	2,342	3,457	1,758	1,699	-	-	-
32	Kab. Nias Barat	3,839	1,894	1,945	1,911	1,042	869	21	11	10
33	Kab. Nias Selatan	11,295	5,682	5,613	7,253	3,710	3,543	-	-	-
	Total	280,204	127,006	153,198	209,003	119,271	91,234	5,343	3,262	2,081

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2025

Jumlah total peserta didik di jenjang SMA Negeri tercatat sebanyak 280.204 siswa, SMK Negeri 209.003 siswa, dan SLB Negeri 5.343 siswa. Kota Medan memiliki jumlah peserta didik terbanyak, sementara Kabupaten Pakpak Bharat dan Samosir memiliki jumlah siswa yang relatif sedikit. Permasalahan utama yang harus diselesaikan adalah ketimpangan distribusi peserta didik yang cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan, sementara daerah-daerah dengan kepadatan penduduk yang lebih rendah, seperti Pakpak Bharat dan Samosir, masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan. Sebaran peserta didik yang tidak merata ini perlu diatasi untuk memastikan pemerataan kesempatan pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah.

Tabel 2. 103. Data Sekolah Menengah di Provinsi Sumatera Utara

No	Satuan Pendidikan	Jumlah		Jumlah Total Sekolah
		Negeri	Swasta	
1	SMA	438	637	1075
2	SMK	279	674	953
3	SLB	29	31	60
JUMLAH		746	1.342	2.088

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2024

Terdapat total 2.088 sekolah tingkat menengah di Sumatera Utara dengan rincian 746 negeri dan 1.342 swasta. SMA negeri berjumlah 438 sekolah, SMK negeri 279 sekolah, dan SLB negeri 29 sekolah.

b. Kesehatan

Kondisi kesehatan di Provinsi Sumatera Utara diprioritaskan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat, salah satu indikator pendukung adalah Indeks Kesehatan beserta derajat kesehatan lainnya, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 104. Indikator Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

INDIKATOR	REALISASI				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	2,39	2,28	2.19	3,61	3,21
Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	62,5	89.18	47.06	72,46	68,19
Angka Kesakitan (Morbiditas)	12,24	8,78	12.98	10,10	10.08

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2025

Terkait kondisi kesehatan di Sumatera Utara mengalami beberapa kemajuan sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berikut beberapa poin penting terkait tabel diatas yaitu : Angka Kematian Bayi (AKB): AKB di Sumatera Utara mengalami penurunan dari target 2.05 dengan realisasi 3.21 dan Angka Kematian Ibu (AKI) tidak memenuhi realisasi target

52.33. Salah satu penyebab turunnya angka kematian ibu di Sumatera Utara adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir, namun pada tahun 2023 terjadi lagi peningkatan Angka Kematian Ibu di Provinsi Sumatera Utara penyebab tertinggi kematian Ibu di Sumatera Utara Tahun 2023 adalah Hipertensi, pendarahan, komplikasi non obstetri, infeksi, kehamilan dengan komplikasi abortus dan lain-lain.

Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta adalah sebuah konsep dalam sistem kesehatan yang memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa mengalami kesulitan finansial saat menggunakan. Di Provinsi Sumatera Utara salah satu Program Berobat Gratis (Probis) diwujudkan dalam pencapaian *Universal Health Coverage (UHC)*, yang memastikan bahwa setiap warga yang memiliki KTP Sumatera Utara mendapatkan akses layanan kesehatan gratis melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pembiayaan pencapaian UHC melalui mekanisme *Cost Sharing* dengan kabupaten/kota, pada tahun 2025 proporsi *cost sharing* sebesar 20%-80%, selanjutnya proporsi provinsi naik 2,5% setiap tahunnya sampai 30% pada tahun 2029.

Sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025 – 2029, bahwa sebuah daerah disebut mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage/UHC*) apabila Cakupan Kepesertaan JKN-nya sebesar 98,6% dari jumlah penduduknya dan Cakupan Kepesertaan Aktif JKN sebesar 80%. Dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 28 Kab/Kota sudah mencapai UHC Prioritas dengan capaian Cakupan Kepesertaan JKN $\geq 98,6\%$ dan Cakupan Kepesertaan Aktif JKN sebesar $\geq 80\%$, sedangkan sebanyak 5 Kab/Kota yang sudah mencapai UHC namun masih UHC Non Prioritas karena Cakupan Kepesertaan Aktif JKN masih $< 80\%$, yakni Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 2. 105. Universal Health Coverage Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	Cakupan Kepesertaan JKN	
		Jumlah	Persen (%)
1	KAB. NIAS UTARA	153,645	100.00%
2	KAB. NIAS SELATAN	374,354	100.00%
3	KAB. PADANG LAWAS	272,519	100.00%
4	KAB. PAKPAK BHARAT	57,272	99.99%
5	KOTA SIBOLGA	100,041	99.76%
6	KOTA GUNUNGSITOLI	137,833	99.66%
7	KAB. NIAS BARAT	97,005	99.47%
8	KAB. TAPANULI TENGAH	367,423	99.44%

No	Kabupaten/Kota	Cakupan Kepesertaan JKN	
		Jumlah	Persen (%)
9	KAB. SAMOSIR	148,378	99.00%
10	KOTA PEMATANGSIANTAR	276,904	98.97%
11	KAB. NIAS	146,467	98.97%
12	KOTA MEDAN	2,512,050	98.65%
13	KOTA TANJUNGBALAI	185,342	98.62%
14	KAB. LABUHANBATU SELATAN	333,110	100.00%
15	KAB. SIMALUNGUN	1,003,310	99.90%
16	KAB. KARO	418,178	98.98%
17	KAB. PADANG LAWAS UTARA	270,565	98.90%
18	KAB. BATU BARA	469,547	98.89%
19	KOTA BINJAI	312,072	98.88%
20	KAB. DAIRI	329,295	98.79%
21	KAB. SERDANG BEDAGAI	688,042	98.74%
22	KOTA TEBING TINGGI	180,149	97.87%
23	KOTA PADANGSIDIMPUAN	228,524	98.51%
24	KAB. TAPANULI SELATAN	319,520	98.45%
25	KAB. TOBA	217,044	98.43%
26	KAB. LANGKAT	1,100,529	98.20%
27	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	206,343	97.78%
28	KAB. TAPANULI UTARA	323,635	97.63%
29	KAB. MANDAILING NATAL	489,359	97.56%
30	KAB. LABUHANBATU	477,824	93.14%
31	KAB. ASAHAN	740,853	92.67%
32	KAB. LABUHANBATU UTARA	360,086	90.18%
33	KAB. DELI SERDANG	1,874,747	90.11%
TOTAL		15,171,965	97.00%

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2025

Tingkat kepesertaan JKN di Sumatera Utara rata-rata sudah mencapai 97%, dengan empat kabupaten yang telah mencatatkan angka 100%, seperti Nias Utara, Nias Selatan, Padang Lawas, dan Labuhanbatu Selatan. Meskipun capaian ini menggambarkan kemajuan yang signifikan, ada kabupaten yang masih menunjukkan angka kepesertaan di bawah standar, seperti Deli Serdang (90,11%) dan Labuhanbatu Utara (90,18%). Meskipun secara keseluruhan cakupan *UHC (Universal Health Coverage)* di Sumatera Utara sudah cukup tinggi, masih terdapat daerah besar yang memerlukan percepatan untuk mencapai target nasional sebesar 98,6%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota dan provinsi perlu mengambil langkah nyata untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program JKN.

Pemerintah daerah perlu lebih gencar dalam melakukan sosialisasi, memperluas aksesibilitas pendaftaran JKN, serta mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang menghalangi masyarakat dari wilayah dengan capaian rendah untuk ikut serta dalam program ini. Selain itu, perlu ada evaluasi mendalam terhadap faktor penyebab rendahnya angka kepesertaan di daerah tertentu, agar upaya peningkatan cakupan UHC dapat lebih terarah dan efektif. Tindakan nyata dan terkoordinasi antara kabupaten/kota dan provinsi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan

masyarakat, terutama yang berada di daerah dengan capaian rendah, dapat merasakan manfaat dari jaminan kesehatan yang maksimal.

Distribusi dokter spesialis di 41 RSUD se-Sumatera Utara masih sangat tidak merata. Meskipun total jumlah dokter spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) di wilayah ini mencapai 114 orang, distribusinya sangat timpang. RSUD Dr. Pirngadi Medan memiliki jumlah terbanyak dengan 9 orang spesialis, sementara sejumlah RSUD lainnya, seperti RSUD dr. Husni Thamrin Mandailing Natal, RSUD Lukas Hilisimaetano Nias Selatan, dan RSUD Tafaeri Nias Utara, bahkan tidak memiliki satu pun dokter spesialis Sp.PD. Hal yang sama juga terjadi pada ketersediaan Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG), yang tercatat sejumlah 89 orang, namun masih ada beberapa RSUD yang belum memiliki tenaga spesialis ini sama sekali. Ketersediaan spesialis lainnya, seperti Radiologi, Patologi Anatomi, dan Rehabilitasi Medik, juga relatif terbatas. Bahkan, hanya ada dua RSUD yang memiliki Spesialis Rehabilitasi Medik.

Tabel 2. 106. Sebaran Dokter Spesialis Kabupaten/Kota Sumatera Utara

No	Kab/Kota	Nama RSUD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD)	Dokter Spesialis Obstetri &Ginekologi - Kebidanan & Kandungan (Sp.OG)	Dokter Spesialis Anak (Sp.A)	Dokter Spesialis Bedah (Sp.B)	Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad)	Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An)	Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK)	Dokter Spesialis Patologi Anatomi (Sp.PA)	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik (Sp.RM)
1	Tapanuli Tengah	RS Umum Daerah Pandan	3	2	3	2	1	2	1	0	0
2	Tapanuli Utara	RSUD Tarutung	3	3	3	3	2	1	3	1	0
3	Tapanuli Selatan	RSUD Tapanuli Selatan	3	1	3	2	1	2	2	0	0
4	Tapanuli Selatan	RSUD Pintupadang	1	0	1	0	0	0	0	0	0
5	NIAS	RS Umum Daerah dr. M. Thomsen Nias	2	2	2	2	2	2	1	0	0
6	Langkat	RS Umum Daerah Tanjung Pura	3	5	9	1	1	1	2	1	0
7	Kabupaten Karo	RSUD Kabupaten Karo	3	3	3	2	1	1	1	1	0
8	Deli Serdang	RSUD Drs. H. Amri Tambunan	4	3	5	2	1	3	4	3	0
9	Deli Serdang	RSUD Pancur Batu	2	2	2	1	1	1	2	0	0
10	Deli Serdang	RSUD BANGUN PURBA	2	2	1	1	0	0	0	0	0
11	Simalungun	RSUD Parapat	2	1	2	2	1	2	2	2	0
12	Simalungun	RSUD Perdagangan	2	2	2	3	1	2	1	1	0
13	Simalungun	RSUD Tuan Rondahaim	3	2	3	2	1	3	2	1	0

No	Kab/Kota	Nama RSUD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD)	Dokter Spesialis Obstetri &Ginekologi - Kebidanan & Kandungan (Sp.OG)	Dokter Spesialis Anak (Sp.A)	Dokter Spesialis Bedah (Sp.B)	Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad)	Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An)	Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK)	Dokter Spesialis Patologi Anatomi (Sp.PA)	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik (Sp.RM)
14	Asahan	UPTD RSUD Haji Abdul Manan Simatupang	3	4	4	2	1	1	2	1	0
15	Labuhanbatu	RSUD Rantauprapat	8	5	5	3	1	2	3	3	0
16	Dairi	UPT. RSUD Sidikalang	5	3	2	3	1	1	2	0	0
17	Kabupaten Toba	RSUD Porsea	2	2	5	2	1	2	1	1	0
18	Mandailing Natal	RSUD dr. Husni Thamrin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Mandailing Natal	RS Umum Daerah Panyabungan	3	3	2	3	1	2	2	0	0
20	Nias Selatan	RSUD NIAS SELATAN	1	1	1	1	0	0	0	0	0
21	Nias Selatan	RSUD LUKAS HILISIMAETANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pakpak Bharat	RSUD Salak	2	2	2	2	1	1	1	0	0
23	Humbang Hasundutan	Doloksanggul	2	2	2	2	1	2	1	1	0
24	SAMOSIR	RSUD dr.Hadrianus Sinaga	3	3	2	2	1	2	2	0	0
25	Serdang Bedagai	RS Umum Daerah Sultan Sulaiman	5	3	5	3	1	3	3	1	0

No	Kab/Kota	Nama RSUD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD)	Dokter Spesialis Obstetri &Ginekologi - Kebidanan & Kandungan (Sp.OG)	Dokter Spesialis Anak (Sp.A)	Dokter Spesialis Bedah (Sp.B)	Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad)	Dokter Spesialis Anestesiologi (Sp.An)	Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK)	Dokter Spesialis Patologi Anatomi (Sp.PA)	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik (Sp.RM)
		Syariful Alamsyah									
26	BATU BARA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATU	2	3	3	3	1	2	2	1	0
27	Padang Lawas Utara	RSUD Gunungtua	3	2	2	4	1	1	1	0	0
28	PADANG LAWAS	RSUD SIBUHUAN	3	-	3	1	-	1	2	1	0
29	Labuhanbatu Selatan	RSUD Kotapinang	2	3	3	2	1	1	1	1	0
30	Labuhanbatu Utara	RSUD Aek Kanopan	4	2	4	2	1	1	3	0	0
31	Nias Utara	RSUD Tafaeri	0	0	1	0	0	0	0	0	0
32	Kota Medan	RSUD Dr. Pirngadi	9	7	4	3	1	3	4	4	2
33	Kota Medan	RSUD H. BACHTIAR DJAFAR	4	2	1	2	1	2	2	0	0
34	Pematangsiantar	RSUD dr. Djasamen Saragih	3	3	2	3	2	1	2	0	0
35	Sibolga	RSU Dr. F.L Tobing	4	2	4	2	1	1	1	1	0
36	TANJUNGBALAI	RSUD dr TENGGU MANSYUR KOTA TANJUNGBALAI	2	2	4	1	1	1	1	1	0
37	Binjai	RSUD DR RM DJOELHAM	4	2	7	2	1	1	3	1	0

No	Kab/Kota	Nama RSUD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD)	Dokter Spesialis Obstetri &Ginekologi - Kebidanan & Kandungan (Sp.OG)	Dokter Spesialis Anak (Sp.A)	Dokter Spesialis Bedah (Sp.B)	Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad)	Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An)	Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK)	Dokter Spesialis Patologi Anatomi (Sp.PA)	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik (Sp.RM)
38	Tebing Tinggi	RSUD dr H KUMPULAN PANE	4	2	3	2	2	1	1	2	0
39	KOTA PADANGSIDIMPUAN	RSUD KOTA PADANGSIDIMPUAN	3	2	2	2	1	1	1	2	0
40	KABUPATEN NIAS BARAT	RUMAH Sakit KABUPATEN NIAS BARAT	0	1	0	1	0	0	0	0	0
41	KABUPATEN NIAS BARAT	Rumah Sakit Pratama Lologulu Soguna Bazato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		114	89	112	76	36	53	62	31	2

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2025

Distribusi dokter spesialis cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar dan wilayah perkotaan, sementara RSUD yang terletak di daerah terpencil dan pedesaan hampir tidak memiliki akses sama sekali terhadap layanan medis dokter spesialis. Keadaan ini menunjukkan bahwa pemerataan tenaga medis terutama dokter spesialis di Sumatera Utara masih menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi untuk memastikan layanan kesehatan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Distribusi dokter spesialis yang tidak merata di Sumatera Utara akan memberikan dampak negatif terhadap kualitas layanan kesehatan di beberapa wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang. Ketidakseimbangan ini berpotensi memperburuk kesenjangan kesehatan antar daerah, memperlambat proses pembangunan, dan meningkatkan ketidakadilan dalam akses kesehatan bagi masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan terobosan dalam kebijakan distribusi tenaga medis, seperti insentif bagi dokter spesialis untuk bertugas di wilayah yang kurang terlayani, peningkatan fasilitas pendidikan kedokteran spesialis di daerah, serta pengembangan teknologi *telemedicine* untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan spesialistik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemerataan distribusi dokter spesialis dapat terwujud dan mendukung percepatan pembangunan yang lebih inklusif dan merata di seluruh provinsi.

Rumah sakit yang berada di bawah kewenangan Provinsi Sumatera Utara memainkan peran vital dalam sistem pelayanan kesehatan di daerah ini, dengan menyediakan layanan medis yang berkualitas untuk masyarakat. Sebagai lembaga kesehatan tingkat lanjut, rumah sakit provinsi ini bertanggung jawab tidak hanya dalam memberikan perawatan medis dan pengobatan, tetapi juga dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan serta penelitian medis. Adapun rumah sakit kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 107. Rumah Sakit Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

No	Nama Rumah Sakit	Kabupaten/Kota
1	Rumah Sakit Umum Haji Medan	Kab. Deli Serdang
2	Rumah Sakit M. Ildrem	Kota Medan
3	Rumah Sakit Khusus Paru	Kota Medan
4	Rumah Sakit Khusus Mata	Kota Medan
5	Rumah Sakit Umum Lau Simomo	Kab. Karo

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2025

Terdapat lima rumah sakit yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Rumah sakit-rumah sakit ini tersebar

di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, dengan sebagian besar berlokasi di Kota Medan. Di antaranya adalah Rumah Sakit M. Ildrem, Rumah Sakit Khusus Paru, dan Rumah Sakit Khusus Mata yang semuanya berada di Kota Medan. Selain itu, ada juga Rumah Sakit Umum Lau Simomo yang terletak di Kabupaten Karo dan Rumah Sakit Umum Haji di Kabupaten Deli Serdang. Keberadaan rumah sakit dibawah kewewenangan Provinsi ini mencerminkan distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata, dengan konsentrasi di kawasan Medan, Deli Serdang dan Karo.

Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof. Dr. M. Ildrem Provinsi Sumatera Utara

Selain itu pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara terlihat dari pelayanan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof. Dr. M. Ildrem Provinsi Sumatera Utara melalui dua indikator yaitu Pencapaian Persentase BOR (*Bed Occupancy Rate*) Rumah Sakit Jiwa dan Rata-rata LOS (*Length of Stay*) Rumah Sakit Jiwa. Capaian Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 108. Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem Provinsi Sumatera Utara

INDIKATOR	REALISASI				
	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian Persentase Bed Occupancy Rate (BOR) Rumah Sakit Jiwa	65,24	60,65	68,63	89,00	49,05
Capaian Average Length Of Stay (ALOS)	87,02	76,87	67,25	60,00	63,00
Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit Jiwa	-	-	75,00	79,53	86,28

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2025

Kondisi pelayanan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof. Dr. M. Ildrem Provinsi Sumatera Utara telah berkembang, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam membangun narasi positif pada tentang Rumah Sakit Jiwa. namun ada juga beberapa kemajuan yang telah dicapai. Upaya berkelanjutan dari berbagai pihak diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan RSJ dan menjamin akses pelayanan bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan, meningkatkan fasilitas RSJ.

Rumah Sakit Haji Medan

Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan adalah salah satu Rumah Sakit yang menerapkan PPK BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 188.44/365/KPTS/2014 tanggal 13 Mei II-47 RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 2014 tentang Penetapan RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai BLUD. Jika dilihat dari tingkat keberhasilan pelayanan di Rumah Sakit Umum Haji terkait sarana, mutu dan

tingkat efisiensi pelayanan, maka capaiannya belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 109. Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Haji Medan

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bed Occupancy Rate (BOR)	Persen	27	40	62,50	79	77,08
2	Length Of Stay (LOS)	Hari	4	4	5	5	4
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	-	2,28	77	85,20	87,60

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2025

Jika dilihat dari tabel di atas, maka hampir semua capaian Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Haji Medan Provinsi Sumatera Utara memiliki tren positif pada realisasi melebihi target yang di tentukan.

c. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Dari data dapat disimpulkan bahwa indeks infrastruktur memiliki peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2024, dengan berbagai proyek besar yang sedang berlangsung dan sejumlah pencapaian penting dalam sektor konektivitas dan aksesibilitas, irigasi, serta infrastruktur dasar. Namun, ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta tantangan dalam pembiayaan dan pengelolaan infrastruktur masih perlu menjadi perhatian utama. Dengan upaya yang lebih terfokus pada pemerataan, inovasi dalam pembiayaan, dan pengelolaan yang berkelanjutan, Sumatera Utara dapat terus meningkatkan indeks infrastrukturnya dan memperkuat perekonomian serta kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 2. 110. Indikator Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Infrastruktur	Poin	0.69	0.71	0.74	0,75	0,76
Persentase panjang jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Persen	82,27	82,27	82,27	78,13	72,75
Persentase panjang jembatan Provinsi dalam Kondisi Baik	Persen	84,06	84,06	84,15	83,45	82,97
Nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Pemprov	Persen	-	-	-	54,53	49,50
Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen	54,19	56,55	57,45	58,62	59,92
Nilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang Provinsi	Persen				76,51	62,69
Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	persen	-	-	-	15,66	15.66

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPAM Regional	Persen	-	-	-	-	6.343
Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses Pengelolaan air limbah domestik melalui SPALD Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPALD Regional	persen	-	-	-	-	50.13

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara, 2025

Kondisi jalan baik di Sumatera Utara merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian infrastruktur transportasi yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Jalan yang baik memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian, mobilitas masyarakat, serta konektivitas antarwilayah. Keberadaan jalan yang memadai sangat berperan dalam mempercepat arus distribusi barang, mempermudah akses ke fasilitas kesehatan, pendidikan, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Pada umumnya, Sumatera Utara memiliki jaringan jalan yang luas dan beragam, yang meliputi jalan nasional, provinsi, hingga jalan kabupaten/kota. Kondisi jalan baik di Sumatera Utara mengacu pada jalan-jalan yang terpelihara dengan baik, bebas dari kerusakan berat, dan dapat dilalui dengan aman dan nyaman oleh berbagai jenis kendaraan.

Jalan provinsi beraspal di setiap kabupaten/kota di Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas wilayah. Kualitas jalan yang memadai turut meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, serta pusat-pusat kegiatan ekonomi. Peningkatan kualitas jalan di provinsi ini juga akan berkontribusi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi, pengembangan sektor pariwisata, serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah. Pemerintah daerah perlu terus fokus pada pembangunan infrastruktur jalan agar dapat menciptakan konektivitas yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Utara. Gambaran jalan Provinsi permukaan aspak dengan kondisi baik di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 111. Persentase Jalan Provinsi Permukaan Aspal dengan Kondisi Baik Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Nias	98	98	100	100	100
Mandailing Natal	87	87	70	70	70
Tapanuli Selatan	90	90	89	89	89
Tapanuli Tengah	100	100	100	100	100
Tapanuli Utara	96	96	95	89	89
Toba	69	72	78	66	62
Labuhan Batu	84	85	85	85	85
Asahan	71	70	70	70	69
Simalungun	99	100	100	100	100
Dairi	89	100	73	73	73
Karo	100	100	97	97	97
Deli Serdang	100	99	100	100	100
Langkat	99	100	95	95	93
Nias Selatan	89	89	89	89	89
Humbang Hasundutan	98	98	94	94	94
Pakpak Bharat	100	98	98	98	98
Samosir	34	28	16	16	16
Serdang Bedagai	100	100	100	100	100
Batu Bara	95	93	95	95	95
Padang Lawas Utara	75	71	69	69	69
Padang Lawas	86	83	88	88	88
Labuhanbatu Selatan	0	0	0	0	0
Labuanbatu Utara	90	89	91	91	79
Nias Utara	86	86	59	59	59
Nias Barat	52	52	55	55	55
Sibolga	84	94	95	95	95
Tanjungbalai	100	100	100	100	100
Pematangsiantar	95	97	95	95	95
Tebing Tinggi	100	100	100	100	100
Medan	85	94	86	85	85
Binjai	100	97	82	82	82
Padangsidempuan	78	98	77	77	77
Gunungsitoli	99	99	100	100	100
Sumatera Utara	87	87	84	83	82

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Jalan Provinsi dengan permukaan aspal di Sumatera Utara dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, dari 87 persen pada tahun 2020 menjadi 82 persen pada tahun 2024. Begitu pula dengan persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap yang menurun dari 75 persen pada tahun 2020 menjadi 72,7 persen pada tahun 2024. Penurunan kualitas infrastruktur jalan ini perlu mendapat perhatian serius karena jalan yang rusak atau tidak terawat dapat menghambat mobilitas barang dan orang, serta mengurangi efisiensi ekonomi. Oleh karena itu,

inisiatif pemerintah provinsi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Dengan perbaikan dan pembangunan jalan yang lebih merata dan berkualitas, konektivitas antar wilayah dapat ditingkatkan, membuka akses yang lebih baik antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini pada gilirannya akan berdampak positif terhadap pembangunan yang inklusif, mengurangi kesenjangan antar daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempermudah distribusi barang dan jasa. Infrastruktur jalan yang baik juga mendukung sektor pariwisata, perdagangan, dan pendidikan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Adapun persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 112. Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Nias	80,5	82,1	93,5	52,8	52,8
Mandailing Natal	64,8	64,8	70,2	90,4	77,6
Tapanuli Selatan	81,0	81,0	80,8	69,4	68,5
Tapanuli Tengah	92,2	92,2	92,2	87,6	89,2
Tapanuli Utara	84,2	84,7	85,5	87,7	86,1
Toba	54,7	59,7	66,1	77,6	63,6
Labuhan Batu	88,4	92,7	95,3	86,4	75,6
Asahan	62,3	63,2	66,4	53,2	56,3
Simalungun	78,9	78,7	84,1	88,4	75,9
Dairi	68,8	68,8	71,3	70,8	74,2
Karo	92,7	92,7	100,0	95,4	91,4
Deli Serdang	90,1	88,7	99,0	89,1	87,5
Langkat	83,7	82,9	97,0	92,0	85,7
Nias Selatan	73,0	75,5	68,8	51,1	51,1
Humbang Hasundutan	84,7	85,6	86,3	95,6	79,4
Pakpak Bharat	96,2	96,2	100,0	99,0	88,7
Samosir	33,4	48,8	48,8	35,9	40,0
Serdang Bedagai	86,2	86,2	92,8	94,1	83,8
Batu Bara	78,1	82,4	84,9	81,9	87,4
Padang Lawas Utara	64,7	64,7	76,3	75,3	68,4
Padang Lawas	74,5	74,8	71,8	77,6	73,2
Labuhanbatu Selatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Labuanbatu Utara	81,5	93,2	93,2	84,1	85,3
Nias Utara	66,1	65,4	58,3	44,9	45,8
Nias Barat	56,5	55,4	61,6	31,6	26,8
Sibolga	40,9	40,9	100,0	100,0	80,3
Tanjungbalai	72,4	80,5	80,5	82,3	97,7
Pematangsiantar	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tebing Tinggi	70,9	56,5	100,0	100,0	100,0
Medan	82,7	90,1	93,3	94,1	96,8

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Binjai	71,4	94,0	97,0	100,0	100,0
Padangsidempuan	66,1	75,5	80,7	73,9	57,1
Gunungsitoli	93,4	93,4	94,6	55,0	55,9
Sumatera Utara	75,0	76,4	80,5	78,1	72,7

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Kondisi jalan mantap di Sumatera Utara merupakan elemen kunci dalam mendukung kemajuan ekonomi, mobilitas masyarakat, serta pembangunan daerah secara keseluruhan. Peningkatan kualitas jalan yang terus menerus dan pemeliharaan yang teratur akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat laju perekonomian, serta menjadikan Sumatera Utara lebih terhubung dengan daerah lain, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki keterkaitan yang erat dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah. RTRW memberikan arah dan pedoman terkait alokasi ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di suatu wilayah, sementara RPJMD merupakan rencana strategis pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah. Keduanya saling melengkapi, karena RTRW menjadi dasar dalam penentuan lokasi dan penggunaan ruang untuk berbagai kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD, seperti pembangunan infrastruktur, permukiman, industri, dan kawasan hijau. Tanpa integrasi yang baik antara RTRW dan RPJMD, pembangunan daerah dapat menjadi tidak terkoordinasi dan berisiko menyebabkan kesenjangan antara rencana ruang dan kebijakan pembangunan yang diterapkan.

Tabel 2. 113. Progres RTRW Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Nomor Perda	Status Tahun 2024
1	Kabupaten Karo	Perda No. 4 Tahun 2022	-
2	Kota Medan	Perda No. 1 Tahun 2022	-
3	Kabupaten Deli Serdang	Perda No. 1 Tahun 2021	-
4	Kabupaten Serdang Bedagai	Perda No.12 Tahun 2013 yang Telah Diubah Dengan Perda No. 1 Tahun 2021	-
5	Kota Binjai	Perda No. 05 Tahun 2020	-
6	Kabupaten Batubara	Perda No. 11 Tahun 2020	-
7	Kabupaten Humbang Hasundutan	Perda No. 1 Tahun 2018	-
8	Kabupaten Padang Lawas	Perda No. 2 Tahun 2018	Revisi
9	Kota Sibolga	Perda No. 2 Tahun 2018	-

No	Kabupaten/Kota	Nomor Perda	Status Tahun 2024
10	Kabupaten Samosir	Perda No. 3 Tahun 2018	Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Menteri ATR/BPN
11	Kabupaten Tapanuli Utara	Perda No. 3 Tahun 2017	-
12	Kabupaten Tapanuli Selatan	Perda No. 5 Tahun 2017	-
13	Kabupaten Labuhanbatu selatan	Perda No. 4 Tahun 2017	Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Menteri ATR/BPN
14	Kabupaten Toba	Perda No. 12 Tahun 2017	Revisi
15	Kabupaten Labuhanbatu	Perda No. 3 Tahun 2016	Revisi
16	Kabupaten Mandailing Natal	Perda No. 8 Tahun 2016	Revisi
17	Kabupaten Pakpak Bharat	Perda No. 9 Tahun 2016	Revisi
18	Kabupaten Nias Utara	Perda No. 1 Tahun 2015	Revisi
19	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Perda No. 5 Tahun 2015	-
20	Kabupaten Padang Lawas Utara	Perda No. 3 Tahun 2015	Revisi
21	Kabupaten Nias Selatan	Perda No. 6 Tahun 2014	Revisi
22	Kabupaten Nias	Perda No. 1 Tahun 2014	Revisi
23	Kabupaten Dairi	Perda No. 7 Tahun 2014	Revisi
24	Kota Padangsidimpuan	Perda No. 4 Tahun 2014	Revisi
25	Kabupaten Nias Barat	Perda No. 12 Tahun 2014	Revisi
26	Kota Tanjungbalai	Perda No. 2 Tahun 2013	Revisi
27	Kabupaten Tapanuli Tengah	Perda No. 8 Tahun 2013	Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Menteri ATR/BPN
28	Kabupaten Langkat	Perda No. 9 Tahun 2013	Revisi
29	Kabupaten Asahan	Perda No. 12 Tahun 2013	Revisi
30	Kota Pematangsiantar	Perda No. 1 Tahun 2013	Revisi
31	Kota Gunungsitoli	Perda No. 12 Tahun 2012	Revisi
32	Kota Tebing Tinggi	Perda No. 4 Tahun 2012	Revisi
33	Kabupaten Simalungun	Perda No. 10 Tahun 2012	Revisi

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara terdapat 19 Kabupaten/Kota yang saat ini sedang melakukan revisi terhadap RTRW, kemudian terdapat 3 Kabupaten yang melakukan permohonan peninjauan kembali kepada Kementerian ATR/BPN terhadap RTRW wilayahnya dan sisanya 11 Kabupaten/Kota lainnya tetap menggunakan RTRW yang saat ini berlaku pada wilayahnya sebagai bagian integrasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan RPJMD 2025-2029.

Pada tahun 2022, kinerja penyelenggaraan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara berada pada rangking 21 dari 34 Provinsi di Indonesia dengan nilai akhir 75,61 (klasifikasi SEDANG) berdasarkan penilaian dari Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang dari Kementerian ATR/BPN. Hasil tersebut didapatkan dari penilaian kelima aspek penyelenggaraan penataan ruang pada Tabel 2.5, dimana aspek pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera nilainya masih 0 (nol) dengan klasifikasi Buruk.

Tabel 2. 114. Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang dan Pelaksanaan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		Nilai	Ket.	Nilai	Ket.	Nilai	Ket.	Nilai	Ket.	Nilai	Ket.
1	Pengaturan Penataan Ruang	83	Baik	83	Baik	62,92	Sedang	62,92	Sedang	-	Penilaian dilakukan dalam 2 tahun sekali
2	Pembinaan Penataan Ruang	90	Baik	90	Baik	64,81	Sedang	64,81	Sedang	-	
3	Perencanaan Tata Ruang	100	Baik	100	Baik	100	Baik	100	Baik	-	
4	Pemanfaatan Ruang	100	Baik	100	Baik	85,72	Baik	85,72	Baik	-	
5	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	5	Buruk	5	Buruk	0	Buruk	0	Buruk	-	
Nilai Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang dan Pelaksanaan Penataan Ruang		75,61	Sedang	75,61	75,61	62,69	Sedang	62,69	Sedang	-	

Sumber: Dirjen Pengendalian, Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian ATR/BPN, 2025

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa aspek yang sangat perlu untuk diperhatikan untuk menaikkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara adalah aspek pengendalian pemanfaatan ruang. Dimana pengendalian pemanfaatan ruang terdiri dari: Pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK, Perwujudan RTR (Rencana Tata Ruang), Penerapan Insentif Disinsentif, Pengenaan Sanksi, dan Penanganan Sengketa.

d. Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dalam menciptakan kondisi kehidupan yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi setiap warga negara. Ketiga elemen ini saling terkait dan memiliki peran yang besar dalam memastikan bahwa masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang harmonis, bebas dari gangguan, ancaman, atau kekhawatiran yang dapat mengganggu kesejahteraan mereka.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Capaian Indikator Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 115. Capaian Indikator Satpol PP Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase gangguan trantibun yang dapat diselesaikan	90.25	96.51	100	97.00	100
Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	59.00	31.25	100	100	100

Sumber: Satpol PP Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan Tahun 2024 tercapai dengan realisasi 100.09% Begitu juga halnya dengan Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA yang ditegakkan, pada tahun 2024 capaian kinerja dicapai sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini dipengaruhi faktor kesadaran masyarakat yang semakin baik terhadap peraturan dan kebijakan Pemerintah, sehingga ketertiban dan ketenteraman masyarakat meningkat.

Kesatuan Bangsa Dan Politik

Dari data berikut dapat dilihat bahwa jumlah pelapor pemilih cerdas di tahun 2023 dan tahun 2024 memiliki capaian jumlah yang sama, dapat dilihat juga hampir semua target pada tahun 2024 mencapai target, kecuali Laporan Rencana Aksi Penanganan Konflik masih belum mendapatkan angka realisasi karena penilaian peringkat dilakukan oleh Kementrian. Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 116. Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Masyarakat yang menerima Pendidikan Politik	Orang	-	250	470	800	800
Jumlah Ormas yang terbina dan Aktif	Ormas	85	74	120	112	112
Jumlah Kawasan Bahaya Narkoba menjadi Kawasan Waspada	Desa	6.5	6.5	6.5	272	271
Laporan Rencana Aksi Penanganan Konflik	Peringkat	10	18	8	8	8
Jumlah Masyarakat yang menerima Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Revolusi Mental	Orang	-	1459	1550	2.160	1800

Sumber : Bakesbangpol Provinsi Sumatera Utara, 2025

Data menunjukkan terdapat total 476 zona rawan narkoba di Sumatera Utara, terdiri dari 23 zona “Bahaya” dan 453 zona “Waspada”. Kabupaten

dengan zona bahaya terbanyak adalah Mandailing Natal (6 zona), Deli Serdang (5 zona), dan Medan (3 zona). Oleh karena itu penanggulangan narkoba perlu difokuskan pada daerah dengan jumlah zona bahaya tinggi, serta memperkuat pencegahan di zona waspada.

Tabel 2. 117. Daerah Kawasan Narkoba di Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	JUMLAH ZONA	
		BAHAYA	WASPADA
1	ASAHAN	0	2
2	BATU BARA	0	1
3	DELI SERDANG	5	54
4	HUMBAHAS	0	24
5	LABUHAN BATU UTARA	1	0
6	LANGKAT	0	1
7	MANDAILING NATAL	6	0
8	SAMOSIR	0	20
9	SERDANGBEDAGAI	1	29
10	SIMALUNGUN	2	76
11	TAPANULI SELATAN	0	4
12	TAPANULI UTARA	0	93
13	TOBA	2	84
14	BINJAI	0	2
15	MEDAN	3	17
16	PADANGSIDIMPUAN	0	2
17	PEMATANGSIANTAR	3	34
18	SIBOLGA	0	1
19	TANJUNGBALAI	0	4
20	TEBING TINGGI	0	5
TOTAL		23	453

Sumber Data : Sumatera Utara dalam Angka Tahun 2025

e. Sosial

Pembangunan kesejahteraan merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Utara. Pencapaian kesejahteraan tidak hanya terfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan pemerataan pembangunan. Pada tahun 2024, Sumatera Utara terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui berbagai program dan kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan dan inklusivitas, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan.

Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa Penyandang Disabilitas yang ada di dalam panti semuanya mendapatkan pelayanan sesuai dengan SPM dibidang sosial. Bentuk pelayanan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dimaksud adalah melalui sistem “panti” dan “luar panti”. Sistem

panti memberikan pelayanan kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam suatu lokasi unit pelayanan teknis dan dalam jangka waktu yang relatif lama. Sistem luar panti memberikan pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial di lokasi tempat tinggal mereka dan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Capaian Indikator Sosial Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 118. Capaian Indikator Sosial Provinsi Sumatera Utara

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PSKS yang dikelola oleh Penyelenggara Sosial	Persen	-	-	-	5759	1233
2	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti	persen	2345/ 100%	1997/ 100%	1997/ 100%	2025/ 100%	3640/ 100%
3	Persentase Keluarga Miskin yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Korban Bencana yang mendapatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar	persen	1468/ 0,11%	15072/ 1,13%	104694/ 7,84%	1344869 / 0,37%	132700
4	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tingkat provinsi yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar.	persen	-	-	-	-	1356

Sumber : Evaluasi TW IV Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Provinsi Sumatera Utara memiliki jaringan panti sosial yang melayani berbagai kelompok, termasuk anak, lansia, penyandang disabilitas, tuna susila, dan eks penderita kusta. Secara garis besar Pelayanan sosial masih membutuhkan peningkatan fasilitas dan peningkatan kapasitas layanan panti.

Tabel 2. 119. Daftar Panti Sosial dan UPTD Provinsi Sumatera Utara

No.	Panti Sosial	UPTD
1.	Panti Sosial Anak Balita Medan	UPTD Pelayanan Sosial Anak Balita Medan
2.	Panti Sosial Anak Siborong-borong	UPTD Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Siborong-borong
3.	Panti Sosial Lanjut Usia Siborong-borong	
4.	Panti Sosial Anak Gunungsitoli	UPTD Pelayanan Sosial Anak Gunung Sitoli
5.	Panti Sosial Anak Padangsidimpuan	UPTD Pelayanan Sosial Anak Padang Sidempuan - Panyabungan
6.	Panti Sosial Anak Panyabungan	
7.	Panti Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa	UPTD Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa
8.	Panti Sosial Anak Sidikalang	UPTD Pelayanan Sosial Anak Sidikalang - Kabanjahe
9.	Panti Sosial Anak Kabanjahe	
10.	Panti Sosial Eks Kusta Belidahan	UPTD Pelayanan Sosial Eks Kusta Belidahan Sicanang
11.	Panti Sosial Eks Kusta Sicanang	
12.	Panti Sosial Eks Kusta Lau Simomo	

No.	Panti Sosial	UPTD
13.	Panti Sosial Eks Kusta Huta Salem	UPTD Pelayanan Sosial Eks Kusta Lau Simomo - Huta Salem
14.	Panti Sosial Gelandangan dan Pengemis Binjai	UPTD Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Binjai
15.	Panti Sosial Gelandangan dan Pengemis Pinang Sori	UPTD Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Pinang Sori
16.	Panti Sosial Lanjut Usia Binjai	UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai
17.	Panti Sosial Lanjut Usia Kisaran	UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran - Rantau Prapat
18.	Panti Sosial Lanjut Usia Rantau Prapat	
19.	Panti Sosial Tuna Netra Tebing Tinggi	UPTD Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Tebing Tinggi
20.	Panti Sosial Tuna Daksa Tebing Tinggi	
21.	Panti Sosial Tuna Rungu Wicara Pematangsiantar	UPTD Pelayanan Sosial Tuna Rungu Wicara dan Lanjut Usia Pematangsiantar
22.	Panti Sosial Lanjut Usia Pematangsiantar	
23.	Panti Sosial Tuna Susila Berastagi	UPTD Pelayanan Sosial Wanita Tuna Susila dan Tuna Laras Berastagi
24.	Panti sosial Tuna Laras Berastagi	

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, 2025

Panti sosial yang dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 24 panti sosial yang terdiri 8 panti sosial anak, 5 panti sosial lanjut usia, 4 panti sosial eks kusta, 2 panti sosial gelandangan dan pengemis dan masing-masing satu panti sosial untuk tuna netra, tuna daksa, tuna rungu, tuna susila dan tuna laras. Distribusi panti sosial yang dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum merata diseluruh Kabupaten/Kota serta tidak merata juga jenis panti sosial yang terdapat pada satu Kabupaten/Kota tersebut.

Tempat ibadah memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat, sehingga keberadaannya harus dipertimbangkan dalam setiap perencanaan pembangunan. Selain sebagai tempat untuk menjalankan kegiatan spiritual, tempat ibadah juga sering kali menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan komunitas bagi warga di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan, peran tempat ibadah tidak hanya dilihat dari sisi kebutuhan religius, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Penyediaan tempat ibadah yang memadai, terjangkau, dan mudah diakses akan mendukung keharmonisan sosial dan memperkuat kohesi antarwarga. Selain itu, perencanaan tempat ibadah yang terintegrasi dengan perencanaan ruang lainnya seperti pemukiman, transportasi, dan ruang publik akan memastikan bahwa pembangunan berlangsung secara inklusif, mencakup seluruh lapisan masyarakat, serta menghormati nilai-nilai agama yang ada.

Tercatat 10.867 masjid, 5.057 mushola, 12.499 gereja (Protestan & Katolik), serta ratusan kuil/pura, vihara, dan rumah ibadah Khonghucu.

Simalungun dan Nias Selatan memiliki gereja terbanyak, sedangkan Deli Serdang dan Medan memiliki jumlah masjid tertinggi.

Tabel 2. 120. Jumlah Tempat Ibadah di Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	Mesjid	Musolah	Gereja		Kuil/ Pura	Vihara	Khonghucu
				Protestan	Katolik			
1	Nias	7	3	565	189	-	-	-
2	Mandailing Natal	637	249	62	12	-	-	-
3	Tapanuli Selatan	511	6	210	45	-	-	-
4	Tapanuli Tengah	228	54	495	157	-	-	-
5	Tapanuli Utara	67	6	911	75	-	1	-
6	Toba	45	13	328	67	-	-	-
7	Labuhanbatu	560	270	300	30	-	11	1
8	Asahan	733	619	416	41	1	10	2
9	Simalungun	964	310	1.049	183	-	6	-
10	Dairi	149	72	872	147	1	2	-
11	Karo	192	50	767	168	2	9	-
12	Deli Serdang	1.062	539	969	129	28	93	27
13	Langkat	852	584	103	43	3	17	1
14	Nias Selatan	13	1	1.347	246	-	-	-
15	Humbang Hasundutan	27	13	450	95	-	-	-
16	Pakpak Bharat	77	23	112	13	-	-	-
17	Samosir	7	2	343	137	-	-	-
18	Serdang Bedagai	662	452	320	48	1	8	2
19	Batu Bara	283	281	170	32	-	2	1
20	Padang Lawas Utara	608	176	33	1	-	-	-
21	Padang Lawas	387	105	18	1	-	-	-
22	Labuhanbatu Selatan	433	150	73	46	-	2	1
23	Labuhanbatu Utara	449	89	273	54	1	2	-
24	Nias Utara	34	2	475	144	-	-	-
25	Nias Barat	6	3	284	58	-	-	-
26	Sibolga	42	7	47	3	-	7	1
27	Tanjungbalai	79	107	43	1	-	13	3
28	Pematangsiantar	136	61	189	9	4	15	1
29	Tebing Tinggi	150	100	52	1	2	24	2
30	Medan	1.039	410	837	44	36	246	54
31	Binjai	185	173	66	2	3	20	3
32	Padangsidempuan	214	113	64	5	-	-	-
33	Gunungsitoli	29	14	256	11	-	-	-
	Sumatera Utara	10.867	5.057	12.499	2.237	82	488	99

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, 2025

2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar merujuk pada berbagai kegiatan pemerintahan yang tidak langsung berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, namun tetap memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan daerah. Meskipun tidak secara langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar berfokus pada aspek-aspek yang meningkatkan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, menciptakan kesejahteraan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial.

a. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Utara. Kualitas,

keterampilan, serta jumlah tenaga kerja yang tersedia menjadi penentu utama dalam mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata. Provinsi Sumatera Utara, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan keragaman sektor ekonomi, menghadapi tantangan dan peluang dalam mengoptimalkan tenaga kerjanya agar dapat berkontribusi maksimal terhadap kemajuan daerah. Capaian Indikator Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 121. Capaian Indikator Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

No.	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	4.46	0.28	0.047	0.03	0.004
2	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0.05	16.58	10.12	60.25	61.98
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	0.42	7.94	7.85	11.55	12.27
4	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang undangan bidang ketenagakerjaan	64.18	50.10	81.34	67.54	12.27
5	Persentase kabupaten/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	93.94	84.85	93.33	36.36	39.39
6	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	-	79 SP / lokasi	-	79	27.12

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hanya IKU Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang mencapai target dan 5 IKU lainnya realisasi masih belum memenuhi target.

b. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

Perkembangan capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 122. Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Tahun dan Keluarga Berencana

No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) (%) di tingkat provinsi	98	98	94	19	54,7

No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Rasio kekerasan terhadap Perempuan (/100.000)	5	5	9	12	10.76
3	Rasio kekerasan terhadap Anak (/10.000)	12	12	19	29	2.5
4	Persentase Perangkat Daerah berkontribusi mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (Menuju) (%)	-	N/A	70%	38	67
5	Total Fertility Rate (TFR)	3.04	3.04	2.6	2.39	2.36

Sumber: Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata IKU terkait diatas menunjukkan tren positif serta seperti Rasio kekerasan terhadap Perempuan (/100.000) mengalami penurunan. indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat prevalensi kekerasan yang dialami oleh perempuan di suatu wilayah. Walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai dalam perlindungan terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan masih menjadi tantangan global yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak. Langkah-langkah yang berfokus pada pencegahan, pendidikan, serta penegakan hukum yang tegas harus terus didorong untuk mengurangi kekerasan dan memastikan perempuan hidup dalam masyarakat yang aman, setara, dan bebas dari diskriminasi.

c. Pangan

Pola pangan yang sehat dan bergizi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Dalam konteks ini, pola pangan mengacu pada kebiasaan, pilihan, dan keberagaman makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pola pangan yang baik harus mencakup keberagaman konsumsi pangan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi secara seimbang, serta mempertimbangkan ketersediaan pangan lokal yang berkelanjutan. Skor Pola Pangan Harapan memiliki peran penting dalam menilai tingkat keberagaman konsumsi pangan di kalangan penduduknya. Sebagai provinsi dengan keragaman suku, budaya, dan tradisi kuliner yang tinggi, pola makan masyarakat Sumatera Utara sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pangan lokal serta tradisi dan kebiasaan makan yang sudah lama berkembang di daerah tersebut.

Kemudian, Beberapa Indikatornya adalah seperti Produksi Tanaman Pangan yang merupakan aspek penting dalam pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan suatu negara. Tanaman pangan, yang meliputi

berbagai jenis tanaman yang dibudidayakan untuk menghasilkan bahan makanan pokok yang berperan vital dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Lalu Indikator Produktivitas Tanaman Pangan menunjukkan seberapa efisien suatu lahan dalam menghasilkan hasil pertanian dalam bentuk tanaman pangan dan dihitung sebagai hasil per unit luas lahan, seperti ton per hektar (t/ha). Produktivitas yang tinggi menandakan kemampuan suatu wilayah atau negara untuk menghasilkan pangan secara lebih efisien, yang pada gilirannya mendukung ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

Berikut capaian indikator ketahanan pangan dan produksi peternakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 123. Capaian Indikator Ketahanan Pangan dan Produksi Peternakan Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	83,77	85	87.2	90.9	89,16
Jumlah Produksi Tanaman Pangan						
1	Padi (ton GKG)	4.200.112	3.926.768	3.985.354	4.049.438	3.595.081
2	Jagung (ton pipilan kering)	1.965.444	1.727.166	1.806.544	1.898.955	1.763.646
3	Kedele (ton)	4.003	1.463	8.214	15.693	9.070
Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan						
1	Padi (ton/Ha)	5.10	5.18	5.34	5.32	5.33
2	Jagung(ton/Ha)	6.11	6.13	6.24	6.23	6.24
3	Kedele (ton/ha)	1.56	1.71	1.58	1.59	1.38
Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura						
1	Bawang Merah (ton)	29.222	53.962	64.835	65.526	35.062
2	Cabe (ton)	193.862	210.220	211.747	205.960	179.190
3	Sayur-sayuran (ton)	1.239.317	1.438.309	1.445.342	1.232.583	1.114.354
4	Buah - buahan (ton)	1.255.585	1.458.997	1.440.660	1.547.654	77.377
Produktivitas Tanaman Hortikultura						
1	Bawang Merah (ton)	9.55	12.33	15.26	8.28	9.84
2	Cabe (ton)	10.46	12.21	12.12	10.36	13.71

Sumber: Dinas TPH dan Ketapang Provinsi Sumatera Utara TW IV Tahun 2024

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2024 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) telah mencapai target, hal ini membuktikan bahwa

Provinsi Sumatera Utara terus berupaya dalam meningkatkan pangan di Provinsi Sumatera Utara. Serta Produksi tanaman terus meningkat dari tahun 2023 sampai tahun 2024.

d. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan tiga aspek penting dalam sistem pemerintahan yang berfungsi untuk memberikan layanan dasar kepada masyarakat, khususnya dalam rangka pengelolaan data kependudukan, pelaksanaan pencatatan status sipil, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Ketiganya memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mendukung pembangunan yang merata, terutama di daerah-daerah pedesaan. Capaian Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 124. Capaian Indikator Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	88.89	85.32	84.75	86.18	89.87
Persentase Penerbitan KIA dalam Pelayanan Adminduk	-	30	25	38.5	50.90
Persentase Jumlah OPD Provsu dan Lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan skala Provinsi untuk Pelayanan Publik dalam rangka pembangunan desa dan penataan kota berbasis NIK	32%	65.30	85.71	100	91
Jumlah Desa Tertinggal	-	-	-	1071	873
Jumlah Desa Berkembang	-	-	-	3132	2904
Jumlah Desa Mandiri	-	-	-	72	168
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju	-	-	-	28	9
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berkembang	-	-	-	253	74
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang Aktif	-	-	-	58	17.49

Sumber: Dinas Pemdes dan Dukcapil Provinsi Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian berada di bawah target provinsi Sumatera utara yang telah ditetapkan di dalam dokumen RPD Provinsi Sumatera Utara 2024-2026, dari seluruh IKU masih

ada beberapa yang belum tercapai dan namun terkait dengan catatan sipil seluruh IKU tercapai 100%.

e. Perhubungan

Untuk mengukur ketercapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap perhubungan yang menjadi kewenangan provinsi dapat dilihat dari ketercapaian beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2. 125. Capaian Indikator Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	39.32	39.92	60.63	70,24	71.00
2	Rasio Konektivitas Provinsi	-	-	-	-	0.604
3	Persentase Konektivitas Simpul Angkutan jalan	-	-	-	30,77	38,46
4	On Time Performance Layanan Transportasi	-	-	-	-	83.52

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari data di atas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami tren positif, hal ini disebabkan karena maksimalnya maksimalnya perencanaan masing-masing sektor perhubungan dan integrasi pelayanan antar Moda, serta maksimalnya pembangunan infrastruktur yang dapat mengakomodir kebutuhan pergerakan orang dan barang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah serta belum tersedianya perencanaan kebutuhan Fasilitas keselamatan jalan. Terkait dengan indikator Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

f. Komunikasi Dan Informatika

Sektor Komunikasi dan Informatika mempunyai peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mendukung pencapaian *clean goverment* dan *good goverment* melalui *e-goverment*. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi diberi tugas untuk melaksanakan 2 (dua) sub urusan, yaitu Informasi dan Komunikasi Publik dan Aplikasi Informatika, Capaian Indikator komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 126. Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan	n/a	n/a	n/a	n/a	80

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional					
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	n/a	n/a	n/a	n/a	92
Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	n/a	n/a	n/a	n/a	2
Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber	n/a	n/a	n/a	n/a	10

Sumber: Diskominfo Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa IKU Diskominfo merupakan IKU yang termuat pada dokumen RPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 - 2026 serta target dan capaian indikator yang ditetapkan telah tercapai pada tahun 2024.

g. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memberdayakan UMKM melalui peningkatan akses permodalan, digitalisasi, dan formalisasi usaha, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga fokus pada upaya formalisasi UMKM, yakni dengan mendorong UMKM untuk berstatus formal, diharapkan mereka dapat mengakses berbagai fasilitas dan dukungan yang tersedia, serta meningkatkan kredibilitas dan daya saing di pasar. Capaian Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 127. Capaian Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	-	-	-	8,34	22,52
Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	-	-	-	4,92	5,86
Persentase Koperasi Berkualitas	Persen	-	-	-	-	0,31
Persentase Jumlah UMKM yang didukung Pemasarannya	Persen	-	-	-	0,04	5,13
Pertumbuhan Wirausaha	Persen	-	-	-	0,01	0,055

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Usaha Kecil yang Menyelesaikan Sertifikasi (HaKI, Halal, Ijin Edar Produk dan lain dan lain)	Unit	-	-	-	328	612
Digitalisasi Platform Inovatif UMKM	Unit	-	-	-	-	1

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Capaian Koperasi Sumatera Utara mengalami peningkatan dan IKU nya mengalami peningkatan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.

h. Penanaman Modal Dan Perizinan

Penanaman modal merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di suatu daerah. Di Provinsi Sumatera Utara, penanaman modal baik dari investor domestik maupun asing memainkan peran krusial dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan infrastruktur, dan mendukung pengembangan sektor-sektor strategis seperti industri, pertanian, dan pariwisata. Dalam konteks ini, sistem perizinan yang efektif dan efisien menjadi salah satu faktor kunci yang mendukung kelancaran investasi dan pembangunan di daerah tersebut. Capaian Indikator Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 128. Capaian Indikator Penanaman Modal

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Investor PMDN	Investor	1.377	4.186	9.146	17.278	26.953
Investor PMA	Investor	401	690	1.613	3.036	4,183
Nilai Investasi PMDN	Rp Triliun	18,18	18,48	22,78	21,57	22,44
Nilai Investasi PMA	Rp Triliun	14,03	8,47	18,88	17,48	25,82
Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMDN	Orang	21.324	17.456	25.682	67.373	34.361
Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMA	Orang	5.297	5.849	6.702	8.857	11.871
Jumlah Izin yang terbit (dokumen izin)	Dokumen	2.694	1.511	1.565	1,484	2,468

Sumber: DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator penanaman modal Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif dengan capaian terbesar pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp48,271 triliun, yang terdiri dari penanaman modal dalam negeri sebesar Rp22,44 triliun dan penanaman modal asing sebesar Rp25,82 triliun. Pembangunan

beberapa proyek infrastruktur diyakini sebagai pendorong meningkatnya investasi di Sumatera Utara.

i. Kepemudaan Dan Keolahragaan

Tujuan pembangunan kepemudaan dan olahraga adalah menjadikan pemuda dan atlit yang berkarakter dan berdaya saing. Untuk membentuk karakter dan kompetensi/daya saing maka diperlukan pendidikan yang baik dan berkualitas. Capaian Kinerja Kepemudaan dan Keolahragaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 129. Capaian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	53,7	53,7	0,97	92,31	87.69
Persentase Pembinaan Atlit Muda (atlit pelajar)	-	-	21.63	51,67	53.09

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 hanya ada 1 (satu) indikator kinerja yang telah belum memenuhi target yang telah ditetapkan di dalam dokumen RPD Provinsi Sumatera Utara 2024-2026 yaitu Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi, sementara indikator lain pada tahun 2024 telah tercapai.

Tabel 2. 130. Perolehan Medali Provinsi Sumatera Utara pada PON XXI Sumut-Aceh 2024

NO	CABOR	MEDALI			
		EMAS	PERAK	PERUNGGU	TOTAL MEDALI
1	ARUNG JERAM	2	3	3	8
2	PETANQUE	1	1	6	8
3	KURASH	1	1	3	5
4	SEPATU RODA	1	1	2	4
5	PANJAT TEBING	1	0	1	2
6	AEROSPORT- PARAMOTOR	1	0	0	1
7	TARUNG DERAJAT	0	2	4	6
8	PANAHAN	0	2	2	4
9	JUDO	0	1	5	6
10	MENEMBAK	0	1	5	6
11	MUAYTHAI	0	1	4	5
12	DRUMBAND	7	1	1	9
13	ATLETIK	6	4	2	12
14	BILIAR	6	1	10	17
15	KICK BOXING	5	4	2	11
16	SAMBO	5	3	5	13
17	DANCESPORT	5	1	1	7
18	BOWLING	4	2	4	10
19	BARONGSAI	4	0	2	6
20	WUSHU TAOLU	4	0	0	4
21	WUSHU SANDA	3	4	1	8
22	PENCAK SILAT	3	3	4	10
23	SQUASH	2	0	1	3
24	TINJU	1	4	5	10

NO	CABOR	MEDALI			
		EMAS	PERAK	PERUNGGU	TOTAL MEDALI
25	GATEBALL	1	2	2	5
26	TAEKWONDO	1	0	4	5
27	BALAP SEPEDA ROAD RACE	1	0	1	2
28	BALAP SEPEDA BMX	0	1	0	1
29	KABADDI	1	0	1	2
30	AKUATIK-RENANG	1	0	0	1
31	ESPORT	1	0	0	1
32	GULAT	0	3	5	8
33	HOKI - OUTDOOR	0	2	0	2
34	JU JITSU	0	1	3	4
35	SKI AIR	0	1	3	4
36	CATUR	0	1	0	1
37	TENIS MEJA	0	0	2	2
38	SQUASH	2	0	1	3
39	TINJU	1	4	5	10
40	GATEBALL	1	2	2	5
41	TAEKWONDO	1	0	4	5
TOTAL		72	43	77	192

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, 2025

Pada PON XXI Sumut-Aceh 2024, Provinsi Sumatera Utara meraih total 192 medali 72 emas, 43 perak, 77 perunggu. Cabang olahraga dengan raihan emas tertinggi antara lain Drumband 7 emas, Atletik (6 emas), Biliar (6 emas), Kick Boxing (5 emas), Sambo (5 emas), dan Dancesport (5 emas).

j. Statistik

Sektor Statistik mempunyai peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mendukung kebijakan pelaksanaan satu data yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Kebijakan satu data ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Selanjutnya untuk pelaksanaan urusan statistik dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan dalam hal pelaksanaan Statistik Sektoral yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dengan tujuan untuk mengetahui kecenderungan (tren) yang akan terjadi pada masa datang, menentukan prioritas, sebagai acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk memperkirakan antisipasi terhadap resiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan. Untuk capaian pelaksanaan statistik sektoral di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 131. Data Statistik Sektoral Yang Terintegrasi

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Data Statistik Sektoral	69	69	92	100	-

Sumber : Diskominfo Provinsi Sumatera Utara, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian pelaksanaan Data Statistik Sektoral pada tahun 2023 sebesar 100% telah mencapai target yang ditetapkan, namun data capaian pada tahun 2024 masih belum rilis.

k. Persandian

Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi menangani sub urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kewenangan yaitu :

- 1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah provinsi melalui: (a) Pembelajaran dan Peningkatan Kapabilitas mengenai Sandi dan Sistem Keamanan Informasi dan; (b) Pengumpulan, Pemutakhiran dan Peningkatan Keamanan Informasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota;
- 2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah provinsi, melalui Pengumpulan, Pemutakhiran dan Penyelarasan Sandi antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Capaian Indikator untuk urusan persandian adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 132. Capaian Indikator Urusan Persandian

Indikator	2020	2021	2022	2023
Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	10	10	61	100

Sumber : Diskominfo Provinsi Sumatera Utara, 2025

Capaian ini berasal dari jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah memahami dan menggunakan keamanan informasi sebanyak 5 (lima) Organisasi Perangkat Daerah antara lain Dinas Kominfo, BPKAD, Bappeda, BKD dan Inspektorat. Indikator ini juga merupakan bagian yang penting dalam mendukung penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

1. Kebudayaan

Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu warisan yang kaya dan beragam, yang tercermin dalam tradisi, seni, bahasa, serta nilai-nilai kehidupan masyarakatnya. Sebagai salah satu provinsi dengan keragaman etnis yang sangat tinggi, Sumatera Utara menjadi tempat pertemuan berbagai budaya yang berkembang seiring waktu. Di sini, berbagai suku bangsa, seperti Batak, Melayu, Minangkabau, Nias, dan Tionghoa, hidup berdampingan dengan damai, masing-masing mempertahankan identitas budaya mereka yang unik sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/464/KPTS/2022 tanggal 4 Juli 2022 dan Surat Keputusan Gubernur

Sumatera Utara Nomor 188.44/1052/KPTS/2023 tanggal 15 Desember 2023, tentang Penetapan Cagar Budaya Provinsi Sumatera Utara, terdapat 27 (dua puluh tujuh) Situs dan Benda Cagar Budaya yang telah ditetapkan menjadi Cagar Budaya Tingkat Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

1. Kompleks Makam Raja Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Nisan-Nisan di Kompleks Makam Papan Tinggi, Kabupaten Tapanuli Tengah
3. Kompleks Makam Papan Tinggi, Kabupaten Tapanuli Tengah
4. Nisan-Nisan di Kompleks Makam Tuan Ambar, Kabupaten Tapanuli Tengah
5. Kompleks Makam Tuan Ambar, Kabupaten Tapanuli Tengah
6. Benda-Benda Di Situs Bongal, Kabupaten Tapanuli Tengah
7. Situs Bongal, Kabupaten Tapanuli Tengah
8. Nisan - Nisan Di Kompleks Makam Tuan Machdum, Kabupaten Tapanuli Tengah.
9. Kompleks Makam Tuan Machdum, Kabupaten Tapanuli Tengah.
10. Nisan - Nisan Di Kompleks Makam Mahligai, Kabupaten Tapanuli Tengah.
11. Kompleks Makam Mahligai, Kabupaten Tapanuli Tengah.
12. Nisan - Nisan di Kompleks Makam Tuan Ibrahim Syah, Kabupaten Tapanuli Tengah.
13. Kompleks Makam Tuan Ibrahim Syah, Kabupaten Tapanuli Tengah.
14. Mesjid Azizi, Kabupaten Langkat.
15. Batu Tettal Padang, Berutu, Solin, Kab. Pakpak Bharat.
16. Benteng Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah.
17. Gudang Pemeraman Tembakau Bulu Cina, Kabupaten Deli Serdang.
18. Kawasan Megalitik Bawomataluo, Kabupaten Nias Selatan.
19. Mejan Berutu Sikuraja Kuta Ujung, Kab. Pakpak Bharat.
20. Masjid Raya Sultan Basyaruddin Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang.
21. Rumah Pengasingan Soekarno, Sutan Sjahrir dan H. Agus Salim Kabupaten Karo
22. Situs Batu Nisan Lebbuh Marga Solin Lae Meang Kabupaten Pakpak Bharat.
23. Situs Batu Tettal Berutu Permang-Mang Lebbuh Nusa Kabupaten Pakpak Bharat.
24. Situs Hilisimaetano Desa Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan.
25. Situs Mejan Berutu Permang-Mang Lumerah Kabupaten Pakpak Bharat.
26. Situs Omo Hada Fonali Daeli Kabupaten Nias Barat.
27. Situs Sitardas Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya Perlindungan, Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya yang berada di Sumatera Utara, seperti konservasi, pemugaran dan penataan Cagar Budaya. Namun karena masih terbatasnya sumber daya yang dimiliki sehingga upaya tersebut masih kurang optimal. Dibawah ini disajikan pencapaian kinerja kebudayaan Provinsi Sumatera Utara, Capaian Indikator kebudayaan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 133. Capaian Indikator Kebudayaan

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Peningkatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	-	-	-	12,42	14,90
2	Persentase Cagar Budaya dan warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	-	-	-	48,54	64,45
3	Jumlah Benda/Situs Cagar Budaya yang ditetapkan	-	7	13	14	-

Sumber: Dinas Kebudayaan,Pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dilihat dari tabel di atas, angka realisasi pada IKU Kebudayaan cendereung mengalami kenaikan, seperti Persentase Peningkatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan pada tahun 2023 memiliki realisasi 12,42% dan mengalami kenaikan menjadi 14,90% dan IKU Persentase Cagar Budaya dan warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan pada Tahun 2023 dengan realisasi 48,54% dengan kenaikan pada tahun 2024 sebesar 64,45%. Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara adalah cermin dari keberagaman etnis dan sejarah panjang masyarakatnya. Dari seni, bahasa, kuliner, hingga adat istiadat, kebudayaan Sumatera Utara menunjukkan identitas yang kuat dan kaya akan nilai-nilai luhur. Melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan, Sumatera Utara dapat mempertahankan keunikannya, sembari membangun masa depan yang lebih inklusif dan berbasis pada kekayaan tradisi dan nilai lokal.

m. Perpustakaan

Jumlah perpustakaan terakreditasi di Indonesia, termasuk di tingkat provinsi, menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dalam beberapa tahun terakhir. Akreditasi perpustakaan merupakan pengakuan formal yang diberikan terhadap pemenuhan standar nasional, mencakup aspek koleksi, layanan, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta

pengelolaan perpustakaan. Secara umum, semakin banyaknya perpustakaan yang terakreditasi menandakan peningkatan kualitas layanan informasi, literasi, dan budaya baca di masyarakat. Di berbagai provinsi, termasuk Sumatera Utara, program akreditasi terus digencarkan untuk memastikan bahwa perpustakaan, baik di sekolah, perguruan tinggi, komunitas, maupun instansi pemerintah, mampu menyediakan layanan yang layak dan berstandar tinggi.

Meskipun jumlah perpustakaan terakreditasi terus bertambah, tantangan masih ada, terutama terkait pemerataan akreditasi di wilayah-wilayah perdesaan dan terpencil. Pemerintah melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) bersama dinas perpustakaan daerah aktif mendorong peningkatan akreditasi ini dengan memberikan bimbingan teknis, asistensi, dan pelatihan pengelolaan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Upaya ini bertujuan memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat, memperluas akses informasi, serta mendukung pengembangan sumber daya manusia berkualitas di seluruh Indonesia.

Tabel 2. 134. Jumlah Perpustakaan Terakreditasi di Provinsi Sumatera Utara

Jenis	Peringkat			Total
	A	B	C	
Perpustakaan Khusus	4	2	2	8
Perpustakaan Sekolah	10	43	76	129
Perpustakaan Perguruan Tinggi	11	4	4	19
Perpustakaan Umum	3	11	28	42
Jumlah	28	60	110	198

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2025

Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 198 perpustakaan di Provinsi Sumatera Utara telah memperoleh akreditasi. Dari jumlah tersebut, perpustakaan sekolah mendominasi dengan 129 unit, terdiri atas 10 perpustakaan berperingkat A, 43 berperingkat B, dan 76 berperingkat C. Perpustakaan umum tercatat sebanyak 42 unit dengan rincian 3 berperingkat A, 11 berperingkat B, dan 28 berperingkat C. Sementara itu, perpustakaan perguruan tinggi berjumlah 19 unit dan perpustakaan khusus sebanyak 8 unit, masing-masing dengan distribusi peringkat yang bervariasi. Data ini mencerminkan komitmen peningkatan kualitas layanan perpustakaan di berbagai jenis lembaga di Sumatera Utara melalui upaya akreditasi formal.

n. Kearsipan

Kearsipan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pengelolaan informasi di sebuah daerah. Di Provinsi Sumatera Utara, kearsipan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk

menyimpan dan mengelola dokumen-dokumen penting, tetapi juga sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan. Pengelolaan arsip yang baik juga sangat vital untuk kepentingan sejarah dan perkembangan daerah, serta mempermudah akses informasi bagi masyarakat dan berbagai pihak yang membutuhkan. Capaian Indikator Kearsipan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 135. Capaian Indikator Kearsipan

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baik	6.12	47	49	49	52
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	65	71	86	103	110
3	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	-	-	-	67.01	68.60

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baik dan peningkatan SDM Pengelola Kearsipan menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, dan pada IKU Nilai Tingkat Kegemaran Membaca mengalami peningkatan sebesar 1,59%.

3. Urusan Pilihan

a. Pariwisata

Perkembangan Pariwisata di Sumatera Utara menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sumatera Utara tidak hanya dikenal karena kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, tetapi juga karena potensi besar yang dimilikinya dalam sektor pariwisata, baik untuk wisatawan domestik maupun internasional. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia, Sumatera Utara terus berupaya untuk mengembangkan sektor ini sebagai pilar penting dalam perekonomian daerah. Diantaranya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, dengan capaian berikut:

Tabel 2. 136. Capaian Indikator Pariwisata

Indikator	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Pariwisata	7,46	6,66	6,22	3,8	3,8
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Pariwisata	-	-	-	51,60	81,50
Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	635,3

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2025

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa kontribusi sektor pariwisata di Sumatera Utara masih belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling

terdampak dengan adanya Pandemi Covid-19. Sektor-sektor ekonomi yang berhubungan dengan pariwisata yang terdampak antara lain adalah industri pengolahan, transportasi dan penyediaan akomodasi, makan-minum serta perdagangan skala besar dan juga eceran. Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2024 IKU Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Pariwisata mengalami kenaikan sebesar 81,50 persen dari sebelumnya 51,60 persen pada tahun 2023.

b. Perkebunan

Dari luas areal perkebunan adalah 2.167.639,02 Ha sebesar 1.189.207,48 Ha merupakan perkebunan rakyat dengan komoditi utamanya adalah kelapa sawit, karet, kopi, kakao dan kelapa. Sementara itu capaian perkebunan dapat dilihat dari keberhasilan indikator sebagai berikut:

Tabel 2. 137. Capaian Indikator Perkebunan Provinsi Sumatera Utara					
Indikator (Ton)	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan produksi komoditas perkebunan rakyat (PR) (%/tahun)	2,60%	3,33%	5,20%	4,65%	5,48%
Persentase Peningkatan Produktivitas komoditas perkebunan rakyat (%)	-	-	1,89%	1,06%	2,83%
NTP sub sektor Tanaman Perkebunan	-	145,04 (poin)	152,28 (poin)	159,89 (poin)	182,87 (poin)
Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB (ADHB)	49,98%	53,85%	57,28%	59,01%	61,99%

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2024 seluruh Indikator Perkebunan Provinsi Sumatera Utara telah mencapai target dan terus meningkat baik peningkatan produksi komoditas perkebunan rakyat, produktivitas komoditas perkebunan rakyat, Nilai Tukar Petani Sub sektor perkebunan dan Kontribusi Sub sektor perkebunan terhadap PDRB, hal ini membuktikan bahwa Provinsi Sumatera Utara terus berupaya dalam meningkatkan sektor perkebunan di Provinsi Sumatera Utara.

c. Kehutanan

Berdasarkan penetapan lahan kritis Provinsi Sumatera Utara seluas 1.338.810 Ha (sesuai SK MENLHK No. 306/2018) dan program perhutanan sosial seluas 592.438 Ha (sesuai SK MENLHK No. 3511/2018) pada tahun 2018 hutan di Sumatera Utara yang harus direhabilitasi untuk lahan kritis seluas 825.754,60 Ha, namun pada tahun 2019 Sumatera Utara dapat melakukan rehabilitasi sebanyak 275.711 Ha, pada tahun 2020 rehabilitasi hutan sebanyak 275.233 Ha, keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan kritis

terus menurun dan pada tahun 2023 capaian rehabilitasi hutan dan lahan kritis hanya mencapai 271.056 Ha. Sedangkan untuk penanganan kerusakan kawasan hutan pada tahun 2019 kerusakan kawasan hutan di Sumatera Utara seluas 60.500 Ha turun pada tahun 2023 penanganan kerusakan hutan sudah mencapai seluas 54.350 Ha. Hal ini merupakan upaya untuk menurunkan tingkat kerusakan kawasan hutan dan lahan kritis melalui rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan pengamanan kawasan hutan serta pemantapan kawasan hutan dan pengusahaan hutan yang akan berdampak pada perbaikan iklim yang terkendali. Adapun capaian Indikator Kehutanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 138. Capaian Indikator Kehutanan

Indiokator	2020	2021	2022	2023	2024
Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis (Ha)	275.233	275.251	271.666	271.056	270,278
Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	59.895	57.455	55.976	54.350	52,983
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)	4,04	3,67	3,38	3,36	3,13

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan tabel di atas, seluruh Indikator kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah mencapai target, dari IKU tersebut, realisasi terhadap IKU Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis (Ha) pada tahun 2024 mencapai 270,278 (Ha) dari sebelumnya 271.056 (Ha) ditahun 2023.

d. Energi Dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Sumatera Utara berada di jalur pegunungan Bukit Barisan, yang memiliki wilayah Cekungan air tanah, pegunungan dan wilayah pesisir. Hal ini mengindikasikan bahwa Sumatera Utara memiliki banyak potensi energi terbarukan seperti potensi panas bumi, potensi hydro, Potensi biomassa baik dari limbah pabrik kelapa sawit maupun limbah pabrik tapioka dan potensi limbah ternak, semua potensi tersebut dapat menghasilkan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan energi. Capaian indikator Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 139. Kondisi Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Sumatera Utara

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Elektrifikasi (%)	100	99,99	99,99	99,99	99,99
Persentase Desa yang teraliri Listrik (%)	98,66	98,50	99,52	98,89	99,09
Persentase Usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda (%)	72,95	75,82	80,16	64,12	96,30

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi & Sumber Daya Mineral, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2023 Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Utara sebesar 99,99% memiliki realisasi dengan angka yang sama dengan tahun 2024. Begitu juga untuk Desa berlistrik juga mengalami peningkatan, Pada tahun 2023 persentase Desa yang teraliri listrik sebesar 98,89 persen, dan terjadi peningkatan pada tahun 2024 99,09%. dan IKU Persentase Usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda (%) mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. hal tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan kegiatan terkait dengan energi dan sumber daya mineral.

e. Kelautan Dan Perikanan

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi di sub sektor perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Capaian indikator kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 140. Capaian Indikator Kelautan dan Perikanan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Perikanan Tangkap	486.955,13	439.657,63	449.571,71	482.343,25	274.442,94
Produksi Perikanan Budidaya	227.235,2	214.135,6	217.945,5	218,944	135,770
Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)	45,5	47,84	49.15	51,32	51,24
Nilai Tukar Nelayan	100	104,28	106,39	108,36	101,48
Produksi Perikanan (Ton/Tahun)	714.190,33	653.793,23	667.517,21	701.341,21	410.212,94
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTP)	95,13	103,20	105,90	97,30	101,41
Rehabilitasi Ekosistem pesisir laut, dan pulau-pulau kecil	158.599,14	-	3.762,62	3.806,14	44,336,01

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, 2025

Produksi perikanan tangkap Sumatera Utara dari tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2021 produksi perikanan tangkap mengalami penurunan yang sebesar 439.657,63 Ton menurun dibandingkan capaian produksi pada tahun 2020 yang mencapai 486,955.13

Ton, namun pada tahun 2022 produksi perikanan tangkap kembali meningkat menjadi sebesar 449.571,71 Ton dan pada tahun 2023 produksi perikanan tangkap meningkat 7 persen menjadi sebesar 482.343,25 Ton lalu mengalami penurunan kembali pada tahun 2024 menjadi 274.442,94. Produksi perikanan budidaya menunjukkan penurunan dari 227.235 ton di tahun 2020 menjadi 135,770 ton pada tahun 2024.

Angka konsumsi ikan menunjukkan peningkatan dari 45,5 kg/kapita di tahun 2020 menjadi 51,24 kg/kapita pada tahun 2024. Nilai Tukar Nelayan menunjukkan fluktuasi yang cenderung menurun dari 100 pada tahun 2020 menjadi 101,48 pada tahun 2024. Produksi perikanan menurun drastis dari 714.190 ton di tahun 2020 menjadi 410.212 ton pada tahun 2024. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan menunjukkan fluktuasi yang cenderung meningkat dari 95,13 di tahun 2020 menjadi 101,41 pada tahun 2024. Hal ini merupakan faktor alam yang tidak dapat diprediksi karena produksi ikan merupakan hasil tangkapan, namun tetap akan menjadi perhatian Provinsi Sumatera Utara kedepan dalam meningkatkan indikator-indikator tersebut.

4. Fungsi Penunjang

Fungsi penunjang berfokus pada berbagai sektor yang secara langsung tidak terkait dengan pelayanan dasar atau sektor-sektor utama pembangunan, namun tetap memiliki peran vital dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pembangunan tersebut. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan di sektor-sektor utama, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup. Upaya penguatan di bidang administrasi, kelembagaan, dan infrastruktur penunjang akan memastikan bahwa pencapaian target pembangunan dapat berlangsung secara optimal dan efisien.

a. Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh pemerintah untuk merencanakan, merancang, dan mengelola program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan suatu daerah atau negara. Perencanaan pembangunan yang baik dan efektif sangat penting untuk memastikan penggunaan sumber daya secara efisien, mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan yang efektif memerlukan sistem pengukuran kinerja yang jelas dan terstruktur agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal. Salah satu instrumen yang mendukung hal ini adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menjadi kerangka kerja dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap program pembangunan di tingkat pemerintah daerah maupun pusat. SAKIP mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya, dengan memantau pencapaian hasil dan dampak dari setiap kebijakan yang diterapkan. Melalui SAKIP, perencanaan pembangunan tidak hanya berfokus pada output, tetapi juga pada outcome yang mencerminkan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Integrasi SAKIP dalam perencanaan pembangunan akan memperkuat sistem manajemen pemerintah, memastikan bahwa setiap kebijakan dan program memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 2. 141. Capaian Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai SAKIP	-	-	-	68,85 (B)	68,93 (B)

Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, Nilai SAKIP di tingkat provinsi mengalami kenaikan yang tidak begitu signifikan, namun tetap menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Upaya terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan nilai SAKIP, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas program pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian Dan Pengembangan

Penelitian (Research) adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau inovasi dalam bidang pemerintahan daerah. Pengembangan (Development) didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengimplementasikan hasil penelitian, baik, berupa pengetahuan, teknologi, maupun inovai, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Capaian Indikator Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 142. Capaian Bidang Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah	15,78	39,41	54,36	53,76	59,93
Persentase Kajian/ Penelitian berbasis bukti yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	75	75	75	100	100

Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2025

Data di atas menunjukkan capaian bidang penelitian dan pengembangan di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020 hingga 2024. Indeks inovasi daerah mengalami peningkatan signifikan dari 15,78 pada tahun 2020 menjadi 59,93 pada tahun 2024, dengan pertumbuhan yang konsisten setiap tahunnya meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase kajian atau penelitian berbasis bukti yang dimanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah juga menunjukkan tren positif, di mana selama tiga tahun awal (2020-2022) berada di angka 75%, kemudian meningkat menjadi 100% pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan dalam pemanfaatan hasil penelitian untuk kebijakan pembangunan, yang berkontribusi pada kemajuan inovasi daerah secara keseluruhan. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang lebih serius dalam mengintegrasikan penelitian berbasis bukti ke dalam proses pengambilan keputusan pembangunan di Sumatera Utara.

b. Keuangan

Provinsi Sumatera Utara memantapkan komitmennya untuk mencapai *good goverment* dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan hasil opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera hingga 2024, kinerja laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keberhasilan capaian indikator pengelolaan keuangan Provinsi Sumatera Utara, seperti penetapan APBD, penyusunan laporan pertanggungjawaban, dan penyusunan laporan aset daerah, yang semuanya tercatat tepat waktu setiap tahunnya dari 2020 hingga 2024, menjadi salah satu faktor kunci yang mendukung opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tingginya persentase laporan yang disusun dengan baik,

termasuk evaluasi APBD dan pelaksanaan pertanggungjawaban yang sesuai standar, menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang kuat dalam pengelolaan keuangan daerah. Semua pencapaian ini mencerminkan upaya yang konsisten dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, yang berkontribusi pada perolehan opini WTP tersebut. Capaian Indikator Keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 143. Capaian Indikator Pengelolaan Keuangan Provinsi Sumatera Utara

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Persentase laporan Aset daerah yang disusun	100	100	75	100	100
Persentase SK Gubsu atas evaluasi APBD, P. APBD dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota	-	100	70	100	100

Sumber: BKAD Provinsi Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan tabel di atas seluruh IKU pada Indikator Pengelolaan Keuangan telah terealisasi sesuai dengan target dan mencapai realisasi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan Provinsi Sumatera Utara memiliki komitmen dalam menyusun pertanggungjawaban keuangan provinsi Sumatera Utara.

c. Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mencakup kegiatan mengadministrasikan pajak dan retribusi serta mendistribusikannya untuk kepentingan umum. Optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi diharapkan dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. Peningkatan kontribusi PAD, diharapkan mengoptimalkan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan daerah. Capaian Indikator Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 144. Capaian Indikator Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase PAD terhadap Pendapatan	42,82	45,62	57,63	56,64	55,67
Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari Tahun Sebelumnya	-5,48	14,95	12,60	-1,46	0,10
Persentase kenaikan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari Tahun sebelumnya	-8,67	32,10	16,15	12,65	-7,44
Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Air Permukaan dari tahun sebelumnya	9,89	-31,32	297,46	-0,278	-4,04
Persentase Kenaikan Pajak Rokok dari tahun sebelumnya	25,04	-4,77	12,85	-2,19	4,58
Persentase Kenaikan Penerimaan Retribusi Daerah dari tahun sebelumnya	-21,32	-10,22	6,73	14,78	5,45
Indeks Pelayanan Publik	-	2,77	-2,81	3,51	92,17

Sumber: BKAD Provinsi Sumatera Utara, 2025

Tabel di atas menunjukkan capaian indikator pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020 hingga 2024. Secara umum, sebagian besar indikator mengalami fluktuasi yang signifikan, dengan beberapa tahun menunjukkan fluktuasi yang tajam. Persentase PAD terhadap Pendapatan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, meskipun ada koreksi tipis pada tahun 2023 dan 2024. Di sisi lain, persentase kenaikan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama menunjukkan fluktuasi besar, dengan penurunan tajam pada 2023. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor juga mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2024 setelah lonjakan besar pada 2021. Pajak air permukaan dan pajak rokok menunjukkan perbedaan drastis dalam pertumbuhannya, dengan penurunan tajam pada 2023 diikuti oleh pemulihan kecil pada 2024. Capaian penerimaan retribusi daerah juga mengalami penurunan yang signifikan pada 2024 dimana sebelumnya meningkat pada 2023. Terakhir, Indeks Pelayanan Publik mengalami lonjakan yang sangat signifikan pada 2024, menunjukkan perbaikan yang pesat dalam pelayanan publik di provinsi ini. Secara keseluruhan, terdapat pencapaian yang bervariasi antara sektor pajak dan retribusi, dengan beberapa sektor membutuhkan perhatian lebih untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

d. Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu upaya dalam membentuk ASN yang berkualitas dengan memiliki

keterampilan, kemampuan kerja serta loyalitas kerja. Capaian Indikator kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 145. Indikator Pengembangan Sumber Daya Manusia					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) dengan Kriteria Memuaskan	-	-	-	9.041	31,55% (7.888 orang)

Sumber: BPSDM Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari data di atas dapat dilihat bahwa IKU Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) dengan Kriteria Memuaskan memiliki peningkatan dari tahun 2023 sampai dengan 2024.

Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara mengukur tingkat keberhasilan kinerja melalui Indikator Nilai Sistem Merit. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Penilaian Mandiri Sistem Merit adalah penilaian yang dilakukan secara mandiri guna mengetahui capaian penerapan Sistem Merit pada instansi pemerintah. Capaian Indikator Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 146. Capaian Indikator Kepegawaian Daerah					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Sistem Merit (Poin)	97.5	263.5	333.5	333.5	343.5

Sumber: BKD Provinsi Sumatera Utara, 2025

Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indeks ini memiliki tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 Nilai Indeks Sistem Merit mengalami kenaikan 10 poin yakni 343.5 dibandingkan tahun 2023 yakni sebesar 333.5 poin.

e. Badan Penghubung

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara (BP Sumut) adalah lembaga yang bertugas untuk menjadi perantara antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pihak-pihak terkait, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, maupun sektor swasta dan masyarakat. Fungsi

utama badan penghubung ini adalah untuk menjalin komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dalam berbagai bidang yang mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Capaian indikator Badan Penghubung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 147. Capaian Indikator Badan Penghubung

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Kepuasan Pelayanan	-	-	-	90,97	90,98

Sumber: Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari tabel di atas, capaian indikator nilai kepuasan pelayanan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023.

f. Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam arti pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Perkembangan capaian Indikator Pengawasan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 148. Capaian Indikator Pengawasan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	83,64	82	79,76	80,74
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100	100	100	100	100
Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Level kapabilitas APIP Inspektorat	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
Penanganan Pengaduan Masyarakat	74,5	55	79	83	83,47
Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikasi Keahlian Khusus Bidang Audit	20	25	64,90	54,55	72,89

Sumber: Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Pengawasan ini memiliki tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 Nilai Indikator Pengawasan secara keseluruhan telah tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa Indikator ini sangat penting dan terus menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

g. Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat Dewan berperan sebagai lembaga yang menyokong secara administratif dan teknis agar DPRD dapat menjalankan tugasnya dengan lancar, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan Sekretariat Dewan dalam menjalankan tupoksinya berkontribusi langsung terhadap kualitas kinerja Dewan dan efektivitas pemerintahan daerah secara keseluruhan. Capaian Indikator Sekretariat Dewan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 149. Capaian Indikator Sekretariat Dewan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	-	-	-	90,25	90,11
Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD	-	-	-	45	34,36
Persentase Penetapan Ranperda yang difasilitasi	-	-	-	45	45,45

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, 2025

Ketercapaian indikator Sekretariat Dewan menunjukkan penurunan kualitas untuk persentase fasilitas sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD. Indikator persentase penetapan ranperda yang difasilitasi menunjukkan perbaikan tipis dari 45 persen di tahun 2023 menjadi 45,45 persen di tahun 2024. Penurunan pada indikator aspirasi masyarakat bisa menjadi area yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk meningkatkan kinerja responsif terhadap kebutuhan publik.

h. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah (Setda) adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab

kepada Kepala Daerah. Capaian Indikator Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 150. Capaian Indikator Sekretariat Daerah

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Biro
Persentase penyelesaian batas daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	2.792	2	2,7	2,93	2,93*	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Persentase Kerjasama yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	-	-	-	75	73	Biro Kesejahteraan Rakyat
Proposal Permohonan Belanja Hibah yang Ditindaklanjuti	-	-	-	75	85	Biro Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi	-	-	-	65	43	Biro Hukum
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi	-	-	-	850	528	Biro Hukum
Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang di eksaminasi	-	-	-	1148	909	Biro Hukum
Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprovsu.	-	-	-	65	43	Biro Hukum
Jumlah Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan	-	-	-	44	38	Biro Hukum
Jumlah Penanganan Perlindungan HAM	-	-	-	25	23	Biro Hukum

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Biro
Persentase perumusan kebijakan lingkup perekonomian yang diimplementasikan	-	-	-	100	100	Biro Perekonomian
Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	-	-	-	71.46	50	Biro Perekonomian
Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	-	-	-		100	Biro Perekonomian
Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	-	100	100	100	100	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pemenuhan 17 standarisasi LPSE Kabupaten/Kota	-	-	-	4	7	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Kebijakan yang ditetapkan untuk pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	-	-	-	20	20	Biro Administrasi Pemerintahan
Persentase Realisasi Fisik dan non fisik pada perangkat daerah diganti dengan Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Melalui Aplikasi.	-	-	-	98	95.55	Biro Administrasi Pemerintahan
Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	-	-	-	100	100	Biro Organisasi
Nilai capaian pelaporan kinerja	-	-	-	11.45	11.45	Biro Organisasi
Persentase Fasilitasi Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan	-	100	100	100	100	Biro Umum
Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprov	-	100	100	100	100	Biro Umum
Persentase Fasilitasi materi pimpinan	-	100	100	100	100	Biro Administrasi Pimpinan
Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	-	100	100	100	100	Biro Administrasi Pimpinan

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Sekretariat Daerah memiliki tren yang berbeda untuk setiap biro. Biro Pemerintahan dan

Otonomi Daerah memiliki 3 indikator dengan capaian yang relatif baik, dimana persentase penyelesaian batas daerah dan persentase kerjasama yang difasilitasi seluruhnya tercapai (100%) serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus meningkat dari 2,79 di tahun 2020 menjadi 2,93 pada tahun 2024. Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki capaian yang menurun untuk indikator kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan capaian yang membaik untuk indikator proposal permohonan belanja hibah yang ditindaklanjuti.

Biro Hukum memiliki capaian yang menurun untuk 6 indikator yang menjadi tanggung jawabnya. Biro Perekonomian mencapai 100 persen untuk 2 indikator dengan 1 indikator yang menurun. Biro Pengadaan Barang dan Jasa memiliki capaian 2 indikator yang baik. Biro Administrasi Pemerintahan memiliki capaian yang menurun untuk indikator persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan melalui aplikasi. Biro Organisasi mampu mempertahankan capaian 2 indikator untuk tahun 2023 dan 2024. Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan juga mencapai 100 persen untuk seluruh indikator yang menjadi kewenangannya.

2.2. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, bagian ini menyajikan penjelasan mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara selama periode Tahun Anggaran 2020 hingga 2024. Seluruh data yang digunakan dalam uraian ini bersumber dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kecuali kondisi keuangan tahun 2024, sehingga mencerminkan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.2.1. Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dalam pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memberikan landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara optimal.

Salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan masa lalu. Evaluasi ini bertujuan untuk memahami pola pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selama periode sebelumnya. Dengan menganalisis data keuangan masa lalu, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi, tantangan, serta faktor-faktor yang memengaruhi kinerja fiskal daerah. Hal ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan keuangan yang lebih akurat dan realistis pada periode mendatang.

Pembahasan kinerja keuangan masa lalu mencakup analisis terhadap realisasi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, maupun sumber-sumber lainnya. Selain itu, aspek belanja daerah juga menjadi fokus utama dalam evaluasi ini, termasuk belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Keseimbangan antara pendapatan dan belanja menjadi indikator utama dalam menilai keberlanjutan fiskal daerah dan kapasitas fiskal untuk mendukung program prioritas pembangunan.

Analisis terhadap pembiayaan daerah, seperti surplus atau defisit anggaran serta kebijakan dalam pengelolaan pinjaman daerah, menjadi bagian penting dalam melihat kondisi keuangan daerah secara menyeluruh. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa strategi pembiayaan yang diterapkan sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan fiskal. Dengan demikian, keputusan yang diambil dalam penyusunan kebijakan keuangan tidak menimbulkan risiko yang dapat membebani anggaran daerah di masa depan.

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah serta proyeksi keuangan di tahun-tahun mendatang, yang berfungsi sebagai dasar dalam penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan memahami kemampuan fiskal tersebut, pemerintah daerah dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, memastikan kecukupan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Keseluruhan proses ini dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

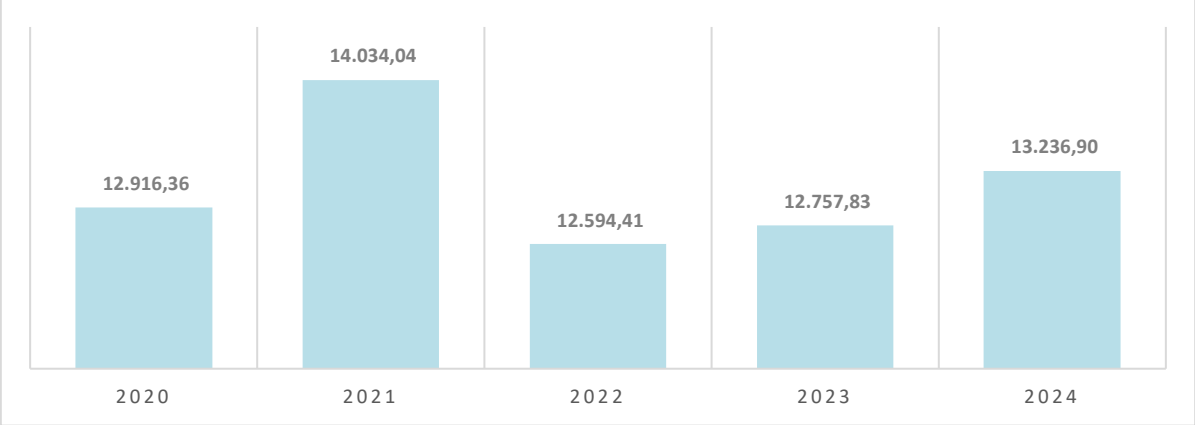
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara selama beberapa tahun terakhir mencerminkan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan. Kinerja APBD dievaluasi berdasarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, yang menjadi indikator efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Stabilitas keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, analisis terhadap tren pendapatan dan belanja menjadi penting dalam merumuskan strategi keuangan yang lebih berkelanjutan pada periode 2025-2029.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sementara itu, Belanja Daerah dibagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Adapun Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan seperti penyertaan modal daerah. Dengan memahami struktur APBD ini, dapat dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta upaya strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan optimalisasi belanja untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020-2024 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat rata-rata 0,44% dari sepanjang tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp.12,91 triliun, kemudian mengalami lonjakan signifikan menjadi Rp.14,03 triliun pada tahun 2021, meskipun saat itu masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak besar terhadap perekonomian. Namun, pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi Rp.12,59 triliun, sebelum kembali meningkat pada tahun 2023 dengan realisasi Rp.12,75 triliun. Tren positif berlanjut pada tahun 2024, di mana pendapatan daerah sebesar Rp.13,24 triliun.

Gambar 2. 35. Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara



Sumber: BKAD Provinsi Sumatera Utara, 2025

Sumber utama pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. PAD menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil, dari Rp.5,53 triliun pada 2020 menjadi Rp.7,37 triliun pada 2024. Pendapatan pajak daerah menjadi kontributor terbesar dalam PAD, dengan kontribusi di atas 90% setiap tahunnya. Namun, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih memiliki porsi yang relatif kecil terhadap total PAD.

Tabel 2. 151. Realisasi Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara

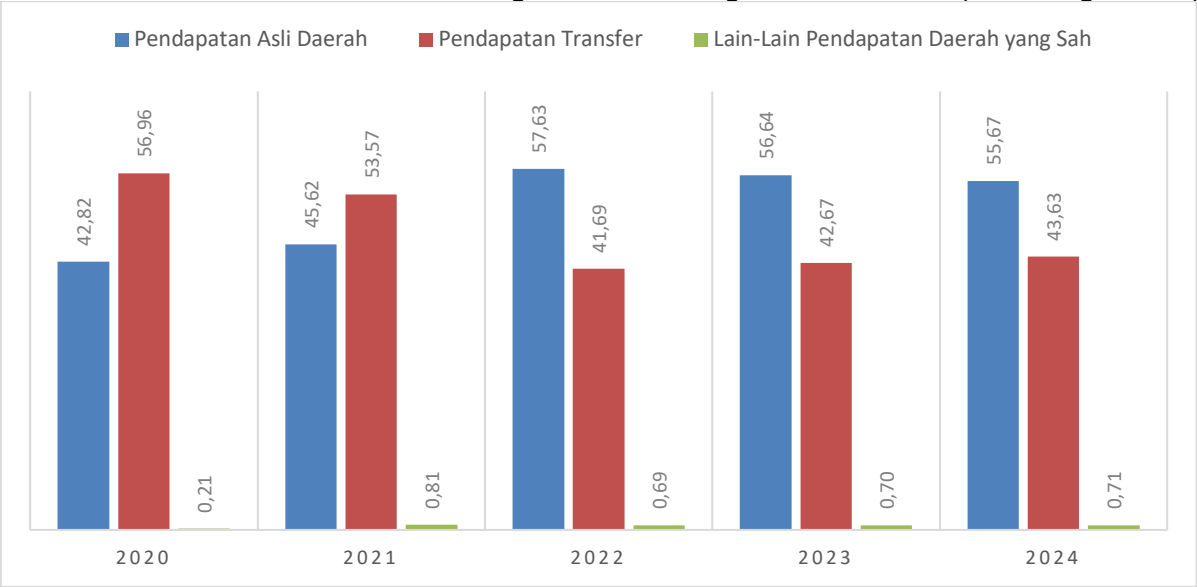
Pendapatan Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
	dalam miliar rupiah				
Pendapatan Asli Daerah	5.531,24	6.402,71	7.258,02	7.225,69	7.368,76
Pajak Daerah	5.071,60	5.730,57	6.646,50	6.667,89	6.616,60
Retribusi Daerah	30,22	27,13	28,95	33,23	35,05
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	242,31	384,08	302,4	299,8	321,06
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	187,11	260,53	280,16	224,76	396,5
Pendapatan Transfer	7.357,62	7.518,00	5.250,01	5.443,20	5.774,78
Dana Perimbangan	7.347,75	7.581,18	5.213,83	5.413,64	5.771,88
Dana Bagi Hasil	468,68	797,63	739,56	581,91	589,74
Dana Alokasi Umum	2.474,47	2.463,69	2.432,95	2.682,81	3.004,38
Dana Alokasi Khusus	4.404,60	4.256,87	2.041,31	2.148,92	2.177,76
Transfer Dana Insentif Daerah	9,87	-	36,19	29,56	2,91
Dana Insentif Daerah (DID)/insentif fiskal	9,87	-	36,19	29,56	2,91
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	27,5	113,14	86,38	88,95	93,35
Pendapatan Hibah	27,5	70,62	73,03	80,25	6,31
Lain-Lain Pendapatan	-	42,52	13,35	8,7	87,04
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	12.916,36	14.034,04	12.594,41	12.757,83	13.236,90

Sumber: BKAD Provinsi Sumatera Utara, 2025

Pendapatan Transfer juga mengalami perubahan signifikan dalam periode ini. Pada tahun 2020, pendapatan transfer mencapai Rp.7,36 triliun, meningkat menjadi Rp.7,58 triliun pada 2021, namun mengalami penurunan drastis pada 2022 menjadi Rp.5,25 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya Dana Perimbangan, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID). Meski pada 2023 dan 2024 terdapat pemulihan dengan angka realisasi masing-masing Rp.5,44 triliun dan Rp.5,77 triliun, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara umum, meskipun terjadi dinamika dalam struktur pendapatan daerah, tren pertumbuhan menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara berupaya meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD. Namun, ketergantungan terhadap pendapatan transfer masih cukup tinggi, yang menunjukkan perlunya strategi lebih agresif dalam meningkatkan kontribusi PAD agar tidak terlalu bergantung pada dana pusat. Distribusi komponen pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Pada tahun 2020, PAD menyumbang 42,82%, namun meningkat signifikan menjadi 57,63% pada tahun 2022 dan tetap dominan hingga 2024 sebesar 55,67%. Sebaliknya, kontribusi pendapatan transfer cenderung menurun, dari 56,96% pada tahun 2020 menjadi hanya 43,63% pada tahun 2024. Sementara itu, porsi lain-lain pendapatan daerah yang sah tetap sangat kecil, tidak pernah melebihi 1%. Pola ini mencerminkan semakin meningkatnya kemandirian fiskal Provinsi Sumatera Utara melalui optimalisasi PAD, sekaligus mengindikasikan berkurangnya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Gambar 2. 36. Distribusi Komponen Pendapatan Daerah (dalam persen)



Sumber: BKAD Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dari perspektif kemandirian fiskal, semakin tingginya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan perbaikan dalam kemandirian keuangan daerah. Sejak tahun 2022 hingga 2024, PAD telah melampaui 50%, yang menunjukkan bahwa Sumatera Utara telah mencapai kondisi lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Namun pada 2024, kontribusi PAD sedikit menurun menjadi 55,67%, yang mengindikasikan masih adanya tantangan dalam mempertahankan pertumbuhan PAD yang lebih besar dari Pendapatan Transfer.

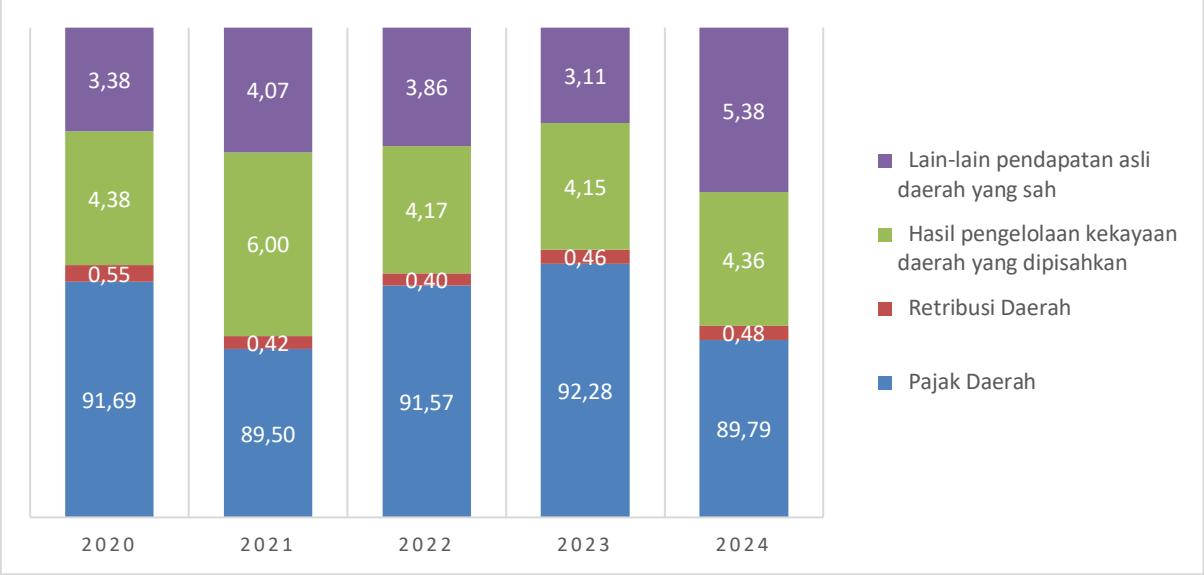
Sebaliknya, Pendapatan Transfer mengalami penurunan kontribusi yang cukup signifikan. Dari 56,96% pada tahun 2020, proporsinya terus menurun hingga 41,69% pada 2022, sebelum kembali sedikit meningkat pada 2023 dan 2024. Kondisi ini menandakan bahwa pemerintah daerah semakin mampu mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat, meskipun belum sepenuhnya lepas dari ketergantungan tersebut. Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tetap menjadi komponen yang sangat kecil dalam struktur pendapatan, dengan kontribusi tidak lebih dari 0,81% sepanjang periode 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pendapatan dari sumber lainnya, seperti hibah atau dana bagi hasil lainnya, masih sangat terbatas dan belum menjadi sumber utama dalam struktur keuangan daerah.

Secara keseluruhan, tren peningkatan PAD di atas 50% dalam beberapa tahun terakhir merupakan sinyal positif bagi kemandirian fiskal Provinsi Sumatera Utara. Namun, untuk mencapai kemandirian yang lebih kuat, pemerintah daerah perlu terus mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah, serta menggali potensi sumber pendapatan lainnya guna mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Strategi peningkatan PAD yang lebih inovatif dan berbasis potensi lokal menjadi kunci untuk memperkuat stabilitas fiskal daerah dalam jangka panjang.

Terkait dengan distribusi komponen Pendapatan Asli Daerah pada gambar di bawah, terlihat bahwa komponen Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan utama dalam struktur PAD Provinsi Sumatera Utara. Sepanjang periode 2020-2024, kontribusi Pajak Daerah selalu mendominasi dengan porsi di atas 87% dari total PAD. Pada tahun 2020, kontribusi Pajak Daerah mencapai 91,69%, dan meskipun terjadi sedikit fluktuasi, angkanya tetap

tinggi, berada di 89,79% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pendapatan dari sektor pajak masih sangat kuat.

Gambar 2. 37. Distribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (persen)



Sumber: BKAD Provinsi Sumatera Utara, 2025

Di sisi lain, Retribusi Daerah memiliki kontribusi yang sangat kecil terhadap PAD, dengan angka di bawah 5% setiap tahunnya. Pada tahun 2020, Retribusi Daerah hanya menyumbang 0,55%, kemudian mengalami sedikit kenaikan di 2025 menjadi 2,39%. Walaupun mengalami peningkatan, kontribusinya terhadap PAD masih tergolong rendah. Ini menunjukkan bahwa potensi retribusi daerah belum sepenuhnya dimaksimalkan sebagai sumber pendapatan.

Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDyP) yang terdiri atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD dan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Swasta, memiliki kontribusi yang relatif lebih besar dibandingkan retribusi, tetapi masih jauh di bawah pajak daerah. Pada tahun 2020, HPKDyP menyumbang 4,38%, dan mengalami kenaikan hingga 4,36% di tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya optimalisasi pengelolaan aset daerah sebagai sumber pendapatan, meskipun porsi kontribusinya masih terbatas.

Sedangkan Lain-lain PAD yang Sah memiliki kontribusi paling kecil dibandingkan komponen lainnya, berkisar 0,21% hingga 0,71% dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan daerah dari kategori ini masih belum menjadi andalan dan mungkin bersifat insidental. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah tetap menjadi tulang punggung PAD, sementara sumber pendapatan lain seperti retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah perlu dioptimalkan agar ketergantungan terhadap pajak tidak terlalu besar. Pemerintah daerah dapat

mendorong strategi diversifikasi sumber PAD, misalnya dengan meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi serta mengembangkan pengelolaan aset daerah secara lebih produktif.

Meskipun Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,44% per tahun selama periode 2020-2024, penting untuk melihat apakah angka pertumbuhan ini cukup untuk mendanai target pembangunan yang direncanakan pada tahun-tahun mendatang. Sumber utama pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak daerah yang telah terbukti memberikan kontribusi dominan. Pada tahun 2024, PAD tercatat sebesar Rp7,37 triliun, meningkat dari Rp5,53 triliun pada 2020, dengan pajak daerah tetap menjadi kontributor utama dengan proporsi lebih dari 89%. Namun, meskipun ada tren peningkatan yang stabil pada PAD, ketergantungan terhadap Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat tetap signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya meningkatkan kemandirian fiskal, masih ada ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pendapatan transfer. Jika melihat tren ini, ada potensi tantangan dalam memenuhi target pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada.

Dengan pertumbuhan PAD yang relatif lambat dan kontribusi pajak yang dominan, Provinsi Sumatera Utara perlu lebih agresif dalam menggali potensi pendapatan dari sektor lain yang belum sepenuhnya dimaksimalkan. Salah satu potensi yang perlu dieksplorasi adalah peningkatan retribusi daerah yang hingga saat ini kontribusinya terhadap PAD masih sangat kecil, yaitu hanya sekitar 2% pada tahun 2024. Strategi pengoptimalan retribusi daerah, serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dapat menjadi sumber alternatif yang dapat memberikan kontribusi lebih besar. Selain itu, ada potensi pendapatan lain yang masih belum tergali sepenuhnya, seperti peningkatan investasi daerah, pengelolaan aset daerah, dan potensi dari sektor non-pajak yang dapat mendukung pendapatan daerah secara berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu lebih kreatif dalam merancang kebijakan yang dapat menarik lebih banyak pendapatan dari sektor-sektor ini, dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal yang ada.

Secara keseluruhan, meskipun pertumbuhan pendapatan daerah menunjukkan arah yang positif, akan lebih bijaksana jika pemerintah daerah mempertimbangkan strategi diversifikasi pendapatan yang lebih luas dan berkelanjutan. Ini tidak hanya untuk memenuhi target pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kestabilan fiskal yang lebih kuat di masa depan.

Kinerja Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan instrumen utama dalam kebijakan fiskal pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan sosial di wilayahnya. Sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belanja daerah mencerminkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Efektivitas belanja daerah tidak hanya dilihat dari besarnya alokasi anggaran, tetapi juga dari seberapa baik anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

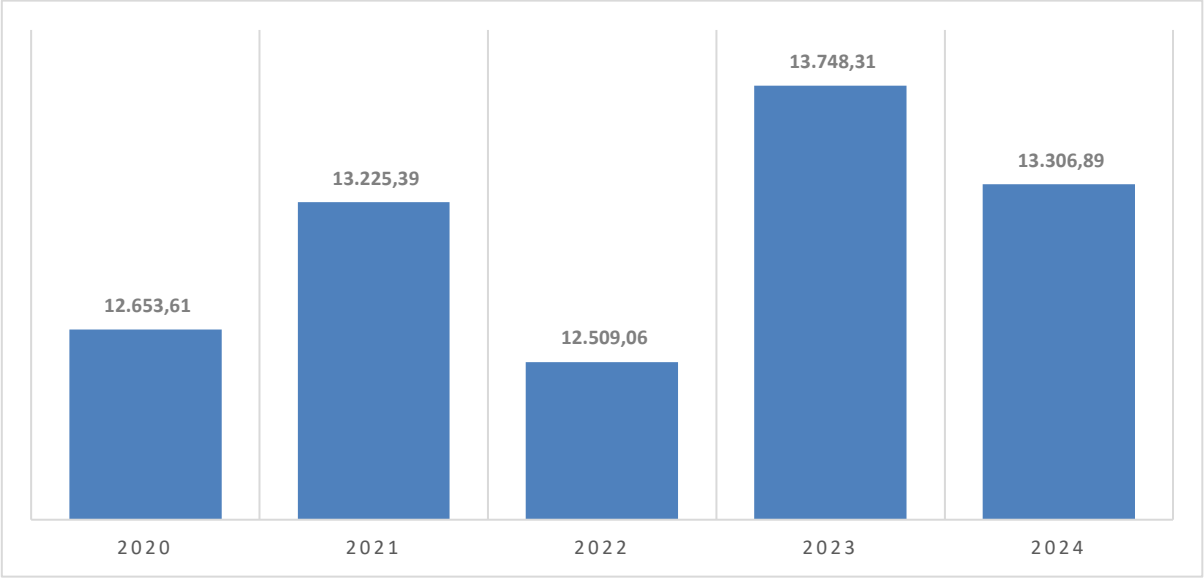
Tabel 2. 152. Kinerja Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara (dalam miliar Rupiah)

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Operasi	8.287,01	9.509,00	7.582,91	8.029,17	8.797,71
Belanja Pegawai	3.337,82	3.372,53	3.392,78	3.291,79	3.649,80
Belanja Barang dan Jasa	1.882,42	2.828,79	2.964,82	2.919,82	2.845,69
Belanja Hibah	3.066,76	3.285,23	1.185,34	1.801,73	2.288,93
Belanja Bantuan Sosial	-	22,45	39,96	15,82	13,29
Belanja Modal	1.497,94	1.141,20	1.775,92	2.629,55	2.010,84
Belanja Tidak Terduga	1.150,69	0,81	0,38	57,50	38,04
Belanja Transfer	1.717,96	2.574,38	3.149,85	3.032,09	2.460,29
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemda	1.717,96	2.574,38	2.697,08	2.704,48	2.276,98
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	452,77	327,61	183,31
BELANJA DAERAH	12.653,61	13.225,39	12.509,06	13.748,31	13.306,89

Sumber: BKAD Provinsi Sumatera Utara, 2025

Sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas tiga komponen utama, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer. Belanja operasi mencakup pengeluaran rutin yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial. Belanja modal berfokus pada pembangunan infrastruktur dan investasi aset daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, belanja transfer merupakan alokasi anggaran yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota maupun desa dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan bantuan keuangan.

Gambar 2. 38. Kinerja Belanja Daerah (dalam miliar rupiah)



Sumber : BKAD Provinsi Sumatera Utara, 2025

Secara umum, sebagaimana tergambar pada gambar di bawah, belanja daerah Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dalam periode 2020-2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,94%. Pada tahun 2020, total belanja daerah tercatat sebesar Rp12,65 triliun, kemudian mengalami kenaikan menjadi Rp13,23 triliun pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan belanja yang cukup tajam menjadi Rp12,50 triliun, yang disebabkan oleh strategi penyesuaian anggaran dalam menghadapi dinamika perekonomian, termasuk dampak dari pandemi Covid-19 serta perubahan kebijakan fiskal daerah.

Memasuki tahun 2023, belanja daerah melonjak drastis hingga mencapai Rp13,74 triliun, menjadi angka tertinggi dalam periode ini. Lonjakan ini mencerminkan adanya peningkatan alokasi anggaran untuk program- program strategis, baik dalam bentuk belanja operasional maupun belanja modal. Namun, peningkatan belanja ini tidak berlangsung lama, karena pada tahun 2024 anggaran kembali mengalami penurunan menjadi Rp13,30 triliun, yang mengindikasikan adanya penyesuaian terhadap kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan pengendalian defisit fiskal. Hal ini dapat mengindikasikan strategi pengelolaan fiskal yang lebih berhati-hati dengan mempertimbangkan potensi risiko ekonomi dan optimalisasi efektivitas belanja daerah. Meskipun terjadi penurunan pada 2024, anggaran belanja tetap berada pada kisaran yang relatif tinggi dibandingkan dengan awal periode.

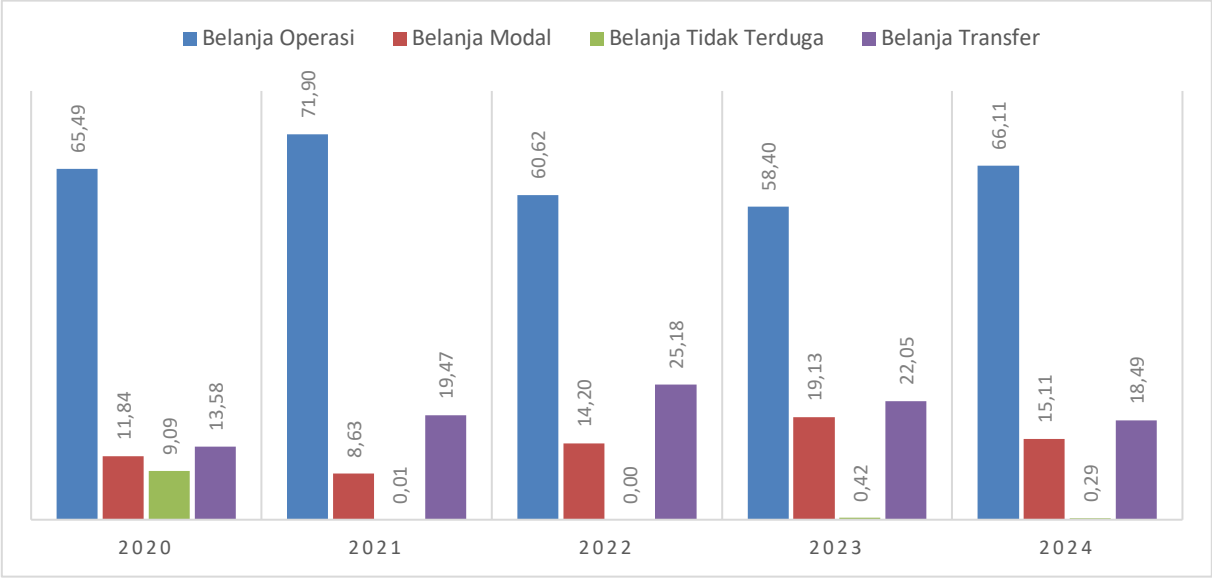
Dari tren tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro, kebijakan fiskal, serta prioritas pembangunan daerah.

Kenaikan belanja pada tahun 2023 menunjukkan adanya dorongan untuk percepatan pembangunan, sementara penyesuaian pada tahun berikutnya mencerminkan upaya menjaga keseimbangan fiskal agar tetap berkelanjutan. Oleh karena itu, efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi faktor kunci yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan.

Dari sisi distribusi pada komponen Belanja Daerah dalam kurun waktu 2020-2024 sebagaimana tersaji pada gambar di bawah, bahwa struktur belanja daerah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan dinamika yang menarik, khususnya dalam komposisi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Secara umum, Belanja Operasi mendominasi struktur pengeluaran daerah, yang mencerminkan alokasi utama untuk kebutuhan rutin pemerintahan seperti belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial. Pada tahun 2021, Belanja Operasi mencapai puncaknya sebesar 71,90%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh kebutuhan pemulihan pasca-pandemi COVID-19. Namun, setelah itu, persentasenya terus mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, hingga proyeksi tahun 2025 yang hanya mencapai 53,05%, menunjukkan adanya pergeseran strategi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, Belanja Modal, yang mencerminkan investasi pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan aset lainnya, mengalami peningkatan dari 8,63% di tahun 2021 menjadi 19,13% di tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan adanya prioritas dalam pembangunan fisik daerah, sejalan dengan kebutuhan peningkatan fasilitas publik dan proyek strategis. Namun, pada tahun 2024, proporsi Belanja Modal kembali menurun, yang bisa jadi merupakan upaya penyesuaian terhadap ketersediaan anggaran serta optimalisasi penggunaan belanja modal yang lebih selektif.

Gambar 2. 39. Distribusi Komponen Belanja Daerah (dalam persen)



Sumber: BKAD Provinsi Sumatera Utara, 2025

Komponen Belanja Tidak Terduga, yang umumnya digunakan untuk keadaan darurat seperti bencana atau krisis tak terduga, mengalami tren yang sangat fluktuatif. Tahun 2020 mencatat alokasi cukup besar sebesar 9,09%, yang kemungkinan besar berkaitan dengan respons terhadap pandemi COVID-19. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, alokasi ini menurun drastis, bahkan 0% di tahun 2022, sebelum kembali mengalami sedikit kenaikan di tahun 2023.

Belanja Transfer, yang mencerminkan transfer dana dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota atau desa, juga mengalami perubahan dinamis. Pada tahun 2022, alokasi untuk belanja ini meningkat menjadi 25,18%, menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mendukung kebutuhan keuangan daerah di tingkat bawah. Namun, pada 2024, proporsi Belanja Transfer menurun menjadi 18,49%, yang kemungkinan besar mencerminkan adanya peningkatan alokasi dana ke pemerintah kabupaten/kota dan desa dalam mendukung program pembangunan yang lebih merata.

Secara keseluruhan, belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tidak hanya mencerminkan alokasi anggaran yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mendukung pembangunan infrastruktur yang vital bagi perkembangan sektor riil. Dalam jangka panjang, kebijakan fiskal yang mendukung alokasi anggaran untuk infrastruktur akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran yang efektif, terarah, dan seimbang sangat diperlukan untuk menciptakan dampak yang optimal dalam pembangunan infrastruktur dan sektor riil.

Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan salah satu komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi sebagai sumber dana untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah terdiri dari dua aspek utama, yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan aset daerah, serta penerimaan pinjaman daerah. Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan meliputi penyertaan modal daerah, pembayaran cicilan pokok utang, dan pembentukan dana cadangan.

Secara umum, kinerja pembiayaan daerah mencerminkan bagaimana pemerintah daerah mengelola keseimbangan antara pendapatan dan belanja dalam APBD. Ketika realisasi pendapatan tidak cukup untuk membiayai belanja daerah, pembiayaan berperan dalam menutup defisit guna memastikan program pembangunan tetap berjalan. Sebaliknya, jika terjadi surplus anggaran, pembiayaan dapat digunakan untuk alokasi strategis seperti investasi atau pengurangan kewajiban keuangan. Oleh karena itu, analisis terhadap pembiayaan daerah penting untuk memahami seberapa efektif pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan dan menjaga stabilitas fiskal daerah.

Pembiayaan daerah dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang signifikan sebagaimana tersaji pada tabel dibawah, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Salah satu komponen utama dalam penerimaan pembiayaan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), yang mengalami lonjakan tajam dari Rp336,60 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1.097,49 miliar pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan adanya efisiensi dalam pengelolaan anggaran atau kemungkinan realisasi belanja yang lebih rendah dari perkiraan. Namun, setelah mencapai puncaknya pada 2022, SiLPA mengalami penurunan drastis menjadi Rp80,98 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini dapat mengindikasikan perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran dan peningkatan efektivitas dalam realisasi belanja daerah.

Tabel 2. 153. Kinerja Pembiayaan Daerah Sumatera Utara (miliar rupiah)					
Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan Pembiayaan :					
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	336,60	499,35	1.097,49	1.076,16	80,98
Pengeluaran pembiayaan :					
Penyertaan modal (Investasi) daerah	100,00	210,50	106,68	4,70	-

Sumber: BKAD Provinsi Sumatera Utara, 2025

Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan yang tercermin dalam penyertaan modal daerah juga mengalami fluktuasi tajam. Pada tahun 2020, investasi daerah tercatat sebesar Rp100,00 miliar dan meningkat signifikan menjadi Rp210,50 miliar pada 2021. Namun, pada tahun 2022, anggaran untuk penyertaan modal kembali turun menjadi Rp106,68 miliar, sebelum mengalami penurunan drastis pada tahun 2023 menjadi hanya Rp4,70 miliar. Tahun 2024 bahkan tidak mencatat adanya alokasi untuk penyertaan modal, yang dapat mengindikasikan adanya kebijakan prioritas baru dalam belanja daerah atau pergeseran strategi investasi pemerintah daerah. Lonjakan SILPA pada 2022 dan penurunannya setelah itu mencerminkan perubahan dalam pengelolaan belanja dan peningkatan efektivitas serapan anggaran. Sementara itu, pola fluktuasi pada penyertaan modal daerah menunjukkan perubahan dinamika investasi pemerintah, yang menyesuaikan dengan kebutuhan prioritas pembangunan serta kondisi fiskal yang tersedia. Perubahan-perubahan ini penting untuk dicermati lebih lanjut guna memastikan bahwa pembiayaan daerah tetap seimbang dan mampu mendukung agenda pembangunan yang telah direncanakan.

Kinerja Neraca Daerah

Neraca keuangan daerah merupakan bagian penting dari laporan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan kondisi keuangan pada periode tertentu. Laporan ini memuat informasi terkait aset, kewajiban, dan ekuitas, yang mencerminkan sumber daya ekonomi yang dikuasai daerah serta kewajiban yang harus ditunaikan. Melalui neraca, dapat diketahui kemampuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya, serta sejauh mana aset yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik. Penyajian neraca ini menjadi landasan utama untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh,

sekaligus menjadi acuan dalam pengambilan keputusan strategis terkait pembangunan daerah.

Perkembangan neraca keuangan Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren yang konsisten meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Total aset tercatat sebesar Rp17,69 triliun pada tahun 2020 dan meningkat menjadi Rp25,06 triliun pada tahun 2024. Pertumbuhan aset ini sebagian besar didorong oleh peningkatan aset tetap yang signifikan, dari Rp11,02 triliun pada 2020 menjadi Rp17,89 triliun pada 2024. Selain itu, aset lainnya juga mengalami pertumbuhan stabil, menunjukkan adanya penguatan kepemilikan dan pengelolaan aset pemerintah daerah yang berkelanjutan.

Namun, aset lancar yang mencerminkan kemampuan likuiditas jangka pendek menunjukkan fluktuasi tajam. Pada 2021, aset lancar tercatat Rp1,74 triliun, tetapi menurun drastis menjadi Rp252,91 miliar pada 2024. Penurunan ini berpotensi menimbulkan tekanan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, meskipun secara keseluruhan nilai aset masih menunjukkan pertumbuhan positif. Investasi jangka panjang terus meningkat, dari Rp3,68 triliun pada 2020 menjadi Rp4,52 triliun pada 2024, yang menandakan bahwa sebagian besar dana dialokasikan ke investasi yang lebih berjangka panjang.

Dari sisi kewajiban, terjadi pergeseran yang cukup signifikan. Kewajiban jangka pendek meningkat dari Rp1,03 triliun pada 2020 menjadi Rp3,25 triliun pada 2024, yang mengindikasikan meningkatnya beban pembayaran dalam waktu dekat. Sementara itu, jumlah total kewajiban jangka panjang menunjukkan pola penurunan dari Rp.536,06 milyar pada tahun 2020 menjadi Rp440,51 miliar pada tahun 2024. Ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat penurunan beban kewajiban jangka panjang, secara jangka pendek dan keseluruhan total utang yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah cenderung meningkat, sehingga meningkatkan risiko likuiditas dan risiko keuangan jangka pendek namun dapat meningkatkan fleksibilitas dalam mengelola kebutuhan pendanaan operasional yang lebih pendek.

Ekuitas Provinsi Sumatera Utara mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari Rp16,13 triliun pada 2020 menjadi Rp21,37 triliun pada 2024. Ini menandakan bahwa akumulasi kekayaan bersih pemerintah daerah terus meningkat, memperkuat kapasitas fiskal dan daya tahan keuangan daerah. Dengan rasio ekuitas yang dominan dibandingkan kewajiban, Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur keuangan yang sehat dan mampu

menopang kebutuhan pembangunan jangka panjang dengan ketergantungan minimal terhadap utang.

Meskipun secara umum struktur keuangan Provinsi Sumatera Utara menunjukkan kinerja yang kuat, tantangan utama ke depan adalah memperbaiki likuiditas jangka pendek yang tercermin dari penurunan tajam aset lancar pada tahun 2023 dan 2024. Ketergantungan yang tinggi terhadap aset investasi jangka panjang harus diimbangi dengan upaya meningkatkan kas atau aset yang cepat dicairkan agar kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek tetap terjaga. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengadopsi strategi manajemen kas yang lebih agresif, memperkuat basis penerimaan yang langsung likuid, serta melakukan pengelolaan aset lebih adaptif agar pertumbuhan aset dan investasi tetap sejalan dengan kebutuhan operasional jangka pendek. Dengan keseimbangan tersebut, ketahanan fiskal Provinsi Sumatera Utara akan semakin kokoh dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di masa depan.

Adapun neraca keuangan Provinsi Sumatera Utara secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 154. Neraca Keuangan Provinsi Sumatera Utara

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Aset					
A. Aset Lancar	1.032.600.741.925	1.745.353.381.582	1.383.892.501.113	322.466.761.936	252.913.508.308
B. Investasi Jangka Panjang	3.688.650.513.149	3.897.021.689.389	4.282.925.763.981	4.465.839.894.981	4.523.222.814.248
C. Aset Tetap	11.021.348.370.948	11.132.161.183.118	14.612.825.410.412	17.133.873.326.936	17.894.420.678.704
D. Aset Lainnya	1.951.891.355.558	2.050.479.831.313	2.439.893.785.364	2.469.944.286.413	2.388.245.205.526
Jumlah Aset	17.694.490.981.579	18.825.016.085.401,00	22.719.537.460.870	24.392.124.270.266	25.058.802.206.785
Kewajiban					
A. Kewajiban Jangka Pendek	1.027.928.417.916	991.722.430.683	1.638.913.817.653	2.340.604.601.026	3.251.610.505.984
B. Kewajiban Jangka Panjang	536.058.148.881	536.058.148.881	536.058.148.881	478.556.739.210	440.511.914.608
Jumlah Kewajiban	1.563.986.566.797	1.527.780.579.564	2.174.971.966.534	2.819.161.340.236	3.692.122.420.592
Ekuitas					
Ekuitas	16.130.504.414.782	17.297.235.505.837	20.544.565.494.336	21.572.962.930.030	21.366.679.786.193
Jumlah Ekuitas	16.130.504.414.782	17.297.235.505.837	20.544.565.494.336	21.572.962.930.030	21.366.679.786.193
Kewajiban Dan Ekuitas	17.694.490.981.579	18.825.016.085.401	22.719.537.460.870	24.392.124.270.266	25.058.802.206.785

Sumber: BKAD Provinsi Sumatera Utara, 2025

Kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat dianalisis dengan menggunakan berbagai rasio keuangan. Rasio-rasio yang dikaji mencakup Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas. Rasio Likuiditas berfungsi untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, yang diukur melalui current ratio (rasio lancar) dan quick ratio (rasio cepat). Sementara itu, Rasio Solvabilitas digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah dalam melunasi kewajiban jangka panjang serta memberikan gambaran tingkat keamanan bagi para kreditur. Analisis rasio ini dilakukan dengan membandingkan total utang terhadap total aset serta utang terhadap ekuitas. Hasil perhitungan masing-masing rasio tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 155. Hasil Perhitungan Rasio Keuangan Neraca Daerah Provinsi Sumatera Utara

Rasio	2020	2021	2022	2023	2024
Quick ratio	0,7468	1,5134	0,6919	0,0489	0,0265
Current ratio	1,0045	1,7599	0,8444	0,1378	0,0778
Rasio total hutang terhadap total aset	0,0884	0,0812	0,0957	0,1156	0,1473
Rasio hutang terhadap modal	0,0970	0,0883	0,1059	0,1307	0,1728

Sumber: BKAD Provinsi Sumatera Utara Utara, 2025 (diolah)

Berikut penjelasan dari hasil tabel di atas:

1. Quick Ratio

Quick ratio menunjukkan kemampuan Provinsi Sumatera Utara dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset yang sangat likuid (tanpa memperhitungkan persediaan). Berdasarkan tabel, nilai quick ratio menunjukkan fluktuasi, dengan penurunan signifikan pada 2024 menjadi 0,0265 dari 1,5134 pada 2021. Ini menunjukkan penurunan tajam dalam likuiditas yang dapat mengindikasikan kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

2. Current Ratio

Current ratio mengukur kemampuan provinsi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Rasio ini tetap cukup tinggi, meskipun sedikit menurun dari 1,7599 di 2021 menjadi 0,0778 di 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya penurunan aset lancar relatif terhadap kewajiban jangka pendek, yang dapat menjadi indikator masalah likuiditas.

3. Debt to Asset Ratio

Rasio ini mengukur seberapa besar proporsi total hutang dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Nilai rasio ini sedikit bervariasi dari 0,0884 di 2020 menjadi 0,1473 di 2024, dengan sedikit kenaikan sepanjang periode. Hal

ini menunjukkan bahwa proporsi hutang terhadap total aset meningkat, yang mungkin menunjukkan ketergantungan yang lebih besar pada pembiayaan utang.

4. Debt to Equity Ratio

Rasio ini mengukur sejauh mana modal (ekuitas) digunakan untuk membiayai hutang. Rasio ini sedikit menurun dari 0,0970 pada 2020 menjadi 0,1728 pada 2024. Peningkatan rasio ini mengindikasikan peningkatan ketergantungan pada pembiayaan eksternal melalui utang yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan di masa mendatang.

Analisis rasio keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan fiskal. Rasio likuiditas seperti *current ratio* dan *quick ratio* sempat menunjukkan perbaikan signifikan pada 2021, yang mengindikasikan kondisi likuiditas sangat baik. Namun, penurunan tajam pada 2023 dan 2024 mengindikasikan melemahnya kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek secara cepat. Situasi ini menuntut perbaikan dalam struktur aset lancar dan strategi manajemen kas yang lebih disiplin dan adaptif.

Dari sisi struktur pembiayaan, terlihat peningkatan ketergantungan terhadap utang. Debt to asset ratio meningkat dari 8,84% pada 2020 menjadi 15% pada 2024, menunjukkan bahwa proporsi pembiayaan aset melalui utang makin besar. Begitu pula dengan *debt to equity ratio* yang naik dari 9,70% menjadi 17,6% pada periode yang sama, mencerminkan bahwa pembiayaan melalui utang tumbuh lebih cepat dibandingkan peningkatan ekuitas atau pendanaan mandiri daerah. Tren ini mengindikasikan tekanan fiskal yang meningkat dan menunjukkan perlunya penguatan sumber-sumber pembiayaan internal serta pengelolaan utang yang lebih berkelanjutan agar tidak membebani stabilitas fiskal jangka panjang.

Posisi keuangan yang stabil, tercermin dari peningkatan ekuitas dan pengelolaan aset yang hati-hati, memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan fiskal yang lebih fleksibel, seperti peningkatan belanja pembangunan atau alokasi investasi untuk sektor-sektor strategis yang dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Namun, kebijakan fiskal yang agresif tetap harus disertai dengan manajemen risiko yang matang, terutama terkait dengan fluktuasi aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Pemerintah daerah harus memperhatikan penurunan tajam pada likuiditas, yang berpotensi memperburuk kemampuan

untuk memenuhi kewajiban jangka pendek jika tidak dikelola dengan hati-hati. Oleh karena itu, penguatan sektor penerimaan dan investasi yang cepat dicairkan, serta penyusunan strategi kas yang lebih adaptif, menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan fiskal dan mendukung kebijakan fiskal yang responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.

Ke depan, pemerintah daerah dapat memanfaatkan posisi ekuitas yang solid untuk mendorong kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada penguatan kapasitas infrastruktur daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta keberlanjutan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, kebijakan fiskal yang lebih progresif dan proaktif dapat diterapkan tanpa mengorbankan stabilitas fiskal jangka panjang.

2.2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah merupakan instrumen strategis dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah daerah mencerminkan bagaimana sumber daya keuangan dikelola, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Evaluasi terhadap kebijakan keuangan masa lalu menjadi penting untuk memahami efektivitas pengelolaan anggaran, tren prioritas belanja, serta tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target pembangunan daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan keuangan daerah menghadapi berbagai dinamika, baik yang disebabkan oleh perubahan kebijakan nasional, kondisi perekonomian global, maupun faktor internal daerah. Pola penggunaan anggaran, khususnya dalam hal proporsi belanja dan sumber pembiayaan, mencerminkan bagaimana pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan fiskalnya terhadap kebutuhan pembangunan yang terus berkembang. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu menjadi dasar dalam merumuskan strategi keuangan yang lebih efektif dan berkelanjutan ke depan.

Dalam periode lima tahun terakhir, kebijakan pengelolaan keuangan daerah menunjukkan berbagai penyesuaian dalam struktur anggaran. Salah satu aspek utama yang dapat dianalisis adalah proporsi penggunaan anggaran, baik dalam belanja operasional, belanja modal, maupun belanja lainnya. Selain itu, analisis terhadap pembiayaan daerah, seperti penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan alokasi penyertaan modal daerah, memberikan gambaran mengenai bagaimana pemerintah daerah

mengelola sumber daya keuangannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

2.2.3. Proporsi Penggunaan Anggaran

Pengelolaan anggaran daerah mencerminkan prioritas kebijakan pemerintah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik. Proporsi penggunaan anggaran menjadi indikator utama dalam menilai bagaimana belanja daerah dialokasikan untuk mendukung berbagai sektor strategis. Secara umum, struktur anggaran daerah terbagi ke dalam belanja operasional, belanja modal, dan belanja lainnya, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pemerintahan dan pembangunan daerah. Komposisi belanja ini juga menunjukkan keseimbangan antara kebutuhan rutin pemerintahan dan investasi jangka panjang yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, proporsi belanja daerah mengalami perubahan yang mencerminkan dinamika kebijakan fiskal serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pergeseran dalam alokasi anggaran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan regulasi, kondisi ekonomi makro, serta kebutuhan mendesak yang muncul akibat krisis atau bencana. Oleh karena itu, analisis terhadap proporsi penggunaan anggaran menjadi penting untuk memahami pola pengelolaan fiskal daerah serta mengidentifikasi peluang perbaikan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan anggaran di masa mendatang.

Analisis terhadap proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran daerah menunjukkan adanya dinamika dalam alokasi anggaran dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2025, belanja untuk aparatur mengalami peningkatan nominal yang cenderung stabil, tetapi dengan persentase terhadap total pengeluaran yang fluktuatif sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 156. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sumatera Utara

Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp.)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp.)	%
2020	3.337.823.171.792,00	12.753.607.434.218,10	26,17
2021	3.372.531.926.884,00	13.435.893.166.670,30	25,10
2022	3.392.784.207.610,00	12.615.745.596.580,20	26,89
2023	3.291.794.526.059,50	13.753.011.016.645,00	23,94
2024	3.649.797.790.530,00	13.307.160.798.301,10	27,43

Sumber: BKAD Provinsi Sumatera Utara Utara, 2025 (diolah)

Pada tahun 2020, belanja aparatur mencapai Rp.3,34 triliun atau sekitar 26,17% dari total pengeluaran daerah. Pada tahun 2021, meskipun nilai nominal belanja aparatur naik sedikit menjadi Rp.3,37 triliun, persentasenya sedikit mengalami penurunan menjadi 25,10% akibat peningkatan total pengeluaran daerah. Tren ini berubah pada 2022, di mana meskipun total pengeluaran daerah turun dibandingkan tahun sebelumnya, belanja aparatur tetap meningkat menjadi Rp3,39 triliun, menyebabkan persentasenya naik menjadi 26,89%.

Pada tahun 2023, terjadi penurunan belanja aparatur menjadi Rp3,29 triliun, yang juga berdampak pada penurunan proporsinya terhadap total pengeluaran menjadi 23,94% angka terendah dalam periode yang dianalisis. Namun, pada tahun 2024, belanja aparatur melonjak signifikan menjadi Rp3,65 triliun, menjadikannya 27,43% dari total pengeluaran, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Tahun 2025 menunjukkan sedikit penurunan nominal belanja aparatur menjadi Rp3,59 triliun, tetapi tetap mempertahankan proporsi yang tinggi, yakni 27,18% dari total pengeluaran daerah. Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat upaya pengendalian belanja aparatur dalam beberapa tahun tertentu, tren jangka panjang menunjukkan adanya peningkatan yang cukup konsisten. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kenaikan gaji pegawai serta peningkatan belanja rutin untuk operasional pemerintahan.

Namun, peningkatan proporsi belanja aparatur di tahun 2024 patut dicermati, dimana pada tahun ini terdapat penambahan beban akibat penambahan jumlah aparatur, terutama dalam kaitannya dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Jika peningkatan ini tidak diimbangi dengan optimalisasi belanja modal dan belanja publik lainnya, maka dapat mengurangi ruang fiskal untuk program-program pembangunan yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, strategi ke depan perlu difokuskan pada efisiensi belanja aparatur, optimalisasi digitalisasi birokrasi, serta pergeseran alokasi anggaran ke sektor-sektor produktif guna meningkatkan keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja pembangunan.

2.2.4. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan defisit riil anggaran merupakan aspek krusial dalam pengelolaan keuangan daerah, karena mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menutup selisih antara pendapatan dan belanja secara berkelanjutan. Defisit anggaran yang terjadi dapat disebabkan oleh

berbagai faktor, termasuk ketidakseimbangan antara penerimaan daerah dan pengeluaran, perubahan kebijakan fiskal, serta dinamika perekonomian baik di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap pembiayaan defisit riil anggaran menjadi penting untuk memahami bagaimana strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal, termasuk pemanfaatan sumber pembiayaan seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), pinjaman daerah, atau bentuk pembiayaan lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan fiskal di tengah kebutuhan belanja yang terus meningkat. Upaya untuk menutup defisit anggaran dilakukan melalui berbagai mekanisme pembiayaan, yang harus dikelola secara hati-hati agar tidak membebani kapasitas fiskal di masa mendatang. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pola defisit dan strategi pembiayaannya menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan keuangan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Analisis terhadap defisit riil anggaran daerah dalam periode 2020–2024 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup signifikan dalam keseimbangan fiskal. Pada tahun 2020, pemerintah daerah mencatat surplus riil sebesar Rp162,75 miliar, yang kemudian meningkat drastis menjadi Rp598,14 miliar pada tahun 2021. Namun defisit riil terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp21, 33 miliar yang meningkat menjadi defisit Rp995,18 miliar dan seterusnya turun menjadi defisit Rp69,99 miliar ini mengindikasikan bahwa belanja daerah meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan, sehingga memerlukan strategi pembiayaan tambahan untuk menutup kesenjangan tersebut.

Tabel 2. 157. Defisit Riil Anggaran Sumatera Utara (miliar rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi Pendapatan Daerah dikurangi realisasi	12.916,36	13.991,52	12.581,06	12.757,83	13.237,34
Belanja Daerah	12.653,61	13.225,39	12.509,06	13.748,31	13.307,16
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	100,00	210,5	106,68	4,70	-
Total Pengeluaran	12.753,61	13.435,89	12.615,75	13.753,01	13.307,16
Surplus/Defisit Riil	162,75	598,14	-21,33	-995,18	-69,99

Sumber: BKAD Provinsi Sumatera Utara Utara, 2025 (diolah)

Disisi lain, analisis terhadap komposisi penutup defisit riil anggaran menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat bergantung pada Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber utama untuk menutupi defisit. Hal ini tercermin dari data tahun 2020 hingga 2024, di mana tidak ada pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah, penerimaan pinjaman daerah, atau penerimaan piutang daerah yang digunakan sebagai sumber pembiayaan defisit.

Tabel 2. 158. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran (dalam miliar rupiah dan persen)

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	336,60		499,35		1.097,49		1.076,16		80,98	
Surplus/Defisit Riil	162,75		598,14		-21,33	1,94	-995,18	92,48	-69,99	86,43
Pencairan Dana Cadangan	-		-		-		-		-	
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	-		-		-		-		-	
Penerimaan Pinjaman Daerah	-		-		-		-		-	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-		-		-		-		-	
Penerimaan Piutang Daerah	-		-		-		-		-	
SiLPA Tahun Berkenaan	499,35		1.097,49		1.076,16		80,98		10,99	

Sumber: BKAD Provinsi Sumatera Utara Utara, 2025 (diolah)

Pada tahun 2020-2021 APBD Provinsi Sumatera Utara mengalami surplus yang mengakibatkan akumulasi SiLPA pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp1.097,49 miliar. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi defisit riil anggaran sebesar Rp 21,33 miliar atau sebesar 1,94 persen dari SiLPA tahun sebelumnya, demikian juga di tahun 2023 mengalami defisit riil sebesar Rp995,18 miliar atau sebesar 92,48 persen dari SiLPA tahun sebelumnya dan kemudian tahun 2024 defisit riil tercatat sebesar Rp69,99miliar atau sebesar 86,43 persen dari SiLPA tahun sebelumnya. Akumulasi surplus/defisit ditambah penerimaan pembiayaan sampai tahun 2024 yang menunjukkan angka positif menggambarkan kemampuan keuangan Provinsi Sumatera Utara yang masih cukup kuat untuk mebiayai belanja daerah.

Namun berdasarkan kondisi ini, terdapat beberapa fenomena yang dapat disimpulkan, diantaranya ketergantungan terhadap SiLPA sebagai sumber utama penutup defisit mencerminkan kurangnya diversifikasi dalam strategi pembiayaan daerah, selain itu fluktuasi tajam dalam penggunaan SiLPA dengan persentase negatif di beberapa tahun menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pengelolaan anggaran, di mana surplus yang diakumulasi tidak selalu sejalan dengan defisit yang terjadi. Untuk meningkatkan keberlanjutan fiskal, perlu menerapkan strategi pengelolaan anggaran yang lebih seimbang dengan mengoptimalkan pendapatan daerah serta mengurangi ketergantungan pada saldo anggaran tahun sebelumnya. Selain itu, eksplorasi terhadap opsi pembiayaan lain seperti pemanfaatan aset daerah, penerimaan piutang, atau pinjaman daerah dengan mekanisme yang terkontrol dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.

2.2.5. Kerangka Pembiayaan

Kerangka pendanaan merupakan landasan utama dalam perencanaan keuangan daerah yang bertujuan untuk memastikan kesinambungan pembiayaan pembangunan serta menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran daerah. Dalam konteks penyusunan kebijakan fiskal, kerangka pendanaan menjadi instrumen strategis dalam mengalokasikan sumber daya keuangan guna mendukung prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Penyusunan kerangka pendanaan harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk tren penerimaan daerah, alokasi belanja, serta strategi pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran. Dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi, kebijakan fiskal nasional, serta

kapasitas fiskal daerah, kerangka pendanaan berfungsi sebagai panduan dalam memastikan bahwa setiap kebutuhan belanja dapat dipenuhi tanpa menimbulkan risiko fiskal yang berlebihan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola pendanaan, terutama akibat ketidakpastian ekonomi dan perubahan kebijakan transfer ke daerah. Oleh karena itu, optimalisasi sumber-sumber pendanaan, baik dari pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer, maupun skema pembiayaan lainnya, menjadi langkah krusial dalam memperkuat ketahanan fiskal daerah. Pada bagian ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai proyeksi sumber pendanaan yang tersedia, strategi alokasi anggaran, serta mekanisme pembiayaan yang digunakan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah merupakan aspek krusial dalam perencanaan keuangan yang bertujuan untuk memastikan kesinambungan pembangunan serta keseimbangan fiskal daerah. Pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, serta penerimaan lainnya menjadi faktor utama dalam menentukan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai program dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, proyeksi pendapatan harus dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan tren ekonomi, potensi sumber daya daerah, serta kebijakan fiskal yang berlaku.

Di sisi lain, belanja daerah harus dialokasikan secara efektif dan efisien guna mendukung prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja ini mencakup belanja operasional, belanja modal, serta pengeluaran pembiayaan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Keseimbangan antara pendapatan dan belanja menjadi tantangan utama dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga strategi alokasi anggaran harus disusun secara cermat untuk menghindari defisit yang tidak terkendali.

Arah Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks seiring dengan dinamika ekonomi, perubahan kebijakan fiskal, dan perkembangan teknologi. Salah satu tantangan utama adalah fluktuasi

penerimaan daerah, seperti yang terlihat dalam tren pendapatan Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020-2025. Pendapatan daerah sempat mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar Rp.13,99 triliun, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp.12,58 triliun sebelum kembali menunjukkan tren peningkatan.

Selain itu, kebijakan fiskal nasional juga mempengaruhi kapasitas fiskal daerah, seperti penerapan opsen pajak kendaraan bermotor, yang mempengaruhi kewenangan pemerintah provinsi dalam pemungutan pajak ini, serta kebijakan pembebasan pajak kendaraan listrik yang berdampak pada potensi penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), proyeksi penerimaan dari retribusi daerah juga cenderung stagnan.

Dengan tantangan tersebut, diperlukan arah kebijakan dan strategi pendapatan daerah yang strategis guna memastikan keberlanjutan fiskal dan meningkatkan kapasitas keuangan daerah yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, efisiensi, dan diversifikasi sumber pendapatan, antara lain yaitu:

1) Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah, melalui:

- a. Memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok.
- b. Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem perpajakan daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- c. Penguatan evaluasi kepatuhan wajib pajak dan pemuatkhiran data potensi pajak secara berkala.
- d. Intensifikasi pengawasan dan pengendalian terhadap potensi kebocoran pajak daerah.
- e. Peningkatan literasi pajak daerah kewenangan provinsi.

2) Diversifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah, melalui:

- a. Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan sektor ekonomi baru, termasuk ekonomi hijau, ekonomi biru dan ekonomi digital sesuai kewenangan.

- b. Memanfaatkan peluang skema Public-Private Partnership (PPP)/ kerjasama pihak swasta untuk mengembangkan aset daerah secara produktif.
 - c. Penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
- 3) Optimalisasi Retribusi Daerah, melalui:
- a. Penyempurnaan sistem retribusi daerah agar lebih efisien dan berbasis layanan publik yang berkualitas.
 - b. Penguatan mekanisme pemungutan retribusi.
 - c. Evaluasi tarif retribusi secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan daerah.
- 4) Peningkatan Pemanfaatan Aset Daerah, melalui:
- a. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah melalui mekanisme kerja sama pemanfaatan aset dengan sektor swasta.
 - b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah untuk mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan nilai ekonomi aset.
- 5) Inovasi dan Digitalisasi dalam Pengelolaan Pendapatan, melalui:
- a. Mengembangkan sistem pembayaran pajak dan retribusi berbasis digital untuk meningkatkan kemudahan akses dan transparansi.
 - b. Pemanfaatan big data dan artificial intelligence (AI) untuk menganalisis potensi penerimaan pajak serta meningkatkan akurasi perencanaan pendapatan daerah.
- 6) Penguatan Regulasi dan Kebijakan Fiskal Daerah
- a. Menyusun regulasi yang adaptif.
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan bagi hasil pajak dan dana transfer daerah agar lebih optimal.
 - c. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pendapatan daerah.

Arah kebijakan pendapatan daerah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal secara berkelanjutan. Namun disisi lain, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai risiko, seperti perubahan regulasi nasional yang mempengaruhi penerimaan daerah, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta stagnasi sumber pendapatan akibat perkembangan teknologi dan kebijakan lingkungan. Selain itu, tantangan dalam pengelolaan aset daerah dan keamanan data digital juga menjadi perhatian. Untuk mengatasi risiko ini, diperlukan strategi mitigasi yang mencakup peningkatan

koordinasi dengan pemerintah pusat, penguatan sistem pengawasan dan digitalisasi pajak, diversifikasi sumber pendapatan, serta pemanfaatan aset daerah yang lebih produktif. Dengan manajemen risiko yang tepat, kebijakan ini dapat berjalan efektif dan memastikan pendapatan daerah yang stabil guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan target proyeksi Pendapatan Asli Daerah, berikut upaya-upaya yang perlu dilakukan, antara lain :

- 1) Mengembangkan sistem layanan pajak yang lebih terintegrasi secara digital untuk memudahkan proses pembayaran PKB dan BBNKB;
- 2) Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya membayar PKB dan BBNKB tepat waktu melalui kampanye media massa, media sosial, dan kegiatan tatap muka;
- 3) Memberikan insentif atau penghargaan kepada wajib pajak yang selalu membayar tepat waktu;
- 4) Melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap wajib pajak yang menunggak atau tidak melakukan balik nama kendaraan bermotor secara tepat waktu (memperkuat koordinasi dengan kepolisian dan lembaga terkait lainnya);
- 5) Menjalin kolaborasi dengan bank atau lembaga keuangan lain di luar Bank Sumut untuk mempermudah proses pembayaran PKB dan BBNKB;
- 6) Mengoptimalkan pemutakhiran data wajib pajak secara berkala untuk memastikan data kendaraan yang terdaftar selalu akurat dan up-to-date;
- 7) Melakukan optimalisasi sistem informasi pajak yang digunakan untuk mengelola data wajib pajak, agar lebih responsif dan efisien dalam mendeteksi tunggakan pajak dan melakukan penagihan secara tepat waktu;
- 8) Mengadakan program pemutihan pajak secara berkala bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk melunasi tunggakan tanpa khawatir akan denda besar;
- 9) Mengingat pengurangan penerimaan PKB dan BBNKB akibat Opsen, perlu dilakukan optimalisasi penerimaan dari pajak-pajak daerah lainnya, seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.

Kemudian terkait Pendapatan Transfer yang merupakan salah satu komponen utama dalam struktur keuangan daerah yang berasal dari Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil dengan Pemerintah Daerah. Untuk memastikan pencapaian target pendapatan transfer sesuai dengan proyeksi, diperlukan beberapa upaya strategis, antara lain:

- 1) Optimalisasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat melalui memastikan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah agar memenuhi persyaratan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan meningkatkan koordinasi dengan kementerian terkait guna memastikan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan daerah termasuk memaksimalkan pemanfaatan Dana Insentif Fiskal dengan meningkatkan kinerja keuangan dan tata kelola daerah.
- 2) Peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dengan memperkuat pengawasan terhadap penerimaan DBH agar sesuai dengan potensi daerah, terutama dari sektor perkebunan, pertambangan, dan migas serta melakukan advokasi kepada pemerintah pusat untuk meningkatkan porsi DBH yang diterima daerah sesuai dengan kontribusi Sumatera Utara dalam produksi nasional.
- 3) Penguatan Dana Transfer Khusus dan Hibah dengan mengajukan program yang memenuhi syarat untuk mendapatkan DAK fisik dan non-fisik melalui perencanaan yang sesuai dengan prioritas nasional, meningkatkan kapasitas daerah dalam menyerap Dana Desa dan Dana Kelurahan dengan memastikan kepatuhan administratif dan teknis dalam penggunaannya serta mendorong peningkatan alokasi hibah dari lembaga nasional dan internasional dengan memperkuat program kerja sama pembangunan daerah.
- 4) Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Transfer, dengan meningkatkan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah agar sesuai dengan ketentuan dan menghindari sanksi pemotongan dana transfer serta memperkuat sistem pengawasan dan audit internal guna memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana transfer dan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem digital untuk mendukung transparansi dalam pengelolaan dana transfer.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan salah satu komponen dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencakup

berbagai sumber penerimaan di luar pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Untuk mengoptimalkan penerimaan dari sumber ini, diperlukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah, dengan memastikan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif melalui kerja sama dengan pihak swasta, sewa aset daerah, atau mekanisme pemanfaatan lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan. Selain itu, pemetaan aset daerah yang berpotensi menghasilkan penerimaan serta menyusun regulasi yang mendukung optimalisasi pemanfaatannya serta mempercepat sertifikasi aset daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan dan menghindari sengketa kepemilikan.
- 2) Meningkatkan Penerimaan dari Jasa Layanan Pemerintah Daerah, melalui pengembangan inovasi layanan publik yang berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas layanan sekaligus mendukung peningkatan penerimaan daerah, menyesuaikan tarif layanan daerah berdasarkan analisis keekonomian agar tetap kompetitif dan sesuai dengan kemampuan masyarakat serta mendorong optimalisasi pendapatan dari layanan rumah sakit daerah, laboratorium kesehatan, serta lembaga pendidikan dan pelatihan yang dikelola pemerintah daerah.
- 3) Penguatan Mekanisme Pengelolaan Pendapatan Daerah dari Denda dan Sanksi Administratif, dengan meningkatkan efektivitas penegakan peraturan daerah terkait denda administratif guna memastikan kepatuhan masyarakat dan badan usaha, mengembangkan sistem pembayaran denda berbasis digital untuk mempermudah transaksi dan mencegah kebocoran penerimaan serta memastikan seluruh potensi denda dan sanksi administratif yang berlaku dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pendapatan daerah.
- 4) Meningkatkan Kolaborasi Kemitraan dengan Sektor Swasta, mendorong skema Public-Private Partnership (PPP) dalam pengelolaan fasilitas publik guna meningkatkan efisiensi layanan dan kontribusi keuangan bagi daerah, mengembangkan kerja sama investasi daerah melalui pemanfaatan potensi sektor pariwisata, energi terbarukan, dan industri kreatif yang dapat memberikan kontribusi pada pendapatan daerah serta memperkuat regulasi dan tata kelola kemitraan

pemerintah daerah dengan badan usaha agar tetap transparan dan berkelanjutan.

Arah Kebijakan dan Strategi Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan instrumen utama dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Melalui kebijakan belanja yang tepat sasaran, pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan belanja daerah harus dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas guna memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan dampak optimal bagi masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan belanja daerah dihadapkan pada berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas penggunaan anggaran. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain:

- 1) Besaran proporsi belanja operasional dibanding belanja modal, yang menyebabkan keterbatasan dalam pembangunan infrastruktur dan investasi daerah.
- 2) Ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat, yang membuat belanja daerah rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional.
- 3) Belum optimalnya efisiensi dalam penggunaan anggaran, terutama dalam aspek belanja pegawai dan barang jasa yang masih memiliki ruang untuk penghematan.
- 4) Kebutuhan peningkatan kualitas layanan publik, yang mengharuskan adanya perbaikan dalam perencanaan dan eksekusi belanja daerah agar lebih tepat sasaran.
- 5) Fluktuasi pendapatan daerah yang berdampak pada stabilitas belanja, terutama dalam merespons dinamika perekonomian regional dan nasional.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, arah kebijakan belanja daerah harus berfokus pada optimalisasi efektivitas dan efisiensi anggaran dengan menyeimbangkan antar komponen belanja sesuai ketentuan dan proporsi kebutuhan pencapaian target Pembangunan. Berikut kebijakan umum dalam pengelolaan belanja daerah antara lain:

- 1) Pemenuhan *mandatory spending* yang telah diamanatkan dalam perundang-undangan.

- 2) Meningkatkan alokasi belanja yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan.
- 3) Pemenuhan belanja dalam rangka mewujudkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), dan prioritas Pembangunan guna pencapaian visi misi daerah.
- 4) Implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara provinsi dan kabupaten/kota
- 5) Memperkuat pengendalian belanja dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran, agar lebih transparan dan berorientasi pada hasil.

Selanjutnya, belanja daerah merupakan instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan belanja yang efektif dan efisien, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan belanja daerah harus disusun dengan mempertimbangkan keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal, serta mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 menuju daerah yang unggul, maju, dan berkelanjutan, kebijakan pembiayaan daerah memegang peranan penting sebagai instrumen pendukung utama dalam menjamin keberlanjutan fiskal sekaligus akselerasi pembangunan. Pembiayaan daerah tidak lagi diposisikan semata untuk menutup defisit anggaran, melainkan diarahkan sebagai motor penggerak untuk memobilisasi sumber daya ekonomi secara lebih produktif, memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta menciptakan ruang fiskal yang memadai bagi pembangunan sektor-sektor prioritas. Fokus ini mencakup dukungan terhadap sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, ketahanan pangan, hilirisasi industri dan investasi, sehingga kebijakan pembiayaan menjadi bagian integral dari upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Strategi pembiayaan juga perlu diletakkan dalam konteks penguatan kemandirian fiskal, melalui optimalisasi penerimaan pembiayaan yang sehat

dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan mendorong pola pembiayaan inovatif seperti pemanfaatan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), peningkatan partisipasi publik dalam pembiayaan pembangunan, serta penguatan penyertaan modal daerah secara selektif dan akuntabel. Pendekatan ini akan memperluas kapasitas fiskal tanpa membebani anggaran rutin, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan biru yang inklusif. Dengan demikian, arah kebijakan dan strategi pembiayaan tidak hanya menopang keseimbangan fiskal, tetapi juga menjadi instrumen kunci dalam memperkuat transformasi ekonomi Sumatera Utara secara berkelanjutan.

Sebagai bagian integral dari arah kebijakan pembiayaan daerah, proyeksi pendapatan dan belanja daerah menjadi landasan penting dalam merumuskan strategi fiskal yang berkelanjutan. Proyeksi ini tidak hanya mencerminkan kapasitas fiskal yang tersedia untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor prioritas, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan belanja yang terus meningkat dan tren penerimaan daerah. Dengan pendekatan yang fleksibel dan adaptif, pemerintah daerah dapat mengantisipasi dinamika fiskal dan menjaga stabilitas keuangan daerah. Gambaran lebih lanjut mengenai proyeksi kapasitas pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 159. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan asli daerah	7.249.501.329.775,00	7.539.481.382.966,00	7.841.060.638.284,64	8.154.703.063.816,02	8.480.891.186.368,67	8.820.126.833.823,41
Pajak daerah	6.366.179.295.640,00	6.593.515.467.441,76	6.836.490.338.669,20	7.086.938.372.639,63	7.344.930.741.578,55	7.610.518.689.372,17
Retribusi daerah	173.331.559.568,00	190.664.715.524,80	200.197.951.301,04	210.207.848.866,09	220.718.241.309,40	231.754.153.374,87
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	343.014.445.649,00	377.315.890.213,90	415.047.479.235,29	456.552.227.158,82	502.207.449.874,70	552.428.194.862,17
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	366.976.028.918,00	377.985.309.785,54	389.324.869.079,11	401.004.615.151,48	413.034.753.606,02	425.425.796.214,20
Pendapatan Transfer	5.788.199.396.000,00	5.993.306.930.920,00	6.205.826.154.009,20	6.426.029.754.397,54	6.654.200.615.428,25	6.890.632.201.025,84
Dana Bagi Hasil	627.857.417.000,00	646.693.139.510,00	666.093.933.695,30	686.076.751.706,16	706.659.054.257,34	727.858.825.885,06
Dana Alokasi Umum	3.146.155.304.000,00	3.272.001.516.160,00	3.402.881.576.806,40	3.538.996.839.878,66	3.680.556.713.473,80	3.827.778.982.012,75
Dana Alokasi Khusus	2.014.186.675.000,00	2.074.612.275.250,00	2.136.850.643.507,50	2.200.956.162.812,73	2.266.984.847.697,11	2.334.994.393.128,02
Transfer Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)/ insentif fiskal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	66.300.000.000,00	36.615.000.000,00	36.945.750.000,00	37.293.037.500,00	37.657.689.375,00	38.040.573.843,75
Pendapatan Hibah	6.300.000.000,00	6.615.000.000,00	6.945.750.000,00	7.293.037.500,00	7.657.689.375,00	8.040.573.843,75
Lain- Lain Pendapatan	60.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
TOTAL JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	13.104.000.725.775,00	13.569.403.313.886,00	14.083.832.542.293,80	14.618.025.855.713,60	15.172.749.491.171,90	15.748.799.608.693,00
Belanja Operasi	7.045.265.423.341,50	7.317.439.052.840,50	7.948.547.361.729,51	8.163.585.548.369,21	8.466.794.928.334,30	8.877.529.488.888,72
Belanja Modal	2.276.380.045.133,50	2.800.000.000.000,00	2.900.000.000.000,00	3.100.000.000.000,00	3.200.000.000.000,00	3.300.000.000.000,00
Belanja tidak terduga	153.024.755.997,00	201.000.000.000,00	205.000.000.000,00	210.000.000.000,00	214.000.000.000,00	219.000.000.000,00
Belanja Transfer	3.682.780.501.303,00	3.250.964.261.045,50	3.030.285.180.564,32	3.144.440.307.344,35	3.291.954.562.837,62	3.352.270.119.804,28
TOTAL JUMLAH BELANJA DAERAH	13.157.450.725.775,00	13.569.403.313.886,00	14.083.832.542.293,80	14.618.025.855.713,60	15.172.749.491.171,90	15.748.799.608.693,00
SURPLUS / DEFISIT	(53.450.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan	103.450.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00

Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2025

Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Proyeksi total penerimaan setelah dikurangi dengan proyeksi belanja menghasilkan angka kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang mencerminkan ruang fiskal yang tersedia untuk mendanai program pembangunan prioritas. Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2030 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2. 160. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (dalam miliar rupiah)

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan Daerah	13.104,00	13.569,40	14.083,83	14.618,03	15.172,75	15.748,80
Proyeksi Penerimaan SiLPA	103,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Total Penerimaan	13.207,45	13.619,40	14.133,83	14.668,03	15.222,75	15.798,80
Belanja Pegawai	3.596,40	3.686,31	3.778,46	3.872,92	3.969,75	4.068,99
Belanja Barang dan Jasa	2.923,64	3.256,13	3.740,08	3.805,66	3.957,05	4.213,54
Belanja Hibah	513,23	350,00	400,00	450,00	500,00	550,00
Belanja Bantuan Sosial	12,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00
Belanja Bagi Hasil	3.554,26	2.650,96	2.380,29	2.444,44	2.541,95	2.552,27
Bantuan Keuangan	128,52	600,00	650,00	700,00	750,00	800,00
Belanja Tidak Terduga	153,02	201,00	205,00	210,00	214,00	219,00
Pengeluaran Pembiayaan	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Total Pengeluaran	10.931,07	10.819,40	11.233,83	11.568,03	12.022,75	12.498,80
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	2.276,38	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00

Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2025 (diolah)

Dalam merencanakan pembangunan daerah yang berkelanjutan, penghitungan kerangka pendanaan menjadi aspek krusial untuk memastikan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah. Sebagaimana disajikan pada tabel dibawah, proyeksi keuangan Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2026-2029 menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dalam Pendapatan Daerah, dengan pendapatan dari Rp.13,57 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp.15,75 triliun pada tahun 2030. Selain itu, proyeksi penerimaan SiLPA yang diasumsikan tetap sebesar Rp.50 miliar setiap tahunnya memberikan tambahan penerimaan. Dengan demikian, total penerimaan daerah meningkat dari Rp13,62 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp15,8 triliun pada tahun 2030.

Dari sisi pengeluaran, terdapat beberapa pos belanja utama yang mencerminkan prioritas alokasi anggaran. Belanja pegawai terus mengalami peningkatan, dari Rp.3,68 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp.4,1 triliun pada tahun 2030, yang menunjukkan upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, belanja barang dan jasa juga mengalami kenaikan secara bertahap, dari

Rp.3,26 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp.4,21 triliun pada tahun 2030, yang mencerminkan kebutuhan operasional pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat.

Di sisi lain, belanja bagi hasil mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2026 mencapai Rp2,65 triliun, namun menurun menjadi Rp.2,55 triliun pada tahun 2030. Tren ini kemungkinan disesuaikan dengan dinamika pendapatan yang diterima daerah serta kebijakan pembagian dana kepada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara. Belanja hibah dan bantuan sosial juga mengalami sedikit peningkatan, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung program kesejahteraan sosial.

Dengan total pengeluaran yang berkisar antara Rp.10,8 triliun hingga Rp.12,5 triliun selama periode 2026-2029, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah menunjukkan tren positif. Pada tahun 2026, kapasitas riil tercatat sebesar Rp.2,80 triliun, meningkat menjadi Rp3,30 triliun pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang semakin kuat untuk mendanai prioritas pembangunan, termasuk proyek infrastruktur, pendidikan, dan sektor strategis lainnya.

Secara keseluruhan, kerangka pendanaan ini mencerminkan perencanaan keuangan yang berorientasi pada kesinambungan fiskal, dengan tetap mengakomodasi kebutuhan belanja yang meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, untuk menjaga stabilitas keuangan, diperlukan strategi optimalisasi pendapatan daerah serta efisiensi dalam pengelolaan belanja, sehingga kapasitas riil kemampuan keuangan dapat terus meningkat dan mendukung pembangunan yang lebih inklusif di Sumatera Utara.

Kebijakan Alokasi Anggaran

Dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah perlu dialokasikan secara proporsional berdasarkan skala prioritas. Dari proyeksi kapasitas keuangan riil Provinsi Sumatera Utara selama periode 2026-2029, terlihat bahwa alokasi anggaran dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu Prioritas I (infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta program pendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial) dan Prioritas II (pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat ekonomi rentan). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 161. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (dalam miliar rupiah)

Uraian	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	2.276,38	100%	2.800,00	100%	2.900,00	100%	3.100,00	100%	3.200,00	100%	3.300,00	100%
Prioritas I	1.593,47	70%	1.960,00	70%	2.030,00	70%	2.170,00	70%	2.240,00	70%	2.310,00	70%
Prioritas II	682,91	30%	840,00	30%	870,00	30%	930,00	30%	960,00	30%	990,00	30%

Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2025 (diolah)

Prioritas I, yang mencakup 70% dari total kapasitas keuangan riil, mengalami peningkatan dari Rp. 1,59 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp. 2,24 triliun pada tahun 2029. Alokasi anggaran ini ditujukan untuk sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program-program prioritas daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan alokasi pada kategori ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Sementara itu, Prioritas II, yang mendapatkan alokasi 30% dari kapasitas keuangan riil, juga menunjukkan tren kenaikan dari Rp.682,91 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp.960,00 miliar pada tahun 2029. Alokasi ini dapat mencakup belanja yang bersifat pendukung, seperti pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta program-program sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan. Meskipun proporsi alokasinya tetap, peningkatan nominal anggaran menunjukkan adanya ruang bagi daerah untuk mengembangkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya keseimbangan dalam alokasi prioritas ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat memastikan bahwa sumber daya keuangan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pencapaian target pembangunan. Ke depan, strategi peningkatan pendapatan daerah dan efisiensi dalam belanja akan menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan fiskal, sekaligus memastikan bahwa setiap prioritas pembangunan mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengembangkan sistem pembiayaan alternatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis, seperti pembangunan pelabuhan, rumah sakit, jalan tol, retribusi umum, dan retribusi jasa usaha, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Pengembangan sistem pembiayaan ini diarahkan pada:

1) Pinjaman Daerah

Dalam rangka mempercepat pembangunan daerah dan mencapai target prioritas pembangunan perlu mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan, termasuk pinjaman daerah. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, pemanfaatan pinjaman daerah diarahkan untuk mendukung pembiayaan infrastruktur strategis dan program pembangunan berkelanjutan yang berdampak luas bagi masyarakat.

Skema pinjaman daerah dipertimbangkan untuk mengatasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempertimbangkan aspek keberlanjutan fiskal, manfaat jangka panjang, serta dampak sosial-ekonomi yang luas bagi masyarakat. Regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menggarisbawahi bahwa pinjaman daerah hanya dapat digunakan untuk kegiatan produktif yang memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, pinjaman daerah harus difokuskan pada pembangunan jalan, jembatan, sistem transportasi publik, fasilitas kesehatan, serta sektor-sektor prioritas lainnya yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Untuk memastikan pinjaman daerah dapat dikelola secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, pemerintah daerah harus memperhatikan kapasitas fiskal dan rasio utang daerah agar tetap dalam batas yang aman. Sebagai bagian dari strategi pembiayaan, pinjaman daerah harus selaras dengan program pembangunan yang telah dirancang dalam dokumen perencanaan serta perlu memastikan bahwa pemanfaatan pinjaman mendukung program prioritas seperti penguatan konektivitas wilayah, peningkatan layanan dasar masyarakat, serta pengembangan sektor ekonomi unggulan. Evaluasi secara berkala terhadap efektivitas pinjaman juga menjadi hal yang penting guna memastikan bahwa dana yang diperoleh memberikan manfaat maksimal dan dapat dikembalikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan tanpa membebani APBD. Dengan strategi yang tepat dan manajemen risiko yang baik, pinjaman daerah dapat menjadi instrumen pendanaan yang efektif dalam mendukung pembangunan Sumatera Utara selama lima tahun ke depan.

2) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan layanan publik

yang semakin kompleks. Dengan keterbatasan fiskal dan meningkatnya kebutuhan investasi di berbagai sektor strategis, mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau *Public-Private Partnership* (PPP) menjadi solusi yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak untuk diimplementasikan. Skema KPBU memungkinkan pemerintah daerah menggandeng sektor swasta dalam membangun, mengoperasikan, dan memelihara proyek infrastruktur tanpa harus bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Skema KPBU di Sumatera Utara dimungkinkan pelaksanaannya dalam rangka merespon tingginya kebutuhan infrastruktur dasar, seperti pembangunan jalan tol, sistem transportasi massal, fasilitas kesehatan, pengelolaan air bersih, energi terbarukan, serta pengembangan kawasan industri dan pariwisata. Keterbatasan dana daerah dan ketatnya defisit fiskal membuat skema KPBU menjadi strategi yang realistis untuk mempercepat pencapaian program kegiatan yang selama ini tertunda karena kendala pembiayaan. Lebih dari sekadar pembiayaan, KPBU juga menawarkan efisiensi manajemen, transfer teknologi, serta peningkatan kualitas layanan publik melalui keterlibatan dunia usaha yang memiliki keunggulan dalam inovasi, operasional, dan manajemen risiko.

3) Obligasi Pemerintah Daerah

Sebagai alternatif pembiayaan, pemerintah perlu mengoptimalkan obligasi daerah untuk pembiayaan pembangunan jangka menengah dan panjang guna mengatasi keterbatasan ruang fiskal daerah. Obligasi daerah harus difokuskan pada proyek-proyek strategis yang memiliki skema pendapatan berkelanjutan (*revenue-generating projects*) seperti transportasi publik, pengelolaan air bersih, dan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan. Penerbitan obligasi harus selaras dengan regulasi yang berlaku, memastikan bahwa dana yang diperoleh digunakan untuk proyek yang berdampak luas bagi masyarakat tanpa membebani keuangan daerah secara langsung.

Untuk menjamin keberhasilan penerbitan obligasi daerah, pemerintah harus menyusun perencanaan yang matang, memperkuat tata kelola dan transparansi, serta memastikan proyek yang didanai memiliki kelayakan finansial yang jelas. Skema *Revenue Bond* dapat menjadi pilihan utama, di mana pembayaran obligasi bersumber dari pendapatan proyek tertentu, bukan dari APBD secara keseluruhan. Dengan strategi ini, obligasi daerah dapat menjadi instrumen pembiayaan berkelanjutan yang mempercepat

pembangunan infrastruktur, meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.

4) Corporate Social Responsibility (CSR)

Dalam menghadapi keterbatasan ruang fiskal, *Corporate Social Responsibility* (CSR) harus dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk mendukung pembangunan di Sumatera Utara. Peran dunia usaha tidak hanya sebatas kontribusi ekonomi, tetapi juga tanggung jawab sosial dalam memperkuat infrastruktur publik, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Melalui skema CSR yang terarah, pemerintah dapat menggandeng perusahaan dalam mendanai program prioritas tanpa membebani APBD, sekaligus mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan berkelanjutan.

Agar CSR berjalan optimal, pemerintah perlu membangun ekosistem kolaboratif dengan dunia usaha, menyusun kebijakan insentif yang menarik, serta memastikan transparansi dalam pemanfaatannya. Program CSR harus diarahkan pada proyek yang memiliki dampak luas bagi masyarakat, seperti pembangunan fasilitas layanan dasar, rehabilitasi kawasan rawan bencana, serta pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Dengan pendekatan ini, CSR dapat menjadi instrumen strategis yang memperkuat daya saing daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat realisasi pembangunan di Sumatera Utara tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.

5) Kolaborasi dan Kemitraan dengan Lembaga Internasional/Lembaga Swadaya Masyarakat

Kolaborasi dan kemitraan dengan lembaga internasional/lembaga swadaya masyarakat atau *Non-Governmental Organizations* (NGO) menjadi strategi penting dalam mengatasi keterbatasan ruang fiskal daerah. Sumatera Utara memiliki peluang besar untuk menjalin kerja sama dengan lembaga internasional dalam bidang pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga mitigasi perubahan iklim. Bantuan teknis, hibah, dan program pendanaan dari organisasi seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), UNDP, serta NGO berbasis lingkungan dan sosial dapat dimanfaatkan untuk mempercepat realisasi proyek-proyek strategis yang selaras dalam percepatan pencapaian visi misi serta berdampak luas bagi masyarakat.

Agar kemitraan ini berjalan efektif, pemerintah daerah harus proaktif dalam membangun kepercayaan dengan menjamin transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan. Skema kerja sama ini harus diarahkan pada proyek yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas dan kemandirian daerah dalam jangka panjang. Dengan pendekatan yang tepat, kolaborasi dengan lembaga internasional dan NGO dapat menjadi motor percepatan pembangunan di Sumatera Utara, mengurangi ketimpangan sosial, serta meningkatkan daya saing daerah dalam skala global.

6) Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA)

Dalam menghadapi keterbatasan fiskal dan meningkatnya kebutuhan infrastruktur, Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) menjadi solusi strategis bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Skema PINA memungkinkan pembiayaan proyek pembangunan tanpa membebani APBD maupun APBN, dengan mengoptimalkan pendanaan dari investor swasta, lembaga keuangan, dana pensiun, dan sovereign wealth funds. Model ini sangat relevan bagi Sumatera Utara, mengingat kebutuhan investasi besar di sektor transportasi, energi, pengelolaan air, kawasan industri, serta infrastruktur sosial seperti rumah sakit dan pendidikan.

Agar PINA berjalan optimal, pemerintah daerah harus menyusun kebijakan insentif yang menarik bagi investor, memastikan transparansi tata kelola, serta menyiapkan proyek yang layak secara ekonomi dan finansial. Skema ini juga menuntut adanya regulasi yang jelas serta mekanisme mitigasi risiko, agar investor memiliki kepastian hukum dalam berpartisipasi. Dengan pendekatan yang tepat, PINA dapat menjadi mesin percepatan pembangunan Sumatera Utara, menciptakan peluang kerja, memperkuat daya saing daerah, serta mengurangi ketergantungan terhadap pendanaan konvensional dari APBD.

2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.3.1. Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Analisis permasalahan pembangunan menjadi bagian penting dalam perumusan isu strategis yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan desain program dan kegiatan untuk akselerasi pencapaian tujuan pembangunan dalam setiap tahapannya. Dalam upaya pencapaian pembangunan di masa depan terdapat berbagai isu dan

tantangan yang menjadi permasalahan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Permasalahan pembangunan tersebut meliputi berbagai aspek, mulai dari kondisi geografi, demografi, kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial budaya, daya saing daerah dan pelayanan umum. Adapun permasalahan di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Kondisi Geografi
 - a. Tantangan Aksesibilitas dan Biaya Konstruksi yang Mahal. Kondisi topografi wilayah Sumatera Utara khususnya di kawasan Pantai Barat dan Kepulauan Nias sangat berbukit dan bergelombang dengan kondisi struktur tanah yang tidak stabil mengakibatkan tingginya biaya pembangunan infrastruktur. Berdasarkan data Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara memiliki rerata IKK sebesar 100,23. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan rerata IKK keseluruhan provinsi yang tercantum dalam data, yaitu 97,75. Secara spesifik, terdapat dua provinsi lain yang memiliki rerata IKK lebih tinggi dari Sumatera Utara, yaitu Kepulauan Bangka Belitung (103,04) dan Kepulauan Riau (115,51). Tingginya IKK di Sumatera Utara mengindikasikan bahwa biaya konstruksi di wilayah ini cenderung lebih mahal dibandingkan dengan rata-rata nasional, yang dapat menjadi hambatan signifikan dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Tabel 2. 162. Perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi

Provinsi	Indeks Kemahalan Konstruksi					
	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata
ACEH	96,38	99,03	100,59	97,38	96,61	98,00
SUMATERA UTARA	99,84	101,63	103,4	98,81	97,45	100,23
SUMATERA BARAT	92,96	94,77	97,66	94,15	93,06	94,52
RIAU	95,72	94,85	99,21	99,06	96,10	96,99
JAMBI	90,35	92,76	96,84	93,55	95,32	93,76
SUMATERA SELATAN	92,69	91,58	92,04	91,39	90,62	91,66
BENGKULU	91,78	94,42	95,65	93,27	94,20	93,86
LAMPUNG	88,67	92,57	90,46	88,65	89,12	89,89
KEP. BANGKA BELITUNG	101,90	101,21	102,78	103,94	105,37	103,04
KEP. RIAU	121,50	116,80	115,97	111,32	111,94	115,51

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Kondisi geografis Sumatera Utara yang beragam, meliputi dataran rendah, pegunungan, dan pesisir serta adanya Kepulauan Nias, secara inheren menimbulkan tantangan aksesibilitas dan berkontribusi pada tingginya biaya konstruksi. Wilayah pegunungan seperti Bukit Barisan yang melintasi provinsi ini, serta keberadaan Danau Toba sebagai

danau vulkanik terbesar di dunia, menciptakan topografi yang kompleks. Pembangunan infrastruktur di daerah berbukit dan pegunungan memerlukan teknik konstruksi yang lebih rumit, seperti pemotongan dan penimbunan lahan yang ekstensif, pembangunan jembatan dan terowongan, serta penanganan lereng yang stabil untuk mencegah longsor. Hal ini secara langsung meningkatkan biaya material, tenaga kerja, dan peralatan yang dibutuhkan. Selain itu, kondisi geologis yang tidak stabil di beberapa area, seperti tanah lunak atau rawan gempa, juga menuntut fondasi yang lebih kuat dan desain struktural yang lebih tahan gempa, yang berdampak pada peningkatan biaya konstruksi secara keseluruhan.

Tantangan aksesibilitas juga menjadi faktor krusial. Beberapa daerah di Sumatera Utara, terutama yang terpencil (Kepulauan Nias) atau berada di pegunungan, memiliki infrastruktur jalan yang belum memadai. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pengangkutan material konstruksi dan peralatan berat ke lokasi proyek. Biaya logistik dan transportasi menjadi membengkak karena jarak tempuh yang jauh, kondisi jalan yang buruk, dan waktu tempuh yang lebih lama. Keterbatasan akses ini juga dapat menghambat mobilisasi tenaga kerja terampil, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi efisiensi dan jadwal proyek. Dengan demikian, kondisi geografis yang menantang di Sumatera Utara tidak hanya secara langsung meningkatkan kompleksitas teknis konstruksi, tetapi juga secara tidak langsung menaikkan biaya melalui tantangan logistik dan aksesibilitas, yang pada akhirnya tercermin dalam Indeks Kemahalan Konstruksi yang relatif tinggi.

- b. Wilayah Rawan Bencana Alam masih tinggi. Sebagian besar wilayah termasuk ke dalam kawasan rawan bencana alam (banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, angin puting beliung, letusan gunung berapi, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain), sehingga menimbulkan limitasi pengembangan wilayah dan mitigasi bencana. Provinsi Sumatera Utara memiliki beberapa wilayah dengan tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi, bahkan masuk dalam kategori risiko tinggi secara nasional. Berdasarkan data Buku IRBI 2024, dari lima kabupaten/kota dengan skor risiko tertinggi, empat di antaranya berada di Sumatera Utara, yaitu Mandailing Natal (skor 214.80), Nias Utara (skor 214.00), Nias (skor 211.70), dan Nias Barat (skor 210.80). Keseluruhan kabupaten/kota ini diklasifikasikan dalam 'Kelas Risiko:

TINGGI'. Keberadaan empat dari lima wilayah dengan risiko bencana tertinggi secara nasional di Sumatera Utara mengindikasikan bahwa provinsi ini menghadapi tantangan serius dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, terutama di wilayah-wilayah tersebut.

Tabel 2. 163. Perbandingan Indeks Risiko Bencana Indonesia

Provinsi	Indeks Risiko Bencana Indonesia					
	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata
ACEH	153,58	149,99	149,10	146,90	144,29	148,77
SUMATERA UTARA	145,18	143,83	142,51	140,65	139,84	142,40
SUMATERA BARAT	149,53	147,36	144,39	144,38	142,55	145,64
RIAU	147,27	142,41	141,26	137,75	137,69	141,28
JAMBI	138,64	135,32	133,49	135,69	138,02	136,23
SUMATERA SELATAN	139,24	137,31	132,99	131,24	131,05	134,37
BENGKULU	162,00	157,14	155,35	148,75	144,08	153,46
LAMPUNG	146,78	145,42	142,55	135,66	130,10	140,10
KEP. BANGKA BELITUNG	161,54	160,98	158,52	155,61	143,42	156,01
KEP. RIAU	116,40	114,71	110,93	107,79	109,24	111,81

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Rerata IRBI Sumatera Utara selama periode 2020-2024 adalah 142.40, yang masih mengindikasikan tingkat risiko yang signifikan. Tren IRBI provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan ini perlu diimbangi dengan perhatian khusus terhadap wilayah-wilayah dengan skor risiko individual yang sangat tinggi, seperti Mandailing Natal dan Kepulauan Nias, untuk memastikan bahwa upaya pengurangan risiko bencana terdistribusi secara merata dan efektif di seluruh wilayah provinsi.

- c. Benturan Kepentingan Pemanfaatan Lahan. Adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang antara pelestarian lingkungan (fungsi lindung) dan budidaya (pertambangan, energi, infrastruktur, dan lain-lain) yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik sosial, ekonomi, lingkungan hidup, pertanahan dan pemerintahan. Sepanjang tahun 2024, Kontras Sumatera Utara mencatat terdapat 24 letusan konflik SDA yang terjadi di Sumatera Utara. Ini terjadi karena ketidakseimbangan antara kepentingan pembangunan, pemanfaatan SDA, dan pertentangan masyarakat akan hak-haknya yang tinggal di sekitar atau bergantung pada sumber daya alam tersebut.
2. Permasalahan Kondisi Demografi
- a. Pertumbuhan Penduduk Masih Tinggi. Masih cukup tingginya angka pertumbuhan penduduk dan adanya kecenderungan peningkatan pertumbuhan selama periode 2025-2029. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020-2024 tercatat

mencapai 1,40, melebihi capaian nasional pada periode yang sama yakni sebesar 1,11 (BPS, 2024).

- b. Distribusi Penduduk Tidak Merata. Ketimpangan distribusi penduduk yang mengakibatkan kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung lebih berkembang di daerah yang padat/perkotaan. Sekitar 29,09% penduduk Sumatera Utara tinggal di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, sedangkan yang menetap di Kabupaten/Kota Kepulauan Nias hanya sekitar 6,07% (BPS, 2024).
- c. Tingginya Migrasi Keluar Usia Produktif. Migrasi penduduk mengakibatkan banyak migrasi keluar yang besar dilakukan oleh usia produktif. Sementara Angka Ketergantungan Sumatera Utara masih sebesar 48,65 persen (2024) artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 48-49 jiwa penduduk usia tidak produktif. Jumlah penduduk Sumatera Utara yang melakukan migrasi keluar Seumur Hidup sebanyak 2.317.370 orang, sedangkan migrasi masuk ke Sumatera Utara sebanyak 569.295 orang. Dengan demikian migrasi neto penduduk Sumatera Utara sebanyak -1.748.075 orang (BPS, 2024). Sekitar 72,8% melakukan migrasi dengan alasan pekerjaan (BPS, 2024).

Migrasi keluar penduduk dari suatu wilayah sering kali memiliki keterkaitan yang erat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut. Wilayah dengan tingkat IPM rendah, yang mencerminkan terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang memadai, cenderung mengalami arus migrasi keluar yang lebih tinggi, karena penduduk mencari peluang kerja, pendidikan, dan kualitas hidup yang lebih baik di daerah lain. Sebaliknya, wilayah dengan IPM tinggi biasanya mampu mempertahankan penduduknya, karena tersedianya fasilitas sosial, layanan kesehatan yang memadai, serta peluang ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, migrasi keluar dapat menjadi indikator tidak langsung adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah, dan menyoroti pentingnya intervensi kebijakan yang fokus pada peningkatan kualitas hidup untuk menahan arus migrasi sekaligus mendorong pembangunan manusia yang lebih merata.

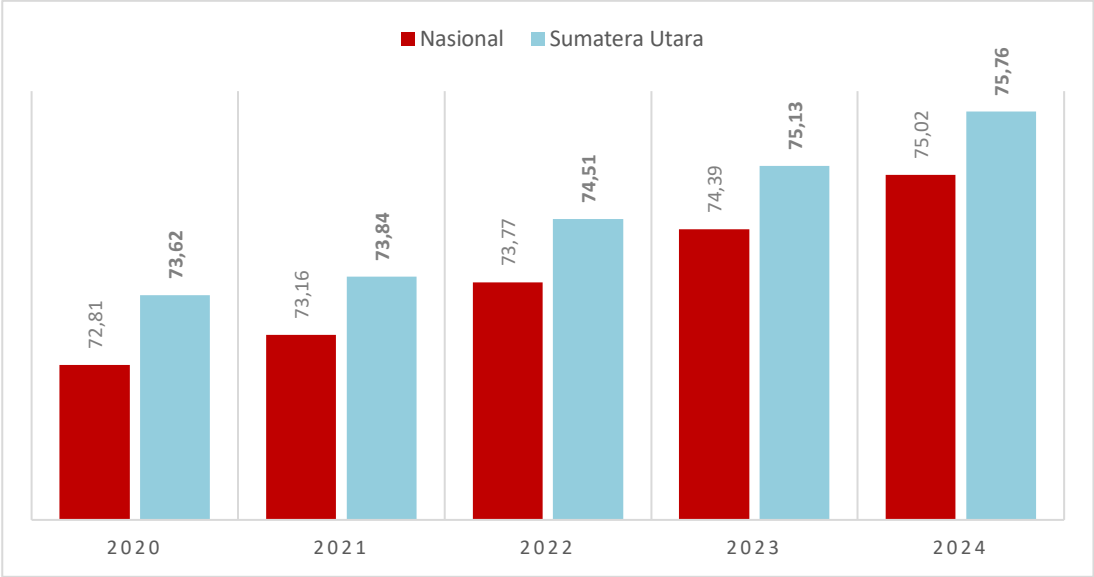
Tabel 2. 164. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Lain di Pulau Sumatera

WILAYAH	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	73,29	73,48	74,11	74,7	75,36
Sumatera Utara	73,62	73,84	74,51	75,13	75,76
Sumatera Barat	74,29	74,56	75,16	75,64	76,43
Riau	73,67	73,89	74,45	74,95	75,67
Jambi	72,29	72,62	73,11	73,73	74,36
Sumatera Selatan	71,62	71,83	72,48	73,18	73,84
Bengkulu	72,93	73,16	73,68	74,3	74,91
Lampung	71,04	71,25	71,79	72,48	73,13
Kep. Bangka Belitung	72,74	72,96	73,5	74,09	74,55
Kep. Riau	77,69	77,87	78,48	79,08	79,89

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren peningkatan IPM yang konsisten dari 73,62 pada tahun 2020 menjadi 75,76 pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, posisi IPM Sumatera Utara berada pada peringkat keempat tertinggi pada tahun 2024. Provinsi dengan IPM tertinggi adalah Kepulauan Riau (79,89), diikuti oleh Sumatera Barat (76,43), dan Riau (75,67). Sumatera Utara unggul atas Aceh (75,36), Jambi (74,36), Sumatera Selatan (73,84), Bengkulu (74,91), Lampung (73,13), serta Kepulauan Bangka Belitung (74,55).

Gambar 2. 40. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara dengan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Secara umum terlihat bahwa IPM Provinsi Sumatera Utara terus meningkat dari tahun ke tahun, yang mana pada tahun 2020 IPM tercatat pada angka 73,62 poin dan pada tahun 2024 tercatat pada angka 75,76. Pencapaian tersebut lebih tinggi dari IPM nasional pada tahun 2024 sebesar 75,02. Peningkatan IPM Sumatera Utara 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat,

pengetahuan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan IPM 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya.

- d. Lapangan Kerja Informal Masih Mendominasi. Angka usia produktif terus bertambah. Sementara penyediaan lapangan kerja bagi mereka yang memasuki masa produktif tidak *balance* (seimbang). Kalau ini terus terjadi, kesenjangan ekonomi, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin sulit. Badan Pusat Statistik mencatat proporsi pekerja informal di Sumatera Utara pada tahun 2020 tercatat sebesar 59,62% (2020) dan menjadi 57,35% (2024).

Tabel 2. 165. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Lain di Pulau Sumatera

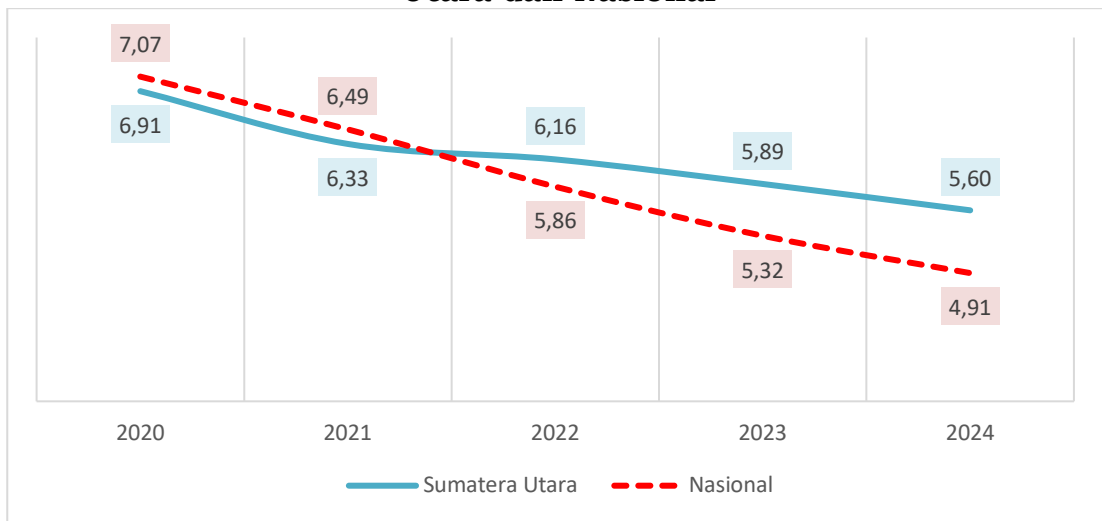
WILAYAH	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	6,59	6,30	6,17	6,03	5,75
Sumatera Utara	6,91	6,33	6,16	5,89	5,60
Sumatera Barat	6,88	6,52	6,28	5,94	5,75
Riau	6,32	4,42	4,37	4,23	3,70
Jambi	5,13	5,09	4,59	4,53	4,48
Sumatera Selatan	5,51	4,98	4,63	4,11	3,86
Bengkulu	4,07	3,65	3,59	3,42	3,11
Lampung	4,67	4,69	4,52	4,23	4,19
Kep. Bangka Belitung	5,25	5,03	4,77	4,56	4,63
Kep. Riau	10,34	9,91	8,23	6,80	6,39

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan TPT yang cukup signifikan, dari 6,91% pada tahun 2020 menjadi 5,60% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan secara bertahap. Meski demikian, pada tahun 2024, posisi TPT Sumatera Utara masih tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera. Sumatera Utara menempati peringkat keempat tertinggi setelah Kepulauan Riau (6,39%), Aceh (5,75%), dan Sumatera Barat (5,75%). Sementara itu, provinsi dengan TPT terendah adalah Bengkulu (3,11%), diikuti oleh Lampung (4,19%) dan Jambi (4,48%).

Gambar perbandingan tingkat pengangguran Sumatera Utara dan nasional dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Sumatera Utara secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional, meskipun keduanya mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran di Sumatera Utara berada di 6,91%, sementara nasional lebih tinggi di 7,07%. Namun, hingga 2024, tingkat pengangguran nasional tercatat lebih rendah (4,91%) dibandingkan Sumatera Utara yang berada di 5,60%.

Gambar 2. 41. Perbandingan Tingkat Pengangguran Sumatera Utara dan Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Penurunan yang lebih lambat di Sumatera Utara dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, termasuk ketergantungan tinggi terhadap sektor-sektor yang kurang mampu menyerap tenaga kerja terampil, seperti sektor pertanian dan perkebunan yang mayoritas bersifat musiman dan padat karya rendah. Selain itu, rendahnya diversifikasi sektor industri di Sumatera Utara turut membatasi penciptaan lapangan kerja yang lebih stabil. Sedangkan di tingkat nasional, sektor industri manufaktur dan jasa yang lebih berkembang di wilayah-wilayah besar seperti di Pulau Jawa berhasil menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, mempercepat penurunan tingkat pengangguran.

3. Permasalahan Kesejahteraan

a. Belum Optimalnya Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Utara menunjukkan penurunan dalam kurun waktu 2 dekade terakhir yang dapat dilihat dari persentase tingkat pengangguran terbuka Tahun 2005 sebesar 10,98% dan menurun menjadi 5,60% pada Tahun 2024, namun kondisi ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional yang tercatat sebesar 4,91%. Tingginya tingkat pengangguran sangat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja menunjukkan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi. Tingkat Produktivitas tenaga kerja Sumatera Utara pada Tahun 2023 sebesar Rp 79,77 juta/tenaga kerja, kondisi ini lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang tercatat sebesar Rp 87,96 juta/tenaga kerja. Tingkat pengangguran yang tinggi dan produktivitas tenaga kerja yang rendah didorong oleh beberapa permasalahan antara lain rendahnya

human Capital (pendidikan dan kesehatan), penguasaan teknologi yang kurang, inovasi yang terbatas, kondisi budaya dan etos kerja yang masih minim, dan infrastruktur yang tidak merata.

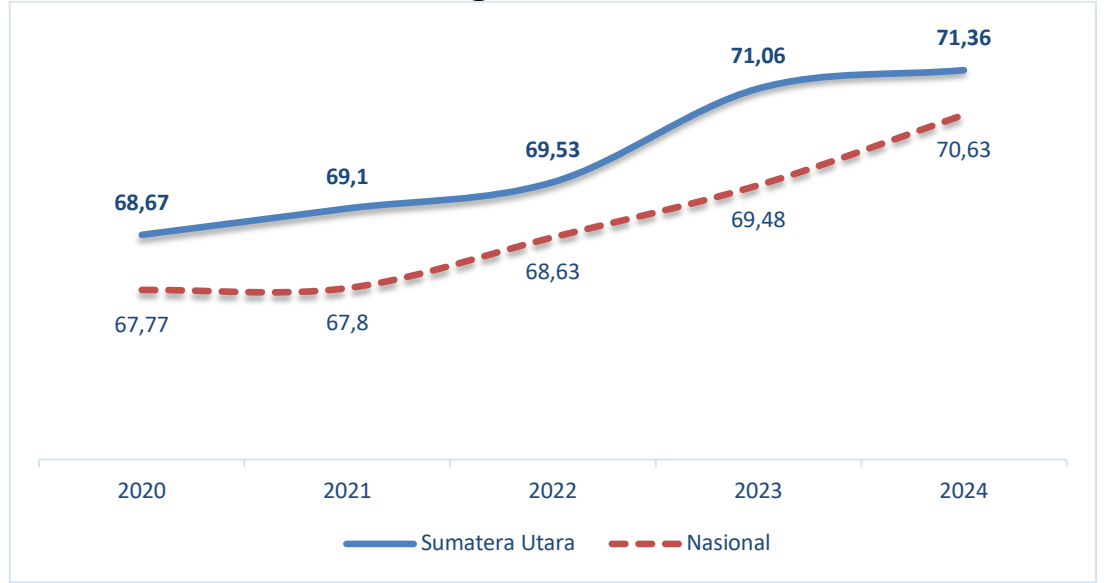
Tabel 2. 166. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB per kapita Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Lain di Pulau Sumatera

WILAYAH	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	0,71	1,35	2,78	2,83	3,30
Sumatera Utara	-1,84	1,12	3,28	3,60	3,67
Sumatera Barat	-2,33	1,85	2,88	3,18	2,95
Riau	6,03	1,87	3,13	2,84	2,21
Jambi	0,27	2,32	3,77	3,36	3,24
Sumatera Selatan	0,53	2,30	4,04	3,93	3,91
Bengkulu	-1,70	1,90	2,94	2,95	3,32
Lampung	-7,43	1,51	3,04	3,34	3,40
Kep. Bangka Belitung	-2,33	3,62	2,98	3,01	-0,52
Kep. Riau	4,77	1,85	3,50	3,63	3,54

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Provinsi Sumatera Utara menunjukkan pemulihan ekonomi yang kuat pasca pandemi, dengan pertumbuhan yang meningkat dari kontraksi -1,84% pada tahun 2020 menjadi 3,67% pada tahun 2024. Kinerja ini menempatkan Sumatera Utara sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi kedua di Pulau Sumatera pada tahun 2024, setelah Sumatera Selatan (3,91%). Pertumbuhan Sumatera Utara juga melampaui provinsi besar lain seperti Riau (2,21%), Sumatera Barat (2,95%), dan Kepulauan Riau (3,54%). Sebaliknya, beberapa provinsi masih mengalami pertumbuhan rendah atau bahkan negatif, seperti Kepulauan Bangka Belitung (-0,52%).

Gambar 2. 42. Perbandingan TPAK Provinsi Sumatera Utara



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Gambar tersebut menunjukkan perbandingan antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara dan Nasional dari tahun 2020 hingga 2024. TPAK Sumatera Utara mengalami kenaikan

yang konsisten dari 68,67 pada tahun 2020 menjadi 71,36 pada tahun 2024. Sementara itu, TPAK nasional juga menunjukkan tren peningkatan, meskipun dengan angka yang sedikit lebih rendah, dari 67,77 pada tahun 2020 menjadi 70,63 pada tahun 2024. Kenaikan TPAK di Sumatera Utara lebih signifikan dibandingkan dengan Nasional, yang menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam pembangunan manusia di wilayah tersebut.

- b. Belum Optimalnya Daya Saing Perekonomian Sumatera Utara
- Daya saing ekonomi Provinsi Sumatera Utara hingga tahun 2024 masih belum optimal, ditunjukkan oleh fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan ketidakmampuan mempertahankan posisi unggul secara konsisten dibandingkan provinsi lain di kawasan Sumatera.

Tabel 2. 167. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Lain di Pulau Sumatera

WILAYAH	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	-0,37	2,81	4,21	4,23	4,66
Sumatera Utara	-1,07	2,61	4,73	5,01	5,03
Sumatera Barat	-1,61	3,29	4,36	4,62	4,36
Riau	-1,13	3,36	4,55	4,21	3,52
Jambi	-0,51	3,70	5,12	4,67	4,51
Sumatera Selatan	-0,11	3,58	5,24	5,08	5,03
Bengkulu	-0,02	3,27	4,31	4,28	4,62
Lampung	-1,66	2,77	4,28	4,55	4,57
Kep. Bangka Belitung	-2,29	5,05	4,40	4,38	0,77
Kep. Riau	-3,80	3,43	5,06	5,16	5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 hingga 2024, Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan positif, khususnya setelah mengalami kontraksi sebesar -1,07 persen pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tercatat meningkat secara signifikan menjadi 2,61 persen pada tahun 2021 dan terus menguat hingga mencapai 5,03 persen pada tahun 2024. Meskipun demikian, capaian ini belum sepenuhnya mencerminkan keunggulan daya saing yang stabil jika dibandingkan dengan provinsi lain di kawasan Pulau Sumatera. Beberapa provinsi seperti Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi yang sebanding atau lebih tinggi pada tahun-tahun tertentu, yang menunjukkan adanya dinamika kompetitif regional yang ketat. Selain itu, fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang masih terjadi dari tahun ke tahun di Sumatera Utara mengindikasikan perlunya penguatan terhadap sektor-sektor penggerak utama ekonomi, peningkatan

efisiensi rantai pasok, serta optimalisasi investasi dan inovasi daerah. Oleh karena itu, untuk memperkuat daya saing ekonomi secara berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan transformasi struktural ekonomi yang berorientasi pada produktivitas, nilai tambah, dan ketahanan terhadap gejolak eksternal.

Daya Saing Perekonomian Sumatera Utara yang belum optimal dapat dilihat dari:

- 1) Industri Pengolahan Belum Berkembang Secara Maksimal. Sektor industri pengolahan berbasis produk unggulan daerah yang belum berkembang secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari stagnannya kontribusi industri pengolahan di Sumatera Utara meskipun kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan terus meningkat. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya hilirisasi industri sektor riil (pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan), serta tingginya biaya produksi antara lain bahan baku, bahan bakar, tenaga listrik dan gas, barang lainnya (di luar bahan baku/penolong) serta sewa gedung, mesin dan alat-alat. Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan Sumatera Utara mengalami degradasi dari 19,29% (2020) menjadi 18,36% (2024). Sementara itu, kontribusi lapangan usaha industri pengolahan di tingkat nasional mencapai 18,98% (2024), lebih tinggi dibandingkan capaian Sumatera Utara.
- 2) Ekonomi Kreatif Belum Menjadi Penggerak Ekonomi Lokal. Daya saing ekonomi kreatif yang masih rendah. Perkembangan ekonomi kreatif di Sumatera Utara belum mencapai tingkat kemajuan yang ideal, sektor ini juga memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi lokal. Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, kurangnya promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif, kelembagaan dan jaringan ekonomi kreatif yang belum maksimal, sistem pembiayaan yang belum memadai, dan kekurangan infrastruktur fisik dan nonfisik yang cukup. Selain itu, peraturan ekonomi kreatif, penghargaan masyarakat terhadap kreativitas, perlindungan hak kekayaan intelektual, jejaring kreatif, pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan warisan budaya lokal, dan standarisasi produk juga perlu ditingkatkan. Salah satu faktornya disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan UMKM dan IKM baru, dan kualitas produk IKM dan UMKM juga

masih tertinggal khususnya dalam hal pemenuhan standarisasi dan sertifikasi yang bersifat wajib seperti Izin Edar BPOM, PIRT, Halal, Batas Maksimal Residu Pestisida dan Batas Kontaminasi (melalui Sertifikasi Analisis atau COA) maupun standarisasi dan sertifikasi yang bersifat umum seperti *Good Agricultural Practices* (GAP), *Good Manufacturing Practices* (GMP), *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP), Standar Nasional Indonesia (SNI), ISO tertentu, serta terkait HKI (Hak Kekayaan Intelektual) seperti Merek dan Paten. Selain itu juga dalam pemenuhan standarisasi dan sertifikasi yang bersifat khusus seperti Organik, *Eco-friendly*, *Fair Trade*, atau *Vegan* masih sangat terbatas.

- 3) Sektor Pariwisata Masih Kurang Kompetitif. Daya saing sektor pariwisata yang rendah. Sektor pariwisata di Sumatera Utara menjadi salah satu penyokong perekonomian daerah dan berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah serta menyediakan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan masyarakat melalui usaha kecil dan menengah. Namun, kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dan PDRB belum optimal. Meskipun memiliki Kawasan Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas sekaligus bagian dari *UNESCO Global Geopark*. Rendahnya daya saing sektor Pariwisata ditunjukkan melalui kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir dan masih berada pada nilai yang cukup rendah, yaitu di bawah 3%. Hal ini disebabkan antara lain: (i) masih terbatasnya aksesibilitas, amenitas, atraksi, aktivitas, *ancillary* dan *available packages* di destinasi wisata; (ii) masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pariwisata serta kemitraan dalam pengembangan destinasi wisata, desa wisata dan usaha wisata; dan (iii) belum optimalnya penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi wisata, desa wisata dan usaha wisata. Selain itu, disrupsi dan perubahan preferensi pasar disebabkan oleh digitalisasi, teknologi, dan bencana. Karena transformasi digital yang tidak merata dan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai, potensi ekonomi kreatif belum dimanfaatkan dengan baik. Serta, belum ada ekosistem yang mendukung komersialisasinya, kurangnya inovasi dan pengembangan produk, *marketing digital*, serta kurangnya *branding* dan investasi

infrastruktur pariwisata sehingga terbatasnya akses ke pasar global. Jumlah Wisatawan Manca Negara (Wisman) yang berkunjung ke Sumatera Utara tahun 2024 mencapai 21.400 kunjungan. Sementara itu jumlah Wisman yang berkunjung ke Bali mencapai 6.333.360 kunjungan. Jumlah Wisman yang berkunjung ke Provinsi DI Yogyakarta di tahun yang sama mencapai 103.797 kunjungan dan jumlah Wisman yang berkunjung ke Kepulauan Riau tahun 2024 mencapai 195.632 kunjungan.

- 4) Investasi Sektor Riil Belum Menarik. Rendahnya investasi pada sektor riil seperti industri pengolahan (agroindustri), industri kemaritiman, industri makanan, dan industri manufaktur. Kondisi ini dapat dilihat dari lambatnya perkembangan investasi pada KEK Sei Mangkei, Kawasan Industri Kuala Tanjung, KIM Medan dan DPSP Danau Toba serta Kawasan Strategis Ekonomi lainnya. Pada tahun 2024, jumlah PMA dan PMDN Sumatera Utara mencapai Rp Rp48,27 triliun. Capaian ini masih jauh dibandingkan DKI Jakarta yang mencapai Rp241,9 triliun. Bahkan capaian realisasi PMA dan PMDN Sumatera Utara masih berada di bawah capaian Provinsi Riau sebesar Rp88,3 triliun dan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp70,92 triliun.
 - 5) Produksi sektor pertanian yang belum efisien. Salah satu permasalahan sektor pertanian di Sumatera Utara adalah masih dominannya penggunaan metode pertanian konvensional yang kurang efisien. Banyak petani masih mengandalkan cara tradisional dalam memantau lahan maupun melakukan penyemprotan tanaman, sehingga produktivitas tidak optimal. Kondisi ini semakin diperburuk dengan keterbatasan akses dan rendahnya adopsi terhadap teknologi modern, dimana banyak petani yang masih menggunakan peralatan tradisional sehingga produktivitas menjadi rendah. Dari total 45.134 kelompok tani, mayoritas masih berada pada kategori pemula sebanyak 32.115 kelompok, sementara hanya 83 kelompok yang sudah tergolong utama. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kapasitas dan kemandirian petani dalam mengelola lahan secara lebih maju dan efisien.
- c. Disparitas Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan Masih Sangat Tinggi. Walaupun tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

menunjukkan tren penurunan dan lebih bagus dari capaian nasional, namun jika dilihat berdasarkan tempat tinggal maka jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan lebih banyak jika dibandingkan daerah perkotaan. Beberapa faktor penyebabnya antara lain masih tingginya tingkat pengangguran, masih terbatasnya akses dan infrastruktur serta sektor-sektor ekonomi pedesaan yang masih didominasi oleh sektor primer dengan nilai tambah yang rendah. Selain itu tingginya beban pengeluaran mempengaruhi kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat miskin yang disebabkan masih tingginya harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan biaya perumahan.

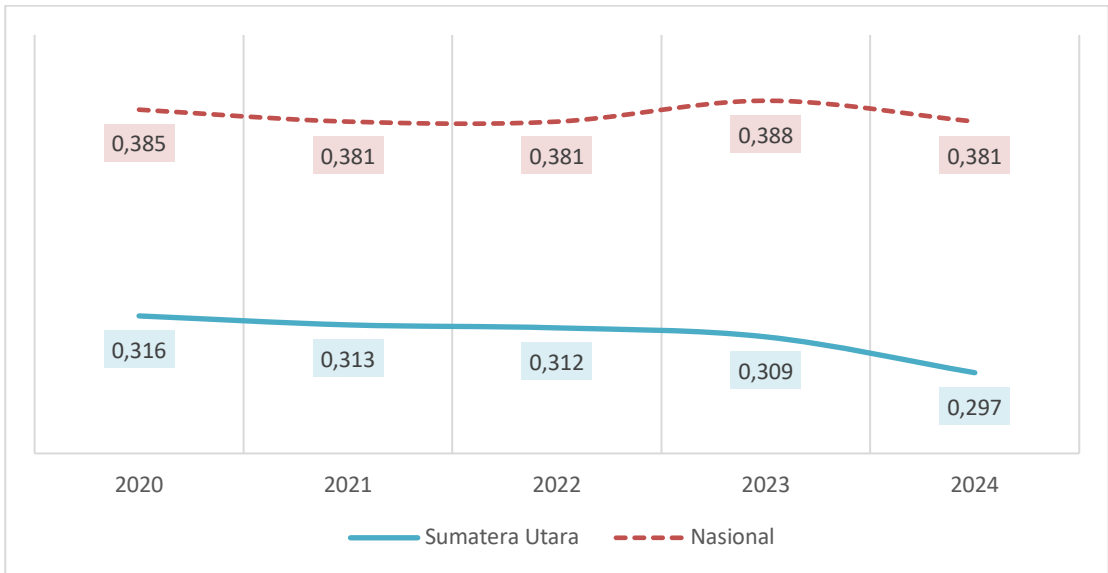
Tabel 2. 168. Perbandingan Rasio Gini Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Lain di Pulau Sumatera

WILAYAH	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	0,319	0,323	0,291	0,296	0,294
Sumatera Utara	0,316	0,313	0,312	0,309	0,297
Sumatera Barat	0,301	0,300	0,292	0,280	0,287
Riau	0,321	0,327	0,323	0,324	0,306
Jambi	0,316	0,315	0,335	0,343	0,315
Sumatera Selatan	0,338	0,340	0,330	0,338	0,331
Bengkulu	0,323	0,321	0,315	0,333	0,343
Lampung	0,320	0,314	0,313	0,324	0,301
Kep. Bangka Belitung	0,257	0,247	0,255	0,245	0,235
Kep. Riau	0,334	0,339	0,325	0,340	0,357

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren penurunan ketimpangan pendapatan dari 0,316 pada tahun 2020 menjadi 0,297 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera pada tahun 2024, Sumatera Utara berada di peringkat keempat terendah dalam hal ketimpangan, menunjukkan distribusi pendapatan yang relatif lebih merata. Provinsi dengan Rasio Gini terendah adalah Kepulauan Bangka Belitung (0,235), diikuti oleh Sumatera Barat (0,287), dan Riau (0,306). Sementara itu, provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi adalah Kepulauan Riau (0,357) dan Bengkulu (0,343). Secara keseluruhan, posisi Sumatera Utara mencerminkan kinerja yang cukup baik dalam pengurangan ketimpangan dibanding mayoritas provinsi lain di Sumatera.

Gambar 2. 43. Rasio Gini Provinsi Sumatera Utara dan Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar di atas menunjukkan perbandingan rasio Gini antara Sumatera Utara dan nasional dari 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa meskipun keduanya mengalami penurunan ketimpangan, Sumatera Utara memiliki rasio Gini yang lebih tinggi dibandingkan nasional sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2020, rasio Gini Sumut tercatat 0,316, sementara nasional berada di 0,385. Rasio ini menunjukkan ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Meskipun ada penurunan yang signifikan di Sumut, yang turun menjadi 0,297 pada 2024, rasio Gini nasional masih berada sedikit lebih tinggi pada 0,381.

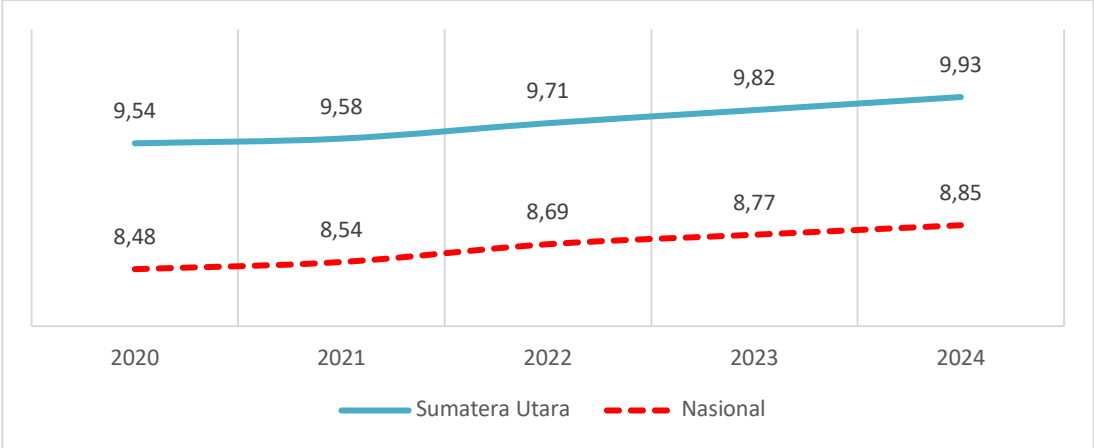
4. Permasalahan Kesejahteraan Sosial dan Budaya
- a. Pelayanan Kesehatan Belum Merata dan Berkualitas. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, baik kesehatan ibu dan anak, usia sekolah, usia produktif, lansia dan layanan Kesehatan mental. Pengendalian penyakit dan kapasitas ketahanan kesehatan juga belum optimal. Penyakit menular masih tinggi, penyakit tidak menular terus meningkat, penyakit tropis terabaikan belum dapat dieliminasi, adanya ancaman penyakit berpotensi wabah/kejadian luar biasa, dan perilaku hidup sehat belum membudaya. Selain itu, disparitas kapasitas sistem kesehatan terjadi di seluruh wilayah yang menyebabkan permasalahan pada kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat.
- Salah satu permasalahan kesehatan di Sumatera Utara adalah masih belum meratanya perlindungan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2025 sebanyak 15.688.142 jiwa, tercatat masih ada 1.124.548 jiwa yang belum

memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kondisi ini menunjukkan adanya GAP Non-JKN yang cukup signifikan, di mana sekitar 845.796 jiwa masih harus dijangkau untuk mencapai *target Universal Health Coverage (UHC)* sebesar 98%. Permasalahan ini diperburuk oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat jaminan kesehatan serta kendala pembiayaan dan pengelolaan dari pemerintah daerah, sehingga kelompok masyarakat miskin semakin rentan tidak mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan dan kesulitan mendapatkan layanan medis serta biaya pengobatan yang tinggi membuat masyarakat tidak jadi berobat sehingga kondisi penyakitnya semakin memburuk.

- b. Pelayanan Pendidikan Belum Merata dan Berkualitas. Permasalahan pendidikan antara lain belum meratanya akses pendidikan yang menyebabkan ketimpangan partisipasi pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi. Selain itu, kualitas pendidikan masih rendah yang disebabkan oleh sarana-prasarana pendidikan yang belum memadai, serta kuantitas, kualitas dan distribusi guru yang masih terbatas. Salah satu permasalahan pendidikan di Sumatera Utara yaitu masih adanya sekolah menengah negeri yang belum teraliri listrik dan belum memiliki akses internet. Berdasarkan data, terdapat 8 SMA dan 9 SMK yang belum mendapatkan aliran listrik, sementara 29 SMA, 34 SMK, dan 3 SLB belum memiliki akses internet. Kondisi ini tentu menghambat proses pembelajaran, terutama di era digital saat ini yang menuntut pemanfaatan teknologi informasi. Keterbatasan infrastruktur dasar tersebut tidak hanya mengurangi kualitas pembelajaran, tetapi juga memperlebar kesenjangan akses pendidikan antara sekolah di perkotaan dengan yang berada di daerah terpencil. Permasalahan pendidikan berikutnya di Sumatera Utara adalah masih banyaknya sekolah menengah negeri yang membutuhkan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Berdasarkan data, tercatat 30 SMA dan 67 SMK yang belum memiliki ruang kelas memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan sarana fisik yang berpotensi menghambat kelancaran proses belajar mengajar, terutama ketika jumlah siswa terus meningkat. Kekurangan ruang kelas juga dapat menyebabkan terjadinya sistem belajar bergilir atau penggunaan ruang darurat yang kurang layak, sehingga kualitas pembelajaran dan

kenyamanan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar menjadi kurang optimal. Permasalahan pendidikan berikutnya adalah masih tingginya biaya pendidikan walau sekolah negeri sudah menerapkan pendidikan gratis tetapi masih adanya biaya tambahan yang harus ditanggung orang tua seperti seragam, buku dan transportasi. Kemudian rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan juga memberikan dampak negatif bagi peningkatan pendidikan di Sumatera Utara, dimana masih ada keluarga di daerah tertentu yang lebih memprioritaskan anak-anaknya untuk bekerja dibandingkan untuk sekolah.

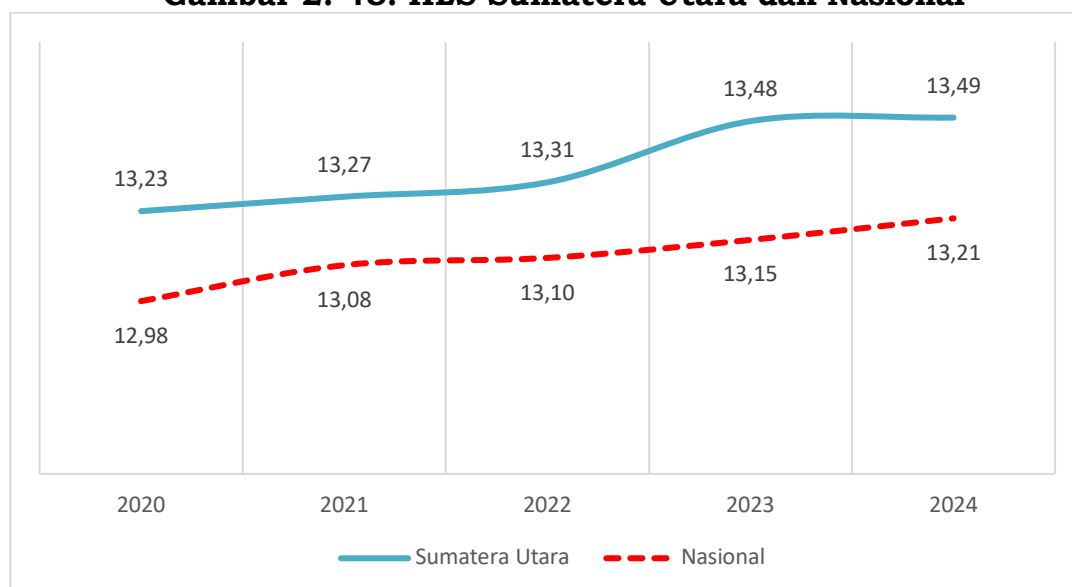
Gambar 2. 44. RLS Sumatera Utara dan Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) antara Sumatera Utara dan Nasional pada tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa Sumatera Utara mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan rata-rata nasional. Meskipun kedua skor menunjukkan tren kenaikan, Sumatera Utara menunjukkan peningkatan yang lebih tajam, dengan RLS di Sumatera Utara pada 2024 mencapai 9,93 tahun, sementara nasional hanya 8,85 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara berhasil meningkatkan akses dan kualitas pendidikan lebih cepat daripada rata-rata nasional. Kenaikan RLS nasional yang lebih lambat mengindikasikan adanya tantangan dalam pemerataan pendidikan di tingkat nasional. Peningkatan yang lebih cepat di Sumatera Utara dapat mencerminkan keberhasilan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan daerah tersebut.

Gambar 2. 45. HLS Sumatera Utara dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Harapan Lama Sekolah (HLS) antara Sumatera Utara dan Nasional dari tahun 2020 hingga 2024 memperlihatkan bahwa HLS di Sumatera Utara mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan rata-rata nasional. Pada tahun 2020, HLS di Sumatera Utara sebesar 13,23 tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan HLS nasional yang hanya 12,98 tahun. Pada tahun 2024, HLS Sumatera Utara mencapai 13,49 tahun, sementara HLS nasional hanya mencapai 13,21 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara berhasil mempercepat perkembangan pendidikan dengan peningkatan yang lebih pesat dibandingkan dengan tingkat nasional, yang mencerminkan keberhasilan kebijakan pendidikan di daerah tersebut. Sebaliknya, meskipun HLS nasional terus meningkat, laju kenaikannya lebih lambat, menunjukkan adanya tantangan dalam pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

- c. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Belum Tertangani Secara Inklusif. Belum optimalnya penurunan tingkat kemiskinan dan perlindungan dalam menjaga kesinambungan kesejahteraan, khususnya untuk penduduk rentan. Integrasi program bantuan sosial belum maksimal, terbatasnya layanan dan pengasuhan bagi kelompok rentan, belum meratanya kesempatan kerja dan berusaha bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan, serta rendahnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Sementara itu, penyelenggaraan program jaminan sosial belum optimal akibat rendahnya kepesertaan aktif dan literasi masyarakat serta program yang belum sepenuhnya konvergen memberikan perlindungan yang

inklusif khususnya bagi pekerja informal dan jaminan hari tua bagi seluruh penduduk. Untuk jaminan kesehatan, baru 11 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang sudah UHC 98% yaitu; Medan (98,91%), Tebing Tinggi (89,17%), Pematangsiantar (99,55%), Sibolga (100%), Gunungsitoli (98,78%), Toba (98,27%), Pakpak Bharat (100%), Nias Barat (98,78%), Nias Utara (100%), Humbang Hasundutan (98,76%) dan Langkat (98%). Sedangkan sisanya terdapat 22 Kab/Kota lagi yang belum UHC.

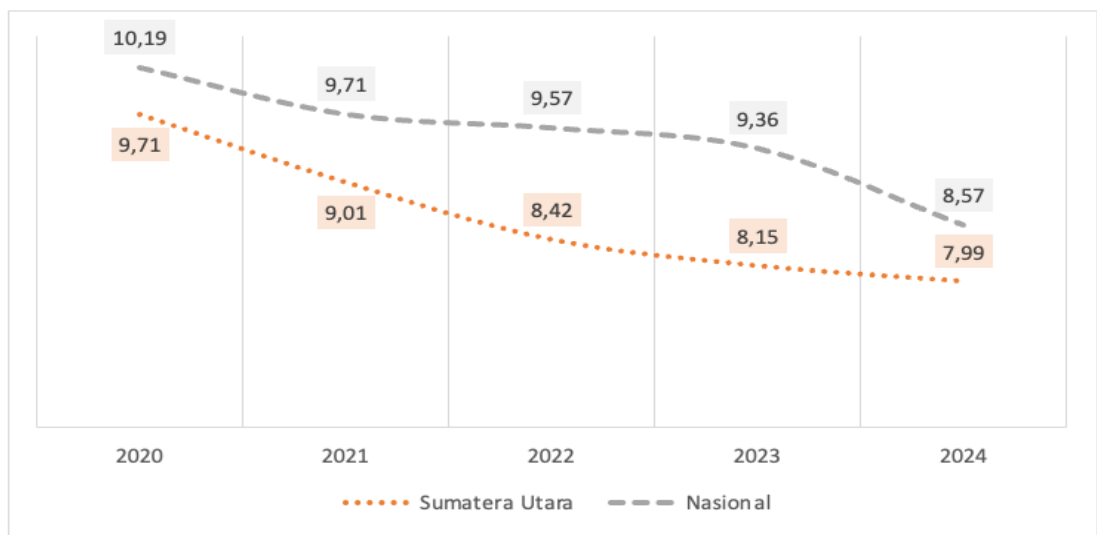
Tabel 2. 169. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Lain di Pulau Sumatera

WILAYAH	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	14,99	15,33	14,64	14,45	12,64
Sumatera Utara	9,71	9,01	8,42	8,15	7,99
Sumatera Barat	6,28	6,63	5,92	5,95	5,42
Riau	6,82	7,12	6,78	6,68	6,36
Jambi	7,58	8,09	7,62	7,58	7,26
Sumatera Selatan	12,66	12,84	11,9	11,78	10,51
Bengkulu	15,03	15,22	14,62	14,04	12,52
Lampung	12,34	12,62	11,57	11,11	10,62
Kep. Bangka Belitung	4,53	4,9	4,45	4,52	5,08
Kep. Riau	5,92	6,12	6,24	5,69	4,78

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Sepanjang 2020-2024, tingkat kemiskinan Sumatera Utara turun konsisten dari 9,71 % menjadi 7,99 %, lebih cepat daripada rata-rata penurunan Pulau Sumatera (dari 9,59 % ke 8,32 %). Pada 2024 posisi Sumut berada di urutan ke-6 terendah (atau ke-5 tertinggi) dari 10 provinsi—lebih baik daripada Aceh (12,64 %), Bengkulu (12,52 %), Sumatera Selatan (10,51 %) dan Lampung (10,62 %), namun masih tertinggal dari “kategori rendah kemiskinan” yakni Kep. Riau (4,78 %), Sumatera Barat (5,42 %), Kep. Bangka Belitung (5,08 %), serta Riau (6,36 %) dan Jambi (7,26 %). Dengan penurunan 1,72 poin persentase—setara Lampung dan hanya kalah besar dari Aceh, Bengkulu, dan Sumatera Selatan—Sumatera Utara berhasil berpindah dari sedikit di atas rata-rata Sumatera pada 2020 menjadi sedikit di bawah rata-rata pada 2024, menegaskan kinerjanya sebagai “middle performer” yang menuju kelompok provinsi berkemiskinan menengah.

Gambar 2. 46. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Sumatera Utara dan Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan gambar perbandingan tingkat kemiskinan Sumatera Utara dan nasional tahun 2020–2024, terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Sumatera Utara secara konsisten berada di bawah rata-rata nasional, meskipun keduanya menunjukkan tren penurunan yang positif. Pada tahun 2020, angka kemiskinan Sumut dan nasional sama-sama berada di 9,71% dan 10,19%, namun hingga tahun 2024 Sumut berhasil menurunkan tingkat kemiskinannya menjadi 7,99% dibanding nasional yang berada di 8,57%. Capaian Sumut yang lebih baik dapat dijelaskan oleh beberapa faktor seperti tingginya kontribusi sektor pertanian dan perkebunan rakyat yang memberikan lapangan kerja luas di pedesaan, efektivitas program perlindungan sosial di tingkat daerah, serta meningkatnya akses terhadap pendidikan dan layanan dasar.

- d. Demokrasi dan Kesenjangan Sipil. Belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sipil, belum meratanya informasi dan komunikasi publik, serta Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi. Kelembagaan demokrasi masih bersifat prosedural akibat politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu, serta belum optimalnya fungsi lembaga perwakilan.
- e. Nilai-nilai Keagamaan Inklusif Belum Terbangun Optimal. Belum maksimalnya kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan serta belum optimalnya penguatan dan penanaman nilai-nilai agama di masyarakat. Krisis Peran Keluarga dan Perlindungan Sosial Dasar. Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda, selain itu Pemenuhan hak dan perlindungan

anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia juga belum optimal.

- f. Ketimpangan Gender Masih Tinggi. Ketimpangan gender yang masih tinggi sehingga kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif menjadi sulit terwujud. Berdasarkan data Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dari tahun 2020 hingga 2024 yang ditampilkan pada tabel, Sumatera Utara secara konsisten menunjukkan angka IKG yang tergolong tinggi dibandingkan dengan beberapa provinsi lainnya di Indonesia. Nilai IKG Sumatera Utara berada pada kisaran 0,39 hingga 0,47 selama lima tahun terakhir, yang mencerminkan tingkat ketimpangan gender yang masih cukup signifikan. Angka ini mengindikasikan bahwa pembangunan sumber daya manusia di provinsi ini masih menghadapi tantangan serius dalam menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek, termasuk kesehatan reproduksi, partisipasi ekonomi, dan keterwakilan dalam pengambilan keputusan.

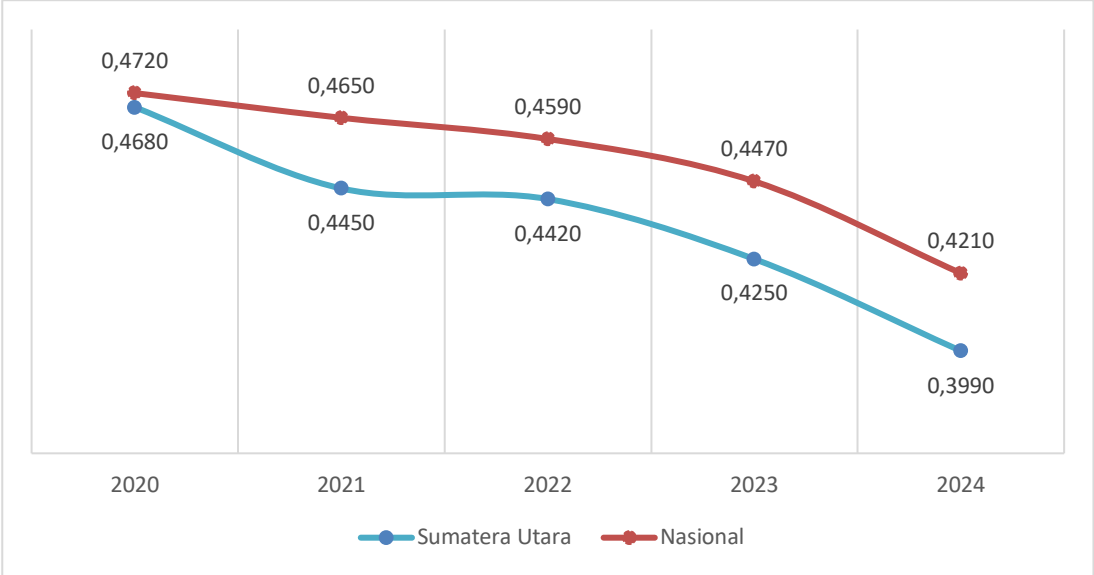
Tabel 2. 170. Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender

Provinsi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	0,514	0,503	0,504	0,489	0,459
Sumatera Utara	0,468	0,445	0,442	0,425	0,399
Sumatera Barat	0,503	0,455	0,430	0,425	0,381
Riau	0,503	0,477	0,473	0,458	0,471
Jambi	0,558	0,554	0,540	0,528	0,528
Sumatera Selatan	0,521	0,520	0,517	0,496	0,479
Bengkulu	0,523	0,520	0,478	0,469	0,384
Lampung	0,474	0,458	0,456	0,437	0,399
Kep. Bangka Belitung	0,559	0,527	0,497	0,490	0,379
Kepulauan Riau	0,416	0,387	0,395	0,348	0,309

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tingginya IKG di Sumatera Utara dapat dikaitkan dengan beberapa determinan struktural dan kultural. Pertama, masih adanya hambatan dalam akses terhadap pendidikan tinggi dan pekerjaan layak bagi perempuan dapat memperlebar kesenjangan dalam partisipasi ekonomi. Kedua, budaya patriarkal yang mengakar kuat di beberapa wilayah Sumatera Utara turut mempengaruhi rendahnya keterlibatan perempuan dalam ranah publik dan politik. Ketiga, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan informasi kesehatan seksual yang belum merata juga menjadi faktor penghambat terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan.

Gambar 2. 47. Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Sumatera Utara dan Nasional

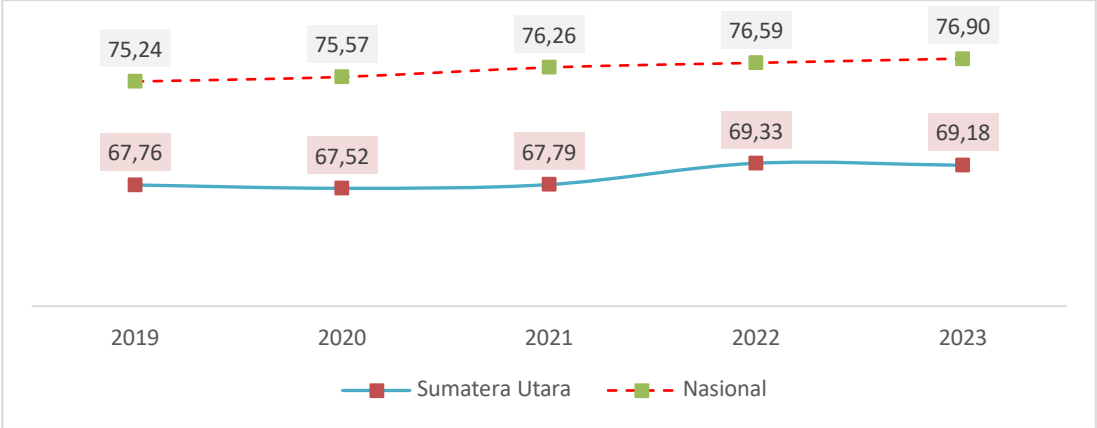


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2020 hingga 2024, Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren penurunan ketimpangan gender yang lebih signifikan dibandingkan dengan capaian nasional. IKG Sumatera Utara tercatat menurun dari 0,4680 pada tahun 2020 menjadi 0,3990 pada tahun 2024, atau mengalami penurunan sebesar 0,069 poin. Sementara itu, IKG nasional dalam periode yang sama mengalami penurunan dari 0,4720 menjadi 0,4210, atau sebesar 0,051 poin. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendorong pengarusutamaan gender, baik melalui peningkatan akses terhadap kesehatan reproduktif, pendidikan, partisipasi politik, maupun pemberdayaan ekonomi perempuan, telah memberikan hasil yang lebih progresif dibandingkan rata-rata nasional.

Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender antara Sumatera Utara dan Nasional dari tahun 2019 hingga 2023. Secara umum, baik Sumatera Utara maupun nasional menunjukkan tren peningkatan yang stabil, namun Sumatera Utara cenderung mengalami kenaikan yang lebih signifikan. Pada tahun 2019, Indeks Pemberdayaan Gender Sumatera Utara adalah 67,76, sementara nasional lebih tinggi, yaitu 75,24. Meskipun ada kesenjangan di awal periode, Sumatera Utara berhasil mempercepat laju peningkatannya, mencapai 69,33 pada 2022, sedangkan nasional hanya 76,59. Pada 2023, meskipun Sumatera Utara mencapai 69,18, selisih antara kedua angka ini masih tetap signifikan, dengan nasional berada di angka 76,90.

Gambar 2. 48. Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Sumatera Utara dan Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

- g. Budaya Lokal dan Jati Diri Mulai Tergeser. Degradasi karakter dan jati diri serta belum optimalnya implementasi kearifan lokal dan nilai budaya sebagai modal dasar pembangunan masyarakat. Ancaman negatif budaya asing berdampak kepada hilangnya karakter dan jati diri asli masyarakat Sumatera Utara. Selain itu belum optimalnya pemanfaatan nilai budaya dan kearifan lokal dalam mendukung pembangunan.
 - h. Akses keadilan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Tingginya angka kriminalitas ringan yang masih bisa diselesaikan tanpa melalui kalur pengadilan disertai dengan minimnya pemahaman masyarakat terkait restoratif justice serta masih sedikitnya lembaga atau mekanisme yang memfasilitasi penyelesaian konflik berbasis komunitas.
5. Permasalahan Infrastruktur dan Lingkungan
- a. Kesenjangan Infrastruktur Antardaerah Masih Tinggi. Pembangunan wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana di Sumatera Utara masih belum merata. Disparitas ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur merupakan salah satu penyebab ketimpangan antar daerah di Provinsi Sumatera Utara. Konektivitas wilayah yang masih belum terhubung dan kondisi jaringan jalan yang rusak, merupakan salah satu penyebab belum meratanya pembangunan di Sumatera Utara. Selanjutnya infrastruktur lain seperti irigasi juga belum optimal di beberapa wilayah.
 - i) Kurangnya Fasilitas Dasar Pendidikan dan Kesehatan. Berdasarkan perhitungan kebutuhan fasilitas pendidikan, diperkirakan pada tahun 2025 hingga 2035 fasilitas sekolah dasar (SD/MI dan SMP/MTs) masih mencukupi jumlah penduduk yang diproyeksikan. Dibutuhkan penambahan

menjadi 11.653 unit SD/MI dan 4.360 unit SMP/MTs di tahun 2045. Sementara itu, jumlah SMA/SMK/MA diperkirakan yang tersedia saat ini masih mencukupi hingga tahun 2025 dan dibutuhkan penambahan menjadi 3.454 unit di tahun 2045. Untuk fasilitas kesehatan, diproyeksikan dibutuhkan sekitar 152 puskesmas dan 607 puskesmas pembantu/balai pengobatan lingkungan di seluruh Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2045.

- ii) Sanitasi dan Pemukiman Layak Huni Masih Jadi Tantangan. Penyediaan infrastruktur dasar lainnya seperti penyediaan air minum, ditandai dengan cakupan layanan akses air minum layak tahun 2024 sebesar 92,94 persen di mana berada diatas capaian nasional sebesar 92,64. Sanitasi, ditandai dengan cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan tahun 2022 sebesar 77,69 persen di mana masih berada di bawah capaian nasional sebesar 86,03 persen. rumah layak huni, persampahan juga masih cukup rendah di beberapa wilayah di Sumatera Utara terutama di daerah afirmasi 3T. Masalah banjir juga belum dapat dituntaskan secara komprehensif dan infrastruktur yang belum tangguh bencana, rasio luas kawasan permukiman rawan banjir terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir pada tahun 2024 sebesar 52,92 persen dan diharapkan menjadi 64,51 persen pada tahun 2026 sesuai dengan dokumen RPA Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Permasalahan rumah layak huni di Sumatera Utara masih cukup serius, di mana ribuan keluarga masih tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Banyak rumah tidak memiliki akses air bersih, sanitasi memadai, maupun ventilasi yang baik, sehingga berisiko menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Selain itu, kondisi rumah yang tidak kokoh juga meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam seperti banjir, longsor, dan gempa. Situasi ini tidak hanya menurunkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperbesar risiko keselamatan dan memperparah masalah kemiskinan akibat keterbatasan akses terhadap hunian yang layak.

- iii) Listrik dan Energi Belum Merata. Layanan ketenagalistrikan Sumatera masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Hal ini ditandai dengan konsumsi listrik Provinsi Sumatera tahun 2022 sebesar 850-1.050 kWh di mana konsumsi tersebut berada dibawah rata-rata konsumsi listrik nasional pada tahun yang sama sebesar 1.173 kWh. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatera masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas.
- iv) Transportasi dan Konektivitas Belum Memadai. Pembangunan infrastruktur transportasi terutama di daerah Metropolitan Medan juga sangat dibutuhkan keberadaannya untuk menunjang mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Infrastruktur digital juga sangat dibutuhkan sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi masyarakat mengingat masih ditemukannya daerah yang masih belum terjangkau jaringan komunikasi. Keterbatasan sarana dan prasarana konektivitas antar daerah di wilayah daratan dan kepulauan. Pelabuhan yang menjadi simpul utama sebagai hub domestik memiliki kendala seperti keterbatasan kedalaman alur dan kolam pelabuhan. Pelabuhan belum dikembangkan secara optimal untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas di provinsi/kabupaten perairan. Kapasitas dan kualitas jaringan jalan lintas utama dan daerah belum memadai. Moda angkutan kereta api, belum memadai untuk angkutan barang seperti batu bara dan belum terhubung dengan simpul transportasi pelabuhan serta perkotaan di Sumatera. Transportasi sungai dan danau belum dikembangkan serta belum dimanfaatkan sebagai angkutan pendukung pariwisata. Rasio konektivitas Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 mempunyai nilai 0,604 dan diharapkan akan meningkat menjadi 0,683 pada tahun 2026 (sesuai dengan target dokumen RPA Tahun 2024-2026).
- v) Infrastruktur Digital Belum Menjangkau Semua Daerah. Masih terdapat wilayah tanpa jaringan komunikasi memadai, membatasi akses informasi, pelayanan publik, dan ekonomi digital. Masih terdapat cukup banyak desa di Sumatera Utara

yang belum dapat menerima koneksi internet atau blank spot. Pada tahun 2021, jumlah desa di Sumatera Utara yang belum memiliki Menara BTS tanpa Penerima Sinyal Seluler/internet mencapai 148 desa (Databoks, 2024). Masih tingginya jumlah desa blankspot menempatkan Sumatera Utara berada di peringkat ke-5 tertinggi dengan jumlah desa tidak dapat diakses internet. Adapun peringkat teratas lainnya adalah Provinsi Papua (3.079 desa), Papua Barat (552 desa), Kalimantan Barat (180 desa) dan Kalimantan Tengah (165 desa). Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan percepatan digitalisasi desa dan perdesaan sehingga dalam waktu lima tahun mendatang (2025-2029), seluruh desa di Sumatera Utara akan memiliki menara BTS yang terintegrasi dengan jaringan internet.

- vi) Perawatan dan perbaikan jalan provinsi yang terkendala anggaran. Salah satu permasalahan utama dalam perbaikan jalan provinsi di Sumatera Utara adalah keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga tidak mampu menutupi kebutuhan perbaikan seluruh ruas jalan yang mengalami kerusakan berat secara bersamaan. Kondisi ini semakin diperparah dengan faktor cuaca dan kondisi alam, seperti daerah rawan longsor dan banjir yang mempercepat kerusakan jalan serta meningkatkan biaya pemeliharaan. Selain itu, tingginya volume kendaraan berat yang melintas tanpa pengawasan memadai turut memperburuk kerusakan jalan, sehingga memperlambat mobilitas masyarakat, meningkatkan risiko kecelakaan, dan menambah biaya transportasi di berbagai sektor.
- vii) Permasalahan pembangunan jembatan di Sumatera Utara terletak pada masih banyaknya jembatan yang tidak layak pakai serta mengalami kerusakan akibat faktor usia maupun bencana alam, sehingga menghambat konektivitas antarwilayah. Selain itu, ketimpangan pembangunan infrastruktur juga masih menjadi tantangan, di mana beberapa daerah belum terlayani secara memadai oleh infrastruktur dasar, khususnya jembatan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan terisolasinya wilayah tertentu, menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi

barang, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal dan upaya penanganan bencana.

- viii) Permasalahan utama waduk dan jaringan irigasi di Sumatera Utara adalah banyaknya sistem irigasi yang mengalami kerusakan sehingga tidak berfungsi secara optimal. Kerusakan tersebut meliputi kondisi saluran yang pecah, tersumbat, maupun mengalami sedimentasi, yang pada akhirnya menghambat distribusi air ke lahan pertanian. Akibatnya, produktivitas pertanian menurun karena lahan tidak mendapatkan pasokan air yang cukup dan stabil, sehingga meningkatkan risiko gagal panen. Kondisi ini juga memperburuk dampak kekeringan serta perubahan iklim yang mengancam ketahanan pangan di daerah tersebut.

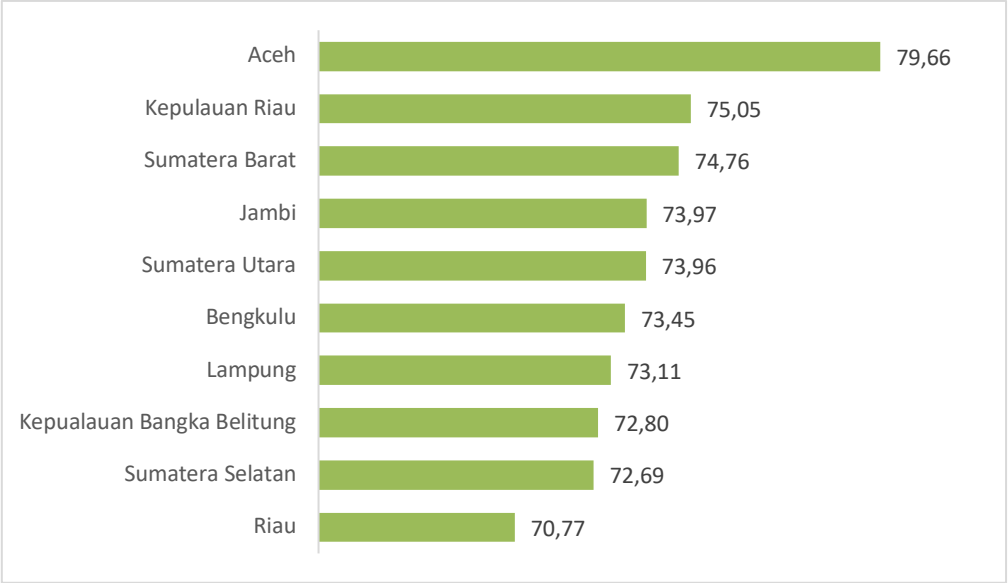
b. Belum Optimalnya Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup.

- i) Risiko Bencana Tinggi dan Penanggulangan Masih Lemah. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam masih rendah, ditandai dengan masih tingginya Indeks Risiko Bencana di Provinsi Sumatera Utara di tahun 2023 mencapai 140,65 dibandingkan dengan Indeks Risiko Bencana nasional sebesar 131,85.
- ii) Kualitas Lingkungan Hidup Masih Perlu Ditingkatkan. Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 memiliki nilai indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 73,96 poin (Baik). Pengelolaan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan adalah kualitas lahan dan air mengingat indeks kualitas lahan Provinsi Sumatera Utara berada pada nilai 48,69% (Kurang), dan indeks kualitas air dengan nilai 61,09 poin (Sedang). Namun untuk kualitas lingkungan lain seperti indeks kualitas udara (92,26 poin), Indeks kualitas air laut (70,82 poin) memiliki nilai yang baik.

Berdasarkan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Pulau Sumatera Tahun 2024, Provinsi Sumatera Utara berada di posisi lima dibandingkan dengan sepuluh provinsi lain di Pulau Sumatera. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara memerlukan perhatian dan upaya peningkatan yang berkelanjutan,

khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengendalian pencemaran lingkungan. Peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan aspek krusial untuk mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 2. 49. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Pulau Sumatera



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

- iii) Keanekaragaman Hayati Semakin Menurun. Lebih lanjut, permasalahan pembangunan yang dirasakan terkait pengelolaan SDA dan lingkungan hidup ialah menurunnya ketersediaan air, keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna, masalah limbah dan persampahan, Iklim dan cuaca ekstrim saat ini harus menjadi perhatian di sektor Pertanian, selain dari aktivitas manusia di darat, kerusakan juga muncul di daerah pesisir sebagai akibat pemanasan global seperti tingkat kerentanan wilayah pesisir Sumatera.

- 6. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
 - a. Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Membaik Namun Belum Optimal. Berdasarkan capaian indeks reformasi birokrasi, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 memperoleh kategori predikat kinerja indeks reformasi birokrasi adalah A dengan nilai 80,87 poin. Capaian ini merupakan momentum awal untuk menjalankan tata kelola pemerintah yang baik secara berkelanjutan. Namun, untuk indikator tata kelola yang lain seperti SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan IPP (Indeks Pelayanan Publik), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih perlu terus ditingkatkan. Nilai SAKIP Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 mencapai 68,93 atau kategori

Baik (B). Sedangkan nilai IPP Provinsi Sumatera Utara sebesar 3,9. Walaupun dalam indikator Tata Kelola Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah semakin membaik, namun capaiannya dibandingkan dengan Provinsi Riau, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Lampung masih relatif tertinggal. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau mencapai 83,97, Provinsi Bangka Belitung mencapai 84,37 dan Provinsi Lampung mencapai 82,34. Demikian juga untuk Capaian SAKIP, provinsi di Pulau Sumatera masih relatif lebih tinggi yaitu Provinsi Riau mencapai 71,22, Provinsi Bangka Belitung mencapai 72,92 dan Sumatera Barat mencapai 79,98.

- b. Pelayanan Publik Belum Sepenuhnya Berbasis Digital dan terintegrasi, dimana masih banyak layanan yang masih menggunakan sistem manual sehingga memakan waktu dan tidak efisien serta layanan digital yang ada belum sepenuhnya dioptimalkan dan terintegrasi. Di samping itu, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik masih perlu terus ditingkatkan. Indeks SPBE Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 mencapai kinerja sebesar 3,90 (Sangat Baik), namun capaian ini masih relatif lebih rendah dibandingkan Provinsi Lampung sebesar 4,09, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,11. Kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat dan aparatur dalam penggunaan dan pemanfaatan layanan digital serta keterampilan teknologi.
- c. Keterbatasan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia desa menjadi hambatan utama dalam optimalisasi pemanfaatan data, seperti Indeks Desa Membangun (IDM) yang akan diintegrasikan menjadi Indeks Desa, yang seharusnya menjadi instrumen penting dalam perencanaan berbasis data. Di samping itu, banyaknya aplikasi dari kementerian/lembaga yang masuk ke desa tanpa adanya integrasi atau simplifikasi turut menambah beban administratif aparatur desa. Lemahnya manajemen pemerintahan, belum optimalnya penataan aset desa, serta minimnya pembinaan aparatur dan kelembagaan desa, memperkuat urgensi perlunya penguatan sistem tata kelola secara menyeluruh. Ketidakjelasan batas wilayah desa juga masih menjadi sumber konflik yang berimplikasi pada ketidakpastian administrasi dan perencanaan wilayah.
Dalam konteks tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memandang bahwa reformasi tata kelola pemerintahan desa

merupakan isu pembangunan strategis yang harus menjadi prioritas pada periode perencanaan tahun 2025–2029. Upaya perbaikan diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa, penyempurnaan tata administrasi yang akuntabel, pembaruan dan validasi database desa, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes dan BUMDes Bersama yang akan diselaraskan dengan pembentukan Koperasi Desa. Selanjutnya, pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa, peningkatan kerja sama antardesa, serta penyelarasan aplikasi digital melalui formulasi kebijakan lintas sektor juga menjadi aspek penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan desa akan menjadi fondasi utama dalam mempercepat pembangunan desa dan mengurangi kesenjangan antarwilayah di Provinsi Sumatera Utara.

2.3.2. Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan Provinsi Sumatera Utara mempertimbangkan pada isu global, isu nasional, dan isu-isu pembangunan di Provinsi Sumatera Utara yang perlu direspons oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

1. Isu Global

Isu global yang dipertimbangkan dalam pembangunan Sumatera Utara ialah sebagai berikut:

a. Krisis Lingkungan Global (*Triple Planetary Crisis*)

Krisis Lingkungan Global, yang dikenal sebagai *Triple Planetary Crisis*, mencakup tiga tantangan utama yang saling terkait: perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi lingkungan. Ketiga krisis ini saling memperkuat dampaknya, menciptakan ancaman serius terhadap keberlanjutan kehidupan di Bumi.

Perubahan Iklim menjadi salah satu aspek paling menonjol dari krisis ini. Emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penggundulan hutan, menyebabkan peningkatan suhu global. Hal ini berdampak pada pola cuaca ekstrem, kenaikan permukaan laut, dan ancaman terhadap ekosistem yang ada.

Hilangnya Keanekaragaman Hayati juga menjadi perhatian utama. Perubahan iklim mempercepat kepunahan spesies karena banyak organisme tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap kondisi

lingkungan yang berubah. Selain itu, aktivitas manusia seperti perburuan liar, deforestasi, dan perubahan penggunaan lahan menyebabkan hilangnya habitat alami flora dan fauna.

Polusi Lingkungan, baik udara, air, maupun tanah, memperburuk kondisi ekosistem dan kesehatan manusia. Polusi udara, misalnya, berkontribusi terhadap penyakit pernapasan dan kardiovaskular, sementara polusi air dan tanah mengancam ketersediaan air bersih dan keamanan pangan.

Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam menghadapi krisis ini. Pada tahun 2024, pemerintah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 147,61 juta ton CO₂, melampaui target yang ditetapkan sebesar 142 juta ton CO₂. Selain itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia mencapai skor 72,54 poin pada tahun 2023, menunjukkan peningkatan kualitas lingkungan secara nasional. Diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan kebijakan iklim, pengelolaan polusi, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan komunitas internasional sangat penting untuk mengatasi krisis ini secara efektif.

Triple Planetary Crisis menjadi tantangan besar sekaligus peluang bagi Sumatera Utara untuk mentransformasikan model pembangunan menuju keberlanjutan jangka panjang. Dengan merancang RPJMD 2025–2029 yang mengintegrasikan mitigasi perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengendalian polusi, Sumatera Utara dapat menjadi pelopor pembangunan hijau di wilayah barat Indonesia. Hal ini membutuhkan komitmen politik, pembiayaan inovatif, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola masa depan lingkungan hidup provinsi ini.

b. Ketidakpastian dan Ketegangan Geopolitik Global

Ketidakpastian dan ketegangan geopolitik global telah menjadi faktor dominan yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan internasional pada tahun 2025. Konflik bersenjata seperti perang Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah, termasuk konflik Israel-Hamas, telah mengganggu pasokan energi dan pangan global, menyebabkan lonjakan harga dan inflasi di berbagai negara. Selain itu, rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, terutama terkait Selat Taiwan, semakin memperburuk ketegangan regional dan mengancam stabilitas jalur perdagangan internasional.

Dampak dari ketegangan ini tidak hanya terbatas pada aspek geopolitik, tetapi juga berdampak langsung pada ketahanan energi dan pangan nasional. Krisis energi yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah dan ketergantungan pada impor bahan bakar fosil menimbulkan risiko terhadap keamanan energi Indonesia. Demikian pula, gangguan pada rantai pasok global akibat konflik bersenjata dan proteksionisme berdampak pada stabilitas makroekonomi dan ketahanan pangan nasional. Dalam menghadapi dinamika global yang kompleks ini, Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk memperkuat posisi dan pengaruhnya di kancah internasional. Menurut Lowy Institute Asia Power Index 2024, Indonesia mengalami peningkatan skor sebesar 2,9 poin, menjadikannya negara dengan peningkatan terbesar dalam indeks tersebut. Peningkatan ini mencerminkan upaya Indonesia dalam memperkuat sumber daya masa depan dan kapasitas diplomasi ekonomi. Selain itu, Indonesia juga menempati peringkat ke-13 dalam Global Firepower Index 2024, menunjukkan peningkatan kapasitas militer sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional.

Dalam konteks diplomasi ekonomi, Indonesia aktif menjalin kerja sama dengan berbagai negara untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Langkah ini sejalan dengan strategi Indonesia untuk mendiversifikasi mitra ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada satu blok kekuatan global. Ketegangan geopolitik global menuntut Sumatera Utara untuk mengadopsi pendekatan pembangunan yang adaptif, resilien, dan berorientasi geopolitik. Periode 2025–2029 menjadi momen penting untuk mengonsolidasikan ketahanan pangan dan energi, memperkuat ekonomi berbasis nilai tambah lokal, serta memperluas peran aktif dalam diplomasi ekonomi lintas negara. Dengan strategi yang tepat dan sinergi antar pemangku kepentingan, Sumatera Utara dapat menjadikan krisis global sebagai momentum transformasi menuju provinsi yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing tinggi dalam tataran regional dan internasional.

c. Transformasi Teknologi dan Kompetisi Ekonomi Digital

Transformasi teknologi dan kompetisi ekonomi digital telah menjadi pilar utama dalam dinamika global saat ini. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK), termasuk adopsi kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), dan komputasi awan, telah mengubah lanskap ekonomi dan sosial di berbagai negara. Negara-negara berlomba untuk

meningkatkan daya saing digital mereka guna memperoleh keunggulan dalam ekonomi berbasis pengetahuan.

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi besar, telah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan daya saing digitalnya. Menurut laporan East Ventures – Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2023, skor daya saing digital Indonesia meningkat dari 27,9 pada 2020 menjadi 38,5 pada 2023, menunjukkan tren positif dalam pengembangan infrastruktur digital, literasi digital, dan inovasi teknologi di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan peningkatan peringkat daya saing digital Indonesia dari posisi 43 pada 2023 menjadi 40 pada 2029, sebagai bagian dari upaya strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Namun, peningkatan konektivitas digital juga membawa tantangan baru dalam bentuk ancaman keamanan siber. Serangan siber yang semakin kompleks dan canggih menuntut negara untuk memperkuat sistem pertahanan digitalnya. Indonesia menghadapi peningkatan signifikan dalam insiden serangan siber, dengan sekitar 42.000 serangan per hari, menjadikannya salah satu target utama di kawasan Asia Tenggara. Sebagai respons, pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menginisiasi pembentukan 121 Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber (Computer Security Incident Response Teams/CSIRT) dan meluncurkan program Intelijen Ancaman Siber (Cyber Threat Intelligence Program) untuk memperkuat ketahanan siber nasional. Peningkatan kapasitas keamanan siber juga tercermin dalam peringkat Indonesia dalam National Cyber Security Index (NCSI), di mana Indonesia naik ke posisi ke-49 secara global dengan skor 63,64 pada 2023, meningkat dari peringkat ke-83 pada tahun sebelumnya. Meskipun demikian, tantangan masih ada, termasuk kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang keamanan siber, mengatasi kekurangan tenaga ahli di bidang ini, dan memperkuat kerangka regulasi yang ada.

Dalam konteks global, transformasi teknologi dan kompetisi ekonomi digital menuntut negara untuk tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur dan adopsi teknologi, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, penguatan regulasi, dan kolaborasi internasional. Indonesia, melalui berbagai inisiatif strategis dan kebijakan yang terintegrasi, berupaya untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga sebagai inovator dan pemimpin dalam ekonomi digital global.

Transformasi digital global bukan sekadar tren teknologi, melainkan instrumen kunci dalam membentuk daya saing dan ketahanan daerah. Bagi Sumatera Utara, periode 2025–2029 menjadi masa penting untuk memperkuat infrastruktur digital, mendorong inovasi lokal, meningkatkan kapasitas SDM, dan melindungi masyarakat dari ancaman digital. Dengan strategi yang terintegrasi dan kolaboratif, Sumatera Utara memiliki peluang besar untuk menjelma menjadi pusat pertumbuhan ekonomi digital baru di wilayah barat Indonesia, sekaligus berkontribusi dalam visi nasional menuju negara maju berbasis ekonomi pengetahuan.

d. Ketidaksetaraan Sosial dan Mobilitas Penduduk Secara Global

Ketidaksetaraan sosial dan mobilitas penduduk secara global merupakan isu yang semakin kompleks di era globalisasi, dengan dampak signifikan terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia. Mobilitas tenaga kerja lintas negara, baik yang terampil maupun tidak, telah meningkat seiring dengan kebutuhan pasar global. Namun, peningkatan ini tidak selalu diiringi dengan perlindungan hak-hak pekerja migran, yang sering kali menghadapi diskriminasi, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Ketidaksetaraan sosial dan mobilitas penduduk global telah menjadi tantangan yang semakin kompleks di era modern, dengan dampak signifikan terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu manifestasi nyata dari dinamika ini adalah kedatangan pengungsi Rohingya ke wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Aceh.

Menurut data dari UNHCR, pada tahun 2023, Indonesia mencatat kedatangan 2.288 pengungsi Rohingya melalui jalur laut, menjadikannya tahun dengan jumlah kedatangan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini berlanjut pada tahun 2024, di mana hingga Mei, tercatat 15 kapal membawa 2.026 pengungsi Rohingya tiba di Aceh dan Sumatera Utara. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak, yang menyoroti kerentanan kelompok ini dalam situasi pengungsian.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menangani situasi ini, termasuk bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM dalam menyediakan tempat penampungan sementara dan bantuan kemanusiaan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan integrasi sosial pengungsi dan mencegah konflik dengan masyarakat lokal. Selain itu, Indonesia juga menghadapi tekanan untuk menyelaraskan kebijakan nasionalnya dengan standar internasional terkait

perlindungan pengungsi, meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

Dalam konteks yang lebih luas, isu pengungsi Rohingya di Indonesia mencerminkan ketidaksetaraan global dalam menangani krisis pengungsian. Negara-negara berkembang sering kali menjadi tujuan utama bagi pengungsi, meskipun memiliki kapasitas terbatas untuk menampung dan memberikan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional yang lebih kuat untuk berbagi tanggung jawab dan memastikan bahwa hak-hak pengungsi dihormati di mana pun mereka berada.

Fenomena mobilitas penduduk global dan pengungsi internasional seperti Rohingya bukan lagi isu nasional semata, melainkan telah menjadi bagian dari tantangan pembangunan daerah, khususnya Sumatera Utara. Oleh karena itu, RPJMD 2025–2029 perlu mengadopsi pendekatan inklusif dan berbasis hak asasi manusia untuk menangani tantangan ini. Dengan merancang kebijakan yang adaptif, membangun kapasitas layanan dasar, serta menjalin kerja sama multilateral, Sumatera Utara dapat tampil sebagai wilayah yang tidak hanya responsif terhadap krisis kemanusiaan global, tetapi juga menjaga harmoni sosial dan martabat kemanusiaan dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

e. Ketergantungan Energi Fosil dan Transisi Energi

Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil, seperti batu bara dan minyak bumi, telah menimbulkan tantangan serius dalam konteks perubahan iklim global dan ketahanan energi nasional. Sektor energi menyumbang lebih dari 30% emisi gas rumah kaca (GRK) nasional, menjadikannya kontributor utama terhadap pemanasan global. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius dalam transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.

Salah satu langkah strategis adalah peningkatan porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional. Porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer di Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2020 hingga 2024, dengan nilai sebesar 14,34% pada 2020, meningkat menjadi 42,04% pada 2024. Namun, pencapaian ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kebutuhan investasi besar dan pengembangan infrastruktur yang memadai.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan biofuel sebagai alternatif energi bersih. Program biodiesel B35 telah diterapkan secara

nasional pada Agustus 2023, dengan rencana peningkatan menjadi B40 pada tahun 2025. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan konsumsi biodiesel hingga 13 miliar liter, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan mendukung industri kelapa sawit domestik.

Efisiensi energi juga menjadi prioritas nasional dalam upaya menurunkan intensitas energi dan emisi GRK. Pemerintah menargetkan penurunan konsumsi energi final sebesar 17% dibandingkan skenario business as usual pada tahun 2025, serta penurunan intensitas energi final sebesar 1% per tahun. Implementasi program efisiensi energi di sektor industri dan transportasi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi nasional. Namun, transisi energi ini tidak lepas dari tantangan, termasuk kebutuhan investasi yang besar, resistensi dari industri energi fosil, dan perlunya dukungan kebijakan yang konsisten. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan keberhasilan transisi menuju sistem energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan berketahanan.

Transisi energi dari fosil menuju sistem yang bersih dan berkelanjutan menuntut Sumatera Utara untuk menyusun agenda pembangunan yang holistik, berbasis potensi lokal, dan terintegrasi dengan kebijakan nasional. Periode 2025–2029 menjadi momentum penting untuk memperkuat investasi EBT, efisiensi energi, biofuel, serta pembangunan energi berbasis komunitas. Dengan kepemimpinan daerah yang progresif dan partisipasi multipihak, Sumatera Utara berpeluang menjadi salah satu provinsi terdepan dalam mewujudkan ekonomi hijau dan ketahanan energi di Indonesia.

f. Ketidakpastian Ekonomi dan Perdagangan Global

Ketidakpastian ekonomi dan perdagangan global telah menjadi tantangan signifikan bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Salah satu faktor utama yang memicu ketidakpastian ini adalah kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pada April 2025, Trump memberlakukan tarif dasar sebesar 10% untuk hampir semua barang impor ke AS, dengan tambahan tarif hingga 32% untuk negara-negara tertentu, termasuk Indonesia. Langkah ini memicu ketegangan dagang internasional dan memperburuk kondisi perdagangan global.

Perang dagang antara negara-negara besar, seperti AS dan China, telah menciptakan ketidakpastian yang luas dalam ekonomi global. Ketegangan

ini menyebabkan gangguan pada rantai pasokan internasional, peningkatan biaya produksi, dan penurunan investasi global. Menurut laporan UNCTAD, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat menjadi 2,3% pada tahun 2025 akibat dampak perang dagang .

Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia telah mengadopsi strategi diplomasi ekonomi yang adaptif dan strategis. Pemerintah berupaya memperkuat kerja sama internasional melalui forum multilateral seperti WTO, G20, dan APEC, serta menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara mitra dagang utama . Selain itu, Indonesia juga fokus pada diversifikasi pasar ekspor dan peningkatan daya saing produk domestik untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional yang terdampak oleh kebijakan proteksionis.

Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Dengan diplomasi ekonomi yang proaktif dan kebijakan perdagangan yang fleksibel, Indonesia berupaya mengatasi tantangan global dan memanfaatkan peluang yang muncul dalam dinamika perdagangan internasional. Ketidakpastian ekonomi dan perdagangan global tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga momentum transformasi ekonomi Sumatera Utara ke arah yang lebih mandiri, tangguh, dan berdaya saing tinggi. Dalam periode pembangunan 2025–2029, penting bagi Sumatera Utara untuk melakukan reorientasi strategi perdagangan, mendorong inovasi produk ekspor, dan memperkuat posisi dalam jaringan perdagangan internasional baru. Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan mitra global akan menjadi kunci dalam menghadapi gejolak eksternal secara konstruktif dan berkelanjutan.

g. Peningkatan Risiko Bencana Global

Peningkatan risiko bencana global, baik yang bersifat alamiah maupun non-alamiah, telah menjadi tantangan signifikan bagi ketahanan nasional Indonesia. Perubahan iklim telah menyebabkan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan meningkat secara signifikan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, terjadi lebih dari 3.000 kejadian bencana di Indonesia, dengan dampak yang meluas pada sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia telah memperkuat sistem deteksi dini dan respons krisis melalui pengembangan teknologi dan peningkatan

kapasitas institusi terkait. Implementasi sistem peringatan dini berbasis teknologi, seperti Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS), telah ditingkatkan untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan cepat kepada masyarakat. Selain itu, pelatihan dan simulasi bencana secara rutin dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan aparat terkait.

Dalam konteks keamanan non-tradisional, Indonesia menunjukkan kemajuan dalam penanggulangan terorisme. Menurut *Global Terrorism Index* (GTI) 2024, Indonesia berada pada peringkat ke-31 dengan kategori dampak terorisme rendah, mencerminkan efektivitas strategi nasional dalam mengurangi ancaman terorisme. Namun, tantangan tetap ada dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

Indeks *Fragile States Index* (FSI) 2024 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-102 dengan skor 63,7, menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, skor ini masih mencerminkan kerentanan dalam aspek-aspek tertentu seperti tekanan demografis dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan ketahanan institusional dan sosial.

Keamanan maritim juga menjadi perhatian utama, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas. Ancaman seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, dan pelanggaran wilayah perairan memerlukan respons yang komprehensif. Badan Keamanan Laut (Bakamla) telah meluncurkan Indeks Keamanan Laut Indonesia untuk memantau dan meningkatkan keamanan maritim secara sistematis.

Dalam konteks pembangunan lima tahunan 2025–2029, Sumatera Utara harus menjadikan isu ketahanan bencana, keamanan maritim, dan stabilitas sosial sebagai agenda lintas sektor. Upaya membangun ketangguhan provinsi tidak dapat dilakukan secara sektoral semata, tetapi harus melalui integrasi perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan keamanan manusia (*human security*). Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra internasional, Sumatera Utara dapat menjadi provinsi yang lebih adaptif, aman, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika risiko global yang semakin kompleks.

2. Isu Strategis Nasional

Isu nasional yang dipertimbangkan dalam pembangunan jangka menengah Sumatera Utara ialah sebagai berikut:

a. Rendahnya Produktivitas

Produktivitas nasional Indonesia masih berada pada tingkat yang rendah di tengah meningkatnya persaingan global. Mengacu pada laporan *Asian Productivity Organization* (2024), pertumbuhan rata-rata produktivitas Indonesia yang diukur melalui indikator *Total Factor Productivity* (TFP) selama periode 2015–2022 hanya mengalami peningkatan sebesar 60 basis poin dibandingkan periode sebelumnya (2010–2015), yakni dari -0,9 persen menjadi -0,3 persen. Capaian ini menunjukkan perbaikan yang sangat terbatas dan masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain yang pernah berada pada tahap transisi menuju negara maju. Sebagai perbandingan, Korea Selatan mampu mencatat pertumbuhan TFP sebesar 1,78 persen selama periode 1971–1995, sedangkan Tiongkok mencatat 2,12 persen pada kurun waktu 2005–2022.

Rendahnya produktivitas di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, antara lain masih rendahnya kualitas sumber daya manusia—terutama pada kelompok perempuan, rendahnya produktivitas sektor ekonomi, serta kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang belum memadai. Selain itu, kelembagaan yang belum kuat, seperti lemahnya sistem insentif, regulasi yang belum mendukung transformasi ekonomi, dan rendahnya kepastian hukum, turut memperburuk kondisi produktivitas nasional.

Secara khusus, produktivitas tenaga kerja perempuan masih tertinggal karena lingkungan kerja yang belum ramah gender. Hambatan utama yang dihadapi perempuan untuk masuk dan bertahan di pasar kerja antara lain adalah norma sosial budaya yang membebankan tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak, kurangnya fleksibilitas jam kerja, serta minimnya akses terhadap layanan penitipan anak (*daycare*) yang berkualitas dan terjangkau.

Dampak dari rendahnya produktivitas ini terlihat pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada periode 2001–2010, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai rata-rata 5,7 persen. Namun, angka ini melambat menjadi 4,7 persen pada periode 2010–2015. Meskipun terjadi perbaikan pada tahun-tahun berikutnya, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,0 persen selama 2015–2019 dan mencapai 5,05 persen pada tahun 2023, pertumbuhan tersebut tetap berada dalam kisaran yang stagnan.

Kondisi ini mencerminkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia, yang menyebabkan kesulitan untuk mencapai percepatan pertumbuhan yang lebih tinggi secara berkelanjutan. Untuk keluar dari stagnasi ini, peningkatan produktivitas harus menjadi agenda prioritas nasional dalam jangka menengah dan panjang.

Rendahnya pertumbuhan produktivitas nasional menjadi refleksi bahwa Sumatera Utara, sebagai bagian penting dari perekonomian Indonesia, harus mengadopsi pendekatan pembangunan lima tahunan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas total faktor (TFP). Agenda pembangunan provinsi perlu diarahkan untuk mendorong inovasi, memperkuat SDM, mengakselerasi industrialisasi berbasis lokal, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan. Hanya dengan strategi menyeluruh dan terintegrasi, Sumatera Utara dapat berkontribusi dalam mendorong ekonomi Indonesia keluar dari jebakan pertumbuhan stagnan menuju pembangunan yang berkelanjutan dan kompetitif di tingkat global.

b. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan laporan *Asian Productivity Organization* (2024), tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) per pekerja pada tahun 2022 masih tergolong rendah, yaitu sebesar US\$28.600 per pekerja. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan dengan Amerika Serikat yang mencapai US\$149.100 per pekerja, serta di bawah rata-rata kawasan ASEAN yang tercatat sebesar US\$40.200 per pekerja.

Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia ini tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang belum optimal. Salah satu indikatornya terlihat dari hasil *Programme for International Student Assessment* (PISA) tahun 2022, di mana skor rata-rata siswa Indonesia untuk seluruh aspek (membaca, matematika, dan sains) hanya sebesar 369,3. Skor ini menurun dari tahun 2018 yang berada di angka 382, dan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan rata-rata skor negara-negara anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang mencapai 488,33.

Tantangan pembangunan manusia unggul juga tercermin dari rendahnya daya saing tenaga kerja Indonesia, khususnya terkait kualifikasi pendidikan. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus 2024, diketahui bahwa 52,32% angkatan kerja

merupakan lulusan pendidikan rendah (maksimal SMP/MTs atau sederajat), 34,82% merupakan lulusan pendidikan menengah (SMA/SMK atau sederajat), dan hanya 12,86% yang memiliki pendidikan tinggi.

Rendahnya kualifikasi pendidikan ini berimplikasi langsung terhadap struktur pasar tenaga kerja nasional. Hanya sekitar 41,23% pekerja yang terserap di bidang pekerjaan dengan keterampilan menengah hingga tinggi, sementara sisanya berada pada sektor dengan nilai tambah dan produktivitas yang lebih rendah.

Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Indonesia dalam mengejar pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan investasi besar-besaran dan berkelanjutan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik melalui pendidikan formal, pelatihan vokasional, pengembangan keterampilan, maupun perbaikan ekosistem ketenagakerjaan yang mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja nasional.

Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia, yang tercermin dalam rendahnya PDB per pekerja dan kualitas pendidikan, menjadi tantangan sentral bagi arah pembangunan Sumatera Utara ke depan. Untuk mengatasi stagnasi ini, Sumatera Utara harus menjadikan peningkatan kualitas SDM sebagai prioritas pembangunan utama. Dengan kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan yang transformatif, inklusif, dan terintegrasi dengan kebutuhan dunia usaha.

c. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Kelompok calon kelas menengah kini menjadi bagian terbesar dalam struktur sosial ekonomi Indonesia. Selama periode 2019–2024, jumlahnya bertambah sebanyak 8,65 juta orang, sehingga mencapai 137,5 juta jiwa atau sekitar 49,2 persen dari total populasi nasional. Namun di sisi lain, terdapat kecenderungan yang mengkhawatirkan: jumlah masyarakat rentan miskin juga meningkat sebesar 12,72 juta jiwa dalam kurun waktu yang sama, mencapai 67,69 juta orang atau 24,33 persen dari populasi pada tahun 2024 (BPS, 2024).

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi ekspansi pada kelompok calon kelas menengah dan rentan miskin, jumlah masyarakat kelas menengah justru mengalami penurunan. Pergeseran status ekonomi ini sebagian besar disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Hingga Agustus 2024, sebanyak 46.420 pekerja dilaporkan

mengalami PHK (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024), dan angka ini diprediksi akan terus bertambah.

Salah satu pemicu utama dari meningkatnya PHK adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang tercermin dari tren deflasi pada beberapa kelompok harga. Berdasarkan laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus menjadi 1,40 persen pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak turun lebih drastis dari 3,04 persen menjadi 1,43 persen pada periode yang sama.

Daya beli yang melemah berdampak langsung pada menurunnya permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan industri. Dalam kondisi tersebut, sektor usaha kesulitan menutup biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa pelaku usaha untuk mengurangi tenaga kerja atau bahkan menghentikan kegiatan usahanya sepenuhnya. Situasi ini menciptakan siklus ekonomi yang rentan, memperbesar risiko mobilitas menurun dari kelas menengah menjadi kelompok rentan, dan menantang upaya pencapaian pertumbuhan inklusif serta stabilitas sosial-ekonomi nasional.

Dinamika sosial-ekonomi nasional yang ditandai dengan menurunnya kelas menengah dan membesarnya kelompok rentan menjadi peringatan dini bagi Sumatera Utara untuk mengubah arah kebijakan lima tahunan menuju model pembangunan yang lebih inklusif, resilien, dan responsif terhadap gejolak ekonomi. Dengan fokus pada penguatan daya beli masyarakat, perlindungan lapangan kerja, dan perluasan perlindungan sosial, Sumatera Utara dapat mencegah kemunduran struktural sosial dan menjaga kesinambungan pembangunan jangka menengah secara berkeadilan.

d. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Menurut data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Besarnya jumlah penduduk usia produktif ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan nasional, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di tengah keterbatasan sumber daya alam seperti pangan, energi, air, dan lahan.

Di samping itu, pemerintah juga dihadapkan pada kewajiban untuk menyediakan akses terhadap perlindungan sosial, layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, serta menciptakan lapangan kerja yang

memadai. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk yang besar dengan kapasitas pemenuhan layanan publik dan sumber daya yang terbatas berpotensi menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi yang lebih besar di masa depan.

Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan kebutuhan penduduk dapat dipenuhi secara adil, efisien, dan inklusif, guna mendukung pencapaian kesejahteraan nasional dan stabilitas jangka panjang. Jumlah penduduk usia kerja yang besar bukan hanya peluang, tetapi juga tantangan serius bagi Provinsi Sumatera Utara jika tidak dikelola secara strategis. Pembangunan lima tahunan 2025–2029 harus diarahkan pada penguatan daya saing tenaga kerja, perluasan akses layanan dasar, ketahanan sumber daya alam, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan inklusif. Pendekatan lintas sektor dan berbasis wilayah menjadi kunci dalam memastikan bahwa pertumbuhan penduduk justru menjadi pendorong utama kemajuan ekonomi dan kesejahteraan daerah.

e. Krisis Lingkungan

Saat ini, dunia tengah menghadapi tiga krisis lingkungan utama (*triple planetary crisis*) yang secara serius mengancam masa depan bumi dan keberlangsungan hidup manusia, yaitu: perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Menurut *Intergovernmental Panel on Climate Change* (2022), sekitar 50–75 persen populasi global diproyeksikan akan terdampak oleh kondisi iklim ekstrem yang mengancam jiwa pada tahun 2100. Dampak ekonomi akibat risiko bencana di Indonesia diperkirakan mencapai Rp22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), dengan jumlah korban jiwa akibat bencana selama satu dekade terakhir mencapai 9.176 orang (BNPB, 2024).

Krisis biodiversitas juga menjadi perhatian serius. Sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan saat ini berada dalam ancaman kepunahan (IPBES, 2019). Sementara itu, polusi udara telah menjadi salah satu penyebab utama penyakit dan kematian dini di dunia, dengan dampak kematian mencapai 4,2 juta jiwa setiap tahun (UNFCCC, 2022). Indonesia sendiri tercatat sebagai negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di kawasan Asia Tenggara, terutama akibat konsentrasi *particulate matter* 2.5 (PM2.5) yang tinggi (WHO, 2021).

Di sisi lain, sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji menunjukkan tingkat pencemaran (BPS, 2022). Masalah

sampah juga menjadi tantangan besar: pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah merupakan sampah makanan, dan diperkirakan akan mencapai 344 kg per kapita per tahun pada 2045 jika tidak ada intervensi (*Report on Food Loss and Waste in Indonesia*, 2021).

Krisis lingkungan juga berkaitan erat dengan krisis sumber daya alam. Dalam lima dekade terakhir, laju ekstraksi sumber daya alam global telah meningkat tiga kali lipat, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata lebih dari 2,3 persen. Indonesia, sebagai negara dengan tingkat ekstraksi tambang terbesar ke-8 di dunia (UNEP, 2023), turut menyumbang pada krisis ini. Kementerian ESDM (2022) mencatat terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan dan memperburuk degradasi ekosistem.

Pertumbuhan populasi yang pesat, peningkatan aktivitas ekonomi, dan kelangkaan sumber daya seperti energi, air, dan pangan turut mendorong kompetisi global yang berpotensi menimbulkan konflik geopolitik. Risiko *triple planetary crisis* ini membawa dampak besar terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran menuju aktivitas ekonomi rendah emisi gas rumah kaca, terutama di sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pertanian, pangan, limbah, serta penerapan ekonomi sirkular. Menyatukan agenda pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan menjadi prioritas utama demi menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.

Triple planetary crisis tidak hanya menjadi tantangan global, tetapi juga persoalan mendesak di tingkat lokal. Pembangunan lima tahunan Sumatera Utara 2025–2029 harus diarahkan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dengan pendekatan integratif, lintas sektor, dan berbasis bukti, Sumatera Utara berpeluang menjadi model provinsi hijau dan resilien iklim di Indonesia. Konvergensi agenda lingkungan, sosial, dan ekonomi merupakan satu-satunya jalan menuju pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan berketahanan jangka panjang.

f. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi tetap menjadi isu strategis yang memerlukan sinergi kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Upaya ini merupakan prasyarat utama untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi

ketimpangan sosial dan ekonomi, menekan angka kemiskinan, serta mendorong iklim investasi yang sehat. Keberhasilan dalam pemberantasan korupsi juga akan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi.

Namun demikian, capaian terkini menunjukkan masih terdapat tantangan yang signifikan. Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*) Indonesia mengalami penurunan dari skor 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022, dan stagnan di angka yang sama pada tahun 2023, dengan menempati peringkat ke-115 dari 180 negara. Meskipun Indeks Perilaku Anti Korupsi sempat menunjukkan perbaikan selama periode 2019–2022, tren tersebut mengalami hambatan pada tahun-tahun berikutnya, mencerminkan adanya risiko dalam menjaga momentum pemberantasan korupsi.

Selain itu, tantangan lain yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah penguatan tata kelola data nasional. Pengambilan keputusan pembangunan yang efektif, akurat, dan berkelanjutan sangat bergantung pada tersedianya data yang valid dan terkelola dengan baik. Namun, saat ini tingkat keamanan siber dan perlindungan privasi data pemerintah belum sepenuhnya mampu mengantisipasi berbagai risiko, seperti peretasan, pembajakan, serta penyalahgunaan data dalam skala besar. Hal ini menimbulkan potensi pelanggaran hak privasi dan ancaman serius terhadap keamanan nasional. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan penguatan sistem keamanan informasi merupakan agenda krusial dalam RPJMN 2025–2029 guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis data dalam mendukung transformasi pembangunan yang berkelanjutan.

Kondisi menurunnya Indeks Persepsi Korupsi dan lemahnya sistem perlindungan data nasional menjadi sinyal kuat bagi Sumatera Utara untuk melakukan pembenahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan. Pembangunan lima tahunan 2025–2029 harus diarahkan pada penguatan integritas birokrasi, transformasi digital yang aman, peningkatan akuntabilitas publik, serta penciptaan ekosistem investasi yang bersih dan kredibel. Dengan fondasi tata kelola yang bersih dan cerdas, Sumatera Utara tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.

3. Isu Strategis Regional

Isu nasional yang dipertimbangkan dalam pembangunan jangka menengah Regional Sumatera adalah sebagai berikut:

1. Dominasi Ekonomi Berbasis Komoditas Primer

Struktur ekonomi wilayah Sumatera masih sangat tergantung pada sektor-sektor berbasis sumber daya alam primer, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, yang secara agregat menyumbang hampir 50% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2023. Ketergantungan ini menciptakan nilai tambah yang relatif rendah dan menjadikan perekonomian regional rentan terhadap fluktuasi harga pasar global, serta ketidakstabilan permintaan komoditas ekspor.

2. Diversifikasi dan Hilirisasi Industri yang Belum Optimal

Kontribusi sektor industri pengolahan baru mencapai 20% dari PDRB, menandakan bahwa proses hilirisasi belum berkembang secara signifikan. Investasi masih didominasi oleh sektor-sektor ekstraktif dan industri hulu, yang memiliki keterbatasan dalam menciptakan nilai tambah tinggi serta lapangan kerja berkelanjutan. Kondisi ini memperlihatkan perlunya transformasi struktural menuju industrialisasi berbasis potensi daerah yang lebih inklusif.

3. Keterbatasan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah

Infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, irigasi, energi, dan akses digital di banyak wilayah di Sumatera masih belum memadai. Ketimpangan antarwilayah di dalam satu provinsi maupun antarprovinsi di Sumatera menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi wilayah.

4. Tingginya Risiko dan Potensi Bencana

Sumatera, khususnya kawasan pesisir barat yang masuk dalam gugusan Pegunungan Bukit Barisan, merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan longsor. Kerentanan ini mengancam keberlanjutan pembangunan dan memerlukan penguatan sistem mitigasi risiko bencana secara komprehensif.

5. Degradasi Lingkungan yang Semakin Meningkat

Wilayah Sumatera menghadapi tekanan ekologis yang signifikan, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), abrasi pantai, pencemaran air, serta alih fungsi lahan pertanian pangan yang semakin masif akibat ekspansi perkebunan dan pertambangan. Degradasi lingkungan ini berdampak

langsung terhadap penurunan produktivitas lahan, kesehatan masyarakat, dan risiko bencana ekologis.

6. Disparitas Kualitas Sumber Daya Manusia dan *Brain Drain*

Tingkat partisipasi sekolah pada jenjang menengah atas/kejuruan di Sumatera masih stagnan di angka 70%, sedangkan pendidikan tinggi hanya mencakup 25% penduduk usia kuliah. Selain itu, terjadi fenomena *brain drain*, di mana sekitar 30% tenaga kerja ahli dan terampil lebih memilih bekerja di luar wilayah Sumatera, terutama ke Jawa dan luar negeri. Hal ini memperlemah kapasitas inovatif dan produktivitas daerah.

7. Tingginya Tingkat Informalitas dalam Ketenagakerjaan (Prevalensi Shifting)

Angka pekerja informal di Sumatera masih tergolong tinggi, mencapai hampir 20% dari total angkatan kerja. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem jaminan kerja formal dan perlindungan sosial bagi pekerja, serta terbatasnya penciptaan lapangan kerja layak di sektor formal.

8. Tingkat Kemiskinan yang Masih Tinggi dan Tidak Merata

Tingkat kemiskinan rata-rata wilayah Sumatera berada pada kisaran 9% (2023), dengan Provinsi Aceh mencatat angka tertinggi sekitar 14%. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa tidak semua daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta adanya perbedaan signifikan dalam akses terhadap layanan dasar antarwilayah.

9. Ketimpangan Akses Layanan Dasar di Daerah Miskin

Di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan masih rendah, sektor unggulan belum menghasilkan nilai tambah tinggi, dan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, konektivitas transportasi, dan jaringan digital masih terbatas. Hal ini menghambat mobilitas sosial dan pembangunan manusia secara berkelanjutan.

Sembilan isu strategis yang menjadi tantangan regional Sumatera secara langsung mencerminkan kompleksitas dan kebutuhan pembangunan Sumatera Utara. Oleh karena itu, arah pembangunan lima tahunan 2025–2029 harus berfokus pada transformasi struktural ekonomi, pembangunan infrastruktur terintegrasi, mitigasi risiko ekologis dan bencana, peningkatan kualitas SDM, serta pengurangan kesenjangan spasial dan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis data, kolaboratif, dan terukur, Sumatera Utara dapat memperkuat posisinya sebagai motor pertumbuhan Sumatera dan kawasan barat Indonesia secara berkelanjutan.

4. Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan dalam KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara

Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan RPJMD Provinsi Sumatera Utara, dilakukan analisis dan sintesa isu-isu pembangunan berkelanjutan. Melalui metode crosstab dapat dilihat hubungan keterkaitan isu utama berdasarkan capaian TPB RPJMD dengan isu strategis RPJPN, isu kondisi umum wilayah, isu pokok RPPLH maupun isu paling strategis KLHS RTRW. Berdasarkan analisis tersebut, maka isu strategis Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan Dasar

Isu peningkatan pelayanan dasar, mencakup lima aspek, yakni aspek perumahan dan permukiman, aspek kesehatan, aspek ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, aspek pendidikan, dan aspek komunikasi. Aspek perumahan dan permukiman mencakup akses terhadap layanan sumber air minum, sanitasi dan pengolahan air limbah dan lumpur tinja, listrik, dan transportasi. Aspek kesehatan mencakup Jaminan Kesehatan Sosial, ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas dan distribusi tenaga kesehatan, sedangkan aspek ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mencakup kasus kejahatan, rasa aman dan penyalahgunaan narkoba, aspek pendidikan mencakup angka partisipasi murni, akreditasi sekolah, guru bersertifikat, dan fasilitas sekolah.

b. Pengentasan Kemiskinan dan Penguatan Ketahanan Pangan

Isu pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan mencakup tiga aspek yang saling terkait yakni kemiskinan, ketahanan pangan serta kebijakan penanggulangannya. Aspek kemiskinan mencakup keberadaan (jumlah) penduduk miskin baik di daerah tertinggal maupun di daerah yang tidak tertinggal, jumlah rumah tangga kumuh perkotaan, maupun akses energi bagi keluarga miskin. Aspek ketahanan pangan meliputi kecukupan dan kualitas pangan yang belum terpenuhi serta dampak yang ditimbulkannya berupa stunting. Aspek kebijakan mencakup penanggulangan yang dilakukan pemerintah yang tercermin dari alokasi sumber daya serta tingkat keberhasilan upaya tersebut yang digambarkan oleh jumlah daerah tertinggal yang terentaskan dan jumlah rumah tangga yang mendapat bantuan tunai serta prevalensi stunting.

c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mencakup tiga hal pokok yakni pemahaman tentang Keluarga Berencana (KB), kekerasan yang dialami perempuan dan anak serta kesetaraan gender. Aspek KB meliputi pemahaman dan penggunaan alat kontrasepsi serta peran tenaga kesehatan terlatih dalam proses melahirkan. Sedangkan aspek kekerasan meliputi kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak baik kekerasan fisik, seksual, emosional oleh pasangan, mantan pasangan ataupun oleh pihak lain. Sedangkan aspek kesetaraan gender mencakup keterwakilan perempuan pada DPRD maupun pada posisi managerial lainnya.

d. Peningkatan Kualitas Lingkungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati

Isu peningkatan kualitas lingkungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati mencakup dua aspek, yakni aspek kualitas lingkungan dan aspek keanekaragaman hayati. Aspek kualitas lingkungan dalam pembangunan memiliki dampak yang langsung terhadap keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan aktivitas pembangunan seringkali diikuti oleh degradasi lingkungan, seperti polusi udara, kerusakan ekosistem, dan deforestasi, yang dapat memperburuk kualitas hidup dan mempercepat perubahan iklim. Oleh karena itu, integrasi prinsip keberlanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sangat penting, dengan fokus pada konservasi sumber daya alam, pengelolaan limbah yang efektif, serta pengurangan emisi karbon. Dengan memperhatikan kualitas lingkungan, pembangunan dapat berjalan seimbang, mengurangi dampak negatif terhadap alam, dan memastikan ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang.

Aspek keanekaragaman hayati meliputi kelestarian kawasan konservasi yang belum tercapai maupun belum tersedianya dokumen pemanfaatan keanekaragaman hayati serta kerangka legislasi pembagian keuntungan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

e. Penanganan Perubahan Iklim dan Pencegahan serta Penanggulangan Bencana

Isu ini terdiri atas dua aspek, yakni aspek perubahan iklim dan aspek bencana. Aspek perubahan iklim menyangkut jumlah emisi gas rumah kaca yang masih tinggi, intensitas energi primer yang masih tinggi serta upaya penyerapan emisi gas rumah kaca terutama pada wilayah perkotaan yang

masih minim yang terlihat dari belum terpenuhinya penerapan green waste dan ruang terbuka hijau.

Aspek pencegahan serta penanggulangan bencana mencakup jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana, jumlah kerugian ekonomi langsung karena bencana, jumlah daerah bencana alam yang diperlengkapi secara khusus, dan penurunan indeks risiko bencana yang belum mencapai target.

f. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Tenaga Kerja

Isu ini menyangkut dua aspek, yakni pertumbuhan ekonomi dan kualitas tenaga kerja. Aspek pertumbuhan ekonomi meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik menyangkut pertumbuhan PDRB Sumatera Utara, rasio penerimaan pajak terhadap PDRB, dan sumber-sumber PDRB. Sedangkan aspek peningkatan kualitas tenaga kerja mencakup tenaga kerja formal, informal, tingkat pengangguran maupun perlindungan terhadap nelayan.

g. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Birokrasi yang Baik.

Isu peningkatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan birokrasi yang baik meliputi dua aspek, yakni peningkatan penegakan hukum dan peningkatan layanan pemerintah. Penegakan hukum meliputi kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan, kepatuhan pemerintah maupun penegakan hukum. Sedangkan aspek peningkatan layanan pemerintah meliputi pemenuhan standar pelayanan perkotaan, standar pelayanan masyarakat, serta aspek lainnya yang domain utamanya berada pada pemerintah.

Timbulnya isu ini tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, daya dukung lingkungan yang makin menurun, kondisi keuangan yang masih terbatas serta masih rendahnya peran-peran pihak lain dalam pencapaian TPB.

Pembangunan lima tahunan Sumatera Utara (2025–2029) harus diarahkan pada pencapaian pembangunan berkelanjutan yang menyeluruh melalui tujuh isu strategis utama yang telah teridentifikasi. Perumusan kebijakan yang terintegrasi, berbasis data, partisipatif, dan responsif terhadap dinamika lingkungan sosial-ekologis akan menjadi pondasi penting dalam menjadikan Sumatera Utara sebagai provinsi yang inklusif, tangguh, dan lestari. Pendekatan multisektor, multi-level, dan multipihak adalah kunci keberhasilan implementasi agenda RPJMD berkelanjutan ini.

5. Isu Strategis dalam Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara

Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara diidentifikasi dan dirumuskan berdasarkan Isu Global, Isu Nasional, Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan dalam KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan permasalahan yang dihadapi Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2024 serta tantangan yang mungkin dihadapi 5 (lima) tahun yang akan datang, isu strategis Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

a. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dihadapkan pada pembangunan dan Pembentukan modal manusia. Modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi dari berbagai risiko siklus hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan Transformasi Sosial yang menitikberatkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Transformasi Sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penguatan dan pemerataan kapasitas ketahanan kesehatan, serta *responsiveness*/ketanggapan sistem kesehatan di seluruh wilayah. Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang, sehingga dukungan Pemerintah Provinsi untuk mensukseskan Program Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas RPJMN merupakan bentuk nyata perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk bisa meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Sumatera Utara. Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

Selanjutnya sistem demokrasi masih prosedural ditandai dengan kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; informasi dan komunikasi publik belum merata; permasalahan politik elektoral seperti

politik uang, politisasi isu SARA; nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi serta sistem kaderisasi partai politik belum maksimal.

Selain hal di atas nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan menjadi dimensi dasar dalam proses pembangunan kualitas sumber daya manusia. Agama dan kebudayaan harus menjadi landasan spiritual, etika, dan moral dalam penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dalam hal ini, sumber daya manusia berperan sebagai katalisator transformasi pembangunan dengan dukungan keluarga sebagai institusi internalisasi nilai positif dan pembangunan integritas karakter individu. Selain itu, perlu dipastikan terselenggaranya kebijakan pemerintah yang ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

Isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mencakup tiga hal pokok yakni pemahaman tentang Keluarga Berencana (KB), kekerasan yang dialami perempuan dan anak serta kesetaraan gender. Aspek KB meliputi pemahaman dan penggunaan alat kontrasepsi serta peran tenaga kesehatan terlatih dalam proses melahirkan. Sedangkan aspek kekerasan meliputi kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak baik kekerasan fisik, seksual, emosional oleh pasangan, mantan pasangan ataupun oleh pihak lain. Sedangkan aspek kesetaraan gender mencakup keterwakilan perempuan pada DPRD maupun pada posisi managerial lainnya.

b. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas ke destinasi wisata unggulan seperti Danau Toba, Nias, dan Bukit Lawang. Untuk meningkatkan daya tarik wisata, diperlukan pembangunan dan perbaikan jalan, bandara, serta transportasi publik yang lebih terintegrasi. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, dan pusat informasi wisata yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan dan memperpanjang durasi kunjungan mereka.

Selain infrastruktur, penguatan ekonomi kreatif juga menjadi kunci dalam mendukung sektor pariwisata. Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kerajinan tangan, kuliner khas, serta seni pertunjukan perlu mendapatkan pembinaan dan akses permodalan yang lebih baik. Digitalisasi usaha ekonomi kreatif, seperti pemasaran berbasis *e-commerce* dan promosi melalui platform media sosial, juga harus

diperkuat agar produk-produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, ekonomi kreatif tidak hanya mendukung industri pariwisata tetapi juga memberikan peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

Keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya harus menjadi fokus dalam pengembangan sektor ini. Pariwisata berbasis alam dan budaya perlu dikembangkan dengan tetap menjaga ekosistem dan kearifan lokal agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku wisata mengenai pentingnya ekowisata serta pengelolaan sampah di kawasan wisata harus ditingkatkan.

c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Yang Merata dan Berkeadilan

Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu direspons ke depan. Luasan permukiman kumuh, rumah tangga dengan akses air minum layak, rumah tangga dengan akses sanitasi layak infrastruktur SDA dalam kondisi baik, penanganan banjir merupakan isu-isu penyediaan infrastruktur yang perlu direspons dalam jangka panjang ke depan. Cakupan rumah tangga yang menempati hunian layak yang terpadu dengan akses air minum, sanitasi dan penanganan persampahan juga masih cukup rendah. Selain itu, kondisi kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera Utara menghadapi perkotaan arah perkembangan yang tidak terstruktur (*urban sprawl*). Kelayakan dan keandalan perumahan yang dibangun secara swadaya juga perlu menjadi perhatian mengingat tingginya risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara.

Layanan ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Utara masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatra masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas. Fleksibilitas operasi masih belum optimum terutama saat kondisi di luar waktu beban puncak sebagai akibat dari minimum operasi PLTG. Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari Sistem Interkoneksi Sumatra dan sistem-sistem yang terisolasi. Sistem transmisi ekstra tinggi belum tersambung untuk mengevakuasi daya energi yang tersebar di seluruh wilayah. Konsumen tenaga listrik masih didominasi oleh rumah tangga.

Jangkauan jaringan seluler di Provinsi Sumatera Utara belum diimbangi dengan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan produktif (masih

terbatas untuk penggunaan telekomunikasi). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup merata dan hampir menjangkau seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan.

Provinsi Sumatera Utara juga memiliki tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar, yaitu belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana dasar di seluruh daerah, khususnya di daerah afirmasi 3T. Permasalahan yang dihadapi di antaranya penyediaan air bersih, irigasi, banjir, dan abrasi. Jumlah kejadian bencana banjir masih tinggi terutama di Metropolitan Medan, pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara juga terdampak risiko abrasi akibat perubahan iklim tersebut.

Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri belum memenuhi target, hal ini mempengaruhi akses terhadap layanan air minum dan sanitasi. Pada sisi lain ketersediaan air di Provinsi Sumatera Utara secara total masih surplus, termasuk pada daerah kabupaten/kota. Namun pada lokasi-lokasi tertentu terjadi defisit air seperti pada sebagian wilayah Kota Tanjungbalai, Kota Medan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Batu Bara, Serdang Bedagai dan seterusnya. Kondisi defisit dipengaruhi oleh ketersediaan dan tingkat konsumsi. Ketersediaan air cenderung menurun dari waktu ke waktu, selain karena dampak perubahan iklim juga karena makin terdegradasinya daerah hulu baik karena deforestasi, maupun karena alih fungsi hutan dan lahan. Luasan hutan pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana kota-kota utama di Sumatera Utara berada, pada umumnya sudah berada di bawah 30%. Hal ini akan menambah ancaman keberlanjutan ketersediaan air pada masa yang akan datang. Kekurangtersediaan air akan menyebabkan ketidaktercapaian target sanitasi dan akan mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Peningkatan kualitas lingkungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh sampah yang belum tertangani, juga disebabkan oleh sanitasi, air peningkatan kualitas lingkungan juga belum memadai, yang tercermin dari belum tercapainya jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan yang baik (sertifikasi SNI ISO 14001) serta masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai.

Penurunan kualitas air permukaan cenderung meningkat seiring waktu, mengingat pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat.

Timbulan sampah akan meningkat, juga limbah cair dan lumpur tinja serta limbah B3. Peningkatan beban lingkungan ini harus dibarengi dengan peningkatan pengelolaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

d. Pembangunan Antar Daerah Serta Desa-Kota

Keterkaitan antar daerah serta desa-kota di Provinsi Sumatera Utara belum mencerminkan keterkaitan tidak bisa mengabaikan rantai pasok, sehingga wilayah kota dan kawasan-kawasan perlu memiliki rantai nilai dengan wilayah-wilayah lain untuk mendorong perekonomian yang merata. Pembangunan wilayah Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo) masih menghadapi permukiman kumuh seperti air bersih dan sanitasi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan infrastruktur transportasi massal yang belum mendukung mobilitas penduduk. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berpusat di inti bisnis dan perdagangan. wilayah pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi *pull factor* manusia bermigrasi ke wilayah dengan ekonomi yang relatif baik.

Dalam rangka mendorong pembangunan antar daerah serta memperkuat keterkaitan antara kawasan perdesaan dan perkotaan di Provinsi Sumatera Utara, diperlukan strategi pengembangan kelembagaan ekonomi desa yang selaras dan saling menguatkan. Salah satu isu strategis yang diidentifikasi adalah perlunya penyelarasan antara pembentukan Koperasi Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), agar kedua entitas tidak saling tumpang tindih atau mematikan, melainkan memiliki core business yang jelas dan saling melengkapi dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal. Di samping itu, peningkatan kapasitas pendamping desa menjadi kebutuhan mendesak, khususnya dalam mendukung pengembangan kawasan perdesaan yang telah ditetapkan sebagai lokus prioritas di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Tiga kawasan perdesaan dimaksud antara lain Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Ajibata di Kabupaten Toba Samosir dan Kawasan Perdesaan Pasir Putih Parbaba di Kabupaten Samosir. Optimalisasi peran pendamping desa dalam mengawal pembangunan kawasan tersebut akan berkontribusi pada pengurangan kesenjangan antarwilayah, memperkuat konektivitas desa-kota, serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional secara berkelanjutan pada periode pembangunan tahun 2025–2029.

Pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan yang berkaitan erat dengan keberadaan pangan. Defisit air pada beberapa wilayah dapat menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan. Secara umum ketersediaan air di Sumatera Utara melebihi kebutuhan (surplus) namun ketersebarannya tidak selalu bersesuaian dengan ketersebaran kebutuhan, hal inilah yang menyebabkan defisit air pada beberapa wilayah, dan status defisit ini akan mempengaruhi ketahanan pangan. Dari aspek ketersediaan pangan, Sumatera Utara juga masih surplus, hal ini turut ditopang oleh keanekaragaman hayati yang tinggi di Sumatera Utara. Kondisi kekurangan pangan di beberapa wilayah di Sumatera Utara dapat dipengaruhi oleh jasa lingkungan penyediaan pangan yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah yang terdapat pada wilayah barat Sumatera Utara. Kerentanan wilayah yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim juga dapat mempengaruhi produksi pangan.

e. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan

Dalam upaya pengelolaan SDA berkelanjutan menjadi perhatian terhadap pengelolaan investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik terutama kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Pengoptimalan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan juga berkaitan dengan: adaptasi perubahan iklim; pengawasan terhadap deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar; akses dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal; dukungan dalam mewujudkan kelestarian dan kesejahteraan yang rendah; belum maksimalnya akses seluruh masyarakat terhadap energi, dan peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer di Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2020 hingga 2024, dengan nilai sebesar 14,34% pada 2020, meningkat menjadi 42,04% pada 2024. Isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mencakup tiga hal pokok yakni pemahaman tentang Keluarga Berencana (KB), kekerasan yang dialami perempuan dan anak serta kesetaraan gender. Aspek KB meliputi pemahaman dan penggunaan alat kontrasepsi serta peran tenaga kesehatan terlatih dalam proses melahirkan. Sedangkan aspek kekerasan meliputi kekerasan yang dialami oleh perempuan dan

anak baik kekerasan fisik, seksual, emosional oleh pasangan, mantan pasangan ataupun oleh pihak lain. Sedangkan aspek kesetaraan gender mencakup keterwakilan perempuan pada DPRD maupun pada posisi managerial lainnya.

Pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan yang berkaitan erat dengan keberadaan pangan. Defisit air pada beberapa wilayah dapat menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan. Secara umum ketersediaan air di Sumatera Utara melebihi kebutuhan (surplus) namun ketersebarannya tidak selalu bersesuaian dengan ketersebaran kebutuhan, hal inilah yang menyebabkan defisit air pada beberapa wilayah, dan status defisit ini akan mempengaruhi ketahanan pangan. Dari aspek ketersediaan pangan, Sumatera Utara juga masih surplus, hal ini turut ditopang oleh keanekaragaman hayati yang tinggi di Sumatera Utara. Kondisi kekurangan pangan di beberapa wilayah di Sumatera Utara dapat dipengaruhi oleh jasa lingkungan penyediaan pangan yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah yang terdapat pada wilayah barat Sumatera Utara. Kerentanan wilayah yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim juga dapat mempengaruhi produksi pangan.

Isu utama peningkatan kualitas lingkungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati mencakup dua aspek, yakni aspek kualitas lingkungan dan aspek keanekaragaman hayati. Aspek kualitas lingkungan mencakup kualitas air permukaan yang belum terpenuhi (kualitas air danau dan sungai). Selain dipengaruhi oleh sampah yang belum tertangani dengan baik, juga disebabkan oleh sanitasi, air limbah dan tinja serta limbah B3. Keterlibatan berbagai pihak dalam peningkatan kualitas lingkungan juga belum memadai, yang tercermin dari belum tercapainya jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan yang baik (sertifikasi SNI ISO 14001) serta masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai. Aspek keanekaragaman hayati meliputi kelestarian kawasan konservasi yang belum tercapai maupun belum tersedianya dokumen pemanfaatan keanekaragaman hayati serta kerangka legislasi pembagian keuntungan pemanfaatan kehati.

Kualitas air yang semakin menurun juga dipengaruhi oleh penurunan ketersediaan karena jasa lingkungan penyediaan air yang semakin berkurang. Berkurangnya jasa lingkungan dalam penyediaan air

disebabkan oleh signifikannya perubahan tutupan lahan berhutan menjadi tutupan lainnya sehingga kuantitas air larian makin tinggi. Perubahan iklim dan pencegahan serta penanggulangan bencana juga merupakan permasalahan di Provinsi Sumatera Utara. Aspek perubahan iklim menyangkut jumlah emisi gas rumah kaca yang masih tinggi, intensitas energi primer yang masih tinggi serta upaya penyerapan emisi gas rumah kaca terutama pada wilayah perkotaan yang masih minim yang terlihat dari belum terpenuhinya penerapan *green waste* dan ruang terbuka hijau.

Perubahan iklim ini akan menimbulkan dampak yang semakin parah mengingat 73% wilayah Sumatera Utara cukup rentan terhadap perubahan iklim, terlebih pada 2% wilayah yang sangat rentan perubahan iklim. Pada sisi lain jasa lingkungan pengatur iklim juga dominan bernilai rendah hingga sangat rendah pada wilayah Pesisir Timur Sumatera.

Aspek pencegahan serta penanggulangan bencana mencakup jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana, jumlah kerugian ekonomi langsung karena bencana, jumlah daerah bencana alam yang diperlengkapi secara khusus, dan penurunan indeks risiko bencana yang belum mencapai target. Aspek-aspek ini belum mencapai target juga dipengaruhi oleh wilayah Sumatera Utara yang memiliki potensi bencana tinggi pada beberapa wilayah seperti potensi banjir tinggi pada pantai utara Kabupaten Langkat hingga Kabupaten Labuhanbatu Selatan, potensi kekeringan kelas tinggi pada beberapa kabupaten. Keberadaan potensi bencana yang tinggi ini belum dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana. Pada sisi lain jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam juga sangat rendah terutama pada sisi timur Sumatera Utara dan kepulauan Nias. Mengingat dominan bencana alam di Sumatera Utara adalah bencana hidrometeorologi, bencana yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim serta ketidakmampuan alam menampung dampak perubahan iklim, maka upaya penurunan faktor penyebab perubahan iklim mutlak dilakukan disertai dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana alam.

f. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur

Infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas dan sistem logistik berpotensi menekan aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari

wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. Hal tersebut perlu diupayakan dengan upaya meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan.

g. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Akuntabel, Transparan dan Kolaboratif

Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi dua persoalan utama yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang fokus pada kapabilitas dan integritas dan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat. Kapabilitas tata pemerintahan berfokus pada penguatan transisi reformasi birokrasi menuju reformasi Birokrasi tematik, memperbaiki proses bisnis adaptif dengan dukungan teknologi informasi, meningkatkan profesionalisme ASN melalui meritokrasi dan penguatan *core value*.

Isu-isu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan lainnya ialah pemanfaatan kehadiran teknologi informasi dalam area deregulasi kebijakan, penataan kelembagaan, penguatan profesionalisme ASN, penguatan kualitas pengawasan, penguatan akuntabilitas dan pelayanan publik. Ketersediaan dan keterjangkauan teknologi pada masyarakat sipil diharapkan mampu mentransformasi posisi masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan.

Penguatan sistem pemerintahan desa yang terintegrasi dan adaptif, melalui peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa, penyederhanaan sistem aplikasi layanan pemerintahan, penataan batas wilayah yang jelas, serta pengembangan basis data desa yang valid dan akuntabel. Strategi ini juga mencakup sinkronisasi kebijakan lintas sektor untuk mendorong tata kelola yang efisien dan partisipatif, guna memperkuat peran desa sebagai pilar pembangunan daerah dan memperkecil kesenjangan antarwilayah dalam periode perencanaan 2025–2029.

Tabel 2. 171. Penetapan Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PROV. SUMUT	PERMASALAHAN PROV. SUMUT	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PROV. SUMUT	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PROV. SUMUT			ISU STRATEGIS PROV. SUMUT
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Jumlah Penduduk usia produktif	Masalah demografis seperti : a. Pertumbuhan Penduduk Tinggi b. Distribusi Penduduk Tidak Merata c. Migrasi Keluar Usia Produktif Tinggi d. Lapangan Kerja Informal Masih Mendominasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Tenaga Kerja	Ketidaksetaraan Sosial dan Mobilitas Penduduk Secara Global	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Disparitas Kualitas Sumber Daya Manusia dan Brain Drain Tingginya Tingkat Informalitas dalam Ketenagakerjaan (Prevalensi Shifting)	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
Kekayaan Wisata Alam dan Budaya serta Kuliner	Permasalahan Kesejahteraan : a. Produktivitas Tenaga Kerja Relatif Tertinggal b. Daya Saing Perekonomian Belum Optimal i. Kontribusi Industri Pengolahan Mengalami Penurunan ii. Ekonomi Kreatif Belum Menjadi Penggerak Ekonomi Lokal iii. Sektor Pariwisata Masih Kurang Kompetitif iv. Investasi Sektor Riil Masih Belum Menarik c. Disparitas Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan Tinggi	Pengentasan Kemiskinan dan Penguatan Ketahanan Pangan	Transformasi Teknologi dan Kompetisi Ekonomi Digital	Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	Dominasi Ekonomi Berbasis Komoditas Primer	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PROV. SUMUT	PERMASALAHAN PROV. SUMUT	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PROV. SUMUT	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PROV. SUMUT			ISU STRATEGIS PROV. SUMUT
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Infrastruktur strategis nasional	Masalah Geografis antara lain : a. Tantangan Aksesibilitas dan Biaya Konstruksi yang Mahal b. Wilayah Rawan Bencana Masih Tinggi c. Konflik Kepentingan Pemanfaatan Lahan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Risiko Bencana	Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Tingginya Risiko dan Potensi Bencana Ketimpangan Akses Layanan Dasar di Daerah Miskin	Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Merata dan Berkeadilan
Dukungan Pemerintah Pusat terkait Koperasi Merah Putih di tingkat Desa	Permasalahan Ketersediaan Infrastruktur : a. Kesenjangan Infrastruktur Antardaerah Masih Tinggi i) Kurangnya Fasilitas Dasar Pendidikan dan Kesehatan ii) Sanitasi dan Pemukiman Layak Huni Masih Jadi Tantangan iii) Kecukupan Listrik dan Energi Belum Merata iv) Transportasi Publik dan Konektivitas Belum Memadai v) Infrastruktur Digital Belum Menjangkau Semua Daerah	Peningkatan Pelayanan Dasar		Rendahnya Produktivitas	Diversifikasi dan Hilirisasi Industri yang Belum Optimal Tingkat Kemiskinan yang Masih Tinggi dan Tidak Merata	Pembangunan Antar Daerah serta Desa-Kota

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PROV. SUMUT	PERMASALAHAN PROV. SUMUT	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PROV. SUMUT	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PROV. SUMUT			ISU STRATEGIS PROV. SUMUT
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Keanekaragaman sumber daya alam	Belum Optimalnya Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup i) Risiko Bencana Masih Tinggi ii) Kualitas Lingkungan Hidup Masih Perlu Ditingkatkan iii) Keanekaragaman Hayati Semakin Menurun	Peningkatan Kualitas Lingkungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Penanganan Perubahan Iklim dan Pencegahan serta Penanggulangan Bencana	Krisis Lingkungan Global (Triple Planetary Crisis) yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan polusi lingkungan Ketergantungan Energi Fosil dan Transisi Energi yang Masih Mahal	Krisis Lingkungan	Degradasi Lingkungan yang Semakin Meningkat	Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
Letak Geografis yang strategis	Permasalahan Kesejahteraan Sosial: a. Pelayanan Kesehatan Belum Merata dan Berkualitas b. Pelayanan Pendidikan Belum Merata dan Berkualitas c. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Belum Tertangani Secara Inklusif d. Ketimpangan Gender Masih Tinggi e. Budaya Lokal dan Jati Diri Asli Sumut Semakin Tergeser		Ketidakpastian Ekonomi dan Perdagangan Global		Keterbatasan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah	Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur
Kepemimpinan kepala daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Belum Optimal: a. Kinerja Tata Kelola Pemerintah Membaik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Birokrasi yang Baik	Ketidakpastian dan Ketegangan Geopolitik Global	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Akuntabel, Transparan dan Kolaboratif

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PROV. SUMUT	PERMASALAHAN PROV. SUMUT	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PROV. SUMUT	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PROV. SUMUT			ISU STRATEGIS PROV. SUMUT
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Namun Belm Optimal b. Pelayanan Publik Belum Sepenuhnya Berbasis Sistem Digital					

Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, tahun 2024, diolah

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 merupakan tahap pertama integrasi dari kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara 2025–2045. RPJPD memberikan arah strategis yang komprehensif untuk pembangunan jangka panjang provinsi, yang kemudian dijabarkan dalam RPJMD sebagai pedoman operasional untuk lima tahun pertama. Keterkaitan antara RPJMD dan RPJPD ini sangat penting untuk memastikan keselarasan tujuan pembangunan yang lebih luas dengan langkah-langkah konkret dalam periode jangka menengah tahap pertama.

RPJMD 2025-2029 berfungsi sebagai fondasi awal dalam mewujudkan visi besar RPJPD 2025-2045 yang berfokus pada "Sumatera Utara Unggul, Maju, dan Berkelanjutan." Dalam kerangka ini, RPJMD tidak hanya menjadi alat perencanaan untuk melaksanakan visi dan misi yang telah disusun, tetapi juga sebagai instrumen yang menggerakkan transformasi pembangunan di tingkat provinsi. Transformasi ini mencakup aspek sumber daya manusia, ekonomi, sosial, tata kelola pemerintahan, serta keberlanjutan lingkungan.

3.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1.1. Visi Dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi dan misi, program kepala daerah Bapak Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, SE, MM dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Bapak H. Surya, B.Sc yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045. RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 merupakan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045 yaitu tahap "Penguatan Fondasi Transformasi" menuju pencapaian visi RPJPD "Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan". Visi Pembangunan jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 merupakan arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan hingga tahun 2029 difokuskan untuk mewujudkan visi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang terjadi di Sumatera Utara. Adapun visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yaitu:

**“Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul,
Maju dan Berkelanjutan”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Kolaborasi, bermakna proses kerja sama untuk menelurkan gagasan atau ide dan bergerak dalam rangka menyelesaikan masalah secara berkolaborasi menuju visi "bersama" RPJMN;

SUMUT - Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Berkah, bermakna harapan agar pembangunan tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga membawa kebaikan dan kebermanfaatan bagi semua pihak serta selaras dengan visi "emas" RPJMN;

Unggul, bermakna Sumatera Utara yang berperan penting dalam tataran nasional dan global, memiliki sumber daya manusia yang tangguh dengan keberagaman budaya yang harmonis, menjadi pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global yang sejalan dengan visi "unggul" RPJPD Sumatera Utara;

Maju, bermakna Sumatera Utara menjadi Provinsi maju dengan posisi empat besar dalam perekonomian nasional, sejahtera, merata dan berkeadilan sosial, didukung infrastruktur modern dan pelayanan birokrasi kelas dunia berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya lokal. Kemajuan Sumatera Utara terlihat dari lancarnya akses dan konektivitas

antar wilayah, terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan publik, berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan antar strata pendapatan masyarakat, dan berkembangnya wilayah metropolitan yang selaras dengan visi "maju" RPJMN dan RPJPD Sumatera Utara;

Berkelanjutan, bermakna Sumatera Utara yang berkontribusi dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat, dengan tata kelola yang baik dimana selaras dengan visi "berkelanjutan" RPJPD Sumatera Utara.

Tabel 3. 1. Keterkaitan Visi RPJMD Sumatera Utara dengan RPJPD Sumatera Utara dan RPJMN

KETERKAITAN VISI		
RPJMD SUMUT	RPJPD SUMUT	RPJMN
Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan	Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045
KETERKAITAN KATA KUNCI		
Kolaborasi		Bersama
Sumut Berkah		Indonesia Emas
Unggul	Unggul	
Maju	Maju	Maju
Berkelanjutan	Berkelanjutan	

Sumber Bappelitbang (data diolah)

Untuk mewujudkan visi “Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju, dan Berkelanjutan” sekaligus memastikan kontribusi daerah terhadap Program Prioritas Nasional, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyelaraskan target RPJMN dengan kondisi dan potensi daerah. Hasil penyelarasan tersebut dituangkan ke dalam sembilan indikator sasaran utama pembangunan RPJMD Sumatera Utara 2025–2029 berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi dari 5,03% pada tahun 2024 menjadi 7,60 – 8,00% pada tahun 2029;
2. Peningkatan PDRB per Kapita dari Rp. 73,57 Juta pada tahun 2024 menjadi Rp. 115,3 Juta pada tahun 2029;
3. Peningkatan Kontribusi PDRB Provinsi Sumatera Utara terhadap PDB Nasional dari 5,2% di tahun 2024 menjadi 5,3% pada tahun 2029;
4. Penurunan Tingkat Kemiskinan dari 7,19% pada tahun 2024 menjadi 2,82-3,82% pada tahun 2029;
5. Penurunan Rasio Gini dari 0,306 poin pada tahun 2024 menjadi 0,287 -

- 0,291 pada tahun 2029;
6. Peningkatan Indeks Modal Manusia yang ditargetkan sebesar 0,54 poin pada tahun 2025 menjadi 0,57 poin pada tahun 2029;
 7. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca yang ditargetkan sebesar 1% pada tahun 2025 menjadi turun sebesar 16,88% pada tahun 2029;
 8. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah dari 73,96 poin di tahun 2024 menjadi 77,87 poin pada tahun 2029;
 9. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dari 5,60% pada tahun 2024 menjadi 4,74-5,20% pada tahun 2029.

Tabel 3. 2. Sasaran Utama Pembangunan RPJMD Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Indikator Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline 2024	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,03	5,20-5,60	5,80-6,20	6,40-6,80	7,00-7,40	7,60-8,00	8,00-8,40
PDRB Per Kapita	Nilai (Rp. Juta)	73,57	78,4	87,6	96,9	106,1	115,3	124,5
Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	5,2	5,2	5,2	5,2	5,3	5,3	5,3
Tingkat Kemiskinan	Persen	7,19	6,96-7,46	5,93-6,55	4,89-5,64	3,86-4,73	2,82-3,82	2,50-3,50
Gini Rasio	Poin	0,306	0,303-0,305	0,301-0,303	0,300-0,302	0,291-0,300	0,287-0,291	0,284-0,287
Indeks Modal Manusia	Poin	N/A	0,54	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	N/A	1	1-2,77	4,14	11,59	16,88	18,52
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Persen	73,96	77,2	77,37	77,54	77,7	77,87	78,04
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,60	5,27-5,56	5,14-5,47	5,01-5,38	4,88-5,29	4,74-5,20	4,62-5,11

Sumber Bappelitbang (data diolah)

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Membangun Sumber Daya Manusia Sumatera Utara yang sehat, cerdas, berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan perlindungan sosial pada kelompok rentan yang **sejalan dengan Asta Cita 4 dan 6 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 1 pada RPJPD Sumut.**

Misi 2 Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah

Memperkuat stabilitas makro ekonomi daerah dilakukan melalui stabilisasi harga, pemerataan pembangunan ekonomi, pengembangan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan lapangan kerja melalui peningkatan iptek, inovasi, pemanfaatan energi

baru terbarukan, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan internasional dalam menjadikan Sumatera Utara sebagai pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global yang **sejalan dengan Asta Cita 2, 3, 5 dan 6 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 2 serta 4 pada RPJPD Sumut.**

Misi 3 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Membangun tata kelola Pemerintahan yang lebih berkualitas melalui kerjasama pemangku kepentingan dan pelayanan publik yang berintegritas, lincah, dinamis, responsif dan kolaboratif serta menjunjung tinggi supremasi hukum disertai penguatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta penegakan keamanan dan ketertiban lingkungan yang **sejalan dengan Asta Cita 7 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 3 serta 8 pada RPJPD Sumut.**

Misi 4 Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan

Melanjutkan kesinambungan pembangunan pusat dan daerah melalui pengembangan dan penataan infrastruktur berkualitas, estetik, dan ramah lingkungan dengan memperhatikan mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim, penguatan kualitas lingkungan hidup, serta ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan yang **sejalan dengan Asta Cita 3 dan 8 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 6 serta 7 pada RPJPD Sumut.**

Misi 5 Memperkuat Ketahanan Sosial dan Budaya untuk Membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh

Memperkuat ketahanan sosial dan budaya melalui penguatan peran keluarga, kesetaraan gender, toleransi dan kerukunan antarumat beragama, melestarikan budaya lokal, menjaga demokrasi, serta mendukung pemberantasan narkoba yang **sejalan dengan Asta Cita 1, 4 dan 8 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 5 pada RPJPD Sumut.**

Tabel 3. 3. Keterkaitan Misi RPJMD Sumatera Utara dengan RPJPD Sumatera Utara dan RPJMN

KETERKAITAN MISI		
RPJMD SUMUT	RPJPD SUMUT	RPJMN
Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Misi 1. Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Membangun Manusia yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, Berkualitas, Berdaya Saing, dan Sejahtera	Asta Cita 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Genegarsi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas
		Asta Cita 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan
Misi 2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	Misi 2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi (Termasuk Pengembangan Pariwisata, Pertumbuhan Ekonomi Kreatif dan Keuangan Syariah), Penerapan Ekonomi Hijau, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, serta Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Menjadikan Sumatera Utara sebagai Pusat Bioindustri dan Pariwisata Bertaraf Global.	Asta Cita 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
		Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
	Misi 4. Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Asta Cita 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
		Asta Cita 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan
Misi 3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Misi 3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola untuk Membangun Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif serta	Asta Cita 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan

KETERKAITAN MISI		
RPJMD SUMUT	RPJPD SUMUT	RPJMN
	Pelayanan Publik yang Berkualitas	Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
	Misi 8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan melalui Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah, dan Pengembangan Pembiayaan Inovatif	
Misi 4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan	Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Adil Berbasis Karakteristik Wilayah	Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
	Misi 7. Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
Misi 5. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh	Misi 5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dengan Memperkuat Ketangguhan Manusia, Keluarga, Masyarakat beserta Lingkungan dan Alam Sekitarnya yang Mampu Hidup dalam Keseimbangan dan Keberkelanjutan	Asta Cita 1. Memperkokoh Idiologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
		Asta Cita 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Genegarsi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas
		Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Sumber Bappelitbang (data diolah)

3.1.2. Tujuan Dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Keberhasilan dari setiap misi ditunjukkan oleh indikator kinerja sasaran dengan target terukur.

Dalam rangka pencapaian misi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan 8 (delapan) tujuan pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tujuan 1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas strategis dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029. Tujuan ini dipandang sebagai fondasi utama untuk mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang unggul, maju, dan berkelanjutan serta mendukung Misi 1 RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029, yaitu meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Di samping itu, tujuan ini juga mendukung Misi ke-4 RPJMN 2025-2029, yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas. Lebih lanjut, pencapaian tujuan ini mendukung arah pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029, khususnya dalam agenda pembangunan manusia unggul, berkarakter, dan berkeadilan.

Dalam konteks ini, sumber daya manusia tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki peran sentral dalam proses transformasi sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Oleh karena itu, pembangunan SDM diarahkan untuk menghasilkan masyarakat yang sehat, cerdas, berintegritas, produktif, berdaya saing, serta adaptif terhadap dinamika perubahan global dan domestik. Secara substansial, peningkatan kualitas SDM yang dimaksud mencakup upaya sistematis dalam

memperluas akses dan mutu layanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan. Upaya tersebut menyoar peningkatan layanan kesehatan yang inklusif serta penguatan sistem pendidikan yang merata dan berkualitas. Untuk mendukung terwujudnya sasaran tersebut, maka diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dengan pendekatan berbasis wilayah dan sasaran prioritas. Melalui pendekatan ini, diharapkan kualitas SDM Sumatera Utara dapat terus meningkat secara merata dan inklusif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Sumatera Utara diterjemahkan melalui pencapaian kinerja indeks modal manusia dari 0,54 di tahun 2025 menjadi 0,57 pada tahun 2029.

Tujuan 2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan pilar strategis dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029. Pemahaman terhadap kesejahteraan tidak terbatas pada aspek peningkatan pendapatan, tetapi mencakup kondisi yang lebih komprehensif, yakni terpenuhinya kebutuhan dasar, akses merata terhadap layanan publik yang berkualitas, partisipasi aktif dalam aktivitas ekonomi, serta perlindungan sosial yang menyeluruh bagi semua kelompok masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat dimaknai sebagai proses transformatif yang menitikberatkan pada pengurangan kemiskinan, penanggulangan kesenjangan sosial, serta penguatan jaminan sosial bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan rumah tangga berpenghasilan rendah.

Tujuan ini tidak berdiri sendiri, namun terhubung erat dengan tujuh tujuan RPJMD lainnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dapat tercapai jika sistem perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif juga didukung dengan penguatan SDM, ekonomi, tata kelola pemerintahan, infrastruktur, serta ketahanan sosial dan budaya masyarakatnya. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merancang upaya sistematis yang meliputi penguatan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah, penciptaan lapangan kerja yang

layak dan inklusif, serta reformasi sistem perlindungan sosial agar lebih adaptif dan tepat sasaran. Pembangunan infrastruktur dasar yang merata, penyediaan hunian yang layak dan sehat, serta transformasi pelayanan publik menjadi unsur pendukung untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil. Selain itu, partisipasi masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan, dari perencanaan hingga pengawasan menjadi pendekatan penting guna menjamin keberlanjutan dan rasa kepemilikan terhadap program kesejahteraan yang dilaksanakan. Secara konkrit, peningkatan kesejahteraan masyarakat tercermin melalui penurunan tingkat kemiskinan dari 6,96% - 7,46% (2025) menjadi 2,82% - 3,82% (2029). Untuk mendukung pencapaian target ini, diperlukan segenap upaya untuk membuka akses yang lebih luas bagi penduduk rentan agar terhubung dengan aktivitas pembangunan ekonomi formal. Upaya ini urgen untuk dilakukan agar penduduk rentan dapat segera keluar dari lingkaran kemiskinan dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Tujuan ini tidak hanya berkontribusi terhadap dimensi ekonomi dan sosial pembangunan daerah, tetapi juga secara langsung mendukung Misi 1 RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025–2029, yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Lebih jauh, tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan Misi ke-6 RPJMN 2025–2029, yaitu “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan”. Relevansi ini diperkuat oleh keterkaitan dengan program prioritas nasional seperti “Pemberantasan Kemiskinan”, “Pelayanan Kesehatan untuk Semua”, serta “Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau”.

Dengan pendekatan lintas sektor yang bersifat holistik, integratif, dan berbasis keadilan sosial, diharapkan seluruh masyarakat Sumatera Utara dapat menikmati manfaat pembangunan secara proporsional. Kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini, menjadi indikator utama keberhasilan RPJMD sekaligus fondasi bagi pencapaian visi jangka panjang Sumatera Utara sebagai provinsi yang unggul, maju, dan berkelanjutan.

Tujuan 3 Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Pengembangan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan merupakan salah satu orientasi strategis dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029. Tujuan ini diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi daerah yang tidak hanya menghasilkan pertumbuhan yang tinggi secara kuantitatif, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat inklusif, merata antarwilayah, serta tangguh terhadap tekanan global dan krisis lingkungan. Ekonomi yang berdaya saing merefleksikan kemampuan daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal, meningkatkan produktivitas, menciptakan nilai tambah, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional melalui inovasi, efisiensi produksi, dan peningkatan kualitas barang dan jasa.

Sementara itu, dimensi keberlanjutan ekonomi menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara bijaksana dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini mencakup penguatan prinsip pembangunan rendah karbon, pelestarian ekosistem, serta keberlanjutan antar-generasi dalam penggunaan sumber daya. Dengan demikian, transformasi ekonomi yang diusung tidak hanya mengejar pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga memastikan kesinambungan daya dukung lingkungan dan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam konteks pembangunan Sumatera Utara, tujuan ini dapat dicapai melalui peningkatan hilirisasi produk unggulan daerah dan peningkatan aktivitas ekonomi yang berwawasan lingkungan. Hilirisasi produk unggulan ditempuh melalui sejumlah upaya, antara lain melalui penguatan integrasi ekonomi domestik dan digital, pengembangan pariwisata, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, pengembangan hilirisasi dan industrialisasi, serta peningkatan IPTEK dan inovasi. Untuk mencapai daya saing ekonomi yang berkelanjutan, maka peningkatan nilai tambah ekonomi juga didukung dengan pengembangan ekonomi lingkungan.

Pencapaian tujuan ini digambarkan melalui peningkatan

kontribusi PDRB provinsi terhadap nasional dari 5,2% di tahun 2025 menjadi 5,3% pada tahun 2029. Selain itu, tujuan ini juga diterjemahkan melalui peningkatan PDRB per kapita dari Rp.78,4 juta (2025) menjadi Rp.115,3 juta (2029). Sebagai representasi dari ekonomi berkelanjutan, maka pada tujuan ini juga ditempatkan satu indikator pengontrol yaitu Indeks Ekonomi Hijau, yang ditargetkan dari 51,12 poin di tahun 2025 dan semakin meningkat hingga 2029 sebesar 51,18 poin.

Tujuan ini secara langsung mendukung Misi ke-2 RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029, yaitu “Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat”. Melalui penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berorientasi pada daya saing jangka panjang, Provinsi Sumatera Utara diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mendorong kemandirian masyarakat, terutama dalam sektor-sektor unggulan berbasis potensi lokal.

Lebih jauh, orientasi ini juga bersesuaian dengan sejumlah misi prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029, khususnya Misi Kedua, yaitu “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru”, serta Misi Kelima, yaitu “Melanjutkan Hilirisasi dan Membangun Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri”. Keterpaduan antara arah pembangunan daerah dan pusat ini menunjukkan adanya sinergi yang kuat dalam upaya menciptakan sistem ekonomi nasional yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi tantangan masa depan.

Tujuan 4 Ekonomi yang Stabil dan Inklusif

Perekonomian yang stabil dan inklusif merupakan fondasi utama bagi terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, adil, dan merata. Dalam kerangka RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029, arah pembangunan ekonomi tidak semata-mata diarahkan pada pencapaian pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga pada bagaimana manfaat pertumbuhan tersebut dapat dirasakan secara luas oleh seluruh

lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marjinal. Stabilitas ekonomi mencakup aspek ketahanan terhadap gejolak eksternal serta pengendalian inflasi yang terjaga melalui pengawasan distribusi barang. Di sisi lain, inklusivitas ekonomi menekankan pentingnya peningkatan pemerataan pembangunan ekonomi. Pemerataan ekonomi ini dicapai melalui penguatan kapasitas dan aksesibilitas ketenagakerjaan yang inklusif, pemerataan sarana prasarana ekonomi, hingga peningkatan peran desa dalam kemajuan daerah. Upaya ini ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berbasis potensi daerah, serta memastikan bahwa setiap warga, tanpa terkecuali, memiliki akses terhadap peluang ekonomi yang layak dan berkelanjutan. Tercapainya tujuan keempat ini diterjemahkan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 5,20%-5,60% (2025) menjadi 7,60%-8,00% (2029), menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari 5,27%-5,56% (2025) menjadi 4,74%-5,20% (2029), dan menurunnya Gini rasio dari 0,303-0,305 (2025) menjadi 0,287-0,291 (2029).

Tujuan pembangunan ini secara langsung mendukung Misi ke-2 RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029, yakni “Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat”. Melalui upaya menciptakan sistem ekonomi daerah yang stabil dan terbuka terhadap partisipasi semua kelompok, pembangunan ekonomi diarahkan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan tetapi juga untuk memastikan bahwa kesejahteraan ekonomi menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh, mandiri, dan inklusif.

Lebih lanjut, tujuan ini selaras dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029, khususnya Misi Keenam, yaitu “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan”, serta Misi Ketiga, yaitu “Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, dan Mengembangkan Industri Kreatif serta Agromaritim di Sentra

Produksi”. Keterpaduan arah pembangunan pusat dan daerah ini memperkuat sinergi dalam menciptakan sistem ekonomi nasional yang berdaya tahan, berkeadilan, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Tujuan 5 Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas

Penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berintegritas merupakan fondasi utama bagi keberhasilan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berorientasi hasil, serta berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029, tata kelola pemerintahan diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun sistem administrasi dan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, efisien, dan akuntabel, termasuk dukungan terhadap sistem keuangan yang inklusif.

Pemerintahan yang profesional ditandai dengan kemampuan birokrasi dalam menjalankan fungsi pelayanan, regulasi, dan pengelolaan pembangunan secara tepat sasaran, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pemerintahan yang adaptif mengedepankan kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan dan layanan terhadap perubahan sosial, teknologi, serta tuntutan pelayanan yang terus berkembang. Integritas birokrasi menjadi landasan etis dan moral bagi terselenggaranya pemerintahan yang bersih, terbuka, dan dipercaya oleh publik. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah tercermin dari peningkatan penerimaan pajak daerah yang sejalan dengan membaiknya daya beli masyarakat dan penguatan inklusi keuangan. Pencapaian tujuan kelima ini digambarkan melalui peningkatan nilai indeks reformasi birokrasi dari 81,12 (A) di tahun 2025 menjadi 81,20 (A) pada tahun 2029.

Tujuan ini secara langsung mendukung Misi ke-3 RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029, yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan”. Dalam kerangka misi tersebut, birokrasi yang profesional dan berintegritas berfungsi sebagai

mesin utama dalam mewujudkan kebijakan publik yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Peningkatan kinerja pemerintahan diarahkan tidak hanya pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada pencapaian hasil pembangunan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi menjadi agenda prioritas yang mencakup transformasi digital pelayanan publik, perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan berbasis data.

Penguatan tata kelola dilakukan secara menyeluruh melalui beberapa upaya. Di antaranya adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem layanan publik terpadu, peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur sipil negara (ASN), serta pembangunan sistem meritokrasi dan manajemen kinerja yang objektif. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal terus diperkuat untuk mencegah terjadinya korupsi, inefisiensi, serta penyalahgunaan kewenangan di semua level pemerintahan. Dalam konteks desentralisasi, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi kebijakan dan efektivitas program pembangunan lintas wilayah dan sektor.

Arah tujuan ini juga selaras dengan Misi Ketujuh RPJMN 2025–2029, yakni “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”. Program prioritas nasional seperti Reformasi Birokrasi, Pembangunan Zona Integritas, dan Pencegahan Korupsi Terintegrasi merupakan bagian integral dari kerangka kebijakan yang mendasari tujuan ini. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen memperkuat fondasi kelembagaan pemerintahan sebagai penggerak utama pembangunan yang inklusif, adaptif terhadap perubahan global, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas tinggi serta berdampak nyata bagi masyarakat.

Tujuan 6 Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Lingkungan yang Mendukung Pelaksanaan Kebijakan dan Pembangunan

Stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah merupakan prasyarat

utama bagi terselenggaranya pemerintahan yang responsif, serta pelaksanaan kebijakan pembangunan yang efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, keamanan tidak hanya dipahami sebagai ketiadaan gangguan ketertiban umum, tetapi juga mencakup terjaminnya ruang publik yang aman bagi seluruh warga, perlindungan terhadap hak-hak sipil, serta penegakan hukum yang adil dan berwibawa. Tujuan ini menjadi semakin penting dalam situasi sosial yang kompleks dan dinamis, di mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas negara dalam menciptakan rasa aman, menjamin kepastian hukum, dan mengelola risiko sosial secara preventif maupun represif.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui RPJMD 2025–2029 menempatkan stabilitas keamanan sebagai bagian integral dari upaya penguatan tata kelola sektor publik yang efisien, efektif, dan akuntabel. Hal ini dilakukan melalui pengembangan sistem keamanan daerah berbasis kolaborasi multi-stakeholder, peningkatan kapasitas kelembagaan penegak hukum dan aparat keamanan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan dan pencegahan potensi gangguan sosial.

Stabilitas keamanan yang terjaga juga menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan. Lingkungan yang aman dan tertib merupakan syarat esensial bagi masuknya investasi, tumbuhnya sektor produktif, serta berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat secara inklusif. Pencapaian tujuan ini menggambarkan hasil dari efektifnya sistem keamanan yang dibangun, yang diterjemahkan melalui meningkatnya Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya dari 58,5% (2025) menjadi 62% (2029).

Dalam kaitannya dengan RPJMN 2025–2029, arah kebijakan ini selaras dengan Misi Nasional Ketujuh, yaitu “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan”. Dengan demikian, stabilitas kawasan tidak hanya menopang penyelenggaraan pemerintahan yang responsif, tetapi

juga menjadi fondasi bagi transformasi ekonomi yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.

Tujuan 7 Peningkatan Akses terhadap Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan guna Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Peningkatan akses terhadap infrastruktur yang berkualitas, estetik, dan ramah lingkungan merupakan salah satu prioritas strategis dalam kerangka pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029. Tujuan ini menekankan pentingnya pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian fisik semata, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup, daya dukung ekologi, dan kualitas tata ruang publik. Infrastruktur yang dirancang secara ramah lingkungan seperti sistem transportasi rendah emisi, sanitasi dan air bersih berkelanjutan, serta fasilitas publik hemat energi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi tekanan ekologis, dan mendukung daya saing wilayah di tengah tantangan perubahan iklim. Pencapaian tujuan ketujuh ini digambarkan melalui penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) kumulatif dari 10,06% (2025) menjadi 12,92% (2029) dan penurunan emisi GRK tahunan dari 19,04% (2025) menjadi 25,38% (2029).

Tujuan ini secara langsung mendukung Misi 4 RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029, yaitu “Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan”. Melalui misi ini, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk menciptakan keterpaduan antarwilayah, memperluas akses pelayanan dasar, serta memperkuat konektivitas sosial-ekonomi di daerah tertinggal, perdesaan, dan kawasan pertumbuhan baru. Infrastruktur yang tidak hanya fungsional tetapi juga estetik dan berwawasan lingkungan diyakini mampu meningkatkan kualitas ruang hidup masyarakat, memperkuat identitas wilayah, dan menciptakan rasa memiliki terhadap lingkungan bersama.

Selaras dengan pengembangan infrastruktur, penguatan kemandirian ekonomi masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan dari tujuan ini. Akses terhadap infrastruktur dasar—seperti energi,

air, jalan produksi, dan jaringan digital—merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air, serta mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, pertanian berbasis organik, dan ekonomi desa. Pendekatan berbasis potensi wilayah ini tidak hanya membuka peluang usaha dan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya secara mandiri dan produktif.

Tujuan ini juga memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029, terutama Misi Ketiga, yaitu “Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, dan Mengembangkan Industri Kreatif serta Agromaritim di Sentra Produksi”. Oleh karena itu, implementasi tujuan ini secara terintegrasi dan berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Sumatera Utara sebagai provinsi yang tangguh secara ekonomi, maju secara sosial, dan lestari secara ekologis.

Tujuan 8 Terwujudnya Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga

Ketahanan sosial, budaya, dan keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Tujuan ini tidak hanya mencerminkan upaya mempertahankan stabilitas sosial, tetapi juga merupakan strategi untuk memperkuat identitas kolektif, jati diri masyarakat, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan lintas generasi. Dalam kerangka RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029, ketahanan sosial, budaya, dan keluarga diarahkan untuk memperkuat solidaritas antarwarga, toleransi antarumat beragama, pelestarian keragaman budaya lokal, peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kohesi dan harmoni sosial, serta memperkuat peran keluarga sebagai pilar utama dalam membentuk generasi yang berakhlak, produktif, dan bertanggung jawab.

Tujuan ini secara langsung mendukung Misi 5 RPJMD Provinsi Sumatera Utara, yaitu “Memperkuat Ketahanan Sosial dan Budaya

untuk Membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh”. Ketangguhan yang dimaksud mencakup kemampuan masyarakat dalam merespons perubahan sosial, tekanan ekonomi, maupun ancaman ideologis dengan sikap adaptif, inklusif, dan berbasis nilai-nilai kebudayaan lokal yang kokoh. Ketahanan budaya di sini mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya daerah sebagai basis penguatan identitas serta kemandirian masyarakat.

Upaya pencapaian tujuan ini dilakukan melalui penguatan pendidikan karakter dan kebudayaan lokal, fasilitasi ruang-ruang ekspresi seni dan budaya, penguatan kelembagaan adat, serta promosi nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan keberagaman sebagai kekuatan integratif. Pemerintah juga mendorong pembentukan forum dialog lintas agama dan budaya, serta program perlindungan sosial berbasis komunitas yang mampu menjangkau kelompok rentan dan memperkuat struktur sosial masyarakat dari tingkat akar rumput. Pencapaian tujuan kedelapan ini tercermin melalui peningkatan nilai Indeks Demokrasi Indonesia dari 80,05 – 82,46 poin di tahun 2025 menjadi 87,95 – 88,95 poin pada tahun 2029.

Tujuan ini juga mencerminkan keselarasan dengan Misi 1 RPJMN 2025–2029, yaitu “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)”, yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, penghormatan terhadap keberagaman, serta penguatan hak-hak warga negara sebagai pilar integrasi sosial. Selain itu, tujuan ini juga sejalan dengan Misi 4 RPJMN “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Genegarsi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas” serta Misi 8 RPJMN 2025–2029, yaitu “Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur”, yang menekankan pentingnya keharmonisan sosial-budaya dan hubungan antarmanusia yang selaras dengan alam dan nilai-nilai kultural.

Tabel 3. 4. Struktur Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Sumatera Utara 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
			2, Meratanya Pendidikan Berkualitas
		2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	3. Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif
	2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	3. Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	4. Meningkatnya Hilirisasi Produk Unggulan Daerah
			5. Meningkatnya Aktivitas Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan
		4. Ekonomi yang Stabil dan inklusif	6. Terciptanya Stabilitas Harga
	3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	5. Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas	7. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi
			8. Menguatnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas
		6. Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan pembangunan	9. Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah
	4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan	7. Peningkatan Akses terhadap Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan guna Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat	10. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
			11. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Ramah Lingkungan
	5. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk Membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh	8. Terwujudnya Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga	12. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
			13. Menguatnya Peran Keluarga, Kesetaraan Gender, Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama dalam Kehidupan Sosial
			14. Menguatnya Pelestarian dan Pemanfaatan

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
			Nilai-nilai Budaya Lokal sebagai Identitas Daerah

Sumber Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2025, (data diolah)

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah maka ditetapkan 14 (empat belas) sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran ini bertujuan untuk Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan. Melalui pemerataan layanan yang berkualitas dan terjangkau, kondisi kesehatan masyarakat Sumatera Utara diharapkan dapat meningkat secara signifikan.

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat direfleksikan dengan meningkatnya Usia Harapan Hidup dari 74,01 tahun (2025) menjadi 74,72 tahun (2029). Pencapaian atas target indikator ini akan memberikan dampak terhadap pencapaian Indeks Modal Manusia yang digunakan sebagai alat ukur kinerja Tujuan Kesatu.

Pencapaian sasaran ini menjadi landasan utama dalam mendukung Tujuan Kesatu RPJMD, yakni *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*. Dengan masyarakat yang lebih sehat, kapasitas dan daya saing individu akan turut meningkat, menciptakan SDM yang lebih produktif, adaptif, dan unggul. Dampak jangka panjang dari upaya ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, yang sejalan dengan visi pembangunan Sumatera Utara unggul, maju, dan berkelanjutan.

Sasaran 2 Meratanya Pendidikan Berkualitas

Sasaran ini menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap pendidikan yang bermutu di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dengan menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis, memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan berkualitas, diharapkan potensi diri masyarakat dapat berkembang secara optimal.

Peningkatan mutu pendidikan akan menghasilkan sumber daya

manusia yang lebih terampil, berpengetahuan, dan berdaya saing tinggi. Hal ini secara langsung mendukung Tujuan Kesatu RPJMD, yaitu *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*. Pada akhirnya, sasaran ini akan memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara secara menyeluruh melalui SDM yang unggul, adaptif, dan siap menghadapi tantangan pembangunan jangka panjang.

Meratanya pendidikan berkualitas di Sumatera Utara digambarkan melalui kinerja dari dua indikator, yaitu meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah dari 10,3 - 10,33 tahun (2025) menjadi 10,83 - 10,84 tahun (2029), serta meningkatnya Harapan Lama Sekolah dari 13,61 - 13,63 tahun (2025) menjadi 13,86 - 13,87 tahun (2029). Pencapaian dua indikator ini memberikan sumbangan besar terhadap pencapaian indeks modal manusia sebagai alat ukur kinerja Tujuan Kesatu.

Sasaran 3 Meningkatkan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan sosial yang mampu merespons secara adaptif terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti masyarakat miskin, korban bencana, dan penyandang disabilitas. Dengan perlindungan yang inklusif dan responsif, masyarakat akan memiliki jaring pengaman yang memungkinkan mereka tetap bertahan, pulih, bahkan meningkatkan kesejahteraan dalam situasi yang tidak menentu.

Lingkungan sosial yang lebih stabil dan aman ini akan menciptakan ruang yang kondusif bagi pengembangan potensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, sasaran ini secara langsung mendukung Tujuan Kedua RPJMD, yaitu *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*.

Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif diterjemahkan setidaknya melalui capaian dua indikator, yaitu meningkatnya nilai indeks kesejahteraan sosial dari 56,09 poin (2025) menjadi 58,09 poin di tahun 2029, dan meningkatnya Indeks Zakat Nasional dari 0,46 poin di tahun 2025 menjadi 0,54 poin pada tahun 2029. Kedua indikator ini diharapkan berkontribusi besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan,

sebagai alat ukur kinerja dari peningkatan kesejahteraan masyarakat yang inklusif.

Sasaran 4 Meningkatkan Hilirisasi Produk Unggulan Daerah

Sasaran ini berfokus pada penguatan proses hilirisasi terhadap produk-produk unggulan daerah guna mendorong terciptanya nilai tambah ekonomi. Dengan mengolah hasil sumber daya lokal menjadi produk bernilai lebih tinggi, daya saing produk lokal akan meningkat secara signifikan, sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.

Langkah ini tidak hanya memperkuat struktur ekonomi daerah dan meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas makro ekonomi. Secara keseluruhan, sasaran ini mendukung pencapaian Tujuan Ketiga RPJMD, yaitu *Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan*.

Meningkatnya hilirisasi produk unggulan daerah dideteksi melalui pencapaian kinerja 4 indikator, antara lain meningkatnya rasio PDRB industri pengolahan dari 18,66% (2025) menjadi 19,86% (2029). Indikator ini penting dalam rangka memantau kinerja pencapaian khususnya aktivitas bioindustri di Sumatera Utara. Semangat RPJMN 2025-2029 yang menempatkan koperasi sebagai salah satu media pengungkit utama perekonomian dicerminkan melalui dukungan perbaikan kinerja koperasi, yakni dengan meningkatnya Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB dari 0,79% (2025) menjadi 0,81% (2029). Koperasi diharapkan dapat berkontribusi lebih maksimal terhadap proses hilirisasi produk unggulan Sumatera Utara. Proses inovasi dimanfaatkan untuk mendukung hilirisasi produk digambarkan dengan meningkatnya Indeks Inovasi Daerah dari 57,50 - 60,01 poin (2025) menjadi 62,26 - 63,01 poin (2029). Pencapaian kinerja atas indikator-indikator tersebut mendukung peningkatan kontribusi PDRB provinsi dan PDRB per kapita, yang digunakan sebagai alat ukur untuk mendeteksi kinerja Tujuan Ketiga.

Sasaran 5 Meningkatkan Aktivitas Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan

Sasaran ini menekankan pentingnya transformasi aktivitas ekonomi ke arah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Melalui pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam secara lestari, serta penerapan prinsip ekonomi hijau, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat berlangsung lebih stabil dan bertanggung jawab.

Pendekatan ini tidak hanya mengurangi tekanan terhadap lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi daerah dalam jangka panjang. Dengan demikian, sasaran ini selaras dengan Tujuan Ketiga RPJMD, yaitu *Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan*.

Meningkatnya aktivitas ekonomi yang berwawasan lingkungan digambarkan melalui pencapaian kinerja 3 indikator, antara lain meningkatnya Porsi EBT Dalam Bauran Energi Primer dari 43% (2025) menjadi 45% (2029), meningkatnya Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dari 0,562 poin (2025) menjadi 0,581 poin (2029), serta meningkatnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum dari 2,42% (2025) menjadi 2,73% (2029). Fokus Sumatera Utara hingga tahun 2045 sebagai destinasi pariwisata global yang berwawasan lingkungan ditunjukkan melalui perbaikan kinerja indikator ini. Terpenuhinya kinerja dari indikator-indikator tersebut sebagai bentuk komitmen Provinsi Sumatera Utara dalam penerapan ekonomi berkelanjutan.

Sasaran 6 Terciptanya Stabilitas Harga

Sasaran ini berfokus pada upaya menjaga kestabilan harga, khususnya melalui pengendalian inflasi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Stabilitas harga merupakan faktor kunci dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Dengan harga yang terjaga, daya beli masyarakat tetap stabil, memungkinkan konsumsi rumah tangga berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kestabilan ini juga mencegah terjadinya gejolak ekonomi akibat fluktuasi harga

yang tajam. Oleh karena itu, sasaran ini mendukung pencapaian Tujuan Keempat RPJMD, yaitu *Ekonomi yang Stabil dan Inklusif*. Terciptanya stabilitas harga diukur melalui kinerja 2 indikator, yaitu menurunnya Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi dari 10,1% (2025) menjadi 9,5% (2025), dan terjaganya tingkat inflasi dari 2,5±1% menjadi 1,4 – 3,7%. Pencapaian atas kedua indikator ini mendukung penurunan tingkat pengangguran terbuka dan Gini rasio serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi, khususnya dukungan dari sisi pengendalian harga.

Sasaran 7 Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Ekonomi

Sasaran ini menitikberatkan pada upaya memperkecil kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Sumatera Utara. Dengan mendorong pemerataan pembangunan ekonomi, setiap daerah akan memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang.

Langkah ini akan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, membuka peluang kerja di berbagai wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pemerataan ini juga berperan penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, sasaran ini mendukung pencapaian Tujuan Keempat RPJMD, yaitu *Ekonomi yang Stabil dan Inklusif*.

Meningkatnya pemerataan pembangunan ekonomi di Sumatera Utara diterjemahkan melalui pencapaian kinerja 8 indikator, antara lain meningkatnya Pembentukan Modal Tetap Bruto secara terjaga dari 29,7% (2025) menjadi 29,76-30,04% (2029), meningkatnya Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan dari 100,26 (2025) menjadi 100,30 (2029), Nilai Tukar Nelayan dari 101,35 (2025) menjadi 105,43 (2029), Nilai Tukar Petani Tanaman Hortikultura dari 92,82 (2025) menjadi 92,86 (2029), Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat dari 183,05 (2025) menjadi 183,79 (2029), Nilai Tukar Petani Peternakan dari 95,5 (2025) menjadi 95,88 (2029), meningkatnya Inklusi Keuangan dari 97,52% menjadi 97,88%, serta Indeks Desa dari 0,6671 menjadi 0,6884.

Kinerja atas 8 indikator ini berkontribusi dalam pencapaian target atas penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Gini Rasio serta meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi, sebagai proksi dari kinerja Tujuan Keempat.

Sasaran 8 Menguatnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas

Sasaran ini menekankan pentingnya reformasi birokrasi untuk membangun aparatur pemerintah yang jujur, profesional, serta mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan zaman. Penguatan integritas dan peningkatan kapasitas adaptif birokrasi akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan transparan. Hal ini mendukung Tujuan Kelima RPJMD untuk menciptakan pemerintahan yang inovatif, mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Outcome sasaran ini adalah meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik yang mampu menciptakan birokrasi yang adaptif.

Menguatnya birokrasi yang profesional, adaptif dan berintegritas diterjemahkan dengan pencapaian kinerja dari 6 indikator, yaitu meningkatnya Indeks Pelayanan Publik dari 3,92 (2025) menjadi 3,69 (2029), meningkatnya Indeks Reformasi Hukum dari 86 (2025) menjadi 89 poin (2029), meningkatnya Indeks Integritas Nasional dari 66,78 (2025) menjadi 69,51 (2029), meningkatnya Nilai Capaian Pelaporan Kinerja (SAKIP) Provinsi dari 72,00(BB) di tahun 2025 menjadi 74 poin di tahun 2029, Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah dari 50 (2025) menjadi 52,5 (2029), serta meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN dari 79,94 (2025) menjadi 80,45 (2029). Kinerja dari beberapa indikator tersebut berhubungan langsung dengan pencapaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi, yang menjadi alat ukur atas kinerja dari Tujuan Kelima.

Sasaran 9 Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah guna mendukung efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Dengan kapasitas fiskal yang lebih baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan

kualitas pelayanan publik serta menjalankan program-program strategis secara lebih optimal.

Peningkatan kapasitas keuangan juga mendorong efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, sehingga memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik. Secara keseluruhan, sasaran ini mendukung pencapaian Tujuan Kelima RPJMD.

Sasaran ini diterjemahkan dengan pencapaian kinerja yang indikatornya berupa Opini BPK Atas Laporan Keuangan yang mencapai WTP selama 2025-2029. Pencapaian atas indikator sasaran ini akan berkontribusi terhadap pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi yang digunakan untuk mengukur kinerja dari Tujuan Kelima.

Sasaran 10 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Sasaran ini berfokus pada upaya menciptakan lingkungan yang aman dan tertib sebagai prasyarat utama bagi kelancaran pelaksanaan program pembangunan dan kebijakan publik. Stabilitas keamanan memungkinkan pemerintah menjalankan fungsi pelayanan dan pengelolaan sektor publik secara lebih efisien, efektif, dan minim gangguan.

Situasi yang kondusif juga mendukung peningkatan transparansi serta pengawasan dalam pelayanan publik, sehingga memperkuat akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, sasaran ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian Tujuan Keenam RPJMD, yaitu *Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Lingkungan yang Mendukung Pelaksanaan Kebijakan dan Pembangunan*.

Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan tercermin dengan terjaganya kinerja Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas secara konsisten hingga tahun 2029. Pencapaian atas sasaran ini mendukung kinerja dari Tujuan Keenam yang dicerminkan melalui meningkatnya Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya yang diperkirakan sebesar 58,5% (2025) menjadi 62% (2029).

Sasaran 11 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Ramah Lingkungan

Sasaran ini diarahkan pada penguatan kualitas infrastruktur dasar yang dibangun dengan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan. Melalui peningkatan sarana seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum berwawasan lingkungan, masyarakat akan memiliki akses yang lebih baik terhadap infrastruktur yang mendukung ketahanan wilayah, khususnya dalam menghadapi risiko bencana.

Pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan ini tidak hanya meningkatkan kesiapsiagaan daerah, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, sasaran ini sejalan dengan Tujuan Ketujuh RPJMD, yaitu *Peningkatan Akses terhadap Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan guna Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat*.

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ramah lingkungan dicerminkan dengan meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari 77,2 poin (2025) menjadi 77,87 poin (2029). Pencapaian kinerja dari indikator sasaran ini akan berdampak terhadap Penurunan emisi GRK.

Sasaran 12 Meningkatnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Sasaran ini menekankan pentingnya penguatan ketahanan pada tiga sektor vital: energi, air, dan pangan. Dengan meningkatkan kapasitas daerah dalam menyediakan kebutuhan dasar tersebut secara mandiri, Sumatera Utara akan lebih siap menghadapi tantangan krisis energi, kelangkaan air, serta ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah.

Ketahanan ini juga berperan penting dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sasaran ini sejalan dengan Tujuan Ketujuh RPJMD, yaitu *Peningkatan Akses terhadap Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan guna Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat*.

Meningkatnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan digambarkan melalui pencapaian atas kinerja 4 indikator, antara lain menurunnya Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan dari 7,2% (2025) menjadi 5,98% (2029), meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan dari 90,05 poin (2025) menjadi 93,7 poin (2029), menurunnya Intensitas Energi Primer dari 79,40 SBM/Rp. miliar (2025) menjadi 72,36 SBM/Rp. miliar (2029), dan Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota yang terjaga secara konsisten hingga tahun 2029.

Sasaran 13 Menguatnya Peran Keluarga, Kesetaraan Gender, Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama dalam Kehidupan Sosial

Sasaran ini bertujuan mendorong peran aktif keluarga dalam pendidikan moral, kesetaraan gender, memperkuat dialog lintas agama, serta membangun ruang-ruang interaksi sosial yang menjunjung tinggi nilai saling menghormati. Keluarga dipandang sebagai unit dasar pembentukan karakter dan nilai, sementara toleransi serta kerukunan antarumat beragama merupakan kunci menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman etnis dan agama di Sumatera Utara.

Kondisi ini akan memperkuat ketangguhan sosial masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan sosial maupun budaya. Oleh karena itu, sasaran ini mendukung pencapaian tujuan kedelapan RPJMD, yaitu *Terwujudnya Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga*.

Menguatnya peran keluarga, kesetaraan gender, toleransi dan kerukunan antarumat beragama dalam kehidupan sosial tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga/IPKK dari 69,79 poin (2025) menjadi 73,22 poin (2029), meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama dari 81,20 poin (2025) menjadi 83 poin (2029), dan menurunnya Indeks Ketimpangan Gender dari 0,395 poin (2025) menjadi 0,377 poin (2029). Pencapaian atas kinerja indikator sasaran ini akan berkontribusi terhadap pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia, sebagai cerminan dari kinerja Tujuan Kedelapan.

Sasaran 14 Menguatnya Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai-nilai Budaya Lokal sebagai Identitas Daerah

Sasaran ini menekankan pentingnya pelestarian serta pemanfaatan nilai-nilai budaya lokal sebagai fondasi dalam membentuk identitas dan ketangguhan masyarakat daerah. Budaya lokal tidak hanya menjadi warisan, tetapi juga sumber kekuatan dalam memperkuat karakter individu dan keluarga agar lebih tangguh, adaptif, dan siap menghadapi dinamika perubahan sosial.

Dengan mengembangkan kapasitas individu dan keluarga melalui internalisasi nilai-nilai budaya, akan tercipta masyarakat yang lebih berdaya saing dan memiliki ketahanan sosial yang berkelanjutan. Sasaran ini mendukung pencapaian Tujuan kedelapan RPJMD, yaitu *Terwujudnya Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga*.

Menguatnya pelestarian dan pemanfaatan nilai-nilai budaya lokal sebagai identitas daerah diterjemahkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan dari 55,44 - 55,48 poin (2025) menjadi 57,56 - 57,67 poin (2029). Pencapaian atas kinerja indikator ini diharapkan dapat terhubung dengan pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia.

Kinerja tujuan dan sasaran dapat dideteksi melalui indikator yang ditetapkan. Indikator yang ditetapkan sebagai refleksi pencapaian tujuan dan sasaran, berasal dari indikator sasaran utama pembangunan di RPJMN, indikator emas atau indikator utama pembangunan, serta indikator tujuan di beberapa urusan yang disampaikan di dalam Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Sebagian besar indikator-indikator ini tertuang di dalam RPJPD Provinsi dan selaras dengan indikator yang ada di RPJMN, termasuk angka targetnya. RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 merupakan Tahap I dari RPJPD, dimana penetapan target menggambarkan kondisi penguatan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola yang didukung dengan peningkatan keamanan dan stabilitas, ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta pembangunan kewilayahan dan infrastruktur. Indikator tujuan dan sasaran disusun selama lima tahun dengan target setiap tahun selama periode Tahun 2025–2030, seperti disajikan pada Tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3. 5. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

“KOLABORASI SUMUT BERKAH MENUJU SUMATERA UTARA UNGGUL, MAJU DAN BERKELANJUTAN”

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Modal Manusia	Poin	N/A	0,54	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	Seluruh OPD
		1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,9	74,01	74,18	74,36	74,54	74,72	74,9	Dinas Kesehatan
		2, Meratanya Pendidikan Berkualitas	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,93	10,3 - 10,33	10,43- 10,46	10,56- 10,59	10,69- 10,72	10,83 - 10,84	10,96- 10,97	Dinas Pendidikan
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,49	13,61 - 13,63	13,67- 13,69	13,73- 13,75	13,79- 13,81	13,86 - 13,87	13,92- 13,94	Dinas Pendidikan
	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Kemiskinan	Persen	7,19	6,96- 7,46	5,93- 6,55	4,89- 5,64	3,86- 4,73	2,82- 3,82	2,50- 3,50	Seluruh OPD
		3. Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	56,09	56,09	56,59	57,09	57,59	58,09	58,59	Dinas Sosial
			Indeks Zakat Nasional	Poin	0,44	0,46	0,48	0,5	0,52	0,54	0,55	Biro Kesra
Misi 2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	3. Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan		Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	5,2	5,2	5,2	5,2	5,3	5,3	5,3	Seluruh OPD
			PDRB per Kapita	Rp. Juta	73,57	78,4	87,6	96,9	106,1	115,3	124,5	Seluruh OPD
			Indeks Ekonomi Hijau	Poin/Skor	N/A	51,12	51,14	51,15	51,17	51,18	51,19	Seluruh OPD
		4. Meningkatnya Hilirisasi Produk Unggulan Daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	18,36	18,66	18,96	19,26	19,56	19,86	20,16	Disperindag ESDM
			Rasio Volume Usaha koperasi terhadap PDRB	Persen	N/A	0,79	0,79	0,8	0,8	0,81	0,81	Dinas Koperasi dan UKM
			Indeks Inovasi Daerah	Poin/Skor	59,93	57,50- 60,01	58,69- 60,76	59,88- 61,51	61,07- 62,26	62,26- 63,01	63,45- 63,76	Bappelitbang
	5. Meningkatnya Aktivitas Ekonomi yang		Porsi EBT dalam Bauran Energi	Persen	42,04	43	44	44	45	45	46	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Berwawasan Lingkungan										Sumber Daya Mineral
			Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin/Skor	N/A	0,562	0,567	0,572	0,576	0,581	0,585	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum	Persen	N/A	2,42	2,5	2,58	2,65	2,73	2,79	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	4. Ekonomi yang Stabil dan inklusif		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,6	5,27-5,56	5,14-5,47	5,01-5,38	4,88-5,29	4,74-5,20	4,62-5,11	Seluruh OPD
			Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,03	5,20-5,60	5,80-6,20	6,40-6,80	7,00-7,40	7,60-8,00	8,00-8,40	Seluruh OPD
			Gini Rasio	Poin	0,306	0,303-0,305	0,301-0,303	0,300-0,302	0,291-0,300	0,287-0,291	0,284-0,287	Seluruh OPD
		6. Terciptanya Stabilitas Harga	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Poin/Skor	N/A	10,1	9,95	9,8	9,65	9,5	9,38	Disperindag ESDM
			Tingkat Inflasi	Persen	2,12	2,5±1	2,5±1	2,5±1	1,61-3,72	1,4-3,7	1,4-3,7	Disperindag ESDM, Biro Perekonomian, TPH, Dishub, Disbunak, Kanla
		7. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	28,65	29,7	29,75	29,8	29,85	29,76-30,04	29,95	DPMPSTSP
			NTP Tanaman Pangan	Poin	100,25	100,26	100,27	100,28	100,29	100,3	100,31	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Poin	101,32	101,35	102,54	103,32	104,1	105,43	105,45	Dinas Kelautan dan Perikanan
			NTP Tanaman Hortikultura	Poin	92,81	92,82	92,83	92,84	92,85	92,86	92,87	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
												Pangan dan Holtikultura
			Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)	Poin	182,87	183,05	183,24	183,42	183,6	183,79	183,97	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	Poin	95,4	95,5	95,59	95,69	95,78	95,88	95,97	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Indeks Desa	Poin	0,6437	0,6671	0,6799	0,685	0,6875	0,6884	0,7133	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
			Inklusi Keuangan	Persen	N/A	97,52	97,61	97,7	97,79	97,88	97,95	Biro Perekonomian
Misi 3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	5. Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin/Skor	80,87 (A)	81,12 (A)	81,14 (A)	81,16 (A)	81,18 (A)	81,20(A)	81,22 (A)	Seluruh OPD
		8. Menguatnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas	Indeks Pelayanan Publik	Poin/Skor	3,90	3,92	3,93	3,94	3,95	3,96	3,97	Biro Organisasi
			Indeks Reformasi Hukum	Poin/Skor	85,9	86	86	87	88	89	90	Biro Hukum
			Indeks integritas Nasional	Poin/Skor	N/A	66,78	67,46	68,15	68,83	69,51	70,19	Inspektorat
			Nilai Capaian Pelaporan Kinerja (SAKIP)	Poin/Skor	N/A	72,00(BB)	72,5	73	73,5	74	74,5	Biro Organisasi
			Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Poin	N/A	50	51	51,5	52	52,5	53	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Indeks Profesionalitas ASN	Poin	79,44	79,94	80,15	80,25	80,35	80,45	80,55	Badan Kepegawaian
		9. Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	6. Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan pembangunan		Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	N/A	58,5	59,38	60,25	61,13	62	62,7	Seluruh OPD
		10. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
Misi 4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan	7. Peningkatan Akses terhadap Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan guna Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat		Persentase Penurunan Emisi GRK									Seluruh OPD
			a. Kumulatif	Persen	N/A	10,06	10,78	11,49	12,21	12,92	13,49	
			b. tahunan	Persen	N/A	19,04	20,63	22,21	23,8	25,38	26,65	
		11. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Ramah Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	73,96	77,2	77,37	77,54	77,7	77,87	78,04	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		12. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undermourishment)	Persen	7,54	7,2	6,87	6,56	6,26	5,98	5,71	Dinas Ketahanan Pangan TPH
			Skor Pola Pangan Harapan	Poin	89,16	90,05	90,95	91,85	92,77	93,7	94,64	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
			Intensitas energi primer	SBM/Rp. Milyar	81	79,4	77,64	75,88	74,12	72,36	70,6	Dinas Peridustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral
			Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	ha	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	Dinas Perindag dan ESDM
Misi 5. Memperkuat	8. Terwujudnya		Indeks Demokrasi Indonesia	Poin/Skor	80,19	80,5 - 82,46	83,08 - 84,08	84,70 - 85,70	86,32 - 87,32	87,95 - 88,95	89,57 - 90,57	Seluruh OPD

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh	Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga	13. Menguatnya Peran Keluarga, Kesenjangan Gender, Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama dalam Kehidupan Sosial	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin/skor	0,399	0,395	0,39	0,386	0,382	0,377	0,373	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga/IPKK	Poin	69,79	69,79	71,04	71,96	72,66	73,22	73,67	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
			Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	80,88	81,2	81,5	82	82,5	83	83,5	Badan Kesbangpol
		14. Menguatnya Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai-nilai Budaya Lokal sebagai Identitas Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin/Skor	N/A	55,44 - 55,48	55,98- 56,05	56,52- 56,59	57,06- 57,14	57,56- 57,67	58,13- 58,20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ekonomi Kreatif

Sumber Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2025, (data diolah)

Tabel 3. 6. Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD				
RPJMD 2025-2029			RPJPD 2025-2045	
Visi : Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan			Visi : Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan	
Misi	Tujuan	Sasaran	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Masyarakat Sumatera Utara sehat dan terjamin	IE 1. Kesehatan untuk semua
		2. Meratanya Pendidikan Berkualitas	2. Masyarakat Sumatera Utara berpendidikan berkualitas unggul	IE 2. Pendidikan unggul dan merata
	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	3. Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif	3. Masyarakat Sumatera Utara sejahtera dan terlindungi	IE 3. Perlindungan sosial yang adaptif
2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	3. Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	4. Meningkatnya Hilirisasi Produk Unggulan Daerah	4. Masyarakat Sumatera Utara yang produktif dengan keunggulan IPTEK dan inovasi serta menerapkan ekonomi berkelanjutan	IE 4. IPTEK, inovasi dan produktivitas ekonomi
		5. Meningkatnya Aktivitas Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan		IE 6. Investasi unggul bernilai tinggi yang didukung oleh transformasi digital
		6. Terciptanya Stabilitas Harga		IE 5. Penerapan ekonomi hijau melalui industri hijau
	4. Ekonomi yang Stabil dan inklusif	7. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi		IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro
				IE 8. Pertumbuhan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat ekonomi
				IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan global
3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	5. Pengelolaan Sektor Publik yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	8. Menguatnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas	5. Pemerintahan Sumatera Utara berkinerja unggul didukung partisipasi masyarakat yang tinggi	IE 9. Penguatan kapabilitas tata kelola berintegritas dan regulasi adaptif
		9. Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah	6. Masyarakat Sumatera Utara yang demokratis dan aman dengan stabilitas ekonomi makro	IE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
	6. Penguatan Efektivitas Kebijakan	10. Meningkatnya Keamanan		IE 10. Masyarakat demokratis dan

RPJMD 2025-2029			RPJPD 2025-2045	
Visi : Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan			Visi : Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan	
Misi	Tujuan	Sasaran	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
		dan Ketertiban Lingkungan	yang unggul dan berdaya gentar kawasan	penciptaan lingkungan aman
4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan	7. Peningkatan Akses terhadap Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan guna Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat	11. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Ramah Lingkungan		IE 15. Lingkungan hidup yang berkualitas
		12. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan		IE 17. Resiliensi terhadap Benacana dan Perubahan Iklim
5. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh	8. Terwujudnya Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga	13. Menguatnya Peran Keluarga, Kesetaraan Gender, Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama dalam Kehidupan Sosial	7. Masyarakat Sumatera Utara berketahanan sosial budaya dan ekologi yang unggul, maju dan berkelanjutan	IE 16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
		14. Menguatnya Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai-nilai Budaya Lokal sebagai Identitas Daerah		IE 10. Masyarakat demokratis dan penciptaan lingkungan aman
				IE 13. Beragama maslahat dan berkebudayan maju
				IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif
				IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2025, (data diolah)

3.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Sumatera Utara mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan efektif dan efisien. Strategi adalah langkah-langkah atau cara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan rangkaian kerja sebagai penjabaran misi yang selaras dengan strategi agar pencapaian tujuan dan sasaran tercapai dengan baik.

Strategi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 ini telah didahului oleh analisis yang cermat atas kondisi makro ekonomi yang ada di daerah dan nasional serta kondisi mikro di daerah. Sebelum masuk pada strategi pembangunan, telah diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara. Sebagai respons terhadap isu strategis, akhirnya ditetapkan Arah Kebijakan yang selaras dengan Strategi sebagai langkah-langkah operasional dalam pelaksanaan misi.

Arah Kebijakan dan strategi dalam rangka pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD sebagaimana terdapat dalam tabel 3.4 dijabarkan sebagaimana berikut ini.

1. Misi 1 **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)** memiliki 2 tujuan yang ingin dicapai yaitu **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**, dan **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran pembangunan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
- b. Meratanya Pendidikan Berkualitas;

Misi pertama pembangunan daerah ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama bagi kemajuan dan kemandirian daerah. Tujuan yang ingin dicapai dari misi ini adalah terwujudnya SDM yang sehat, terdidik, produktif, serta mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan ekonomi. Untuk itu, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat layanan dasar melalui penguatan sektor kesehatan dan pendidikan. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berorientasi pada peningkatan akses, tetapi juga menjamin inklusivitas dan kualitas layanan, agar seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh manfaat yang setara.

Dalam kerangka tersebut, ditetapkan dua sasaran pembangunan yang saling melengkapi. Pertama, *meningkatkan derajat kesehatan masyarakat*, diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang merata dan berkelanjutan. Kedua, *meratanya pendidikan berkualitas*, bertujuan memperkecil kesenjangan akses dan mutu pendidikan antarwilayah serta antar kelompok sosial. Kedua Sasaran tersebut dicapai melalui arah kebijakan yaitu :

- a. Penguatan jaminan kesehatan masyarakat dan optimalisasi sistem informasi layanan kesehatan daerah
- b. Peningkatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan gratis, promotif, dan preventif bagi seluruh masyarakat
- c. Penguatan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular secara terintegrasi
- d. Peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas kesehatan yang merata dan berstandar
- e. Peningkatan ketersediaan dan pemerataan tenaga medis spesialis
- f. Peningkatan kualitas gizi masyarakat
- g. Pengembangan dan penguatan rumah sakit unggulan daerah
- h. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan rumah sakit rujukan dengan standar pelayanan internasional
- i. Pengembangan layanan kesehatan terintegrasi berbasis digital

Arah kebijakan ini untuk mendukung misi pertama yang selaras dengan strategi provinsi untuk **Meningkatkan Kualitas Kesehatan**. Arah kebijakan lainnya yang mendukung misi pertama, yaitu :

- a. Pemerataan akses infrastruktur pendukung pembelajaran digital
- b. Peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah melalui pembangunan sekolah unggulan
- c. Peningkatan kualitas dan kelayakan sarana prasarana pendidikan
- d. Peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas infrastruktur pendidikan bagi penyandang disabilitas
- e. Penguatan kapasitas dan distribusi merata tenaga pendidik
- f. Penguatan pendidikan vokasi dan STEAM yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia kerja dan pengembangan industri lokal
- g. Mengembangkan pusat pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada keterampilan yang relevan dengan kebutuhan bioindustri dan pariwisata
- h. Perluasan akses dan pemerataan kesempatan pendidikan
- i. Penguatan karakter pelajar melalui pengembangan minat, bakat, dan kreativitas
- j. Peningkatan daya saing dan prestasi pelajar
- k. Penguatan keterhubungan pendidikan vokasi dengan dunia kerja
- l. Pengembangan dan pembinaan olahraga pelajar, termasuk olahraga disabilitas, untuk meningkatkan prestasi dan partisipasi

Arah kebijakan ini selaras dengan strategi kedua yaitu **Peningkatan Kualitas Pendidikan**. Tujuan Kedua Dari Misi 1 yaitu Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Tujuan ini memiliki 1 sasaran yaitu **Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif**. Sasaran ini dapat dicapai melalui serangkaian arah kebijakan berikut:

- a. Penyaluran bantuan sosial tepat sasaran
- b. Peningkatan akses bantuan hukum dan perlindungan masyarakat berbasis keadilan restoratif
- c. Penguatan kelembagaan dan kompetensi SDM dalam pelayanan sosial
- d. Pengembangan sistem data terpadu dan pemutakhiran informasi untuk peningkatan ketepatan sasaran program perlindungan sosial
- e. Perluasan akses dan kepesertaan masyarakat dalam program jaminan sosial secara inklusif
- f. Perlindungan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah
- g. Peningkatan keterampilan dan kemandirian warga panti sosial
- h. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja

Arah kebijakan ini untuk mendukung misi pertama yang selaras dengan strategi provinsi untuk penguatan **Perlindungan Sosial**.

2. Misi 2 **Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah** diturunkan ke dalam 2 tujuan pembangunan, yaitu **(1) Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan** serta **(2) Ekonomi yang Stabil dan inklusif**. Tujuan pertama dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran pembangunan, sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya Hilirisasi Produk Unggulan Daerah;
 - b. Meningkatnya Aktivitas Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan.

Misi 2 *Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah* diarahkan untuk membangun fondasi ekonomi daerah yang kokoh, adaptif, dan inklusif di tengah dinamika global dan nasional. Tujuan pertama, yaitu *mewujudkan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan*, menekankan pentingnya transformasi ekonomi daerah yang tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga tangguh dalam jangka panjang. Hal ini dicapai melalui penguatan sektor-sektor produktif unggulan, inovasi teknologi, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Untuk mencapai sasaran pertama yaitu meningkatnya

hilirisasi produk unggulan daerah, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pengembangan pemasaran digital dan galeri virtual produk UMKM kreatif
- b. Penguatan infrastruktur dan teknologi kawasan industri strategis
- c. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kawasan industri
- d. Penguatan kemitraan dan akses pasar bagi hasil pertanian
- e. Pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan dan efektivitas pemasaran hasil pertanian lokal
- f. Penguatan sistem logistik dan distribusi untuk menjamin kelancaran dan keterjangkauan akses pasar
- g. Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata melalui konektivitas
- h. Penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah
- i. Meningkatkan akses, literasi, dan pemanfaatan layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat

Sembilan arah kebijakan tersebut selaras dengan strategi **Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**. Arah kebijakan berikutnya yang mendukung misi kedua yaitu:

- a. Peningkatan transformasi digital pelaku IKM dan UMKM
- b. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan promosi produk UMKM melalui penyediaan ruang kolaboratif dan etalase pemasaran
- c. Mendorong kolaborasi antara industri besar, startup, dan UMKM untuk memperkuat rantai nilai dan inovasi usaha
- d. Memperkuat kapasitas UMKM melalui pendampingan, inovasi, jaringan, teknologi, akses pasar, dan ketahanan usaha
- e. Pengembangan sentra industri kreatif terpadu di Kawasan Sport Center Sumatera Utara

Lima arah kebijakan tersebut selaras terhadap strategi provinsi dalam **Mengembangkan Ekosistem UMKM dan Ekonomi Kreatif**.

Arah kebijakan dengan fokus industrialisasi:

- a. Meningkatkan kapasitas dan relevansi pelatihan kerja
- b. Mengembangkan pusat pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada keterampilan yang relevan dengan kebutuhan bioindustri dan pariwisata

- c. Mendorong pengembangan kawasan industri dan klaster bioindustri
 - d. Mendukung peningkatan produksi biodiesel dan hilirisasi kelapa sawit
 - e. Peningkatan nilai tambah sektor perkebunan melalui dukungan hilirisasi dan keberlanjutan produksi
 - f. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah kawasan unggulan perikanan tangkap dan budidaya
 - g. Pengembangan diversifikasi produk olahan cabai merah
 - h. Pengembangan kawasan unggulan pertanian, hortikultura, dan peternakan
 - i. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah kawasan perkebunan kelapa, kopi, dan aren
 - j. Meningkatkan daya tarik investasi, menjamin kepastian berusaha, dan menciptakan iklim usaha yang transparan
 - k. Memperkuat industri regional dan bioindustri melalui investasi berskala besar
 - l. Menerapkan teknologi hijau dan praktik berkelanjutan dalam bioindustri
 - m. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
- Rangkaian arah kebijakan tersebut selaras terhadap strategi **Pengembangan Hilirisasi dan Industrialisasi**. Arah kebijakan berikutnya yaitu:

- a. Penguatan kemitraan riset dan inovasi yang bernilai tambah ekonomi dan ramah lingkungan
- b. Peningkatan pemanfaatan teknologi dan penguatan tata kelola BUMDes
- c. Penguatan riset dan inovasi bibit unggul
- d. Penguatan infrastruktur dan teknologi kawasan industri strategis
- e. Penguatan kolaborasi riset dan inovasi dengan perguruan tinggi, perusahaan, dan lembaga penelitian

Arah kebijakan tersebut selaras terhadap strategi **Peningkatan IPTEK dan Inovasi**. Kemudian, untuk mencapai sasaran 2 dari Misi 2 yaitu *Meningkatnya Aktivitas Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan*, maka membutuhkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Mendorong penerapan ekonomi sirkular

- b. Pemulihan ekosistem mangrove dan pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat
- c. Penguatan pengawasan konservasi laut berbasis pemberdayaan nelayan
- d. Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sistem pangan daerah
- e. Penguatan sarana dan prasarana perikanan yang efisien dan ramah lingkungan
- f. Penguatan perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan
- g. Penguatan kemitraan dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah
- h. Peningkatan kesadaran publik dan perubahan perilaku melalui edukasi dan advokasi pengurangan plastik sekali pakai
- i. Ketersediaan pupuk organik dan organik yang cukup dan memudahkan serta menguntungkan petani
- j. Mengoptimalkan ekonomi biru

Arah kebijakan ini didukung oleh strategi **Pengembangan Ekonomi Berwawasan Lingkungan. Selanjutnya.** Arah kebijakan berikutnya yaitu:

- a. Penguatan destinasi pariwisata prioritas melalui dukungan infrastruktur, promosi, dan pelestarian kawasan strategis
- b. Penguatan pariwisata berbasis potensi lokal, lingkungan, dan edukasi
- c. Penguatan promosi pariwisata berbasis digital dan peningkatan citra destinasi unggulan
- d. Peningkatan kualitas dan daya tarik paket aktivitas pariwisata melalui inovasi, kurasi pengalaman wisata, serta standardisasi layanan
- e. Perencanaan pengembangan pariwisata jangka panjang yang terarah, berkelanjutan, dan berbasis potensi daerah
- f. Pengembangan perencanaan terpadu desa wisata tematik dan kawasan wisata perkotaan
- g. Pengembangan kawasan ekonomi khusus pertanian dan pariwisata
- h. Pengembangan kawasan strategis budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif terpadu
- i. Mengelola pariwisata secara berkelanjutan melalui Kelompok Sadar Wisata

- j. Memastikan keamanan dan keselamatan di daya tarik wisata
- k. Memperkuat pengelolaan sampah di kawasan destinasi pariwisata
- l. Mengurangi dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan

Arah kebijakan ini selaras dengan strategi **provinsi untuk Mengembangkan Pariwisata Bertaraf Global**. Selanjutnya, Tujuan kedua, yaitu *mewujudkan ekonomi yang stabil dan inklusif*, mencerminkan upaya untuk menciptakan pemerataan manfaat pembangunan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat. Stabilitas harga menjadi salah satu indikator utama yang dijaga agar daya beli masyarakat tetap terjaga, termasuk pengendalian inflasi komoditas strategis. Di sisi lain, peningkatan pemerataan pembangunan ekonomi dilakukan dengan mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di luar wilayah utama serta membuka akses terhadap sumber daya ekonomi secara lebih merata. Tujuan ini memiliki 2 sasaran pembangunan, yaitu (1) *Terciptanya Stabilitas Harga*, dan (2) *Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi*. Sasaran pertama dapat terwujud melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Perlindungan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
- b. Penguatan stabilisasi harga dan ketersediaan sarana produksi pertanian.

Arah kebijakan ini selaras dengan strategi provinsi yaitu **Pengawasan Distribusi Barang dan Stabilisasi Harga**. Kemudian, sasaran kedua dari tujuan *mewujudkan ekonomi yang stabil dan inklusif* adalah *Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi*. Sasaran ini dicapai melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas perempuan dan pemuda melalui pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi lokal
- b. Penguatan sistem informasi pasar kerja untuk meningkatkan konektivitas antara pencari kerja dan penyedia lapangan kerja
- c. Penguatan sistem pengupahan yang adil, transparan, dan berkeadilan bagi pekerja
- d. Meningkatnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam dunia kerja formal
- e. Peningkatan daya saing tenaga kerja baik formal maupun nonformal

Rincian arah kebijakan ini didukung melalui strategi **Penguatan Kapasitas dan Aksesibilitas Ketenagakerjaan Inklusif dan**

Berkeadilan. Arah kebijakan lainnya yang mendukung pencapaian misi 2 yaitu:

- a. Meningkatkan promosi potensi unggulan daerah dan memperluas kemitraan strategis lintas sektor
- b. Mendorong pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung pelabuhan perikanan
- c. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan
- d. Peningkatan akses pembiayaan bagi kelompok tani
- e. Meningkatkan akses energi bagi nelayan
- f. Meningkatkan akses dan kualitas jaringan internet sampai ke wilayah terpencil
- g. Memperluas konektivitas dan aksesibilitas wilayah
- h. Meningkatkan kualitas dan jangkauan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah
- i. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah terpencil

Arah kebijakan ini selaras dengan strategi **Pemerataan Sarana Prasarana Ekonomi**. Arah kebijakan selanjutnya yaitu:

- a. Meningkatkan produktivitas peternakan
- b. Mengembangkan ekonomi desa melalui optimalisasi potensi pangan lokal untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat desa
- c. Memperkuat kelembagaan dan kapasitas pengelola desa wisata
- d. Mendorong penguatan koperasi sektor riil dan multipihak
- e. Mendorong pembangunan dan kemandirian desa melalui pemanfaatan potensi lokal secara optimal
- f. Meningkatkan kapasitas ekonomi desa melalui pemberdayaan usaha lokal dan penguatan kelembagaan
- g. Meningkatkan kapasitas usaha BUMDes
- h. Memperkuat infrastruktur desa untuk mendukung pengembangan bioindustri dan Pariwisata

Arah kebijakan ini selaras dengan strategi provinsi dalam **Meningkatkan Peran Desa dalam Kemajuan Daerah**.

3. Dalam rangka pencapaian Misi 3 **Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**, dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai (1) *Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas* dan (2) *Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan yang*

mendukung pelaksanaan kebijakan dan pembangunan. Tujuan yang pertama, memiliki 2 sasaran antara lain (1) *Menguatnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas*, dan (2) *Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah*. Untuk mencapai sasaran pertama, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan
- b. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme APIP
- c. Meningkatkan integrasi, akurasi, dan akuntabilitas dalam perencanaan serta pengelolaan keuangan daerah
- d. Mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
- e. Memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif, dinamis dan responsif
- f. Penguatan pengelolaan dan pemanfaatan Satu Data Sumut untuk perencanaan pembangunan
- g. Peningkatan Profesionalitas dan Integritas ASN
- h. Meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara melalui sistem merit
- i. Meningkatkan kerjasama internasional untuk investasi, teknologi, dan pengetahuan
- j. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan berbasis risiko
- k. Pengelolaan kearsipan pemerintahan yang tertib dan akuntabel
- l. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Rangkaian arah kebijakan tersebut selaras dengan strategi provinsi untuk **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan**. Arah kebijakan berikutnya:

- a. Meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik
- b. Mengoptimalkan kinerja dan akuntabilitas BUMD
- c. Mendorong transparansi dan akuntabilitas pembangunan

Arah kebijakan ini didukung melalui strategi **Peningkatan Pelayanan Publik**. Untuk mencapai sasaran kedua, maka ditetapkan arah kebijakan antara lain:

- a. Memperkuat peran dan daya saing BUMD
- b. Mendukung transformasi kelembagaan dan penguatan kinerja Bank Sumut

- c. Meningkatkan penerimaan daerah melalui perluasan basis, intensifikasi, penguatan sistem informasi dan digitalisasi pemungutan pajak serta retribusi secara efektif dan transparan
- d. Mendorong pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah secara produktif dan berkelanjutan
- e. Membuka proyek perintis dengan pembiayaan alternatif Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
- f. Memperkuat instrumen dan sistem informasi untuk reformasi tata kelola fiskal daerah

Arah kebijakan ini diterjemahkan ke dalam strategi **Peningkatan kapasitas dan kemandirian fiskal**. Tujuan Kedua yaitu *Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan pembangunan*, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan sistem keamanan yang modern dan efektif
- b. Menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku kerusakan lingkungan
- c. Meningkatkan sinergi dan kemitraan antara aparat keamanan dan masyarakat
- d. Memperkuat upaya pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi guna menghentikan dan mengendalikan peredaran narkoba
- e. Meningkatkan penyelesaian konflik agraria secara cepat dan efektif

Arah kebijakan ini selaras dengan strategi **Penguatan Stabilitas Sosial, Keamanan, dan Ketahanan Masyarakat**.

4. Misi 4 yaitu **Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan**. Misi ini bertujuan yaitu adanya *Peningkatan Akses terhadap Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan guna Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat*. Tujuan tersebut kemudian diturunkan ke dalam 2 sasaran yang harus dicapai, yaitu (1) *Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Ramah Lingkungan*, dan (2) *Meningkatnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan*. Untuk mencapai sasaran yang pertama, maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan konektivitas antarwilayah dan kawasan
- b. Meningkatkan akses dan kualitas air minum serta sanitasi

- c. Mendorong pembangunan permukiman layak, infrastruktur dasar, dan PSU yang memadai
- d. Meningkatkan pengelolaan sampah terpadu
- e. Pengembangan infrastruktur terpadu untuk mendukung konektivitas dan pelayanan publik
- f. Pemerataan infrastruktur layanan dasar di kawasan afirmasi, terluar, dan terpencil
- g. Pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis BRT dan kereta commuter
- h. Subsidi bus perintis bagi wilayah terpencil
- i. Meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pembangunan dan pengelolaan Sistem Pengolahan Air Limbah regional
- j. Pengembangan taman untuk pelestarian keanekaragaman hayati
- k. Pemulihan ekosistem mangrove dan pesisir melalui pemberdayaan masyarakat

Rangkaian arah kebijakan ini didukung dengan strategi **Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Ramah Lingkungan**. Arah kebijakan berikutnya untuk mendukung pencapaian Misi 4 yaitu:

- a. Memperkuat kapasitas penanggulangan banjir melalui peningkatan infrastruktur, mitigasi risiko, dan sistem respons yang terintegrasi dan berkelanjutan
- b. Mendorong penerapan prinsip bangunan hijau
- c. Meningkatkan penghijauan dan kelestarian lingkungan
- d. Penguatan pengelolaan sampah terpadu skala regional
- e. Peningkatan pengelolaan air limbah terpadu skala regional
- f. Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana

Arah kebijakan tersebut selaras dengan strategi provinsi untuk **Meningkatkan Ketangguhan Lingkungan dan Mitigasi Risiko Bencana**. Selanjutnya, untuk mencapai sasaran kedua yaitu *Meningkatnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan*, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Mendorong pengembangan energi terbarukan
- b. Meningkatkan daya dukung infrastruktur KEK
- c. Mendorong transisi menuju transportasi berkelanjutan

Arah kebijakan ini selaras dengan strategi provinsi untuk **Memperkuat Ketahanan Energi dan Air**. Kemudian, arah kebijakan berikutnya adalah:

- a. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan intensifikasi dan pengembangan prasarana produksi
- b. Peningkatan infrastruktur irigasi dan sumber air pertanian
- c. Pengembangan kawasan unggulan pertanian, hortikultura, dan peternakan
- d. Mendukung diversifikasi produk pertanian
- e. Mendorong pengelolaan lahan pertanian yang berkelanjutan
- f. Meningkatkan inovasi pangan lokal
- g. Memastikan data kepemilikan lahan akurat dan lengkap sebagai dasar strategis untuk mewujudkan swasembada pangan
- h. Meningkatkan kapasitas penyuluh dan petani
- i. Mendorong generasi milenial untuk berperan aktif dalam pertanian melalui pembinaan, akses teknologi, dan dukungan kewirausahaan
- j. Memperkuat akses pembiayaan, manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan usaha pertanian
- k. Dukungan penurunan biaya ekonomi sektor pertanian
- l. Dukungan peningkatan produksi garam

Arah kebijakan ini selaras dengan strategi Provinsi dalam **Memperkuat Kemandirian Pangan**.

5. Misi 5 **Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh** diarahkan agar berdampak pada menguatnya nilai-nilai toleransi dan saling menghargai antar umat beragama dalam kehidupan sosial, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya lokal. Misi ini memiliki tujuan yaitu *Terwujudnya Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga*, dengan 2 sasaran yang dituju yaitu (1) *Menguatnya Peran Keluarga, Kesetaraan Gender, Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama dalam Kehidupan Sosial*, dan (2) *Menguatnya Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai-nilai Budaya Lokal sebagai Identitas Daerah*. Untuk mencapai sasaran pertama, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Pengembangan dan penguatan jaringan sosial masyarakat guna meningkatkan solidaritas dan kepedulian antar warga.

- b. Penguatan ruang dialog lintas komunitas untuk membangun toleransi, kebersamaan, dan harmoni sosial antar kelompok masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas pembangunan perempuan dan perlindungan anak
- d. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan
- e. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga
- f. Memperkuat upaya pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi guna menghentikan dan mengendalikan peredaran narkoba
- g. Fasilitasi dan dukungan pembangunan dan perbaikan rumah ibadah
- h. Mengoptimalkan kerukunan umat beragama dan budaya

Arah kebijakan ini selaras dengan strategi provinsi untuk **Mendorong Harmoni Sosial, Kerukunan Beragama, Ketahanan Keluarga dan Kesetaraan Gender**. Selanjutnya, untuk mencapai sasaran kedua yaitu *Menguatnya Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai-nilai Budaya Lokal sebagai Identitas Daerah*, maka diturunkan ke dalam arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan situs cagar budaya
- b. Penguatan pemanfaatan teknologi digital untuk pelestarian, promosi, dan edukasi cagar budaya serta destinasi wisata berbasis pengetahuan
- c. Pelestarian dan pengembangan seni budaya

Serangkaian arah kebijakan ini selaras dengan strategi provinsi untuk **Meningkatkan Pelestarian dan Pemanfaatan Budaya Lokal untuk Memperkuat Identitas Daerah**.

Tabel 3. 7. Misi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

MISI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Penguatan jaminan kesehatan masyarakat dan optimalisasi sistem informasi layanan kesehatan daerah
	Peningkatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan gratis, promotif, dan preventif bagi seluruh masyarakat
	Penguatan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular secara terintegrasi
	Peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas kesehatan yang merata dan berstandar
	Peningkatan ketersediaan dan pemerataan tenaga medis spesialis
	Peningkatan kualitas gizi masyarakat
	Pengembangan dan penguatan rumah sakit unggulan daerah
	Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan rumah sakit rujukan dengan standar pelayanan internasional
	Pengembangan layanan kesehatan terintegrasi berbasis digital
	Pemerataan akses infrastruktur pendukung pembelajaran digital
	Memperkuat pelayanan kesehatan darurat dan responsif bagi masyarakat terdampak bencana maupun kejadian luar biasa (KLB)
	Peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah melalui pembangunan sekolah unggulan
	Peningkatan kualitas dan kelayakan sarana prasarana pendidikan
	Peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas infrastruktur pendidikan bagi penyandang disabilitas
	Penguatan kapasitas dan distribusi merata tenaga pendidik
	Penguatan pendidikan vokasi dan STEAM yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia kerja dan pengembangan industri lokal
	Mengembangkan pusat pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada keterampilan yang relevan dengan kebutuhan bioindustri dan pariwisata
	Perluasan akses dan pemerataan kesempatan pendidikan
	Penguatan karakter pelajar melalui pengembangan minat, bakat, dan kreativitas
	Penguatan budaya baca dan literasi digital masyarakat
	Peningkatan daya saing dan prestasi pelajar
	Penguatan keterhubungan pendidikan vokasi dengan dunia kerja
	Pengembangan dan pembinaan olahraga pelajar, termasuk olahraga disabilitas, untuk meningkatkan prestasi dan partisipasi

MISI	ARAH KEBIJAKAN
	Penyaluran bantuan sosial tepat sasaran
	Peningkatan akses bantuan hukum dan perlindungan masyarakat berbasis keadilan restoratif
	Penguatan kelembagaan dan kompetensi SDM dalam pelayanan sosial
	Pengembangan sistem data terpadu dan pemutakhiran informasi untuk peningkatan ketepatan sasaran program perlindungan sosial
	Perluasan akses dan kepesertaan masyarakat dalam program jaminan sosial secara inklusif
	Perlindungan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah
	Peningkatan keterampilan dan kemandirian warga panti sosial
	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja
	Memastikan tersedianya pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara secara inklusif
	Menguatkan rehabilitasi sosial dan penanganan bencana
	Memperkuat perlindungan sosial masyarakat rentan melalui koordinasi penghimpunan dan distribusi zakat secara efektif
Misi 2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	Pengembangan pemasaran digital dan galeri virtual produk UMKM kreatif
	Penguatan infrastruktur dan teknologi kawasan industri strategis
	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kawasan industri
	Penguatan kemitraan dan akses pasar bagi hasil pertanian
	Pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan dan efektivitas pemasaran hasil pertanian lokal
	Penguatan sistem logistik dan distribusi untuk menjamin kelancaran dan keterjangkauan akses pasar
	Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata melalui konektivitas
	Penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah
	Meningkatkan akses, literasi, dan pemanfaatan layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat
	Peningkatan transformasi digital pelaku IKM dan UMKM
	Penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan promosi produk UMKM melalui penyediaan ruang kolaboratif dan etalase pemasaran
	Mendorong kolaborasi antara industri besar, startup, dan UMKM untuk memperkuat rantai nilai dan inovasi usaha

MISI	ARAH KEBIJAKAN
	Memperkuat kapasitas UMKM melalui pendampingan, inovasi, jaringan, teknologi, akses pasar, dan ketahanan usaha
	Pengembangan sentra industri kreatif terpadu di Kawasan Sport Center Sumatera Utara
	Meningkatkan kapasitas dan relevansi pelatihan kerja
	Mengembangkan pusat pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada keterampilan yang relevan dengan kebutuhan bioindustri dan pariwisata
	Mendorong pengembangan kawasan industri dan klaster bioindustri
	Mendukung peningkatan produksi biodiesel dan hilirisasi kelapa sawit
	Peningkatan nilai tambah sektor perkebunan melalui dukungan hilirisasi dan keberlanjutan produksi
	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah kawasan unggulan perikanan tangkap dan budidaya
	Pengembangan diversifikasi produk olahan cabai merah
	Pengembangan kawasan unggulan pertanian, hortikultura, dan peternakan
	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah kawasan perkebunan kelapa, kopi, dan aren
	Pembentukan Kawasan Industri Sumatera Utara dalam rangka Peningkatan Pemerataan Ekonomi, Peningkatan Investasi, serta Penguatan Daya Saing Logistik Regional dan Komoditas Unggulan Provinsi Sumatera Utara
	Meningkatkan daya tarik investasi, menjamin kepastian berusaha, dan menciptakan iklim usaha yang transparan
	Memperkuat industri regional dan bioindustri melalui investasi berskala besar
	Menerapkan teknologi hijau dan praktik berkelanjutan dalam bioindustri
	Mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
	Penguatan kemitraan riset dan inovasi yang bernilai tambah ekonomi dan ramah lingkungan
	Peningkatan pemanfaatan teknologi dan penguatan tata kelola BUMDes
	Penguatan riset dan inovasi bibit unggul
	Penguatan infrastruktur dan teknologi kawasan industri strategis
	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi dengan perguruan tinggi, perusahaan, dan lembaga penelitian
	Mendorong penerapan ekonomi sirkular
	Pemulihan ekosistem mangrove dan pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat
	Penguatan pengawasan konservasi laut berbasis pemberdayaan nelayan

MISI	ARAH KEBIJAKAN
	Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sistem pangan daerah
	Penguatan sarana dan prasarana perikanan yang efisien dan ramah lingkungan
	Penguatan perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan
	Penguatan kemitraan dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah
	Peningkatan kesadaran publik dan perubahan perilaku melalui edukasi dan advokasi pengurangan plastik sekali pakai
	Ketersediaan pupuk organik dan organik yang cukup dan memudahkan serta menguntungkan petani
	Mengoptimalkan ekonomi biru
	Penguatan destinasi pariwisata prioritas melalui dukungan infrastruktur, promosi, dan pelestarian kawasan strategis
	Penguatan pariwisata berbasis potensi lokal, lingkungan, dan edukasi
	Penguatan promosi pariwisata berbasis digital dan peningkatan citra destinasi unggulan
	Peningkatan kualitas dan daya tarik paket aktivitas pariwisata melalui inovasi, kurasi pengalaman wisata, serta standardisasi layanan
	Perencanaan pengembangan pariwisata jangka panjang yang terarah, berkelanjutan, dan berbasis potensi daerah
	Pengembangan perencanaan terpadu desa wisata tematik dan kawasan wisata perkotaan
	Pengembangan kawasan ekonomi khusus pertanian dan pariwisata
	Pengembangan kawasan strategis budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif terpadu
	Mengelola pariwisata secara berkelanjutan melalui Kelompok Sadar Wisata
	Memastikan keamanan dan keselamatan di daya tarik wisata
	Memperkuat pengelolaan sampah di kawasan destinasi pariwisata
	Mengurangi dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan
	Perlindungan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah
	Menjaga kestabilan harga komoditas pangan
	Peningkatan kapasitas perempuan dan pemuda melalui pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi lokal
	Penguatan sistem informasi pasar kerja untuk meningkatkan konektivitas antara pencari kerja dan penyedia lapangan kerja
	Penguatan sistem pengupahan yang adil, transparan, dan berkeadilan bagi pekerja

MISI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam dunia kerja formal
	Peningkatan daya saing tenaga kerja baik formal maupun nonformal
	Meningkatkan promosi potensi unggulan daerah dan memperluas kemitraan strategis lintas sektor
	Mendorong pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung pelabuhan perikanan
	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan
	Peningkatan akses pembiayaan bagi kelompok tani
	Meningkatkan akses energi bagi nelayan
	Meningkatkan akses dan kualitas jaringan internet sampai ke wilayah terpencil
	Memperluas konektivitas dan aksesibilitas wilayah
	Meningkatkan kualitas dan jangkauan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah
	Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah terpencil
	Meningkatkan produktivitas peternakan
	Mengembangkan ekonomi desa melalui optimalisasi potensi pangan lokal untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat desa
	Menguatkan kelembagaan dan kapasitas pengelola desa wisata
	Mendorong penguatan koperasi sektor riil dan multipihak
	Mendorong pembangunan dan kemandirian desa melalui pemanfaatan potensi lokal secara optimal
	Meningkatkan kapasitas ekonomi desa melalui pemberdayaan usaha lokal dan penguatan kelembagaan
	Meningkatkan kapasitas usaha BUMDes
	Memperkuat infrastruktur desa untuk mendukung pengembangan bioindustri dan Pariwisata
Misi 3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan
	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme APIP
	Meningkatkan integrasi, akurasi, dan akuntabilitas dalam perencanaan serta pengelolaan keuangan daerah
	Mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
	Memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif, dan responsif
	Penguatan pengelolaan dan pemanfaatan Satu Data Sumut untuk perencanaan pembangunan
	Peningkatan Profesionalitas dan Integritas ASN

MISI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara melalui sistem merit
	Meningkatkan kerjasama internasional untuk investasi, teknologi, dan pengetahuan
	Mengoptimalkan perencanaan pembangunan berbasis risiko
	Pengelolaan kearsipan pemerintahan yang tertib dan akuntabel
	Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
	Meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik
	Mengoptimalkan kinerja dan akuntabilitas BUMD
	Mendorong transparansi dan akuntabilitas pembangunan
	Memperkuat peran dan daya saing BUMD
	Mendukung transformasi kelembagaan dan penguatan kinerja Bank Sumut
	Meningkatkan penerimaan daerah melalui perluasan basis, intensifikasi, penguatan sistem informasi dan digitalisasi pemungutan pajak serta retribusi secara efektif dan transparan
	Mendorong pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah secara produktif dan berkelanjutan
	Membuka proyek perintis dengan pembiayaan alternatif Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
	Menguatkan instrumen dan sistem informasi untuk reformasi tata kelola fiskal daerah
	Mengembangkan sistem keamanan yang modern dan efektif
	Meningkatkan sinergi dan kemitraan antara aparat keamanan dan masyarakat
	Memperkuat upaya pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi guna menghentikan peredaran narkoba
	Meningkatkan penyelesaian konflik agraria secara cepat dan efektif
	Menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku kerusakan lingkungan
Misi 4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan	Meningkatkan konektivitas antarwilayah dan kawasan
	Meningkatkan akses dan kualitas air minum serta sanitasi
	Mendorong pembangunan permukiman layak, infrastruktur dasar, dan PSU yang memadai
	Meningkatkan pengelolaan sampah terpadu
	Pengembangan infrastruktur terpadu untuk mendukung konektivitas dan pelayanan publik
	Pemerataan infrastruktur layanan dasar di kawasan afirmasi, terluar, dan terpencil
	Pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis BRT dan kereta commuter
	Subsidi bus perintis bagi wilayah terpencil

MISI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pembangunan dan pengelolaan Sistem Pengolahan Air Limbah regional
	Pengembangan taman untuk pelestarian keanekaragaman hayati
	Pemulihan ekosistem mangrove dan pesisir melalui pemberdayaan masyarakat
	Memperkuat kapasitas penanggulangan banjir melalui peningkatan infrastruktur, mitigasi risiko, dan sistem respons yang terintegrasi dan berkelanjutan
	Mendorong penerapan prinsip bangunan hijau
	Meningkatkan penghijauan dan kelestarian lingkungan
	Penguatan pengelolaan sampah terpadu skala regional
	Peningkatan pengelolaan air limbah terpadu skala regional
	Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana
	Mendorong pengembangan energi terbarukan
	Meningkatkan daya dukung infrastruktur KEK
	Mendorong transisi menuju transportasi berkelanjutan
	Meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan intensifikasi dan pengembangan prasarana produksi
	Peningkatan infrastruktur irigasi dan sumber air pertanian
	Pengembangan kawasan unggulan pertanian, hortikultura, dan peternakan
	Mendukung diversifikasi produk pertanian
	Mendorong pengelolaan lahan pertanian yang berkelanjutan
	Meningkatkan inovasi pangan lokal
	Memastikan data kepemilikan lahan akurat dan lengkap sebagai dasar strategis untuk mewujudkan swasembada pangan
	Meningkatkan kapasitas penyuluh dan petani
	Mendorong generasi milenial untuk berperan aktif dalam pertanian melalui pembinaan, akses teknologi, dan dukungan kewirausahaan
	Memperkuat akses pembiayaan, manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan usaha pertanian
	Dukungan penurunan biaya ekonomi sektor pertanian
	Dukungan peningkatan produksi garam

MISI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 5. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh	Pengembangan dan penguatan jaringan sosial masyarakat guna meningkatkan solidaritas dan kepedulian antar warga.
	Penguatan ruang dialog lintas komunitas untuk membangun toleransi, kebersamaan, dan harmoni sosial antar kelompok masyarakat
	Meningkatkan kualitas pembangunan perempuan dan perlindungan anak
	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan
	Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga
	Memperkuat upaya pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi guna menghentikan peredaran narkoba
	Fasilitasi dan dukungan pembangunan dan perbaikan rumah ibadah
	Mengoptimalkan kerukunan umat beragama dan budaya
	Pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan situs cagar budaya
	Penguatan pemanfaatan teknologi digital untuk pelestarian, promosi, dan edukasi cagar budaya serta destinasi wisata berbasis pengetahuan
	Pelestarian dan pengembangan seni budaya

Sumber Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2025, (data diolah)

3.2.2. Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Daerah

Berdasarkan arah kebijakan yang merupakan rumusan yang selaras dengan strategi agar lebih terarah untuk mencapai tujuan sasaran dalam waktu 3 (tiga) tahun, memiliki fokus berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan struktur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja *outcome*. Berikut ini perubahan arah kebijakan tahunan Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030.

Tabel 3. 8. Arah Kebijakan Tahunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030

PENTAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN				
Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Implementasi Awal dan Konsolidasi : • Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) dan Program Strategis Provinsi terpilih yang berdampak besar sesuai kemampuan keuangan daerah	Penguatan dan Ekspansi: • Akselerasi Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) dan Program Strategis Provinsi terpilih lanjutan sesuai kemampuan keuangan daerah	Perluasan dan Optimalisasi : • Penyelesaian Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) dan Pengoptimalan Pelaksanaan Program Strategis Provinsi terpilih lanjutan sesuai kemampuan keuangan daerah	Konsolidasi Lanjutan dan Penyelesaian : • Penyelesaian Program Strategis Provinsi terpilih lanjutan sesuai kemampuan keuangan daerah	Keberlanjutan dan Legacy • Penyiapan Skema Program Strategis Provinsi Lanjutan
• Penataan struktur dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta koordinasi lintas lembaga dan sektor	• Akselerasi sinergitas program antar OPD dan lintas pemerintah pusat-daerah	• Optimalisasi sinergitas program antar OPD dan lintas pemerintah pusat-daerah	• Penguatan sinergitas program antar OPD dan lintas pemerintah pusat-daerah	• Pelembagaan sistem integrasi kelembagaan dan kolaborasi multipihak
• Review dan harmonisasi regulasi sektoral, dan perumusan regulasi pendukung pembangunan	• Finalisasi peraturan pendukung, advokasi dan sosialisasi implementasi	• Penegakan regulasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan regulasi	• Penyempurnaan regulasi berdasarkan hasil evaluasi, dan harmonisasi dengan regulasi di tingkat nasional	• Finalisasi regulasi pendukung pembangunan jangka panjang
• Peningkatan kemitraan strategis antara pemerintah, swasta dan masyarakat	• Ekspansi Kemitraan berbasis proyek unggulan dan berdampak	• Optimalisasi Kemitraan berbasis proyek unggulan dan berdampak	• Konsolidasi Lanjutan Kemitraan berbasis proyek unggulan dan berdampak	• Pembentukan ekosistem kemitraan multi sektor

Sumber : Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2025, (data diolah)

3.2.3. Program Prioritas Daerah

Program pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 serta dengan mempertimbangkan isu-isu internasional, isu-isu nasional dan isu-isu daerah.

Pendekatan perencanaan yang digunakan dalam menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 Provinsi Sumatera Utara adalah pendekatan perencanaan pembangunan Tematik, Holistik, Integratif, dan spasial (THIS). Pendekatan THIS pada dasarnya adalah pendekatan yang memberi penekanan pada keterpaduan, bukan pendekatan yang berangkat dari sektor atau tugas dan fungsi semata tetapi tugas dan fungsi mendukung keterpaduan. Karena penekanannya pada keterpaduan, perencanaan ini, berangkat dari tema pembangunan yang menjadi dasar atau *starting point*-nya dalam lingkup daerah, tema bisa bersumber dari isu-isu strategis dan/atau prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh kepala daerah. Inilah titik pusat (*core*) dari perencanaan berbasis pendekatan THIS. Dalam hal ini perangkat daerah yang terlibat tersebut kita namakan integratif. Kemudian program-program dan kegiatan yang ada pada setiap Perangkat Daerah yang terlibat untuk membangun suatu tema kecil itu dinamakan Holistik. Kemudian spasial digunakan untuk mendukung pembangunan tematik besarnya yang akan menjadi tema kecil yang diintervensi oleh banyak Perangkat Daerah yang juga dinamakan integratif dan masing-masing perangkat daerah mengintervensi dengan program dan kegiatan yang dinamakan juga holistik.

Untuk mempercepat dampak pembangunan, dirumuskan enam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebagai *quick wins* pembangunan, yang secara langsung menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan sekaligus merepresentasikan implementasi dari kelima misi pembangunan. Selain enam PHTC, ada sebanyak 17 program prioritas yang dampaknya lebih bersifat jangka menengah. Setiap program didesain untuk memberikan dampak jangka pendek dan menengah yang terukur, sebagai fondasi menuju transformasi jangka panjang. Dengan kata lain, PHTC menjadi pengungkit awal yang mendekatkan Sumatera Utara pada kondisi ideal sebagaimana dicita-citakan dalam visi dan misi RPJMD.

Berikut adalah enam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC/*quick wins*) beserta tujuan, dampak yang diharapkan dan ruang lingkup yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029:

1. Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) Kepulauan Nias (2026), Kepulauan Nias dan Pantai Barat (2027), Kepulauan Nias, Pantai Barat dan Dataran Tinggi (2028), Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur (2029)

Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) adalah kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan menengah (SMA, SMK, dan SLB Negeri) tanpa dikenakan pungutan biaya pendidikan. Program ini diluncurkan untuk mendukung peningkatan angka partisipasi sekolah, mengurangi angka putus sekolah, serta mendorong keadilan sosial dalam layanan pendidikan.

Tujuan Program

- **Meningkatkan Akses Pendidikan.** Menghapus hambatan ekonomi agar seluruh anak usia sekolah, tanpa terkecuali, dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas.
- **Mencegah Putus Sekolah.** Menjamin keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan pendekatan berkeadilan.
- **Meningkatkan Kualitas SDM.** Memberikan pendidikan yang layak dan bermutu untuk menghasilkan generasi muda yang unggul dan kompetitif.
- **Menyiapkan Tenaga Kerja Siap Pakai,** khususnya bagi siswa SMK agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja.

Dampak yang Diharapkan

Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) ditujukan untuk mendorong peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah. Rata-rata lama sekolah (RLS) yang saat ini berada pada kisaran 9,93 tahun (2024) ditargetkan meningkat menjadi 10,83 tahun (2029), sementara harapan lama sekolah (HLS) dari 13,4 tahun (2024) ditingkatkan menjadi 13,86 tahun (2029). Dalam aspek sumber daya manusia, indeks modal manusia yang berada pada angka 0,54 (2025)

ditargetkan naik menjadi 0,57 (2029), seiring dengan meningkatnya kompetensi lulusan, khususnya SMK.

Ruang Lingkup Program

- Pembebasan biaya sekolah sebesar 100% secara bertahap untuk seluruh siswa SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri.
- Penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan industri melalui program magang, pelatihan, serta dukungan CSR (*Corporate Social Responsibility*) guna memperkuat kompetensi siswa SMK.

Lokus Pelaksanaan:

Zona Kepulauan Nias, Zona Pantai Barat, Zona Dataran Tinggi dan Zona Pantai Timur

Strategi Pembiayaan

- APBD Provinsi sebagai sumber utama untuk menanggung biaya pendidikan di seluruh sekolah negeri tingkat menengah.
- Dana BOS (APBN) untuk SMA/SMK & Dana BOP (APBN) untuk SLB guna mendukung kegiatan operasional dan sarana pendidikan.
- Kemitraan dengan sektor swasta dan industri untuk mendukung pelatihan, sertifikasi, dan penguatan kompetensi siswa SMK.

Keterkaitan dengan RPJMN 2025-2029 dan PHTC Nasional

Program PUBG sejalan dengan RPJMN 2025–2029, khususnya *Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)* poin ke-4, yaitu “Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.” Program nasional ini mendorong pembangunan sekolah unggulan termasuk renovasi ruang kelas dan peningkatan fasilitas pendidikan di daerah, selaras dengan intervensi pembangunan pendidikan unggulan di Sumatera Utara seperti pembangunan SMA/SMK baru, sekolah terbuka, serta integrasi dengan program vokasi berbasis industri lokal dan pariwisata.

Program PUBG juga memperkuat pelaksanaan visi pembangunan SDM unggul sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMN dan Arah Kebijakan Nasional, dengan fokus pada peningkatan indeks modal manusia dan pengurangan kesenjangan akses pendidikan di daerah tertinggal.

2. Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program Universal Health Coverage (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC Prioritas tahun 2026 - 2030)

Program Berobat Gratis (PROBIS) merupakan inisiatif strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, serta memperpanjang usia harapan hidup. Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan layanan kesehatan gratis dan menyeluruh bagi seluruh penduduk yang ber-KTP Sumatera Utara, dengan pendekatan sistem kesehatan yang digital, terintegrasi, dan responsif.

Dirancang untuk menghapus hambatan ekonomi dalam akses layanan medis, PROBIS menjamin bahwa setiap warga dapat memperoleh layanan kesehatan berkualitas tanpa biaya, termasuk kemudahan dalam menjangkau layanan spesialis melalui sistem digital yang modern dan informatif. Pelaksanaan program dijadwalkan mulai Oktober 2025.

Tujuan Program

- **Menjamin Akses Kesehatan Gratis.** Memastikan seluruh warga ber-KTP Sumatera Utara memperoleh layanan kesehatan secara cuma-cuma.
- **Cakupan Peserta JKN 100%.** Menyasar agar seluruh penduduk terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tanpa terkecuali.
- **Digitalisasi Layanan Kesehatan.** Meningkatkan efisiensi layanan melalui sistem pendaftaran online, rujukan elektronik, dan rekam medis yang terintegrasi.
- **Akses Mudah ke Layanan Spesialis.** Menyediakan dashboard digital berisi informasi tenaga medis spesialis di seluruh fasilitas mitra BPJS untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi ketersediaan layanan spesialis rumah sakit.

Dampak yang Diharapkan

Program Berobat Gratis (Probis) diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Sumatera Utara dengan memperbaiki usia harapan hidup dari 73,9 tahun (2024) menjadi 74,72 (2029). Program ini juga berperan dalam mendorong peningkatan Indeks Modal Manusia, yang pada 2024 masih berada pada angka 0,54 dan ditargetkan naik menjadi 0,57 pada 2029. Selain itu, Probis ditujukan untuk berkontribusi pada

penurunan tingkat kemiskinan, dari 7,19% (2024) menjadi hanya 2,82–3,82% pada akhir periode RPJMD tahun 2029.

Ruang Lingkup Program

- Pembangunan Sistem Informasi Kesehatan digital yang memfasilitasi akses ke semua layanan jaminan kesehatan.
- Implementasi sistem digital.
- Dashboard informasi dokter spesialis mencakup jadwal praktik dan lokasi fasilitas mitra BPJS.
- Sistem pendaftaran online untuk mengurangi antrean dan mempercepat proses administrasi.
- Peningkatan jenis cakupan layanan kesehatan yang lebih tinggi dan lebih berkualitas

Lokus Pelaksanaan

- 33 kabupaten/kota

Strategi Pembiayaan

- APBD Provinsi Sumatera Utara menanggung pembiayaan kepesertaan BPJS dengan skema kontribusi 20% oleh provinsi dan 80% oleh kabupaten/kota, yang secara bertahap, akan ditingkatkan kontribusi provinsi sebesar 2,5% setiap tahunnya hingga 30% pada tahun 2030. Peningkatan kontribusi provinsi akan menyebabkan kontribusi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara menjadi sebesar 70%.
- Integrasi Data Kesehatan melalui pelaksanaan kolaborasi dengan BPJS Kesehatan dalam integrasi data pasien guna meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan.

Keterkaitan dengan RPJMN 2025-2029 dan PHTC Nasional

Program Berobat Gratis (PROBIS) selaras dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang menempatkan sektor kesehatan sebagai pilar penting pembangunan sumber daya manusia (SDM). Fokus utama pemerintah pusat adalah memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan.

Secara khusus, PROBIS mendukung dan berkontribusi langsung pada Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Nasional poin ke-2, yaitu: “Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.”

PROBIS memperkuat arah reformasi sistem kesehatan nasional dengan mendorong digitalisasi dan transformasi layanan kesehatan yang adaptif, responsif, dan berbasis data. Ini mendukung target RPJMN dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh dan mampu merespons tantangan kesehatan masyarakat secara cepat dan terintegrasi.

3. Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP)

Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP) merupakan strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas pertanian, kestabilan harga, dan peningkatan kesejahteraan petani. Program ini dirancang untuk melindungi pendapatan petani dari fluktuasi harga pasar serta memastikan ketersediaan komoditas strategis seperti cabai bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau sepanjang tahun.

Melalui mekanisme intervensi harga dan pemanfaatan teknologi penyimpanan berbasis *Solar Dryer Dome*, pemerintah berupaya mencegah harga komoditas pertanian anjlok saat panen raya dan menghindari lonjakan harga saat pasokan terbatas. Program ini juga mendorong hilirisasi pertanian dengan mengolah hasil panen menjadi produk bernilai tambah, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

Tujuan Program

- Program ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga cabai dan komoditas pertanian utama lainnya agar tetap menguntungkan bagi petani sekaligus terjangkau bagi konsumen di berbagai kondisi pasar.
- Pemerintah ingin mencegah lonjakan harga yang ekstrem akibat gangguan pasokan, sekaligus menghindari kerugian petani saat terjadi surplus produksi dengan melakukan intervensi pasar.
- Program ini juga bertujuan melindungi petani dari ketidakpastian harga melalui penyerapan hasil panen oleh pemerintah berdasarkan harga patokan yang menguntungkan.
- Dengan memanfaatkan teknologi *Solar Dryer Dome*, daya simpan hasil pertanian dapat ditingkatkan sehingga komoditas tetap tersedia dan berkualitas selama musim paceklik.
- Pemerintah juga mendorong pengembangan industri hilir pertanian melalui pengolahan hasil panen menjadi produk yang memiliki nilai tambah ekonomis lebih tinggi.

Ruang Lingkup Program

- Pemerintah akan melakukan penyerapan hasil panen petani secara langsung menggunakan skema harga patokan untuk mencegah harga komoditas, khususnya cabai, jatuh ke bawah ambang batas Rp 22.000 per kilogram.
- Komoditas yang diserap akan disimpan dan diolah menjadi produk kering, seperti cabai kering, dengan menggunakan teknologi *Solar Dryer Dome* untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan.
- Produk hasil pengeringan akan dipasarkan kembali saat harga tinggi, sehingga memberikan keuntungan tambahan bagi daerah dan menjaga pasokan di pasar.
- Ketika terjadi lonjakan harga di pasar, pemerintah akan melakukan intervensi harga melalui pelaksanaan pasar murah guna menjaga daya beli masyarakat.

Dampak yang Diharapkan

Terciptanya harga komoditas pertanian yang stabil dan wajar berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dari 3,73% (2024) menjadi 7,8% (2029), yang menandakan produktivitas dan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah semakin menguat. Di sisi lain, upaya pengendalian harga pangan berhasil menjaga tingkat inflasi tetap stabil, dari 2,12% (2024) ke kisaran 1,4–3,7% (2029).

Program JASKOP mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melindungi petani dan menjaga ketahanan pangan daerah. Dengan intervensi pasar yang tepat dan dukungan teknologi, program ini diharapkan mampu menstabilkan harga, memperkuat sektor pertanian, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Keterkaitan dengan RPJMN 2025-2029 dan PHTC Nasional

Program JASKOP (Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan) merupakan salah satu inisiatif strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menciptakan sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh, sekaligus melindungi kesejahteraan petani dari volatilitas harga pasar. Program ini dirancang untuk menjaga harga komoditas strategis seperti cabai agar tetap stabil melalui mekanisme penyerapan hasil panen menggunakan harga patokan, penyimpanan hasil pertanian dengan

teknologi *Solar Dryer Dome*, serta pelaksanaan pasar murah saat terjadi lonjakan harga. Secara nasional, JASKOP memiliki keterkaitan erat dengan RPJMN 2025–2029, khususnya dalam prioritas pembangunan ketahanan ekonomi dan transformasi sosial. Program ini juga mendukung tujuan PHTC Nasional poin ke-3, yaitu “Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.” Melalui pengelolaan distribusi yang efisien dan pengolahan pascapanen yang modern, JASKOP tidak hanya mengamankan pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen, tetapi juga mendorong terciptanya nilai tambah bagi petani dan pelaku usaha lokal. Intervensi program ini selaras dengan strategi nasional dalam menjaga inflasi pangan, memperkuat rantai pasok, dan memperluas kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

4. Digitalisasi Pelayanan Publik “Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif” (CERDAS)

Program Digitalisasi Pelayanan Publik CERDAS merupakan langkah transformasi sistem pelayanan pemerintah di Provinsi Sumatera Utara guna menciptakan birokrasi yang lebih cepat, adaptif, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pendekatan digital yang terintegrasi dan berbasis teknologi, program ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses terhadap layanan administrasi publik secara efisien, transparan, dan inklusif.

Dengan mengusung prinsip *Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif (CERDAS)*, Pemerintah Provinsi berkomitmen menghadirkan layanan publik yang lebih ramah pengguna dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan teknologi ini, akses internet gratis akan disediakan di alun-alun dan ruang publik strategis sebagai bentuk nyata dari inklusi digital yang merata.

Tujuan Program

- Meningkatkan kecepatan layanan publik dengan mengandalkan sistem digital, sehingga masyarakat tidak lagi perlu hadir secara fisik ke kantor pemerintahan untuk mengurus administrasi.
- Menjamin keterjangkauan akses digital bagi seluruh masyarakat melalui penyediaan layanan internet gratis di berbagai titik ruang publik strategis.

- Mendukung inklusi digital bagi semua kalangan, termasuk masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi, agar mereka dapat beradaptasi dan memanfaatkan layanan digital secara optimal.

Dampak yang Diharapkan

Pelaksanaan program ini ditargetkan untuk memperbaiki kinerja tata kelola pemerintahan yang tercermin dari meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi dari 80,87 (A) menjadi 81,20 (A), serta perbaikan Indeks Pelayanan Publik dari 3,92 (2025) menjadi 3,69 (2029). Transparansi dan akuntabilitas juga diperkuat melalui peningkatan SAKIP dari 72,00 (BB) (2025) menjadi 74,0 (2029), dan penguatan Indeks Integritas Nasional yang ditargetkan dari 66,78 (2025) menjadi 69,51 (2029). Selain itu, Indeks Profesionalitas ASN naik dari 79,44 (2024) menjadi 80,45 (2029), menunjukkan birokrasi yang semakin adaptif dan tanggap, didukung oleh partisipasi publik yang lebih aktif dan inklusif. Dari sisi keuangan, PAD meningkat dari 60,43% (2024) menjadi 64,18% (2029). Seluruh capaian ini menegaskan komitmen Sumatera Utara dalam membangun pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik serta pembangunan berkelanjutan.

Ruang Lingkup

- Pembangunan portal layanan publik yang terintegrasi dan dapat diakses melalui aplikasi mobile dan laman web resmi, mencakup layanan administrasi, kependudukan, perizinan, dan pajak daerah.
- Penyediaan fitur digital seperti pendaftaran online, pemantauan status layanan, dan sistem pembayaran elektronik yang mempermudah proses administrasi masyarakat.
- Pemasangan akses WiFi gratis di ruang publik seperti alun-alun dan tempat strategis lainnya untuk memastikan semua masyarakat dapat mengakses layanan secara digital.
- Pengembangan sistem laporan pengaduan digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan atau masukan secara langsung dan mendapatkan tanggapan dari pemerintah secara cepat dan efisien.

Lokus Pelaksanaan

- 33 kabupaten/kota

Strategi Pembiayaan

- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan dana APBD untuk membangun infrastruktur digital serta mengembangkan layanan publik berbasis web dan aplikasi mobile.
- Kolaborasi juga dilakukan dengan operator telekomunikasi dalam penyediaan jaringan internet gratis yang tersebar di titik-titik strategis wilayah publik.

Keterkaitan dengan RPJMN 2025-2029 dan PHTC Nasional

Program CERDAS (Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif) merupakan bentuk transformasi digital yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mempercepat pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui pembangunan sistem layanan terintegrasi berbasis web dan aplikasi mobile, serta penyediaan akses Wi-Fi gratis di ruang-ruang publik, program ini ditujukan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil. CERDAS memiliki keterkaitan langsung dengan RPJMN 2025–2029 yang menempatkan transformasi digital dan penguatan tata kelola pemerintahan sebagai pilar penting reformasi struktural nasional. Secara khusus, CERDAS mendukung capaian PHTC Nasional poin ke-6 yang mencakup peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara, termasuk melalui digitalisasi proses kerja birokrasi dan sistem pelayanan publik berbasis teknologi. Selain itu, program ini sejalan dengan visi nasional membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan menciptakan layanan publik yang terintegrasi serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan CERDAS, Sumatera Utara tidak hanya membangun birokrasi yang adaptif dan berbasis data, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan nasional menuju tata kelola pemerintahan digital yang inklusif, terbuka, dan akuntabel.

5. A. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI)

Program Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI) merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, terhubung, dan tangguh terhadap perubahan iklim maupun risiko bencana. Program ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur strategis seperti jalan dan jembatan berbasis kebutuhan wilayah prioritas.

Tujuan Program

Peningkatan kualitas infrastruktur ini dilakukan melalui perencanaan teknis, konstruksi, dan pengawasan yang berkelanjutan

Dampak yang Diharapkan

Program Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI) diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat dari 5,03% (2024) menjadi 7,60–8,00% (2029). Sejalan dengan itu, PDRB per kapita naik signifikan dari Rp. 73,57 juta (2024) menjadi Rp. 115,3 juta (2029). Dampak pembangunan infrastruktur juga terlihat pada penurunan masalah ketenagakerjaan, di mana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih berada pada level 5,6% (2024) ditargetkan turun menjadi 4,74–5,20% (2029). Di sisi lain, pembangunan yang inklusif ditunjukkan dengan penurunan tingkat kemiskinan dari 7,19% (2024) menjadi 2,82–3,82% (2029). Selain aspek ekonomi, INSTANSI juga berkontribusi terhadap pembangunan manusia dan lingkungan. Indeks Modal Manusia ditingkatkan dari kondisi 0,54 (2024) menjadi 0,57 (2029). Sementara itu, perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan diwujudkan melalui peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari 73,96 (2024) menjadi 77,87 (2029).

Lokus Pelaksanaan

Pembangunan jalan:

Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Serdang Berdagai, Kab. Dairi, Kota Gunungsitoli, Kab. Nias, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kab. Karo, Kab. Simalungun, Kab. Batubara, Kab. Deli Serdang, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kab. Pakpak Bharat, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Mandailing Natal, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Nias Selatan, Kota Pematangsiantar, Kota Medan, Kab. Langkat, Kota Tanjung Balai, Kab. Langkat, Kota Medan.

Pembangunan Jembatan:

Kab. Deli Serdang, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kab. Nias Barat, Kab. Simalungun, Kab. Samosir, Kab. Asahan, Kab. Mandailing Natal, Kab. Langkat, Kab. Batubara, Kab.

Serdang Bedagai, Kota Tanjung Balai, Kab. Pakpak Barat, Kab. Dairi, Kab. Labuhanbatu, Kab. Nias Utara.

Ruang Lingkup Program

- **Peningkatan Jalan Strategis Berbasis Kawasan Prioritas**, termasuk:
 - a. Kawasan Pertumbuhan: Fokus pada wilayah industri, perdagangan, dan pariwisata.
 - b. Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air: Meningkatkan akses ke pertanian, perkebunan, dan infrastruktur sumber daya.
 - c. Kawasan Komoditas Unggulan: Mendukung distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan untuk memperkuat daya saing daerah.
 - d. Kawasan Afirmasi: Memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
 - e. Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana: Penguatan infrastruktur yang tahan terhadap risiko bencana.

Strategi Pembiayaan

- Pendanaan program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara.
- Dukungan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur dan Perumahan melalui APBN.
- Kemitraan strategis dengan pihak swasta melalui skema CSR dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
- Optimalisasi Dana Desa dan partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya sebagai bentuk kolaborasi pembangunan berbasis komunitas.

Keterkaitan dengan RPJMN 2025-2029 dan PHTC Nasional

Program INSTANSI (Infrastruktur Strategis Terintegrasi) merupakan langkah prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang terhubung, tangguh, dan ramah lingkungan. Program ini mencakup peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, kawasan perumahan dan permukiman, khususnya di kawasan pertumbuhan ekonomi, wilayah pertanian dan energi, serta daerah afirmasi dan rawan bencana. INSTANSI memiliki relevansi yang kuat dengan RPJMN 2025–2029, terutama dalam pilar pembangunan wilayah

yang inklusif dan konektivitas antarwilayah, yang ditujukan untuk mendukung distribusi logistik, menurunkan biaya ekonomi, serta memperkuat integrasi ekonomi nasional. Selain itu, program INSTANSI sangat sejalan dengan PHTC Nasional poin ke-7, yaitu *“Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), generasi milenial dan generasi Z.”* Melalui pembangunan dan penataan permukiman berbasis kawasan serta penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan jalan lingkungan, INSTANSI turut mendukung pengentasan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program ini juga mengadopsi pendekatan pembangunan berbasis kawasan dan kolaboratif, selaras dengan strategi nasional dalam memperkuat fondasi pembangunan wilayah yang merata, produktif, dan tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana.

5. B. Penguatan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Air Pertanian untuk Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan

Program Penguatan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Air Pertanian bertujuan memperkuat sistem irigasi sebagai fondasi swasembada pangan berkelanjutan di Sumatera Utara, dengan target perluasan layanan irigasi teknis 27.654,68 ha melalui pembangunan dan rehabilitasi DI kewenangan provinsi, diprioritaskan berdasarkan ketersediaan SID/DED dan nilai IKSI agar tepat sasaran; program berjalan bertahap 2025–2029 di kabupaten prioritas dari tahap awal, akselerasi cakupan, penguatan jaringan hingga penyempurnaan konektivitas saluran; Dinas PUPR Provsu memimpin bersama Dinas Ketahanan Pangan dan perangkat SDA/Cipta Karya kabupaten/kota, sementara pemda memperkuat pengelolaan jaringan tersier, membangun embung/sumur bor/pompanisasi, melakukan digitalisasi “smart irrigation”, serta memberdayakan P3A sehingga produktivitas meningkat, pasokan air stabil, risiko gagal panen menurun, dan ketahanan pangan serta kesejahteraan petani kian kuat.

Tujuan Program

- Memperkuat sistem irigasi sebagai fondasi swasembada pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada DI yang telah siap (memiliki SID/DED dan nilai IKSI memadai) agar pelaksanaan cepat dan tepat sasaran.

- Meningkatkan produktivitas pertanian, menstabilkan pasokan air, dan menurunkan risiko gagal panen.
- Memperkuat ketahanan pangan daerah menuju swasembada yang berkelanjutan serta mendorong efisiensi produksi.
- Meningkatkan kesejahteraan petani melalui layanan irigasi yang lebih andal dan merata.

Dampak yang diharapkan

Program Penguatan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Air Pertanian untuk Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian sebagai penopang utama perekonomian Sumatera Utara. Produktivitas pertanian ditunjukkan melalui peningkatan Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dari 3,73% (2024) menjadi 7,8% (2029). Program ini juga mendorong ketahanan pangan, yang tercermin dari penurunan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dari 7,54 persen (2024) menjadi 5,98% (2029). Di sisi lain, peningkatan efisiensi produksi tercermin dari penurunan intensitas energi primer dari 81 SBM/Rp. miliar (2024) menjadi 72,36 SBM/Rp. miliar (2029). Selain itu, program ini akan memberikan peningkatan kesejahteraan petani didukung perluasan layanan irigasi teknis total 27.654,68 ha sepanjang 2025–2029.

Ruang Lingkup Program

- Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi pada Daerah Irigasi kewenangan Provinsi: untuk memperluas layanan irigasi teknis selama 2025–2029.
- Penetapan prioritas berbasis kesiapan teknis: intervensi hanya pada DI yang telah memiliki SID/DED dan dengan acuan IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi).
- Tahapan pelaksanaan: 2025 pelaksanaan awal (2 DI prioritas), 2026 skala besar, 2027 akselerasi cakupan, 2028 penguatan jaringan teknis, 2029 penyempurnaan konektivitas saluran.
- Pemberdayaan P3A dan integrasi dengan program ketahanan pangan daerah.
- Koordinasi lintas pemangku kepentingan: Dinas PUPR Provinsi sebagai pelaksana teknis utama, Dinas Ketahanan Pangan untuk sinkronisasi kebutuhan air & kalender tanam, serta Dinas SDA/Cipta Karya kabupaten/kota untuk koordinasi teknis lapangan.

Lokus Pelaksanaan

- a. Kabupaten Batu Bara
 - D.I. Cinta Maju/Cinta Damai
 - D.I. Purwodadi
 - D.I. Simodong
 - D.I. Tanjung Muda
 - D.I. Sei Balai
 - D.I. Suka Makmur
 - D.I. Sijambi
- b. Kabupaten Padang Lawas Utara
 - D.I. Padang Garugur
 - D.I. Napa Tanjung Beringin
- c. Kabupaten Padang Lawas
 - D.I. Balakka Sitongkon
 - D.I. Sigorbus
- d. Kabupaten Mandailing Natal
 - D.I. Roburan Maga
 - D.I. Pakatan
 - D.I. Terusan
 - D.I. Tapus
 - D.I. Siulang-Aling
- e. Kabupaten Tapanuli Tengah
 - D.I. Pandurungan/Sitandiang
 - D.I. Mombangboru
 - D.I. Badiri Lopian
- f. Kabupaten Simalungun
 - D.I. Rambung Merah
 - D.I. Pekan Dolok
 - D.I. Javacolonisasi / Javaconisasi
 - D.I. Raja Maligas
 - D.I. Bah Tongguran I
 - D.I. Raja Hombang/Tongah Mangaraja
 - D.I. Bah Horas Hulu/Tongah
 - D.I. Naga Sompah
 - D.I. Panombean Pane
- g. Kabupaten Langkat

- D.I. Secanggang
- D.I.R Gebang
- h. Kabupaten Karo
 - D.I. Parit Lompaten
- i. Kabupaten Serdang Bedagai
 - D.I. Pekan Kemis
 - D.I.R Bogak Besar
- j. Kabupaten Asahan
 - D.I. Serbangan
 - D.I. Panca Arga
- k. Kabupaten Dairi
 - D.I. Buluh Duri
- l. Kabupaten Toba
 - D.I. Hinalang
 - D.I. Simangatasi II
 - D.I. Sijambur
- m. Kabupaten Tapanuli Utara
 - D.I. Aek Sigeaon
 - D.I. Hasak I dan II
 - D.I. Simok Mok
 - D.I. Aek Sarulla
- n. Kabupaten Samosir
 - D.I. Tele Harian Boho
- o. Kabupaten Humbang Hasundutan
 - D.I. Parmiahan/Hutapaung
- p. Kabupaten Nias
 - D.I. Gido Zebua
- q. Kabupaten Labuhanbatu
 - D.I.R Cinta Makmur
 - D.I.R Sei Serdang/Sei Rakyat
- r. Kabupaten Deli Serdang
 - D.I. Namorambe
 - D.I.R Sisir Gunting
 - D.I.R Percut
 - D.I. Medan Krio
- s. Kabupaten Tapanuli Selatan

- D.I. Sipirok Komplek
- t. Kota Pematangsiantar
- D.I. Sibatu-Batu
 - D.I. Rambung Merah (bersama Simalungun)

Strategi Pembiayaan

- APBD Provinsi (belanja modal PUPR) fokus “spending better” untuk sektor prioritas, terutama infrastruktur dan ketahanan pangan dengan tata kelola akuntabel dan berorientasi hasil.
- Pendapatan transfer pusat dimaksimalkan (DAK/DAU/DBH) guna membiayai pembangunan/rehabilitasi irigasi; tren transfer diasumsikan stabil dan meningkat hingga 2030.
- Hibah, kolaborasi CSR, dan pembiayaan mitra: mendorong hibah (tren +5%/tahun) dan kemitraan dengan swasta/badan usaha serta lembaga keuangan/investor untuk mendukung pembiayaan irigasi.
- APBD kabupaten/kota untuk jaringan tersier dan sumber air pendukung (embung, sumur bor, pompanisasi), digitalisasi “smart irrigation”, serta pemberdayaan P3A/BUMDes untuk operasi pemeliharaan.

Keterkaitan dengan RPJMN 2025-2029 dan PHTC Nasional

Program Penguatan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Air Pertanian selaras dengan agenda RPJMN 2025–2029 di bidang ketahanan pangan dan infrastruktur sumber daya air, serta telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2025–2029 dan mekanisme “Quick Wins”/PHTC melalui sinkronisasi prioritas program quick wins, sehingga berfungsi sebagai pengungkit kinerja PHTC klaster pangan di daerah. Keterkaitan ini juga tercermin pada arah kebijakan belanja 2025–2030 yang secara eksplisit menegaskan dukungan terhadap pencapaian PHTC, memastikan fokus pendanaan pada sektor prioritas termasuk ketahanan pangan. Secara operasional, program menargetkan perluasan layanan irigasi teknis 27.654,68 ha berbasis kesiapan SID/DED dan IKSI untuk mendorong produktivitas pertanian, menstabilkan pasokan air, dan memperkuat ketahanan pangan sebagai kontribusi konkret terhadap sasaran RPJMN dan PHTC.

5. C. Peningkatan Kualitas Permukiman Layak, Terjangkau, dan Inklusif melalui Penyediaan Hunian Murah serta Dukungan Terhadap Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah

Program Peningkatan Kualitas Permukiman Layak, Terjangkau, dan Inklusif mendukung Program 3 Juta Rumah dengan menyediakan hunian yang layak huni, terjangkau secara finansial, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat terutama MBR dan ASN Pemda melalui skema subsidi utama FLPP serta kemitraan dengan REI dan Bank Sumut; program dilaksanakan bertahap 2025–2030 lintas kabupaten/kota di Sumatera Utara, dengan pengembangan perumahan (termasuk di 4 daerah Kepulauan Nias sesuai MoU), penyusunan bank data penerima manfaat, dan verifikasi teknis usulan/perubahan SK Kumuh agar tepat sasaran; pelaksana utama Dinas Perumahan dan Permukiman Provsu bersama pemangku kepentingan pusat-daerah (Kementerian PUPR, Kemensos, Bappelitbang Provsu, BPS, Pemkab/Pemko, Dinas Perkim/PUPR kab/kota, BP Tapera, perguruan tinggi, LSM, dan sektor swasta), sementara kab/kota menangani pendataan BNBA, penerbitan SK Kumuh (10–15 ha), pembentukan Pokja dan sosialisasi kepada MBR/ASN.

Tujuan Program

- Mempercepat pembangunan perumahan subsidi secara bertahap di kabupaten/kota prioritas 2025–2030 agar pemerataan akses hunian tercapai.
- Memperkuat tata kelola penyaluran bantuan lewat bank data penerima manfaat (BNBA) bagi MBR/ASN agar tepat sasaran.
- Memastikan ketepatan intervensi kawasan kumuh melalui verifikasi teknis usulan/perubahan SK Kumuh serta dukungan penerbitan SK Kumuh kewenangan provinsi (luasan 10–15 ha).
- Meningkatkan kualitas hidup warga seperti kesehatan, kohesi sosial, peluang kerja lokal serta menata lingkungan permukiman agar lebih bersih dan fungsional.

Dampak yang diharapkan

Program peningkatan kualitas permukiman layak dan terjangkau di Sumatera Utara diharapkan memberikan kontribusi nyata pada berbagai aspek pembangunan daerah. Dari sisi fisik dan kesehatan, peningkatan

kualitas rumah yang layak huni mendorong naiknya Usia Harapan Hidup dari 73,9 tahun (2024) menjadi 74,72 tahun (2029). Dampak sosial dan psikologis tercermin dalam membaiknya Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) dari 69,79 (2024) menjadi 73,22 (2029) serta peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama dari 80,88 (2024) menjadi 83,0 (2029), yang menandakan semakin kuatnya ikatan sosial dan solidaritas antarwarga di kawasan permukiman. Dari aspek ekonomi, pembangunan dan perbaikan hunian turut menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal, yang mendukung penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 5,6 persen (2024) menjadi 4,74–5,20 persen (2029). Sementara itu, dari sisi lingkungan dan tata kota, penataan permukiman yang lebih tertib, bersih, dan fungsional didukung oleh peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari 73,96 (2024) menjadi 77,87 (2029) serta penurunan risiko bencana yang lebih terkendali. Selain itu, akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan ASN terhadap hunian layak semakin terbuka melalui skema KPR subsidi FLPP, yang berdampak pada peningkatan Indeks Kesejahteraan Sosial dari 56,09 (2024) menjadi 58,09 (2029), serta kenaikan Indeks Modal Manusia dari 0,54 (2024) menjadi 0,57 (2029).

Ruang Lingkup Program

- Penyediaan hunian murah bagi MBR/ASN melalui KPR subsidi FLPP dengan kemitraan REI dan Bank Sumut, disinergikan dengan BP Tapera; dilaksanakan bertahap lintas kab/kota 2025–2030 sesuai lokus yang telah ditetapkan.
- Rencana aksi inti: tindak lanjut MoU dengan REI/Bank Sumut (termasuk dorongan pengembangan di 4 daerah Kepulauan Nias), penyusunan BNBA (by name by address) penerima manfaat, serta verifikasi teknis usulan/perubahan SK Kumuh.
- Cakupan lokasi FLPP 2025–2029 di kota/kabupaten prioritas.
- Peran kab/kota: pendataan–validasi BNBA, penerbitan SK Kumuh (kewenangan provinsi untuk luasan 10–15 ha), pembentukan Pokja penanganan kumuh, sosialisasi kepada MBR/ASN, serta dukungan teknis lapangan oleh Dinas Perkim/PUPR.

Lokus Pelaksanaan

Kabupaten Simalungun, Batu Bara, Labuhanbatu Utara, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Nias Utara,

Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Toba, Langkat, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Serdang Bedagai, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Dairi, Nias, Karo, Asahan, serta Nias Barat, Kota Pematangsiantar, Padangsidimpuan, Tanjungbalai, Medan, Binjai, Tebing Tinggi, dan Gunungsitoli.

Strategi Pembiayaan

- Optimalkan skema pusat (FLPP/Tapera): amankan kuota KPR FLPP 2025–2029 di kab/kota prioritas, kemitraan operasional dengan REI dan Bank Sumut, serta sinergi dengan BP Tapera untuk pembiayaan cicilan MBR/ASN.
- APBD Provinsi sebagai dana pendamping & enabling: arahkan belanja modal “spending better” pada sektor prioritas dan PHTC untuk biaya perencanaan, fasilitasi MoU/kemitraan, pendataan BNBA, serta verifikasi teknis SK Kumuh agar penyaluran tepat sasaran.
- Kemitraan developer–perbankan: percepat suplai rumah melalui tindak lanjut MoU dengan REI (termasuk 4 daerah Kepulauan Nias) dan penyaluran KPR oleh Bank Sumut untuk memperluas jangkauan pembiayaan MBR.
- Penjadwalan multiyears 2025–2030: sesuaikan arus kas dengan tahapan lokus dan target output (mis. proyeksi 27.903 unit pada 2025 dan 60.000 unit/tahun 2026–2029, serta RTLH 400–800 unit/tahun) agar pembiayaan terkendali dan terukur.
- Tata kelola berbasis kinerja: prioritas pembiayaan diberikan pada usulan yang lolos verifikasi teknis SK Kumuh dan BNBA untuk meminimalkan moral hazard dan mempercepat pencapaian sasaran 3 Juta Rumah.

Keterkaitan dengan RPJMN 2025-2029 dan PHTC Nasional

Program Peningkatan Kualitas Permukiman Layak, Terjangkau, dan Inklusif di Sumatera Utara dirancang selaras dengan arah RPJMN 2025–2029 yang ditetapkan melalui Perpres 12/2025 sebagai tahap awal RPJPN 2025–2045, sehingga program daerah ikut menguatkan prioritas nasional di sektor perumahan/permukiman. Pada level pusat, target Program 3 Juta Rumah dipacu terutama lewat skema KPR subsidi FLPP/BSPS dengan penguatan pendanaan dan kebijakan yang menjadi tulang punggung perluasan akses hunian layak sepanjang periode RPJMN. Di tingkat provinsi, dokumen Program Strategis Daerah Sumut 2025–2029 secara eksplisit mensinkronkan PHTC sebagai kerangka “pengungkit” kinerja daerah agar sejalan dengan

kebijakan nasional. Implementasi program perumahan Sumut mendukung 3 Juta Rumah melalui penyediaan hunian murah (FLPP), kemitraan REI-Bank Sumut, penyusunan BNBA dan verifikasi SK Kumuh, serta penetapan lokus FLPP 2025–2029 keseluruhannya menempatkan program ini sebagai kontributor nyata terhadap capaian PHTC di klaster perumahan/permukiman. Selain itu, arah kebijakan belanja 2025–2030 Sumut menegaskan dukungan pada pencapaian PHTC, memperkuat kesinambungan pendanaan program menuju sasaran RPJMN. Output terukur, misalnya proyeksi 27.903 unit rumah subsidi pada 2025 dan ± 60.000 unit/tahun 2026–2029 menjadi kontribusi konkret terhadap target nasional dan kerangka PHTC.

6. Program Bantuan Hukum dan Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice (PRESTICE)

Program PRESTICE merupakan upaya strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menghadirkan keadilan yang lebih inklusif dan humanis di tengah masyarakat. Melalui pendekatan *restorative justice*, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum dan konflik sosial secara damai, partisipatif, dan berkeadilan. Program ini juga menjadi sarana untuk memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar hak-hak mereka tetap terlindungi di hadapan hukum.

PRESTICE dirancang untuk memperkuat peran desa, komunitas, dan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan secara lokal, serta mencegah terjadinya kriminalisasi berlebihan yang kerap merugikan masyarakat kecil. Program ini juga berfokus pada pencegahan pungutan liar di ruang publik, termasuk destinasi wisata, demi terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua.

Tujuan Program

- Mencegah praktik kriminalisasi yang berlebihan dengan mengedepankan penyelesaian konflik melalui mediasi dan pendekatan keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antar pihak.
- Menyediakan akses pendampingan hukum yang layak dan gratis bagi masyarakat kurang mampu, agar mereka tidak kehilangan hak-haknya dalam proses hukum.
- Menyelesaikan konflik sosial di tengah masyarakat melalui pendekatan damai untuk menghindari eskalasi ke ranah pidana atau kekerasan.

- Menekan praktik pungutan liar (pungli) dan bentuk penyalahgunaan wewenang lainnya yang merugikan masyarakat, khususnya di sektor layanan publik dan pariwisata.

Dampak yang Diharapkan

Program PRESTICE diharapkan mampu mewujudkan perlindungan hukum yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Sumatera Utara. Hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Reformasi Hukum yang naik dari 86,0 (2025) menjadi 90,0 (2029), menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap keadilan dan layanan hukum. Penguatan kelembagaan juga ditandai dengan peningkatan Indeks Integritas Nasional, dari 66,78 (2025) menjadi 70,19 (2029), yang menggambarkan kapasitas organisasi bantuan hukum (OBH) lokal semakin kokoh serta didukung terbentuknya jaringan Pos Bantuan Hukum yang lebih merata. Dari sisi pelayanan publik, program ini turut mendorong peningkatan kualitas akses masyarakat terhadap layanan hukum, yang tercermin pada perbaikan Indeks Pelayanan Publik dari 3,92 (2025) menjadi 3,69–3,71 (2029). Sementara itu, upaya penyelesaian konflik secara damai dan efisien ditunjukkan melalui Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang dipertahankan pada tingkat 100 persen sepanjang 2025–2029, menandakan ketertiban umum terjaga dengan pendekatan restorative justice.

Waktu dan Lokus Pelaksanaan

Tahun 2025-2030 di 33 kabupaten/kota

Ruang Lingkup Program

- Pembentukan Tim Restorative Justice di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan, yang terdiri dari unsur aparat hukum, tokoh masyarakat, advokat, dan fasilitator mediasi.
- Pengembangan layanan pengaduan hukum baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*) bagi masyarakat yang menghadapi dugaan kriminalisasi atau membutuhkan perlindungan hukum.
- Pendirian klinik hukum di kantor pemerintahan dan desa sebagai pusat layanan bantuan hukum gratis dan edukasi hukum masyarakat.
- Pembentukan unit pengawas pungli di kawasan wisata dan pusat keramaian guna melindungi wisatawan serta pelaku usaha dari pemerasan atau praktik korupsi kecil lainnya.

- Program ini direncanakan mulai diimplementasikan pada Januari 2026, seiring penguatan kapasitas kelembagaan dan dukungan lintas sektor.

Strategi Pembiayaan

- APBD Provinsi Sumatera Utara digunakan untuk pendirian dan operasional Tim Restorative Justice serta pengembangan layanan aduan dan pendampingan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu.
- Kemitraan dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Organisasi Advokasi dengan memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat yang mengalami permasalahan hukum.

Keterkaitan dengan RPJMN 2025-2029 dan PHTC Nasional

Program PRESTICE (Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice) merupakan inisiatif strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperkuat akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, melalui pendekatan penyelesaian sengketa yang damai, adil, dan berakar pada nilai-nilai sosial budaya. Program ini berfokus pada pembentukan Tim Restorative Justice hingga tingkat kecamatan, layanan aduan digital, pendirian klinik hukum, serta pengawasan praktik pungli di lokasi wisata dan ruang publik. PRESTICE secara langsung mendukung visi RPJMN 2025–2029 dalam mendorong reformasi hukum dan memperluas akses terhadap keadilan yang inklusif, cepat, dan terjangkau. Selain itu, program ini mendukung upaya penguatan demokrasi dan supremasi hukum di tingkat lokal, dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik dan pengawasan pelayanan publik. Dalam konteks PHTC Nasional, PRESTICE berkontribusi terhadap tujuan pembangunan sosial yang lebih inklusif sebagaimana tercermin dalam PHTC poin ke-5, yaitu *penghapusan kemiskinan absolut* dan pemberdayaan masyarakat rentan. Dengan memberikan perlindungan hukum tanpa diskriminasi dan mencegah kriminalisasi berlebihan, PRESTICE memperluas makna kesejahteraan sosial sebagai bagian dari keamanan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Program ini memperkuat pilar keadilan sosial di Sumatera Utara dan sejalan dengan arah kebijakan nasional menuju sistem hukum yang lebih berkeadilan, humanis, dan solutif.

Keterkaitan yang erat antara program *quick wins* dengan arah kebijakan utama ini juga menunjukkan konsistensi perencanaan yang terstruktur,

realistis, dan responsif terhadap tantangan pembangunan daerah. Selain Keenam PHTC tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan 17 (tujuh belas) Program Prioritas yang lebih berdampak jangka menengah. Program-program ini merupakan penguatan dari *quick wins* yang dikembangkan secara sektoral dan lintas urusan, dengan tetap menjaga kesinambungan terhadap visi dan misi pembangunan daerah dan nasional.

Enam PHTC yang telah dirancang dalam RPJMD Sumatera Utara ini mencerminkan tekad pemerintah provinsi untuk menghadirkan layanan dasar yang merata, memperkuat perlindungan sosial, serta membangun infrastruktur yang menyokong kemandirian ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Dari penyediaan pendidikan gratis, layanan kesehatan universal, stabilisasi harga pangan, digitalisasi layanan publik, pembangunan infrastruktur strategis, hingga bantuan hukum yang humanis, seluruh PHTC merupakan fondasi awal yang memastikan masyarakat Sumatera Utara dapat merasakan manfaat pembangunan secara nyata, inklusif, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, untuk memperkuat arah pembangunan daerah secara lebih terarah dan berdampak luas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan 17 program prioritas RPJMD. Program-program ini menjadi payung besar yang tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan daya saing daerah. Dengan demikian, setiap program prioritas diharapkan mampu saling melengkapi dengan PHTC, sehingga pembangunan Sumatera Utara ke depan semakin terukur, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Adapun 17 Program Prioritas RPJMD yaitu:

1. Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal

Program prioritas pertama dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara adalah pendidikan melalui program sekolah unggulan berbasis peningkatan skill yang selaras dengan kebutuhan industri dan potensi wilayah di tingkat lokal. Program ini menempatkan sektor pendidikan sebagai fondasi utama peningkatan kualitas sumber daya manusia yang adaptif dan berdaya saing, sekaligus mendorong keterkaitan erat antara dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja.

Sejumlah proyek strategis menjadi pilar utama pencapaian program ini. Pertama, **pemenuhan 100% fasilitas listrik dan layanan internet pada seluruh SMA/SMK/SLB di Sumatera Utara**, yang akan memastikan akses pendidikan modern berbasis teknologi informasi dapat dirasakan secara merata, baik di perkotaan maupun daerah terpencil. Kedua, **pembangunan 4 sekolah unggulan di beberapa kabupaten/kota, yaitu SMA Unggulan di Nias (2026), SMK Unggulan di Asahan (2027), SMK Unggulan di Samosir (2028), dan SLB Unggulan di Karo (2029)**. Kehadiran sekolah unggulan ini diharapkan menjadi pusat pembelajaran inovatif, berorientasi keahlian, serta mampu menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan berkontribusi pada pembangunan daerah.

Selain itu, pemerintah juga akan melaksanakan **rehabilitasi Ruang Sekolah SMA/SMK/SLB sebanyak 490 sekolah** serta **pembangunan ruang kelas baru dan unit sekolah baru**. Upaya ini ditujukan untuk memperbaiki kualitas sarana pendidikan, memperluas akses, dan meningkatkan kenyamanan belajar mengajar, sehingga lebih banyak peserta didik dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak dan setara.

Di sisi lain, optimalisasi dunia kerja juga menjadi perhatian, dengan adanya program **pengembangan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK) Provsu menuju BLK tematik berbasis bioindustri dan pariwisata**. Hal ini memperkuat keterhubungan antara sektor pendidikan dengan dunia industri dan potensi unggulan daerah, sehingga generasi muda tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan praktis sesuai kebutuhan sektor strategis di Sumatera Utara.

Secara keseluruhan, Program Prioritas 1 ini mendukung pencapaian *tujuan 1: peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada sasaran 2: meratanya pendidikan berkualitas*. Selain itu, program ini juga berkontribusi pada *tujuan 3: ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan*, terutama pada *sasaran 4: meningkatnya hilirisasi produk unggulan daerah melalui penyediaan tenaga kerja terampil yang mendukung pengembangan sektor ekonomi strategis*.

Seluruh program dan kegiatan strategis yang dijalankan dalam kerangka prioritas pendidikan ini dirancang untuk mendukung pencapaian target

pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Fokus pada penguatan sumber daya manusia unggul, perluasan akses pendidikan, serta peningkatan keterkaitan pendidikan dan ketenagakerjaan, merupakan bagian integral dari agenda nasional. Dalam rangka mendukung pemerataan kesempatan belajar, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga berkomitmen menjalankan Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program prioritas nasional, yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan. Implementasi pembangunan sekolah vokasi unggulan di berbagai kabupaten/kota, revitalisasi infrastruktur pendidikan, penguatan pendidikan jarak jauh, dan pengembangan pelatihan vokasi tematik menjadi kontribusi konkret Sumatera Utara dalam mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Peningkatan kualitas pendidikan menjadi pilar utama dalam membangun daya saing daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong transformasi pendidikan melalui pengembangan sekolah unggul, vokasi, dan konektivitas dengan kebutuhan industri serta potensi lokal. Adapun rincian Proyek Strategis Daerah yang merupakan turunan dari Program Prioritas 1, serta OPD pengampu disajikan sebagai berikut:

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
1. PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH UNGGULAN BERBASIS PENINGKATAN SKILL YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI DAN POTENSI WILAYAH DI TINGKAT LOKAL	1. Pemenuhan 100% Fasilitasi Listrik dan Layanan Internet pada Seluruh SMA/SMK/SLB di Sumatera Utara	Dinas Pendidikan
	2. Pembangunan 4 SMA/SMK/SLB Unggulan (Nias/SMA - 2026, Asahan/SMK - 2027, Samosir/SMK – 2028, Karo/SLB - 2029)	Dinas Pendidikan
	3. Rehabilitasi Ruangan Sekolah SMA/SMK/SLB sebanyak 490 Sekolah	Dinas Pendidikan
	4. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru	Dinas Pendidikan
	5. Optimalisasi Sarana dan Prasarana BLK Provsu menuju BLK Tematik Bioindustri dan Pariwisata	Disnaker

2. Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi

Pemberdayaan kelompok perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas merupakan salah satu pilar penting dalam arah pembangunan Sumatera Utara untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, produktif, dan berkeadilan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Program Prioritas 2 berkomitmen memperkuat partisipasi aktif kelompok-kelompok ini dalam dunia kerja, kewirausahaan, seni, olahraga, serta berbagai sektor strategis pembangunan daerah. Program ini disusun untuk menjawab tantangan keterbatasan akses, ketimpangan kesempatan, dan rendahnya tingkat partisipasi produktif perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, dengan pendekatan yang holistik berbasis pengembangan kapasitas, kreativitas, dan kemandirian.

Program prioritas pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam berkarya dan berprestasi diwujudkan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga pelajar yang berskala daerah. Salah satu proyek strategis yang akan dijalankan adalah **Liga Olahraga Pelajar Sumatera Utara Piala Gubernur untuk cabang sepak bola dan voli pada periode 2026–2030**. Ajang ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan bakat, peningkatan sportivitas, dan penguatan karakter generasi muda. Melalui liga ini, diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus membangun budaya hidup sehat dan produktif di kalangan pelajar.

Selain itu, Dispora Sumatera Utara juga akan menyelenggarakan **Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Sumatera Utara untuk cabang atletik** pada periode yang sama. Kegiatan ini memiliki makna strategis dalam mendorong kesetaraan dan inklusivitas, dengan memberikan ruang yang adil bagi pelajar penyandang disabilitas untuk menunjukkan kemampuan dan prestasi mereka. Dengan dukungan penuh pemerintah daerah, event ini diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan diri, meningkatkan motivasi, serta memperkuat semangat kebersamaan. Lebih jauh, proyek ini juga mendukung pencapaian tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada sasaran pemerataan pendidikan berkualitas yang berorientasi pada partisipasi semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali.

Program Prioritas "Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi" memiliki keterkaitan erat dengan Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Program ini mendukung Prioritas Nasional nomor 4, yang menekankan pada penguatan pembangunan sumber daya manusia, pengembangan sains dan teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, serta kesetaraan gender dan pemberdayaan kelompok rentan. Melalui pelatihan kerja, pendampingan bisnis, sertifikasi keterampilan, serta penyediaan teknologi asistif, program ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM kelompok perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam berbagai sektor pembangunan.

Selain itu, program ini juga mendukung Prioritas Nasional yakni penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Dengan memberikan akses pelatihan seni, olahraga, layanan pendukung ketenagakerjaan, dan kebijakan afirmatif, program ini berkontribusi dalam membentuk ekosistem yang lebih adil dan setara, serta memastikan bahwa semua kelompok masyarakat di Sumatera Utara memperoleh kesempatan yang setara dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya.

Pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas menjadi bagian penting dari pembangunan inklusif di Sumatera Utara. Rincian Proyek Strategis Daerah yang menjadi bagian dari Program Prioritas 2, serta OPD pengampu disajikan sebagai berikut:

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM BERKARYA DAN BERPRESTASI	6. Liga Olahraga Pelajar Sumut Piala Gubernur Sumatera Utara Cabang Olahraga Sepak Bola dan Voli tahun 2026 - 2030	Dispora
	7. Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Sumatera Utara pada Cabang Olahraga Atletik Tahun 2026 - 2030	Dispora

3. Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan penguatan sistem layanan kesehatan yang terintegrasi sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan kesehatan daerah. Strategi ini dirancang untuk menjamin bahwa seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil, kawasan industri, wisata, maupun perkotaan strategis, memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang layak, berkualitas, dan berkelanjutan. Program prioritas ini disusun dengan pendekatan holistik yang mencakup aspek layanan, infrastruktur, teknologi informasi kesehatan, serta intervensi spesifik terhadap permasalahan kesehatan masyarakat, seperti stunting dan penyakit menular.

Program Prioritas 3 ini menjadi salah satu pondasi utama pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam periode 2025–2029. Program ini dirancang untuk memperkuat kualitas layanan kesehatan yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga promotif dan preventif, sehingga mampu menjawab tantangan nyata berupa tingginya beban penyakit, kesenjangan akses layanan antarwilayah, serta keterbatasan tenaga kesehatan di daerah terpencil. Melalui pendekatan integratif, PP 3 ini mendorong terwujudnya sistem layanan kesehatan masyarakat yang lebih efektif, efisien, dan inklusif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Sebagai turunan dari PP 3, terdapat beberapa Proyek Strategis Daerah (PSD) yang akan dilaksanakan secara bertahap dan saling terhubung. Pertama, **Digitalisasi sistem kesehatan terintegrasi (*Sumut e-Health Integration System*)** yang bertujuan membangun platform digital yang terintegrasi, real time, dan berbasis data pasien yang menghubungkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Inovasi ini akan mendorong peningkatan transparansi, mempercepat pelayanan, serta memastikan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat.

Kedua, **Program Beasiswa Ikatan Dinas bagi Dokter Spesialis dan Distribusi Dokter Spesialis Residen di Wilayah Kurang Terlayani (2025–2030)**, yang difokuskan untuk mengatasi ketimpangan distribusi tenaga medis/dokter spesialis khususnya di wilayah kurang terlayani, lokus program unggulan serta rumah sakit pengampu layanan KJSU_KIA. Dengan pola ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat memperkuat pemerataan tenaga kesehatan, terutama spesialis, di

wilayah dengan keterbatasan sumber daya. Upaya ini bertujuan meningkatkan mutu dan akses layanan kesehatan rujukan di seluruh daerah, sekaligus mendukung percepatan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) melalui penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Ketiga, **Dukungan Pengembangan Rumah Sakit Unggulan yang meliputi peningkatan kapasitas, pemenuhan sarana-prasarana, serta modernisasi alat kesehatan.** Rumah sakit unggulan ini diharapkan menjadi pusat rujukan layanan spesialis sekaligus pusat inovasi kesehatan yang mampu memberikan pelayanan setara standar nasional bahkan internasional, sehingga masyarakat Sumut tidak lagi harus mencari layanan kesehatan lanjutan ke luar daerah.

Keseluruhan program dan proyek strategis ini menjadi instrumen nyata bagi tujuan pembangunan daerah, khususnya *Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*, dengan *sasaran 1: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat*. Dengan sistem layanan kesehatan yang lebih terintegrasi, tenaga medis yang memadai, serta fasilitas unggulan yang modern, diharapkan derajat kesehatan masyarakat Sumatera Utara meningkat secara berkelanjutan, yang pada akhirnya menjadi modal penting bagi lahirnya SDM yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Program “Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu” menunjukkan keterkaitan erat dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Secara substansi, program ini mendukung pencapaian Prioritas Nasional 4 yang berfokus pada penguatan pembangunan sumber daya manusia, khususnya melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penguatan layanan kesehatan primer dan jaminan kesehatan universal.

Lebih lanjut, program ini juga sejalan dengan Prioritas Nasional 7, yang menekankan pada pelayanan kesehatan untuk semua dengan memperhatikan pemerataan akses hingga ke kawasan-kawasan perdesaan, industri, dan wisata strategis. Penguatan layanan RSUD, distribusi tenaga medis spesialis, revitalisasi layanan unggulan, serta penyediaan program beasiswa ikatan dinas, menunjukkan komitmen

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memperkuat sistem kesehatan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Peningkatan layanan kesehatan masyarakat menjadi fokus penting dalam pembangunan Sumatera Utara, melalui sistem yang terintegrasi di berbagai kawasan strategis. Tabel berikut merangkum tiga Proyek Strategis Daerah dari Program Prioritas 3, serta perangkat daerah penanggung jawab utama yang mendukung penguatan layanan kesehatan yang lebih merata, responsif, dan berdaya saing:

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 3 KESEHATAN YANG TERINTEGRASI DI BEBERAPA TITIK KAWASAN YANG MENJADI SENTRA LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT TERPADU	8. Digitalisasi sistem kesehatan terintegrasi (Sumut e-Health Integration system)	Dinas Kesehatan
	9. Beasiswa Ikatan Dinas bagi Dokter Spesialis dan dokter spesialis residen di Wilayah Kurang Terlayani (2025 – 2030)	Dinas Kesehatan
	10. Dukungan Pengembangan Rumah Sakit Unggulan (Pengembangan Rumah Sakit Unggulan dan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan)	Dinas Kesehatan

4. Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran

Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan sosial masyarakat dan mendukung pembangunan inklusif, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan sejumlah program strategis dalam kerangka Program Prioritas melalui inisiatif Kolaborasi Sumut Berkah 2025–2029. Program-program ini diarahkan untuk meningkatkan perlindungan sosial, memperluas jangkauan jaminan sosial, serta memperbaiki kualitas pelayanan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan pekerja sektor informal.

Program Prioritas 4 ini diarahkan untuk memastikan bahwa masyarakat rentan di Sumatera Utara memperoleh perlindungan dan akses pemberdayaan yang lebih komprehensif. Program ini tidak hanya menekankan pada bantuan jangka pendek berupa perlindungan sosial,

tetapi juga pada upaya transformasi menuju kemandirian melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan produktivitas, serta jaminan sosial yang lebih merata. Dengan pendekatan ini, kebijakan pengentasan kemiskinan menjadi lebih terukur, adaptif, dan menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Sejalan dengan itu, terdapat beberapa Proyek Strategis Daerah yang menjadi turunan dari program ini. Pertama, **Bantuan Sosial Produktif melalui Program Masyarakat Produktif (MAPRO)** yang dikelola Dinas Sosial, bertujuan untuk mendorong masyarakat rentan agar tidak semata-mata bergantung pada bantuan, tetapi juga memiliki modal sosial dan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup. Kedua, **Program Pasar Murah Bergerak (PMB)** yang dijalankan oleh Disperindag ESDM, hadir sebagai instrumen untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli masyarakat miskin agar tetap terjangkau. Ketiga, **Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja Rentan melalui subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan** yang dilaksanakan oleh Disnaker, memastikan para pekerja informal dan kelompok rawan tetap terlindungi dari risiko sosial-ekonomi. Keempat, **Revitalisasi, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat panti sosial provinsi** yang dikelola oleh Dinas Sosial, difokuskan pada penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas penerima manfaat agar lebih berdaya dan mampu mandiri.

Kehadiran PP 4 ini secara langsung mendukung *Tujuan 2: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, khususnya *Sasaran 3: Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif*, dengan memberikan jaminan keberlanjutan perlindungan sosial serta ruang bagi kelompok rentan untuk berkembang. Di sisi lain, keterkaitan dengan *Tujuan 4: Ekonomi yang Stabil dan Inklusif* tercermin dalam *Sasaran 6: Terciptanya Stabilitas Harga*, yang diwujudkan melalui program pasar murah bergerak dalam menjaga harga kebutuhan pokok agar tetap stabil. Dengan demikian, program ini bukan hanya menjadi instrumen penanggulangan kemiskinan, tetapi juga instrumen penguatan daya tahan sosial dan ekonomi masyarakat Sumatera Utara secara keseluruhan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga memberikan dukungan penuh terhadap upaya percepatan penanggulangan kemiskinan eskترم, dengan mengintegrasikan upaya tersebut ke dalam dokumen Rencana

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), sehingga langkah-langkah penanggulangan dapat lebih terarah, terukur, dan selaras dengan target penurunan kemiskinan nasional. Pengurangan kemiskinan dilakukan secara menyeluruh dan terarah dengan memperkuat perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat rentan agar lebih produktif dan mandiri. Berikut ini adalah rincian Proyek Strategis Daerah yang diturunkan dari Program Prioritas 4, serta perangkat daerah yang berperan sebagai pelaksana utama dalam program prioritas tersebut:

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 4: PEMBERANTASAN KEMISKINAN MELALUI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RENTAN SECARA MENYELURUH DAN TEPAT SASARAN	11. Bantuan Sosial Produktif melalui Program Masyarakat Produktif (MAPRO).	Dinas Sosial
	12. Pelaksanaan Program Pasar Murah Bergerak (PMB)	DISPERINDAG ESDM
	13. Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja Rentan (Subsidi BPJS Ketenagakerjaan)	DISNAKER
	14. Revitalisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Panti Sosial Provinsi	Dinas Sosial

5. Penguatan Stabilitas Makro Ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah

Program Prioritas 5 diarahkan untuk memperkuat stabilitas makro ekonomi dan meningkatkan keberlanjutan fiskal daerah melalui pengelolaan sumber daya, optimalisasi aset, dan peningkatan daya saing perekonomian Sumatera Utara. Program ini berfokus pada penciptaan fondasi ekonomi yang lebih tangguh dengan melibatkan sektor pertanian, pariwisata, industri, BUMD, hingga pengelolaan aset daerah.

Sebagai turunan dari program ini, terdapat beberapa proyek strategis daerah yang menjadi prioritas. Pertama, **Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pertanian dan Pariwisata** yang diampu oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif serta Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura. Proyek ini ditujukan untuk memperkuat basis perekonomian berbasis sektor unggulan, mendorong investasi, serta memperluas lapangan kerja di kawasan potensial.

Kedua, **Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan di Kawasan Industri Sumatera Utara** yang diampu oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral. Melalui hilirisasi, komoditas unggulan tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah dan memperluas pasar ekspor.

Ketiga, **BUMD Reform Program** yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian. Program ini berfokus pada penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah agar lebih profesional, adaptif, transparan, serta mampu berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi daerah dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Keempat, **Pemanfaatan Aset Barang Milik Daerah melalui Kerja Sama Ekonomi** yang diampu oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pemanfaatan aset dilakukan secara produktif dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kerja sama yang saling menguntungkan, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat kapasitas fiskal.

Secara keseluruhan, Program Prioritas 5 ini mendukung *Tujuan 3: Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan*, khususnya pada *Sasaran 4: Meningkatnya Hilirisasi Produk Unggulan Daerah* dan *Sasaran 5: Meningkatnya Aktivitas Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan*. Selain itu, PP 5 juga selaras dengan *Tujuan 5: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas*, melalui *Sasaran 8: Menguatnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas* serta *Sasaran 9: Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah*.

Stabilitas ekonomi makro dan keberlanjutan fiskal menjadi fondasi penting dalam pembangunan daerah yang berdaya tahan dan inklusif. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyusun sejumlah Proyek Strategis Daerah terkait Program Prioritas 5, serta dengan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya:

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 5: PENGUATAN STABILITAS MAKRO EKONOMI DAN KESINAMBUNGAN FISKAL DAERAH	15. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pertanian dan pariwisata	DISBUDPAREKRAF DAN DINAS KETAPANG TPH

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
	16. Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan di Kawasan Industri Sumatera Utara	DISPERINDAG ESDM
	17. BUMD Reform Program (Penguatan Peran BUMD sebagai Motor Ekonomi)	Biro Perekonomian
	18. Pemanfaatan Aset barang milik daerah melalui kerja sama ekonomi	BKAD

6. Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru

Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru menjadi bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara. Kedua pendekatan ini tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan diarahkan untuk membangun keseimbangan antara kemajuan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan mengadopsi prinsip keberlanjutan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya mengubah paradigma pembangunan daerah agar lebih berwawasan lingkungan dan responsif terhadap tantangan perubahan iklim global.

Program prioritas ini bertujuan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam ekonomi daerah melalui dua jalur utama, yakni ekonomi hijau yang berbasis kelestarian ekosistem daratan dan ekonomi biru yang mengoptimalkan potensi pesisir dan kelautan. Dalam pengembangan ekonomi hijau, beberapa intervensi strategis dirancang untuk memperbaiki produktivitas sektor pertanian dan perkebunan rakyat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan energi daerah. Salah satu bentuk nyata adalah peningkatan daya guna lahan pertanian melalui distribusi pupuk organik dan pestisida nabati yang ramah lingkungan. Inisiatif ini tidak hanya mendukung praktik pertanian berkelanjutan, tetapi juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan kimia sintetis yang berdampak buruk pada kesehatan tanah dan air.

Program Prioritas 6 dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara diarahkan untuk memperkuat pembangunan ekonomi yang tidak hanya

berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan. Melalui pendekatan ekonomi hijau dan biru, Sumatera Utara berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam darat dan laut dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem. Sejumlah proyek strategis daerah pun diturunkan untuk mendukung visi tersebut. Di sektor perkebunan, Dinas Perkebunan dan Peternakan mengembangkan **kawasan unggulan kelapa, kopi, dan aren** sebagai komoditas strategis yang memiliki nilai tambah tinggi. Pada saat yang sama, Dinas Kelautan dan Perikanan mendorong **penguatan kawasan perikanan tangkap dan budidaya**, disertai dengan program inovatif **Konservasi Laut SEMESTA**, yakni pemberdayaan nelayan sebagai pasukan penjaga laut untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir.

Selain itu, upaya **rehabilitasi mangrove dan kawasan pesisir** berbasis masyarakat yang digerakkan oleh DLHK menjadi langkah nyata dalam meningkatkan ketahanan ekosistem pesisir sekaligus memperkuat peran masyarakat sebagai pengelola utama lingkungan. Tidak kalah penting, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral berfokus pada **pengembangan energi baru terbarukan, seperti PLTS pompa air untuk irigasi pertanian dan PLTA mikrohidro**, yang menjadi solusi ramah lingkungan dalam mendukung produktivitas masyarakat.

Implementasi Program Prioritas 6 ini mendukung *Tujuan 3: Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan*, khususnya pada sasaran 4 (*meningkatnya hilirisasi produk unggulan daerah*) dan sasaran 5 (*meningkatnya aktivitas ekonomi yang berwawasan lingkungan*). Lebih jauh lagi, PP 6 juga mendukung *Tujuan 4: Ekonomi yang Stabil dan Inklusif* pada sasaran 7 (*meningkatnya pemerataan pembangunan ekonomi*). Dengan demikian, pengembangan ekonomi hijau dan biru tidak hanya memperkuat daya saing Sumatera Utara, tetapi juga memastikan terciptanya pertumbuhan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan strategi yang terintegrasi ini, Sumatera Utara diharapkan mampu menjadi model pembangunan berkelanjutan di kawasan barat Indonesia, dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mengejar peningkatan angka PDRB, tetapi juga memperhatikan daya dukung lingkungan dan kualitas kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sementara itu, melalui pengembangan ekonomi biru,

Sumatera Utara menegaskan komitmennya pada pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya pesisir dan laut. Program seperti pembangunan pelabuhan perikanan, penyediaan alat tangkap ramah lingkungan, pelatihan pengolahan hasil laut, pembangunan cold storage bertenaga surya, serta inisiatif energi laut menunjukkan bahwa provinsi ini turut mengimplementasikan pendekatan ekonomi biru sebagaimana didorong oleh RPJMN. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan nelayan, tetapi juga menjaga ekosistem laut dan memperkuat ketahanan pangan nasional dari sektor kelautan.

Untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan agenda strategis dalam pengembangan ekonomi hijau dan biru. Rangkaian Proyek Strategis Daerah berikut menunjukkan fokus pada optimalisasi sumber daya darat dan laut secara berkelanjutan, beserta perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya:

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 6: PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU	19. Pengembangan Kawasan Perkebunan (Kelapa, Kopi, Aren)	DISBUNAK
	20. Pengembangan Kawasan Unggulan Perikanan Tangkap dan Budidaya	DISKANLA
	21. Pengawasan Konservasi Laut SEMESTA (Pemberdayaan Nelayan Sebagai Pasukan Penjaga Laut)	DISKANLA
	22. Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir berbasis Masyarakat	DLHK
	23. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (PLTS Pompa Air Untuk Irigasi Pertanian/PLTA Mikrohidro dan lainnya)	Disperindag ESDM

7. **Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal**

Penguatan ketahanan pangan di Sumatera Utara tidak hanya dilakukan melalui pendekatan teknis dan modernisasi pertanian, tetapi juga melalui revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang telah lama menjadi fondasi kehidupan masyarakat agraris. Program ini bertujuan

untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal, dengan pendekatan budaya, sosial, dan teknologi modern. Fokus utamanya adalah diversifikasi komoditas, pelestarian kearifan lokal, dan peningkatan kapasitas produksi masyarakat.

Program Prioritas 7 RPJMD Provinsi Sumatera Utara berfokus pada ketahanan pangan melalui penguatan nilai budaya dan kearifan lokal agar diversifikasi hasil pertanian menjadi lebih produktif serta berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan Hortikultura (TPH) bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) menjadi OPD pengampu utama dalam sejumlah proyek strategis, mulai dari **pembentukan kawasan unggulan padi, jagung, cabai merah, bawang merah**, hingga **pengembangan kawasan peternakan unggulan**. Upaya ini ditopang dengan **program pengembangan bibit unggul pertanian** serta **fasilitasi akses permodalan bagi kelompok tani** guna memperkuat kapasitas produksi sekaligus daya saing sektor pertanian di Sumatera Utara.

Pelaksanaan program ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga mendorong hilirisasi produk unggulan daerah agar memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar. Melalui fasilitasi permodalan dan bibit unggul, kelompok tani memiliki daya dukung yang lebih baik dalam meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah.

Dengan demikian, Program Prioritas 7 berkontribusi terhadap pencapaian tujuan 3: ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui sasaran 4: meningkatnya hilirisasi produk unggulan daerah, serta mendukung tujuan 4: ekonomi yang stabil dan inklusif melalui sasaran 6: terciptanya stabilitas harga dan sasaran 7: meningkatnya pemerataan pembangunan ekonomi. Melalui penguatan ketahanan pangan berbasis budaya dan kearifan lokal, Sumatera Utara dapat memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan yang mandiri, tangguh, dan berkelanjutan.

Program Prioritas *Ketahanan Pangan melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal* yang dijalankan oleh Provinsi Sumatera Utara memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Prioritas Nasional Nomor 1 dalam RPJMN 2025–

2029, yaitu *Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air*. Program ini mencerminkan semangat kemandirian dan keberlanjutan dalam sektor pangan, yang tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil pertanian, tetapi juga memperkuat akar budaya lokal dan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama dalam ekosistem pertanian.

Melalui intervensi peningkatan produktivitas pangan, seperti penyediaan benih unggul lokal, pengembangan jaringan irigasi tersier, serta pemanfaatan pupuk organik dan sistem pertanian berbasis kearifan lokal, Sumatera Utara memperkuat ketahanan pangan dari hulu ke hilir. Upaya ini selaras dengan tujuan nasional dalam memperluas kapasitas produksi berbasis sumber daya lokal dan memperkuat sistem distribusi pangan yang efisien. Sementara itu, intervensi untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui akses terhadap pembiayaan seperti KUR, penguatan pasar melalui digitalisasi dan kemitraan, serta regenerasi petani muda, mendukung pilar utama RPJMN dalam menciptakan ekonomi kerakyatan yang tangguh dan inklusif.

Upaya penguatan ketahanan pangan di Sumatera Utara tidak hanya bertumpu pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pada pelestarian nilai budaya, kearifan lokal, dan kesejahteraan petani. Tabel berikut memuat Sejumlah Proyek Strategis Daerah yang diturunkan dari Program Prioritas 7, serta perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan strategi ketahanan pangan secara menyeluruh dan berkelanjutan:

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 7: KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGUATAN NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL AGAR DIVERSIFIKASI HASIL PERTANIAN MENJADI LEBIH PRODUKTIF DAN BERDAMPAK PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL	24. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Unggulan Padi, Jagung, Cabai Merah, dan bawang merah	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
	25. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Peternakan unggulan	DISBUNAK
	26. Program pengembangan bibit unggul pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
	27. Fasilitasi Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH

8. Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)

Pengembangan pariwisata berbasis potensi alam lokal di Provinsi Sumatera Utara menjadi strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menempatkan sektor pariwisata tidak hanya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat partisipasi masyarakat, memperluas pemerataan manfaat ekonomi, serta menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Melalui pendekatan berbasis komunitas (*community-based tourism*), program ini menegaskan bahwa masyarakat lokal, baik di kawasan pedesaan maupun perkotaan harus menjadi pelaku utama sekaligus penerima manfaat utama dari pengembangan industri pariwisata.

Program ini bertujuan meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperkuat pengembangan potensi wisata alam, budaya, dan kearifan lokal di tingkat desa dan kota. Pada saat yang sama, program ini memastikan keterlibatan aktif masyarakat, komunitas lokal, pemerintah desa/kelurahan, serta pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam seluruh tahapan pengelolaan pariwisata, mulai dari perencanaan, pengelolaan destinasi, hingga promosi dan pemasaran.

Program Prioritas 8 RPJMD Provinsi Sumatera Utara menekankan pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal, baik di pedesaan maupun perkotaan, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah daerah/desa/kelurahan, serta pengusaha lokal. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) menjadi OPD pengampu utama dalam berbagai proyek strategis, termasuk dukungan terhadap **pengembangan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba, pengelolaan dan penataan Kawasan Toba Caldera UGGp serta kawasan Geopark lainnya**. Langkah ini memastikan bahwa pengelolaan pariwisata dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan kelestarian alam, budaya, dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, penguatan sektor pariwisata diwujudkan melalui **pembentukan dan pengembangan kawasan strategis budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif provinsi, seperti TATABUSE, SIBANDAN, SIPUAN, KARDAPAK, dan BAHLIKE**. Proyek ini dipadukan dengan **pengembangan dan peningkatan pengelolaan situs cagar budaya Sumatera Utara** untuk memperkuat identitas budaya daerah sekaligus meningkatkan daya tarik wisata. Selain itu, **pelaksanaan event internasional, pengembangan paket wisata, serta digitalisasi promosi pariwisata global** menjadi strategi penting dalam memperluas eksposur pariwisata Sumatera Utara ke tingkat internasional.

Dengan demikian, Program Prioritas 8 mendukung *terwujudnya ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan (tujuan 3)* melalui *sasaran meningkatnya aktivitas ekonomi yang berwawasan lingkungan (sasaran 5)*. Peningkatan sektor pariwisata yang berbasis partisipasi masyarakat, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan budaya lokal tidak hanya memperluas peluang ekonomi, tetapi juga memperkuat daya saing Sumatera Utara sebagai destinasi wisata unggulan dunia.

Program Prioritas ini memiliki keterkaitan strategis dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, khususnya mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dalam RPJMN, sektor pariwisata ditargetkan untuk meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dari 4,6% pada 2025 menjadi 5% pada tahun 2029, dengan target perolehan devisa sebesar USD 32 miliar dan penciptaan lapangan kerja baru yang signifikan bagi masyarakat. Sumatera Utara, melalui program ini, secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian sasaran tersebut dengan memperkuat pariwisata berbasis potensi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Sumatera Utara juga berkomitmen untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara melalui pengoptimalan sektor pariwisata, didorong dengan kebijakan pengembangan destinasi, promosi, pemasaran dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pariwisata. Beberapa intervensi yang akan dilakukan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pariwisata adalah:

- 1) *Tourism linkage networking* antar kabupaten dan kota;
- 2) Pengembangan dan penguatan Sumber Daya Manusia pariwisata;

- 3) Mendorong event Pariwisata;
- 4) Memfasilitasi pembukaan destinasi wisata danau dan bahari;
- 5) Membuat paket-paket wisata yang menarik;
- 6) Promosi dan kerjasama nasional dan internasional; dan
- 71 Pengembangan Industri jasa pariwisata

Dengan mengedepankan pengembangan berbasis komunitas, konservasi budaya, adaptasi teknologi digital, serta keberpihakan kepada pelaku usaha lokal, Sumatera Utara diharapkan mampu menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi baru, mempercepat pemerataan pembangunan antardaerah, serta memperkuat identitas budaya dan ekologi provinsi di tingkat nasional dan global.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong pengembangan pariwisata yang berbasis potensi lokal, baik di pedesaan maupun perkotaan, dengan menekankan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Rincian Proyek Strategis Daerah pada Program Prioritas 8, serta perangkat daerah yang berperan dalam mendukung pembangunan sektor pariwisata secara holistik disajikan sebagai berikut:

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 8: PARIWISATA YANG MENGGERAKKAN POTENSI ALAM LOKAL DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA LANGSUNG (KOMUNITAS, PEMERINTAH DAERAH/DESA/KELURAHAN DAN PENGUSAHA LOKAL)	28. Dukungan terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	Disbudparekraf
	29. Pengelolaan dan Penataan Kawasan Toba Caldera UGGp dan Kawasan Geopark lainnya	Disbudparekraf
	30. Pembentukan & Pengembangan Kawasan Strategis Budaya, Parawisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi yang Terintegrasi (TATABUSE, SIBANDAN, SIPUAN, KARDAPAK dan BAHLIKE)	Disbudparekraf
	31. Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Situs Cagar Budaya Sumatera Utara	Disbudparekraf

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
	32. Pelaksanaan Event Internasional, pengembangan paket wisata dan digitalisasi promosi pariwisata global	Disbudparekraf

9. Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi

Pengembangan ekonomi kreatif dan industri berbasis teknologi menjadi salah satu prioritas strategis dalam upaya diversifikasi ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Di tengah dinamika transformasi digital dan globalisasi ekonomi, sektor ini dipandang memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan generasi wirausaha muda, serta memperkuat daya saing daerah melalui inovasi dan kreativitas. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merancang program ini dengan tujuan mendukung transformasi ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, mempercepat adaptasi pelaku usaha kecil dan menengah terhadap perubahan pasar, serta memperluas kontribusi sektor kreatif dan digital dalam struktur perekonomian daerah.

Program Prioritas 9 RPJMD Provinsi Sumatera Utara menempatkan ekonomi kreatif dan industri berbasis teknologi sebagai motor baru penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui **pengembangan sentra industri kreatif di Kawasan Sport Center Sumatera Utara** yang dipimpin oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf), pemerintah provinsi menghadirkan ruang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk berkarya, berinovasi, sekaligus memperluas jejaring usaha. Sentra ini diharapkan menjadi pusat aktivitas kreatif yang memadukan potensi seni, budaya, pariwisata, dan teknologi dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi serta meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

Di sisi lain, penguatan digitalisasi UMKM diwujudkan melalui **pembangunan Sumut Digital Market dan galeri virtual produk UMKM kreatif** yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Inovasi ini membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM, memperkuat branding produk lokal, serta memberikan peluang penetrasi pasar digital yang semakin relevan dengan tren ekonomi modern. Melalui pemanfaatan teknologi digital, UMKM di Sumatera Utara dapat

meningkatkan skala usaha, memperbaiki kualitas layanan, dan memperluas jaringan distribusi secara lebih efisien.

Dengan sinergi antar-OPD pengampu, Program Prioritas 9 mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, yaitu *ekonomi yang stabil dan inklusif (tujuan 4)*, serta berkontribusi pada sasaran *meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi (sasaran 7)*. Pengembangan ekonomi kreatif dan industri berbasis teknologi ini tidak hanya memperluas kesempatan kerja dan menciptakan nilai ekonomi baru, tetapi juga menumbuhkan ekosistem usaha yang berkelanjutan dan berdaya saing di Sumatera Utara.

Program prioritas ini selaras dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029, khususnya mendukung Prioritas Nasional 3 tentang pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif dan peningkatan lapangan kerja melalui kewirausahaan, serta Prioritas Nasional 4 terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan teknologi. Melalui digitalisasi UMKM, pembangunan infrastruktur kreatif, dan pendampingan inovatif, Sumatera Utara berkontribusi terhadap percepatan transformasi struktur ekonomi nasional ke arah ekonomi berbasis inovasi dan teknologi.

Selain itu, program revitalisasi koperasi digital dan penguatan kemitraan bisnis kreatif mendukung Prioritas Nasional 6, yakni membangun dari desa dan daerah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan. Strategi ini dipandang krusial dalam mendukung target nasional untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 4,5–5%, meningkatkan Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*) menjadi 0,59, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8% pada tahun 2029. Dengan pendekatan yang holistik ini, Sumatera Utara mempertegas peranannya sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru di kawasan barat Indonesia, berbasis pada ekonomi inovatif, kreatif, inklusif, dan berdaya saing global.

Pengembangan ekonomi kreatif dan industri berbasis teknologi menjadi salah satu pendorong utama transformasi ekonomi Sumatera Utara yang inklusif dan berdaya saing. Rangkaian Proyek Strategis Daerah berikut ini mencerminkan peran strategis OPD utama dalam mengakselerasi penguatan ekosistem ekonomi digital dan kreatif di daerah:

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 9: EKONOMI KREATIF DAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI	33. Sentra industri kreatif di Kawasan Sport Center Sumatera Utara	Disbudparekraf
	34. Sumut digital market dan galeri virtual produk UMKM kreatif	Diskop UMKM

10. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Sumatera Utara sebagai provinsi yang unggul, maju, dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk membangun birokrasi yang adaptif, profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik, dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi digital. Reformasi ini dipandang sebagai strategi kunci untuk mempercepat efektivitas pembangunan, memperbaiki kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Program Prioritas 10 RPJMD Provinsi Sumatera Utara diarahkan pada reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, serta berorientasi hasil. Melalui proyek strategis **implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)** yang dikelola oleh Bappelitbang, pemerintah provinsi memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah selaras dengan agenda pembangunan global. Integrasi prinsip-prinsip SDGs ke dalam kebijakan dan program daerah memperkuat keberlanjutan pembangunan, menjamin inklusivitas, serta memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan juga diwujudkan melalui **kerjasama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pendampingan proyek strategis dan kegiatan unggulan daerah**. Dengan keterlibatan Inspektorat sebagai OPD pengampu, pendampingan dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga serah terima, sehingga meminimalisasi potensi penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas. Pendekatan ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

Dengan sinergi antara Bappelitbang dan Inspektorat, Program Prioritas 10 mendukung *terwujudnya birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas (tujuan 5)*, serta mengarah pada sasaran *menguatnya birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas (sasaran 8)*. Reformasi birokrasi yang berbasis akuntabilitas dan transparansi ini akan menjadi landasan kokoh dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih efisien, responsif, dan berdaya saing tinggi.

Program Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Sumatera Utara dalam RPJMD 2025–2029 memiliki keterkaitan strategis dengan arah kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029. Secara substansial, program ini mendukung pencapaian Prioritas Nasional 3 mengenai Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi. Melalui penguatan sistem berbasis teknologi, profesionalisasi aparatur, dan kolaborasi pengawasan, Sumatera Utara berkontribusi terhadap pembentukan birokrasi yang lebih tangguh, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan pelaksanaan program ini, Sumatera Utara diharapkan dapat mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas, yang pada gilirannya akan memperkuat daya saing daerah, memperbaiki iklim investasi, serta mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan baik di tingkat daerah maupun nasional. Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mendukung pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota di bidang keamanan siber dan sandi sebagaimana didorong oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), melalui pengukuran tingkat kematangan keamanan siber, peningkatan kapasitas SDM bekerja sama dengan BKPSDM, serta percepatan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di lingkungan pemerintah daerah.

Upaya reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan terus didorong untuk menciptakan birokrasi yang profesional, bersih, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Berikut ini disajikan Proyek Strategis Daerah yang merupakan bagian dari Program Prioritas 10, serta perangkat daerah penanggung jawab utama dan pendukung yang berperan dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi tersebut:

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 10: REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	35. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Bappelitbang
	36. Kerjasama APIP dan APH dalam Pendampingan Proyek Strategis dan Kegiatan Unggulan Daerah melalui pendampingan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan serah terima kegiatan proyek strategis	Inspektorat

11. Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat

Transformasi digital telah ditetapkan sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan Sumatera Utara, seiring dengan semakin pesatnya disrupsi teknologi global dan akselerasi digitalisasi di berbagai sektor kehidupan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memandang bahwa digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan daya saing daerah, mempercepat pelayanan publik, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam ekonomi berbasis teknologi. Dengan kerangka kebijakan yang komprehensif, intervensi digital dirancang secara sistemik untuk menjangkau berbagai dimensi pembangunan, mulai dari tata kelola pemerintahan, pelayanan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Program Prioritas 11 RPJMD Provinsi Sumatera Utara berfokus pada transformasi digital dan inovasi teknologi, baik dalam pelayanan publik maupun perekonomian masyarakat. Salah satu proyek strategis yang menjadi tonggak penting adalah **pemanfaatan Satu Data Sumut sebagai pusat data dan informasi pembangunan**, yang dikelola oleh Dinas Kominfo. Kehadiran Satu Data Sumut tidak hanya berfungsi sebagai basis informasi terintegrasi, tetapi juga sebagai instrumen pengambilan keputusan berbasis data yang akurat, valid, dan terkini. Dengan pengelolaan data yang terstandar, pemerintah provinsi dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Inisiatif ini mendukung secara langsung tujuan pembangunan daerah, yaitu *terwujudnya birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas*

(tujuan 5), melalui sasaran *menguatnya birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas* (sasaran 8). Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan memperkuat prinsip akuntabilitas, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih cepat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Program prioritas ini selaras dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029, khususnya dalam pilar Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi. Secara nasional, transformasi digital diarahkan untuk memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan literasi teknologi, memperluas penerapan SPBE, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Tujuannya adalah untuk menciptakan birokrasi yang adaptif, pelayanan publik yang efisien dan transparan, serta memperluas inklusi ekonomi digital di seluruh lapisan masyarakat.

Secara lebih luas, program transformasi digital Sumatera Utara juga berkontribusi terhadap pencapaian target nasional peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB, mempercepat adopsi teknologi baru di sektor pertanian, pendidikan, dan industri kreatif, serta memperkuat daya saing daerah dalam konteks ekonomi digital global. Dengan strategi yang holistik dan progresif ini, Sumatera Utara diharapkan mampu menjadi salah satu provinsi pionir dalam implementasi digitalisasi di Indonesia, sekaligus mempercepat tercapainya visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Transformasi digital dan inovasi teknologi diarahkan untuk mempercepat modernisasi layanan publik sekaligus mendorong efisiensi dan inklusivitas ekonomi masyarakat. Rincian Proyek Strategis Daerah yang diturunkan dari Program Prioritas 11, serta penanggung jawab pelaksana dari masing-masing kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 11: TRANSFORMASI DIGITAL DAN INOVASI TEKNOLOGI PADA PELAYANAN PUBLIK DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT	37. Pemanfaatan Satu Data SUMUT pusat data dan informasi pembangunan	Dinas Kominfo

12. Infrastruktur dengan Prioritas Jalan dan Jembatan pada Kawasan Terisolir dan Penyediaan Layanan Dasar pada Kawasan Afirmasi, Terluar, dan Terpencil

Pembangunan infrastruktur dasar merupakan salah satu pilar utama dalam strategi percepatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Infrastruktur dipandang tidak hanya sebagai sarana fisik, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membuka keterisolasian wilayah, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta meningkatkan konektivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan dasar masyarakat.

Melalui kebijakan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada dampak langsung terhadap masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan program prioritas pembangunan yang difokuskan pada pembangunan jalan pada kawasan terisolir. Program ini dirancang sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi lokal dan regional serta mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Pada sektor jalan dan jembatan, fokus kebijakan diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat dan barang, serta memperkuat keterhubungan antar pusat produksi, kawasan pertanian, kawasan industri, dan destinasi pariwisata. **Peningkatan dan rekonstruksi jalan provinsi** dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, untuk memastikan kemantapan dan kualitas jaringan jalan utama maupun penghubung. Dalam jangka menengah, **penanganan terhadap puluhan ruas jalan strategis** menjadi prioritas, dengan pendekatan integratif yang mencakup **pembangunan trotoar, sistem drainase jalan, serta fasilitas keselamatan transportasi**. Langkah ini dimaksudkan untuk mewujudkan sistem jaringan jalan yang tidak hanya andal secara teknis, tetapi juga aman, inklusif, dan mendukung konsep kota ramah pejalan kaki.

Pembangunan dan rehabilitasi jembatan juga diarahkan pada wilayah-wilayah terpencil, kawasan pertanian produktif, serta sentra-sentra industri yang membutuhkan akses transportasi memadai. Jembatan diposisikan sebagai simpul konektivitas vital, khususnya untuk menjamin kontinuitas logistik, distribusi hasil produksi, dan mobilitas penduduk, terutama di wilayah yang dipisahkan oleh bentang alam seperti sungai, lembah, dan hutan.

Di sektor sumber daya air, perhatian khusus diberikan pada **penataan jaringan irigasi** yang tersebar di berbagai daerah irigasi yang berada dalam kewenangan provinsi. Peningkatan kapasitas dan fungsi layanan irigasi dilakukan melalui rehabilitasi dan revitalisasi jaringan yang ada,

dengan tujuan memperkuat ketahanan sektor pertanian, meningkatkan intensitas tanam, serta mendorong optimalisasi produktivitas lahan. Upaya ini merupakan bagian integral dari strategi ketahanan pangan daerah, terutama di kawasan sentra produksi beras, hortikultura, dan perkebunan unggulan.

Untuk mendukung pengembangan kawasan industri, dilakukan pula **peningkatan kapasitas infrastruktur air bersih di kawasan strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)**. Penyediaan air baku dan layanan pengolahan air bersih dipastikan tersedia guna menjamin keberlangsungan kegiatan produksi, memperkuat daya saing kawasan industri, serta mendorong investasi di sektor industri pengolahan dan manufaktur.

Kawasan afirmasi, seperti wilayah kepulauan dan pesisir, menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur dasar, khususnya prasarana utilitas umum (PSU), air minum dan sistem sanitasi. Kebijakan ini diarahkan untuk menjamin kesetaraan akses pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat, memperkecil ketimpangan layanan infrastruktur antara daratan utama dan daerah terluar, serta mengintegrasikan kawasan perdesaan ke dalam sistem ekonomi regional.

Secara keseluruhan, program ini dirancang untuk mendorong integrasi wilayah, mempercepat pergerakan barang dan jasa, serta membuka peluang ekonomi baru melalui peningkatan aksesibilitas fisik. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Program Prioritas 12 RPJMD Provinsi Sumatera Utara menempatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan penyediaan layanan dasar sebagai instrumen utama dalam memperkuat konektivitas wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Melalui **proyek pembangunan ruas jalan baru yang menghubungkan wilayah terisolir atau strategis**, Dinas PUPR berperan untuk membuka aksesibilitas baru yang sebelumnya terbatas, sehingga mendorong percepatan arus barang, jasa, dan mobilitas masyarakat. Kehadiran infrastruktur jalan ini tidak hanya memperlancar aktivitas ekonomi lokal, tetapi juga menjadi katalis

bagi tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di kawasan pedesaan dan hinterland.

Dengan demikian, Program Prioritas 12 berkontribusi langsung terhadap *terwujudnya ekonomi yang stabil dan inklusif (tujuan 4)* melalui sasaran *meningkatnya pemerataan pembangunan ekonomi (sasaran 7)*, serta mendukung tujuan *peningkatan akses terhadap infrastruktur berkualitas, estetik, dan ramah lingkungan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat (tujuan 7, sasaran 11)*.

Selaras dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan penyediaan layanan dasar di Provinsi Sumatera Utara juga ditujukan untuk memperkuat konektivitas nasional, menurunkan biaya logistik, meningkatkan efisiensi rantai pasok, memperkuat ketahanan pangan, serta memperkuat daya saing daerah. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menetapkan prioritas peningkatan kapasitas jalan nasional dan daerah, preservasi jembatan strategis dan penyediaan layanan dasar sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi ekonomi nasional secara merata dan berkelanjutan.

Guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal secara langsung, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, penyediaan layanan dasar, dan kawasan ekonomi produktif. Informasi lengkap mengenai bentuk Proyek Strategis Daerah, serta OPD penanggung jawab utama dalam Program Prioritas pembangunan ini dapat dilihat sebagai berikut:

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 12. INFRASTRUKTUR DENGAN PRIORITAS JALAN DAN JEMBATAN PADA KAWASAN TERISOLIR DAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR PADA KAWASAN AFIRMASI, TERLUAR, DAN TERPENCIL	38. Pembangunan Ruas Jalan Baru Penghubung Wilayah Terisolir atau Strategis yang Merupakan kewenangan Provinsi	Dinas PUPR
	39. Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar bagi Kawasan Afirmasi, Terluar, dan Terpencil untuk Mewujudkan Keadilan Pembangunan	Dinas PUPR

13. Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menempatkan penguatan sistem logistik dan transportasi sebagai salah satu pilar strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Di tengah dinamika globalisasi dan transformasi ekonomi, sistem logistik dan transportasi yang terintegrasi dipandang sebagai prasyarat untuk menekan biaya distribusi, mempercepat mobilitas barang dan jasa, membuka konektivitas antarwilayah, serta memperkuat daya saing daerah. Melalui program prioritas ini, Pemerintah Provinsi berupaya tidak hanya memperbaiki infrastruktur fisik, tetapi juga mengembangkan sistem distribusi dan pelayanan transportasi berbasis kawasan yang adaptif terhadap kebutuhan pembangunan jangka panjang.

Program Prioritas 13 RPJMD Provinsi Sumatera Utara diarahkan untuk memperkuat sistem logistik dan transportasi sebagai pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah. Melalui proyek strategis **pembangunan angkutan umum massal perkotaan berupa Bus Rapid Transit (BRT) serta peningkatan layanan kereta commuter**, Dinas Perhubungan berupaya menghadirkan transportasi publik yang modern, aman, dan nyaman. Kehadiran sistem angkutan massal ini tidak hanya mengurangi kemacetan lalu lintas dan emisi kendaraan pribadi, tetapi juga meningkatkan konektivitas antarwilayah perkotaan sehingga mendorong produktivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, program **subsidi transportasi bus perintis untuk daerah terpencil** menjadi instrumen penting dalam memastikan pemerataan akses transportasi hingga ke wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan. Kebijakan ini memperkecil kesenjangan antarwilayah, membuka peluang distribusi barang dan jasa, serta memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat di daerah pedesaan atau terisolasi. Dengan keterlibatan aktif Dinas Perhubungan sebagai OPD pengampu, kedua proyek ini menjadi bagian strategis dalam memperkuat jaringan logistik dan transportasi yang inklusif serta berkelanjutan.

Dengan demikian, Program Prioritas 13 berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan pembangunan daerah, yakni *terwujudnya ekonomi*

yang stabil dan inklusif (tujuan 4) melalui meningkatnya pemerataan pembangunan ekonomi (sasaran 7), sekaligus mendukung peningkatan akses terhadap infrastruktur berkualitas, estetik, dan ramah lingkungan untuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat (tujuan 7, sasaran 11). Implementasi program ini menegaskan komitmen Provinsi Sumatera Utara dalam menghadirkan transportasi publik yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan pembangunan.

Program prioritas pengembangan sistem logistik dan transportasi Sumatera Utara ini memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029. Secara nasional, peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur logistik dan transportasi—baik jalan, pelabuhan, bandara, maupun pusat distribusi logistik—dipandang sebagai kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperbaiki efisiensi logistik nasional, serta memperluas akses pasar bagi sektor produktif seperti pertanian, perikanan, industri kecil, dan pariwisata.

Dalam kerangka RPJMN, penguatan sistem logistik juga menjadi syarat penting untuk mendukung program swasembada pangan, hilirisasi industri, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Sistem logistik yang efisien diharapkan mampu mengurangi biaya logistik nasional, yang saat ini masih relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN. Selain itu, pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah terpencil memperkuat pencapaian prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mendorong aksesibilitas, mengurangi ketimpangan sosial, serta mempercepat integrasi daerah tertinggal dalam sistem ekonomi nasional.

Melalui implementasi program ini, Sumatera Utara diharapkan dapat membangun sistem logistik dan transportasi yang adaptif, berkelanjutan, serta menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi berbasis kawasan yang inklusif dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional dan regional.

Sebagai upaya meningkatkan efisiensi logistik, memperluas akses pasar, serta memperkuat konektivitas wilayah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong pengembangan sistem logistik dan transportasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Adapun Proyek Strategis Daerah, serta OPD penanggung jawab utama dapat dilihat sebagai berikut:

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 13: PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK DAN TRANSPORTASI YANG MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN DAYA SAING	40. Dukungan pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan melalui pembangunan BRT dan peningkatan kereta commuter	Dinas Perhubungan
	41. Subsidi Transportasi Bus Perintis untuk daerah-daerah terpencil	Dinas Perhubungan

14. Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana

Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan menjadi fondasi utama dalam menjaga kesinambungan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Prinsip keberlanjutan menuntut bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tetapi juga memastikan bahwa daya dukung lingkungan tetap terjaga bagi generasi mendatang. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan berbagai program dan Proyek Strategis Daerah yang mengintegrasikan konservasi lingkungan, mitigasi perubahan iklim, serta peningkatan ketangguhan daerah terhadap risiko bencana.

Program pengelolaan lingkungan ini dikembangkan melalui dua jalur utama: konservasi sumber daya alam dan pengurangan emisi karbon. Pada jalur pertama, yaitu Konservasi Sumber Daya Alam, intervensi diarahkan untuk memperkuat pengelolaan lingkungan secara holistik dan menjaga ekosistem dari kerusakan akibat tekanan pembangunan serta perubahan iklim. Salah satu kegiatan prioritas adalah dukungan pembangunan/ pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional maupun TPST di 33 kabupaten/kota. Infrastruktur ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah berbasis prinsip ekonomi sirkular, dengan mengurangi ketergantungan pada metode pembuangan terbuka.

Program Prioritas 14 RPJMD Provinsi Sumatera Utara menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkelanjutan serta berketahanan terhadap bencana. Program ini diwujudkan melalui serangkaian Proyek Strategis Daerah yang bertujuan

memperkuat daya dukung lingkungan sekaligus mengurangi risiko bencana yang sering mengganggu aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Di antaranya adalah **pembangunan infrastruktur pengendali banjir** serta **pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) regional** yang digerakkan oleh Dinas PUPR. Kedua proyek ini berfungsi untuk melindungi kawasan permukiman dan pusat-pusat aktivitas ekonomi dari kerusakan akibat banjir maupun pencemaran lingkungan, sekaligus mendorong terciptanya tata ruang wilayah yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, **proyek pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) regional** yang juga dipimpin oleh Dinas PUPR, serta **pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)** oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM), menghadirkan inovasi dalam pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan. Kedua inisiatif ini tidak hanya mengurangi timbunan sampah, tetapi juga menghasilkan energi alternatif yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) memimpin **pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati** sebagai ruang konservasi dan edukasi, yang sekaligus memperkuat komitmen pelestarian ekosistem lokal dan memberikan manfaat sosial-ekonomi melalui potensi wisata alam.

Melalui sinergi berbagai OPD pengampu, Program Prioritas 14 mendukung secara langsung tujuan pembangunan daerah, yaitu *peningkatan akses terhadap infrastruktur yang berkualitas, estetik, dan ramah lingkungan guna mendukung kemandirian ekonomi masyarakat (tujuan 7)*. Implementasi proyek-proyek strategis ini juga memperkuat pencapaian sasaran *meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ramah lingkungan (sasaran 11)*, sehingga pembangunan di Sumatera Utara tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan dan ketahanan lingkungan.

Secara nasional, inisiatif ini memiliki keterkaitan erat dengan beberapa prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029.

Program konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup ini secara langsung mendukung Prioritas Nasional 11, yaitu *Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup*. Melalui intervensi seperti rehabilitasi hutan dan lahan kritis, restorasi kawasan pesisir, konservasi keanekaragaman

hayati, serta pengembangan infrastruktur pengolahan limbah, Sumatera Utara berkontribusi pada pembangunan berbasis ekosistem yang ramah lingkungan.

Selain aspek lingkungan, program ini juga berkontribusi pada Prioritas Nasional 2, yaitu *Memantapkan Ketahanan Nasional*, dengan memperkuat ketahanan wilayah terhadap ancaman bencana alam dan perubahan iklim. Intervensi seperti sistem peringatan dini, pembangunan sabuk hijau di wilayah pesisir, edukasi tanggap bencana berbasis komunitas, dan pembentukan desa siaga bencana menunjukkan kesiapan Sumatera Utara dalam menghadapi perubahan iklim dengan pendekatan berbasis adaptasi dan mitigasi yang terintegrasi.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan serta tangguh terhadap risiko bencana, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merancang berbagai bentuk intervensi hingga OPD penanggungjawab. Adapun rincian Proyek Strategis Daerah, serta OPD penanggung jawab utama disajikan sebagai berikut:

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 14. PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA	42. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir	Dinas PUPR
	43. Pembangunan TPST Regional	Dinas PUPR
	44. Pembangunan PLTSa	Disperindag ESDM
	45. Pengembangan SPAL Regional	Dinas PUPR
	46. Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati	DLHK

15. Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa

Penguatan ekonomi perdesaan melalui pengembangan desa produktif menjadi salah satu prioritas strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui Program Membangun Desa Produktif Terpadu, pemerintah berupaya menciptakan desa yang mandiri, produktif, serta berdaya saing, dengan mengoptimalkan potensi lokal dan mengintegrasikan inovasi teknologi. Program ini dirancang tidak hanya

untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa, tetapi juga untuk memperkecil ketimpangan pembangunan antarwilayah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Program Prioritas 15 RPJMD Provinsi Sumatera Utara menempatkan pembangunan berbasis desa sebagai strategi utama untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah dari tingkat akar rumput. Melalui proyek strategis daerah **berupa penguatan ekonomi desa**, pemerintah provinsi mendorong terciptanya kemandirian lokal dengan menyusun masterplan desa produktif dan mandiri. Langkah ini tidak hanya mengurangi ketergantungan desa terhadap pusat kota, tetapi juga memanfaatkan potensi unggulan di tingkat lokal sehingga desa mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdaya saing. Peran Dinas PMD Dukcapil sebagai OPD pengampu sangat penting dalam memastikan perencanaan dan implementasi kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, **peningkatan kapasitas serta pendampingan bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)** menjadi bagian integral dari program ini. BUMDes diposisikan sebagai motor penggerak ekonomi desa yang mampu mengelola sumber daya lokal, membuka peluang usaha, serta menciptakan lapangan kerja baru. Melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola, BUMDes diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Dengan demikian, Program Prioritas 15 berkontribusi langsung terhadap tercapainya tujuan pembangunan daerah, yaitu *terwujudnya ekonomi yang stabil dan inklusif (tujuan 4)*, serta mendukung sasaran *meningkatnya pemerataan pembangunan ekonomi (sasaran 7)*. Pembangunan berbasis desa memastikan hasil pembangunan tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga merata hingga ke wilayah pedesaan, sehingga kesenjangan ekonomi dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, Program Membangun Desa Produktif Terpadu menegaskan pendekatan holistik dalam pembangunan ekonomi desa, yang meliputi penguatan kelembagaan, pengembangan kapasitas manusia, adopsi teknologi, serta penyediaan dukungan regulasi dan infrastruktur usaha. Program ini sejalan dengan prinsip

pembangunan berbasis kemandirian komunitas, yang menempatkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek bantuan.

Dalam konteks kebijakan nasional, program ini mendukung pencapaian Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029, khususnya pada bidang penguatan desa dan daerah, pengembangan ekonomi lokal, serta pengurangan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Dengan implementasi program yang terukur dan konsisten, Provinsi Sumatera Utara diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan desa mandiri, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, serta meningkatkan kontribusi desa dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan berbasis desa sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi lokal dan mengurangi ketimpangan wilayah. Bentuk Proyek Strategis Daerah, serta OPD penanggungjawab pada Program Prioritas 15 dapat dilihat pada tabel berikut:

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 15: MELANJUTKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA	47. Penguatan ekonomi desa untuk mengurangi ketergantungan pada pusat kota dengan penguatan ekonomi lokal melalui pembuatan masterplan desa produktif dan mandiri.	Dinas PMD Dukcapil
	48. Peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDes.	Dinas PMD Dukcapil

16. Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana Harmonis, Toleran, dan Rukun

Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis, toleran, dan rukun di tengah dinamika globalisasi dan percepatan perubahan sosial. Ketahanan sosial yang kuat tidak hanya memperkuat kohesi internal masyarakat, tetapi juga menjadi prasyarat utama bagi terciptanya

stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta kesejahteraan sosial. Dalam konteks Sumatera Utara, yang dikenal dengan keragaman etnis, agama, dan budaya, upaya menjaga harmoni sosial dan memperkuat nilai-nilai toleransi menjadi semakin strategis. Melalui promosi nilai-nilai kebersamaan, saling menghargai, dan inklusivitas, potensi konflik sosial dapat diminimalisir, sementara solidaritas sosial diperkuat sebagai modal sosial utama pembangunan daerah.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menginisiasi Program BERHATI (Berbudaya, Rukun, Harmonis, Toleran, dan Empati) sebagai salah satu prioritas strategis dalam RPJMD 2025–2029. Program ini diarahkan untuk memperkuat jaringan sosial budaya masyarakat, membangun ketahanan sosial berbasis komunitas, serta menciptakan tatanan sosial yang lebih damai, toleran, dan inklusif.

Program Prioritas 16 RPJMD Provinsi Sumatera Utara diarahkan untuk memperkuat ketahanan sosial dan budaya yang menjadi fondasi terciptanya suasana masyarakat yang harmonis, toleran, dan rukun. Program ini diwujudkan melalui sejumlah Proyek Strategis Daerah yang menyentuh langsung aspek kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Salah satunya adalah **pemberian bantuan hibah rumah ibadah di 33 kabupaten/kota** yang dikelola oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Kebijakan ini bukan sekadar dukungan fasilitas keagamaan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat toleransi antar umat beragama serta memperkuat harmoni sosial di Sumatera Utara yang dikenal dengan keragaman budaya dan keyakinannya.

Selain itu, **pelaksanaan Festival Seni dan Budaya Daerah** oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) menjadi wadah penting untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya lokal, sekaligus mempererat persatuan melalui apresiasi seni dan tradisi yang beragam. Program ini diperkaya dengan **edukasi serta pembekalan solidaritas, ketahanan sosial, dan wawasan kebangsaan bagi organisasi maupun kelompok masyarakat** yang digerakkan oleh Bakesbangpol. Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kohesi sosial, memperdalam rasa kebangsaan, serta menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menjaga persatuan di tengah dinamika kehidupan modern.

Dengan pelaksanaan yang terpadu oleh OPD pengampu sesuai perannya masing-masing, Program Prioritas 16 secara langsung mendukung tujuan pembangunan daerah, yakni *terwujudnya ketahanan sosial, budaya, dan keluarga (tujuan 8)*.

Program BERHATI secara substansial mendukung pencapaian Prioritas Nasional 8 dalam RPJMN 2025–2029, yaitu *Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama*. Melalui pendekatan berbasis komunitas, Program BERHATI berkontribusi dalam membangun tatanan sosial yang inklusif, adil, dan berkeadilan sosial. Implementasi program ini juga sejalan dengan agenda nasional untuk memperkuat identitas nasional, mengurangi kesenjangan sosial budaya, serta meningkatkan indeks kerukunan umat beragama.

Lebih jauh, pendekatan berbasis masyarakat yang digunakan dalam Program BERHATI sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan sosial berkelanjutan (*social sustainability*), yang menekankan pada pemberdayaan komunitas, partisipasi publik, serta penguatan kapasitas lokal dalam menciptakan ketahanan sosial yang berkelanjutan. Dengan implementasi yang konsisten dan adaptif terhadap dinamika sosial, Program BERHATI diharapkan mampu memperkokoh Sumatera Utara sebagai provinsi yang menjadi teladan dalam menjaga harmoni sosial, memperkuat toleransi, serta merawat keberagaman budaya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial dan budaya yang mendukung suasana harmonis, toleran, dan rukun di Sumatera Utara, dirancang program strategis berbasis pendekatan kolaboratif dan kultural. Adapun rincian Proyek Strategis Daerah yang menjadi bagian dari Program Prioritas 16, serta OPD penanggung jawab utamanya dapat dilihat sebagai berikut:

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 16: MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG MENDUKUNG SUASANA YANG HARMONIS, TOLERAN DAN RUKUN	49. Bantuan Hibah Rumah Ibadah di 33 Kabupaten/Kota	Biro Kesra
	50. Festival Seni dan Budaya Daerah	Disbudparekraf

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
	51. Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat	Bakesbangpol

17. Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib

Memperkuat sistem keamanan dan ketertiban adalah langkah fundamental untuk memastikan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Sistem keamanan yang efektif melibatkan peningkatan kapasitas dan koordinasi antara lembaga penegak hukum, penggunaan teknologi untuk pengawasan, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan sistem yang mendukung, dapat mengidentifikasi dan merespons ancaman keamanan dengan cepat dan tepat, yang penting untuk mencegah terjadinya kejahatan dan gangguan ketertiban. Lingkungan yang aman menciptakan rasa nyaman dan percaya di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya mendorong kegiatan ekonomi, dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Program Prioritas 17 RPJMD Provinsi Sumatera Utara menekankan terciptanya kehidupan yang lebih aman dan tertib melalui serangkaian langkah strategis yang menyasar akar persoalan keamanan di daerah. Program ini diterjemahkan ke dalam sejumlah Proyek Strategis Daerah yang berfokus pada penguatan pengawasan, penegakan hukum, serta pencegahan potensi gangguan ketertiban masyarakat. Di antaranya, **pelaksanaan patroli gabungan untuk memberantas narkoba di pintu-pintu masuk peredaran dan kawasan yang rawan kenakalan remaja, termasuk geng motor**, menjadi upaya nyata yang dikoordinasikan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kegiatan ini tidak hanya menekan potensi kriminalitas, tetapi juga memberi rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Selain itu, pemberantasan pengguna dan bandar narkoba melalui langkah strategis **pemindahan gembong narkoba dari Lapas di Sumatera Utara ke Nusakambangan** yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Bakesbangpol merupakan upaya serius dalam memutus

mata rantai jaringan narkoba di daerah. Tindakan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memperkuat ketertiban hukum dan melindungi generasi muda dari dampak buruk narkoba. Dengan keterlibatan OPD pengampu sesuai dengan kewenangan dan tupoksi masing-masing, program ini mendorong tercapainya tujuan pembangunan daerah yaitu *peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan (tujuan 6)*, serta mendukung sasaran *meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat (sasaran 10)*.

Upaya menanggulangi narkoba di Sumatera Utara harus ditempuh secara menyeluruh melalui langkah preventif, represif, dan pemulihan yang saling melengkapi. Dari sisi preventif, keluarga menjadi pagar pertama agar individu, terutama anak-anak dan remaja, tidak terpapar narkoba. Pendidikan nilai, komunikasi yang hangat, dan pengawasan yang sehat dalam keluarga menjadi benteng utama. Ayah, sebagai sosok teladan dalam keluarga, memiliki peran strategis untuk menanamkan nilai, disiplin, dan keteladanan nyata dalam kehidupan sehari-hari. *Gerakan Ayah Teladan* perlu diperkuat bukan hanya pada simbol seremonial, tetapi pada aspek-aspek substansial, seperti sosialisasi terbatas kepada setiap ayah di komunitas, pelatihan komunikasi efektif dengan anak, serta pembekalan mengenai bahaya narkoba. Melalui penguatan ini, ayah mampu hadir sebagai figur utama yang mencegah anak mencari panutan dari luar yang berisiko negatif.

Kemudian, peran tetangga, lingkungan sekitar, dan komunitas juga penting dalam menciptakan ruang sosial yang aman dan bebas dari pengaruh narkoba. Sekolah harus mengambil bagian melalui pendidikan karakter, penguatan kurikulum tentang bahaya narkoba, serta kegiatan positif yang menyalurkan bakat dan kreativitas siswa. Bahkan orang yang tidak dikenal oleh si “anak” sekalipun, dengan budaya saling peduli dan keberanian untuk melaporkan dapat menjadi bagian penting dari rantai pengawasan sosial terhadap peredaran narkoba. Disini peran komunitas memainkan perannya dalam memutus rantai penyalahgunaan.

Bagi mereka yang sudah terlanjur menjadi korban penyalahgunaan narkoba, aspek pemulihan melalui rehabilitasi harus menjadi prioritas. Rumah-rumah rehabilitasi yang dikelola secara profesional perlu

didorong lebih kuat, baik dari sisi fasilitas medis, tenaga konselor, maupun dukungan sosial. Dengan pendekatan yang menyeluruh, baik fisik, psikologis, spiritual, dan sosial, rehabilitasi dapat menjadi pintu penyelamatan, memberi kesempatan kedua bagi korban untuk kembali pulih, berdaya, dan diterima di masyarakat.

Sementara dari sisi represif, Pemerintah Provinsi perlu memperkuat kerja bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kota, Kepolisian, TNI, BNN, hingga Ditjen Bea Cukai untuk memperkuat barisan pemberantasan narkoba. Kolaborasi ini harus dilandasi kekuatan legalitas masing-masing institusi agar tindakan yang diambil memiliki kepastian hukum dan daya tekan yang kuat. Diperlukan *roadmap* yang jelas, dimulai dari deteksi dini potensi peredaran narkoba di pintu masuk perbatasan, jalur laut, dan distribusi lokal, hingga mekanisme pencegahan yang terintegrasi di seluruh wilayah Sumatera Utara. Penegakan hukum melalui penangkapan bandar dan pengedar perlu dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, disertai strategi menciptakan efek jera bagi pelaku. Dengan langkah terukur antara pencegahan sosial dan penindakan hukum, Sumatera Utara dapat mempersempit ruang gerak peredaran narkoba sekaligus memperkuat ketahanan keluarga dan masyarakat dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman yang merusak masa depan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Program Prioritas 17 tidak hanya bersifat represif melalui pemberantasan jaringan narkoba dan penindakan geng motor, tetapi juga bersifat preventif dengan menghadirkan sinergi lintas sektor dalam menjaga ketertiban umum. Kehadiran program ini memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dalam menciptakan ruang hidup yang kondusif, sehingga kebijakan pembangunan di berbagai bidang dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Secara substansial, Program SUMUT BERSATU sejalan dengan Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029, yaitu *“Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”*. Melalui pendekatan berbasis teknologi dan kolaborasi antar lembaga, program ini mendukung upaya

nasional dalam membangun sistem keamanan yang tangguh dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Untuk mendukung terciptanya kehidupan yang lebih aman dan tertib di Sumatera Utara, telah dirumuskan berbagai bentuk intervensi strategis yang difokuskan pada penguatan sistem keamanan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengendalian terhadap ancaman sosial. Adapun daftar Proyek Strategis Daerah yang menjadi bagian dari Program Prioritas 17, serta OPD pengampunya dapat dilihat sebagai berikut:

PROGRAM PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS DAERAH	OPD PENGAMPU
PP 17: TERCIPTANYA KEHIDUPAN YANG LEBIH AMAN DAN TERTIB	52. Patroli Gabungan untuk Narkoba di Pintu Masuk Narkoba dan Kawasan- Kawasan Kenakalan Remaja (genk motor).	Satpol PP
	53. Pemberantasan Pengguna dan Bandar Narkoba melalui Pemindahan Gembong Narkoba dari Lapas ke Nusakambangan	Biro Hukum / Bakesbangpol

RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 disusun tidak hanya sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih, tetapi juga sebagai bentuk konkret dukungan terhadap arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Dalam hal ini, RPJMD menjadi bagian integral dari pelaksanaan agenda Asta Cita.

Keterkaitan antara RPJMD dan Asta Cita dijabarkan secara nyata dalam misi pembangunan provinsi, tujuan dan sasaran, hingga indikator kinerja utama. Sebagai contoh, misi pertama dalam RPJMD yang berfokus untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara langsung mendukung Asta Cita keempat dan keenam. Sementara misi kedua yaitu Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah sejalan dengan Asta Cita kedua, ketiga kelima dan keenam. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (misi ketiga) menopang Asta Cita ketujuh. Misi keempat yaitu Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan mendukung Asta Cita ketiga dan kedelapan. Kemudian, misi kelima yang ingin Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk

Membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh (misi kelima) selaras dengan Asta Cita kesatu, keempat dan kedelapan.

Dukungan ini juga tercermin dalam target-target pembangunan Sumatera Utara yang linier dengan target nasional, seperti peningkatan PDRB per kapita, peningkatan pertumbuhan dan kontribusi ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan hidup, SDM, pemberantasan kemiskinan, penurunan pengangguran, penurunan ketimpangan pengeluaran antar individu (Rasio Gini), hingga penurunan emisi gas rumah kaca. Dengan demikian, RPJMD Sumatera Utara 2025–2029 tidak hanya memperjuangkan kepentingan lokal, tetapi juga menjadi bagian dari orkestrasi pembangunan nasional menuju Visi Indonesia Emas 2045. Agar PHTC dan Program Prioritas Provinsi dapat dijalankan secara operasional, maka program-program tersebut perlu dipadukan dengan program nomenklatur yang relevan di setiap urusan OPD. Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Outcome, Indikator, Program Prioritas, dan Program Utama OPD dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 9. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Outcome, Indikator dan Program Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			Indeks Modal Manusia		
		1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Persentase ibu hamil ANC (antenatal care) 6 kali sesuai standar	PP 3: KESEHATAN YANG TERINTEGRASI DI BEBERAPA TITIK KAWASAN YANG MENJADI SENTRA LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT TERPADU	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (termasuk PHTC 2)
				2. Persentase Wasting		
				3. Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi		
				4. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana		
				5. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin imunisasi rutin lengkap		
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
			Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi		Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan
				Rata-Rata Lama Sekolah		

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
		2, Meratanya Pendidikan Berkualitas		Harapan Lama Sekolah		
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	PP 1: PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH UNGGULAN BERBASIS PENINGKATAN SKILL YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI DAN POTENSI WILAYAH DI TINGKAT LOKAL	Program Pengelolaan Pendidikan (termasuk PHTC 1)
				2. Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik		Program Penataan Bangunan Gedung
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	PP 2 : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM BERKARYA DAN BERPRESTASI	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	3. Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif		Tingkat Kemiskinan		
				Indeks Kesejahteraan Sosial		
				Indeks Zakat Nasional		
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	PP 4: PEMBERANTASAN KEMISKINAN MELALUI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RENTAN SECARA MENYELURUH DAN TEPAT SASARAN	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (PHTC 6)

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		Program Rehabilitasi Sosial
				2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				4. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				6. Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas		
				7. Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia		
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	3. Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial		Program Hubungan Industrial
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial		Program Pemberdayaan Sosial
		4. Meningkatnya Hilirisasi Produk Unggulan Daerah		Kontribusi PRDB Provinsi		
				PDRB per Kapita		
				Indeks Ekonomi Hijau		
				Rasio PDRB Industri Pengolahan		
				Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB		
				Indeks Inovasi Daerah		
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	PP 1: PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH UNGGULAN BERBASIS PENINGKATAN SKILL YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI DAN POTENSI WILAYAH DI TINGKAT LOKAL	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	PP 5: PENGUATAN STABILITAS MAKRO EKONOMI DAN KESINAMBUNGAN FISKAL DAERAH	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	PP 6: PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura	PP 7 : KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGUATAN NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL AGAR DIVERSIFIKASI HASIL PERTANIAN MENJADI LEBIH PRODUKTIF DAN BERDAMPAK PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan		Program Penyuluhan Pertanian
				2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi		
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		5. Meningkatnya Aktivitas Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan		Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer		
				Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	PP 5 : PENGUATAN STABILITAS MAKRO EKONOMI DAN KESINAMBUNGAN FISKAL DAERAH	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				2. Peningkatan Produksi Hortikultura		
				3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	PP.6 : PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			Meningkatnya kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Meningkatnya kelestarian Mut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	PP 8 : PARIWISATA YANG MENGGERAKKAN POTENSI ALAM LOKAL DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA LANGSUNG (KOMUNITAS, PEMERINTAH DAERAH/DESA/KELURAHAN DAN PENGUSAHA LOKAL)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata		Program Pemasaran Pariwisata
	4. Ekonomi yang Stabil dan inklusif			Tingkat Pengangguran Terbuka		
				Pertumbuhan Ekonomi		
				Gini Rasio		

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
		6. Terciptanya Stabilitas Harga		Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi		
				Tingkat Inflasi		
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	PP 4: PEMBERANTASAN KEMISKINAN MELALUI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RENTAN SECARA MENYELURUH DAN TEPAT SASARAN	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	PP 7 : KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGUATAN NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL AGAR DIVERSIFIKASI HASIL PERTANIAN MENJADI LEBIH PRODUKTIF DAN BERDAMPAK PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (PHTC 3)
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (PHTC 3)
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan		Program Program Penyelenggaraan Jalan (PHTC 3)
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan		Program Perekonomian dan Pembangunan (PHTC 3)

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	1. Efektivitas Kerja Sama Daerah		Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah (PHTC 3)
				2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (termasuk PHTC 3)
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
				2. Peningkatan Produksi Hortikultura		
				3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		7. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Ekonomi		Pembentukan Modal Tetap Bruto		
				Nilai Tukar Nelayan (NTN)		
				NTP Tanaman Pangan		
				NTP Tanaman Hortikultura		
				Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)		
				Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)		
				Inklusi Keuangan		
				Indeks Desa		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	PP 6: PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa		Program Peningkatan Kerjasama Desa
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	PP 7 : KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGUATAN NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL AGAR DIVERSIFIKASI HASIL PERTANIAN MENJADI LEBIH PRODUKTIF DAN BERDAMPAK PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				2. Peningkatan Produksi Hortikultura		
				3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan		Program Penyuluhan Pertanian
				2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi		
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	PP 9: EKONOMI KREATIF DAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
			Meningkatnya kapasitas SDM	Persentase pelaku pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Program Pengembangan Sumber

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			pariwisata dan ekonomi kreatif	yang Aktif dan Tervalidasi		DayaPariwisata dan Ekonomi kreatif
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor		Program Pengembangan UMKM
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	PP 12: INFRASTRUKTUR DENGAN PRIORITAS JALAN DAN JEMBATAN PADA KAWASAN TERISOLIR DAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR PADA KAWASAN AFIRMASI, TERLUAR, DAN TERPENCIL	Program Penyelenggaraan Jalan
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	1. Konektivitas Darat	PP 13 : PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK DAN TRANSPORTASI YANG MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN DAYA SAING	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal		
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	PP 15 : MELANJUTKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA	Program Administrasi Pemerintahan Desa
				2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa		
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa		Program Peningkatan Kerjasama Desa
3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	5. Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas			Indeks Reformasi Birokrasi		
		8. Menguatnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas		Indeks Pelayanan Publik		
				Indeks Reformasi Hukum		

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
				Indeks Integritas Nasional		
				Nilai Capaian Pelaporan Kinerja (SAKIP)		
				Indeks Profesionalitas ASN		
				Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	PP 5 : PENGUATAN STABILITAS MAKRO EKONOMI DAN KESINAMBUNGAN FISKAL DAERAH	Program Perekonomian dan Pembangunan (PHTC 4)
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	PP 10 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
				2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang		

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
				Perekonomian dan SDA		
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	1. Maturitas Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)		Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
				2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1		Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PHTC 4)
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (PHTC 4)
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (PHTC 4)
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (PHTC 4)

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap, Akurat, dan Terkini		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (PHTC 4)
			Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan (PHTC 4)
			Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan		Program Kebijakan Admnistrasi Pembangunan (PHTC 4)
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	PP 11. : TRANSFORMASI DIGITAL DAN INOVASI TEKNOLOGI PADA PELAYANAN PUBLIK DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		9. Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah		Opini BPK atas Laporan Keuangan		
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	PP 5 : PENGUATAN STABILITAS MAKRO EKONOMI DAN KESINAMBUNGAN FISKAL DAERAH	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	6. Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan pembangunan			Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya		
		10. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan		Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas		
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	PP 17 : TERCIPTANYA KEHIDUPAN YANG LEBIH AMAN DAN TERTIB	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas		Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat		
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya		
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan		
4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan	7. Peningkatan Akses terhadap Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan guna Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat			Persentase Penurunan Emisi GRK		
				a. Kumulatif		
				b. tahunan		
		11. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Ramah Lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	PP 12. INFRASTRUKTUR DENGAN PRIORITAS JALAN DAN JEMBATAN PADA KAWASAN TERISOLIR DAN	Program Penyelenggaraan Jalan (termasuk PHTC 5.a)

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	PENYEDIAAN LAYANAN DASAR PADA KAWASAN AFIRMASI, TERLUAR, DAN TERPENCIL	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (termasuk PHTC 5.b)
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	1.Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni		Program Pengembangan Perumahan (PHTC 5.c)
				2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni		
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kurnuh 10-15 Ha yang Ditangani		Program Kawasan Permukiman
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	1. Konektivitas Darat	PP 13: PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK DAN TRANSPORTASI YANG MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN DAYA SAING	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal		
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	PP 14 : PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
				2. Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan danri Abrasi dan an Banjir Rob		
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah		Program Pengelolaan Persampahan
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	PP 6: PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
			Meningkatnya kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
			Meningkatnya kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
			Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil
		12. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undermourishment)		
				Skor Pola Pangan Harapan		
				Intensitas Energi Primer		
				Luas zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota		

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	PP 6: PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
				2. Porsi EBT dalam Bauran Energi		
			Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	PP 14 : PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
				2. Porsi EBT dalam Bauran Energi		
			Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	PP 7 : KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGUATAN NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL AGAR DIVERSIFIKASI HASIL PERTANIAN MENJADI LEBIH PRODUKTIF DAN BERDAMPAK PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				2. Peningkatan Produksi Hortikultura		
				3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
			Meningkatnya kapasitas SDM	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan		Program Penyuluhan Pertanian

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			bidang penyuluh pertanian	2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi		
5. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh	8. Terwujudnya Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga			Indeks Demokrasi Indonesia		
		13. Menguatnya Peran Keluarga, Kesenjangan Gender, Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama dalam Kehidupan Sosial		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		
				Indeks Ketimpangan Gender		
				Indeks Kerukunan Umat Beragama		
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	PP 16 : MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG MENDUKUNG SUASANA YANG HARMONIS, TOLERAN DAN RUKUN	Program kesejahteraan rakyat
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif		Program pemberdayaan organisasi kemasyarakatan
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	PP 17 : TERCIPTANYA KEHIDUPAN YANG LEBIH AMAN DAN TERTIB	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas		

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat		Program pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya		
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan		
		14. Menguatnya Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai-nilai Budaya Lokal Sebagai Identitas Daerah		Indeks Pembangunan Kebudayaan		
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	PP 8 : PARIWISATA YANG MENGGERAKKAN POTENSI ALAM LOKAL DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA LANGSUNG (KOMUNITAS, PEMERINTAH DAERAH/DESA/KELURAHAN DAN PENGUSAHA LOKAL)	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
				2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan		

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Program Utama OPD
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	PP 16 : MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG MENDUKUNG SUASANA YANG HARMONIS, TOLERAN DAN RUKUN	Program Pengembangan Kebudayaan
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tabel berikut menyajikan pemetaan *cascading* antara visi, misi, tujuan, indikator tujuan RPJMD, sasaran, indikator sasaran RPJMD, indikator tujuan OPD, indikator sasaran OPD, hingga OPD pengampu indikator. Penyusunan tabel ini dimaksudkan untuk memperlihatkan kerangka pikir pencapaian visi RPJMD Sumatera Utara secara utuh, melalui serangkaian indikator kinerja yang tersusun secara bertingkat. Pendekatan *leveling* indikator ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan pencapaian indikator tujuan RPJMD sangat dipengaruhi oleh capaian indikator sasarnya. Demikian pula, pencapaian sasaran RPJMD bergantung pada kinerja indikator tujuan dan sasaran OPD yang telah dirumuskan dalam Renstra masing-masing OPD.

Lebih lanjut, jika diurai hingga ke tingkat operasional, kinerja tujuan dan sasaran OPD sangat ditentukan oleh keberhasilan setiap program yang OPD jalankan. Pemetaan ini juga memperlihatkan bahwa beberapa indikator tujuan dan sasaran OPD yang sama dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian lebih dari satu indikator tujuan maupun sasaran RPJMD. Dengan kata lain, hubungan antarindikator tidak bersifat linear tunggal, melainkan bersifat saling berhimpun dan berjejaring (*interconnected*) untuk secara kolektif memengaruhi pencapaian berbagai tujuan pembangunan daerah. Pola hubungan yang berlapis dan saling terkait ini menegaskan pentingnya koordinasi lintas-OPD dan sinergi antarprogram agar visi pembangunan daerah dapat tercapai secara menyeluruh.

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029, menyatakan bahwa Renstra PD harus memuat “tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan” serta “program, kegiatan, subkegiatan, dan elaborasi indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan” yang disusun secara fungsional mengarah ke mekanisme *cascading* dari visi misi serta penjabaran indikator kinerja perangkat daerah dalam bentuk pohon kinerja. Dengan demikian Perangkat Daerah wajib untuk melakukan penyusunan Renstra yang memuat pohon kinerja sebagai struktur logis yang menghubungkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, program/kegiatan, subkegiatan pada Bab IV dari Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 3. 10. Pencapaian Visi melalui Pencapaian Kinerja Indikator

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Modal Manusia			Seluruh OPD
		1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup			Dinas Kesehatan
				Usia Harapan Hidup		Dinas Kesehatan
					Angka Kematian Ibu	Dinas Kesehatan
					Angka Kematian Bayi	Dinas Kesehatan
					Prevalensi Stunting	Dinas Kesehatan
					Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan
					Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis	Dinas Kesehatan
				Bed Occupancy Rate (BOR)		UPT RS Haji
					Length Of Stay (LOS)	UPT RS Haji
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	UPT RS Haji
				Bed Occupancy Rate (BOR)		UPT RSJ Ildrem
					Average Length Of Stay (ALOS)	UPT RSJ Ildrem
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	UPT RSJ Ildrem
				Indeks Partisipasi Olahraga		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Rata-Rata Lama Sekolah			Dinas Pendidikan

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
		2, Meratanya Pendidikan Berkualitas	Harapan Lama Sekolah			Dinas Pendidikan
				Rata-Rata Lama Sekolah		Dinas Pendidikan
				Harapan Lama Sekolah		Dinas Pendidikan
				Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional		Dinas Pendidikan
				a. Literasi Membaca		
				b. Numerasi		
				Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional		Dinas Pendidikan
				a. Literasi Membaca		
				b. Numerasi		
					Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	Dinas Pendidikan
					Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Dinas Pendidikan

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
					Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Dinas Pendidikan
					Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Dinas Pendidikan
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Kemiskinan			Seluruh OPD
		3. Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial			Dinas Sosial
			Indeks Zakat Nasional			Setdaprovsu (Biro Kesra)
				Indeks Kesejahteraan Sosial		Dinas Sosial
					Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Dinas Sosial

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
					Persentase Korban Bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Dinas Sosial
					Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial	Dinas Sosial
					Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Setdaprovsu (Biro Kesra)
				Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM		Setdaprovsu (Biro Hukum)
					Jumlah Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan	Setdaprovsu (Biro Hukum)
					Jumlah Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perlindungan HAM	Setdaprovsu (Biro Hukum)
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		Dinas Ketenagakerjaan
					Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
					Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Tingkat Kabupaten/ Kota/ Provinsi	Dinas Ketenagakerjaan
Misi 2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	3. Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan		Kontribusi PDRB Provinsi			Seluruh OPD
			PDRB per Kapita			Seluruh OPD
			Indeks Ekonomi Hijau			Seluruh OPD
		4. Meningkatnya Hilirisasi Produk Unggulan Daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan			Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral
			Rasio Volume Usaha koperasi terhadap PDRB			Dinas Koperasi dan UKM
			Indeks Inovasi Daerah			Bappelitbang
				Rasio PDRB Industri Pengolahan		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral
				Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral
				Rasio Volume Usaha koperasi terhadap PDRB		Dinas Koperasi dan UKM
				Kontribusi UMKM terhadap PDRB		Dinas Koperasi dan UKM
					Proporsi Jumlah UKM terhadap UMKM	Dinas Koperasi dan UKM
					Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Dinas Koperasi dan UKM

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
					Rasio Kewirausahaan Daerah	Dinas Koperasi dan UKM
				Indeks Inovasi Daerah		Bappelitbang
				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		Bappelitbang
				Indeks Daya Saing Daerah		Bappelitbang
					Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Bappelitbang
				Aset Perbankan Syariah/PDRB		Setdaprovsu (Biro Perekonomian)
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		Dinas Ketenagakerjaan
					Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah tinggi	Dinas Ketenagakerjaan
					Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Dinas Ketenagakerjaan
		5. Meningkatnya Aktivitas Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan	Porsi EBT dalam Bauran Energi			Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral
			Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum			Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Porsi EBT dalam Bauran Energi		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral
				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum		Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
					Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	4. Ekonomi yang Stabil dan inklusif		Tingkat Pengangguran Terbuka			Seluruh OPD
			Pertumbuhan Ekonomi			Seluruh OPD
			Gini Rasio			Seluruh OPD
	6. Terciptanya Stabilitas Harga		Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi			Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral
			Tingkat Inflasi			Setdaprovsu (Biro Perekonomian)
				Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral
				Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral
				Ekspor Barang dan Jasa		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
				Tingkat Inflasi		Setdaprovsu (Biro Perekonomian)
				Indeks Ketahanan Pangan		Dinas Ketahanan Pangan TPH
		7. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Pembentukan Modal Tetap Bruto			DPMPTSP
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)			Dinas Kelautan dan Perikanan
			NTP Tanaman Pangan			Dinas Ketahanan Pangan TPH
			NTP Tanaman Hortikultura			Dinas Ketahanan Pangan TPH
			Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)			Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)			Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Inklusi Keuangan			Setdaprovsu (Biro Perekonomian)
			Indeks Desa			Dinas Pemdes Dukcapil
				Nilai Tukar Nelayan (NTN)		Dinas Perikanan dan Kelautan
				NTP Tanaman Pangan		Dinas Ketahanan Pangan TPH
					Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Dinas Ketahanan Pangan TPH
				NTP Tanaman Hortikultura		Dinas Ketahanan Pangan TPH
					Persentase Peningkatan	Dinas Ketahanan Pangan TPH

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
					Produksi Tanaman Hortikultura	
				Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)		Dinas Perkebunan dan Peternakan
					Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Rakyat	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)		Dinas Perkebunan dan Peternakan
					Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				Pembentukan Modal Tetap Bruto		DPMPTSP
					Persentase Peningkatan Investasi	DPMPTSP
				Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)		Dinas Perikanan dan Kelautan
				Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB		Dinas Perikanan dan Kelautan
				Inklusi Keuangan		Setdaprovsu (Biro Perekonomian)
					Aset Dana Pensiun/PDRB	Setdaprovsu (Biro Perekonomian)
				Return on Asset (ROA) BUMD		Setdaprovsu (Biro Perekonomian)
				Aset Dana Pensiun/PDRB		Setdaprovsu (Biro Perekonomian)

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
				Nilai Transaksi Saham per Kapita per Provinsi		Setdaprovsu (Biro Perekonomian)
				Indeks Desa		Dinas Pemdes Dukcapil
					Persentase Desa Mandiri	Dinas Pemdes Dukcapil
Misi 3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	5. Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi			Seluruh OPD
		8. Menguatnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas	Indeks Pelayanan Publik			Biro Organisasi
			Indeks Reformasi Hukum			Setdaprovsu (Biro Hukum)
			Indeks integritas Nasional			Inspektorat
			Nilai Capaian Pelaporan Kinerja (SAKIP)			Setdaprovsu (Biro Organisasi)
			Indeks Profesionalitas ASN			Badan Kepegawaian
			Nilai indeks transformasi digital pilar pemerintah			Dinas Komunikasi dan Informatika
				Indeks Reformasi Birokrasi		Sekretariat Daerah
				Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah		Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)
				Nilai Capaian Pelaporan Kinerja (SAKIP)		Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
				Indeks Pelayanan Publik		Setdaprovsu (Biro Organisasi)
					Persentase Kerjasama Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
				Indeks Reformasi Hukum		Setdaprovsu (Biro Hukum)
				Indeks Tata Kelola Pengadaan		Setdaprovsu (Biro Pengadaan Barang dan Jasa)
				Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD		Sekretariat DPRD
				Indeks Integritas Nasional		Inspektorat
					Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Inspektorat
				Indeks Profesionalitas ASN		Badan Kepegawaian
					Indeks Sistem Merit	Badan Kepegawaian
				Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi		BPSDM
					Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	BPSDM

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
					Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
					Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Tingkat ketersediaan arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah		Dinas Komunikasi dan Informatika
					Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK)	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Indeks SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunan		Setdaprovsu (Biro Administrasi Pembangunan)

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
					Persentase Fasilitasi materi pimpinan	Setdaprovsu (Biro Administrasi Pimpinan)
					Persentase kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa	Setdaprovsu (Biro Umum)
		9. Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan			BKAD
				Opini BPK atas Laporan Keuangan		BKAD
					Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	BKAD
					Persentase Belanja pegawai Diluar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD (Tranfer Keuangan Daerah)	BKAD
					Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	BKAD
					Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan wajib Pelayanan Dasar	BKAD
					Persentase Penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	BKAD
					Persentase tanah Milik Pemprovsu yang Disertifikasi	BKAD
					Persentase Keputusan Gubernur Tentang evaluasi APBD / Perubahan	BKAD

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
					APBD / Pertanggungjawabkan Jawaban APBD Kabupaten/Kota	
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Bappelitbang
					Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Bapenda
					Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Bapenda
	6. Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan pembangunan		Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya			Seluruh OPD
		10. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas			Satpol PP
				Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas		Satpol PP
				Indeks Risiko Bencana		BPBD
					Persentase penanganan pra bencana	BPBD
					Persentase penanganan tanggap darurat bencana	BPBD

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
					Persentase penanganan pasca bencana	BPBD
					Persentase penegakan hukum peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Satpol PP
Misi 4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan	7. Peningkatan Akses terhadap Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan guna Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat		Persentase Penurunan Emisi GRK			Seluruh OPD
			a. Kumulatif			
			b. tahunan			
		11. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Ramah Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Persentase Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Indeks Kualitas Air (IKA)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
					Indeks kualitas Udara (IKU)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Dinas PUPR
					Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Dinas PUPR
					Tingkat Kemantapan Jalan	Dinas PUPR
				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Rasio konektivitas		Dinas Perhubungan
					Konektivitas darat	Dinas Perhubungan
					Konektivitas laut	Dinas Perhubungan
		12. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Pravelence of Undermourishment</i>)			Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
			Skor Pola Pangan Harapan			Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
			Intensitas energi primer			Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral
			Luas zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota			Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral
					Intensitas energi primer	
					Konsumsi listrik per kapita	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral
Misi 5. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh	8. Terwujudnya Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga		Indeks Demokrasi Indonesia			Seluruh OPD
		13. Menguatnya Peran Keluarga, Kesenjaraan Gender, Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama dalam Kehidupan Sosial	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)			Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga/IPKK			Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
			Indeks Kerukunan Umat Beragama			Badan Kesbangpol
				Indeks Demokrasi Indonesia		Badan Kesbangpol

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
					Indeks Harmoni Indonesia	Badan Kesbangpol
					Indeks Kerukunan Umat Beragama	Badan Kesbangpol
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
				Indeks pembangunan gender (IPG)		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
				Indeks perlindungan anak (IPA)		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
				Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
				Indeks pembangunan keluarga (iBangga)		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
					Persentase perencanaan penganggaran responsif gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
					Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
					Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
					Indeks pemenuhan hak anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB

Visi: Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan						
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RENSTRA OPD		Perangkat Daerah
				TUJUAN	SASARAN	
					Indeks pembangunan berwawasan kependudukan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
					Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility rate/ TFR</i>)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
				Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
		14. Menguatnya Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai-nilai Budaya Lokal sebagai Identitas Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ekonomi Kreatif
				Indeks Pembangunan Kebudayaan		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ekonomi Kreatif
					Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ekonomi Kreatif
					Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3.3. ARAH PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN

3.3.1. Arah Pengembangan Kewilayahan Berdasarkan Highlight

Intervensi Nasional

Pengembangan kewilayahan di Provinsi Sumatera Utara dirancang melalui pendekatan berbasis intervensi strategis yang mempertimbangkan karakteristik dan potensi unggulan masing-masing wilayah. Lima kategori kawasan menjadi fokus utama dalam arah pembangunan ini, yaitu: (1) Kawasan Pertumbuhan, yang mengedepankan penguatan pusat-pusat ekonomi seperti wilayah metropolitan, kawasan industri, dan destinasi pariwisata strategis; (2) Kawasan Komoditas Unggulan, yang diarahkan pada optimalisasi sektor-sektor utama seperti perkebunan, perikanan, dan kehutanan berbasis sumber daya lokal; (3) Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi, yang berperan mendukung ketahanan nasional melalui pengelolaan sumber daya vital secara berkelanjutan; (4) Kawasan Afirmasi, yang meliputi wilayah tertinggal dan terpencil yang memerlukan percepatan pembangunan layanan dasar dan pemberdayaan sosial ekonomi; serta (5) Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana, yang mendapat perhatian khusus dalam upaya pelestarian lingkungan dan mitigasi risiko bencana. Melalui highlight intervensi yang terfokus pada masing-masing kategori ini, arah pengembangan wilayah ditujukan untuk memperkuat konektivitas, mempercepat transformasi ekonomi, dan mewujudkan pemerataan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Sumatera Utara.

3.3.1.1. Kawasan Pertumbuhan

Pemerintah menitikberatkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi guna mendorong akselerasi transformasi ekonomi nasional dan daerah. Pendekatan ini mencakup penguatan kawasan perkotaan, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, serta destinasi pertumbuhan berbasis pariwisata dan ekonomi biru. Melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut, wilayah-wilayah strategis didorong untuk memainkan peran sentral sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sehingga memperkuat keterkaitan antara pembangunan sektoral dan pemerataan antarwilayah. Highlight intervensi pemerintah untuk kawasan pertumbuhan di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 11. Arah Pengembangan Kawasan Pertumbuhan

Kode	Wilayah	Highlight Intervensi
A1	Wilayah Metropolitan Medan dan Kawasan Pengembangan Industri Medan-Binjai-Deli Serdang Kota Medan Kota Binjai Kab. Deli Serdang Kab. Karo	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di WM Medan
		Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran
		Penataan Kota Lama Kesawan
		Pembangunan SPAM Regional Medan– Binjai– Deli Serdang
		Medan <i>Urban Traffic Improvement Project</i>
		Pengendalian banjir Sungai Badera dan Selayang
		Preservasi Jalan Akses Simpul Transportasi di Jalan SISINGAMANGARAJA (MEDAN)
		Pekerjaan Peningkatan Jalur KA Lintas Medan - Belawan Tahap II (Labuhan - Belawan)
		Pembangunan SPAM di Kab. Karo
		Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional di Kota Medan
		Pembangunan Jalur KA Lintas Medan Binjai Tahap II
A2	Kawasan Pengembangan Industri Kualatanjung-Sei Mangkei Kab. Batubara Kab. Simalungun Kota Tebing Tinggi Kota Pematangsiantar	Pembangunan/revitalisasi sentra IKM
		Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan (Simpang KA) - Provinsi Sumatera Utara
		Pendampingan penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia, Pakan
		Restrukturisasi mesin dan peralatan industri pakan dan oleokimia
		Fasilitasi prototyping produk betacarotene dan tocopherol alami berbasis minyak sawit
		Fasilitasi pendampingan teknis pemenuhan standar industri hijau dan transformasi industri hijau untuk sektor prioritas hilirisasi
		Surat tanda daftar budidaya (STDB) tanaman kelapa sawit dan aneka palma
A3	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Danau Toba dan Kawasan Perkotaan Toba (Balige) (Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba) Kab. Toba Kab. Samosir Kab. Humbang Hasundutan	Peningkatan 6A Pariwisata dan <i>Urban Renewal</i> di Parapat-Ajibata, Balige, Baktiraja, Pangururan, Silalahi-Paropo, Merek, dan Ambarita-Tomok
		Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
		Pembangunan TPST Kec. Girsang Simpangan Bolon
		Pembangunan Jalan Tol Inderapura – Kuala Tanjung dan Sinaksak Parapat
		Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Industri Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi Sumatera Utara
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat - Provinsi Sumatera Utara

Kode	Wilayah	Highlight Intervensi
	Kab. Tapanuli Utara Kab. Dairi Kab. Karo Kab. Simalungun	Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi Sumatera Utara
		Pelaksanaan Kegiatan (<i>Events</i>) Internasional - Kota Medan
		Preservasi jalan Siborong Borong - Tarutung
		Preservasi Jalan Dairi Dolok Sanggul
		Perluasan SPAM
		Indonesia <i>Game Academy</i>
		<i>Masterclass for Game Developers</i>
		<i>Women for Indonesian Game</i>
		Inkubasi startup gim
		Fasilitasi Akses Pendanaan dan Pembiayaan Industri Gim
		Fasilitasi dan Promosi Industri Gim Nasional
A4	Kawasa Perkotaan Sibolga-Pandan- Padangsidimpua n Kota Sibolga Kab. Tapanuli Tengah Kota Padangsidimpua n	Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
		Pelabuhan perikanan PPN Sibolga
A5	Kawasan Perkotaan Rantauprapat Kab. Labuhanbatu	Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
		Penyiapan Jalan Tol Rantauprapat- Kisaran
A6	Kawasan Perkotaan Kabanjahe Kab. Karo	Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
		Preservasi jalan ruas Kabanjahe– Berastagi– Medan, Kabanjahe– Sidikalang–Subulussalam, Kabanjahe–Kutacane
		Preservasi jalan ruas Lawe Pakam (BTS. Prov. Aceh)-Kuta Buluh-BTS. Kota Sidikalang-BTS. Kota Kabanjahe
A7	Kota Gunungsitoli	Pembangunan SPAM
		Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
		RS Berkualitas di Kab/Kota (Pemenuhan PHTC bidang Kesehatan)
		Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif

3.3.1.2. Kawasan Komoditi Unggulan

Di samping pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menetapkan kawasan komoditas unggulan sebagai fokus strategis dalam pembangunan kewilayahan. Kawasan ini mencakup wilayah-wilayah yang

memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta berfungsi sebagai sentra pemerataan ekonomi yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong produktivitas sektor-sektor unggulan di daerah, memperkuat ketahanan ekonomi domestik, serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal di pasar nasional dan global.

Tabel 3. 12. Arah Pengembangan Kawasan Komoditi Unggulan

Kode	Wilayah	Highlight Intervensi
B1	Kawasan Komoditas Unggulan Sawit, Karet, dan Kelapa Asahan-Labuhanbatu-Padanglawas	Kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan
	Kab. Asahan Kab. Labuhanbatu Kab. Labuhanbatu Utara Kab. Labuhanbatu Selatan Kab. Padanglawas Kab. Padanglawas Utara	Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri
B2	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Asahan-Tanjungbalai Kota Tanjungbalai Kab. Asahan	Pelabuhan perikanan PPI Tanjungbalai
		Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap
B3	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Nias Utara Kab. Nias Utara	Pelabuhan perikanan modern yang terintegrasi dengan industrialisasi/hilirisasi perikanan di Lahewa

3.3.1.3. Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi

Kawasan swasembada merupakan wilayah yang diarahkan untuk mendukung ketahanan nasional melalui optimalisasi kapasitas produksi

energi dan pangan strategis. Fokus pengembangannya mencakup daerah-daerah yang memiliki potensi besar dalam penyediaan sumber daya vital, seperti pembangkit listrik, kilang energi, serta lahan produktif untuk pertanian dan perikanan. Pendekatan ini bertujuan memastikan ketersediaan dan distribusi energi serta pangan yang merata dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi lokal sebagai bagian dari sistem ketahanan nasional jangka panjang.

Tabel 3. 13. Arah Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi

Kode	Wilayah	Highlight Intervensi
C1	Kawasan Swasembada Pangan Sumatera Timur Kab. Langkat Kab. Deli Serdang Kab. Serdang Bedagai Kab. Simalungun Kab. Asahan Kab. Labuhanbatu	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. I. Bandar Sidoras, D.I Perkotaan, dan D.I Sei Ular
		Pembangunan jarinan Irigasi pada D.I. Wampu, D.I. Silau Bunut
		Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah dan Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet pada Kecamatan Perbatasan Prioritas, yaitu di Kab. Langkat (Pematang Jaya, Pangkalan Susu, Berandan Barat, Gebang, Tanjung Pura), Kab. Serdang Bedagai (Tanjung Beringin, Bandar Khalipah), Kab. Batu Bara (Sei Suka) dan Kab. Asahan: (Silau Laut, Sei Kepayang Timur)
		Menyiapkan calon lokasi dan calon petani penerima
		Membangun infrastruktur pertanian
		Melaksanakan pelatihan petani dan penguatan kelembagaan petani
		Menyediakan input dan alat mesin produksi pertanian
		Melaksanakan pengawalan produksi dan pengendalian OPT/DPI
		Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
C2	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bukit Barisan Utara Kab. Toba Kab. Samosir Kab.Humbang Hasundutan Kab. Tapanuli	Kawasan hortikultura guna mendukung KSPP Sumatera Utara
		Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah
		Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Danau Toba dan Sub-DAS Asahan
		Revitalisasi Danau Toba

Kode	Wilayah	Highlight Intervensi
	Utara Kab. Dairi Kab. Karo Kab. Pakpak Bharat Kab. Tapanuli Tengah	Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Sarulla-PLTA Batangtoru
C3	Kawasan Swasembada Pangan dan Air Batang Angkola-Batang Gadis Kab. Tapanuli Selatan Kab. Mandailing Natal	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan pada D. I. Batang Angkola
		Pembangunan TPST Kab. Mandailing Natal
		Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Batang Gadis dan Danau Siai

3.3.1.4. Kawasan Afirmasi

Kawasan afirmatif merupakan wilayah-wilayah yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus dalam kerangka pembangunan nasional, terutama mencakup daerah tertinggal, terluar, dan terdalam (3T) serta kawasan perdesaan. Wilayah-wilayah ini umumnya menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses layanan dasar, serta peluang ekonomi yang minim. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan di kawasan afirmatif difokuskan pada percepatan pemerataan, pengurangan kesenjangan, serta pemberdayaan masyarakat lokal agar dapat mengejar ketertinggalan dan berkontribusi dalam pertumbuhan nasional secara inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 3. 14. Arah Pengembangan Kawasan Afirmasi

Kode	Wilayah	Highlight Intervensi
D1 A7	Kawasan Afirmasi Kepulauan Nias (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan) (D1) dan Kawasan Perkotaan	Pembangunan SPAM
		Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
		Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat
		RS Berkualitas di Kab/Kota (Pemenuhan PHTC bidang Kesehatan)
		Peningkatan 6A Pariwisata di Telukdalam, Kep. Hinako, Lahewa- Tureloto, Kep. Batu

Kode	Wilayah	Highlight Intervensi
	Gunungsitoli (A7) Kab. Nias Kab. Nias Utara* Kab. Nias Barat Kab. Nias Selatan Kota Gunungsitoli Keterangan:) Daerah Tertinggal	Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif

3.3.1.5. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

Kawasan konservasi dan rawan bencana merupakan wilayah yang mendapat perhatian khusus dalam upaya pelestarian lingkungan hidup sekaligus pengurangan risiko bencana. Fokus pembangunan di kawasan ini diarahkan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, serta mengelola sumber daya alam secara lestari. Selain itu, intervensi kebijakan juga mencakup peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap bencana alam melalui penguatan sistem peringatan dini, tata ruang berbasis risiko, serta pembangunan infrastruktur yang tangguh. Pendekatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekologis dan melindungi keselamatan serta kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah rentan.

Tabel 3. 15. Arah Pengembangan Kawasan Konservasi/Rawan Bencana		
Kode	Wilayah	Highlight Intervensi
E1 E2	Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Batang Gadis (E1) dan TN Gunung Leuser (E2) TN Batang Gadis: Kab. Mandailing Natal TN Gunung Leuser: Kab. Langkat	Penguatan pengelolaan hutan lestari Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, kebijakan kewilayahan di Provinsi Sumatera Utara diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi,

dan lingkungan di daerah. Arah kebijakan kewilayahan ini menekankan pentingnya keseimbangan pembangunan antar kawasan, penguatan keterkaitan perkotaan dan perdesaan, serta optimalisasi potensi unggulan wilayah sesuai karakteristik masing-masing daerah. Peta berikut menggambarkan lokasi dan sebaran arah kebijakan kewilayahan RPJMN di Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi acuan bagi integrasi pembangunan pusat dan daerah.

Gambar 3. 1. Lokasi Arah Kebijakan Kewilayahan RPJMN di Provinsi Sumatera Utara



Sumber: Lampiran IV RPJMN Tahun 2025-2029

Sejalan dengan penjabaran intervensi nasional ke dalam lima kawasan intervensi pembangunan di Sumatera Utara, terdapat sejumlah tema dan program nasional strategis yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Program-program tersebut merupakan penekanan agenda prioritas pemerintah pusat yang didukung pelaksanaannya oleh provinsi untuk memastikan kesinambungan antara arah pembangunan

nasional dengan pencapaian sasaran pembangunan Sumatera Utara. Melalui integrasi tema-program tersebut ke dalam RPJMD, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat efektivitas kebijakan, mendorong sinergi lintas-sektor dan lintas-wilayah, serta memastikan manfaat pembangunan benar-benar sampai di seluruh lapisan masyarakat.

Gambar 3. 2. Tema/Program Nasional



Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Gambar tersebut merangkum tema/program nasional yang meliputi: dukungan swasembada pangan; pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem; pengendalian inflasi di daerah; Program Sekolah Rakyat; serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruhnya sejalan dengan arah RPJMD Sumatera Utara yang menempatkan peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial sebagai prioritas mulai dari layanan kesehatan, intervensi gizi spesifik untuk percepatan penurunan stunting, hingga pemerataan pendidikan yang bermutu. Dalam kerangka ini, pengurangan kemiskinan ditempuh secara sistematis melalui perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif, sementara stabilitas harga menjadi penopang daya beli rumah tangga. Dukungan swasembada pangan diposisikan sebagai bagian dari ketahanan wilayah pada sektor vital energi, air dan pangan.

Dari sisi pengembangan kewilayahan, highlight intervensi diarahkan untuk menguatkan konektivitas antarpusat pertumbuhan dan sentra komoditas termasuk kawasan swasembada pangan, air, dan energi, agar distribusi barang lancar, biaya logistik turun, dan inflasi daerah lebih terkendali. Program “3 Juta Rumah” diterjemahkan di RPJMD melalui dorongan permukiman layak berikut prasarana–sarana utilitas umum (PSU),

air minum, sanitasi, pengelolaan sampah, dan air limbah yang memperbaiki kualitas ruang hunian perkotaan maupun perdesaan. Pendekatan ini sekaligus memperkuat peran wilayah metropolitan sebagai lokomotif ekonomi yang terhubung dengan kawasan pertumbuhan baru di kabupaten/kota.

Pada skala desa/kelurahan, agenda “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih” dipadukan dengan penguatan ekosistem UMKM dan koperasi transformasi digital, akses pasar dan pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha serta penguatan peran desa melalui BUMDes, ekonomi pangan lokal, dan desa wisata. Arah ini konsisten dengan misi pembangunan yang “membangun dari desa dan dari bawah,” sekaligus menyokong hilirisasi-industrialisasi berbasis potensi wilayah serta peningkatan produktivitas pertanian/perikanan guna menopang swasembada pangan. Dengan begitu, program nasional dapat beroperasi nyata pada ruang-ruang kewilayahan Sumatera Utara: desa yang berdaya, kota yang terkoneksi, dan koridor produksi yang efisien.

3.3.2. Arah Pengembangan Kewilayahan Berdasarkan Highlight Intervensi Provinsi Sumatera Utara

Sebagai wujud nyata dari visi Sumut Berkah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merancang arah pengembangan kewilayahan melalui rangkaian intervensi prioritas yang menyentuh berbagai aspek pembangunan. Program prioritas dan PHTC digulirkan berdasarkan prioritas kebutuhan yang ada di masing-masing kabupaten/kota untuk menjawab tantangan dan potensi lokal secara kontekstual. Intervensi tersebut mencakup peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penguatan layanan kesehatan, revitalisasi industri dan pertanian, pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, perlindungan sosial, penguatan tata kelola, perluasan infrastruktur dasar dan digital, hingga penguatan daya saing pariwisata dan konservasi lingkungan. Keseluruhan kebijakan ini tidak hanya diarahkan untuk membangun wilayah secara fisik dan ekonomi, tetapi juga menumbuhkan kesetaraan sosial, nilai-nilai kemanusiaan, dan keberlanjutan lingkungan. Pelaksanaan 17 program prioritas provinsi telah selaras dengan 17 program prioritas nasional, yang saling melengkapi sehingga dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terkait ragam aspek pembangunan yang diintervensi. Melalui pelaksanaan program prioritas dan PHTC, Pemerintah Sumatera Utara berupaya memperkuat fondasi transformasi sosial, ekonomi daerah, dan tata kelola guna mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berdaya saing, sekaligus

memperkuat kontribusi Sumatera Utara dalam pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

3.3.2.1. Keselarasan Program Prioritas Nasional dan Provinsi

Sinkronisasi program pembangunan merupakan langkah penting untuk memastikan arah kebijakan nasional, provinsi, dan daerah berjalan selaras serta saling memperkuat. Pemerintah pusat telah menetapkan 17 program prioritas nasional dalam RPJMN, yang kemudian dijabarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke dalam 17 program prioritas provinsi. Kedua level prioritas ini menjadi pedoman utama bagi perangkat daerah dalam merumuskan program dan kegiatan yang relevan, sesuai dengan kewenangan serta karakteristik daerah masing-masing.

Melalui penyelarasan ini, setiap program perangkat daerah tidak hanya diarahkan untuk menjawab isu-isu strategis lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan provinsi dan nasional. Indikator program kemudian disusun sebagai ukuran kinerja yang obyektif, agar capaian yang direncanakan dapat terukur dan dievaluasi secara berkala.

Keselarasan antara 17 Prioritas Nasional dan 17 Prioritas Provinsi Sumatera Utara tergambar jelas dalam arah pembangunan daerah. Fokus swasembada pangan, energi, dan air pada tingkat nasional, misalnya, diterjemahkan secara kontekstual di Sumatera Utara melalui pengembangan ekonomi hijau dan biru (PP 5) serta penguatan ketahanan pangan berbasis nilai budaya dan kearifan lokal (PP 6). Pendekatan ini tidak hanya memperkuat produksi pertanian dan perikanan, tetapi juga memajukan kesejahteraan masyarakat pesisir serta petani lokal. Program OPD seperti penyediaan dan pengembangan sarana pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura, sementara pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya mendorong naiknya volume produksi perikanan daerah.

Tabel berikut menyajikan keterkaitan antara 17 program prioritas nasional, 17 program prioritas provinsi Sumatera Utara, program utama yang dijalankan oleh OPD, serta indikator capaian masing-masing program. Dengan demikian, arah pembangunan di setiap tingkatan dapat terhubung secara sistematis dan konsisten.

Tabel 3. 16. Keselarasan 17 Program Prioritas Nasional dengan 17 Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM UTAMA OPD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru (PP 6)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH
			Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Luasan Kawasan Konservasi
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa
			Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB
			Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT 2. Porsi EBT dalam Bauran Energi
		Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal (PP 7)	Program Penyuluhan Pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan 2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM UTAMA OPD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (PHTC 3)	Persentase Jumlah Cadangan Pangan
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (PHTC 3)	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas
			Program Penyelenggaraan Jalan (PHTC 3)	Tingkat Kemantapan Jalan
			Program Perekonomian dan Pembangunan (PHTC 3)	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan
			Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah (PHTC 3)	1. Efektivitas Kerja Sama Daerah
				2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (termasuk PHTC 3)	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
				2. Peningkatan Produksi Hortikultura
				3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan
2	Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	Penguatan Stabilitas Makro Ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah (PP 5)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM UTAMA OPD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
				2. Peningkatan Produksi Hortikultura
				3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan
			Program Perekonomian dan Pembangunan (PHTC 4)	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan
3	Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan (PP 10)	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
			Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD
				2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM UTAMA OPD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Wilayah
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA
			Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	1. Maturitas Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)
				2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PHTC 4)	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (PHTC 4)	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (PHTC 4)	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (PHTC 4)	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (PHTC 4)	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap, Akurat, dan Terkini
			Program Pengelolaan Ketenagalistrikan (PHTC 4)	Rasio Elektrifikasi

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM UTAMA OPD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Program Kebijakan Admnistrasi Pembangunan (PHTC 4)	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan
4	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan (PP 10)	Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD
				2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA
			Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	1. Maturitas Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)
				2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PHTC 4)	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (PHTC 4)	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM UTAMA OPD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Pemberantasan Kemiskinan	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran (PP 4)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (PHTC 4)	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital
			Program Kebijakan Admnistrasi Pembangunan (PHTC 4)	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan
			Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (PHTC 6)	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan
			Program Rehabilitasi Sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
				2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
				3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
				4. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
				5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
				6. Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas
				7. Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM UTAMA OPD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
			Program Hubungan Industrial	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial
6	Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib (PP 17)	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas
				Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat
			Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya
7	Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu (PP 3)	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (termasuk PHTC 2)	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan
				1. Persentase ibu hamil ANC (antenatal care) 6 kali sesuai standar 2. Persentase Wasting

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM UTAMA OPD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				3. Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi
				4. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
				5. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin imunisasi rutin lengkap
			Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan
			Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi
8	Penguatan Pendidikan, Sains dan Teknologi, serta Digitalisasi	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill Yang Berhubungan Dengan Kebutuhan Industri Dan Potensi Wilayah Di Tingkat Lokal (PP 1)	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik
			Program Pengelolaan Pendidikan (termasuk PHTC 1)	1. Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)
				2. Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)
			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM UTAMA OPD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat (PP 11)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE
9	Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara serta Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib (PP 17)	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas
				Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat
				Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya
			Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan
10	Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi (PP 2)	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas
		Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun (PP 16)	Program kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
11	Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM UTAMA OPD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana (PP 14)		2. Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan danri Abrasi dan an Banjir Rob
			Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH
			Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati
			Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT 2. Porsi EBT dalam Bauran Energi
			Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi
12	Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal (PP 7)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (termasuk PHTC 3)	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
				2. Peningkatan Produksi Hortikultura
				3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan
			Program Penyuluhan Pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan 2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM UTAMA OPD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau dengan Sanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal (PP 12)	Program Pengembangan Perumahan (PHTC 5.c)	1. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni
				2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni
			Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kurnuh 10-15 Ha yang Ditangani
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)
14	Pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM serta pembangunan kota inovatif	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing (PP 13)	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Konektivitas Darat
		Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi (PP 9)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
				Persentase pelaku pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM UTAMA OPD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan
				2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan
			Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor
		Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa (PP 15)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya
				2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa
15	Hilirisasi dan industrialisasi SDA, termasuk maritim, untuk keadilan ekonomi	Penguatan Stabilitas Makro Ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah (PP 5)	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri
			Program Perekonomian dan Pembangunan (PHTC 4)	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B
				1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM UTAMA OPD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2. Peningkatan Produksi Hortikultura
				3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan
		Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru (PP 6)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH
			Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Luasan Kawasan Konservasi
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa
			Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB
			Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT
				2. Porsi EBT dalam Bauran Energi
16	Memastikan kerukunan antarumat beragama dan perawatan rumah ibadah	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun (PP 16)	Program kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
			Program pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM UTAMA OPD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	Pelestarian seni budaya, ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi (PP 9)	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan
				2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan
			Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor
		Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas,	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM UTAMA OPD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)(PP 8)	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan
				2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan
		Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi (PP 2)	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas

3.3.2.2. Rencana Pelaksanaan PHTC serta Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara

Arah pembangunan Sumatera Utara periode 2025–2030 ditopang oleh enam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi fokus utama percepatan pencapaian target pembangunan daerah. PHTC dirancang sebagai program unggulan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat dalam jangka pendek, sekaligus menjadi landasan bagi transformasi pembangunan jangka menengah dan panjang.

Untuk mendukung proses transformasi tersebut, Pemerintah Provinsi juga telah menetapkan 17 program prioritas yang berfungsi sebagai kerangka strategis pembangunan lintas sektor. Dari program prioritas ini kemudian diturunkan ke dalam 53 proyek strategis daerah (PSD) yang menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Proyek strategis ini meliputi infrastruktur, layanan dasar, penguatan daya saing, serta sektor-sektor produktif lainnya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah.

Agar pelaksanaannya terukur dan konsisten, setiap program prioritas dan proyek strategis dilengkapi dengan penjelasan singkat tindak lanjut (deskripsi) dan lokus pelaksanaan untuk periode 2025 hingga 2030. Deskripsi yang dimaksud meliputi penjelasan singkat mengenai apa yang akan dilakukan, dan atau wilayah yang menjadi prioritas, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik.

Peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu sangat penting dalam menjalankan program dan proyek ini, sesuai tugas pokok dan fungsinya. Namun, keberhasilan implementasi juga membutuhkan dukungan aktif dari kabupaten/kota, baik dalam bentuk sinkronisasi program, penyediaan sumber daya, maupun penguatan kolaborasi lintas wilayah. Sinergi inilah yang diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pembangunan, memperkuat daya saing daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara secara menyeluruh.

Tabel berikut menyajikan rencana aksi enam PHTC, serta 17 Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara yang diturunkan menjadi 53 PSD, lengkap dengan deskripsi serta lokus pelaksanaan dalam rentang tahun 2025–2030, informasi OPD pengampu, dan dukungan dari kabupaten/kota.

Tabel 3. 17. Deskripsi / Rencana Lokus Pelaksanaan PHTC RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029

PHTC	DESKRIPSI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
1. Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) Kepulauan Nias (2026), Kepulauan Nias dan Pantai Barat (2027), Kepulauan Nias, Pantai Barat dan Dataran Tinggi (2028), Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur (2029) 33 Kabupaten/Kota	Program ini dirancang untuk memastikan seluruh siswa SMA, SMK, dan SLB Negeri memperoleh akses pendidikan tanpa biaya, mencakup 33 Kabupaten/Kota. Kegiatan diawali dengan penyusunan kajian akademik yang mendalami kebutuhan, tantangan, dan strategi implementasi program. Pembentukan Tim Pokja menjadi langkah awal untuk koordinasi lintas instansi dan validasi data siswa, dengan fokus pada empat zona geografis: Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur. Setelah data valid, program dilaksanakan secara bertahap dimulai dari zona Kepulauan Nias, kemudian diperluas ke zona Pantai Barat, dilanjutkan ke Dataran Tinggi, dan akhirnya menyentuh zona Pantai Timur. Implementasi mencakup penghapusan biaya pendidikan, dukungan administrasi, dan monitoring berkala untuk memastikan setiap siswa memperoleh manfaat penuh. Program ini bertujuan meningkatkan pemerataan pendidikan, mengurangi hambatan ekonomi, dan mendorong capaian pendidikan yang lebih tinggi di seluruh provinsi.	Dinas Pendidikan	Diskominfo (Publikasi Kegiatan)	- Menyediakan basis data siswa SMP/SLTP kelas IX yang akan melanjutkan SLTA - Melakukan edukasi kepada siswa SLTP agar seluruhnya melanjutkan kepada jenjang SLTA
2. Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program Universal Health Coverage (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 2030).	Program ini dimulai dengan kegiatan launching resmi, disertai penyusunan regulasi berupa Pergub dan/atau SK Gubernur terkait implementasi UHC. Selanjutnya, dilakukan penandatanganan MoU dengan seluruh 33 Kabupaten/Kota untuk memperkuat koordinasi lintas daerah dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.	Dinas Kesehatan	1. Dinas Sosial (Pembinaan kepada Dinsos Kabupaten/Kota untuk melakukan penginputan, pemutakhiran dan verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada Pusdatin Kemensos setiap bulannya), 2. Dinas PMD Dukcapil	- Dukungan penganggaran APBD Kabupaten/Kota untuk UHC/PBPU yaitu pada Tahun 2025 sebesar 80%, tahun 2026 sebesar 77,5%, tahun 2027 sebesar 75%, tahun 2028 sebesar 72,5%, tahun 2029 dan 2030 sebesar 70%. - Melakukan penginputan,

PHTC	DESKRIPSI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	Fokus utama program adalah pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan target capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara mulai Triwulan IV 2025. Implementasi dilakukan secara merata di seluruh 33 Kabupaten/Kota, dengan monitoring berkala untuk mengevaluasi capaian kepesertaan dan efektivitas layanan. Selain itu, program juga menekankan peningkatan kualitas layanan kesehatan sehingga UHC tidak hanya mencakup akses tetapi juga pelayanan prima, yang dikenal sebagai UHC Plus, memastikan setiap warga menerima pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi.		(Penyediaan data kependudukan Provsu) 3. Diskominfo (Publikasi Kegiatan),	pemutakhiran dan verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada Pusdatin Kemensos setiap bulannya - Dinas PMD Dukcapil (Penyediaan data kependudukan Kabupaten/Kota)
3. Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP)	Program ini dimulai dengan pembentukan Tim Khusus Kestabilan Harga di semua level, yang dilengkapi dengan pelatihan teknis terkait pengaturan harga dan sosialisasi Perda mengenai mekanisme Harga Eceran Tertinggi (HET). Tim ini bertugas mengawal kestabilan harga sekaligus mendampingi kelompok tani dalam pengolahan dan pengemasan produk turunan cabai merah. Selanjutnya, dilakukan pilot project diversifikasi produk turunan cabai merah untuk menguji resep, membangun branding awal, serta memetakan jalur distribusi dan pasar. Identifikasi kontrak farming dengan kelompok tani dan pembentukan forum harga bersama mitra pembeli tetap menjadi bagian penting dari strategi untuk menjamin penyerapan hasil panen. Di sisi infrastruktur, dilakukan pembangunan dan pengembangan fasilitas pengeringan serta pengolahan cabai merah, termasuk renovasi dan digitalisasi gudang untuk pencatatan hasil	Dinas TPH	- Disperindag ESDM (Memfasilitasi kemitraan antara petani dan pelaku usaha) - Diskop UMKM (Mendorong koperasi tani dan mengkoordinasikan ke koperasi merah putih) - PUPR (Perbaikan akses jalan ke sentra produksi dan koordinasi dengan PUPR Kabupaten/Kota terkait akses jalan) - BUMD Dirga Surya (Skema pembelian hasil pertanian cabai merah ketika harga turun) - Biro Pematda (fasilitasi kerja sama antar pemerintah daerah) - Diskominfo (Publikasi Kegiatan)	Disperindag Kabupaten/Kota: Melakukan fasilitasi dan pameran produk cabai kering di tingkat lokal. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota: Menyiapkan lahan dan kelompok tani (CPCL) serta pendampingan kelompok tani. Dinas Koperasi Kabupaten/Kota: Mendorong pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama yang mengelola SDD.

PHTC	DESKRIPSI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	panen. Uji coba pencatatan digital diterapkan di wilayah percontohan guna meningkatkan efisiensi pengelolaan hasil pertanian. Skema kemitraan dengan BUMD dan sektor swasta dirancang untuk menjamin penyerapan, pengolahan, dan distribusi produk dari tingkat kelompok tani hingga pasar. MoU dan kontrak pembelian antara kelompok tani dan BUMD memperkuat kepastian pasar, sementara pendampingan terus diberikan untuk meningkatkan kapasitas petani dalam memanfaatkan fasilitas pengolahan dan distribusi. Program ini juga menekankan pentingnya regulasi teknis distribusi dan pelatihan petugas pasar, disertai monitoring dan evaluasi berkala terhadap produktivitas, mutu, dan kualitas cabai yang dihasilkan. Evaluasi dilakukan untuk menyesuaikan skema kemitraan, mekanisme distribusi, serta strategi pengolahan agar tercapai stabilisasi harga dan peningkatan nilai tambah produk cabai merah di Sumatera Utara.			
4. Digitalisasi Pelayanan Publik “Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif” (CERDAS)	Program ini dimulai dengan identifikasi dan pemetaan layanan publik yang akan didigitalisasi, termasuk audit kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta kebijakan pendukung. Berdasarkan hasil pemetaan, disusun roadmap dan desain awal sistem layanan digital yang dapat diimplementasikan secara efektif di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tahap selanjutnya meliputi identifikasi dan penetapan lokasi melalui survei lapangan untuk	Dinas Kominfo	DPMPTSP Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Bapenda Disperindag ESDM BPSDM Biro Adpem BUMD: PDAM, Bank Sumut	1. Penyiapan kebijakan/regulasi di tingkat Provinsi/Pemda Kabupaten/Kota. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota. 4. Penentuan lokasi

PHTC	DESKRIPSI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	mengetahui kebutuhan, potensi gangguan jaringan, serta lokasi strategis untuk pemasangan fasilitas digital. Koordinasi intensif dilakukan dengan berbagai stakeholder, dan dokumen perencanaan teknis serta administratif disiapkan untuk mendukung proses integrasi sistem layanan digital di 33 kabupaten/kota. Pengembangan portal aplikasi dilakukan secara bertahap, mulai dari implementasi aplikasi, integrasi sistem layanan, pelatihan penggunaan bagi aparat pemerintah, hingga sosialisasi kepada masyarakat. Di sisi infrastruktur, dilakukan pengadaan perangkat jaringan dan akses internet, pemasangan titik akses WiFi, serta evaluasi berkelanjutan untuk pengembangan sistem monitoring. Selanjutnya, program memperluas jangkauan layanan dan akses jaringan internet, mencakup delapan kota besar serta 25 kabupaten lainnya, dengan peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur untuk menjamin layanan digital dapat diakses secara merata. Setiap tahapan dilengkapi dengan sosialisasi, pelatihan, serta evaluasi berkelanjutan guna memastikan layanan publik berjalan optimal, aman, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien. Dengan implementasi yang terintegrasi, digitalisasi layanan publik ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah, tetapi juga meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan di seluruh wilayah Sumatera Utara.			5. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 6. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan

PHTC	DESKRIPSI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
5 a. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI)	Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Sumatera Utara dilaksanakan secara bertahap dengan mengacu pada kebutuhan kawasan dan potensi unggulan masing-masing wilayah. Kegiatan dimulai dengan penyusunan desain perencanaan (DED) dan leger jalan, yang menjadi dasar pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan di seluruh kabupaten/kota. Pembangunan ini mencakup kawasan pertumbuhan, kawasan komoditas unggulan, kawasan swasembada pangan, air, dan energi, serta kawasan afirmasi dan kawasan rawan bencana atau konservasi. 1. Pelaksanaan penanganan jalan: - Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Serdang Berdagai, Kab. Dairi, Kota Gunungsitoli, Kab. Nias, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kab. Karo, Kab. Simalungun, Kab. Batubara, Kab. Deli Serdang, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kab. Pakpak Bharat, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Mandailing Natal, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Nias Selatan, Kota Pematangsiantar, Kota Medan, Kab. Langkat, Kota Tanjung Balai, Kab. Langkat, Kota Medan 2. Pelaksanaan penanganan jembatan: - Kab. Deli Serdang, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kab. Nias Barat, Kab. Simalungun, Kab. Samosir, Kab. Asahan, Kab. Mandailing Natal, Kab. Langkat, Kab. Batubara, Kab. Serdang	Dinas PUPR	OPD Dinas LHK terkait penyiapan dokumen lingkungan/ AMDAL, Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas Perhubungan terkait Fasilitas Keselamatan Jalan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi	1. Dukungan penanganan akses jalan dalam koridor pembangunan jalan provinsi yang mendukung kawasan prioritas. 2. Dukungan penyediaan lahan pada rencana pelebaran yang tidak sesuai dengan Ruang Milik Jalan (RUMIJA).

PHTC	DESKRIPSI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	Bedagai, Kota Tanjung Balai, Kab. Pakpak Barat, Kab. Dairi, Kab. Labuhanbatu, Kab. Nias Utara			
b. Penguatan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Air Pertanian untuk Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan	Program ini dilaksanakan secara komprehensif untuk meningkatkan cakupan layanan irigasi, efisiensi operasional, serta kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi. Kegiatan dimulai dengan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi permukaan dan irigasi rawa di sejumlah wilayah strategis. Selain rehabilitasi, kegiatan ini juga mencakup operasi dan pemeliharaan rutin serta pemeliharaan berkala jaringan irigasi permukaan dan irigasi rawa, sehingga infrastruktur irigasi tetap berfungsi optimal sepanjang tahun. Upaya penguatan kelembagaan dilakukan melalui fasilitasi Komisi Irigasi Provinsi Sumatera Utara, termasuk pelatihan dan pendampingan teknis bagi anggota komisi, agar pengelolaan irigasi lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan petani.	Dinas PUPR	OPD Dinas LHK terkait penyiapan dokumen lingkungan/AMDAL, Dinas TPH melakukan pemataan terhadap kawasan swasembada dan dukungan terhadap irigasi tersier dan kuarter, benih, pupuk, alsintan, penyuluh pertanian. Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Dinas Kominfo untuk publikasi Media	- Dukungan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier - Sinergi antara pemerintah daerah, kelompok tani, dan BUMDes untuk pemeliharaan jaringan irigasi - Pembangunan embung, sumur bor, dan pompanisasi untuk sumber air cadangan. - Digitalisasi sistem irigasi (<i>smart irrigation</i>) berbasis sensor dan aplikasi. - Pemberdayaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) untuk pengelolaan irigasi. - Integrasi dengan program ketahanan pangan daerah.

PHTC	DESKRIPSI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	Program ini juga melibatkan survei digital melalui E-Paksi untuk pemetaan dan monitoring kondisi jaringan irigasi secara real-time, mendukung perencanaan rehabilitasi dan pemeliharaan secara berbasis data. 1. Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi: a. Kabupaten Batu Bara • D.I. Cinta Maju/Cinta Damai • D.I. Purwodadi • D.I. Simodong • D.I. Tanjung Muda • D.I. Sei Balai • D.I. Suka Makmur • D.I. Sijambi b. Kabupaten Padang Lawas Utara • D.I. Padang Garugur • D.I. Napa Tanjung Beringin c. Kabupaten Padang Lawas • D.I. Balakka Sitongkon • D.I. Sigorbus d. Kabupaten Mandailing Natal • D.I. Roburan Maga • D.I. Pakatan • D.I. Terusan • D.I. Tapus • D.I. Siulang-Aling e. Kabupaten Tapanuli Tengah • D.I. Pandurungan/Sitandiang • D.I. Mombangboru • D.I. Badiri Lopian f. Kabupaten Simalungun • D.I. Rambung Merah • D.I. Pekan Dolok • D.I. Javacolonisasi / Javaconisasi			

PHTC	DESKRIPSI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	• D.I. Raja Maligas • D.I. Bah Tongguran I • D.I. Raja Hombang/Tongah Mangaraja • D.I. Bah Horas Hulu/Tongah • D.I. Naga Sompah • D.I. Panombean Pane g. Kabupaten Langkat • D.I. Secanggang • D.I.R Gebang h. Kabupaten Karo • D.I. Parit Lompaten i. Kabupaten Serdang Bedagai • D.I. Pekan Kemis • D.I.R Bogak Besar j. Kabupaten Asahan • D.I. Serbangan • D.I. Panca Arga k. Kabupaten Dairi • D.I. Buluh Duri l. Kabupaten Toba • D.I. Hinalang • D.I. Simangatasi II • D.I. Sijambur m. Kabupaten Tapanuli Utara • D.I. Aek Sigeaon • D.I. Hasak I dan II • D.I. Simok Mok • D.I. Aek Sarulla n. Kabupaten Samosir • D.I. Tele Harian Boho o. Kabupaten Humbang Hasundutan • D.I. Parmiahan/Hutapaung p. Kabupaten Nias • D.I. Gido Zebua			

PHTC	DESKRIPSI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	q. Kabupaten Labuhanbatu • D.I.R Cinta Makmur • D.I.R Sei Serdang/Sei Rakyat r. Kabupaten Deli Serdang • D.I. Namorambe • D.I.R Sisir Gunting • D.I.R Percut • D.I. Medan Krio s. Kabupaten Tapanuli Selatan • D.I. Sipirok Komplek t. Kota Pematangsiantar • D.I. Sibatu-Batu • D.I. Rambung Merah (bersama Simalungun)			
c. Peningkatan Kualitas Permukiman Layak, Terjangkau, dan Inklusif melalui Penyediaan Hunian Murah serta dukungan terhadap pelaksanaan program 3 juta rumah	Program ini dilaksanakan secara bertahap. Kegiatan diawali dengan pembentukan tim pelaksana, penyusunan anggaran biaya, serta survei lokasi di seluruh kabupaten/kota sasaran. Selanjutnya, dilakukan penyusunan nota kesepahaman atau nota kerja sama dengan mitra terkait, seperti Real Estate Indonesia (REI), Bank Sumut, dan pihak terkait lainnya, serta penyediaan data dan informasi statistika MBR dan ASN di masing-masing pemerintah daerah. Pembangunan fisik rumah dilaksanakan setiap tahun, disertai upaya perluasan pemasaran dan kepemilikan rumah bagi MBR dan ASN. Selain itu, program ini juga menekankan evaluasi dampak program dan penataan lingkungan untuk memastikan kualitas hunian dan keberlanjutan program. Wilayah Intervensi: Kabupaten Simalungun, Batu Bara, Labuhanbatu Utara, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal,	Dinas PKP	Dinas PUPR terkait dukungan terkait Tata Ruang, Jalan, dan Keciptakayaan (sanitasi dan air minum), BPBD koordinasi terhadap Rehab rumah akibat bencana Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi Biro Pemotda (memfasilitasi kerja sama antar Pemerintah Daerah) Badan Kepegawaian dan BP Tapera untuk penyediaan data ASN yang belum memiliki rumah Dinas Kominfo untuk publikasi Media	Bupati/Wali Kota: 1. Pendataan dan Validasi Calon Penerima (BNBA = <i>by name by address</i>) 2. SK Kumuh yang dikeluarkan Bupati atau Wali Kota terkait wewenang Provinsi untuk luasan 10 – 15 Ha 3. SK Pokja Penanganan Kawasan Kumuh pada kabupaten/Kota 4. Melakukan sosialisasi kepada MBR dan ASN Dinas yang Membidangi Perumahan Rakyat (di Kabupaten/Kota): Pelaksana teknis utama di lapangan. Bertanggung jawab atas pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan,

PHTC	DESKRIPSI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	Nias Utara, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Toba, Langkat, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Serdang Bedagai, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Dairi, Nias, Karo, Asahan, serta Nias Barat, Kota Pematangsiantar, Padangsidimpuan, Tanjungbalai, Medan, Binjai, Tebing Tinggi, dan Gunungsitoli.			pendampingan, monitoring, dan pelaporan langsung dari lokasi perbaikan. Dinas PUPR Kabupaten/Kota: Memberikan bantuan teknis konstruksi, menyusun RAB, dan memberikan supervisi teknis kepada pelaksana di lapangan. Dinas Sosial Kabupaten/Kota: Membantu dalam pembaruan dan verifikasi data kemiskinan di tingkat lokal. Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan: Ujung tombak identifikasi awal calon penerima, sosialisasi langsung kepada masyarakat, memfasilitasi gotong royong, dan membantu monitoring di lapangan. Badan Kepegawaian dan BP Tapera: Penyediaan data ASN yang belum memiliki rumah
6. Bantuan Hukum dan perlindungan rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE).	Program ini mencakup pembentukan kelembagaan Prestice, edukasi dan sosialisasi, pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin (selain kasus KDRT dan narkoba), pendampingan kasus tindak pidana ringan, serta pelatihan mediator tingkat kabupaten/kota. Program dilaksanakan di 33 Kabupaten Kota.	Biro Hukum	Dinas PMD Capil (memberikan data/pemetaan desa prioritas kegiatan PRESTICE yaitu desa dengan karakteristik konflik yang tinggi) Diskominfo (Publikasi),	1. Replikasi Kegiatan <i>PRESTICE</i> pada tingkat Kabupaten/Kota 2. Edukasi dan Sosialisasi <i>PRESTICE</i> di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan ke level Kecamatan dan Desa. 3. Pendampingan dari bagian hukum kabupaten/kota dari

PHTC	DESKRIPSI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
				kasus tidak pidana ringan yang ditangani oleh <i>PRESTICE</i>

Tabel 3. 18. Deskripsi / Rencana Lokus Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
PP1. PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH UNGGULAN BERBASIS PENINGKATAN SKILL YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI DAN POTENSI WILAYAH DI TINGKAT LOKAL				
1. Pemenuhan 100% Fasilitas Listrik dan Layanan Internet pada Seluruh SMA/SMK/SLB di Sumatera Utara	Listrik: 35 sekolah (8 SMA dan 27 SMK) a. Listrik Gratis 8 SMA: SMA Negeri 1 Pulau Simuk Kabupaten Nias Selatan (Plts), SMA Negeri 2 Alasa Kabupaten Nias Utara (Plts), SMA Negeri 2 Hilimigia Kabupaten Nias Selatan (Plts), SMA Negeri 2 Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal (Plts), SMA Negeri 1 Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 1 Hibala Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 2 Hibala Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 9 Kota Padangsidimpuan 27 SMK: SMK Negeri 1 Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan, SMK Negeri 2 Gunungsitoli Kota	Dinas Pendidikan	Disperindag ESDM (pendampingan terhadap akses listrik), Dinas Kominfo (pendampingan terhadap akses internet dan publikasi kegiatan).	Pembangunan akses jalan yang baik ke sekolah yang akan dibangun akses listrik dan layanan internet.

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	Gunungsitoli, SMK Negeri 1 Bawolato Kabupaten Nias, SMK Negeri 1 Botomuzoi Kabupaten Nias, SMK Negeri 1 Gido Kabupaten Nias, SMK Negeri 1 Hiliduhoh Kabupaten Nias, SMK Negeri 1 Idanogawo Kabupaten Nias, SMK Negeri 1 Ulugawo Kabupaten Nias, SMK Negeri 2 Botomuzoi Kabupaten Nias, SMK Negeri 2 Idanogawo Kabupaten Nias, SMK Negeri 2 Somolomolo Kabupaten Nias, SMK Negeri 3 Hiliserangkai Kabupaten Nias, SMK Negeri 1 Alasa Kabupaten Nias Utara, SMK Negeri 1 Lahewa Kabupaten Nias Utara, SMK Negeri 1 Lotu Kabupaten Nias Utara, SMK Negeri 1 Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, SMK Negeri 1 Sawo Kabupaten Nias Utara, SMK Negeri 1 Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara, SMK Negeri 1 Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara, SMK Negeri 2 Afulu Kabupaten Nias Utara, SMK Negeri 2 Lotu Kabupaten Nias Utara, SMK Negeri 2 Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, SMK Negeri 2			

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPSI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara, SMK Negeri 1 Susua Kabupaten Nias Selatan, SMK Negeri 1 Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan, SMK Negeri 1 Umbunasi Kabupaten Nias Selatan, SMK Negeri 2 Susua Kabupaten Nias Selatan			

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	Instalasi dan aktivasi pada titik lokasi bekerja sama dengan provider (Tahun 2025) Internet: 66 Sekolah (29 SMA, 34 SMK dan 3 SLB) b. Internet Gratis 29 SMA: SMA Negeri 1 Gunung Sitember Kabupaten Dairi, SMA Negeri 2 Besitang Kabupaten Langkat, SMA Negeri 1 Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 1 Hibala Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 2 Hibala Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 1 Pulau Simuk Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 2 Hilimegai Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 1 Susua Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 2 Susua Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 3 Susua Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 4 Susua Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 1 Ulu Susua Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 1 Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 2 Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan,			

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	SMA Negeri 1 Umbunasi Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 1 Idanotae Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 1 Ulu Idanotae Kabupaten Nias Barat, SMA Negeri 1 Mazo Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 2 Mazo Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 2 Hilisalawae Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 1 Boronadu Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 1 Hilimegai Kabupaten Nias Selatan, SMA Negeri 1 Dolok Silau Kabupaten Simalungun, SMA Negeri 2 Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, SMA Negeri 1 Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, SMA Negeri 3 Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, SMA Negeri 1 Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, SMA Negeri 2 Alasa Kabupaten Nias Utara, SMA Negeri 2 Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara SMK: SMKN 1 BORONADU Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 1 SUSUA Kabupaten			

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	NIAS SELATAN, SMKN 2 SUSUA Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 1 UMBUNASI Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 2 ARAMO Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 1 IDANO TAE Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 1 AMANDARAYA Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 1 O'O'U Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 1 LOLOWAU Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 1 HILIMEGAI Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 1 LOLOMATUA Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 1 PULAU PULAU BATU Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 2 PULAU PULAU BATU Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 1 HURUNA Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 2 HURUNA Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 1 GOMO Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 1 MAZO Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 1 HILISALAWAHE Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 1 MOROO Kabupaten NIAS BARAT, SMKN 1 ULU MOROO Kabupaten NIAS BARAT, SMKN 2 ULU			

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	MOROO Kabupaten NIAS BARAT, SMKN 1 MANDREHE Kabupaten NIAS BARAT, SMKN 2 MANDREHE Kabupaten NIAS BARAT, SMKN 2 MANDREHE UTARA Kabupaten NIAS BARAT, SMKN 1 MANDREHE BARAT Kabupaten NIAS BARAT, SMKN 1 LAHOMI Kabupaten NIAS BARAT, SMKN 1 SIROMBU Kabupaten NIAS BARAT, SMKN 2 TUGALA OYO Kabupaten NIAS UTARA, SMKN 2 SOMOLO-MOLO Kabupaten NIAS, SMKN 1 MA'U Kabupaten NIAS, SMKN 2 HILISERANGKAI Kabupaten NIAS, SMKN 1 HILIDUHO Kabupaten NIAS, SMKN 1 ULUGAWO Kabupaten NIAS, SMKN 1 SIPOHOLON Kabupaten TAPANULI UTARA SLB: SLB Negeri Gunungsitoli, SLB Negeri Nias Barat, SLB Negeri Salak Kabupaten Pakpak Bharat Pembiayaan tagihan listrik dan Perangkat Internet			

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
2. Pembangunan 4 SMA/SMK/SLB Unggulan (Nias/SMA - 2026, Asahan/SMK - 2027, Samosir/SMK – 2028, Karo/SLB - 2029)	• Kajian Akademis dan Perencanaan Pembangunan Sekolah Unggulan SMA Negeri Sukma Nias Kota Gunungsitoli • Pembangunan fisik sekolah Unggulan SMA Negeri Sukma Nias, Kajian Akademis dan Perencanaan Pembangunan Sekolah Unggulan SMK Negeri 1 Tinggi Raja Asahan Kabupaten Asahan • Pembangunan fisik sekolah Unggulan SMK Negeri 1 Tinggi Raja Asahan Kabupaten Asahan, Kajian Akademis dan Perencanaan Pembangunan sekolah unggulan SMK Negeri 1 Pariwisata Samosir Kabupaten Samosir • Pembangunan fisik sekolah unggulan SMK Negeri 1 Pariwisata Samosir Kabupaten Samosir, Kajian Akademis dan Perencanaan Pembangunan sekolah unggulan SLB Alpha Omega Kabupaten Karo	Dinas Pendidikan	PUPR (Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	- Penyediaan lahan/hibah lahan yang diperlukan - Pembangunan akses jalan yang baik dari dan ke sekolah - Menyediakan basis data siswa SMP/SLTP kelas IX yang berprestasi dan direkomendasikan masuk ke dalam sekolah unggulan

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	Pembangunan fisik sekolah unggulan SLB Alpha Omega Kabupaten Karo			
3. Rehabilitasi Ruang Sekolah SMA/SMK/SLB sebanyak 490 Sekolah	Pelaksanaan Fisik di 32 Kabupaten/Kota: Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Dairi, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Simalungun, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kota Gunungsitoli,	Dinas Pendidikan	PUPR (Appraisal/ Penilaian Kerusakan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	Pembangunan infrastruktur akses jalan yang baik dari dan menuju sekolah yang akan dilakukan kegiatan rehabilitasi ruangan kelas rusak

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat.			
4. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru	Dalam rangka memenuhi kebutuhan mendesak ruang kelas baru di Provinsi Sumatera Utara, program pembangunan ruang kelas baru direncanakan secara bertahap mulai Tahap I hingga Tahap II. Tahap I difokuskan pada pembangunan di 15 kabupaten/kota, yaitu Deli Serdang, Langkat, Dairi, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Simalungun, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Asahan. Selanjutnya, Tahap II direncanakan dengan sasaran 19 kabupaten/kota, mencakup Langkat, Binjai, Medan, Dairi, Serdang Bedagai, Batu Bara, Asahan, Simalungun, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli	Dinas Pendidikan	PUPR (Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	Penyediaan atau hibah Lahan dari kabupaten/kota untuk lokasi Pembangunan Ruang Kelas Baru sesuai kebutuhan. Pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan akses jalan yang baik dari dan menuju sekolah.

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padangsidempuan, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara. Selain itu, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dilakukan untuk 4 unit sekolah baru, diikuti dengan pembangunan di 14 kabupaten/kota, yaitu Medan, Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Tapanuli Utara, Padangsidempuan, Tapanuli Tengah, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Nias, Nias Selatan, dan Gunungsitoli. Pembangunan lanjutan dilakukan di 13 kabupaten/kota lainnya, yakni Binjai, Langkat, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Asahan, Tanjungbalai, Samosir, Toba, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, dan Sibolga. Program ini juga mencakup pembangunan 2 unit sekolah baru sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan mutu			

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	pendidikan di seluruh wilayah intervensi.			
05. Optimalisasi Sarana dan Prasarana BLK Provsu menuju BLK Tematik Bioindustri dan Pariwisata	Pengembangan UPTD BLK Simalungun difokuskan pada peningkatan kapasitas tenaga kerja tematik, khususnya di sektor bioindustri dan pariwisata. Kegiatan dimulai dengan penyusunan regulasi teknis dan pembentukan Tim Pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara, dilanjutkan dengan penyusunan dokumen perencanaan teknis (DED) serta penandatanganan MoU kerja sama pemagangan dan rekrutmen tenaga kerja dengan mitra industri strategis seperti KEK Sei Mangke, KIM, Inalum, dan Kuala Tanjung, yang menargetkan penempatan ribuan tenaga kerja di sektor industri. UPTD BLK Simalungun dioptimalkan melalui revitalisasi sarana dan prasarana, pengadaan peralatan modern, serta peningkatan kompetensi SDM instruktur dan pengelola. Kurikulum	DISNAKER	Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral: Disperindag ESDM bersifat mendukung dan lintas sektor, bukan pelaksana utama pelatihan. Maka Disperindag ESDM mendukung proyek strategis BLK, sebagai berikut: - Menjadi penghubung antara pelaku industri/perusahaan dengan Disnaker dan BLK. - Memfasilitasi program magang industri dan penempatan lulus BKL ke industri lokal. - Disperindag ESDM dapat menjadi mitra dalam pengembangan program pelatihan vokasi di BLK melalui fasilitasi pelatihan berbasis proyek industri, penyediaan instruktur ahli dari sektor industri dan akses terhadap bantuan alat pelatihan. Dinas Pendidikan: Dinas Pendidikan memiliki peran dalam proyek strategis ini dalam hal pelatihan kerja, sebagai berikut:	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - Dukungan sarana dan prasaran pendukung sesuai kewenangan kabupaten - Memfasilitasi kerja sama antara BLK dan perusahaan lokal untuk program magang, pelatihan kerja, atau penyerapan tenaga kerja berbasis potensi daerah

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	pelatihan disesuaikan dengan standar SKKNI dan KKNi sesuai tematik bioindustri dan pariwisata, diikuti pelatihan serta sertifikasi profesi bagi peserta. BLK juga memperluas jaringan kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) serta sektor ekonomi kreatif melalui KADIN untuk memastikan lulusan terserap di industri sesuai MoU. Selain itu, sarana dan prasarana pelatihan terus dimodernisasi dengan dukungan pembiayaan, termasuk CSR, sementara SDM pelatih ditingkatkan kualitasnya sesuai kebutuhan industri. Monitoring dan evaluasi penyerapan lulusan dilakukan secara berkala, didukung digitalisasi basis data penyerapan sebelum dan sesudah pelatihan, sehingga BLK Kabupaten Simalungun dapat menjadi pusat pelatihan yang efektif dan berorientasi pada penempatan kerja nyata bagi masyarakat.		• Mendorong sinkronisasi kurikulum SMK/vokasi dengan skema pelatihan BLK agar lulusan SMK lebih siap kerja. • Memastikan kompetensi lulusan SMK sejalan dengan kebutuhan industri dan program pelatihan BLK. • Mengintegrasikan teaching factory di SMK dengan fasilitas pelatihan BLK untuk menciptakan ekosistem pelatihan <i>dual system</i>. • Mendorong peserta didik SMK mengikuti sertifikasi kompetensi melalui LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang terhubung dengan BLK. • Bersama Disnaker, mendata dan menyiapkan guru produktif/tenaga pelatih yang memenuhi standar pelatihan. Dinas Koperasi dan UMKM: • Mengintegrasikan hasil pelatihan BLK dengan program inkubasi usaha UMKM • Membina lulusan BLK agar mampu mengembangkan usaha mandiri berbasis keahlian yang telah diperoleh • Menyediakan pendampingan usaha lanjutan bagi peserta	

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPSI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
			pelatihan BLK yang ingin berwirausaha • Menyediakan ruang inkubasi bisnis di sentra-sentra UMKM daerah yang terhubung dengan BLK • <i>Membantu</i> lulusan BLK yang berwirausaha dalam promosi dan digitalisasi produk melalui <i>E-commerce</i> dan platform digital UMKM. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: • Menyediakan ruang promosi bagi hasil karya lulusan BLK di sektor kriya, kuliner, dan <i>fashion</i> etnik melalui festival budaya, event pariwisata, serta <i>platform</i> pemasaran digital. • Menjalin kolaborasi dengan Disnaker untuk mendukung pengembangan ekosistem pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat dan budaya lokal melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. • Memberikan dukungan fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi bagi peserta pelatihan BLK untuk meningkatkan daya saing dan kesiapan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.	

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
			- Bekerja sama dengan Disnaker dalam menyusun kurikulum pelatihan di BLK yang relevan dengan kebutuhan industri pariwisata dan subsektor ekonomi kreatif. Dinas Sosial: - Menjangkau dan Memberdayakan Kelompok Rentan Sosial. - Integrasi Program Rehabilitasi Sosial dan Pelatihan Kerja. - Bersinergi dengan Disnaker dalam memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan program pelatihan BLK tepat sasaran, terutama bagi warga miskin dan rentan sosial. - Melalui tenaga pekerja sosial, Dinas Sosial dapat melakukan pendampingan bagi peserta pelatihan selama dan setelah masa pelatihan, untuk memastikan mereka mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh, baik untuk bekerja maupun memulai usaha secara mandiri. Badan Kepegawaiaan Daerah: - BKD berperan dalam mendukung ketersediaan ASN dengan kompetensi teknis	

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPSI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
			dan manajerial yang relevan, untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BLK, baik sebagai instruktur, tenaga administrasi, maupun pengelola program pelatihan. - Melakukan pemetaan dan perencanaan kebutuhan SDM aparatur di bidang pelatihan vokasional agar sejalan dengan arah pengembangan BLK, termasuk dalam pengadaan, rotasi, dan pengembangan karier ASN yang ditempatkan di unit-unit pelatihan. - BKD dapat mengintegrasikan program pelatihan teknis fungsional dan manajerial bagi ASN yang bertugas di lingkungan BLK ke dalam rencana pengembangan kompetensi tahunan, guna meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan pelatihan. - Berperan dalam membangun sistem penilaian kinerja yang berbasis output dan dampak, termasuk mengawasi efektivitas kinerja ASN di BLK dalam menyelenggarakan pelatihan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja.	

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
			Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan	
PP2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM BERKARYA DAN BERPRESTASI				
6. Liga Olahraga Pelajar Sumut Piala Gubernur Sumatera Utara Cabang Olahraga Sepak Bola dan Voli tahun 2026 - 2030	Proyek ini dimulai dengan inisiasi dan konsolidasi melalui rapat koordinasi, diikuti dengan pelaksanaan liga di tingkat provinsi yang menjangkau seluruh 33 kabupaten/kota. Setiap tahunnya, liga dilaksanakan secara berkesinambungan, disertai penguatan pembinaan dan kemitraan dengan sekolah, klub olahraga, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan kualitas atlet muda. Program ini tidak hanya menekankan kompetisi, tetapi juga pembangunan kapasitas melalui pembinaan rutin, sehingga mampu mencetak prestasi olahraga yang berkelanjutan. Selain itu, dilakukan penguatan legacy	Dispora	Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan (pembinaan, edukasi dan sosialisasi kepada pelajar untuk dapat menjadi atlet pelajar) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	-Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan liga olahraga pelajar sumut untuk cabang olahraga sepak bola dan voli - Melaksanakan <i>side event</i> pada saat pelaksanaan liga olahraga (pameran UMKM) dan sejenisnya

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	dan keberlanjutan program untuk memastikan dampak jangka panjang, baik dari sisi pengembangan atlet maupun kultur olahraga di tingkat sekolah dan masyarakat.			
7. Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Sumatera Utara pada Cabang Olahraga Atletik Tahun 2026 - 2030	Proyek ini dimulai dengan inisiasi dan konsolidasi melalui pertemuan koordinasi yang dilaksanakan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan ini menargetkan cabang olahraga para atletik, dan diselenggarakan secara berkesinambungan setiap tahun, mencakup pelaksanaan kompetisi, perluasan partisipasi, serta evaluasi pelaksanaan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan peserta. Program ini dirancang untuk membangun ekosistem olahraga inklusif bagi pelajar penyandang disabilitas, sekaligus memperkuat pembinaan, kemitraan dengan sekolah, klub olahraga, dan stakeholder terkait. Setiap tahunnya, evaluasi dan pengembangan dilakukan untuk memastikan	Dispora	Dinas pendidikan / Cabang Dinas Pendidikan (Edukasi dan Sosialisasi bagi Pelajar Difabel untuk dapat mendata dan membina atlet sesuai potensi dan minat siswa) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	NPC Kabupaten/Kota dan Dispora Kabupaten/Kota memperkuat perekrutan dan pembinaan para atlet disabilitas pelajar di Kabupaten/Kota

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	keberlanjutan program, peningkatan partisipasi, dan pencapaian prestasi yang lebih optimal bagi para atlet pelajar.			
PP 3 KESEHATAN YANG TERINTEGRASI DI BEBERAPA TITIK KAWASAN YANG MENJADI SENTRA LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT TERPADU				
8. Digitalisasi sistem kesehatan terintegrasi (<i>Sumut e-Health Integration system</i>)	Proyek ini dimulai dengan pembangunan aplikasi, diikuti dengan edukasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat. Selanjutnya, aplikasi ini dikembangkan secara berkelanjutan dari tahun 2026 hingga 2029 untuk meningkatkan integrasi layanan kesehatan digital di seluruh Provinsi Sumatera Utara. Edukasi penggunaan aplikasi terus dilakukan setiap tahun guna memastikan masyarakat memahami dan memanfaatkan layanan e-health secara optimal. Program ini dilaksanakan di seluruh 33 kabupaten/kota, sehingga seluruh wilayah di Sumatera Utara dapat merasakan kemudahan akses layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo (Penyediaan Web, Server dan Publikasi Kegiatan)	-Penyediaan data kepesertaan JKN Kabupaten/Kota -Sosialisasi dan edukasi <i>platform</i> kepada faskes tingkat Kabupaten/Kota

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	melalui sistem digital yang terpadu.			
9. Beasiswa Ikatan Dinas bagi Dokter Spesialis dan Dokter Spesialis Residen di Wilayah Kurang Terlayani (2025 – 2030)	Proyek ini dilaksanakan melalui pemberian beasiswa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, yaitu USU dan UGM, untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di rumah sakit rujukan dan RSUD di berbagai kabupaten/kota. Beasiswa ditujukan bagi dokter spesialis dasar dan penunjang, dengan lokus di berbagai RSUD, seperti Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Madina, Padangsidempuan, Tebing Tinggi, Tanjungbalai, Binjai, Pematangsiantar, Sibolga, Simalungun, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Karo, Asahan, dan Kota Medan. Selain beasiswa, program ini juga mencakup distribusi dokter spesialis	Dinas Kesehatan	Badan Kepegawaian (Pelaksanaan assesmen kompetensi dokter spesialis sesuai kebutuhan, Pembinaan Monitoring kepada Badan Kepegawaian Kabupaten/Kota agar Dokter Spesialis yang sudah dididik tidak berpindah tempat kerja) Biro Pemotha (Fasilitasi Penyusunan Dokumen kerja sama dengan USU dan UGM) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	-Menyediakan data dokter umum yang memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh beasiswa dokter spesialis dan Mengidentifikasi jenis dan jumlah spesialis yang dibutuhkan di RSUD atau faskes daerah - Menyiapkan surat komitmen bersama dengan para Bupati/Wali Kota yang menyatakan bahwa peserta dokter spesialis akan kembali ke daerah asal dan RSUD setempat - Menentukan jenis spesialis yang paling dibutuhkan - Kesiapan Sarana dan Prasarana RSUD - Surat Penugasan & Dukungan Legal Formal - penyediaan Akomodasi dokter residen

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	residen di rumah sakit rujukan, termasuk di DTPK Kepulauan Nias, untuk memastikan layanan medis merata di wilayah terpencil dan daerah prioritas. Pelaksanaan program dilakukan bertahap setiap tahun, melalui penguatan SDM dokter spesialis, distribusi residen, dan kerja sama dengan perguruan tinggi serta rumah sakit daerah. Rumah Sakit dan Kabupaten/Kota Terintervensi Program Pemenuhan Dokter Spesialis (Kerja Sama USU & UGM) 1. Kota Medan • RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan 2. Kota Binjai • RSUD Dr. R. M. Djoelham 3. Kota Pematangsiantar • RSUD Dr. Djasamen Saragih 4. Kota Tebing Tinggi • RSUD Dr. H. Kumpulan Pane 5. Kota Tanjungbalai			

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	• RSUD Dr. Tengku Mansyur 6. Kota Padangsidimpuan • RSUD Padangsidimpuan 7. Kota Sibolga • RSUD Dr. FL Tobing 8. Kabupaten Deli Serdang • RSUD Bangun Purba • RSUD Drs. H. Amri Tambunan • RSUD Pancur Batu 9. Kabupaten Langkat • RSUD Tanjung Pura 10. Kabupaten Asahan • RSUD H. Abdul M. Simatupang 11. Kabupaten Serdang Bedagai • RSUD Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah 12. Kabupaten Batu Bara • RSUD Kabupaten Batu Bara 13. Kabupaten Simalungun • RSUD Tuan Rondahaim • RSUD Parapat • RSUD Perdagangan 14. Kabupaten Samosir • RSUD Dr. Hadrianus Sinaga 15. Kabupaten Toba • RSUD Porsea			

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	16. Kabupaten Humbang Hasundutan • RSUD Dolok Sanggul 17. Kabupaten Tapanuli Utara • RSUD Tarutung 18. Kabupaten Tapanuli Tengah • RSUD Pandan 19. Kabupaten Tapanuli Selatan • RSUD Pintu Padang • RSUD Tapanuli Selatan • RSUD Pintupadang 20. Kabupaten Mandailing Natal • RSUD Dr. Husni Thamrin • RSUD Penyabungan 21. Kabupaten Padang Lawas • RSUD Sibuhuan 22. Kabupaten Padang Lawas Utara • RSUD Gunung Tua 23. Kabupaten Labuhanbatu • RSUD Kabupaten Labuhanbatu 24. Kabupaten Labuhanbatu Utara • RSUD Aek Kanopan 25. Kabupaten Labuhanbatu Selatan • RSUD Kota Pinang			

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	26. Kabupaten Pakpak Bharat • RSUD Salak 27. Kabupaten Karo • RSUD Kabanjahe 28. Kabupaten Dairi • RSUD Sidikalang 29. Kabupaten Nias • RSUD Kabupaten Nias 30. Kabupaten Nias Selatan • RSUD Kabupaten Nias Selatan 31. Kabupaten Nias Utara • RSUD Tafaeri 32. Kabupaten Nias Barat • RSUD Pratama Kabupaten Nias Barat • RSUD Pratama Lologolu Soguna Bazato Kabupaten Nias Barat 33. Kota Gunungsitoli • RSUD Gunungsitoli			
10. Dukungan Pengembangan Rumah Sakit Unggulan (Pengembangan Rumah Sakit Unggulan dan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan dilaksanakan melalui penyusunan kajian dan dokumen perencanaan untuk penguatan fasilitas kesehatan di beberapa rumah sakit daerah, termasuk RSUD Lau Simomo di Kabupaten Karo, RSUD Mata, dan RSUD	Dinas Kesehatan	PUPR (Manajamen Konstruksi, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	- Penyediaan Lahan dan Dokumen Legalitas - Menyediakan tenaga non-medis, mendukung rekrutmen tenaga kesehatan, dan pemeliharaan fasilitas -Koordinasi Lintas Pemerintahan

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	Paru. Kegiatan ini mencakup peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, pengembangan fasilitas penunjang medis, serta penyempurnaan infrastruktur yang mendukung pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat. Dengan adanya perencanaan dan pelaksanaan yang terstruktur, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di masing-masing RSUD dan memperkuat kapasitas rumah sakit dalam memberikan pelayanan medis yang profesional dan merata. - RSUD Lau Simomo – Kabupaten Karo - RSUD Paru - RSUD Mata			
PP4 PEMBERANTASAN KEMISKINAN MELALUI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RENTAN SECARA MENYELURUH DAN TEPAT SASARAN				

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
11. Bantuan Sosial Produktif melalui Program Masyarakat Produktif (MAPRO).	Proyek ini dilaksanakan melalui koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan, pendataan dan penetapan penerima manfaat, serta pembuatan bank data sasaran masyarakat miskin. Program ini menyasar beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan inti mencakup penyaluran bantuan modal usaha, pelatihan, keterampilan, pengembangan usaha, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi lapangan. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, program ini bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat miskin, memperkuat kelompok usaha bersama (KUBE), serta mendorong kemandirian dan produktivitas masyarakat di berbagai wilayah intervensi. Wilayah intervensi: Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Mandailing Natal, Humbang	Dinas Sosial	Disperindag dan Dinas Koperasi UMKM (Dukungan Pelatihan dan Pendampingan bagi sasaran kegiatan Mapro yaitu KUBe dan UEP, fasilitasi keikutsertaan Kelompok Usaha Bersama/Usaha Ekonomi Produktif Mapro dalam pameran/expo yang dilaksanakan oleh Dinas) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	Dukungan peninjauan calon penerima bantuan agar tepat sasaran. Dukungan koordinasi penyiapan kegiatan pelatihan bagi calon penerima bantuan di Kabupaten/Kota. Replikasi kegiatan serupa di Kabupaten/Kota masing-masing.

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	Hasundutan, Toba, Padang Lawas Utara, Dairi, Labuhanbatu Selatan, Batu Bara, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Nias, Tapanuli Tengah, Labuhanbatu Utara, Simalungun, Padang Lawas, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Karo, Labuhanbatu, Padangsidiimpian.			
12. Pelaksanaan Program Pasar Murah Bergerak (PMB)	Program Pasar Murah Bergerak (PMB) dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang mencakup identifikasi kebutuhan dan lokasi sasaran, penentuan komoditas dan harga jual, penyusunan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP), koordinasi dan kemitraan dengan TPID, BULOG, CSR, distributor, pengusaha daerah, koperasi, BUMDes, serta pemerintah kabupaten/kota. Program ini juga melibatkan penentuan jadwal dan titik lokasi pelaksanaan, konsolidasi kelembagaan, integrasi sistem informasi daerah, serta edukasi masyarakat terkait harga dan distribusi pangan.	DISPERINDAG ESDM	• Dinas TPH: Data pangan strategis dan penyediaan stok • Dinas Perhubungan: Transportasi logistik • Dinas Sosial: Data P3KE <i>by name by address</i> (untuk menentukan titik titik PMB dilakukan) • Dinas Koperasi & UMKM: Pelibatan UMKM dan Koperasi dalam penyediaan stok • Biro Perekonomian: pelibatan TPID untuk menghitung dampak terhadap pengendalian inflasi • Dinas Kominfo: Publikasi Pelaksanaan • Bappelitbang: Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan • Inspektorat: Pengawasan Pelaksanaan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan (Tahun 2025-2030): 1. Pendataan kecamatan dan jumlah penduduk miskin dan rawan miskin; 2. Pendataan jumlah KUMKM penyedia Bahan Kebutuhan Pokok; 3. Pengawasan distribusi dan harga bahan kebutuhan pokok; 4. kerja sama antar kabupaten dalam penyediaan Bahan Kebutuhan Pokok 5. Penyediaan lokasi untuk pelaksanaan; 6. Monitoring dan evaluasi

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	Kegiatan Pasar Murah Bergerak (PMB) selama periode 2025–2030 dilaksanakan di 28 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, meliputi Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematangsiantar, dan Kota Padangsidimpuan, serta Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Asahan, Batu Bara, Simalungun, Toba, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Dairi, Karo, Pakpak Bharat, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Selatan, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara, dan Kota Gunungsitoli. Seluruh daerah tersebut mewakili karakteristik wilayah pesisir, perkotaan, kepulauan, serta dataran tinggi yang menjadi prioritas pengendalian inflasi, penguatan distribusi pangan, dan penanganan kerentanan ekonomi masyarakat.			

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
13. Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja Rentan (Subsidi BPJS Ketenagakerjaan)	Program perlindungan pekerja rentan di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan secara menyeluruh di 33 kabupaten/kota, dengan fokus pada masyarakat miskin ekstrem di desil 1 dan 2. Kegiatan dimulai dengan pendataan dan verifikasi calon peserta, dilanjutkan dengan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang bekerja dengan upah atau penghasilan serta kondisi kerja di bawah standar. Pelaksanaan program ini dilakukan melalui skema penganggaran bersama antara provinsi dan kabupaten/kota, dengan proporsi 20% ditanggung provinsi dan 80% oleh kabupaten/kota. Selama program berjalan, dilakukan perluasan kepesertaan untuk menjangkau lebih banyak pekerja informal, sekaligus penguatan peran dan komitmen pemerintah daerah melalui MoU antara Pemprov Sumatera Utara dengan kabupaten/kota	DISNAKER	• Dinas Sosial • Dinas Sosial berperan dalam memberikan data dukung DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk memastikan penerima termasuk dalam kategori penerima bantuan. • Pendataan dan Validasi Calon Penerima, Mengelola dan memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penetapan penerima bantuan iuran BPJS. • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil • Penyediaan dan Verifikasi Data Identitas • Menyediakan data kependudukan yang valid (NIK, KK, KTP) sebagai prasyarat utama pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan. • Melakukan verifikasi dan sinkronisasi data dengan sistem BPJS, DTKS (Dinas Sosial), dan lembaga lain untuk memastikan data pekerja rentan terverifikasi secara administratif. • Dukungan Pemutakhiran Data DTKS, Bekerja sama	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1. Mendukung pelaksanaan agar bisa mencapai target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) sebesar 60% sesuai RPJMD 2025-2029 2. Memberikan sosialisasi untuk masyarakat, khususnya untuk tenaga kerja rentan dan masyarakat yang berada di garis kemiskinan 3. Pengalokasian DBH sawit dan APBD dengan persentase pembagian 80 persen Kabupaten/Kota dan 20 persen provinsi utk perlindungan pekerja rentan miskin ekstrim desil 1 dan 2

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPSI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	terkait pembiayaan dan regulasi. Program ditutup dengan evaluasi menyeluruh untuk memastikan pencapaian target cakupan peserta hingga 60% UCJ, sehingga perlindungan sosial bagi pekerja rentan di seluruh provinsi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.		dengan Dinas Sosial untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan data identitas dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang digunakan untuk menetapkan penerima bantuan iuran BPJS. • Membantu mempercepat proses registrasi atau koreksi data calon penerima manfaat yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap. • BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan berperan menyelenggarakan perlindungan sosial bagi pekerja melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Perlindungan atas risiko kecelakaan selama bekerja. • Jaminan Kematian (JKm): Santunan kepada ahli waris pekerja yang meninggal. • Jaminan Hari Tua (JHT): Tabungan jangka panjang bagi pekerja saat pensiun. • Jaminan Pensiun (JP): Penghasilan berkala untuk pekerja setelah pensiun. • Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Bantuan uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan bagi	

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
			pekerja yang terkena PHK. • Kominfo: Publikasi Kegiatan	
14. Revitalisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Panti Sosial Provinsi	Proyek ini meliputi berbagai kegiatan yang menyasar PPKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) atau penghuni panti. Kegiatan ini dimulai dengan bimbingan keterampilan dasar bagi penghuni panti, sehingga mereka memiliki kemampuan dasar yang mendukung kemandirian setelah meninggalkan panti. Selanjutnya, diberikan bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi, untuk memastikan transisi mereka ke masyarakat berjalan lancar dan aman. Selain itu, dilakukan penyusunan dokumen appraisal/penilaian kerusakan bekerja sama dengan Dinas PUPR, serta dokumen perencanaan pembangunan panti sosial melalui jasa konsultan perencanaan untuk panti		PUPR (Dokumen appraisal, pendampingan, monitoring dan evaluasi untuk revitalisasi panti sosial) Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, Disnaker (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan Kerja bagi sasaran Penghuni Panti) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	- Kabupaten/Kota mendukung pelaksanaan pelatihan bimbingan mental, dan pendidikan paket A/B/C bagi penerima manfaat yang dirujuk dari panti sosial provinsi khususnya panti anak dan remaja - Kabupaten/Kota bersama Provinsi melakukan pemantauan, evaluasi atas keberlanjutan penerima manfaat.

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	yang diintervensi. Revitalisasi fisik gedung panti juga menjadi fokus utama, dengan beberapa unit panti yang mendapatkan perbaikan. Kegiatan ini berlangsung secara berkesinambungan dengan penekanan pada penguatan kapasitas penghuni panti, penyediaan bantuan sosial, serta perbaikan fisik dan fasilitas panti, sehingga layanan kesejahteraan sosial dapat lebih optimal dan mendukung kemandirian masyarakat rentan di seluruh wilayah Sumatera Utara. • Kabupaten Deli Serdang – PSAR Anak Tanjung Morawa • Kabupaten Asahan – PS Lansia Kisaran • Kota Binjai – PS Gepeng Binjai • Kota Pematangsiantar – PS Lansia TRW Pematangsiantar • Kabupaten Karo – PS Tuna Susila & Tuna Laras Berastagi, PS			

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	Anak Sidikalang–Kabanjahe, PS Lausimomo–Hutasalem • Kota Padangsidimpuan – PS Padangsidimpuan • Kabupaten Tapanuli Utara – PS Siborong-borong • Kota Tebing Tinggi – PS Tebing Tinggi • Kabupaten Dairi – PS Anak Sidikalang–Kabanjahe • Kabupaten Toba – PS Lausimomo–Hutasalem • Kota Gunungsitoli – PS Anak Gunungsitoli • Kota Medan – PS Eks Kusta Belidahan–Sicanang • Kabupaten Tapanuli Tengah – PS Pinangsori			
PP 5 PENGUATAN STABILITAS MAKRO EKONOMI DAN KESINAMBUNGAN FISKAL DAERAH				

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
15. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pertanian dan pariwisata	Proyek ini difokuskan pada dua sektor utama, yaitu KEK Pertanian dan KEK Pariwisata Danau Toba. Proses dimulai dengan identifikasi lokasi dan penentuan lokasi pengusulan KEK, termasuk kawasan potensial seperti Humbang Hasundutan dan daerah strategis lainnya. Tahapan pengusulan meliputi kelengkapan dokumen, antara lain: tata lokasi, rencana tata ruang KEK, rencana sumber pembiayaan, studi kelayakan ekonomi dengan penguasaan lahan minimal 50%, serta persetujuan dari Pemerintah Kabupaten. Selanjutnya, dibentuk kelembagaan badan usaha pengelola KEK untuk memastikan pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan. Prosedur dan persyaratan lain juga disiapkan, termasuk penyediaan lahan sesuai RTRW, persetujuan lingkungan, serta rencana strategis pengembangan KEK. Kegiatan ini juga menekankan peningkatan kapasitas SDM lokal untuk	DISBUDPAREKRAF DAN DINAS KETAPANG TPH	• Bappelitbang: Menyelaraskan rencana pengajuan KEK Pariwisata dan Pertanian dengan RPJMD, RTRW, RPJPD, dan RIPPARNAS/RIPPARDA , Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan • Dinas Lingkungan Hidup: Kajian AMDAL dan pengelolaan lingkungan • Dinas Ketenagakerjaan: Peningkatan Capacity Building Pariwisata dan Pertanian • Dinas Pendidikan: Penguatan Vokasi SMK Pariwisata dan Pertanian • Dinas PUPR: Percepatan Perda RTRW Perubahan, sinkronisasi lokasi KEK pada RTRW • Dinas Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan • Biro Hukum: Penetapan Regulasi Perda/Pergub • DPMPTSP: Fasilitasi perizinan	2025: 'Dukungan Kabupaten/Kota untuk Pengembangan KEK Pariwisata Koordinasi terkait rencana pengajuan DPSP Danau Toba menjadi KEK 2026: '• Persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kawasan Danau Toba dan Penetapan Lokasi • Penertapan Pebup RTRW; Kesesuaian Dokumen RTRW dan RDTR 2027: '• Penyediaan Lahan (Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KEK dalam hal terdapat lahan yang belum dibebaskan) • Peningkatan infrastruktur kewenangan kabupaten (jalan, air, sarana persampahan, sanitasi) • Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 2028: '• Peningkatan SDM Pariwisata dan Pertanian '• Penyediaan Lahan '• Peningkatan Infrastruktur kewenangan Kabupaten/Kota • Kemudahan Perizinan Usaha

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	mendukung operasional dan pengelolaan KEK. Tahapan lanjutan mencakup mekanisme pengusulan resmi KEK melalui Dewan Nasional KEK, evaluasi kelengkapan dokumen, kajian kelayakan lokasi, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan BLK tematik. Pengelolaan KEK diperluas dengan melibatkan BUMN, swasta, dan investor potensial, baik di sektor pertanian maupun pariwisata. Di KEK Pertanian, fokus diberikan pada peningkatan kapasitas pelaku industri pertanian, pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung seperti jalan, serta hilirisasi produk. Sementara itu, di KEK Pariwisata, kegiatan diarahkan pada peningkatan kapasitas UMKM dan industri pariwisata, pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung, serta promosi investasi untuk meningkatkan okupansi			Kewenangan Kabupaten/Kota 2029: '• Peningkatan SDM Pariwisata '• Penyediaan Lahan '• Peningkatan Infrastruktur kewenangan Kabupaten/Kota • Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota • Promosi Investasi 2030: '• Peningkatan SDM Pariwisata dan Pertanian '• Penyediaan Lahan '• Peningkatan Infrastruktur kewenangan Kabupaten/Kota • Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota • Promosi Investasi

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	investor di kawasan KEK Danau Toba. - Kabupaten Humbang Hasundutan – Lokasi utama pengusulan KEK Pertanian, termasuk identifikasi, penentuan lokasi, penyusunan dokumen, hingga pembentukan kelembagaan badan usaha pengelola. - Kabupaten di sekitar Danau Toba (yakni Toba, Samosir, Humbang Hasundutan, Simalungun) – Lokasi pengembangan KEK Pariwisata yang berfokus pada peningkatan status Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba menjadi KEK Pariwisata. - Kabupaten potensial lainnya untuk KEK Pertanian – yang memiliki basis pertanian dan infrastruktur pendukung pengembangan kawasan.			

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
16. Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan di Kawasan Industri Sumatera Utara	Pada tahap identifikasi, pengembangan komoditas kelapa difokuskan di Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Asahan, Batu Bara, dan Labuhanbatu Utara yang memiliki potensi besar dalam pengolahan produk turunan seperti VCO, santan kemasan, gula kelapa, arang aktif, serta produk berbasis serat sabut. Untuk komoditas kopi, pengembangan diarahkan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun melalui inovasi produk hilir seperti kopi instan, kopi kemasan siap minum, serta drip bag coffee. Sementara itu, komoditas aren difokuskan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal, dengan pengembangan produk turunan seperti gula aren, sirup, tuak, serta kerajinan berbasis ijuk dan lidi. Adapun komoditas cabai dikembangkan di Kabupaten Karo, Batu Bara, Serdang Bedagai, dan Deli	DISPERINDAG ESDM	• Dinas TPH: Peningkatan Produksi Cabe melalui Sarprodi; Pemberian Bibit Cabai varietas tahan hama & cocok untuk pengeringan, <i>capacity building</i> bagi petani • Dinas Perkebunan dan Peternakan: Peningkatan Produksi Kelapa, Aren dan Kopi melalui Sarprodi; Pemberian Bibit Kelapa genjah, Kopi Unggu, Aren, <i>capacity building</i> bagi petani • Dinas PUPR: Penguatan Infratraktur Jalan dan Jembatan • Dinas Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan	Dukungan Kabupaten/Kota: • Menyediakan Data IKM sektor Kopi, Kelapa, Aren, Cabe (jenis produk, data produksi, nilai omset produksi)

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIpsi / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	Serdang dengan hilirisasi berupa produk pangan seperti cabai kering, bubuk, saus, serta produk non-pangan seperti ekstrak capsaicin, oleoresin, dan pestisida organik. Tahap berikutnya mencakup peningkatan kapasitas produksi hilir, riset inovasi produk dan teknologi tepat guna, serta kemitraan antara IKM dan industri besar, termasuk upaya penguatan pasar dan branding produk unggulan. Proses ini juga dilengkapi dengan integrasi ekosistem industri dari hulu ke hilir, mencakup penyediaan bahan baku, rantai pasok, hingga bisnis matching dengan industri besar baik dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, kegiatan evaluasi, ekspansi, dan keberlanjutan produk hilirisasi industri agar mampu menembus pasar nasional dan global.			
17. BUMD Reform Program (Penguatan Peran BUMD sebagai Motor Ekonomi)	Program Penguatan dan Reformasi BUMD Provinsi Sumatera Utara difokuskan untuk memperkuat tata kelola, kapasitas usaha,	Biro Perekonomian	Bappelitbang: Penyusunan konsep dan perencanaan kesehatan BUMD, GCG Biro Hukum: Percepatan fasilitasi regulasi	-

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	dan peran BUMD dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. Seluruh kegiatan dilakukan secara terpadu di tingkat provinsi dengan melibatkan dukungan pemerintah kabupaten/kota sesuai sektor usaha masing-masing BUMD. BUMD yang menjadi fokus penguatan meliputi: PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) – beroperasi di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara dan berperan dalam memperluas akses pembiayaan daerah serta mendukung ekonomi lokal. PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) – berperan dalam investasi dan pengelolaan infrastruktur daerah yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, termasuk pengembangan sarana transportasi dan energi. Perumda Tirtanadi – beroperasi terutama di Kota		Biro PemOtda: Fasilitasi Kerja sama Diskominfo: Publikasi Kegiatan Inspektorat: Audit BUMD	

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	Medan dan beberapa daerah sekitarnya, dengan fokus pada pelayanan air bersih dan sanitasi regional. PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) – memiliki basis usaha di kabupaten-kabupaten sentra perkebunan seperti Labuhanbatu, Asahan, Simalungun, dan Langkat, yang menjadi tulang punggung sektor perkebunan provinsi. PD. Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara – mendukung sektor industri dan jasa lintas daerah, terutama untuk pengelolaan aset dan kerja sama bisnis antar-BUMD di wilayah Medan dan sekitarnya. PT. Dhirga Surya Sumatera Utara – bergerak dalam sektor properti, energi, dan transportasi, dengan basis utama di Kota Medan dan jangkauan ke beberapa kabupaten. PT. Jamkrida Sumut (Perseroda) – lembaga penjaminan kredit daerah			

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	yang memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara. Keseluruhan program ini mencakup kegiatan audit menyeluruh dan penilaian kesehatan BUMD, penyusunan roadmap reformasi, penerapan Good Corporate Governance (GCG) berbasis digital, penguatan permodalan dasar dan bisnis baru, serta pengembangan kemitraan antar-BUMD, BUMN, dan swasta. Melalui sinergi tersebut, diharapkan tujuh BUMD utama Sumatera Utara dapat menjadi pilar penggerak ekonomi daerah yang sehat, adaptif, dan berdaya saing tinggi.			
18. Pemanfaatan Aset barang milik daerah melalui kerja sama ekonomi	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dilaksanakan secara bertahap selama periode 2025–2030 di tingkat Provinsi Sumatera Utara, dengan dukungan koordinasi bersama kabupaten/kota. Fokus utama program ini mencakup inventarisasi aset daerah yang belum	BKAD	Bapenda Provsu: Dukungan dalam proses bisnis pendapatan melalui pemafaatan aset BMD dengan kerja sama ekonomi Bappelitbang Provsu: Dukungan dalam penyusunan konsep dan perencanaan Diskominfo: Dukungan dalam penyediaan web aplikasi dan promosi OPD Pengguna BMD: Dukungan dalam inventarisir	Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota pada pelaksanaan pengamanan BMD dalam penerbitan SKT lahan (Surat Keterangan Kepemilikan Lahan) dari Pemerintah Setempat (Kelurahan atau Kepala Desa)

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPSI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	termanfaatkan secara optimal, identifikasi potensi pemanfaatan, serta penyusunan skema bisnis dan regulasi pemanfaatan BMD agar aset-aset produktif dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah. Tahapan pelaksanaan mencakup pengamanan aset daerah berdasarkan hasil inventarisasi, digitalisasi proses pemanfaatan melalui pengembangan web aplikasi BMD, serta peningkatan kapasitas dan jumlah SDM penilai barang untuk mendukung profesionalitas pengelolaan aset. Program ini juga diarahkan pada penguatan kemitraan dalam perluasan pemanfaatan aset daerah, termasuk kerja sama dengan satu platform digital atau pihak swasta untuk memperluas pasar pemanfaatan aset. Selama periode pelaksanaan, dilakukan pula evaluasi dan monitoring berkala terhadap BMD produktif, guna memastikan		dan pengamanan aset serta pemeliharaan BMD	

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	keberlanjutan dan efektivitas pemanfaatannya dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).			
PP.6 PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU				
19. Pengembangan Kawasan Perkebunan (Kelapa, Kopi, Aren)	Proyek ini dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan penyusunan regulasi teknis, pembentukan tim pelaksana, dan kajian awal. Setiap tahapan diawali dengan verifikasi calon pekebun dan lahan (CPCL) serta sosialisasi awal kepada kelompok pekebun di lokasi intervensi. Selanjutnya dilakukan pemberian benih, pupuk organik, dan paket alat pasca panen sesuai komoditas unggulan di masing-masing kabupaten. Untuk komoditas kelapa, kopi, dan aren, setiap kelompok pekebun menerima dukungan berupa benih, pupuk, serta alat pengolahan hasil panen seperti kopra, VCO, bubuk kopi, dan gula semut.	DISBUNAK	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara: Memberikan pelatihan pengemasan izin edar hasil produk, pelatihan pengemasan produk dan sertifikasi halal serta pemberian alat untuk mengolah hasil produksi dalam rangka hilirisasi hasil Perkebunan kelapa seperti alat untuk menjadikan air kelapa menjadi minyak kelapa/VCO, dan <i>coconut milk</i>, kemudian biji kopi menjadi kopi bubuk dan kopi ekstrak, kemudian aren menjadi gula aren dan bioetanol 2. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara: Pembentukan dan pelatihan UMKM bagi kelompok pekebun dan alat pengolah hasil produksi kelapa, kopi dan aren;	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1. Dukungan data CPCL di lokasi intervensi 2. Melakukan Pembinaan dan pelatihan peningkatan produksi atau peningkatan pasca produksi di lokasi intervensi pengembangan kawasan perkebunan

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	Program ini juga mencakup pembinaan dan pengawasan untuk melihat perkembangan kawasan perkebunan serta pelatihan pengolahan hasil produksi. Kegiatan ini dilaksanakan secara berulang setiap tahun, dengan penyesuaian lokasi dan komoditas di berbagai kabupaten. • Komoditas Kelapa: Kabupaten Nias Barat Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Nias Utara Kabupaten Asahan Kabupaten Batu Bara Kabupaten Labuhanbatu Utara • Komoditas Kopi Kabupaten Humbang Hasundutan Kabupaten Karo Kabupaten Simalungun Kabupaten Tapanuli Selatan • Komoditas Aren Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Simalungun		3. Dinas PMD Dukcapil: Untuk pembentukan dan pemberdayaan BUMDes di lokasi intervensi pengembangan kawasan perkebunan 4. Diskominfo: Untuk publikasi media	

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	Kabupaten Karo			
20. Pengembangan Kawasan Unggulan Perikanan Tangkap dan Budidaya	Diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi pesisir dan memperluas basis produksi perikanan di 13 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Kawasan perikanan tangkap dikembangkan di Tapanuli Tengah–Sibolga, Asahan–Tanjungbalai, Nias Utara, Batu Bara, Langkat, Kota Medan, dan Deli Serdang, dengan fokus pada pembangunan sarana dan prasarana produksi seperti sampan, jala, dan dermaga, pengadaan unit pengolahan ikan berupa <i>coolbox</i> dan gudang ikan, serta penguatan sistem logistik dan digitalisasi pemasaran hasil tangkap. Sementara itu, kawasan perikanan budidaya difokuskan di Simalungun, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, dan Batu Bara, dengan komoditas unggulan meliputi ikan dori, ikan mas, udang, dan ikan gurami. Intervensi	DISKANLA	• Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Pengolahan, pemasaran, dan ekspor produk perikanan. • Dinas Koperasi dan UKM – Penguatan kelembagaan usaha nelayan/pembudidaya. • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang – Pembangunan infrastruktur pendukung (jalan dan pelabuhan). • Dinas Kominfo: Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - Pendataan kelompok nelayan dan pembudidaya Kabupaten/Kota - Klasterisasi - Sosialisasi dan Edukasi - Replikasi di daerah yang sama

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	diarahkan pada revitalisasi kolam, penyediaan benih dan pakan, pemasangan <i>automatic feeder</i> , serta peningkatan saluran air dan kincir untuk efisiensi produksi.			
21. Pengawasan Konservasi Laut SEMESTA (Pemberdayaan Nelayan Sebagai Pasukan Penjaga Laut)	Program pengawasan laut di Provinsi Sumatera Utara difokuskan pada penguatan kapasitas pengawas, digitalisasi informasi kawasan rawan pelanggaran, serta peningkatan sistem monitoring dan evaluasi. Program ini mencakup pembentukan Pokja Pengawas Laut dan penyusunan peta digital kawasan rawan pelanggaran serta draf rencana aksi untuk menata pengawasan di seluruh perairan Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara. Pelaksanaan patroli didukung oleh peralatan lengkap dan aplikasi e-Mawas, yang memungkinkan pengawasan lebih efektif dan terintegrasi. Untuk meningkatkan kepastian hukum dan pemahaman regulasi, disediakan modul	DISKANLA	• BAPPELITBANG: Integrasi program SEMESTA dalam perencanaan daerah. • Dinas Lingkungan Hidup Provsu: Kebijakan dan pemantauan kualitas lingkungan laut. • Dinas Perhubungan Provsu: Dukungan transportasi laut dan keselamatan pelayaran patroli. • Satpol PP Provsu: Penegakan perda terkait konservasi laut. • Dinas Pariwisata Provsu: Sinergi dengan wisata bahari berkelanjutan. • Dinas Kominfo Provsu: Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat. • Dinas Koperasi & UKM Provsu: Penguatan kelembagaan nelayan pengawas. • Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provsu: Kesiapsiagaan dan tanggap darurat di laut. • Inspektorat: Pengawasan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - Pendataan Nelayan Kabupaten/Kota - Klasterisasi - Sosialisasi dan Edukasi

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	hukum dan klinik konsultasi bagi petugas dan masyarakat terkait kegiatan di wilayah perairan. Hasil pengawasan dianalisis melalui laporan evaluasi dan strategi pengawas baru, yang menjadi acuan untuk perbaikan sistem dan tata kelola pengawasan laut. Selain itu, program ini juga menghasilkan buku capaian dan film dokumenter, yang mendokumentasikan kegiatan pengawasan serta capaian strategis di Kabupaten/Kota dan perairan Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara. Kabupaten/kota dan perairan Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara.		dan pendampingan jalannya program	
22. Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir berbasis Masyarakat	Proyek ini difokuskan pada rehabilitasi kawasan pesisir, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekowisata berbasis mangrove. Kegiatan dimulai dengan identifikasi calon lokasi penanaman dan pembentukan kelompok tani hutan, yang menjadi ujung tombak pelaksanaan	DLHK	1. Dinas Kominfo - Media massa - Publikasi kegiatan 2. Kementerian Kehutanan - Penyediaan Regulasi - Koordinasi program-program	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui DLHK dengan dukungan <i>Stakeholder</i> terkait diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kementerian Kehutanan, Kelompok Masyarakat Pesisir dan LSM/NGO/pemerhati Lingkungan. adapun dukungan

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	program di masing-masing kabupaten. Di Kabupaten Langkat, program dilaksanakan dengan kolaborasi bersama NGO dan pemerhati lingkungan, serta kegiatan Mangrove Fest untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mangrove. Di Kabupaten Deli Serdang, penanaman mangrove dilakukan dengan fokus tambahan pada pemberdayaan masyarakat melalui ekowisata dan silvofishery, sehingga masyarakat lokal dapat memperoleh manfaat ekonomi dari konservasi pesisir. Program serupa juga diterapkan di Kabupaten Serdang Bedagai, Batu Bara, dan Asahan, dengan kegiatan Mangrove Fest serta pengembangan ekowisata dan silvofishery sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Wilayah intervensi:			kabupaten/kota pada kegiatan ini diantaranya: 1. Kolaborasi <i>Multistakeholder</i> dalam kegiatan 2. Pemberdayaan Masyarakat: Program rehabilitasi yang sukses tidak hanya tentang menanam pohon, tapi juga tentang memberdayakan masyarakat. 3. Membantu dalam proses pengadaan lahan dan memastikan status hukum lahan tersebut jelas 4. Pemerintah kabupaten melakukan pemantauan dan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan pertumbuhan mangrove berjalan baik dan program mencapai tujuannya.

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan			
23. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (PLTS Pompa Air Untuk Irigasi Pertanian/PLTA Mikrohidro dan lainnya)	Proyek ini difokuskan pada kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian utama berada di Kabupaten Samosir, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan air dan energi bagi sektor pertanian. Selain di Samosir, intervensi ini juga mencakup berbagai kawasan pertanian di sejumlah kabupaten/kota Sumatera Utara yang menghadapi kendala irigasi. Kegiatan yang dilakukan meliputi survei dan evaluasi lokasi, perencanaan dan perizinan, penyusunan desain teknis, pengadaan dan pemasangan peralatan, pelatihan bagi petani, hingga monitoring serta evaluasi terhadap efektivitas sistem yang diterapkan. Melalui inisiatif ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong	DISPERINDAG ESDM	TPH : Pembinaan Kelompok Petani dalam penggunaan PLTS . • Bappelitbang: Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan • Inspektorat: Pengawasan Pelaksanaan • Dinas Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan untuk Tahun 2025-2030: 1. Data Kelompok Tani (CPCL) 2. Data penentuan lokasi 3. Pengadaan lahan 4. Data produksi pertanian; kondisi air 5. Data <i>readiness criteria</i>

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung produktivitas pertanian sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi irigasi, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah pedesaan.			
PP 7 KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGUATAN NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL AGAR DIVERSIFIKASI HASIL PERTANIAN MENJADI LEBIH PRODUKTIF DAN BERPAMPAK PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL				
24. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Unggulan Padi, Jagung, Cabai Merah, dan bawang merah	• Kajian pengembangan kawasan unggulan padi, jagung, cabai merah, dan bawang merah • Pembuatan masterplan pengembangan kawasan komoditas unggulan • Penyusunan tim kerja dan inventarisasi data pendukung • Pengembangan kawasan unggulan padi, jagung,	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan TPH	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki peran krusial dalam pembangunan infrastruktur dasar pendukung pertanian. Ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, jalan usaha tani, serta infrastruktur penunjang lainnya yang memperlancar distribusi hasil panen dan aksesibilitas kawasan pertanian. Penataan ruang juga menjadi fokus penting	• Memfasilitasi penyediaan benih unggul, pupuk, dan alat pertanian dasar. • Mendorong sinergi antar pemangku kepentingan lokal (petani, penyuluh, BUMDes). • Memfasilitasi pembangunan/peningkatan akses jalan produksi di kawasan unggulan. • Mendukung pembangunan fasilitas pascapanen: gudang, alat pengering, rumah sortasi. • Mengkoordinasikan

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	cabai merah, dan bawang merah • Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian • Pengembangan bibit olahan dan kemitraan usaha • Digitalisasi pemasaran dan sistem logistik hasil pertanian • Pembukaan akses pasar ekspor dan pasar bermutu • Evaluasi dan monitoring kegiatan Lokasi Kawasan Unggulan per Komoditas: Kawasan Padi: Kabupaten Karo, Toba, Langkat, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, dan Serdang Bedagai Kawasan Jagung: Kabupaten Samosir, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Toba, Humbang Hasundutan, Langkat, Tapanuli Utara, dan Karo Kawasan Cabai Merah:		untuk memastikan kawasan pertanian unggulan tidak terganggu oleh alih fungsi lahan. 2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) turut berperan dalam mendorong hilirisasi produk pertanian melalui pengembangan industri pengolahan hasil tani, seperti pengeringan, pengemasan, dan pengolahan lanjutan produk padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Di sisi perdagangan, dinas ini memastikan akses pasar yang lebih luas dan stabil melalui promosi, fasilitasi perdagangan, dan penguatan sistem rantai pasok. Adanya kegiatan Gerakan pangan Murah membuat Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat berkolaborasi dengan Dinas ketahanan Pangan dan TPH dalam menjalankan kegiatan ini 3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) memegang peranan sebagai koordinator perencanaan strategis lintas sektor.	petani/UMKM untuk mengikuti pelatihan sertifikasi ekspor dan standar internasional. • Memberikan laporan lengkap atas capaian program, kendala, dan peluang lanjutan. Replikasi di daerah yang sama

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	Kabupaten Mandailing Natal, Samosir, Deli Serdang, Langkat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Simalungun, dan Dairi Kawasan Bawang Merah: Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Toba, Serdang Bedagai, Dairi, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, dan Simalungun		Bappelitbang merumuskan arah kebijakan, menyusun rencana aksi, serta memastikan sinergi antar-dinas dalam pengembangan kawasan unggulan. 4) Diskominfo (Publikasi)	
25. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Peternakan unggulan	Terdapat 15 kabupaten yang menjadi lokasi intervensi utama dalam pengembangan kawasan peternakan di Sumatera Utara selama periode 2025–2029, antara lain Kabupaten Serdang Bedagai, Karo, Batu Bara, Nias, Padang Lawas, Mandailing Natal, Deli Serdang, Nias Selatan, Langkat, Humbang Hasundutan, Asahan, Tapanuli Utara, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, dan Simalungun.	DISBUNAK	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara: Memberikan pelatihan pengemasan izin edar hasil produk, pelatihan pengemasan produk dan sertifikasi halal serta pemberian alat untuk mengolah hasil produksi 2. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara: Koordinasi pembentukan dan pelatihan UMKM bagi kelompok peternak 3. Dinas PMD Dukcapil: Untuk pembentukan dan pemberdayaan BUMDes di lokasi intervensi pengembangan kawasan peternakan 4. Diskominfo: Untuk publikasi media	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1. Dukungan data CPCL di lokasi intervensi 2. Melakukan Pembinaan dan pelatihan peningkatan produksi atau peningkatan pasca produksi di lokasi intervensi pengembangan kawasan peternakan 3. Pemberian izin usaha untuk koperasi, UMKM, BUMDes yang mengolah hasil produksi berada di kawasan peternakan 4. Replikasi di daerah yang sama

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
26. Program Pengembangan Bibit Unggul Pertanian	Terdapat sembilan kabupaten yang menjadi lokasi utama intervensi dalam program pengembangan benih unggul padi di Sumatera Utara, yaitu: Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Serdang Bedagai, Asahan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Tapanuli Utara, dan Mandailing Natal. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi Subang, Provinsi Jawa Barat, mencakup tahap persiapan dan penandatanganan perjanjian kerja sama, uji multilokasi di berbagai kabupaten, produksi dan distribusi benih sumber, peningkatan kapasitas penangkar, serta promosi varietas unggul melalui ekspo dan lomba hasil panen. Selain memperluas lahan produksi benih, kegiatan ini juga mendorong integrasi sistem pemasaran gabah dan beras unggul di	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH Provinsi berperan sebagai inisiator utama program. Mereka bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, penyediaan alokasi anggaran, serta koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam implementasinya, mereka juga menetapkan lokasi uji multilokasi dan mendukung pelepasan varietas secara resmi	PT. Dirga Surya : memasarkan produksi bibit unggul padi	Dinas Pertanian Kabupaten mempromosikan dan menggunakan bibit unggul padi varietas baru.

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	seluruh sentra produksi padi di Sumatera Utara.			
27. Fasilitasi Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani	Program Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) dilaksanakan secara menyeluruh di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Kegiatan dimulai dengan tahap persiapan yang mencakup pembentukan Tim Pokja FPPS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, rekrutmen serta pelatihan fasilitator, pemutakhiran data kelompok tani, koordinasi dengan lembaga keuangan, dan sosialisasi program kepada para pemangku kepentingan. Selanjutnya, dilakukan Temu Pembiayaan tahap I dan II, pendampingan realisasi kredit, serta pelatihan manajemen keuangan bagi kelompok tani penerima pembiayaan. Pada tahap berikutnya, program memperluas cakupan penerima pembiayaan dan memperkuat kemitraan dengan BUMN, BUMD, serta sektor swasta, diiringi	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH bertindak sebagai penghubung antara kelompok tani dengan lembaga keuangan formal seperti bank, koperasi, serta lembaga penjaminan kredit. Melalui penyediaan data kelompok tani, pelatihan manajemen usaha tani, serta pembentukan kelembagaan petani yang kuat, dinas membantu petani memenuhi persyaratan administratif dan teknis agar layak mengakses program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan pertanian lainnya.	a) Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran sentral dalam penguatan kelembagaan kelompok tani melalui pembinaan koperasi tani dan UMKM berbasis pertanian. Dinas ini dapat memfasilitasi akses permodalan bagi kelompok tani melalui penguatan koperasi simpan pinjam, pelatihan manajemen usaha tani, hingga menjembatani kerja sama antara koperasi dan lembaga keuangan. b) Disperindag ESDM berkontribusi dalam mendorong hilirisasi produk pertanian dan menjaga stabilitas harga hasil tani. Melalui penguatan rantai nilai dan pasar hasil tani, dinas ini dapat membuka peluang tambahan pendapatan bagi petani yang dapat digunakan sebagai modal atau premi asuransi. c) Dinas Kominfo memainkan peran dalam penyebarluasan informasi terkait program bantuan iuran premi asuransi dan akses permodalan. Melalui berbagai saluran	Memetakan kelompok tani yang layak dan potensial untuk memperoleh akses permodalan, berdasarkan data luas lahan, komoditas yang diusahakan, serta rekam jejak kelembagaan kelompok

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	pelatihan lanjutan bagi FPPS dalam bidang negosiasi bisnis dan pemasaran. Integrasi sistem pemasaran digital dan e-commerce juga dikembangkan melalui penerapan aplikasi informasi pembiayaan pertanian. Selain itu, dilakukan diversifikasi sumber pembiayaan melalui koperasi, CSR, dan investor, serta pengembangan usaha hilir pascapanen dan olahan untuk meningkatkan nilai tambah produk. Program ini ditutup dengan kajian dampak ekonomi, penyusunan model pendampingan berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas FPPS agar dapat berperan sebagai konsultan atau koperasi tani mandiri di seluruh kabupaten/kota Sumatera Utara.		komunikasi digital dan non-digital, Kominfo dapat menjamin transparansi program, meningkatkan literasi digital kelompok tani, dan mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pengajuan permodalan dan asuransi pertanian. e) Dinas Pemdesdukcapil memiliki peran strategis dalam verifikasi dan validasi data kependudukan serta kelembagaan desa sebagai basis penyaluran bantuan. Melalui data kependudukan dan basis kelompok tani di desa, Pemdesdukcapil memastikan agar bantuan permodalan maupun iuran premi asuransi diberikan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil kelompok tani. f) Diskominfo (Publikasi)	

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
PP 8 PARIWISATA YANG MENGGERAKKAN POTENSI ALAM LOKAL DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA LANGSUNG (KOMUNITAS, PEMERINTAH DAERAH/DESA/KELURAHAN DAN PENGUSAHA LOKAL)				
28. Dukungan terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	Program Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan melalui Pokja P3TB Provinsi dan Pokja P3TB di 8 Kabupaten se-Kawasan Danau Toba dilaksanakan secara terpadu untuk mendukung implementasi Rencana Aksi Tahap II RIDPN Danau Toba 2025-2029. Kegiatan diawali dengan evaluasi rencana aksi tahap I, dilanjutkan dengan penyusunan draft rencana aksi tahap II, integrasi hasil evaluasi, serta penyusunan rencana aksi yang diperkuat melalui rapat koordinasi reguler antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan delapan kabupaten di kawasan Danau Toba, yaitu Simalungun, Humbang Hasundutan, Toba, Dairi, Pakpak Bharat, Karo,	DISBUDPAREKRAF	DISKOMINFO: Publikasi Media DISBUDPAREKRAF: Penguatan Atraksi Budaya dan Pariwisata; Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif; Promosi dan Pemasaran Destinasi; Pengembangan Infrastruktur dan Amenitas Pariwisata; Kolaborasi dan Sinkronisasi Program; Penguatan Tata Kelola Destinasi; BPODT (Badan Pelaksana Otorita Danau Toba): Koordinasi Pengelolaan Kawasan Pariwisata Strategis; Pengembangan infrastruktur dan Investasi; Promosi dan Branding Kawasan; Pengembangan SDM dan Ekosistem Wisata BAPPELITBANG (Badan Perencanaan, Penelitian, dan	1. Memastikan keselarasan Program/Kegiatan dalam Rencana Aksi Tahap II telah sesuai dengan Dokumen Perencanaan di daerah (RPJMD Kabupaten & RKPD Kabupaten) dan Integrasi RIPDN kedalam renja OPD 2. Menyusun rencana aksi tahunan 3. Memastikan ketersediaan anggaran dalam mendukung Pengembangan DPSP Danau Toba 4. Penyediaan Lahan yang Clean & Clear (jika terdapat pembangunan fisik) 5. Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; 6. Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; 7. Pendampingan Desa Wisata; 8. Pendataan Potensi Unggulan Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata & Ekonomi Kreatif; 9. Pendataan jumlah Pelaku

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	Samosir, dan Tapanuli Utara. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan strategis mencakup pilar tata kelola dan kelembagaan, pilar infrastruktur, pilar sumber daya manusia, serta pilar investasi. Pilar infrastruktur difokuskan pada peningkatan kualitas jalan dan jembatan, konektivitas transportasi darat dan danau, serta pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di kabupaten Karo, Simalungun, dan Samosir. Pilar SDM menitikberatkan pada pelatihan pelaku pariwisata, penguatan kapasitas Pokdarwis, serta pengelolaan desa wisata, sementara pilar investasi mencakup penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) dan Lake Toba Tourism Destination Investment Book yang diintegrasikan ke dalam platform North Sumatera Invest. Seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan monitoring dan evaluasi program serta perluasan kemitraan ekonomi antar-		Pengembangan Daerah): Integrasi Perencanaan Pengembangan DPP Danau Toba; Sinkronisasi Program Daerah dengan Nasional; Litbang & Evaluasi Program Pengembangan Pariwisata; Dukungan Kebijakan Inovatif & Kolaboratif Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/159/KTPS/2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja P3TB Provinsi Sumatera Utara, seluruh Opd Pemprovsu yg termasuk dalam SK Gubsu tersebut berperan dalam mendukung Pengembangan DPSP Danau Toba sesuai dengan Rencan Aksi yang disusun	Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (<i>Homestay/Hotel</i>), Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Jasa <i>Travel Agent</i>); 10. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata 11. Pelaksanaan <i>Event</i> Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif berskala Nasional

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	pemangku kepentingan di delapan kabupaten kawasan Danau Toba untuk memperkuat keberlanjutan pembangunan kawasan strategis nasional tersebut.			
29. Pengelolaan dan Penataan Kawasan Toba Caldera UGGp dan Kawasan Geopark lainnya	Intervensi program penguatan Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TCUGGp) mencakup tujuh kabupaten di kawasan Danau Toba, yaitu Kabupaten Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, Simalungun, Karo, Dairi, dan Tapanuli Utara, serta perluasan kajian ke Kabupaten Nias. Di Kabupaten Samosir, kegiatan diarahkan pada pembangunan visibilitas di sejumlah geosite seperti Pusuk Buhit, Tele, Hutatinggi-Sidihoni, Ambarita-Tuktuk, dan Batu Hoda, disertai pelatihan serta penyusunan bahan promosi untuk mendukung rekomendasi UNESCO. Kabupaten Toba menjadi lokasi intervensi di geosite Balige-Meat, Situmurun, dan Muara-Sibandang melalui kegiatan peningkatan visibilitas,	DISBUDPAREKRAF	1. DISBUDPAREKRAF: Penyaluran Belanja Operasional BP TCUGGp; Pembangunan <i>Visibilities di Geosite</i>; Pelatihan dan Pembinaan Pelaku Pariwisata dan Pengelola Desa Wisata; Identifikasi dan Penetapan Cultural Heritage di Kawasan Geopark; Melaksanakan <i>Event Geofest</i>. 2. DINAS Koperasi &UMK: Melakukan Pelatihan & Pembinaan UMKM terutama di Kawasan <i>Geosite</i>; 3. Dinas Pendidikan: Melaksanakan kegiatan <i>Geopark to School</i> dan edukasi terkait Geopark kepada pelajar; 4. Dinas PUPR: Peningkatan kualitas jalan/jembatan di ruas jalan Provinsi yang menghubungkan antar geosite; 5. Bappeda: Melaksanakan penelitian terkait <i>Geological Heritage/Natural/Biological Heritage/Cultural Heritage</i> di Kawasan Toba Caldera UGGp maupun di Kawasan Geopark	1. Memastikan ketersediaan dukungan anggaran dalam pengelolaan <i>Geosite</i> di masing-masing Kabupaten; 2. Penyusunan muatan Lokal; 3. Bekerja sama dengan BP dalam melaksanakan sosialisasi & edukasi kepada Masyarakat, Pelaku Wisata, Pelajar dan ASN tentang <i>Geopark</i>; 4. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM terutama dalam pengembangan Geoproduk; 5. Mengidentifikasi dan menginventarisasi serta melakukan penelitian terkait potensi <i>Geological Heritage, Biological/Natural Heritage</i> dan <i>Cultural Heritage</i>; 6. Rutin melaksanakan <i>Event GeoFest</i>; 7. Menyusun kajian awal terkait Kawasan Geopark baru; 8. Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; 9. Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata;

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	promosi, dan persiapan revalidasi. Sementara itu, di Kabupaten Humbang Hasundutan, intervensi mencakup pembangunan fasilitas visibilitas di geosite Hutaginjang dan Sipinsur, serta penyusunan kajian awal pengusulan Geopark Nasional Humbang Hasundutan. Di Kabupaten Simalungun, kegiatan meliputi pembangunan panel informasi dan letter plank di geosite Haranggaol dan Sibaganding. Sedangkan di Kabupaten Karo difokuskan pada penguatan visibilitas di geosite Sipiso-piso. Adapun di Kabupaten Dairi, kegiatan dilakukan di kawasan geosite Silalahi-Sabungan, yang juga mendukung upaya promosi dan edukasi geopark. Kabupaten Tapanuli Utara menjadi bagian penting dalam pengembangan geosite Bakara-Tipang dan		yang baru; 6. BPBD: Mitigasi Bencana & Sosialisasi; 7. Dinas LHK: Pelestarian Hutan dan ekosisten di Kawasan Danau Toba 8. Dinas Kominfo: Publikasi kegiatan;	10. Pendampingan Desa Wisata; 11. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (<i>Homestay/Hotel</i>), Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Jasa <i>Travel Agent</i>); 12. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	Muara-Sibandang, termasuk dalam pelatihan dan revalidasi UNESCO. Selain itu, intervensi turut diperluas ke Kabupaten Nias melalui konsolidasi dan kajian awal pengusulan Geopark Nasional baru. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan ini mendukung tata kelola kelembagaan TCUGGp, penguatan promosi dan visibilitas geosite, pengusulan geosite baru, serta persiapan revalidasi dan pemenuhan rekomendasi UNESCO demi menjaga status Toba Caldera sebagai bagian dari jaringan Geopark Dunia.			
30. Pembentukan & Pengembangan Kawasan Strategis Budaya, Parawisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi yang Terintegrasi (TATABUSE, SIBANDAN, SIPUAN, KARDAPAK dan BAHLIKE)	Intervensi pembangunan kawasan strategis pariwisata di Sumatera Utara dilakukan melalui tahapan inventarisasi dan identifikasi sumber daya manusia (SDM), termasuk BUMDes, Pokdarwis, pengelola desa wisata, serta pelaku UMKM. Kegiatan ini juga mencakup penyusunan regulasi penetapan kawasan strategis dan penyusunan masterplan sebagai dasar	DISBUDPAREKRAF	1. Dinas Koperasi & UMKM: Pelatihan dan Pembinaan kepada UMKM di Kawasan. 2. Dinas PUPR: Pembangunan Kawasan (jika ada pembangunan fisik); Peningkatan Akses Ruas Jalan Provinsi menuju Kawasan. 3. Dinas PMD : Pelatihan dan Pembinaan pengelola BUMDES Wisata	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, sementara kabupaten/kota berperan dalam: 1. Memastikan ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan Proyek Strategis; 2. Penyediaan Lahan yang <i>Clean & Clear</i> (jika terdapat pembangunan fisik);

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	perencanaan terpadu di lima kawasan, yaitu Sibolga–Pandan, Sipirok–Padangsidempuan, Bawomatoluo–Hilisimaetano–Sorake, Tanjung Pura–Tangkahan–Bukit Lawang–Sei Bingai, serta Karo–Dairi–Pakpak. Selanjutnya, pelaksanaan intervensi difokuskan pada penataan kawasan, pembinaan, pelatihan, dan pendampingan bagi BUMDes, Pokdarwis, pengelola desa wisata, serta pelaku UMKM di empat Kawasan Strategis prioritas, yakni SIBANDAN, SIPUAN, BAHLIKE, TATABUSE, dan KARDAPAK. Kegiatan di kawasan-kawasan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan lokal, meningkatkan kualitas layanan wisata, serta memperluas aksesibilitas menuju destinasi unggulan. Melalui langkah ini, diharapkan pengembangan kawasan strategis dapat berlangsung secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat		4. Dinas Kominfo : Penyediaan Fasilitas Digital di Kawasan; Publikasi Kegiatan	3. Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; 4. Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; 5. Pendampingan Desa Wisata; 6. Pendataan Potensi Unggulan Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata & Ekonomi Kreatif; 7. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (<i>Homestay/Hotel</i>), Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Jasa <i>Travel Agent</i>); 8. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata; 9. Pendataan dan inventarisasi pelaku UMKM; 10. Pendampingan kepada pelaku UMKM; 11. Pelaksanaan <i>Event</i> Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berskala Nasional

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	lokal, dan memperkuat daya saing pariwisata daerah.			
31. Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Situs Cagar Budaya Sumatera Utara	Upaya pelestarian warisan budaya di Sumatera Utara dilakukan secara menyeluruh melalui pemetaan dan verifikasi kondisi situs cagar budaya, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, di beberapa wilayah prioritas, yaitu Kabupaten Nias Selatan, Kawasan Danau Toba, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Tahap awal ini menjadi dasar penting untuk memastikan kondisi aktual setiap situs serta kebutuhan intervensi pelestariannya. Selanjutnya, dilakukan penyusunan dokumen perencanaan pelestarian berupa masterplan, DED, dan roadmap, diikuti dengan pelaksanaan konservasi dan pemugaran bangunan bersejarah, serta pelatihan konservasi dasar dan manajemen situs budaya bagi pengelola dan masyarakat sekitar. Program ini juga mencakup	DISBUDPAREKRAF	1. Dinas Koperasi & UMKM: Pelatihan dan Pembinaan kepada UMKM di Kawasan. 2. Dinas PUPR: Peningkatan Akses Ruas Jalan Provinsi menuju Kawasan. 3. Dinas PMD: Pelatihan dan Pembinaan pengelola BUMDes Wisata 4. Dinas Kominfo: Penyediaan Fasilitas Digital di Kawasan; Publikasi Kegiatan 5. Dinas Pendidikan: Edukasi kepada pelajar tentang Situs Cagar Budaya	1. Memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Provinsi; 2. Penyediaan Lahan yang <i>Clean & Clear</i> (jika terdapat pembangunan fisik); 3. Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Tingkat Kabupaten/Kota; 4. Pembentukan Pengelola Kawasan Situs Cagar Budaya; 5. Melaksanakan Program edukasi kepada masyarakat dan pelajar tentang Kawasan Situs Cagar Budaya; 6. Pendataan, Inventarisasi, Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota 7. Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; 8. Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; 9. Pendampingan Desa Wisata; 10. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (<i>Homestay</i>/Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	edukasi di sekolah dan masyarakat guna menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pelestarian cagar budaya. Di beberapa kabupaten seperti Padang Lawas Utara, Nias Selatan (terdapat satu cagar budaya berstatus UNESCO), Langkat, Samosir, dan Pakpak Bharat, pelaksanaan konservasi dilengkapi dengan promosi budaya melalui event lokal dan media digital, yang bertujuan meningkatkan apresiasi publik sekaligus memperkuat potensi pariwisata berbasis budaya. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan warisan budaya sekaligus mendorong pengembangan ekonomi kreatif di sekitar kawasan cagar budaya tersebut.			Jasa <i>Travel Agent</i>); 11. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata; 12. Pendataan dan Pendampingan UMKM; 13. Pelaksaaan <i>Event</i> Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif berskala Nasional
32. Pelaksanaan Event Internasional, pengembangan paket wisata dan digitalisasi promosi pariwisata global	Penyelenggaraan event berskala internasional menjadi salah satu strategi utama untuk memperkuat posisi Sumatera Utara sebagai destinasi pariwisata unggulan dunia. Kegiatan ini diawali dengan	DISBUDPAREKRAF	1. Dinas Perhubungan: Memastikan ketersediaan transportasi dan lalu lintas saat event internasional dilaksanakan 2. Dinas Kesehatan: Dukungan Tenaga Kesehatan dan Ambulans	1. Pelaksanaan <i>Side Event</i> saat pelaksanaan <i>Event</i> Internasional; 2. Pelaksanaan Promosi melalui media digital dan cetak; 3. Sosialisasi & Edukasi kepada Pelaku Usaha

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	pelaksanaan event Trail of The King di Danau Toba, Aquabike, dan F1H2O, yang menjadi ajang promosi global bagi Kawasan Danau Toba sekaligus menguji kesiapan daerah dalam menggelar event internasional. Setiap penyelenggaraan event diikuti dengan evaluasi menyeluruh guna memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kualitas pelaksanaan di tahun berikutnya. Selain itu, dilakukan uji coba dan promosi paket wisata, pengembangan website dan media sosial destinasi, serta kampanye digital internasional melalui video, influencer, dan konten kreatif. Upaya ini diperkuat dengan penyusunan Calender of Event yang memuat seluruh agenda wisata tahunan di berbagai kawasan pariwisata provinsi, seperti Sibolga–Pandan, Sipirok–Padangsidempuan, Bawomatoluo–Hilisimaetano–Sorake, Tanjung Pura–Tangkahan–Bukit Lawang–Sei Bingai, serta Karo–Dairi–Pakpak.		3. Dinas Koperasi &UMKM: Pelatihan dan pendampingan UMKM untuk mendukung pelaksanaan event internasional 4. Dinas Kominfo: Memastikan ketersediaan jaringan digital saat pra event-event-pasca event internasional; publikasi kegiatan 5. Satpol PP: Keamanan Pelaksanaan Event dan ketertiban penyelenggaraan acara 6. Dinas Pemuda dan Olahraga; Pembinaan Pemuda untuk partisipasi dalam penyelenggaraan event (sport, e-sport, dsb)	Pariwisata (Penyedia Jasa Akomodasi (Hotel & Homestay),Penyedia Jasa makan-minum, Penyedia Jasa Transportasi, dan Travel Agent); 4. Pendataan & pendampingan terhadap UMKM; 5. Memastikan kelancaran aksesibilitas terutama saat pelaksanaan Event internasional (Pengaturan lalu lintas; Peningkatan kualitas jalan)

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	Program ini juga mencakup penyelenggaraan event tematik baru di bidang kuliner, budaya, dan wisata minat khusus (geowisata, religi, agro, dan wellness tourism), serta diversifikasi produk wisata untuk menarik segmen wisatawan yang lebih luas. Pemerintah provinsi bersama pelaku industri pariwisata menjalin kerja sama sponsorship, kolaborasi dengan ASITA dalam penyusunan paket wisata, serta kemitraan promosi dengan influencer dan platform digital internasional seperti Traveloka, Booking.com, dan Tiket.com. Dalam tahap lanjut, dilakukan penguatan jejaring promosi pariwisata melalui kemitraan dengan diaspora dan pelaku industri global, serta integrasi penuh dengan platform pariwisata nasional dan internasional untuk memperluas jangkauan promosi dan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara.			

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
PP 9 EKONOMI KREATIF DAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI				
33. Sentra industri kreatif di Kawasan Sport Center Sumatera Utara	Kegiatan pengembangan ekonomi kreatif di Sumatera Utara difokuskan pada Kawasan Sport Center, Deli Serdang, yang menjadi lokasi utama inventarisasi dan pemetaan sub sektor ekonomi kreatif, industri kreatif potensial, serta UMKM. Hasil inventarisasi ini menjadi dasar penyusunan masterplan skema pengembangan, termasuk pembentukan BLUD dan program pembinaan, pelatihan, serta pendampingan bagi pelaku ekonomi kreatif. Selanjutnya, dilakukan pembangunan Sentra Industri Kreatif yang mencakup penataan dan penyediaan fasilitas industri kreatif untuk mendukung kegiatan produksi, inovasi, dan kolaborasi antar pelaku kreatif. Sentra ini juga menjadi wadah untuk promosi kegiatan kreatif melalui penyelenggaraan event-event berskala lokal dan nasional, seperti kejuaraan e-sport, festival musik, dan berbagai	DISBUDPAREKRAF	1. Dinas PUPR: Pembangunan Sentra Industri Kreatif 2. Biro Perekonomian : Menyusun Kajian pembentukan BLUD; Pembentukan BLUD pengelola Sentra Industri Kreatif. 3. Dinas PerindagESDM: Pendataan, Pelatihan & Pembinaan IKM Kreatif. 4. Dinas Koperasi UMK: Pendataan, Pelatihan & Pembinaan UMKM 5. Dinas Kominfo: Penyediaan Fasilitas Digital (Internet, dll) di Kawasan Sentra Industri Kreatif; Publikasi Kegiatan	1. Pendataan Pelaku Industri Kreatif & Data UMKM Potensial; 2. Kurasi Pelaku Ekonomi Kreatif; 3. Fasiitasi HAKI bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; 4. Pelaksanaan Event Ekonomi Kreatif secara rutin di Sentra Industri Kreatif; 5. Promosi terkait Sentra Industri Kreatif melalui media digital dan cetak;

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	kegiatan kreatif lainnya, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus meningkatkan daya tarik Kawasan Sport Center sebagai pusat ekonomi kreatif di Deli Serdang.			
34. Sumut digital market dan galeri virtual produk UMKM kreatif	Pengembangan platform e-commerce UMKM di Sumatera Utara difokuskan pada PLUT sebagai pusat pengelolaan. Kegiatan dimulai dengan evaluasi platform e-commerce yang sudah ada, seperti SIMITRA, untuk memahami keunggulan dan kekurangannya. Selanjutnya dilakukan desain dan pengembangan platform baru, termasuk kurasi awal 100 produk UMKM serta membangun kemitraan dengan platform logistik dan payment gateway. Pelaksanaan berikutnya mencakup manajemen operasional platform, promosi, dan sosialisasi agar UMKM dapat memanfaatkan platform secara optimal. Proses ini juga melibatkan onboarding UMKM, pelatihan branding,	DISKOP UMKM	KOMINFO: Publikasi Media DISKOP UKM: Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan Platform; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan DISKOP UKM: Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan Platform; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan UKM, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - Pendataan UMKM binaan Kabupaten/Kota - Kurasi Produk UMKM - Klasterisasi UMKM yang dapat dimasukkan ke dalam Galeri - <i>Capacity Building</i>

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	dan manajemen toko online untuk meningkatkan profesionalisme penjual. Selanjutnya, platform e-commerce dikembangkan menjadi marketplace yang terintegrasi dengan katalog elektronik, dilengkapi galeri virtual 3D, serta kampanye digital nasional dan regional. Tahap lanjutan menitikberatkan pada kurasi produk ekspor dan promosi virtual pada event internasional, termasuk virtual expo dan marketplace ASEAN, sehingga mendukung UMKM Sumatera Utara memperluas pasar hingga ke tingkat internasional.			
PP 10 REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN				
35. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Pelaksanaan program TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Utara difokuskan pada penguatan tata kelola, monitoring, dan inovasi digital untuk mendukung pencapaian target SDGs. Kegiatan dimulai dengan penyusunan SK Tim Forum Pemangku Kepentingan	Bappelitbang	Seluruh Perangkat Daerah	1. Penyusunan dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Kabupaten/Kota se-Sumut tahun 2025-2030 2. Dukungan pelaksanaan skema BRS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs : identifikasi UMKM/IMK serta

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	SDGs, sosialisasi, dan updating target capaian SDGs yang disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya dilakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi Business Registration System (BRS) dan e-Monev SDGs, termasuk pelatihan dan capacity building bagi UMKM serta pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) mencakup penyusunan draf dan laporan capaian SDGs, workshop Voluntary Local Review (VLR) bagi kabupaten/kota, serta diseminasi RAD TPB/SDGs. Program juga menekankan integrasi sistem satu data SDGs, digitalisasi pelaporan, serta penguatan kapasitas melalui forum BRS dan pelaksanaan North Sumatra SDGs Action Award untuk mendorong inovasi dan kompetisi positif. Selain itu, program mengakomodasi pendampingan tematik			pelaku usaha 3. Dukungan pelaksanaan North Sumatera SDGs Action Awards 4. Dukungan proses penginputan E- Monev Kabupaten/Kota 5. Peningkatan Kapasitas untuk implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	berbasis lokus prioritas SDGs, promosi penggunaan aplikasi e-Monev, dan replikasi inovasi untuk memastikan implementasi SDGs di seluruh kabupaten/kota berjalan terstruktur, terdokumentasi, dan berkelanjutan hingga tahap penyusunan laporan akhir kegiatan. Semua tahapan ini menciptakan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat tata kelola dan akselerasi pencapaian SDGs.			
36. Kerja sama APIP dan APH dalam Pendampingan Proyek Strategis dan Kegiatan Unggulan Daerah melalui pendampingan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan serah terima kegiatan proyek strategis	Pelaksanaan kegiatan pendampingan proyek strategis daerah di Sumatera Utara mencakup serangkaian langkah terintegrasi yang dimulai dari penyusunan MoU antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian, yang menjadi dasar kolaborasi pengawasan dan pendampingan. Kegiatan	Inspektorat	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Perangkat Daerah yang memiliki Proyek Strategis	Inspektorat Kabupaten/Kota : Koordinasi Pengawasan dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terkait pelaksanaan Proyek Strategis yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPSI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	selanjutnya mencakup pendampingan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan proyek strategis daerah, termasuk reviu perencanaan untuk memastikan kesesuaian dengan target pembangunan dan prioritas daerah. Setelah itu, dilakukan pendampingan pelaksanaan proyek strategis, yang diikuti dengan evaluasi dan reviu pelaksanaan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta capaian proyek. Proses ini bersifat berulang dan kolaboratif, menekankan pelaksanaan kolaborasi antara APIP, APH, dan instansi terkait untuk memastikan setiap proyek strategis berjalan sesuai perencanaan, mengoptimalkan sumber daya, dan meminimalkan risiko. Keseluruhan kegiatan ini membangun mekanisme pengawasan yang berkelanjutan, menguatkan akuntabilitas, dan meningkatkan kualitas implementasi proyek			

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	strategis di seluruh Sumatera Utara.			
PP 11. TRANSFORMASI DIGITAL DAN INOVASI TEKNOLOGI PADA PELAYANAN PUBLIK DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT				
37. Pemanfaatan Satu Data SUMUT pusat data dan informasi pembangunan	Pelaksanaan program Satu Data Provinsi Sumatera Utara melalui aplikasi SADAINA Reborn mencakup rangkaian kegiatan yang dimulai dari tindak lanjut MoU kerja sama teknis dengan BPS dan Diskominfo dalam pengembangan aplikasi. Kegiatan ini meliputi proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD, yang menjadi dasar integrasi data dari seluruh instansi terkait. Selanjutnya dilakukan launching SADAINA Reborn pada Konreg PDRB ISEI serta updating SK Tim Pelaksana SADAINA Reborn, diikuti dengan diseminasi aplikasi dan penjelasan tupoksi tim kepada seluruh pengguna.	Dinas Kominfo	Seluruh OPD menginput data statistik sektoral	Replikasi aplikasi, menyediakan SDM, menyiapkan regulasi terkait

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	Pemanfaatan SADAINA Reborn dilakukan secara berkelanjutan melalui forum Satu Data tingkat daerah, integrasi data dengan dokumen perencanaan dan evaluasi provinsi, serta pengembangan proses bisnis yang menghubungkan data geospasial dan data SDGs. Fitur tambahan seperti API (Application Programming Interface) mendukung integrasi data dengan kabupaten/kota dan sistem lainnya, sementara peningkatan kapasitas pengguna memastikan pemanfaatan aplikasi secara maksimal. Kegiatan ini juga mencakup monitoring, evaluasi, dan replikasi penggunaan SADAINA Reborn, sehingga data sektoral dapat tersinkronisasi, dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan, dan mendukung perencanaan pembangunan berbasis data yang terintegrasi di seluruh Sumatera Utara.			

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
PP 12. INFRASTRUKTUR DENGAN PRIORITAS JALAN DAN JEMBATAN PADA KAWASAN TERISOLIR DAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR PADA KAWASAN AFIRMASI, TERLUAR, DAN TERPENCIL				
38. Pembangunan Ruas Jalan Baru Penghubung Wilayah Terisolir atau Strategis yang Merupakan kewenangan Provinsi	Pelaksanaan pembangunan dan penanganan ruas jalan provinsi di Sumatera Utara dilakukan secara bertahap dengan fokus utama pada jalur yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat layanan, serta memperkuat jalur distribusi antar kabupaten/kota. Penanganan mencakup berbagai ruas jalan yang masih berupa tanah dan belum tembus. Lokasi intervensi tersebar di Kabupaten Dairi, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Labuhanbatu, Asahan, Nias Utara, Samosir, dan Langkat. Program ini mencakup perbaikan jalan yang masih dalam kondisi tanah agar	Dinas PUPR	Dinas Kominfo, untuk publikasi kegiatan, Dinas LHK mendukung proses penyusunan dokumen lingkungan, AMDAL dan izin pinjam pakai Hutan, Dinas Perhubungan untuk penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	1. Memberikan dukungan administratif atas pembangunan jalan yang berada di wilayah kewenangannya, mendukung penyediaan lahan pada trase jalan serta perizinan 2. Menyelaraskan program jalan dengan perencanaan pembangunan daerah dan usulan prioritas lokal. 3. Melaksanakan koordinasi teknis lapangan dan penyedia data kondisi eksisting jalan serta kebutuhan daerah.

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	dapat dilalui, pembangunan ruas jalan baru di beberapa kabupaten, serta peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Secara keseluruhan, kegiatan ini menitikberatkan pada peningkatan akses bagi desa-desa terpencil dan penguatan jaringan distribusi antar kabupaten/kota di Sumatera Utara.			
39. Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar bagi Kawasan Afirmasi, Terluar, dan Terpencil untuk Mewujudkan Keadilan Pembangunan	Pelaksanaan program air minum, sanitasi, dan MCK di wilayah Kepulauan Nias difokuskan pada pemetaan kebutuhan infrastruktur layanan dasar serta koordinasi penetapan lokasi layanan di kawasan afirmasi, terluar, dan terpencil. Kegiatan ini mencakup perencanaan dan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan, pembangunan MCK, serta pengelolaan limbah melalui TPS3R dan IPAL. Tahap perencanaan meliputi penyusunan RISPAM regional, studi kelayakan, dokumen DED, dan dokumen lingkungan	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan, AMDAL, Dinas Kominfo untuk publikasi kegiatan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	1. Pemerintah Kabupaten/Kota: Menyediakan lahan, mengarahkan program RTLH (Air Minum dan Sanitasi), menetapkan penerima bantuan, dan mengalokasikan anggaran daerah. 2. Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota: Pelaksana utama di lapangan yang mengurus pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan. 3. Dinas PUPR Kabupaten/Kota: Memberikan dukungan teknis konstruksi, membuat RAB, dan mengawasi pelaksanaan di lapangan. 4. Dinas Sosial Kabupaten/Kota: Membantu memperbaiki dan

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	untuk SPAM, TPS3R, dan IPAL di Kota Gunungsitoli, Teluk Dalam, Nias Barat, Nias Utara, dan kawasan strategis provinsi lainnya. Pembangunan fisik dilakukan untuk SPAM regional, jaringan perpipaan di beberapa kawasan strategis, TPS3R, dan MCK di Kepulauan Nias. Secara keseluruhan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak, memperkuat jaringan infrastruktur layanan dasar, serta mendukung keberlanjutan lingkungan di wilayah Kepulauan Nias.			memverifikasi data kemiskinan lokal. 5. Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada Kabupaten/Kota: Melakukan identifikasi penerima bantuan, sosialisasi, memfasilitasi gotong royong, serta membantu pemantauan di lapangan.
PP13. PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK DAN TRANSPORTASI YANG Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing				
40. Dukungan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Melalui Pembangunan BRT dan Peningkatan Kereta Commuter	Pelaksanaan program BRT di wilayah Medan, Deli Serdang, dan Binjai mencakup pengadaan lahan, pembangunan infrastruktur, penyediaan armada, serta pengelolaan operasional dan sistem ticketing. Kegiatan dimulai	Dinas Perhubungan	Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas PUPR terkait penyelenggaraan Jalan Provinsi (jika trayek melalui jalan provinsi) Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, Biro Organisasi membentuk kelembagaan (BLUD) BRT	Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Pelaksana operasional harian, koordinator lapangan. Kota Binjai: Dukungan penetapan lokasi lahan depo BRT Kabupaten Deli Serdang:

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	dengan perhitungan nilai aset lahan oleh konsultan appraisal untuk pengadaan lahan Depo BRT di Jalan Makalona, Kelurahan Tungkurono, Kota Binjai, dan di Desa Tanjung Garbus I, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya, dibentuk BLUD/UPT sebagai pengelola sistem angkutan umum massal BRT. Program ini menyediakan armada bus untuk koridor Terminal Binjai – Medan Mall dan Terminal Lubuk Pakam – Amplas, dilengkapi dengan halte berupa bus pole, halte kecil, dan halte besar di kedua koridor serta di titik tambahan di luar koridor. Selain itu, kegiatan juga mencakup penyediaan biaya operasional dan maintenance, pengelolaan manajemen, serta implementasi sistem ticketing untuk seluruh koridor. Secara keseluruhan, program ini bertujuan untuk memperkuat sistem		Mebidang, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	Dukungan penetapan lokasi lahan depo BRT

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	transportasi massal, meningkatkan kenyamanan penumpang, serta mendukung integrasi jaringan transportasi antar kota di wilayah Medan, Deli Serdang, dan Binjai.			
41. Subsidi Transportasi Bus Perintis untuk Daerah-Daerah Terpencil	Pelaksanaan program bus perintis mencakup pembentukan tim pelaksana, koordinasi dengan K/L dan pemangku kepentingan terkait, serta sosialisasi bus perintis kepada masyarakat, termasuk pelajar, petani, dan pedagang. Program ini juga meliputi survei teknis rute dan validasi kebutuhan untuk memastikan pelayanan tepat sasaran. Armada bus perintis disebarkan ke berbagai kabupaten, antara lain Deli Serdang, Mandailing Natal, Nias Barat, Pakpak Bharat, Nias Selatan, Serdang Bedagai, Padang Lawas, Toba, Nias Utara, Padang Lawas Utara, dan Tapanuli Selatan, dengan pengadaan armada serta pembangunan halte dan fasilitas dasar di masing-masing lokasi. Selain itu, kegiatan meliputi pengelolaan biaya	Dinas Perhubungan	Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas PUPR terkait penyelenggaraan Jalan Provinsi (jika trayek melalui jalan provinsi) Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	1. Koordinasi dan Penyediaan Data: Pemerintah kabupaten/kota berperan menyediakan data dan kebutuhan daerah terkait angkutan perintis serta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi agar subsidi dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi wilayah terpencil yang membutuhkan akses transportasi. 2. Fasilitasi Pelaksanaan Program: Kabupaten/kota membantu pelaksanaan program subsidi dengan memastikan armada bus perintis dapat beroperasi di wilayahnya, menyediakan dukungan administratif, dan memantau pelaksanaan layanan agar berjalan lancar dan memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu penyediaan fasilitas pendukung untuk kelancaran operasional, berupa lahan untuk titik keberangkatan 3. Penentuan Rute dan

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	operasional untuk semua unit bus perintis dan pengawasan pelaksanaan operasional. Sosialisasi dilakukan secara terus-menerus untuk memperkenalkan layanan kepada masyarakat, sementara monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala bulanan, triwulanan, dan tahunan, dengan penyusunan laporan monitoring sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan. Program ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas transportasi di kabupaten/kota yang belum terlayani optimal dan memperkuat konektivitas antar wilayah.			Kebijakan Lokal: Pemerintah daerah menetapkan rute bus perintis yang strategis sesuai kebutuhan wilayah dan sinkron dengan program nasional, serta mengeluarkan kebijakan pendukung agar subsidi bisa dimanfaatkan optimal untuk membuka keterisolasian daerah, yaitu pengusulan dan penetapan trayek dan sosialisasi program kepada masyarakat serta kesiapan infrastruktur jalan di kabupaten dalam kondisi layak dan aman, yang akan dilalui oleh trayek 4. Pengawasan dan <i>Monitoring</i>: Kabupaten/kota melakukan pemantauan operasional bus perintis di lapangan untuk memastikan layanan tetap berjalan dengan baik, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat di daerah terpencil.
PP 14. PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA				

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
42. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir	Pelaksanaan program penanganan banjir mencakup penetapan lokasi rawan banjir, penyusunan Detail Engineering Design (DED), dan pemenuhan kriteria readiness untuk setiap lokasi yang menjadi fokus intervensi. Kegiatan ini dilanjutkan dengan pengerjaan fisik di sejumlah sungai strategis di berbagai kabupaten/kota, termasuk Sungai Aek Natas, Sungai Kualuh, Sungai Aek Sirahar, Sungai Bah Lombut, Sungai Aek Kanopan, Sungai Muzoi, Sungai Lahomi, Sungai Idano Mola, Sungai Suka, Sungai Humanga, Sungai Lae Bongkaras, Sungai Aek Siandurian, Sungai Aek Sigaeon, Sungai Gambus, dan Sungai Aek Pohon. Kegiatan ini difokuskan pada kota dan kabupaten yang rawan banjir, dengan tujuan memperkuat sistem pengendalian banjir, meningkatkan kapasitas sungai, dan meminimalkan risiko kerusakan akibat banjir bagi masyarakat dan infrastruktur. Pendekatan ini dilakukan secara	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk dokumen lingkungan dan AMDAL, BPBD menyusun kajian resiko bencana, rencana mitigasi, dan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat pada wilayah bencana, Diskominfo untuk publikasi kegiatan	1. Penyediaan Data dan Koordinasi: Kabupaten/kota berperan menyediakan data wilayah yang terdampak banjir serta kebutuhan teknis di lapangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi agar pembangunan bisa tepat sasaran dan efektif (BPBD) 2. Fasilitasi Pelaksanaan dan Administrasi: Kabupaten/kota membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan dengan menyediakan dukungan administratif, perizinan, penyediaan lahan, dan tenaga lokal di wilayahnya (PUPR) 3. Pemeliharaan dan Pengawasan: Setelah pembangunan infrastruktur pengendali banjir dilakukan, pemerintah kabupaten/kota turut bertanggung jawab melakukan pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian agar fasilitas yang dibangun tetap berfungsi sesuai perencanaan dan umur yang diharapkan (PUPR) 4. Pemberdayaan Masyarakat dan Kolaborasi: Pemerintah daerah mendorong partisipasi

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	terpadu mulai dari perencanaan teknis, penyusunan dokumen lingkungan, hingga pelaksanaan fisik di lapangan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program.			masyarakat dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah provinsi dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pengendalian banjir melalui manajemen drainase, normalisasi sungai, dan pengelolaan ruang terbuka hijau (LHK, Dinas PKP Kabupaten/Kota) 5. Penyesuaian Kebijakan Lokal: Kabupaten/kota juga menetapkan kebijakan lokal yang mendukung implementasi program pengendalian banjir provinsi, termasuk pengelolaan tata ruang dan penggunaan teknologi mitigasi banjir (LHK, Dinas PKP Kabupaten/Kota, BPBD)
43. Pembangunan TPST Regional	Pelaksanaan pengelolaan persampahan di TPST Regional Mebidang dimulai dengan identifikasi lokasi potensial untuk pembangunan TPST regional, diikuti dengan penyusunan studi kelayakan dan pelaksanaan forum group discussion (FGD) bersama kabupaten/kota terkait. Tahap selanjutnya mencakup pengadaan lahan dan persiapan lokasi agar	Dinas PUPR : pelaksana	PUPR: -Penyiapan dokumen Lingkungan, -Dalam pembuatan FS dan DED, dan pembangunan infrastruktur serta pendukungnya, Dinas LHK : - Dukungan dalam proses penyusunan dokumen lingkungan hidup -Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi,	1. Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah 2. Penyediaan dan penentuan lokasi 3. Dukungan pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4. Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan 5. Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	siap digunakan, serta penyusunan dokumen peta jalan pengelolaan persampahan TPST regional. Dokumen studi kelayakan dan Detail Engineering Design (DED) Lingkungan Hidup (AMDAL) disiapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap aspek lingkungan. Setelah itu, pembangunan infrastruktur TPST dilakukan, diikuti dengan operasionalisasi fasilitas dan pelatihan sumber daya manusia pengelola. Seluruh kegiatan dilengkapi dengan monitoring, evaluasi, dan pengembangan berkelanjutan untuk memastikan TPST berfungsi optimal dalam mendukung pengelolaan sampah regional.		-Dinas Kominfo untuk publikasi media	pengolahan 6. Dukungan SDM
44. Pembangunan PLTSa	Pelaksanaan pembangunan PLTSa dimulai dengan inventarisasi potensi kerja sama antara pemerintah provinsi dan dunia usaha untuk penyediaan infrastruktur teknologi. Selanjutnya dilakukan koordinasi teknis lintas OPD, khususnya PUPR dan	DISPERINDAG ESDM	• PUPR : Pembangunan TPST • LHK: Pengelolaan Sampah • Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: Lahan dan wilayah untuk

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	LHK, serta kabupaten/kota terkait, yaitu Medan dan Deli Serdang, dengan fokus pada kawasan perkotaan (STM Hilir) atau area yang dekat dengan TPST. Tahap awal mencakup kajian potensi PLTSa, dilanjutkan dengan pra-studi kelayakan (Pra-FS) dan penyusunan studi kelayakan (FS) pembangunan PLTSa. Selanjutnya dilakukan peninjauan pembiayaan melalui investor, KPBU, hibah, dan penyusunan MoU dengan PLN terkait pembelian daya listrik. Tahap akhir adalah pembangunan PLTSa serta pengelolaan dan pemanfaatan residu secara optimal untuk mendukung energi terbarukan dan pengelolaan sampah terpadu.			pembangunan PLTSa, Penerapan Sistem Persampahan Terpilah Perizinan 1. Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah 2. Penyediaan dan penentuan lokasi 3. Dukungan pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4. Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan 5. Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan 6. Dukungan SDM
45. Pengembangan SPAL Regional	Pelaksanaan program difokuskan pada penguatan DED dan optimalisasi IPAL/IPLT Regional yang sudah ada, terutama di wilayah padat penduduk seperti Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Toba, dan	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, PDAM dalam peningkatan layanan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Dinas kominfo untuk publikasi media	1. Perencanaan tata ruang (PKP Tata Ruang) 2. Membuat regulasi dan menerbitkan perizinan (LHK, DPMPTSP) 3. Sosialisasi kepada masyarakat (Dinas Kesehatan) 4. Dukungan penyediaan lahan (PKP Tata Ruang)

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	Kabupaten Simalungun. Kegiatan mencakup optimalisasi IPLT Regional Cemara beserta supervisi peningkatan kapasitasnya, serta optimalisasi IPAL/IPLT Regional Ajibata yang telah ada. Selain itu, dilakukan pembinaan operasional IPAL/IPLT Regional, operasional penuh SPAL Regional, pemantauan kinerja IPAL, dan evaluasi kualitas air secara berkala. Program ini juga mencakup penyusunan rencana ekspansi untuk replikasi wilayah lain, sehingga pengelolaan air limbah dapat lebih merata dan efektif di kawasan-kawasan padat penduduk tersebut.			5. Menyediakan alokasi anggaran (BKAD) 6. Pembentukan kelembagaan untuk mengelola operasional IPLT (Biro Organisasi)
46. Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati	Pelaksanaan pembangunan Taman Kehati dimulai dengan rapat koordinasi, pembentukan tim appraisal, dan pembentukan pokja perencanaan. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen DPPT serta proses pembebasan lahan, diikuti dengan penyusunan dokumen FS, DED, dan dokumen administrasi pendukung lainnya.	DLHK	1. Biro Pem Otda - SK Penlok 2. BPN - Sertifikat Lahan 3. Diskominfo - Publikasi Media	1. Dukungan terhadap pengadaan lahan 2. Penetapan Taman Kehati pada RTRW Kabupaten/Kota

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	Tahap pekerjaan fisik di lapangan dilakukan sesuai Perdirjen KSDAE Nomor P.5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Design Dasar, mencakup desain vegetasi dan desain infrastruktur Taman Kehati. Kegiatan berikutnya difokuskan pada penanaman dan pemeliharaan vegetasi, serta penyusunan rencana kesepakatan bersama atau kerja sama sebagai dukungan pengembangan kawasan konservasi. Tahap akhir mencakup pembukaan dan peresmian Taman Kehati, pelaksanaan kegiatan penanaman lanjutan, pemeliharaan vegetasi, pengembangan fasilitas pendukung, serta pembentukan UPT Taman Keanekaragaman Hayati untuk memastikan pengelolaan dan keberlanjutan taman konservasi ini.			
PP 15. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA				

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
47. Penguatan Ekonomi Desa untuk Mengurangi Ketergantungan pada Pusat Kota dengan Penguatan Ekonomi Lokal melalui Pembuatan <i>Master Plan</i> Desa Produktif dan Mandiri.	Pelaksanaan program Desa Produktif dan Mandiri dimulai dengan pendataan lokus desa serta penyusunan master plan untuk mengembangkan potensi unggulan setiap desa. Langkah awal mencakup penyusunan SK Gubernur terkait Hibah Desa dan Naskah Perjanjian Hibah Desa (NPHD) sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan bantuan. Selanjutnya dilakukan pelaksanaan bantuan pengembangan produk unggulan desa yang diberikan kepada BUMDes atau BUMDesma, disertai pendampingan intensif agar program hibah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh setiap desa penerima. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program serta memberikan perbaikan jika diperlukan. Program ini difokuskan pada tiga kawasan pedesaan, yakni Kabupaten Tapanuli Selatan (unggulan		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Dinas Perkebunan (Pemberian bantuan/pelatihan pengembangan komoditas gula aren, kopi, dan kelapa kepada kelompok yang terdapat pada desa yang menjadi sasaran intervensi kegiatan ini)	-Menyediakan data potensi desa yang akurat termasuk peta sebaran komoditi unggulan. -Memperbaiki jalan produksi, pasar desa, gudang, sentra dan pengolahan -Memfasilitasi kerja sama antar desa atau antar BUMDes untuk memperkuat rantai pasok. -Memfasilitasi sertifikasi produk (halal, organik, SNI) untuk meningkatkan daya saing. -Pembinaan Penggunaan dana desa untuk ekonomi desa pada Lokus yang di intervensi

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	Gula Aren), Kabupaten Mandailing Natal (unggulan Kopi), dan Kepulauan Nias (unggulan Kelapa). Tahap lanjutan menekankan penguatan keberlanjutan dan legacy program hingga Tahun 2030, memastikan manfaat jangka panjang bagi pengembangan ekonomi lokal dan kemandirian desa.			
48. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan bagi Pengelola BUMDES	Program pendampingan BUMDes/BUMDesma dimulai dengan pendataan seluruh BUMDes/BUMDesma yang menjadi sasaran kegiatan di 27 Kabupaten/Kota yang memiliki desa. Berdasarkan pendataan ini, dilakukan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pengelola BUMDes/BUMDesma, termasuk pelatihan manajemen usaha, administrasi keuangan, pengembangan produk, serta strategi pemasaran agar BUMDes/BUMDesma mampu beroperasi lebih profesional dan berkelanjutan. Selama pelaksanaan, kegiatan juga dilengkapi	Biro Perekonomian	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan bagi pengelola BUMDES/Masyarakat Desa).	- Menugaskan tenaga pendamping desa atau penyuluh ekonomi untuk mendampingi operasional BUMDES. - Memfasilitasi akses internet dan teknologi informasi untuk mendukung pemasaran digital. - Memfasilitasi sertifikasi kompetensi pengelola BUMDES melalui lembaga pelatihan resmi.

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	dengan pendampingan langsung untuk memastikan penerapan materi pelatihan dan pembinaan berjalan efektif. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala untuk menilai capaian program, mengidentifikasi kendala, serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi BUMDes/BUMDesma di masing-masing kabupaten/kota. Kegiatan ini secara simultan diterapkan di seluruh 27 Kabupaten/Kota, sehingga pengelola BUMDes/BUMDesma di seluruh wilayah dapat memperoleh manfaat yang merata dan berkelanjutan.			
PP 16. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG MENDUKUNG SUASANA YANG HARMONIS, TOLERAN DAN RUKUN				
49. Bantuan Hibah Rumah Ibadah di 33 Kabupaten/Kota	Program Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah dilaksanakan melalui beberapa tahap, dimulai dengan penyusunan perubahan Pergub Hibah Rumah Ibadah yang memuat	Biro KESRA	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Inspektorat (pendampingan menyeluruh dan tinjauan terhadap tata kelola pemberian bantuan hibah rumah ibadah)	-

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	mekanisme penyaluran hibah, termasuk alokasi untuk biaya operasional pengelola dan sarana-prasarana rumah ibadah. Selanjutnya, dilakukan penerimaan proposal usulan dari rumah ibadah di seluruh 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, diikuti proses verifikasi proposal untuk memastikan kelayakan dan kesesuaian dengan kriteria hibah yang ditetapkan. Setelah proposal diverifikasi, penyaluran bantuan hibah dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme yang ditetapkan, disertai dengan pembinaan administrasi dan pengelolaan sarana-prasarana bagi penerima hibah. Selama pelaksanaan, dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas penyaluran, memastikan penggunaan dana tepat sasaran, serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi keberlanjutan program. Kegiatan ini diterapkan secara konsisten selama			

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	periode 2025–2030 di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.			
50. Festival Seni dan Budaya Daerah	Program pengembangan dan penyelenggaraan festival budaya dan pariwisata di Provinsi Sumatera Utara difokuskan pada penguatan event yang telah dilaksanakan selama tiga tahun terakhir untuk ditingkatkan menjadi kalender event nasional (KEMENPAR) dan kalender event budaya (KEMENDIKBUD) pada tahun 2026. Kegiatan ini meliputi pemetaan event budaya potensial, penyusunan Calendar of Event (CoE) 2026, sinkronisasi travel pattern dan travel package dengan CoE provinsi dan nasional, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Ashita, travel agent, influencer, dan perangkat daerah serta kabupaten/kota. Beberapa kawasan prioritas dan rekomendasi tema	DISBUDPAREKRAF	1. Dinas Perhubungan : Memastikan ketersediaan transportasi dan lalu lintas saat <i>event</i> internasional dilaksanakan 2. Dinas Kesehatan : Dukungan Tenaga Kesehatan dan Ambulans 3. Dinas Koperasi &UMKM : Pelatihan dan pendampingan UMKM untuk mendukung pelaksanaan <i>event</i> internasional 4. Dinas Kominfo : Memastikan ketersediaan jaringan digital saat pra <i>event-event</i>-pasca <i>event</i> internasional; publikasi kegiatan 5. Satpol PP : Keamanan Pelaksanaan <i>Event</i> dan ketertiban penyelenggaraan acara	1. Memastikan ketersediaan anggaran dalam mendukung Proyek Strategis Provinsi; 2. Pelatihan dan pembinaan Sanggar Kesenian Daerah; 3. Pendataan/Inventarisasi potensi Festival Seni Budaya di masing-masing daerah; 4. Memastikan kontinuitas pelaksanaan Festival Seni Budaya di masing-masing daerah 5. Promosi pelaksanaan Festival Seni-Budaya; 6. Penyusunan Kalender Budaya

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	acara antara lain: Kawasan Sibolga – Pandan dan Sipirok – Padangsidempuan dengan tema “Cultural Coast Fest” atau “Pesona Warisan Dunia” yang menampilkan paduan seni pantai, karnaval budaya, dan promosi destinasi Bawömataluo; Kawasan Bawomatoluo – Hilisimaetano – Sorake dengan tema “Melayu Heritage & Culinary Fest” menampilkan pameran sejarah kerajaan dan bazar makanan tradisional Melayu; Kawasan Tanjung Pura – Tangkahan – Bukit Lawang – Sei Bingai dengan tema “Festival Budaya Angkola-Mandailing”; Kawasan Sipirok – Padangsidempuan dengan tema “Heritage Highland Festival” menampilkan artefak adat Karo, Dairi, dan Pakpak, serta lomba seni dan kerajinan khas daerah; serta kawasan Karo – Dairi – Pakpak dengan fokus pengembangan event budaya lokal. Pelaksanaan festival menyesuaikan waktu libur anak sekolah, musim			

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	panas, dan musim dingin, serta mengedepankan penguatan promosi melalui media sosial, platform online, dan kolaborasi dengan institusi seperti MURI untuk kegiatan rekor peserta. Kegiatan ini mencakup seluruh tahapan mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi dampak festival, dengan tujuan meningkatkan daya tarik pariwisata, mendorong kunjungan wisatawan, serta melestarikan dan mempromosikan warisan budaya Sumatera Utara secara berkelanjutan.			
51. Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat	Program edukasi wawasan kebangsaan dan solidaritas bagi organisasi masyarakat (Ormas) dan kelompok masyarakat di daerah rawan konflik di Sumatera Utara akan dilaksanakan secara bertahap selama tahun 2025–2030. Kegiatan ini mencakup pendataan sasaran Ormas dan kelompok masyarakat, penyusunan modul pembekalan, pelaksanaan pelatihan edukasi wawasan kebangsaan dan solidaritas, serta monitoring dan	Kesbangpol	Dinas Pendidikan (Koordinasi rekomendasi satuan pendidikan yang membutuhkan pembekalan terhadap edukasi wawasan kebangsaan) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	Replikasi pelaksanaan kegiatan Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat di Kabupaten/kota

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	evaluasi untuk memastikan efektivitas program. Pelaksanaan dilakukan secara terjadwal di berbagai kabupaten/kota, dengan fokus pada wilayah yang memiliki potensi konflik sosial. Setiap tahunnya, kegiatan menargetkan daerah berbeda sesuai dengan tingkat kebutuhan dan prioritas intervensi, dimulai dari Kabupaten Asahan dan Kota Pematangsiantar, kemudian Kota Medan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Toba, Kota Tanjungbalai, dan Kabupaten Serdang Bedagai, hingga wilayah seperti Kabupaten Langkat, Nias, Simalungun. Pendekatan program ini bersifat menyeluruh, dimulai dari pemetaan sasaran, pembekalan melalui modul yang disesuaikan, pelaksanaan edukasi yang interaktif dan partisipatif, hingga evaluasi berkala untuk menilai perubahan pengetahuan, sikap, dan keterlibatan Ormas dalam menjaga kerukunan dan solidaritas			

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	di masyarakat. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memperkuat wawasan kebangsaan, meningkatkan kerja sama antar kelompok masyarakat, serta menekan potensi konflik di Sumatera Utara secara berkelanjutan.			
PP 17. TERCIPTANYA KEHIDUPAN YANG LEBIH AMAN DAN TERTIB				
52. Patroli Gabungan untuk Narkoba di Pintu Masuk Narkoba dan Kawasan-Kawasan Kenakalan Remaja (Genk Motor).	Program Patroli Gabungan untuk menanggulangi genk motor dan mencegah pengedaran narkoba akan dilaksanakan secara berkelanjutan dari tahun 2025 hingga 2030. Kegiatan ini dimulai dengan pembentukan SK Gubernur tentang Tim Patroli Gabungan dan rapat teknis koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, untuk memastikan pelaksanaan patroli berjalan efektif. Patroli gabungan dilakukan secara rutin di pintu masuk narkoba dan wilayah rawan gangguan keamanan di Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Langkat. Setiap	Satpol PP	Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	Melakukan koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota terkait dukungan personel dalam pelaksanaan kegiatan. Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba di Kabupaten/Kota)

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	tahunnya kegiatan ini mencakup operasi patroli, pengawasan, serta pembinaan hasil patroli untuk meningkatkan kapasitas tim dalam deteksi dini dan penanganan kasus terkait genk motor maupun peredaran narkoba. Pendekatan program ini bersifat kolaboratif, mengintegrasikan aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya, dengan tujuan meningkatkan keamanan wilayah, menekan angka kriminalitas, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas patroli dan keberlanjutan pengawasan di seluruh wilayah prioritas.			
53. Pemberantasan Pengguna dan Bandar Narkoba melalui Pemindahan Gembong Narkoba dari Lapas ke Nusakambangan	Program pemindahan warga binaan high risk dari Lapas di Sumatera Utara ke Lapas Nusakambangan akan dilaksanakan secara berkelanjutan mulai tahun 2025 hingga 2030. Kegiatan dimulai dengan penandatanganan MoU antara Direktorat Jenderal	Kesbangpol	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Dinas Perhubungan (pengaturan lalu lintas untuk pemindahan gembong narkoba) Satpol PP (pendampingan saat pemindahan gerbong narkoba)	Penguatan pencegahan narkoba di pemerintahan daerah

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	Pemasyarakatan Kanwil Sumut, Poldasu, BNNP Sumut, dan Lanud Soewondo, yang menjadi dasar koordinasi lintas instansi terkait pelaksanaan pemindahan. Setiap tahunnya, dilakukan perencanaan dan pendataan warga binaan yang masuk kategori high risk untuk memastikan proses pemindahan berlangsung aman dan sesuai prosedur. Pelaksanaan pemindahan dilakukan secara terstruktur dari Lapas I Tanjung Gusta Kota Medan ke Lapas Nusakambangan, dengan pengawasan ketat dan protokol keamanan tinggi. Program ini bertujuan meningkatkan keamanan lembaga pemasyarakatan, meminimalkan risiko gangguan keamanan di wilayah asal, serta mendukung manajemen warga binaan high risk secara profesional dan sistematis. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin untuk memastikan			

PROYEK STRATEGIS DAERAH	DEKSRIPI / RENCANA LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
		UTAMA	PENDUKUNG	
	kelancaran proses dan keberlanjutan program.			

Sebagai bagian dari komitmen untuk menyukseskan agenda pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merumuskan dukungan strategis melalui enam PHTC, 17 Program Prioritas, yang kemudian dijabarkan ke dalam 53 Proyek Strategis Daerah (PSD), serta diperkuat oleh sejumlah Kegiatan Utama Perangkat Daerah (KUPD). Seluruh perangkat ini diarahkan untuk memperkuat keterkaitan dan sinergi dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

PSN mencakup berbagai agenda strategis, mulai dari penanggulangan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, Sekolah Rakyat, pembangunan 3 juta rumah, program makan bergizi gratis, hingga pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah. PSN dikelompokkan ke dalam beberapa Program Strategis Nasional (ProSN), yaitu: pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan untuk semua, perluasan akses pendidikan, pertumbuhan ekonomi, serta PSN khusus untuk Sumatera Utara. Beberapa PSN yang pelaksanaannya secara khusus dipusatkan di Sumatera Utara antara lain Pengembangan KEK Sei Mangkei, Bioethanol berbasis tebu, dan Hilirisasi kelapa sawit, kelapa, serta rumput laut.

Penyelarasan terhadap PSN diwujudkan melalui rencana tindak lanjut beserta lokus pelaksanaan yang telah dijadwalkan untuk periode 2025–2030, lengkap dengan penetapan OPD pengampu pada masing-masing proyek. Sebagai contoh, pada PSN khusus untuk Sumatera Utara yaitu Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, dan Rumput Laut, selaras dengan PSD 16: Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan di Kawasan Industri Sumatera Utara. Proyek ini direncanakan berjalan pada tahun 2026, dengan fokus pada peningkatan kapasitas produksi IKM melalui produk hilirisasi, riset inovasi produk, dan pengembangan teknologi tepat guna. Pelaksanaan PSD 16 diampu oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM).

Melalui pemetaan dan sinergi ini, Provinsi Sumatera Utara tidak hanya memastikan bahwa seluruh prioritas daerah selaras dengan arah pembangunan nasional, tetapi juga mendorong keterpaduan lintas sektor dan perangkat daerah agar dampak pembangunan dapat dirasakan secara luas di berbagai wilayah dan berkelanjutan. Bentuk penyelarasan yang dimaksud dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

Tabel 3. 19. Penyelarasan PHTC/PSD/KUPD Provinsi Sumatera Utara terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) RPJMN 2025-2029

NO	PSN	PENYELARASAN PHTC/PSD/KUPD	PD PENANGUNGJAWAB
1	Pengentasan Kemiskinan		
a	Penanggulangan Kemiskinan	PHTC 6: Bantuan Hukum dan perlindungan rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE).	Biro Hukum
		PSD 11. Bantuan Sosial Produktif melalui Program Masyarakat Produktif (MAPRO)	Dinas Sosial
		PSD 12. Pelaksanaan Program Pasar Murah Bergerak (PMB)	DISPERINDAG ESDM
		PSD 13. Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja Rentan (Subsidi BPJS Ketenagakerjaan)	Dinas Ketenagakerjaan
		PSD 14. Revitalisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Panti Sosial Provinsi	Dinas Sosial
		KUPD 1 Dinsos. Pengadaan Mesin Jahit dan Becak Dagang Bagi Penyandang Disabilitas (PPM)	Dinas Sosial
		KUPD 2 Dinsos. Penyediaan database masyarakat miskin berupa data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berbasis digital	Dinas Sosial

NO	PSN	PENYELARASAN PHTC/PSD/KUPD	PD PENANGUNGJAWAB
		KUPD 1 Disnaker. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan penempatan tenaga kerja	Dinas Ketenagakerjaan
		KUPD 1 DP3AKB. Pemberian Pelatihan Keterampilan Kerja bagi perempuan	DP3AKB
		KUPD 1 Diskanla. Asuransi nelayan	Dinas Perikanan dan Kelautan
		KUPD 2 Diskanla. Bantuan Sarana Prasarana perikanan tangkap	Dinas Perikanan dan Kelautan
		KUPD 3. Bantuan sarana prasaranan perikanan budidaya	Dinas Perikanan dan Kelautan
b	Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	PHTC 6: Bantuan Hukum dan perlindungan rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE).	Biro Hukum
		PSD 11. Bantuan Sosial Produktif melalui Program Masyarakat Produktif (MAPRO)	Dinas Sosial
		PSD 12. Pelaksanaan Program Pasar Murah Bergerak (PMB)	DISPERINDAG ESDM
		PSD 13. Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja Rentan (Subsidi BPJS Ketenagakerjaan)	Disnaker
		PSD 14. Revitalisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Panti Sosial Provinsi	Dinas Sosial

NO	PSN	PENYELARASAN PHTC/PSD/KUPD	PD PENANGUNGJAWAB
		KUPD 1 Dinsos. Pengadaan Mesin Jahit dan Becak Dagang Bagi Penyandang Disabilitas (PPM)	Dinas Sosial
		KUPD 2 Dinsos. Penyediaan database masyarakat miskin berupa data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berbasis digital	Dinas Sosial
		KUPD 1 Disnaker. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan penempatan tenaga kerja	Dinas Ketenagakerjaan
		KUPD 1 DP3AKB. Pemberian Pelatihan Keterampilan Kerja bagi perempuan	DP3AKB
		KUPD 1 Diskanla. Asuransi nelayan	Dinas Perikanan dan Kelautan
		KUPD 2 Diskanla. Bantuan Sarana Prasarana perikanan tangkap	Dinas Perikanan dan Kelautan
		KUPD 3. Bantuan sarana prasaranan perikanan budidaya	Dinas Perikanan dan Kelautan

NO	PSN	PENYELARASAN PHTC/PSD/KUPD	PD PENANGUNGJAWAB
c	Sekolah Rakyat	PHTC 1: Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) Kepulauan Nias (2026), Kepulauan Nias dan Pantai Barat (2027), Kepulauan Nias , Pantai Barat dan Dataran Tinggi (2028), Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur (2029) 33 Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan
		PSD 1. Pemenuhan 100% Fasilitas Listrik dan Layanan Internet pada Seluruh SMA/SMK/SLB di Sumatera Utara	Dinas Pendidikan
		PSD 2. Pembangunan 4 SMA/SMK/SLB Unggulan (Nias/SMA - 2026, Asahan/SMK - 2027, Samosir/SMK – 2028, Karo/SLB - 2029)	Dinas Pendidikan
		PSD 3. Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK/SLB sebanyak 490 Sekolah	Dinas Pendidikan
		PSD 4. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru	Dinas Pendidikan
		KUPD 4 Disdik. Penyusunan Buku Kurikulum muatan Lokal “MARSIPATURE HUTANABE” yang akan diterapkan di SMA/SMK di Provinsi Sumatera Utara	Dinas Pendidikan

NO	PSN	PENYELARASAN PHTC/PSD/KUPD	PD PENANGUNGJAWAB
		KUPD 7 Disdik. Pembentukan SMA Terbuka dengan sistem Pembelajaran Jarak Jauh	Dinas Pendidikan
		KUPD 2 Dinas Perpustakaan dan Arsip. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka melalui Bahan Bacaan Digital Sumut (Baca Di Sumut) Pengadaan Titik Baca Digital untuk peningkatan Literasi Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		KUPD 3 Dinas Perpustakaan dan Arsip. Peningkatan Literasi Berbasis Inklusi Sosial untuk Peningkatan Minat baca dan Literasi Masyarakat di Pedesaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip
d	Pembangunan 3 Juta Rumah	PHTC 5.c: Peningkatan Kualitas Permukiman Layak, Terjangkau, dan Inklusif melalui Penyediaan Hunian Murah serta dukungan terhadap pelaksanaan program 3 juta rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Ketahanan Pangan		
a	Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)	PHTC 5.b. Penguatan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Air Pertanian untuk Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan	Dinas PUPR

NO	PSN	PENYELARASAN PHTC/PSD/KUPD	PD PENANGUNGJAWAB
		KUPD 2 Dinas Ketapang TPH. Digitalisasi Produk Pertanian Lokal	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
b	Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	PHTC 3: Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP)	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
		PSD 24. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Unggulan Padi, Jagung, Cabai Merah, dan bawang merah	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
		PSD 25. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Peternakan unggulan	DISBUNAK
		PSD 26. Program pengembangan bibit unggul pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
		PSD 27. Fasilitasi Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
		KUPD 5. Dinas Ketapang TPH. Pemberdayaan penyuluh pertanian serta Pelatihan dan Edukasi Pertanian Berbasis Teknologi	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
c	Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	PHTC 3: Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP)	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
		KUPD 4 Dinas Ketapang TPH. Gerakan Pangan Murah	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
d	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	PHTC 3: Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP)	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
		PSD 24. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Unggulan Padi, Jagung, Cabai Merah, dan bawang merah	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH

NO	PSN	PENYELARASAN PHTC/PSD/KUPD	PD PENANGUNGJAWAB
		PSD 26. Program pengembangan bibit unggul pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
		PSD 27. Fasilitasi Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
		KUPD 1 Dinas Ketapang TPH. Pelatihan petani muda milenial dan Brigade Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
		KUPD 3 Dinas Ketapang TPH. Program pengembangan bibit unggul pertanian (Benih Padi)	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
		KUPD 5. Dinas Ketapang TPH. Pemberdayaan penyuluh pertanian serta Pelatihan dan Edukasi Pertanian Berbasis Teknologi	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
		KUPD 6 Dinas Ketapang TPH. Pengembangan Sistem Pendataan kepemilikan lahan pertanian dan pengawasan kepemilikan lahan yang terintegrasi dengan kabupaten/kota	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
3	Kesehatan untuk semua		
a	Stunting	PHTC 2: Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program Universal Health Coverage (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 2030).	Dinas Kesehatan

NO	PSN	PENYELARASAN PHTC/PSD/KUPD	PD PENANGUNGJAWAB
		PSD 9. Beasiswa Ikatan Dinas bagi Dokter Spesialis dan dokter spesialis residen di Wilayah Kurang Terlayani (2025 – 2030)	Dinas Kesehatan
		PSD 10. Dukungan Pengembangan Rumah Sakit Unggulan (Pengembangan Rumah Sakit Unggulan dan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan)	Dinas Kesehatan
		KUPD 3 Dinkes. Pencegahan dan Penurunan Stunting	Dinas Kesehatan
		KUPD 1 UPT RS Haji. Peningkatan layanan unggulan KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Stroke, Urologi-Nefrologi, dan Kesehatan Ibu Anak) melalui (Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam Pemanfaatan Alat Kesehatan KJSU-KIA serta Penyediaan alat kesehatan penunjang lainnya (Kedokteran Umum, Laboratorium, dll)	UPT RS Haji

NO	PSN	PENYELARASAN PHTC/PSD/KUPD	PD PENANGUNGJAWAB
b	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PHTC 2: Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program Universal Health Coverage (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 2030).	Dinas Kesehatan
		PSD 8. Digitalisasi sistem kesehatan terintegrasi (Sumut e-Health Integration system)	Dinas Kesehatan
		KUPD 1 Dinkes. Dukungan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis- KESUMA SEHAT	Dinas Kesehatan
c	Jaminan Kesehatan Nasional	PHTC 2: Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program Universal Health Coverage (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 2030).	Dinas Kesehatan
		PSD 8. Digitalisasi sistem kesehatan terintegrasi (Sumut e-Health Integration system)	Dinas Kesehatan
		KUPD 1 Dinkes. Dukungan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis- KESUMA SEHAT	Dinas Kesehatan

NO	PSN	PENYELARASAN PHTC/PSD/KUPD	PD PENANGUNGJAWAB
d	Penuntasan TBC	PHTC 2: Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program Universal Health Coverage (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 2030).	Dinas Kesehatan
		PSD 9. Beasiswa Ikatan Dinas bagi Dokter Spesialis dan dokter spesialis residen di Wilayah Kurang Terlayani (2025 – 2030)	Dinas Kesehatan
		PSD 10. Dukungan Pengembangan Rumah Sakit Unggulan (Pengembangan Rumah Sakit Unggulan dan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan)	Dinas Kesehatan
		KUPD 2 Dinkes. Penuntasan Kasus TBC	Dinas Kesehatan
e	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	PSD 10. Dukungan Pengembangan Rumah Sakit Unggulan (Pengembangan Rumah Sakit Unggulan dan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan)	Dinas Kesehatan

NO	PSN	PENYELARASAN PHTC/PSD/KUPD	PD PENANGUNGJAWAB
		KUPD 1 UPT RS Haji. Peningkatan layanan unggulan KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Stroke, Urologi-Nefrologi, dan Kesehatan Ibu Anak) melalui (Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam Pemanfaatan Alat Kesehatan KJSU-KIA serta Penyediaan alat kesehatan penunjang lainnya (Kedokteran Umum, Laboratorium, dll)	UPT RS Haji
		KUPD 1 UPT RSJ Ildrem. Pengembangan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa Paripurna	UPT RSJ Ildrem
4	Perluasan Akses Pendidikan		
a	Pembangunan dan Revitalisasi PAUD	PSD 1. Pemenuhan 100% Fasilitas Listrik dan Layanan Internet pada Seluruh SMA/SMK/SLB di Sumatera Utara	Dinas Pendidikan
		PSD 2. Pembangunan 4 SMA/SMK/SLB Unggulan (Nias/SMA - 2026, Asahan/SMK - 2027, Samosir/SMK - 2028, Karo/SLB - 2029)	Dinas Pendidikan
		PSD 3. Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK/SLB sebanyak 490 Sekolah	Dinas Pendidikan

NO	PSN	PENYELARASAN PHTC/PSD/KUPD	PD PENANGUNGJAWAB
		PSD 4. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru	Dinas Pendidikan
		KUPD 1. Disdik. Peningkatan kompetensi Guru Pendamping Khusus SMA/SMK Inklusi Tunarungu melalui pelatihan Guru Inklusi dari SLB Kab/Kota kepada SMA/SMK di kab/kota	Dinas Pendidikan
		KUPD 2 Disdik. Peningkatan kompetensi Guru Pendamping Khusus SMA/SMK Inklusi Tunanetra melalui pelatihan Guru Inklusi dari SLB Kab/Kota kepada SMA/SMK di kab/kota	Dinas Pendidikan
		KUPD 3 Disdik. Pemberian alat bantu disabilitas bagi sekolah SMA/SMK melalui penyediaan infrastruktur Ramah Disabilitas	Dinas Pendidikan
		KUPD 4 Disdik. Penyusunan Buku Kurikulum muatan Lokal “MARSIPATURE HUTANABE” yang akan diterapkan di SMA/SMK di Provinsi Sumatera Utara	Dinas Pendidikan

NO	PSN	PENYELARASAN PHTC/PSD/KUPD	PD PENANGUNGJAWAB
		KUPD 5 Disdik. Pelatihan Upskilling dan Reskilling Bagi Guru SMK secara Luring Berbasis Zonasi bagi 2.100 Guru SMK (Teknik Mesin, Otomotif, Design, Tata Boga, Agribisnis, Pariwisata, Seni dan industri kreatif)	Dinas Pendidikan
		KUPD 6 Disdik. Link and Match SMK dan DUDI terutama dengan KEK Sei Mangke, KIM dan DUDI lainnya berbasis kearifan lokal	Dinas Pendidikan
		KUPD 7 Disdik. Pembentukan SMA Terbuka dengan sistem Pembelajaran Jarak Jauh	Dinas Pendidikan
		KUPD 8 Disdik. Revitalisasi Bangunan Sekolah	Dinas Pendidikan
		KUPD 1 Dinas Perpustakaan dan Arsip. Penyediaan Fasilitas Perpustakaan Sekolah Menengah untuk peningkatan Akreditasi Sekolah, minat baca dan literasi siswa	Dinas Perpustakaan dan Arsip
b	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	PSD 1. Pemenuhan 100% Fasilitas Listrik dan Layanan Internet pada Seluruh SMA/SMK/SLB di Sumatera Utara	Dinas Pendidikan

NO	PSN	PENYELARASAN PHTC/PSD/KUPD	PD PENANGUNGJAWAB
		PSD 2. Pembangunan 4 SMA/SMK/SLB Unggulan (Nias/SMA - 2026, Asahan/SMK - 2027, Samosir/SMK – 2028, Karo/SLB - 2029)	Dinas Pendidikan
		PSD 3. Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK/SLB sebanyak 490 Sekolah	Dinas Pendidikan
		PSD 4. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru	Dinas Pendidikan
		KUPD 1. Disdik. Peningkatan kompetensi Guru Pendamping Khusus SMA/SMK Inklusi Tunarungu melalui pelatihan Guru Inklusi dari SLB Kab/Kota kepada SMA/SMK di kab/kota	Dinas Pendidikan
		KUPD 2 Disdik. Peningkatan kompetensi Guru Pendamping Khusus SMA/SMK Inklusi Tunanetra melalui pelatihan Guru Inklusi dari SLB Kab/Kota kepada SMA/SMK di kab/kota	Dinas Pendidikan
		KUPD 3 Disdik. Pemberian alat bantu disabilitas bagi sekolah SMA/SMK melalui penyediaan infrastruktur Ramah Disabilitas	Dinas Pendidikan

NO	PSN	PENYELARASAN PHTC/PSD/KUPD	PD PENANGUNGJAWAB
		KUPD 4 Disdik. Penyusunan Buku Kurikulum muatan Lokal “MARSIPATURE HUTANABE” yang akan diterapkan di SMA/SMK di Provinsi Sumatera Utara	Dinas Pendidikan
		KUPD 5 Disdik. Pelatihan Upskilling dan Reskilling Bagi Guru SMK secara Luring Berbasis Zonasi bagi 2.100 Guru SMK (Teknik Mesin, Otomotif, Design, Tata Boga, Agribisnis, Pariwisata, Seni dan industri kreatif)	Dinas Pendidikan
		KUPD 6 Disdik. Link and Match SMK dan DUDI terutama dengan KEK Sei Mangke, KIM dan DUDI lainnya berbasis kearifan lokal	Dinas Pendidikan
		KUPD 7 Disdik. Pembentukan SMA Terbuka dengan sistem Pembelajaran Jarak Jauh	Dinas Pendidikan
		KUPD 8 Disdik. Revitalisasi Bangunan Sekolah	Dinas Pendidikan
		KUPD 1 Dinas Perpustakaan dan Arsip. Penyediaan Fasilitas Perpustakaan Sekolah Menengah untuk peningkatan Akreditasi Sekolah, minat baca dan literasi siswa	Dinas Perpustakaan dan Arsip

NO	PSN	PENYELARASAN PHTC/PSD/KUPD	PD PENANGUNGJAWAB
c	Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran	PSD 1. Pemenuhan 100% Fasilitas Listrik dan Layanan Internet pada Seluruh SMA/SMK/SLB di Sumatera Utara	Dinas Pendidikan
		PSD 2. Pembangunan 4 SMA/SMK/SLB Unggulan (Nias/SMA - 2026, Asahan/SMK - 2027, Samosir/SMK - 2028, Karo/SLB - 2029)	Dinas Pendidikan
		PSD 4. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru	Dinas Pendidikan
		KUPD 7 Disdik. Pembentukan SMA Terbuka dengan sistem Pembelajaran Jarak Jauh	Dinas Pendidikan
		KUPD 8 Disdik. Revitalisasi Bangunan Sekolah	Dinas Pendidikan
d	Makan Bergizi Gratis	PHTC 1: Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) Kepulauan Nias (2026), Kepulauan Nias dan Pantai Barat (2027), Kepulauan Nias , Pantai Barat dan Dataran Tinggi (2028), Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur (2029) 33 Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan
		PHTC 2: Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program Universal Health Coverage (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 2030).	Dinas Kesehatan

NO	PSN	PENYELARASAN PHTC/PSD/KUPD	PD PENANGUNGJAWAB
		KUPD 1 Dinkes. Dukungan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis- KESUMA SEHAT	Dinas Kesehatan
		KUPD 3 Dinkes. Pencegahan dan Penurunan Stunting	Dinas Kesehatan
5	Pertumbuhan Ekonomi		
a	Pengendalian Inflasi	PHTC 3: Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP)	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
		PSD 12. Pelaksanaan Program Pasar Murah Bergerak (PMB)	Disperindag ESDM
		PSD 24. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Unggulan Padi, Jagung, Cabai Merah, dan bawang merah	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
		PSD 25. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Peternakan unggulan	DISBUNAK
		PSD 26. Program pengembangan bibit unggul pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
		PSD 27. Fasilitasi Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
		KUPD 4 Dinas Ketapang TPH. Gerakan Pangan Murah	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
		KUPD 1 Biro Perekonomian. Fasilitasi dan Koordinasi TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah)	Biro Perekonomian

NO	PSN	PENYELARASAN PHTC/PSD/KUPD	PD PENANGUNGJAWAB
b	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	PSD 27. Fasilitasi Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
		PSD 48. Peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDes	Dinas Koperasi UMKM
		KUPD 1 Diskop UMKM. Pengoperasian, Pengembangan dan Optimasi KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih)	Dinas Koperasi UMKM
c	Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	PSD 17. BUMD Reform Program (Penguatan Peran BUMD sebagai Motor Ekonomi)	Biro Perekonomian
		PSD 18. Pemanfaatan Aset barang milik daerah melalui kerja sama ekonomi	BKAD
		PSD 35. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Bappelitbang

NO	PSN	PENYELARASAN PHTC/PSD/KUPD	PD PENANGUNGJAWAB
		PSD 36. Kerjasama APIP dan APH dalam Pendampingan Proyek Strategis dan Kegiatan Unggulan Daerah melalui pendampingan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan serah terima kegiatan proyek strategis	Inspektorat
		PSD 37. Pemanfaatan Satu Data SUMUT pusat data dan informasi pembangunan	Dinas Kominfo
		KUPD 1 BKAD. Belanja Transfer ke Kabupaten/Kota	BKAD
		KUPD 1 Bapenda. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda
d	Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)	PSD 15. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pertanian dan pariwisata	DISBUDPAREKRAF DAN DINAS KETAPANG TPH
		PSD 16. Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan di Kawasan Industri Sumatera Utara	DISPERINDAG ESDM
		PSD 19. Pengembangan Kawasan Perkebunan (Kelapa, Kopi, Aren)	DISBUNAK
		PSD 20. Pengembangan Kawasan Unggulan Perikanan Tangkap dan Budidaya	DISKANLA
		KUPD 1 DPMPTSP. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	DPMPTSP

NO	PSN	PENYELARASAN PHTC/PSD/KUPD	PD PENANGUNGJAWAB
		KUPD 2 DPMPTSP. Penyusunan Peta Potensi Investasi (PPI) Provinsi	DPMPTSP
		KUPD 3 DPMPTSP. Optimalisasi pelayanan perizinan berbasis resiko	DPMPTSP
		KUPD 6 Disdik. Link and Match SMK dan DUDI terutama dengan KEK Sei Mangke, KIM dan DUDI lainnya berbasis kearifan lokal	Dinas Pendidikan
		KUPD 1 Disnaker. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan penempatan tenaga kerja	Dinas Ketenagakerjaan
e	Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	PSD 21. Pengawasan Konservasi Laut SEMESTA (Pemberdayaan Nelayan Sebagai Pasukan Penjaga Laut)	DISKANLA
		PSD 22. Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir berbasis Masyarakat	DLHK
		PSD 42. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir	Dinas PUPR
		PSD 43. Pembangunan TPST Regional	Dinas PUPR
		PSD 44. Pembangunan PLTSa	DISPERINDAG ESDM
		PSD 45. Pengembangan SPAL Regional	Dinas PUPR
		PSD 46. Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati	DLHK

NO	PSN	PENYELARASAN PHTC/PSD/KUPD	PD PENANGUNGJAWAB
		KUPD 1 DLHK. Program Komunitas untuk Iklim dan Adiwiyata	DLHK
		KUPD 2 DLHK. Kesiapsiagaan Karhutla Provinsi Sumatera Utara	DLHK
		KUPD 3 DLHK. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	DLHK
		KUPD 2 BPBD. Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)	BPBD
PSN KHUSUS UNTUK SUMATERA UTARA			
1	Pengembangan KEK Sei Mangkei	PSD 16. Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan di Kawasan Industri Sumatera Utara	DISPERINDAG ESDM
		KUPD 6 Disdik. Link and Match SMK dan DUDI terutama dengan KEK Sei Mangke, KIM dan DUDI lainnya berbasis kearifan lokal	Dinas Pendidikan
2	Bioethanol (Berbasis Tebu)	PSD 16. Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan di Kawasan Industri Sumatera Utara	DISPERINDAG ESDM
		PSD 23. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (PLTS Pompa Air Untuk Irigasi Pertanian/PLTA Mikrohidro dan lainnya)	DISPERINDAG ESDM
		PSD 44. Pembangunan PLTSa	DISPERINDAG ESDM

NO	PSN	PENYELARASAN PHTC/PSD/KUPD	PD PENANGUNGJAWAB
3	Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, dan Rumput Laut	PSD 16. Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan di Kawasan Industri Sumatera Utara	DISPERINDAG ESDM
		PSD 19. Pengembangan Kawasan Perkebunan (Kelapa, Kopi, Aren)	DISBUNAK
		KUPD 6 Disdik. Link and Match SMK dan DUDI terutama dengan KEK Sei Mangke, KIM dan DUDI lainnya berbasis kearifan lokal	Dinas Pendidikan

3.3.2.3. **Industri Unggulan Provinsi Sumatera Utara**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038, bahwa industri unggulan provinsi yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 20. Industri Unggulan Provinsi Sumatera Utara

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri
1	Industri Pangan	Industri Olahan Ikan dan Hasil Laut
		Industri Olahan Coklat
		Industri Olahan Kelapa
		Industri Olahan Kopi
		Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayuran
2	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	Industri Tekstil
		Industri Kulit dan Alas Kaki
		Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu
3	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri	Industri Mesin dan Perlengkapan
		Industri Komponen
		Industri Barang dari Aluminium
4	Industri Hulu Agro	Industri Olahan Karet
		Industri Olahan Sawit
		Industri Oleofood
		Industri Oleokimia
		Industri Kemurgi
5	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri Pengolahan dan Pemurnian Bauksit
		Industri Keramik/Kaca
		Industri Pengolahan Granit
6	Industri Kimia Dasar	Industri Kimia Organik
		Industri Karet Alam dan Sintetik

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Provinsi Sumatera Utara sebagaimana ditetapkan, diperlukan pelaksanaan berbagai program strategis. Program-program tersebut mencakup: pembangunan sumber daya industri; penyediaan sarana dan prasarana industri; peningkatan kerja sama dengan berbagai lembaga, baik dalam maupun luar negeri serta antar pemerintah daerah; pengembangan kawasan industri; pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM); serta penyempurnaan sistem perizinan dan kebijakan perpajakan daerah yang mendukung pertumbuhan sektor industri. Pelaksanaan program-program tersebut didukung oleh strategi berikut:

1. **Penguatan pasokan bahan baku industri** yang berkualitas dan berkelanjutan.
2. **Pengembangan industri pengolahan** berbasis sumber daya unggulan seperti karet, sawit, kelapa, dan aluminium, dengan struktur industri yang kuat dan berdaya saing.

3. **Peningkatan kompetensi industri daerah** sesuai komoditas basis dari masing-masing industri unggulan.
4. **Penguatan SDM dan kelembagaan pelaku usaha**, serta konektivitas antar unit usaha dalam rantai industri.
5. **Perbaikan iklim usaha industri** yang kondusif, inklusif, dan bertanggung jawab.
6. **Peningkatan kerja sama lintas institusi**, termasuk antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga penelitian, dan mitra lainnya.
7. **Peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung industri**, termasuk akses ke bahan baku dan pasar.
8. **Pengembangan kawasan industri** secara terencana dan terintegrasi sesuai dengan arah pembangunan wilayah.

Pembangunan industri menjadi salah satu perhatian di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara, yang terhubung dengan pelaksanaan Misi kedua yaitu “Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah”, dan tertuang dalam beberapa arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan infrastruktur dan teknologi kawasan industri strategis
2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kawasan industri
3. Penguatan kemitraan dan akses pasar bagi hasil pertanian
4. Penguatan sistem logistik dan distribusi untuk menjamin kelancaran dan keterjangkauan akses pasar
5. Peningkatan transformasi digital pelaku IKM dan UMKM
6. Mendorong kolaborasi antara industri besar, startup, dan UMKM untuk memperkuat rantai nilai dan inovasi usaha
7. Pengembangan sentra industri kreatif terpadu di Kawasan Sport Center Sumatera Utara
8. Meningkatkan kapasitas dan relevansi pelatihan kerja
9. Mengembangkan pusat pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada keterampilan yang relevan dengan kebutuhan bioindustri dan pariwisata
10. Mengembangkan pusat pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada keterampilan yang relevan dengan kebutuhan bioindustri dan pariwisata
11. Mendorong pengembangan kawasan industri dan klaster bioindustri
12. Mendukung peningkatan produksi biodiesel dan hilirisasi kelapa sawit
13. Peningkatan nilai tambah sektor perkebunan melalui dukungan hilirisasi dan keberlanjutan produksi

14. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah kawasan unggulan perikanan tangkap dan budidaya
15. Pengembangan diversifikasi produk olahan cabai merah
16. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah kawasan perkebunan kelapa, kopi, dan aren
17. Meningkatkan daya tarik investasi, menjamin kepastian berusaha, dan menciptakan iklim usaha yang transparan
18. Memperkuat industri regional dan bioindustri melalui investasi berskala besar
19. Menerapkan teknologi hijau dan praktik berkelanjutan dalam bioindustri
20. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
21. Penguatan kemitraan riset dan inovasi yang bernilai tambah ekonomi dan ramah lingkungan
22. Penguatan infrastruktur dan teknologi kawasan industri strategis
23. Penguatan kolaborasi riset dan inovasi dengan perguruan tinggi, perusahaan, dan lembaga penelitian
24. Mendorong penerapan ekonomi sirkular
25. Penguatan kemitraan dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah
26. Mendorong pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung pelabuhan perikanan
27. Memperkuat infrastruktur desa untuk mendukung pengembangan bioindustri dan Pariwisata

3.3.2.4. Rencana Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola BUMD yang sehat, profesional, dan berorientasi pada hasil, Pemerintah Daerah akan mengambil langkah-langkah strategis guna mengatasi berbagai permasalahan yang telah teridentifikasi. Fokus utama diarahkan pada penguatan kelembagaan, perbaikan tata kelola, serta optimalisasi fungsi ekonomi dan sosial BUMD, yaitu:

1) Pemenuhan Modal Dasar dan Penguatan Permodalan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan modal dasar masing-masing BUMD dan menyusun skema penyertaan modal daerah yang lebih terukur, akuntabel, dan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah. Selain itu, akan didorong pemanfaatan sumber

pembiayaan alternatif seperti kerja sama investasi strategis dengan pihak swasta (*public-private partnership*), penerbitan obligasi daerah (jika relevan), atau pengelolaan aset produktif untuk mendukung permodalan BUMD secara mandiri.

2) Penataan Fokus Usaha (*Core Business*)

Diperlukan peninjauan ulang terhadap ruang lingkup usaha masing-masing BUMD guna mendorong spesialisasi dan efisiensi. Melalui proses pemetaan bisnis dan kajian kelayakan usaha, BUMD akan diarahkan untuk fokus pada sektor-sektor yang relevan dengan kebutuhan daerah, memiliki potensi ekonomi yang tinggi, serta tidak tumpang tindih dengan BUMD lain maupun entitas usaha daerah lainnya. Konsolidasi atau penggabungan BUMD dengan bidang usaha sejenis juga dapat menjadi pilihan dalam rangka efisiensi kelembagaan.

3) Optimalisasi Aset yang *Idle*

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong percepatan inventarisasi aset BUMD, termasuk penilaian terhadap potensi ekonomi dan kelayakan pemanfaatannya. Aset-aset yang belum dimanfaatkan secara optimal akan dijadikan bagian dari strategi pengembangan usaha, baik melalui pengelolaan langsung oleh BUMD maupun melalui skema kerja sama dengan mitra strategis. Aset yang tidak relevan dengan kegiatan usaha inti juga akan ditinjau untuk potensi divestasi atau reposisi pemanfaatan.

4) Tata Kelola Aset-aset yang dimanfaatkan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan Pemetaan dan Klasifikasi Aset dengan mengidentifikasi seluruh aset BUMD, baik yang telah maupun yang belum dimanfaatkan, serta mengklasifikasikan status hukum dan penggunaannya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga melakukan penguatan tata kelola kerja sama aset BUMD melalui peninjauan kembali seluruh perjanjian kerja sama yang telah berjalan, termasuk audit legal, audit aset, evaluasi kinerja keuangan. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan penyusunan regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap seluruh bentuk kerja sama pemanfaatan aset agar tetap dalam kendali dan kepemilikan daerah serta penegakan kebijakan pembatasan penggunaan aset sebagai jaminan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, serta pengawasan dan persetujuan yang melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

5) Penguatan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Implementasi prinsip GCG akan menjadi salah satu pilar utama dalam pengelolaan BUMD. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menetapkan pedoman dan standar tata kelola yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Penguatan fungsi pengawasan oleh komisaris/dewan pengawas, peningkatan kapasitas manajemen, serta seleksi Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas berbasis meritokrasi akan menjadi prioritas. Selain itu, pelaporan kinerja secara berkala dan berbasis kinerja (*Key Performance Indicators*) akan diterapkan secara konsisten.

6) Keikutsertaan dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Selain APBD untuk pendanaan Pembangunan, Non APBD Provinsi Sumatera Utara yang lainnya adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). TJSL diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut juga berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Dalam artian bahwa TJSL yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah dari masyarakat tetapi tanggung jawab ini haruslah berkesinambungan sampai waktu yang cukup panjang serta mendukung pada program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Rencana pengembangan BUMD ke depan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan sejumlah langkah strategis guna memastikan bahwa BUMD dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan penyumbang signifikan terhadap PAD, antara lain :

- 1) Transformasi BUMD menjadi entitas bisnis yang modern, adaptif, dan berbasis digital, khususnya dalam pelayanan publik dan pengelolaan usaha berbasis teknologi informasi.
- 2) Pengembangan BUMD berbasis potensi unggulan daerah, seperti sektor energi, pangan, air minum, pariwisata, dan jasa keuangan, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.
- 3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) BUMD melalui pelatihan berkelanjutan, program sertifikasi, dan rekrutmen berbasis kompetensi.
- 4) Integrasi perencanaan BUMD dalam sistem pembangunan daerah, agar sinergi antara kebijakan BUMD dan RPJMD dapat terwujud secara konkret.

- 5) Peningkatan transparansi dan partisipasi publik, termasuk dalam penyampaian laporan keuangan dan kinerja, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik.
- 6) Penyiapan pengaturan terkait pemanfaatan Aset dengan Pihak Ketiga.
- 7) Penyiapan terhadap pengaturan terkait pemanfaatan dana CSR/TJSL yang mendukung Visi dan Misi Program Prioritas.

Dengan pelaksanaan strategi tersebut secara konsisten, diharapkan BUMD dapat berkembang menjadi lembaga usaha yang sehat, profesional, dan berdaya saing, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif seperti pemberian PAD / Deviden. Berikut target PAD BUMD berdasarkan Tabel 3. 23.

Tabel 3. 21. Target PAD/Deviden BUMD kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

No	BUMD	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029
1.	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	286.000.000.000	292.000.000.000	302.000.000.000	312.000.000.000	322.000.000.000
2.	Perumda Tirtanadi	35.000.000.000	35.500.000.000	36.000.000.000	38.000.000.000	40.000.000.000
3.	PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda)	2.700.000.000	3.400.000.000	5.300.000.000	6.300.000.000	7.300.000.000
4.	PD. Aneka Industri dan Jasa Provsu PT. Perkebunan Sumatera Utara	208.000.000	225.000.000	250.000.000	275.000.000	300.000.000
5.	(Perseroda)	0	0	100.000.000	300.000.000	500.000.000
6.	PT. Dhirga Surya Sumatera Utara	508.000.000	625.000.000	650.000.000	675.000.000	700.000.000
7.	PT. Jamkrida Sumut (Perseroda)	0	0	100.000.000	200.000.000	300.000.000
	Jumlah Total	324.416.000.000	331.750.000.000	344.400.000.000	357.750.000.000	371.100.000.000

Sumber: Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2025

3.3.2.5. Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Implementasi program-program strategis yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Utara tersebut diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja indikator-indikator makro di tingkat kabupaten/kota periode 2025-2030. Berbagai intervensi di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, industri, pertanian, dan ekonomi kreatif dirancang tidak hanya untuk menjawab kebutuhan sektoral, tetapi juga untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Capaian seperti peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka, serta peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi tolok ukur utama dalam mengukur keberhasilan dari visi Sumatera Utara yaitu Kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan.

Provinsi Sumatera Utara mendukung implementasi visi nasional periode 2025-2029 melalui penyelarasan intervensi kebijakan, termasuk dukungan dalam pencapaian target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Target yang telah ditetapkan ini kemudian diturunkan ke 33 kabupaten kota sesuai dengan dinamika kondisi eksisting masing-masing wilayah, dan harapan kinerjanya selama lima tahun ke depan. Sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara dapat diklasifikasi ke dalam 4 aspek kinerja pembangunan, antara lain (1) Peningkatan pendapatan, (2) Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan, (3) Peningkatan daya saing SDM, dan (4) Penurunan emisi GRK dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. Keempat aspek ini diterjemahkan ke dalam 9 indikator, yaitu (1) Laju Pertumbuhan Ekonomi, (2) PDRB per Kapita, (3) Kontribusi PDRB Provinsi, (4) Tingkat Kemiskinan, (5) Rasio Gini, (6) Tingkat Pengangguran Terbuka, (7) Indeks Modal Manusia, (8) Penurunan Intensitas Emisi GRK, dan (9) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Derivasi target ini penting dilakukan agar pencapaian seluruh kabupaten kota benar-benar berpengaruh terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan provinsi. Misalnya, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2029 ditargetkan sebesar 7,6-8,0%. Target ini hanya bisa terealisasi jika Kabupaten Labuhanbatu Utara juga mencapai pertumbuhan sebesar 7,00-7,37%, Kota Medan mencapai 7,6-8,0%, Kabupaten Nias mencapai 6,11-6,43%, serta kabupaten kota lainnya juga mencapai target yang telah digariskan, karena pencapaian provinsi adalah agregasi dari kinerja seluruh kabupaten kota. Untuk selengkapnya, target kinerja dari sembilan indikator sasaran pembangunan pada lingkup kabupaten kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 22. Target Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota Sumatera Utara Tahun 2025-2029

No	Kabupaten Kota	Peningkatan Pendapatan									Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan									Peningkatan Daya Saing SDM			Penurunan Intensitas Emisi GRK dan Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup					
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			PDRB per Kapita (Rp. Juta)			Kontribusi PDRB Kabupaten Kota (%)			Tingkat Kemiskinan (%)			Gini Rasio			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru)			Penurunan Emisi GRK (tonCO2eq)			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
		2024	2025	2029	2024	2025	2029	2024	2025	2029	2024	2025	2029	2024	2025	2029	2024	2025	2029	2024	2025	2029	2024	2025	2029	2024	2025	2029
1	Kab. Labuhanbatu Utara	4,24	4,79-5,16	7,00-7,37	89,49	96,42-96,76	135,05-137,42	3,19	3,19	3,13	8,98	7,51-7,56	2,46-3,05	0,239	0,237	0,228	4,6	4,00-4,24	3,97-4,27	74,4	74,98-75,48	79,43-79,93	NA	1-2	8-11	NA	70,17	70,87
2	Kota Medan	5,07	5,20-5,60	7,60-8,00	132,57	142,91-143,46	212,71-216,74	28,74	28,45	28,45	7,94	6,78-7,29	3,95-5,30	0,356	0,362-0,372	0,349-0,359	8,13	8,00-8,08	7,54-7,71	82,76	82,99-83,49	86,42-86,92	NA	6.320	8.308	NA	67,88	68,73
3	Kab. Padangsidimpuan	5,01	5,30-5,71	7,75-8,15	35,72	40,41-40,57	58,19-59,31	0,75	0,79	0,79	6,23	4,70-5,20	1,29-1,98	0,296	0,296-0,294	0,288-0,286	7,17	7,13-7,20	6,41-6,99	76,96	77,14-77,64	80,29-80,79	NA	85.343	141.713	NA	76,12	76,81
4	Kota Tanjungbalai	4,91	5,33-5,75	7,79-8,20	65,75	70,35-70,62	102,37-104,35	1,06	1,05	1,06	11,97	10,34-10,88	4,91-6,49	0,236	0,236-0,234	0,226-0,224	4,08	3,69-4,06	3,18-3,78	71,1	71,51-72,01	75,05-75,55	NA	80.893	134.313	NA	70,18	70,85
5	Kab. Dairi	4,97	5,30-5,71	7,75-8,15	38,39	44,49-44,66	63,43-64,65	1,11	1,19	1,20	7,1	5,64-6,15	1,84-2,67	0,215	0,215-0,213	0,206-0,204	1,43	1,1-1,40	0,58-1,01	73,92	74,36-74,86	78,27-78,77	NA	133.286	228.363	NA	76,90	77,58
6	Kab. Langkat	4,98	5,41-5,82	7,89-8,31	57,85	62,82-63,06	92,90-94,72	5,44	5,46	5,51	9,04	7,52-8,04	3,07-4,20	0,26	0,256-0,246	0,231-0,226	6,08	5,71-6,10	5,24-5,92	72,73	72,89-73,39	75,91-76,41	NA	180.758	297.673	NA	82,01	82,70
7	Kab. Serdang Bedagai	5,01	5,20-5,60	7,60-8,00	60,74	64,04-64,28	92,93-94,69	3,66	3,57	3,57	6,97	5,64-6,15	1,84-2,67	0,242	0,242-0,240	0,234-0,232	4,88	4,55-4,89	4,10-4,61	72,47	72,82-73,32	76,62-77,12	NA	154.428	241.781	NA	73,88	74,72
8	Kab. Tapanuli Tengah	4,15	4,79-5,16	7,00-7,37	34,61	39,16-39,30	53,99-54,93	1,19	1,26	1,23	11,8	10,15-10,88	4,91-6,49	0,234	0,234-0,232	0,226-0,224	7,45	7,12-7,48	6,72-7,28	71,52	71,87-72,37	75,48-75,98	NA	142.489	242.844	NA	81,81	82,49
9	Kab. Tapanuli Selatan	5,12	5,41-5,82	7,89-831	67,22	71,21-71,49	104,34-106,39	1,86	1,82	1,84	6,92	5,64-6,15	1,84-2,67	0,206	0,206-0,204	0,198-0,196	3,41	2,98-3,30	2,49-3,00	72,14	72,51-73,01	76,12-76,62	NA	223.462	390.538	NA	84,13	84,82
10	Kab. Padang Lawas Utara	4,99	5,30-5,71	7,75-8,15	63,54	67,66-67,92	96,41-98,27	1,55	1,54	1,55	8,97	7,52-8,04	3,07-4,20	0,223	0,223-0,220	0,214-0,212	3,99	3,64-3,97	3,17-3,66	72,32	72,77-72,97	76,74-77,24	NA	182.056	316.647	NA	75,21	75,89
11	Kab. Padang Lawas	5,02	5,30-5,71	7,75-8,15	65,28	66,30-66,56	94,99-96,83	1,60	1,51	1,52	7,87	6,58-7,10	2,46-3,43	0,224	0,224-0,214	0,208-0,206	5,47	5,14-5,48	4,70-5,22	71,27	71,84-72,34	76,48-76,98	NA	174.849	302.722	NA	75,83	76,51
12	Kab. Nias	3,89	4,18-4,50	6,11-6,43	34,08	36,51-36,63	50,48-51,26	0,46	0,46	0,43-0,44	14,89	12,69-13,24	6,45-8,32	0,247	0,247-0,245	0,238-0,236	2,1	1,77-2,08	1,26-1,71	65,55	66,21-66,71	71,28-71,78	NA	101.787	166.596	NA	77,56	78,24
13	Kab. Nias Utara	3,64	4,08-4,39	5,96-6,27	30,19	32,16-32,26	43,33-43,98	0,42	0,41	0,39	21,5	19,27-19,77	10,75-13,66	0,234	0,234-0,232	0,226-0,224	2,82	2,49-2,81	1,99-2,46	65,62	66,29-66,79	71,16-71,66	NA	109.850	181.101	NA	75,11	75,80
14	Kota Sibolga	3,92	4,85-5,22	7,07-7,45	78,49	85,84-86,14	124,87-127,08	0,63	0,63	0,62	11,39	9,87-10,31	4,61-6,03	0,313	0,313-0,310	0,304-0,302	6,52	6,19-6,54	5,77-6,35	75,66	75,87-76,37	78,96-79,46	NA	80.778	133.702	NA	73,48	74,16
15	Kota Binjai	4,66	4,79-5,16	7,00-7,37	50,75	58,51-58,71	83,33-84,79	1,36	1,45	1,42	4,75	6,39-6,72	2,39-3,28	0,312	0,312-0,311	0,306-0,304	5,44	5,07-5,45	4,59-5,29	78,1	78,45-78,95	81,96-82,46	NA	85.612	147.525	NA	74,19	74,87
16	Kab. Simalungun	4,89	5,61-6,04	8,19-8,62	56	60,89-61,14	89,16-90,98	5,14	5,18	5,28-5,29	7,72	6,11-6,62	2,15-3,05	0,257	0,257-0,255	0,248-0,246	5,17	4,82-5,16	4,38-4,89	74,97	75,29-75,79	79,01-79,51	NA	173.083	288.935	NA	74,46	75,15

No	Kabupaten Kota	Peningkatan Pendapatan									Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan									Peningkatan Daya Saing SDM			Penurunan Intensitas Emisi GRK dan Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup					
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			PDRB per Kapita (Rp. Juta)			Kontribusi PDRB Kabupaten Kota (%)			Tingkat Kemiskinan (%)			Gini Rasio			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru)			Penurunan Emisi GRK (tonCO2eq)			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
		2024	2025	2029	2024	2025	2029	2024	2025	2029	2024	2025	2029	2024	2025	2029	2024	2025	2029	2024	2025	2029	2024	2025	2029	2024	2025	2029
17	Kota Tebing Tinggi	3,37	4,44-4,78	6,48-6,82	43,51	47,83-47,98	67,24-68,33	0,69	0,70	0,67	8,79	7,52-8,04	3,07-4,20	0,335	0,335-0,333	0,326-0,324	6,18	5,83-6,18	5,40-5,60	77,45	77,90-78,40	81,57-82,07	NA	82.711	139.333	NA	67,67	68,35
18	Nias Selatan	3,82	4,18-4,50	6,11-6,43	23,4	23,48-23,55	31,69-32,18	0,80	0,74	0,70-0,71	16,32	14,57-15,04	7,61-9,84	0,247	0,247-0,245	0,238-0,236	3,03	2,7-3,02	2,21-2,68	65,02	65,70-66,20	70,46-70,96	NA	169.980	292.956	NA	79,40	80,09
19	Kota Pematangsiantar	4,61	4,85-5,22	7,07-7,45	62,62	75,32-75,58	109,24-111,18	1,51	1,68	1,65	7,20	5,64-6,15	1,84-2,67	0,297	0,297-0,295	0,288-0,285	8	7,63-8,04	7,24-7,89	81,17	81,66-82,16	85,92-86,42	NA	87.239	152.995	NA	71,59	72,44
20	Kab. Deli Serdang	5,36	5,61-6,04	8,19-8,62	73,93	79,38-79,70	116,53-118,90	13,20	13,14	13,41-13,42	3,44	2,35-2,74	0,17-0,31	0,262	0,262-0,260	0,254-0,252	8,02	7,65-8,06	7,26-7,91	76,92	77,02-77,22	79,78-80,28	NA	186.965	306.667	NA	72,50	73,35
21	Kab. Labuhanbatu	5,06	5,41-5,82	7,89-8,31	97,59	104,00-104,41	152,33-155,32	4,43	4,37	4,41	7,84	6,58-7,10	2,46-3,43	0,251	0,251-0,250	0,244-0,242	5,9	5,57-5,92	5,14-5,67	74,18	74,61-75,11	78,22-78,72	NA	126.382	209.934	NA	74,15	75,00
22	Kab. Asahan	4,68	5,30-5,71	7,75-8,15	70,61	74,53-74,82	108,23-11-,31	5,01	4,90	4,92	8,12	6,58-7,10	2,46-3,43	0,248	0,248	0,246-0,244	5,94	5,69-5,96	5,26-5,74	72,09	72,30-72,80	75,46-75,96	NA	144.122	249.973	NA	75,24	75,93
23	Kab. Karo	4,22	4,90-5,27	7,15-7,53	67,69	75,24-75,51	107,10-109,02	2,52	2,59	2,55	7,37	6,20-6,53	2,15-2,98	0,214	0,214	0,212-0,210	2,4	2,07-2,38	1,57-2,02	76,55	76,90-77,40	80,52-81,02	NA	130.888	223.175	NA	79,23	79,92
24	Kab. Labuhanbatu Selatan	4,89	5,20-5,60	7,60-8,00	124,51	129,49-129,98	184,73-188,22	3,65	3,53	3,53	7,73	6,11-6,72	2,15-3,13	0,212	0,212-0,210	0,203-0,201	3,24	2,87-3,23	2,34-2,88	73,67	74,14-74,64	78,47-78,97	NA	103.859	178.173	NA	76,21	76,89
25	Kab. Mandailing Natal	4,83	5,00-5,38	7,30-7,68	40,12	41,89-42,04	59,30-60,38	1,77	1,71	1,70	8,69	7,05-7,76	2,76-3,82	0,25	0,248-0,238	0,229-0,226	7,22	6,89-7,25	6,48-7,04	69,33	69,68-70,18	73,51-74,01	NA	247.042	432.961	NA	81,15	81,84
26	Kab. Batu Bara	4,12	4,44-4,78	6,48-6,82	108,18	120,96-121,36	167,51-170,24	4,13	4,28	4,11-4,12	10,94	9,40-9,93	4,30-5,72	0,258	0,256-0,254	0,248-0,246	5,75	5,45-5,80	5,01-5,54	70,83	71,29-71,79	74,96-75,46	NA	102.761	166.937	NA	71,13	71,97
27	Kab. Gunungsitoli	3,84	4,18-4,50	6,11-6,43	50,41	51,38-51,54	70,04-71,12	0,64	0,60	0,57	14,72	12,69-13,24	6,51-8,47	0,277	0,277-0,275	0,268-0,265	3,3	2,97-3,29	2,48-2,96	71,41	71,70-72,20	75,38-75,88	NA	84.993	141.478	NA	78,70	79,38
28	Kab. Nias Barat	3,89	4,18-4,50	6,11-6,43	26,03	27,93-28,02	37,59-38,17	0,22	0,22	0,21	22,68	20,21-20,91	11,36-14,50	0,219	0,219-0,215	0,208-0,206	1	0,96-0,97	0,62-0,64	64,67	65,26-65,76	69,91-70,41	NA	89.025	145.693	NA	75,04	75,72
29	Kab. Pakpak Bharat	5,02	5,30-5,71	7,75-8,15	30,57	34,39-34,52	48,98-49,92	0,15	0,16	0,16	6,87	5,64-6,15	1,84-2,67	0,262	0,250-0,240	0,242-0,232	0,97	0,93-0,94	0,62-0,64	70,36	70,86-71,36	75,06-75,56	NA	127.032	217.018	NA	83,18	83,87
30	Kab. Humbang Hasundutan	4,79	5,00-5,38	7,30-7,68	39,94	44,89-45,06	64,37-65,54	0,72	0,75	0,74	8,44	7,05-7,47	2,76-3,74	0,302	0,302-0,300	0,324-0,322	0,92	0,86-0,87	0,52-0,53	71,59	72,11-72,61	75,83-76,33	NA	152.910	257.312	NA	78,32	79,00
31	Kab. Tapanuli Utara	4,77	5,00-5,38	7,30-7,68	34,49	40,96-41,11	58,78-59,85	0,98	1,08	1,07	8,21	6,58-7,10	2,46-3,43	0,242	0,242-0,240	0,234-0,232	1,21	0,88-1,18	0,35-0,78	75,23	75,51-76,01	78,97-79,47	NA	213.096	364.026	NA	79,51	80,19
32	Kab. Samosir	5,02	5,30-5,71	7,75-8,15	42,63	49,35-49,54	71,77-73,15	0,53	0,57	0,57	11,63	9,87-10,31	4,61-6,03	0,238	0,238-0,236	0,230-0,228	0,89	0,85-0,86	0,43-0,45	72,88	73,17-73,67	76,98-77,48	NA	124.353	209.615	NA	77,37	78,06

No	Kabupaten Kota	Peningkatan Pendapatan									Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan									Peningkatan Daya Saing SDM			Penurunan Intensitas Emisi GRK dan Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup					
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			PDRB per Kapita (Rp. Juta)			Kontribusi PDRB Kabupaten Kota (%)			Tingkat Kemiskinan (%)			Gini Rasio			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru)			Penurunan Emisi GRK (tonCO2eq)			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
		2024	2025	2029	2024	2025	2029	2024	2025	2029	2024	2025	2029	2024	2025	2029	2024	2025	2029	2024	2025	2029	2024	2025	2029	2024	2025	2029
33	Kabupaten Toba	4,84	5,10-5,49	7,45-7,84	47,45	57,74-57,96	82,83-84,37	0,90	1,01	1,01	8,07	6,58-7,10	2,46-3,43	0,348	0,348-0,346	0,340-0,338	1,09	0,74-1,04	0,21-0,67	76,91	77,12-77,62	80,34-80,84	NA	137.330	229.023	NA	76,61	77,30
	Sumatera Utara	5,03	5,20-5,60	7,60-8,00	73,57	78,4	115,3	5,2	5,2	5,3	7,19	6,96-7,46	2,82-3,82	0,306	0,303-0,305	0,287-0,291	5,6	5,27-5,56	4,74-5,20	N/A	0,54 (IMM)	0,57 (IMM)	N/A	1%	16,88%	73,96	77,2	77,87

3.4. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, disampaikan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) diterapkan untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapannya diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Adapun jenis-jenis pelayanan dasar yang dimaksud meliputi:

- a. pendidikan menengah;
- b. pendidikan khusus;
- c. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
- d. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
- e. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
- f. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;
- g. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
- h. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah provinsi;
- i. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
- j. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
- k. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
- l. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
- m. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- n. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu menjadi prioritas, dimana makna tidak mampu yang dimaksud antara lain:

- a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;

- c. kondisi bencana; dan/atau
- d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Ketentuan ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam memastikan pemenuhan pelayanan dasar yang wajib diberikan kepada masyarakat, dengan prioritas bagi kelompok yang tidak mampu dan rentan. Melalui penerapan SPM, pemerintah daerah berkewajiban menjamin bahwa setiap urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan dasar diselenggarakan sesuai jenis dan mutu yang ditetapkan, sehingga hak-hak dasar masyarakat dapat terpenuhi secara adil, merata, dan berkelanjutan. Selanjutnya, RPJMD Provinsi Sumatera Utara akan menguraikan secara rinci pelaksanaan SPM pada masing-masing urusan pemerintahan, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan urusan sosial.

A. Urusan Pendidikan

Dalam rangka mewujudkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu mengintegrasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan ke dalam dokumen RPJMD 2025–2029. Integrasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap anak usia sekolah memperoleh hak atas layanan pendidikan dasar yang layak, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan program prioritas pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Integrasi SPM bidang pendidikan juga diarahkan untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah ditentukan peruntukannya bagi bidang pendidikan, sehingga dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian target pelayanan dasar pendidikan di daerah. Dengan demikian, arah kebijakan dan program yang dijalankan tidak hanya berfokus pada peningkatan mutu, tetapi juga menjamin ketercukupan pendanaan dalam rangka pencapaian standar pelayanan pendidikan yang merata, terukur, dan berkesinambungan.

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Pendidikan, program ini diarahkan pada perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, serta peningkatan partisipasi pendidikan.

Untuk mendukung penerapan SPM urusan pendidikan, maka telah ditetapkan beberapa arah kebijakan yang beririsan, antara lain:

- a. Pemerataan akses infrastruktur pendukung pembelajaran digital
- b. Peningkatan kualitas dan kelayakan sarana prasarana pendidikan
- c. Peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas infrastruktur pendidikan bagi penyandang disabilitas
- d. Penguatan kapasitas dan distribusi merata tenaga pendidik
- e. Perluasan akses dan pemerataan kesempatan pendidikan
- f. Penguatan karakter pelajar melalui pengembangan minat, bakat, dan kreativitas
- g. Penguatan budaya baca dan literasi digital masyarakat
- h. Memastikan tersedianya pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara secara inklusif

Arah kebijakan ini selaras dengan strategi provinsi yang berfokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pelaksanaan urusan pendidikan bertujuan untuk pelaksanaan kinerja pemenuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan serta meningkatkan intelegktualitas dan karakter anak usia sekolah di Sumatera Utara. Indikator kinerja program terkait SPM yang ingin dicapai yaitu:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	- Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)
		- Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)

B. Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang sangat penting dalam pembangunan daerah karena menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat untuk hidup sehat. Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau, merata, dan bermutu sesuai amanat peraturan perundang-undangan serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Pemenuhan SPM ini menjadi tolok ukur utama dalam memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh pelayanan kesehatan esensial, mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, arah kebijakan dan

program kesehatan di daerah disusun untuk menjamin keberlangsungan pelayanan dasar kesehatan, sekaligus memperkuat sistem kesehatan daerah agar adaptif terhadap berbagai tantangan, termasuk masalah gizi, penyakit menular, penyakit tidak menular, hingga krisis kesehatan.

Penerapan SPM urusan kesehatan ini beririsan dengan beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a. Penguatan jaminan kesehatan masyarakat dan optimalisasi sistem informasi layanan kesehatan daerah
- b. Peningkatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan gratis, promotif, dan preventif bagi seluruh masyarakat
- c. Penguatan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular secara terintegrasi
- d. Peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas kesehatan yang merata dan berstandar
- e. Peningkatan ketersediaan dan pemerataan tenaga medis spesialis
- f. Peningkatan kualitas gizi masyarakat
- g. Memperkuat pelayanan kesehatan darurat dan responsif bagi masyarakat terdampak bencana maupun kejadian luar biasa (KLB)
- h. Memastikan tersedianya pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara secara inklusif

Arah kebijakan ini selaras dengan strategi provinsi yang berfokus pada Peningkatan Akses dan Mutu Kesehatan yang merata. Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, program ini diarahkan pada pemetaan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi; peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia sesuai standar; percepatan perbaikan gizi masyarakat; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular, serta kesehatan jiwa; penguatan kluster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis kesehatan dan penanganan gizi saat bencana; pemenuhan operasional pelayanan rumah sakit khusus

mata, serta peningkatan mutu pelayanan di Rumah sakit Haji Medan dan Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem.

Pelaksanaan urusan kesehatan ditujukan untuk pelaksanaan kinerja pemenuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan dan meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan. Adapun indikator kinerja program yang berkaitan dengan pemenuhan SPM yaitu:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	- Persentase ibu hamil ANC (antenatal care) 6 kali sesuai standard
		- Persentase Wasting (Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk)
		- Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi
		- Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
		- Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin Imunisasi Rutin Lengkap (IRL)

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi dan drainase, yang terkelola dengan baik merupakan fondasi utama bagi tumbuhnya aktivitas sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Melalui pengelolaan prasarana dan sarana yang terencana serta penataan ruang yang tertib, pemerintah daerah tidak hanya menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memperkuat daya saing daerah dan mengantisipasi risiko bencana. Penyelenggaraan urusan ini juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan infrastruktur.

Untuk mendukung penerapan SPM urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, maka telah ditetapkan beberapa arah kebijakan yang mengandung pemenuhan SPM, antara lain:

- a. Meningkatkan akses dan kualitas air minum serta sanitasi
- b. Pemerataan infrastruktur layanan dasar di kawasan afirmasi, terluar, dan terpencil
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pembangunan dan pengelolaan Sistem Pengolahan Air Limbah regional
- d. Memastikan tersedianya pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara secara inklusif

Beberapa arah kebijakan tersebut selaras dengan strategi provinsi yang mengarah kepada Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Ramah Lingkungan, serta Peningkatan Ketangguhan Lingkungan dan Mitigasi Risiko Bencana. Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/kota melalui pengembangan SPAM regional, hibah sarana prasarana SPAM perdesaan, dan fasilitasi pendampingan pengelolaan SPAM di kabupaten/kota.
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Regional, serta peningkatan prasarana sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat.

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditujukan untuk pelaksanaan kinerja standar pelayanan minimal yang meliputi:

- Tersedianya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman;
- Meningkatnya penyediaan Infrastruktur layanan dasar;

Tujuan dari urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas. Adapun indikator kinerja program terkait SPM yang ingin dicapai yaitu:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum layak minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)

D. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan perumahan dan kawasan permukiman menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat atas hunian yang layak, aman, dan sehat, khususnya bagi kelompok rentan yang terdampak bencana maupun relokasi akibat program pembangunan pemerintah. Pemenuhan rumah layak huni bukan hanya menjadi bagian dari pemulihan pascabencana, tetapi juga sebagai wujud perlindungan hak dasar warga negara dalam memperoleh tempat tinggal yang memadai. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen memfasilitasi penyediaan hunian layak bagi korban bencana dan masyarakat yang harus direlokasi akibat program pemerintah provinsi, sehingga kualitas hidup dan keberlanjutan sosial masyarakat tetap terjaga.

Penerapan SPM urusan perumahan dan kawasan permukiman didukung oleh arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Mendorong pembangunan permukiman layak, infrastruktur dasar, dan PSU yang memadai
- b. Pemerataan infrastruktur layanan dasar di kawasan afirmasi, terluar, dan terpencil
- c. Memastikan tersedianya pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara secara inklusif

Arah kebijakan tersebut bersentuhan dengan strategi provinsi untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Ramah Lingkungan. Rencana program prioritas urusan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Perumahan, program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pemberian stimulan bantuan untuk

pembangunan baru (PB), peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana, bantuan pembangunan baru rumah sederhana layak huni utamanya bagi masyarakat miskin (PB backlog), serta bantuan pembangunan rumah sederhana sehat relokasi program pemerintah provinsi.

Pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman ditujukan untuk pelaksanaan kinerja pemenuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan rakyat serta untuk memenuhi akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan. Indikator kinerja program yang berkaitan dengan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	- Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni
		- Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni

E. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam menjamin rasa aman, perlindungan, serta ketertiban di tengah masyarakat. Pemenuhan SPM ini menuntut terselenggaranya pelayanan dasar berupa penegakan peraturan daerah, penanganan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dalam menghadapi potensi gangguan maupun keadaan darurat. Sejalan dengan strategi Provinsi Sumatera Utara yang berfokus pada penguatan stabilitas sosial, keamanan, dan ketahanan masyarakat, program pembangunan diarahkan untuk memperkuat kapasitas aparatur, meningkatkan kualitas pembinaan masyarakat, serta mengoptimalkan peran satuan tugas perlindungan masyarakat (Satgas Linmas) agar setiap warga memperoleh jaminan rasa aman dan terlindungi.

Penerapan SPM urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat didukung oleh arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan sistem keamanan yang modern dan efektif

- b. Meningkatkan sinergi dan kemitraan antara aparat keamanan dan masyarakat
- c. Memperkuat upaya pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi guna menghentikan dan mengendalikan peredaran narkoba
- d. Memastikan tersedianya pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara secara inklusif

Arah kebijakan tersebut selaras dengan strategi provinsi yang berfokus untuk Penguatan Stabilitas Sosial, Keamanan, dan Ketahanan Masyarakat. Rencana program urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan untuk memenuhi SPM adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pembinaan masyarakat dan satgas Linmas.

Pelaksanaan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ditujukan untuk pelaksanaan kinerja pemenuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; serta untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Adapun indikator kinerja program terkait SPM yang ingin dicapai yaitu:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan
	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas
	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat
	Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya

F. Urusan Sosial

Urusan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti

fakir miskin, penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia, korban bencana, serta warga negara yang menghadapi permasalahan sosial. Pemenuhan hak dasar mereka tidak hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial. Melalui penyelenggaraan urusan ini, pemerintah daerah berupaya memastikan penyediaan layanan rehabilitasi sosial, serta menjamin pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana pada masa tanggap darurat.

Penerapan SPM urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat didukung oleh arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyaluran bantuan sosial tepat sasaran
- b. Peningkatan keterampilan dan kemandirian warga panti sosial
- c. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja
- d. Memperkuat rehabilitasi sosial dan penanganan bencana
- e. Memperkuat perlindungan sosial masyarakat rentan melalui koordinasi penghimpunan dan distribusi zakat secara efektif
- f. Memastikan tersedianya pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara secara inklusif

Arah kebijakan tersebut selaras dengan strategi provinsi untuk memperkuat Perlindungan Sosial. Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Rehabilitasi Sosial, program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang.
- b. Program Penanganan Bencana, program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial

Pelaksanaan urusan sosial ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

- Tersedianya Data Fakir Miskin
- Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial

- Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.
- Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota
- Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana
- Pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Indikator kinerja program terkait SPM yang ingin dicapai yaitu:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	- Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti
		- Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas
		- Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti
		- Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti
		- Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti
		- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti
		- Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas
		- Indeks Peranan Sosial
Penanganan Bencana	Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	- Persentase Korban Bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
		- Persentase masyarakat didaerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya
		- Persentase Korban bencana yang mendapatkan layananana pemulihan sosial

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi penjabaran program-program perangkat daerah, yang terhubung dengan visi dan misi Provinsi Sumatera Utara lima tahun ke depan. Ragam program nomenklatur perangkat daerah yang ditetapkan merupakan terjemahan praktis dari visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan. Adapun arah kebijakan Provinsi Sumatera Utara yang diturunkan ke dalam enam PHTC dan 17 Program Prioritas, melebur ke dalam program-program nomenklatur OPD. Kinerja pencapaian tujuan pembangunan Provinsi diukur melalui serangkaian indikator utama yang bersifat *ultimate outcome*, yang selanjutnya indikator-indikator terpilih menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah. Sementara itu, indikator-indikator yang digunakan untuk menterjemahkan tercapainya sasaran pembangunan, ditetapkan sebagai bagian dari Indikator Kinerja Daerah (IKD), bersama dengan IKU dan indikator lainnya yang merupakan indikator tujuan dari setiap urusan pemerintahan. Indikator tujuan dan sasaran pembangunan yang sifatnya lebih spesifik terhadap urusan-urusan tertentu digunakan pula sebagai Indikator Kinerja Utama Renstra pada OPD terkait.

Bab ini juga memuat pagu indikatif yang menggambarkan dukungan finansial serta level konsentrasi atas pelaksanaan program-program kerja OPD, yang saling terlibat dan berkolaborasi satu sama lainnya dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Penetapan program ini diikuti dengan penetapan target untuk masing-masing program beserta pagu indikatif setiap tahunnya. Pada akhir bab, juga disajikan komitmen Pemerintah Provinsi dalam pemenuhan pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal. Komitmen ini tergambar dari upaya pemenuhan pelayanan dasar melalui beberapa program OPD, target indikator, target pagu, maupun keterkaitannya dengan pencapaian IKD.

4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029, perangkat daerah memiliki peran yang sangat penting melalui penyelenggaraan program pembangunan sesuai bidang urusannya masing-

masing. Program-program ini disusun secara sistematis untuk memastikan keterhubungan antara perencanaan strategis dan implementasi di lapangan, sehingga arah pembangunan daerah dapat diwujudkan secara terukur.

Tabel berikut merangkum program perangkat daerah menurut urusan, perangkat daerah penanggung jawab, indikator *outcome* yang digunakan untuk mengukur keberhasilan, *baseline* capaian pada tahun 2024, serta target tahunan beserta pagu indikatifnya untuk periode 2025–2030. Penyajian ini dimaksudkan agar keterpaduan antara program, indikator, target, dan pembiayaan dapat tergambar secara jelas, sekaligus menjadi instrumen akuntabilitas dalam mengawal pencapaian pembangunan Provinsi Sumatera Utara lima tahun ke depan.

Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Gubernur terpilih di periode berikutnya. Adapun program-program perangkat daerah beserta pagu indikatif dijabarkan dalam setiap urusan, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1. Program Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar															
1.1	Urusan Pendidikan				3.469.301.113.245		3.790.039.168.907		3.903.740.343.974		4.020.852.554.294		4.141.478.130.923		4.265.722.474.850	Dinas Pendidikan
1.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				2.085.314.129.717		1.878.928.387.677		1.935.296.239.299		1.993.355.126.487		1.887.496.655.045		2.114.750.453.691	Dinas Pendidikan
1.1.2	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	78,59	78,59	1.908.115.612.285	79,4	1.534.621.601.330	79,975	1.580.660.249.370	80,55	1.628.080.056.851	81,125	1.676.922.458.557	81,7	1.727.230.132.313	Dinas Pendidikan
		Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus (APS)	65,84	65,84		74,38		75,6		76,82		78,04		79,26		Dinas Pendidikan
1.1.3	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	80	100		100	833.462.500	100	858.466.375	100	884.220.366	100	910.746.977	100	938.069.387	Dinas Pendidikan
1.1.4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru	100	100	149.218.799.534	100	153.971.365.402	100	158.590.506.364	100	163.348.221.555	100	168.248.668.202	100	173.296.128.248	Dinas Pendidikan
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	44,67	50,4		51,4		52,4		53,4		54,4		55,4		Dinas Pendidikan
1.1.5	Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	100	100	34.693.011.132	100	37.900.391.689	100	39.037.403.440	100	40.208.525.543	100	41.414.781.309	100	42.657.224.749	Dinas Pendidikan
1.1.6	Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	100	100	138.772.044.530	100	151.601.566.756	100	156.149.613.759	100	160.834.102.172	100	165.659.125.237	100	170.628.898.994	Dinas Pendidikan
1.2	Urusan Kesehatan				949.959.502.692		1.088.947.219.727		1.118.776.901.019		1.149.444.698.043		1.180.974.618.779		1.213.391.368.732	Dinas Kesehatan
a	Dinas Kesehatan				690.182.448.986		805.073.689.730		829.225.900.422		854.102.677.435		879.725.757.758		906.117.530.490	Dinas Kesehatan
1.2.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				283.756.733.211		278.810.770.409		291.263.700.370		291.846.227		292.429.920.226		292.429.920.226	Dinas Kesehatan
1.2.2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Persentase ibu hamil ANC (antenatal care) 6 kali sesuai standard	N/A	82	393.040.668.481	84	513.774.259.551	86	523.473.459.623	88	546.448.158.281	90	570.049.824.761	92	596.441.597.493	Dinas Kesehatan
		Persentase Wasting (Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk)	9	8		7,5		7		6,5		5		4		
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	100	100		100		100		100		100		100		

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin Imunisasi Rutin Lengkap (IRL)	N/A	65		70		75		80		85		90		
1.2.3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	N/A	3,88	7.413.056.444	3,92	9.709.676.820	4,07	11.709.676.820	4,23	12.880.644.502	4,4	14.168.708.952	4,58	14.168.708.952	Dinas Kesehatan
1.2.4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Alat Kesehatan serta PKRT yang memenuhi standar mutu	N/A	87	193.446.000	89	47.450.000	91	94.900.000	93	189.800.000	95	284.700.000	97	284.700.000	Dinas Kesehatan
1.2.5	Program Pemberdayaan Masyarakat Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	N/A	17	5.778.544.850	19	2.631.532.950	21	2.648.163.609	23	2.737.846.227.771	25	292.429.920.226	27	292.429.920.226	Dinas Kesehatan
b	Rumah Sakit Umum Haji Medan				211.581.023.446		233.268.078.349		237.933.439.916		242.692.108.715		247.545.950.889		252.496.869.907	UPTD Khusus RS Haji Medan
c	Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Hldrem				48.195.668.236		50.605.451.648		51.617.560.681		52.649.911.894		53.702.910.132		54.776.968.335	UPTD Khusus RS Jiwa Medan
1.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				1.845.799.437.667		2.131.898.350.505		2.195.855.301.021		2.261.730.960.051		2.329.582.888.853		2.399.470.375.518	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.3.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				197,104,418,566		190,000,000,000		192,000,000,000		192,000,000,000		192,000,000,000		192,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.3.2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	N/A	60,38	162,902,834,218	62,34	444,470,000,000	65,23	642,462,000,000	71,11	782,166,000,000	77,7	699,721,000,000	82,73	699,721,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase Peningkatan perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	N/A	13,5		13,56		15,75		21,3		27,37		31,67		
		Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	N/A	55,5		58,56		61,62		64,68		67,74		70,5		
1.3.3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	N/A	40.95	68,182,271,605	43.95	98,622,000,000	47.15	21,000,000,000	50.3	200,000,000,000	53	99,000,000,000	55	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.3.4	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional/TPST	Terbangunnya Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional/TPST	0	0	4,756,622,280	1	203,000,000,000	0	1,100,000,000	0	2,100,000,000	0	2,200,000,000	0	2,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.3.5	Program Pengelolaan dan	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang	N/A	23	0	23,08	17,500,000,000	23,08	20,000,000,000	23,12	20,000,000,000	23,12	20,000,000,000	23,12	20,000,000,000	Dinas Pekerjaan

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pengembangan Sistem Air Limbah	Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman														Umum dan Tata Ruang
1.3.6	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	N/A	50	106,016,025,900	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.3.7	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	72,75	75.84	1,303,881,820,541	79.17	1.162.016.350.505	82.49	1.267.132.301.021	85.49	1.019.518.960.051	87.17	1.303.016.888.853	90	1.470.697.375.518	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.3.8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	N/A	15,88	702,549,320	16,22	3,190,000,000	16,62	3,361,000,000	17,08	3,546,000,000	17,62	3,745,000,000	18,72	3,952,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.3.9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi	62.69	68	2,037,328,532	70	8,900,000,000	72	9,500,000,000	75	10,100,000,000	78	8,100,000,000	78	8,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.3.10	Program Pengeloaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	N/A	0	0	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.3.11	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	N/A	0	116,703,705	0	2,400,000,000	36.84	37,500,000,000	57.89	30,500,000,000	84.21	0	100	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.3.12	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	N/A	10.6	98,863,000	13.6	500,000,000	17.6	500,000,000	20.3	500,000,000	25.6	500,000,000	28	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.4.	Urusan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan				40.731.402.046		43.623.331.591		44.495.798.223		45.385.714.188		46.293.428.471		47.219.297.041	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.4.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				21,060,395,046		20,510,531,311		20,920,589,451		21,339,001,240		21,765,781,264		22,201,096,890	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.4.2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	6	9	200,000,000	12	200,000,000	15	203,790,756	18	207,866,571	21	212,023,902	24	216,264,380	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	6	9		12		15		18		21		24		
1.4.3	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	57,6	19	17,393,847,000	19	20,738,792,280	19	21,153,747,433	19	21,576,822,382	19	22,008,358,829	19	22,448,526,006	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.4.4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	8	8	1,880,568,000	8	1,854,680,000	8	1,891,961,340	8	1,929,800,567	8	1,968,396,579	8	2,007,764,510	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.5	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat															
	Satpol PP				47.089.071.212		50.390.798.857		50.894.706.846		51.403.653.914		51.917.690.453		52.436.867.358	
1.5.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				38.427.483.068		43.811.532.315		44.305.967.562		44.805.347.163		45.309.720.559		45.819.137.689	Satpol PP
1.5.1.2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	N/A	95 - 100	8.166.377.644	96 - 100	6.295.071.542	97 - 100	6.304.544.284	98 - 100	6.314.111.751	99 - 100	6.323.774.894	100	6.333.534.669	Satpol PP
		Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	N/A	100		100		100		100		100				
		Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	N/A	N/A		100		100		100		100				
		Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	N/A	N/A		100		100		100		100				
1.5.1.3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	N/A	N/A	495.210.500	4	284.195.000	4	284.195.000	4	284.195.000	4	284.195.000	4	284.195.000	Satpol PP
	BPBD				25.879.347.766		28.646.754.077		28.933.221.618		29.222.553.834		29.514.779.372		29.809.927.166	
1.5.3.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				24,785,427,866		25,675,472,626		25,932,194,908		26,191,516,857		26,453,432,025		26,717,966,346	BPBD
1.5.3.2	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Prabencana	6,1	9,1	1,093,919,900	15,1	2.971.281.451	42,4	3.001.026.710	72,7	3.031.036.977	90,9	3.061.347.347	97	3.091.960.820	BPBD
		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	70	75		82		86		91		95		97		BPBD
		Persentase Penanganan Pasca Bencana	6,1	6,1		27,3		45,4		63,6		81,8		90,9		BPBD
1.6	Urusan Sosial				91.172.305.151		119.222.112.376		120.414.333.499		121.618.476.836		122.834.661.603		124.063.008.220	Dinas Sosial
1.6.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				7.293.784.412		7.811.643.105		8.045.992.398		8.287.372.170		8.535.993.336		8.792.073.136	Dinas Sosial
1.6.2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	100	100	22.793.076.288	100	45.987.958.263	100	44.983.154.764	100	43.924.362.737	100	42.809.724.082	100	41.637.322.573	Dinas Sosial

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	91	92		92,5		94		94,5		95		95,5		
		Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	10	12		14		16		18		20		22		
		Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	5	5		5		5		5		5		5		
1.6.3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya	100	100	22.793.076.288	100	24.411.384.704	100	25.143.726.245	100	25.898.038.033	100	26.674.979.174	100	27.475.228.549	Dinas Sosial
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhannya	100	100		100		100		100		100		100		
		Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	37,92	38,42		42,64		46,86		51,08		55,3		56,2		
		Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	59,17	59,67		62,37		65,07		67,76		70,46		73,07		
		Indeks Peranan Sosial	50,5	51		52		53		54		55		56		
		1.6.4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhannya Dasar		0,37		0,38		30.998.583.751		0,39		33.199.483.198		
Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	0,37			0,38	0,39	0,4	0,41	0,42	0,43							
Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	100			100	100	100	100	100	100							

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	59,5	60		61		62		63		64		65		
		Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi	42,5	43		44		45		46		47		48		
		Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	2,77	3,27		6,54		9,82		13,09		16,36		19,09		
1.6.5	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	100	2.735.169.155	100	2.929.366.165	100	3.017.247.149	100	3.107.764.564	100	3.200.997.501	100	3.297.027.426	Dinas Sosial
		Persentase masyarakat didaerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	100	100		100		100		100		100				
		Persentase Korban bencana yang mendapatkan layananana pemulihan sosial	100	100		100		100		100		100				
1.6.6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase tanah makam pahlawan nasional yang dikelola dengan baik	100	100	455.861.526	100	488.227.694	100	502.874.525	100	517.960.761	100	533.499.583	100	549.504.571	Dinas Sosial
1.6.7	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	75	80	4.102.753.732	85	4.394.049.247	90	4.525.870.724	95	4.661.646.846	100	4.801.496.251	105	4.945.541.139	Dinas Sosial
		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	100	100		100		100		100		100				
	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar															
2.1	Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi				50.372.483.774		60.504.166.506		61.109.208.171		61.720.300.253		62.928.846.352		62.960.878.288	Dinas Ketenagakerjaan
2.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				40.709.042.590		41.239.975.532		42.064.775.043		42.906.070.543		43.764.191.954		44.639.475.793	Dinas Ketenagakerjaan
2.1.2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	39,39	100%	115.710.000	93,94%	249.979.700	100,00%	254.979.294	100,00%	260.078.880	100,00%	265.280.457	100,00%	270.586.067	Dinas Ketenagakerjaan
2.1.3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	0,025	0,025	3.373.314.784	0,026	11.782.609.174	0,026	11.413.219.692	0,027	11.030.392.005	0,027	11.225.139.939	0,028	10.223.097.747	Dinas Ketenagakerjaan
2.1.4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	49,85	51,76	311.243.050	53,53	824.688.400	55,17	841.182.168	56,70	858.005.811	59,35	875.165.928	60,16	892.669.246	Dinas Ketenagakerjaan

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.5	Program Hubungan Industrial	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	455.287	503.287	5.396.503.400	551.287	5.603.459.800	599.287	5.715.528.996	647.287	5.829.839.576	695.287	5.946.436.367	743.287	6.065.365.095	Dinas Ketenagakerjaan
2.1.6	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	2.100.000	2.200.000	430.281.950	2.300.000	747.999.000	2.400.000	762.958.980	2.500.000	778.218.160	2.600.000	793.782.523	2.700.000	809.658.173	Dinas Ketenagakerjaan
2.1.7	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya.	20,25	20,25	36.388.000	17,72	55.454.900	15,19	56.563.998	12,66	57.695.278	10,13	58.849.184	7,59	60.026.167	Dinas Ketenagakerjaan
2.2	Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana				18.263.735.082		19.560.460.273		19.756.064.876		19.953.625.524		20.153.161.780		20.354.693.397	Dinas PP, PA dan KB
2.2.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				14.688.842.453		15.791.750.267		15,747,667,770		15,905,144,448		16,064,195,892		16,224,837,851	Dinas PP, PA dan KB
2.2.2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	2,38	23,81	57.076.000	35,71	511.128.396	47,62	516.239.680	59,52	521.402.077	71,43	526.616.098	100	531.882.259	Dinas PP, PA dan KB
		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	9	10		11		12		13		14		15		
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	58,54	59,59		60,66		61,74		62,85		63,97		65,12		
2.2.3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	81	83	1.744.204.387	85	846.661.826	87	855.128.445	90	863.679.729	92	872.316.526	95	881.039.692	Dinas PP, PA dan KB
		rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan)	11,21	11,2		11,18		11,15		11,1		11,05		11		
2.2.4	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	82	83	252.337.242	85	370.253.186	87	373.955.718	90	377.695.275	92	381.472.228	95	385.286.950	Dinas PP, PA dan KB
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	68,5	68,75		69,95		70,95		71,8		72,98		74,1		
		Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	2.66:2.66	2,66		2.7		2.65		2.6		2.5		2.1		
2.2.5	Program Peningkatan kualitas keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	1	2	1.142.128.000	2	1.123.219.088	3	1.134.451.279	3	1.145.795.792	3	1.157.253.750	3	1.168.826.287	Dinas PP, PA dan KB
2.2.6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	61,72	63,65	59.034.000	65,57	463.225.414	67,5	467.857.668	69,42	472.536.245	71,35	477.261.607	73,27	482.034.223	Dinas PP, PA dan KB
2.2.7	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	12	17	7.900.000	37	39.841.972	49	40.240.392	68	40.642.796	85	41.049.224	100	41.459.716	Dinas PP, PA dan KB
2.2.8	Program Pembinaan	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	17,65	16,99	217.654.000	16,33	233.107.434	15,68	235.438.508	15,02	237.792.893	14,36	240.170.822	13,71	242.572.531	Dinas PP, PA dan KB

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang Terepenuhi menurut Alat/ Cara KB Modern	73,79	75,3		76,67		77,91		79,04		80,06				
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate /mCPR)	52,1	54,3		56,9		59,28		61,65		64,03				
		Persentase kehamilan yang tidak direncanakan (PKTD)	13,69	13:13												
2.2.9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	69,79	69,79	37.234.000	71,04	139.877.614	71,96	141.276.390	72,66	142.689.154	73,22	144.116.046	73,67	145.557.206	Dinas PP, PA dan KB
		Presentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	15	20		25		45		50		75		100		
		Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	81,32	82,79		84,14		85,39		86,54		87,6		88,57		
		Indeks Lansia Berdaya	60,73	61,79		62,81		63,8		64,75		65,66		66,54		
2.2.10	Program Pengendalian Penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	66,12	67,21	57.325.000	68,25	241.395.075	69,24	243.809.026	70,19	246.247.116	71,09	248.709.587	71,95	251.196.683	Dinas PP, PA dan KB
		Angka Kelahiran Total (Total Fertility rate/ TFR)	2,36	2,35		2,34		2,33		2,32		2,32		2,31		
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility rate (ASFR 15-19)	17,3	17,31		17,41		17,52		17,63		17,73		17,8		
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas dan Mandiri	54,03	54,96		55,86		56,71		57,53		58,31		59,05		
2.3	Urusan Pangan dan Pertanian															
	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura				161.236.639.567		265.536.639.567		273.502.738.754		281.707.820.917		290.159.055.544		298.863.827.210	
2.3.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				96.966.589.696		112,998,545,431		116,648,472,703		118,437,572,608		122,359,451,238		124,959,451,238	Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.3.2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	89,16	90,05	655.021.536	90,95	9.550.790.850	91,85	10.028.330.393	92,77	10.529.746.912	93,7	11.056.234.258	94,64	11.556.234.258	Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.3.3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	10	9	268.792.000	8	2.500.360.250	7	2.625.378.263	6	2.756.647.176	5	2.894.479.534	4	3.394.479.534	Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.3.4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	91,5	92	157.983.825	92,5	2.050.000.729	93	2.152.500.765	93,5	2.260.125.804	94	2.373.132.094	94,5	2.673.132.094	Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.3.5	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan:					71.275.991.607		72.879.058.396		76.023.011.316		77.824.161.882		79.994.161.882	Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Padi	3.923.928	3.974.939		4.026.613		4.078.959		4.131.986		4.185.702		4.240.116		
		Jagung	1.948.641	1.973.973		1.999.635		2.025.630		2.051.963		2.078.639		2.105.661		

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD PENANGGUNG JAWAB					
				2025		2026		2027		2028		2029		2030							
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		Kedelai	9.082	9.200	6.918.685.872	9.320		9.441		9.564		9.688		9.814							
		Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan:																			
		Padi	5,32	5,34		5,36		5,38		5,4		5,42		5,44							
		Jagung	6,25	6,27		6,29		6,31		6,33		6,35		6,37							
		Kedelai	1,38	1,39		1,4		1,41		1,42		1,43		1,44							
		Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura:																			
		Bawang Merah	58.070	58.825		59.590		60.364		61.149		61.944		62.749							
		Cabai	194.593	197.123		199.685		202.281		204.911		207.575		210.273							
		Sayur-sayuran	1.330.765	1.348.065		1.365.590		1.383.342		1.401.326		1.419.543		1.437.997							
		Buah-Buahan	1.531.043	1.550.947		1.571.109		1.591.533		1.612.223		1.633.182		1.654.413							
		Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura:																			
		Bawang Merah	15,04	15,06		15,08		15,1		15,12		15,14		15,16							
		Cabai	11,68	11,7		11,72		11,74		11,76		11,78		11,79							
2.3.6	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	-	5	39.544.842.158	5	40.452.291.010	10	41.474.905.560	10	43.048.650.838	10	44.201.083.380	10	45.635.855.046	Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura					
2.3.7	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	100	95	9.167.114.247	96	12.033.659.690	97	12.635.342.675	98	13.267.109.808	99	13.696.308.880	100	14.396.308.880	Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura					
		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	100	95		96		97		98		99		100							
2.3.8	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	4,2	4,25	7.557.610.233	4,3	14.675.000.000	4,35	15.058.750.000	4,4	15.384.956.455	4,45	15.754.204.278	4,5	16.254.204.278	Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura					
		Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	2	3		4		5		6		7		8							
2.4.	Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan				129.240.919.154		138.417.024.414		141.185.364.902		144.009.072.200		146.889.253.644		149.827.038.717	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
2.4.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				107.957.436.101		113.521.612.196		133.817.477.946		134.959.904.181		132.439.103.542		132.439.103.542	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
2.4.2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	N/A	100	0	100	699.999.462	100	1.200.000.000	100	1.400.000.000	100	1.600.000.000	100,00	2.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
2.4.3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	61,09	75,80	1.007.017.141	76,00	2.859.997.807	76,20	9.950.000.000	76,40	12.050.000.000	76,60	14.130.000.000	76,80	15.680.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
2.4.4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks kualitas Udara (IKU)	92,26	82,20	0	82,40	200.000.000	82,60	1.500.000.000	82,80	1.500.000.000	83,00	1.500.000.000	83,20	1.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
2.4.5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH	N/A	0,00	0	10,00	200.000.000	10,00	1.500.000.000	10,00	1.500.000.000	10,00	1.500.000.000	10,00	1.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4.6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	67,45	69,00	199.800.000	71,00	224.999.750	72,00	950.000.000	73,00	1.160.000.000	74,00	1.365.000.000	75,00	1.415.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.4.7	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	91,67	76,00	400.000.000	76,00	649.999.800	76,00	1.428.758.950	76,00	1.428.758.950	76,00	1.428.758.950	76,00	1.835.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.4.8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	92,50	100,00	245.000.000	100,00	272.783.450	100,00	635.000.000	100,00	785.000.000	100,00	970.000.000	100,00	970.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.4.9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	66,67	67,00	35.607.150	68,00	139.999.650	69,00	320.000.000	70,00	350.000.000	71,00	368.000.000	72,00	598.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.4.10	Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	31,14	40,00	1.079.319.012	47,56	2.499.999.420	47,56	3.694.769.748	47,56	3.844.769.748	47,56	3.944.769.748	47,56	3.380.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.4.11	Program Pengelolaan Hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	0,76	0,76	14.645.310.236	0,76	10.688.636.628	0,76	31.766.106.796	0,76	36.195.903.925	0,76	39.416.507.203	0,76	45.078.883.325	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.4.12	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati	N/A	0,562	442.881.814	0,567	829.530.000	0,573	300.000.000	0,579	300.000.000	0,585	300.000.000	0,592	1.950.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.4.13	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	N/A	2,00	3.213.747.700	2,00	5.611.750.001	2,00	9.315.452.070	2,00	9.965.348.277	2,00	10.767.742.735	2,00	7.761.800.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	N/A	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00				
2.4.14	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	N/A	20,00	0	20,00	150.000.000	20,00	450.000.000	20,00	485.000.000	20,00	520.000.000	20,00	500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.5	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil				26.840.075.624		33.724.422.685		34.061.666.913		34.402.283.580		34.746.306.417		35.093.769.480	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.5.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				1.610.404.537		1.690.924.764		1.707.834.012		1.724.912.352		1.742.161.476		1.759.583.090	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.5.2	Program Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	100	100	3.757.610.587	100	9.487.834.397	100	9.582.712.741	100	9.678.539.868	100	9.775.325.267	100	9.873.078.519	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.5.3	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100	100	3.489.209.831	100	3.663.670.323	100	3.700.307.026	100	3.737.310.096	100	3.774.683.197	100	3.812.430.029	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.5.4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0,0094	2.147.206.050	0,0094	2.254.566.352	0,0094	2.277.112.016	0,0094	2.299.883.136	0,0094	2.322.881.967	0,0094	2.346.110.787	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	0,0369	0,0369		0,0369		0,0369		0,0369		0,0369				
2.5.5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakatan an Desa (LKD)		0,0243	3.489.209.831	0,0243	3.663.670.323	0,0243	3.700.307.026	0,0243	3.737.310.096	0,0243	3.774.683.197	0,0243	3.812.430.029	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Fasilitasi Pemberdayaa n Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	0,0243	0,0243		0,0243		0,0243		0,0243		0,0243				
2.5.6	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	7,27	10	4.294.412.100	15	4.509.132.705	25	4.554.224.032	35	4.599.766.272	45	4.645.763.935	55	4.692.221.574	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	46,86	50		55		60		65		70		75		
2.5.7	Program Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100	4.026.011.344	100	4.227.311.911	100	4.269.585.030	100	4.312.280.880	100	4.355.403.689	100	4.398.957.726	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	95,49	96,2		97		97,8		98,2		99		99,5		
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100		100		100		100		100		100		
2.5.8	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	70	75	2.147.206.050	75	2.254.566.352	80	2.277.112.016	80	2.299.883.136	85	2.322.881.967	85	2.346.110.787	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.5.9	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100	100	1.878.805.294	100	1.972.745.558	100	1.992.473.014	100	2.012.397.744	100	2.032.521.722	100	2.052.846.939	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.6	Urusan Perhubungan				63.275.534.515		121.017.497.826		122.357.847.782		123.725.004.738		125.119.504.832		126.541.894.929	Dinas Perhubungan
2.6.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				43,812,995,389		38,952,200,272		39,729,581,131		40,524,172,754		41,334,656,208		42,161,349,333	Dinas Perhubungan
2.6.2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat	75,13	77,06	18.952.890.410	78,99	78.021.147.100	80,93	78.504.032.621	82,86	78.994.113.273	84,97	79.493.995.539	86,73	80.003.875.450	Dinas Perhubungan
		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	37,55	38,94		50,92		63,09		75,39		87,7		90		
2.6.3	Program Pengelolaan Pelayaran	Konektivitas Laut	80	84,44	381,069,858	86,67	96,040,454	88,89	97,956,796	91,11	99,915,932	93,33	101,914,250	95,56	103,952,535	Dinas Perhubungan
2.6.4	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Cakupan perlintasan kereta api yang ditangani	12,5	25	128,578,858	37,5	3,948,110,000	50	4,026,277,234	62,5	4,106,802,779	75	4,188,938,835	87,5	4,272,717,611	Dinas Perhubungan
2.7	Urusan Komunikasi, Informatika; Persandian; dan Statistik				45.702.478.891		70.502.478.891		71.912.528.469		73.350.779.038		74.817.794.619		76.314.150.511	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.7.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				20,534,553,338		25,177,438,577		25,888,510,249		26,406,280,454		26,934,406,063		27,473,094,184	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.7.2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	N/A	77	16,935,181,000	79	17,275,453,485	81	17,978,132,117	83	18,337,694,760	85	18,704,448,655	87	19,078,537,628	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.7.3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.86	3,89	7,263,728,027	3,92	18,490,001,127	3,93	18,697,257,402	3,94	19,071,202,550	3,95	19,452,626,601	3,96	19,841,679,133	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.7.4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1,8	2	645,700,000	2,2	1,828,470,040	2,3	2,157,375,854	2,4	2,200,523,371	2,5	2,244,533,839	2,6	2,289,424,515	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.7.5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	N/A	40	323,316,526	42	7,731,115,662	44	7,910,378,132	46	8,068,585,694	48	8,229,957,408	50	8,394,556,556	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.8	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				41.616.123.929		44.570.868.728		45.462.286.103		46.371.531.825		47.298.962.461		48.244.941.710	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.8.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				21.037.989.429		24.398.446.408		23.429.792.000		23.648.230.000		24.038.230.000		24.378.230.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.8.2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	40,93	41,87	0	42,91	100.000.000	43,76	150.000.000	44,89	200.000.000	45,73	250.000.000	46,86	300.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.8.3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	6,26	7,43	241.446.000	8,69	3.200.000.000	9,27	3.425.000.000	10,42	3.650.000.000	11,36	3.875.000.000	12,48	4.100.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.8.4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	15,95	17,37	1.430.469.500	19,51	10.422.422.320	21,79	11.557.494.103	23,42	11.723.301.825	25,87	11.635.732.461	27,28	11.766.711.710	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.8.5	Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	1,51	1,66	18.312.356.900	1,8	5.000.000.000	1,9	5.250.000.000	2,02	5.300.000.000	2,14	5.450.000.000	2,28	5.450.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.8.6	Program Penguatan Badan Hukum Koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	25,48	26,61	0	27,71		28,78		29,81		30,82		32,02		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.8.7	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	0,33	0,81	0	1,25	500.000.000	1,86	550.000.000	2,37	600.000.000	2,95	650.000.000	3,24	700.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.8.8	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	4,61	4,82	0	5,07		5,19		5,31		5,38		5,49		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.8.9	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1,38	1,87	593.862.100	2,54	850.000.000	3,61	1.000.000.000	4,59	1.150.000.000	5,72	1.300.000.000	6,51	1.450.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.9	Urusan Penanaman Modal				19.445.732.893		29.445.732.893		30.034.647.551		30.635.340.502		31.248.047.312		31.873.008.258	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.9.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				18.679.854.741		18.725.447.523		19.000.000.000		19.500.000.000		20.000.000.000		20.500.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.9.2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap target Investasi (RPJMD)		100	73.823.000	100	4.071.210.084	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Realisasi Total terhadap target Investasi (BKPM)		85		85		85		85		85		85		
2.9.3	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi		53,5	256.023.752	54	2.990.978.000	54,5	3.000.000.000	55	3.000.000.000	55,5	3.000.000.000	56	3.000.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																Terpadu Satu Pintu
2.9.4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan		100	354.657.000	100	2.809.293.000	100	2.900.000.000	100	2.900.000.000	100	2.900.000.000	100	2.900.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.9.5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha		100	81.474.400	100	799.167.000	100	799.167.000	100	799.167.000	100	799.167.000	100	799.167.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.9.6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal		100	0	100	49.637.285	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.9.7	Program Kerja Sama Penanaman Modal	Persentase kerjasama penanaman Modal yang ditindaklanjuti		100	0	100	0	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.10	Urusan Kepemudaan dan Olahraga				185.432.430.540		194.704.052.067		196.651.092.588		198.617.603.514		200.603.779.549		202.609.817.344	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
2.10.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan			100	49.961.771.323	100	42.645.100.097	100	44.592.140.618	100	46.558.651.544	100	48.544.827.579	100	50.550.865.374	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
2.10.2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha pemuda	N/A	0	1.554.627.906	1,5890478	7.650.000.000	1,8335167	7.650.000.000	2,0168684	7.650.000.000	2,2613372	7.650.000.000	2,4446889	7.650.000.000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
2.10.3	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang masuk Pelatnas	N/A	12	132.916.031.311	15	141.058.951.970	18	141.058.951.970	21	141.058.951.970	24	141.058.951.970	28	141.058.951.970	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
2.10.4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	N/A	0	1.000.000.000	0,0024565	3.350.000.000	0,0030707	3.350.000.000	0,0036848	3.350.000.000	0,0042989	3.350.000.000	0,0049131	3.350.000.000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
2.11	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata				56.176.452.495		80.771.020.622		82.386.441.035		84.034.169.855		85.714.853.252		87.429.150.317	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2.11.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				Rp31,530,389,498		31,785,192,688		32,208,494,298		32,852,664,185		33,509,717,467		34,179,911,816	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.11.2	Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	N/A	50	Rp1,939,995,850	60	2,388,985,421	70	2,504,510,622	80	2,554,600,835	90	2,605,692,852	100	2,657,806,709	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2.11.3	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	N/A	5	Rp3,900,172,877	8	2,567,702,973	11	2,504,558,016	14	2,554,649,176	17	2,605,742,160	20	2,657,857,003	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2.11.4	Program Pembinaan Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	N/A	15	Rp110,997,000	15	-	16	-	17	-	18	-	19	-	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2.11.5	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase kunjungan wisatawan ke museum	N/A	97,93	Rp2,906,310,460	97,99	3,247,716,526	98,05	3,313,220,637	98,11	3,379,485,048	98,16	3,447,074,750	98,21	3,516,016,245	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2.11.6	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	N/A	10	Rp2,219,992,000	15	3,385,868,800	20	3,630,656,136	25	3,703,269,259	30	3,777,334,644	35	3,852,881,337	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2.11.7	Program Perfilman Nasional	Persentase pelaku industri perfilman yang tervalidasi	N/A	5	-	10	-	10	-	15	-	15	-	20	-	
2.11.8	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan mancanegara	26,32	31,78	Rp6,387,480,400	7,58	5,928,352,164	7,04	6,096,672,494	6,58	6,218,605,944	3,99	6,342,978,063	5,67	6,469,837,625	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Nusantara	54,88	23,38		23,5		23,75		24		24,2		24,25		
		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	250,41	300-350		365		380		395		421		445		
2.11.9	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Parawisata	16,67	14,29	Rp6,642,351,935	12,5	29,620,528,000	11,11	30,294,000,000	10	30,899,880,000	9,09	31,517,877,600	8,33	32,148,235,152	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2.11.10	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	N/A	14,97	-	31,97	1,045,003,350	48,98	1,015,678,158	65,99	1,035,991,721	82,99	1,056,711,555	100	1,077,845,786	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2.11.11	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Parawisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	N/A	35,9	Rp538,762,475	48,72	801,670,700	61,54	818,650,674	74,36	835,023,687	87,18	851,724,161	100	868,758,644	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2.12	Urusan Perpustakaan dan Arsip				23.074.751.799		24.228.489.389		24.470.774.283		24.715.482.026		24.962.636.846		25.212.263.214	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2.12.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				1.384.485.108		1.453.709.363		1.468.246.457		1.482.928.922		1.497.758.211		1.512.735.793	Dinas Perpustakaan dan Arsip

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.12.2	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat	68,57	70	11.537.375.900	71	12.114.244.695	72	12.235.387.142	73	12.357.741.013	74	12.481.318.423	75	12.606.131.607	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2.12.3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki		20	2.307.475.180	25	2.422.848.939	30	2.447.077.428	35	2.471.548.203	40	2.496.263.685	50	2.521.226.321	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2.12.4	Program Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan	Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi dibidang Perpustakaan		25	922.990.072	30	969.139.576	40	978.830.971	50	988.619.281	60	998.505.474	70	1.008.490.529	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2.12.5	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip	82,78	84	2.999.717.734	85	3.149.703.621	86	3.181.200.657	87	3.213.012.663	88	3.245.142.790	89	3.277.594.218	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2.12.6	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		10	2.307.475.180	15	2.422.848.939	17	2.447.077.428	20	2.471.548.203	21	2.496.263.685	22	2.521.226.321	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2.12.7	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		1	922.990.072	2	969.139.576	3	978.830.971	4	988.619.281	5	998.505.474	6	1.008.490.529	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2.12.8	Program Akreditasi dan Sertifikasi	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya		10	692.242.554	15	726.854.682	20	734.123.228	25	741.464.461	30	748.879.105	35	756.367.896	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2.13	Urusan Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)				64.003.629.933		82.612.997.335		84.265.257.282		85.950.562.428		87.669.573.676		89.422.965.150	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.13.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan			100%	49.046.015.722	100%	49.867.818.509	100%	51.221.880.503	100%	51.832.429.716	100%	52.473.506.390	100%	53.146.636.897	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.13.2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat	220.289,15	226.778,78	8.824.489.790	237.524,28	25.828.426.393	248.812,52	26.031.154.567	260.678,97	27.015.120.354	273.171,63	27.015.120.354	286.303,64	28.383.674.260	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	15.071,70	17.464,66		18.100,49		18.782,85		19.510,10		20.286,30		21.115,97		
2.13.3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan yang Difasilitasi Ketersediaan Prasarana Perkebunan	308	308	1.801.348.148	308	1.958.215.948	308	1.948.215.948	308	1.838.215.948	308	1.948.215.948	308	2.088.215.948	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Persentase Peningkatan Populasi Ternak	0,55	0,66		0,67		0,69		0,7		0,72		0,74		
2.13.4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	0,77	0,39	2.466.047.410	0,41	3.014.352.254	0,44	3.024.164.846	0,47	3.175.373.088	0,5	3.334.141.742	0,54	3.500.848.830	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	89	90		90		90		90		90		90		
2.13.5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	0,15	0,23	254.165.000	0,25	310.153.800	0,27	324.598.470	0,3	340.828.394	0,33	357.869.813	0,37	375.763.304	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	0,53	0,27		0,34		0,37		0,41		0,45		0,49		
2.13.6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	100	100	52.578.000	100	56.219.000	100	58.802.100	100	61.742.205	100	64.829.315	100	68.070.781	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.13.7	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang Mendapat	0,58	0,47	1.558.985.863	0,56	1.577.811.431	0,62	1.656.440.847	0,69	1.739.262.889	0,77	1.826.226.033	0,84	1.917.537.335	Dinas Perkebunan dan Peternakan

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyuluhan dan Pemberdayaan														
2.14	Urusan Kelautan dan Perikanan				34.048.173.765		42.891.594.102		43.749.425.984		44.624.414.504		45.516.902.794		46.427.240.850	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.14.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				27.353.929.153		27.743.150.786		28.298.013.802		28.863.974.078		29.441.253.559		30.030.078.631	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.14.2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	1.67	1.6	518.822.500	1.7	699.746.210	1.9	713.741.134	2	728.015.957	2,2	742.576.276	2,25	757.427.802	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.14.3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	399.941	395427	3.422.127.173	410213	7.998.745.943	427103,34	8.158.720.862	435701	8.321.895.279	463078,68	8.488.333.185	476971,04	8.658.099.846	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.14.4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	332.310,14	340.000	1.853.639.077	342.279,00	4.699.972.277	350.836	4.793.971.723	360.484	4.889.851.157	371.298	4.987.648.180	381.509	5.087.401.144	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.14.5	Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	Luasan Kawasan Konservasi	210.403,53	27343,57	404.562.632	7703,41	750.077.650	1415,36	765.079.203	1880,91	780.380.787	9474,49	795.988.403	1292,28	811.908.171	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.14.6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	51,24	35,01	495.093.230	35,31	999.901.236	35,66	1.019.899.261	36,02	1.040.297.246	36,38	1.061.103.191	36,75	1.082.325.255	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.15	Urusan Perindustrian, Perdagangan dan ESDM				70.771.864.951		76.171.517.363		77.694.947.710		79.248.846.664		80.833.823.597		82.450.500.069	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
	Urusan Perindustrian															
2.15.2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Persentase Sektor Industri dan Kawasan Industri	28,43	28,43	11.704.933.822	32,61	11.000.000.000	37,37	11.220.000.000	42,68	11.444.400.000	48,69	11.673.288.000	55,58	11.906.753.760	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
2.15.3	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	100	100	11.206.000	100	700.000.000	100	714.000.000	100	728.280.000	100	742.845.600	100	757.702.512	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.15.4	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	125	0	-	125	300.000.000	125	306.000.000	125	312.120.000	125	318.362.400	125	324.729.648	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
	Urusan Perdagangan															
2.15.5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	0	0	-	50	100.000.000	55	102.000.000	60	104.040.000	65	106.120.800	70	108.243.216	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
2.15.6	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	0	0	-	100	49.487.750	100	50.477.505	100	51.487.055	100	52.516.796	100	53.567.132	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
2.15.7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	4,17	4,03	465.606.500	4,01	778.000.000	3,99	793.560.000	3,97	809.431.200	3,95	825.619.824	3,93	842.132.220	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
2.15.8	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Barang	153000	182.790,8	1.861.725.600	191.207	1.450.512.000	199.623,2	1.479.522.240	208.039,5	1.509.122.685	216.455,7	1.539.294.938	224.871,9	1.570.080.837	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
2.15.9	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	77,78	81,01	754.903.000	84,24	1.936.380.000	87,47	1.975.107.600	90,7	2.014.609.752	93,93	2.054.901.947	97,16	2.095.999.986	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
2.15.10	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan Negeri	0	0	-	100	100.000.000	100	102.000.000	100	104.040.000	100	106.120.800	100	108.243.216	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
	Urusan ESDM															
2.15.11	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Jumlah Penerima Manfaat dari Pembangkit EBT	150	75	3.018.113.106	75	3.027.404.283	75	3.087.952.369	75	3.149.711.416	75	3.212.705.644	75	3.276.959.757	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
2.15.12	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	0	5.048.600	157.930.000	5.048.600	430.401.200	5.048.600	439.009.224	5.048.600	447.789.408	5.048.600	456.745.197	5.048.600	465.880.101	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.15.13	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Usaha Tambang Sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar	96,3	66,56	398.453.290	71,35	711.291.100	78,51	725.516.922	82,3	740.027.260	88,5	754.827.806	95	769.924.362	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
2.15.14	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	99,99	100	1.969.839.819	100	3.670.277.500	100	3.743.683.050	100	3.818.556.711	100	3.894.927.845	100	3.972.826.402	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
3.1	Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan dan Kelitbangan				54.998.222.100		67.329.028.824		68.002.319.112		68.682.342.303		69.369.165.725		70.062.857.384	Bappelitbang
3.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				3.849.875.547		4.123.216.711		4.164.448.878		4.206.093.367		4.248.154.300		4.290.635.843	Bappelitbang
3.1.2	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd	100	100	13.749.555.525	100	14.725.773.967	100	14.873.031.707	100	15.021.762.024	100	15.171.979.644	100	15.323.699.441	Bappelitbang
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100	100		100		100		100		100				
3.1.3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	13.749.555.525	100	23.151.706.922	100	23.383.223.991	100	23.617.056.231	100	23.853.226.793	100	24.091.759.062	Bappelitbang
		Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100		100		100		100		100				
		Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100	100		100		100		100		100				
3.1.4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan Implementasi Pembangunan	100	100	12.649.591.083	100	13.547.712.050	100	13.683.189.170	100	13.820.021.062	100	13.958.221.273	100	14.097.803.485	Bappelitbang
		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	100	100		100		100		100		100				
		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	100	100		100		100		100		100				

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	100	100		100		100		100		100		100		
3.1.5	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	100	100	10.999.644.420	100	11.780.619.174	100	11.898.425.366	100	12.017.409.619	100	12.137.583.715	100	12.258.959.553	Bappelitbang
		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	100	100		100		100		100		100				
		Persentase Kajian berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	100	100		100		100		100		100				
		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	100	100		100		100		100		100				
3.2	Fungsi Penunjang Urusan Penunjang Urusan Keuangan															
	BKAD				3.874.805.297.313		3.156.546.157.997		3.415.444.481.857		3.687.094.696.341		3.972.061.237.678		4.270.932.537.252	
3.2.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				26.601.004.481		34.586.414.209		34.932.278.351		35.281.601.135		35.634.417.146		35.990.761.317	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.2.2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Pegawai diluar tunjangan Guru yang dialokasi kan melalui TKD (Transfer Keuangan Daerah)	23	23	3.846.021.951.104	23	3.117.439.252.971	25	3.374.312.688.150	25	3.646.829.254.081	25	3.931.193.787.350	25	4.229.447.091.097	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	38	38		38		40		40		40				
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja urusan wajib pelayanan dasar	92	92		92		94		96		98				
		Persentase Penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	1	1		0,8		0,7		0,6		0,5				
		Persentase Laporan Keuangan tepat Waktu	100	100		100		100		100		100				
		Persentase Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD/Perubahan APBD/ Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	100	100		100		100		100		100				
3.2.3	Program Pengelolaan	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	12	12	2.182.341.728	12	4.520.490.817	14	6.199.515.356	16	4.983.841.125	18	5.233.033.182	18	5.494.684.838	

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Barang Milik Daerah	Persentase Tanah Milik Pemprovsu yang disertifikasi	84,42	84,42		84,42		87,42		90		93		96		Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.3	Bapenda				321.456.715.592		344.280.142.399		347.722.943.823		351.200.173.261		354.712.174.994		358.259.296.744	Bapenda
3.3.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				316.575.257.210		337.935.505.549		371.729.056.104		408.901.961.714		449.729.157.886			Bapenda
3.3.2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	N/A	1,37	4.585.538.650	1,42	6.115.236.850	1,46	6.726.760.535	1,51	7.399.436.589	1,55	8.139.380.247	1,6		Bapenda
3.4	Fungsi Penunjang Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia				42.756.473.582		45.792.183.206		46.250.105.038		46.712.606.089		47.179.732.150		47.651.529.471	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.4.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				2.992.953.151		3.205.452.824		3.237.507.353		3.269.882.426		3.302.581.251		3.335.607.063	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.4.2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	N/A	12,06	39.763.520.431	13,79	42.586.730.382	15,51	43.012.597.685	17,24	43.442.723.663	18,96	43.877.150.900	22,41	44.315.922.408	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	N/A	10,58		12,94		15,29		17,64		20		23,52		
		Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi		4,76		9,52		14,28		19,04		23,8		28,57		
		Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	N/A	6,49		10,56		13,26		20,08		24,16		25,42		
3.5	Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian				32.513.972.357		35.802.262.465		36.160.285.090		36.521.887.941		36.887.106.820		37.255.977.888	Badan Kepegawaian
3.5.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				2.275.978.065		2.389.776.968		2.413.674.738		2.437.811.485		2.462.189.600		2.486.811.496	Badan Kepegawaian
3.5.2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	100	80	30.237.994.292	80	33.412.485.497	80	33.746.610.352	80	34.084.076.456	80	34.424.917.220	80	34.769.166.392	Badan Kepegawaian

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	6	7		8		9		10		11		12		
		Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	78	80		81		82		83		84		85		
		Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai baik	89	90		91		92		93		94		95		
3.6	Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan				76.288.405.528		80.204.667.808		81.006.714.486		81.816.781.630		82.634.949.447		83.461.298.942	Inspektorat
3.6.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				5.340.188.387		5.607.197.806		5.663.269.784		5.719.902.482		5.777.101.507		5.834.872.522	Inspektorat
3.6.2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindakanjuz Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	80,74	82	36.618.434.653	83	38.551.198.390	84	38.936.710.374	85	39.326.077.477	86	39.719.338.252	87	40.116.531.635	Inspektorat
3.6.3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Level 3 Terdefi nisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	34.329.782.488	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	36.046.271.612	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	36.406.734.328	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	36.770.801.671	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	37.138.509.688	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	37.509.894.785	Inspektorat
		Pemerintah (SPIP)														
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3 (Terintegra si	Level 3 (Terintegrasi		Level 3 (Terintegrasi		Level 3 (Terintegrasi		Level 3 (Terintegrasi		Level 3 (Terintegrasi				
3.7	Fungsi Penunjang Urusan Penghubung				34.516.491.746		36.242.316.333		36.604.739.497		36.970.786.892		37.340.494.761		37.713.899.708	Badan Penghubung
3.7.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				24,889,802,824		32,303,830,410		32,625,804,314		32,952,062,357		33,281,582,980		33,614,398,810	Badan Penghubung
3.7.2	Program Pelayanan Penghubung	Persentase Program Pelayanan Penghubung	100	100	9,626,688,922	100	3,938,485,923	100	3,978,935,183	100	4,018,724,535	100	4,058,911,781	100	4,099,500,898	Badan Penghubung

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.8	Fungsi Penunjang Urusan Sekretariat DPRD				541.981.524.081		553.035.514.770		558.565.869.918		564.151.528.617		569.793.043.903		575.490.974.342	Sekretariat DPRD
3.8.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				37.938.706.686		37.941.409.879		38.320.823.978		38.704.032.218		39.091.072.540		39.481.983.265	Sekretariat DPRD
3.8.2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	45	100	504.042.817.395	100	515.094.104.891	100	520.245.045.940	100	525.447.496.399	100	530.701.971.363	100	536.008.991.077	Sekretariat DPRD
		Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	NA	50		50		53		53		53		55		
		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	NA	100		100		100		100		100		100		
3.9	Fungsi Penunjang Urusan Sekretariat Daerah															
3.9.1	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah				2.201.698.660		3.325.207.160		3.358.459.232		3.392.043.824		3.425.964.262		3.460.223.905	
3.9.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				154.118.906		165.061.349		166.711.962		168.379.082		170.062.872		171.763.501	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3.9.1.2	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Kerjasama Daerah	100	100	2.047.579.754	100	3.160.145.811	100	3.191.747.270	100	3.223.664.742	100	3.255.901.390	100	3.288.460.404	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	2,7	2,9		3,4		3,5		3,6		3,7		3,8		
3.9.2	Biro Kesejahteraan Rakyat				308.744.505.067		330.665.364.927		333.972.018.576		337.311.738.762		340.684.856.149		344.091.704.711	
3.9.2.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				21.612.115.355		23.146.575.545		23.378.041.300		23.611.821.713		23.847.939.930		24.086.419.330	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.9.2.2	Program Kesejahteraan Rakyat	Efektifitas pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		90-100	287.132.389.712	90-101	307.518.789.382	90-102	310.593.977.276	90-103	313.699.917.049	90-104	316.836.916.219	90-105	320.005.285.381	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.9.3	Biro Hukum				2.317.340.622		5.997.340.622		6.057.314.028		6.117.887.169		6.179.066.040		6.240.856.701	
3.9.3.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				162.213.844		419.813.844		424.011.982		428.252.102		432.534.623		436.859.969	Biro Hukum

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.9.3.2	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase penyelesaian penyusunan rancangan produk hukum daerah tepat waktu		100	2.155.126.778	100	5.577.526.778	100	5.633.302.046	100	5.689.635.067	100	5.746.531.417	100	5.803.996.732	Biro Hukum
3.9.4	Biro Perekonomian				1.904.141.898		2.210.075.898		2.232.176.657		2.254.498.424		2.277.043.408		2.299.813.842	
3.9.4.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				133.289.933		142.753.518		144.181.053		145.622.864		147.079.092		148.549.883	Biro Perekonomian
3.9.4.2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan Pembangunan	90	92	1.770.851.965	94	2.067.322.380	96	2.087.995.604	98	2.108.875.560	100	2.129.964.316	100	2.151.263.959	Biro Perekonomian
3.9.5	Biro Pengadaan Barang dan Jasa				1.821.214.236		2.271.214.236		2.293.926.378		2.316.865.642		2.340.034.299		2.363.434.642	
3.9.5.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				319,508,644		486,024,880		490,930,392		495,839,696		500,798,093		505,806,074	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
3.9.5.2	Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	10,09	25	1,501,705,592	27	1.785.189.356	28	1.802.995.986	28	1.821.025.946	28	1.839.236.206	28	1.857.628.568	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	18,57	21		22		23		23		23				
		Tingkat Kematangan KPBJ	40	40		40		40		40		40				
3.9.6	Biro Administrasi Pembangunan				1.748.720.341		1.872.879.485		1.891.608.280		1.910.524.363		1.929.629.606		1.948.925.903	
3.9.6.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				1,059,209,241		1,108,835,991		1,119,832,102		1,131,030,423		1,142,340,727		1,153,764,135	Biro Administrasi Pembangunan
3.9.6.2	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	100	100	689,511,100	100	764,043,494	100	771,776,178	100	779,493,940	100	787,288,879	100	795,161,768	Biro Administrasi Pembangunan

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.9.7	Biro Organisasi				2.258.266.634		2.418.603.565		2.442.789.601		2.467.217.497		2.491.889.672		2.516.808.568	
3.9.7.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				180.661.331		193.488.285		195.423.168		197.377.400		199.351.174		201.344.685	Biro Organisasi
3.9.7.2	Program Penataan Organisasi	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100	100	2.077.605.303	100	2.225.115.280	100	2.247.366.433	100	2.269.840.097	100	2.292.538.498	100	2.315.463.883	Biro Organisasi
		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100	100		100		100		100		100				
3.9.8	Biro Umum				322.344.564.240		343.089.028.301		346.519.918.584		349.985.117.770		353.484.968.948		357.019.818.637	
3.9.8.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				250,945,244,240		271,689,708,301		274,409,123,527		277,153,214,762		279,924,746,910		282,723,994,379	Biro Umum
3.9.8.2	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa	100	100	71,399,320,000	100	71,399,320,000	100	72,110,795,057	100	72,831,903,008	100	73,560,222,038	100	74,295,824,258	Biro Umum
3.9.9	Biro Administrasi Pimpinan				16.663.117.675		22.807.284.210		23.035.357.052		23.265.710.623		23.498.367.729		23.733.351.406	
3.9.9.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase terlaksananya urusan Pemerintah daerah Provinsi	100	100	16.663.117.675	100	22.807.284.210	100	23.035.357.052	100	23.265.710.623	100	23.498.367.729	100	23.733.351.406	Biro Administrasi Pimpinan
3.10	Unsur Pemerintahan Umum				58.696.847.412		66.241.794.057		66.904.211.998		67.573.254.118		68.248.986.659		68.931.476.525	Bakesbangpol
3.10.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan				14.581.752.423		16.141.030.611		16.302.440.917		16.465.465.326		16.630.119.980		16.796.421.179	Bakesbangpol
1.5.2.2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		68	2.326.378.433	72	2.326.393.711	74	2.349.657.648	76	2.373.154.225	78	2.396.885.767	80	2.420.854.625	Bakesbangpol
1.5.2.3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik		100	35.549.904.400	100	40.527.558.574	100	40.932.834.160	100	41.342.162.502	100	41.755.584.127	100	42.173.139.968	Bakesbangpol

NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.5.2.4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasarvakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif		20	712.188.000	20	1.296.972.000	20	1.309.941.720	20	1.323.041.137	20	1.336.271.549	20	1.349.634.264	Bakesbangpol
1.5.2.5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan		100	4.343.302.181	100	4.549.839.191	100	4.595.337.583	100	4.641.290.959	100	4.687.703.868	100	4.734.580.907	Bakesbangpol
1.5.2.6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan		100	1.183.321.975	100	1.399.999.970	100	1.413.999.970	100	1.428.139.969	100	1.442.421.368	100	1.456.845.582	Bakesbangpol
TOTAL PAGU INDIKATIF					13.157.450.725.775		13.569.403.313.886		14.083.832.542.294		14.618.025.855.714		15.172.749.491.172		15.748.799.608.693	

4.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

4.2.1. Penyelarasan Indikator Makro Sasaran Utama Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan RPJMN dengan RPJMD

Provinsi Sumatera Utara berperan aktif dalam mendukung pencapaian Indikator Makro Sasaran Utama Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Seluruh indikator tersebut menjadi acuan penting bagi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, sekaligus memastikan adanya sinkronisasi arah kebijakan antara pusat dan daerah. Indikator makro sasaran pembangunan yang memuat sembilan indikator utama secara langsung menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Sumatera Utara, sehingga keberhasilan pembangunan dapat diukur secara objektif dan terstandar. Di sisi lain, indikator utama pembangunan yang termuat dalam RPJMN dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara juga dilebur ke dalam IKU, Indikator Kinerja Daerah (IKD), maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai satu kesatuan sistem pengukuran kinerja. Integrasi ini tidak hanya memperkuat keterkaitan perencanaan antar level pemerintahan, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah pembangunan di daerah selaras dengan target nasional dan visi jangka panjang provinsi.

RPJMD tahun 2025-2029 merupakan terjemahan pelaksanaan dari Tahap I RPJPD Provinsi Sumatera Utara. Pencapaian visi Provinsi Sumatera Utara tahun 2045 sangat bergantung dari kinerja pencapaian di Tahap I, sebagai langkah penguatan fondasi transformasi. Dukungan pencapaian ini dapat dilihat dari keselarasan indikator dan target yang ditetapkan.

Dukungan Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai Indikator Makro Sasaran Utama Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029, atau yang juga dikenal sebagai Indikator Emas (IE) dapat dilihat pada tabel 4.2. dan 4.3. berikut:

Tabel 4. 2. Penyelarasan Indikator Sasaran Pembangunan RPJMN dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Indikator	Satuan	RPJMN			RPJMD Provinsi Sumatera Utara		
		Baseline 2024	Target 2025	Target 2029	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
01. Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,05	5,3	8	5,03	5,20- 5,60	7,60-8,00
02. GNI per Kapita	USD / Rp. Juta	4.870 (2023)	5.410	8.000	73,57	78,4	115,3
03. Kontribusi PDB Maritim/ Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	7,9 (2022)	8,1	9,1	5,2	5,2	5,3
04. Tingkat Kemiskinan	Persen	9,03	7,0 - 8,0	4,5 - 5,0	7,19	6,69 - 7,17	2,82 - 3,82
05. Rasio Gini	Poin	0,379	0,378 - 0,382	0,372 - 0,375	0,306	0,303 - 0,305	0,287 - 0,291
06. Indeks Modal Manusia	Poin	0,54 (2020)	0,56	0,59	N/A	0,54	0,57
07. Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	34,09 (2022)	35,53	45,17	N/A	1	16,88
08. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	72,54 (2023)	76,49	77,2	73,96	77,2	77,87
09. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,91	4,50-5,00	4,00-4,71	5,6	5,27-5,56	4,74-5,20

**Tabel 4. 3. Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJMN dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2025-2029**

MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJM NASIONAL	BASELINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASELINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI 1	TRANSFORMASI SOSIAL				TRANSFORMASI SOSIAL							
TUJUAN PEMBANGUNAN 1	Kesehatan untuk Semua				Kesehatan untuk Semua							
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,13 (2023)	74,43	75,4	Usia Harapan Hidup (tahun)	73,90	74,1	74,18	74,36	74,54	74,72	74,90
2.a	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	189 (2020)	122	77	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	68.19	65,78	58,90	55,50	52,49	49,21	46,32
2.b	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21,50 (2023)	18,8	14,2	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	22	20	18,50	17,00	15,50	14	12,50
3.a	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	387 (2023)	329	190	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	71,8	90	90	90	90	90	90
3.b	-				Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	85	90	90	90	90	90	90

MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJM NASIONAL	BASELINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASELINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	98,42	98,6	99	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	93	98,6	98,60	98,60	98,60	99	99,00
TUJUAN PEMBANGUNAN 2	Pendidikan Berkualitas yang Merata				Pendidikan Berkualitas yang Merata							
5.a.1	Rata-rata Nilai PISA				a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:							
	a-I Membaca	359 (2022)	396	409	i. Literasi Membaca	N/A	6,06-12,12	12,01-16,01	16,94-20,94	22,36-25,36	27,27-30,30	32,21-35,21
	a-ii Matematika	366 (2022)	404	416	ii. Numerasi	N/A	0,00-3,03	1,5-4,57	3,03-6,06	4,5-7,6	6,06-9,09	7,5-10,68
	a-iii Sains	383 (2022)	416	426								
5.b	Rata-rata nilai asesmen nasional				b) Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:							
	b-i Literasi Membaca	60,89 (2023)	62,89	66,89	i. Literasi Membaca	N/A	35,99-38,49	37,37-39,88	38,76-41,26	40,15-42,65	41,53-44,03	42,92-45,42
	b-ii Numerasi	51,36 (2023)	54,36	59,86	ii. Numerasi	N/A	33,70-36,20	34,70-39,20	35,70-38,20	36,70-39,20	37,70-40,20	38,70-41,20

MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJM NASIONAL	BASELINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASELINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.c	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,22	9,33	9,82	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,93	10,3 - 10,33	10,43-10,46	10,56-10,59	10,69-10,72	10,83 - 10,84	10,96-10,97
5.d	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,21	13,32	13,58	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,49	13,61 - 13,63	13,67-13,69	13,73-13,75	13,79-13,81	13,86 - 13,87	13,92-13,94
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	31,45 (2023)	33,94	38,04	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	N/A	11,12	11,12-11,30	11,12-11,33	11,12-11,37	11,12-11,40	11,16-11,44
7	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,30 (2023)	66,78	67,66	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	N/A	71,1	72,47	73,85	75,22	76,59	77,69
TUJUAN PEMBANGUNAN 3	Perlindungan Sosial yang Adaptif				Perlindungan Sosial yang Adaptif							
8	Tingkat Kemiskinan (%)	9,03	7,0-8,0	4,5-5,0	Tingkat Kemiskinan (%)	7,19	6,96-7,16	5,93-6,55	4,89-5,64	3,86-4,73	2,82-3,82	2,50-3,50
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	29,77 (semester I)	32,15	43,92	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	49,59	29,27	32,11	34,94	37,78	40,61	42,88

MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJM NASIONAL	BASELINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASELINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	9,07 (2023)	10	12	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	N/A	27,00	27,20	27,40	27,60	27,80	28,00
MISI 2	TRANSFORMASI EKONOMI				TRANSFORMASI EKONOMI							
TUJUAN PEMBANGUNAN 4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi				Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi							
11.a	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	18,67 (2023)	20,8	21,9	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	18,36	18,66	18,96	19,26	19,56	19,86	20,16
11.b	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	1,30 (2023)	2,2	3,46								
12.a	Rasio PDB Pariwisata (%)	3,6 (2022)	4,50- 4,60	4,90- 5,00	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,21	2,42	2,51	2,60	2,69	2,73	2,82
12.b	Devisa Pariwisata (miliar USD)	14,0 (2023)	19-22,1	32,0- 39,4	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang)	142,71	330	355	380	405	421,14	445
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	6,77 (2023)	7,3-7,9	8,0-8,4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	N/A	5,45	5,47	5,5	5,5	5,43	5,5

MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJM NASIONAL	BASELINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASELINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
14.a	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	3,06	3,1	3,3	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	3,16	3,2	3,28	3,36	3,43	3,51	3,57
					a.i. Proporsi jumlah UKM non pertanian pada Level Provinsi (%)	N/A	10,66-10,81	10,67-10,82	10,68-10,83	10,69-10,84	10,70-10,85	10,71-10,86
					a.ii. Proporsi jumlah industri kecil menengah pada level provinsi (%)	N/A	5,04	5,15-6,15	5,26-6,26	5,38-6,38	5,50-6,50	5,61-6,61
14.b	Rasio kewirausahaan (%)	3,08	3,1	3,6	Rasio Kewirausahaan	3,60	3,63	3,68	3,80	4,10	4,25	4,35
14.c	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,07 (2021)	1,1	1,2	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%)	N/A	0,79	0,79	0,80	0,80	0,81	0,81
14.d	Return on Aset (ROA) BUMN (%)	3,14 (2023)	3,21	3,42	ROA BUMD	N/A	1,24	1,42	1,61	1,79	1,97	2,12
15.a	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,91	4,50-5,00	4,00-4,71	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,6	5,27-5,56	5,14-5,47	5,01-5,38	4,88-5,29	4,74-5,20	4,62-5,11
15.b	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	23,96	35	46	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	41,93	43	44,85	46,70	48,55	50,4	51,88
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,42	56,30-58,80	56,70-60,89	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	58,54	59,29-61,67	59,33-62,22	59,38-62,77	59,43-63,32	59,48-63,87	59,53-64,42

MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJM NASIONAL	BASELINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASELINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
17.a	Pengeluaran IPTEK dan Inovasi (% PDB)	0,28 (2020)	0,3	0,45	-							
17.b	Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	54	53	49	Indeks Inovasi Daerah	59,93	57,50- 60,01	60,01 - 60,76 (Sangat Inovatif)	60,76- 61,51 (Sangat Inovatif)	61,51- 62,26 (Sangat Inovatif)	62,26- 63,01 (Sangat Inovatif)	63,01- 63,76 (Sangat Inovatif)
TUJUAN PEMBANGUNAN 5	Penerapan Ekonomi Hijau				Penerapan Ekonomi Hijau							
18.a	Indeks Ekonomi Hijau	60,08 (2023)	68,34	77,2	Indeks Ekonomi Hijau	N/A	51,12	51,14	51,15	51,17	51,18	51,19
18.b	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	13,2 (2023)	20	23	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	47,73	53,21	60,60	67,99	75,38	82,76	90,15
TUJUAN PEMBANGUNAN 6	Transformasi Digital				Transformasi Digital							
19	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	45 (2023)	43	40	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6.04	6	6.23	6.45	6.68	6.9	7.08

MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJM NASIONAL	BASELINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASELINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TUJUAN PEMBANGUNAN 7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global				Integrasi Ekonomi Domestik dan Global							
20	Biaya Logistik (% PDB)	14,29 (2022)	13,52	12,5	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	N/A	10,1	9,95	9,8	9,65	9,5	9,38
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,3 (2023)	29,4	29,9	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	28,65	29,70	29,75	29,80	29,85	29,90	29,95
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	21,7 (2023)	21,7	22,6	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	12,56	16,45- 16,54	16,62- 16,76	16,79- 16,98	16,96- 17,20	17,13- 17,41	17,30- 17,62
					a) Tingkat Kemantapan Jalan	72,75	75.84	79.17	82.49	85.49	87.17	90,00
TUJUAN PEMBANGUNAN 8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi				Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi							
23.a	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,13 (2023)	44,35	45,6	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	N/A	2,26	2,28	2,3	2,31	2,33	2,34

MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJM NASIONAL	BASELINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASELINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
23.b	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	65,25	67	74	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	73,47	74.36	75.5	78.28	79.54	81.01	82.32
23.c	Persentase Desa Mandiri (%)	22,85	23,29	25,79	Persentase Desa Mandiri (%)	3,1	8,44	8,56	8,69	8,81	8,93	9,03
MISI 3	TRANSFORMASI TATA KELOLA				TRANSFORMASI TATA KELOLA							
TUJUAN PEMBANGUNAN 9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif				Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif							
24	Indeks Materi Hukum	0,60 (2023)	0,51	0,55	Indeks Reformasi Hukum	85,9	86	86	87	88	89	90,00
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,79 (2023)	3	2,00 (b)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.86	3.89	3.92	3.93	3.94	3.95	3.96
26	Indeks Pelayanan Publik	3,78 (2023)	3,68 (a)	3,8	Indeks Pelayanan Publik	3,90	3,92	3,93	3,94	3,95	3,69	3,71
27.a	Indeks Integritas Nasional	70,97 (2023)	74,52	77,57	Indeks Integritas Nasional	N/A	66,78	67,46	68,15	68,83	69,51	70,19

MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJM NASIONAL	BASELINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASELINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
27.b	Indeks Persepsi Korupsi	34 (2023)	38	43,7								
MISI 4	SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA				SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA							
TUJUAN PEMBANGUNAN 10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial				Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, Dan Demokrasi Substansial							
28	Indeks Pembangunan Hukum	0,68 (2023)	0,69	0,73	a) Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	N/A	95 - 100	96 - 100	97 - 100	98 - 100	99 - 100	100
					b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	86,20	86,50	86,80	87,10	87,40	87,70	88,00
29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	62,8 (2020)	67,5	68,5	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	N/A	58,5	59,38	60,25	61,13	62	62,7

MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJM NASIONAL	BASELINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASELINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
30	Indeks Demokrasi Indonesia	79,51 (2023)	81,69-85,23	83,42-86,96	Indeks Demokrasi Indonesia	80,19	80,5 - 82,46	83,08 - 84,08	84,70 - 85,70	86,32 - 87,32	87,95 - 88,95	89,57 - 90,57
TUJUAN PEMBANGUNAN 11	Stabilitas Ekonomi Makro				Stabilitas Ekonomi Makro							
31	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,07	10,24	11,52-15,00	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	N/A	1,37	1,42	1,46	1,51	1,55	1,6
32	Tingkat Inflasi (%)	1,57	2,5 ± 1,0	2,5 ± 1,0	Tingkat Inflasi (%)	2,12	2,5±1	2,5±1	2,5±1	1,61-3,72	1,4-3,7	1,4-3,7
33.a	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)	40,5 (2023)	43	50,9	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	N/A	28,77	30,06	31,35	32,63	33,92	34,95
33.b	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,3 (2023)	8	11,2	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	N/A	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14
33.c	Aset Asuransi/PDB (%)	9,0 (2023)	9,1	10,5	-							
33.d	Nilai Transaksi Saham/PDB (%)	16,0 (2023)	19,8	23,9	Nilai Transaksi Saham Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	N/A	8.103.064,03	8.677.816,12	9.252.568,21	9.827.320,30	10.402.072,39	10.861.874,06
33.e	Total Kredit/PDB (%)	33,9 (2023)	37,8	46,8	Total Kredit/PDRB (%)	N/A	25,7	27,15	28,60	30,04	31,49	32,65

MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJM NASIONAL	BASELINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASELINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
34	Inklusi Keuangan (%)	88,7 (2023)	91	93	Inklusi Keuangan (%)	N/A	97,52	97,61	97,70	97,79	97,88	97,95
TUJUAN PEMBANGUNAN 12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan				Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan							
35	Asia Power Index (Diplomatic Influence)	15,7	16	20	Jumlah Kerja Sama Provinsi Kembar/Bersaudara (Sister Province)	N/A	20	20	21	21	22	22
36	Asia Power Index (Military Capability)	65,6	65,7	66,1	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	N/A	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	92,00
MISI 5	KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI							
TUJUAN PEMBANGUNAN 13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju				Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju							
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,13 (2023)	58,39	60,7	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	N/A	55,44 - 55,48	55,48- 55,50	55,50- 56,50	56,50- 57,56	57,56 - 57,67	57,67- 58,00
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,47	76,77	78,25	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	80,88	81,17	81,20	81,50	81,70	82,62	82,82
TUJUAN PEMBANGUNAN 14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan				Keluarga Berkualitas, Kesenjangan							

MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJM NASIONAL	BASELINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASELINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Gender, dan Masyarakat Inklusif				Gender, dan Masyarakat Inklusif							
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,51 (2023)	72,89	75,55	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga /Ibangga	69,79	71,04	71,96	72,66	73,22	73,67	74,4
40.a	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,447 (2023)	0,43	0,394	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,399	0,395	0,390	0,386	0,382	0,377	0,373
TUJUAN PEMBANGUNAN 15	Lingkungan Hidup Berkualitas				Lingkungan Hidup Berkualitas							
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,35 (2020)	0,44	0,55	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	N/A	0,562	0,567	0,572	0,576	0,581	0,585
42.a.i.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,67 (2023)c	78,53	79,49	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,96	77,2	77,37	77,54	77,7	77,87	78,04
42.a.ii.	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,59 (2023)	72,02	72,77								
42.a.iii.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	61,79	77,97	78,19								
42.a.iv.	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	78,84	81,02	81,22								
42.b	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	10,21 (2023)	12,5	30	RT dengan Akses Sanitasi Aman	7.14	10	11,25	12,50	13,75	15	15,50

MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJM NASIONAL	BASELINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASELINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
42.c.1	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15 (13 terdaur ulang) (2022)	24 (16 terdaur ulang)	38 (20 terdaur ulang)	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	N/A	16	19,00	22,00	25,00	28	30,40
42.c.2	-				Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	N/A	45	49,75	66,50	83,25	100	100
TUJUAN PEMBANGUNAN 16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan				Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan							
43.i.1	Indeks Ketahanan Energi	6,64	6,77	6,95	Konsumsi listrik per kapita	1158,97	1184,21	1213,4	1244,39	1277,25	1312,09	1348,99
43.i.2	-				Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)	81,0	79,4	77,64	75,88	74,12	72,36	70,6
43.ii.	Prevalensi ketidakcukupan pangan (%) / Indeks Ketahanan Pangan	71,2 (a)	73,2	82	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	7,54	7,2	6,87	6,56	6,26	5,98	5,71
43.iii.1	Kapasitas Tampung Air (m3/kapita)	59,59	59,31	63,54	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	N/A	0,64	0,66	0,68	0,71	0,75	0,80
43.iii.2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air	24 (2020)	39,2	51,36	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan	N/A	40,95	43,96	46,98	49,99	53	55,41

MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJM NASIONAL	BASELINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASELINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Siap Minum Perpipaan (%)											
					Indeks Kinerja Sistem Irigasi	49,50	57,47	59,47	61,47	64,47	67,47	70,47
TUJUAN PEMBANGUNAN 17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim							
44	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,140 (2022)	0,137	0,135	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	139,84	157,53	155,05	152,5	149,95	147,8	144,91
45.a	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif (%)	17,2 (2023)	18,37	21,12	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	N/A	10,06	10,78	11,49	12,21	12,92	13,49
45.b	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan (%)	23,48 (2023)	26,67	30,11	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	N/A	19,04	20,63	22,21	23,8	25,38	26,65

Keterangan: b) instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital sehingga target nasional disesuaikan (Lampiran I RPJMN Tahun 2025-2029)

4.2.2. Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara

Indikator Kinerja Utama (IKU) dirumuskan dan ditetapkan dari pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029, yang telah mempertimbangkan arah kebijakan tahap I RPJPD Provinsi, memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah, dan terhubung dengan target-target kinerja pembangunan nasional yang dideteksi melalui ragam indikator makro sasaran pembangunan dan indikator utama pembangunan (IUP). Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis, yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi selama rentang lima tahun, sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

IKU bersifat dependen, dimana nilainya sangat dipengaruhi oleh kinerja berbagai indikator makro lain yang berkontribusi terhadap pencapaian *ultimate outcome* pembangunan daerah. Sebagai indikator makro terpilih, IKU berfungsi sebagai tolok ukur utama dalam menilai kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur. Oleh karena itu, pencapaiannya bersifat lintas perangkat daerah, mencerminkan hasil dari sinergi dan kolaborasi seluruh OPD dalam mewujudkan tujuan pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mengukur kinerja pembangunan di Provinsi Sumatera Utara periode 2025-2029, maka telah ditetapkan sebanyak 12 indikator kinerja utama (IKU). Dua belas indikator ini menjadi alat bantu untuk mendeteksi sejauh mana pencapaian pembangunan sejumlah aspek di Sumatera Utara melalui penetapan sejumlah target, yang menggambarkan suatu proses untuk mencapai visi. Dari 12 indikator kinerja utama, sebanyak sembilan indikator merupakan indikator sasaran utama pembangunan nasional. Penentuan target IKU sendiri terhubung langsung dengan target yang telah ditetapkan pada skala nasional. Artinya, pencapaian IKU di satu sisi berkontribusi besar dalam pencapaian target-target nasional, dan di sisi lain pencapaian IKU merupakan muara dampak kinerja yang diharapkan dalam lima tahun ke depan. Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah periode 2025-2029 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4. 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Modal Manusia	Poin	N/A	0,54	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	Seluruh OPD
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,19	6,96-7,46	5,93-6,55	4,89-5,64	3,86-4,73	2,82-3,82	2,50-3,50	Seluruh OPD
3	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	5,2	5,2	5,2	5,2	5,3	5,3	5,3	Seluruh OPD
4	PDRB per Kapita	Rp. Juta	73,57	78,4	87,6	96,9	106,1	115,3	124,5	Seluruh OPD
5	Indeks Ekonomi Hijau	Poin/Skor	N/A	51,12	51,14	51,15	51,17	51,18	51,19	Seluruh OPD
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,6	5,27-5,56	5,14-5,47	5,01-5,38	4,88-5,29	4,74-5,20	4,62-5,11	Seluruh OPD
7	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,03	5,20- 5,60	5,80-6,20	6,40-6,80	7,00-7,40	7,60-8,00	8,00-8,40	Seluruh OPD
8	Gini Rasio	Poin	0,306	0,303-0,305	0,301-0,303	0,300-0,302	0,291-0,300	0,287-0,291	0,284-0,287	Seluruh OPD
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin/Skor	80,87 (A)	81,12 (A)	81,14 (A)	81,16 (A)	81,18 (A)	81,20(A)	81,22 (A)	Seluruh OPD
10	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	N/A	58,5	59,38	60,25	61,13	62	62,7	Seluruh OPD
11	Persentase Penurunan Emisi GRK									Seluruh OPD
	a. Kumulatif	Persen	N/A	10,06	10,78	11,49	12,21	12,92	13,49	
	b. tahunan	Persen	N/A	19,04	20,63	22,21	23,8	25,38	26,65	
12	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin/Skor	80,19	80,5 - 82,46	83,08 - 84,08	84,70 - 85,70	86,32 - 87,32	87,95 - 88,95	89,57 - 90,57	Seluruh OPD

4.3. INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

4.3.1. Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sumatera Utara

Indikator Kinerja Daerah adalah indikator kinerja yang terdiri dari indikator kinerja makro dan indikator kinerja kunci. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada Permendagri nomor 18 tahun 2020. Indikator Kinerja Daerah (IKD) dibagi menjadi empat aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Aspek geografi dan demografi diukur melalui indikator-indikator yang mencerminkan kondisi wilayah dan karakteristik penduduk Provinsi Sumatera Utara. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial.

Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IKD yang dibagi ke dalam 4 aspek ini merupakan gabungan dari serangkaian indikator yang bersifat makro dan relevan dalam konteks perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara selama lima tahun ke depan, yaitu indikator sasaran visi RPJPD, indikator emas RPJPD, indikator tujuan dan sasaran RPJMD, serta indikator tujuan dari setiap urusan pemerintahan.

Indikator tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih spesifik terhadap urusan tertentu selanjutnya ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Renstra pada OPD terkait. Dengan indikator yang jelas dan terukur, setiap OPD memiliki peta jalan yang lebih pasti untuk merancang program, mengalokasikan sumber daya, serta melakukan evaluasi kinerja. Pendekatan ini mendorong terciptanya budaya kerja berbasis hasil (*result-based management*), di mana keberhasilan tidak dinilai dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi dari sejauh mana dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Dampak nyata yang dimaksud kemudian diterjemahkan ke dalam serangkaian indikator, yang dihitung melalui metode ilmiah dan netral berbasis bukti, sebagai proksi dari gambaran keadaan yang sebenarnya.

Tabel 4. 5. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undermourishment)	Persen	7,54	7,2	6,87	6,56	6,26	5,98	5,71	Dinas Ketahanan Pangan TPH
2	Konsumsi listrik per kapita	kwh/kapita	1158,97	1184,21	1213,4	1244,39	1277,25	1312,09	1348,99	Dinas Perindag dan ESDM
3	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	N/A	1	1,00-2,77	4,14	11,59	16,88	18,52	DLHK
4	Persentase Penurunan Emisi GRK									
	a. Kumulatif	Persen	N/A	10,06	10,78	11,49	12,21	12,92	13,49	Seluruh OPD
	b. tahunan	Persen	N/A	19,04	20,63	22,21	23,8	25,38	26,65	Seluruh OPD
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	73,96	77,2	77,37	77,54	77,7	77,87	78,04	DLHK
6	Indeks Resiko Bencana	Poin	139,84	157,53	155,05	152,5	149,95	147,4	144,91	BPBD
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	7,14	10	11,25	12,5	13,75	15	15,5	Dinas PUPR
8	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	N/A	40,95	43,96	46,98	49,99	53	55,41	Dinas PUPR
9	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	N/A	0,562	0,567	0,572	0,576	0,581	0,585	Dinas LH dan Kehutanan
10	Persentase Tutupan Lahan	Persen	N/A	20	20	20	20	20	20	Dinas LH dan Kehutanan
11	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	61,09	75,8	76	76,2	76,4	76,6	76,8	Dinas LH dan Kehutanan
12	Indeks kualitas Udara (IKU)	Poin	92,26	82,2	82,4	82,6	82,8	83	83,2	Dinas LH dan Kehutanan
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Modal Manusia	Poin	N/A	0,54	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	Seluruh OPD
2	Angka Kematian Ibu	100.000/KL	68.19	65,78	58,9	55,5	52,49	49,21	46,32	Dinas Kesehatan
3	Prevalensi Stunting	Persen	22	20	18,5	17	15,5	14	12,5	Dinas Kesehatan
4	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis	Persen	71,8	90	90	90	90	90	90	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	Persen	85	90	90	90	90	90	90	Dinas Kesehatan
6	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	74,40%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Dinas Kesehatan
7	Usia arapan Hidup	Tahun	73,9	74,01	74,18	74,36	74,54	74,72	74,9	Dinas Kesehatan
	Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional									
8	a. Literasi Membaca	Poin	N/A	6,06-12,12	12,01-16,01	16,94-20,94	22,36-25,36	27,27-30,30	32,21-35,21	Dinas Pendidikan
9	b. Numerasi	Poin	N/A	0,00-3,03	1,5-4,57	3,03-6,06	4,5-7,6	6,06-9,09	7,5-10,68	Dinas Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional									
10	a. Literasi Membaca	Poin	N/A	35,99-38,49	37,37-39,88	38,76-41,26	40,15-42,65	41,53-44,03	42,92-45,42	Dinas Pendidikan
11	b. Numerasi	Poin	N/A	33,70-36,20	34,70-39,20	35,70-38,20	36,70-39,20	37,70-40,20	38,70-41,20	Dinas Pendidikan
12	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan tinggi	Persen	N/A	11,12	11,12-11,30	11,12-11,33	11,12-11,37	11,12-11,40	11,16-11,44	Dinas Pendidikan
13	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah tinggi	Persen	N/A	71,1	72,47	73,85	75,22	76,59	77,69	Dinas Pendidikan
14	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,93	10,3 - 10,33	10,43-10,46	10,56-10,59	10,69-10,72	10,83 - 10,84	10,96-10,97	Dinas Pendidikan
15	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,49	13,61 - 13,63	13,67-13,69	13,73-13,75	13,79-13,81	13,86 - 13,87	13,92-13,94	Dinas Pendidikan
16	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	62.39	69,02	69,5	70	70,5	71	71,5	Dinas Perputakaan dan Arsip
17	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,19	6,96-7,16	5,93-6,55	4,89-5,64	3,86-4,73	2,82-3,82	2,50-3,50	Seluruh OPD
18	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	49,59	51	53,25	55,5	57,75	60	62,25	Dinas Ketenagakerjaan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
19	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	Unit	9	14	19	24	29	34	38	Dinas Ketenagakerjaan
20	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	N/A	55,44 - 55,48	55,98-56,05	56,52-56,59	57,06-57,14	57,56-57,67	58,13-58,20	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
21	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	80,88	77,89	78,15	78,5	78,55	79,2	79,55	Kesbangpol
22	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	60,20	61,32	62,49	63,66	64,86	66,08	67,32	Dinas P3AKB
23	Indeks Ketimpangan Gender	Persen	0,399	0,395	0,39	0,386	0,382	0,377	0,373	Dinas P3AKB
24	Indeks pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Poin	69,79	71,04	71,96	72,66	73,22	73,67	74,33	Dinas P3AKB
25	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	91,5	91,59	91,71	91,82	91,94	92,06	92,19	Dinas P3AKB
26	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Poin	62,5	63,7	64,9	66,2	67,6	69,1	70,7	Dinas P3AKB
27	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	56,09	56,09	56,59	57,09	57,59	58,09	58,59	Dinas Sosial
28	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	56,33	58,5	60,7	63	65,5	68	70,5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
29	Indeks Partisipasi Olahraga	Persen	N/A	0,275	0,288	0,301	0,315	0,33	0,345	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
30	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,44	0,46	0,48	0,5	0,52	0,54	0,57	Biro Kesra
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	18,36	18,66	18,96	19,26	19,56	19,86	20,16	Dinas Perindag dan ESDM
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	2,21	2,42	2,5	2,58	2,65	2,73	2,79	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	Indeks Ekonomi Hijau	Poin/Skor	N/A	51,12	51,14	51,15	51,17	51,18	51,19	Seluruh OPD
4	PDRB per Kapita	Rp. Juta	73,57	78,4	87,6	96,9	106,1	115,3	124,5	Seluruh OPD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	N/A	5,45	5,5	5,55	5,6	5,65	5,7	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6	Rasio Volume Usaha koperasi terhadap PDRB	Persen	N/A	0,79	0,79	0,8	0,8	0,81	0,81	Dinas Koperasi, UKM
7	Indeks Inovasi Daerah	Poin	59,93	57,50-60,01	58,69-60,76	59,88-61,51	61,07-62,26	62,26-63,01	63,45-63,76	Bappelitbang
8	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi	Poin	6,04	6	6,23	6,45	6,68	6,9	7,08	Dinas Kominfo
9	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	42,04	43	44	44	45	45	46	Dinas Perindag dan ESDM
10	Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)	SBM/Rp Miliar	81	79,4	77,64	75,88	74,12	72,36	70,6	Dinas Perindag dan ESDM
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,6	5,27-5,56	5,14-5,47	5,01-5,38	4,88-5,29	4,74-5,20	4,62-5,11	Seluruh OPD
12	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,03	5,20- 5,60	5,80-6,20	6,40-6,80	7,00-7,40	7,60-8,00	8,00-8,40	Seluruh OPD
13	Kontribusi PRDB Provinsi	Persen	5,2	5,2	5,2	5,2	5,3	5,3	5,3	Seluruh OPD
14	Gini Rasio	Poin	0,306	0,303-0,305	0,301-0,303	0,300-0,302	0,291-0,300	0,287-0,291	0,284-0,287	Seluruh OPD
15	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Poin	N/A	10,1	9,95	9,8	9,65	9,5	9,38	Dinas Perindag dan ESDM
16	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	28,65	29,7	29,75	29,8	29,85	29,76-30,04	29,95	Dinas PMPTSP
17	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	Persen	N/A	2,26	2,28	2,3	2,31	2,33	2,34	Biro Perekonomian
18	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	72,75	75.84	79.17	82.49	85.49	87.17	90	Dinas PUPR
19	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	73,47	74.36	75.5	78.28	79.54	81.01	82.32	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
20	Persentase Desa Mandiri	Persen	3,1	8,44	8,56	8,69	8,81	8,93	9,03	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
21	Tingkat Inflasi	Persen	2,12	2,5±1	2,5±1	2,5±1	1,61-3,72	1,4-3,7	1,4-3,7	Sekretariat Daerah
22	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	41,93	43	44,85	46,7	48,55	50,4	51,88	Dinas Ketenagakerjaan
23	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persen	N/A	28,77	30,06	31,35	32,63	33,92	34,95	Biro Perekonomian
24	Aset Dana Pensiun/PDRB	Persen	N/A	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	Biro Perekonomian
25	Nilai Transaksi Saham per Kapita per Provinsi (Rp)	Rp. Miliar	N/A	8.103.064,03	8.677.816,12	9.252.568,21	9.827.320,30	10.402.072,39	10.861.874,06	Biro Perekonomian
26	Total Kredit/PDRB	Persen	N/A	25,7	27,15	28,6	30,04	31,49	32,65	Sekretariat Daerah
27	Return on Asset (ROA) BUMD	Persen	N/A	1,24	1,42	1,61	1,79	1,97	2,12	Biro Perekonomian
28	Inklusi Keuangan	Persen	N/A	97,52	97,61	97,70	97,79	97,88	97,95	Biro Perekonomian
29	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	81.898.862,98	84.331.740,97	86.836.889,75	89.416.456,18	92.072.650,91	94.807.750,24	97.624.098,12	Dinas Ketenagakerjaan
30	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	77,49	77,88	78,26	78,65	79,04	79,43	79,82	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
31	Indeks Desa	Poin	0,6437	0,6671	0,6799	0,685	0,6875	0,6884	0,7133	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil
32	Rasio konektivitas Provinsi	Poin	76,59	79,28	81,3	83,32	85,34	87,36	89,38	Dinas Perhubungan
33	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	N/A	46,51	48	50	52	54	55	Dinas Koperasi, UKM
34	Persentase Peningkatan Investasi	Persen	23,61	25	50	75	100	125	150	Dinas PMPTSP
35	NTP Tanaman Pangan	Poin	100,25	100,26	100,27	100,28	100,29	100,3	100,31	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
36	NTP Tanaman Hortikultura	Poin	92,81	92,82	92,83	92,84	92,85	92,86	92,87	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
37	Nilai Tukar Nelayan	Persen	101,32	101,35	102,54	103,32	104,1	105,43	105,45	Dinas Kelautan dan Perikanan
38	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan	Persen	97	98	98	99	100	101	102	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
39	Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)	Poin	182,87	183,05	183,24	183,42	183,6	183,79	183,97	Dinas Perkebunan dan Peternakan
40	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	Poin	95,4	95,5	95,59	95,69	95,78	95,88	95,97	Dinas Perkebunan dan Peternakan
41	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	18,79	19,03	19,2	19,37	19,54	19,71	19,88	Dinas Perindag dan ESDM
42	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	60,43	60,93	61,93	62,68	63,43	64,18	64,68	Bapenda
43	Aset Perbankan Syariah/PDRB	Persen	2.86	2.95	3.06	3.32	3.47	3.79	4.03	Biro Perekonomian
44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. /pekerja /tahun	81.898.862,98	84.331.740,97	86.836.889,75	89.416.456,18	92.072.650,91	94.807.750,24	97.624.098,12	Dinas Ketenagkerjaan
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Poin/Skor	N/A	82	84	86	88	90	92	Biro Organisasi
2	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin/Skor	80,19	80,5 - 82,46	83,08 - 84,08	84,70 - 85,70	86,32 - 87,32	87,95 - 88,95	89,57 - 90,57	Seluruh OPD
3	Indeks Pelayanan Publik	Poin/Skor	3,19	3,92	3,93	3,94	3,95	3,69	3,71	Biro Organisasi
4	Reformasi Birokrasi	Poin/Skor	N/A	81,12 (A)	81,14 (A)	81,16 (A)	81,18 (A)	81,20(A)	81,22 (A)	Seluruh OPD
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin/Skor	3,86	3,89	3,92	3,93	3,94	3,95	3,96	Dinas Kominfo
6	Indeks Reformasi Hukum	Poin/Skor	85,9	86	86	87	88	89	90	Biro Hukum
7	Indeks integritas Nasional	Poin/Skor	N/A	66,78	67,46	68,15	68,83	69,51	70,19	Inspektorat
8	Jumlah Kerja Sama Provinsi	Jumlah Kerjasama	N/A	20	20	21	21	22	22	Biro Ogranisasi
9	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	N/A	95 - 100	96 - 100	97 - 100	98 - 100	99 - 100	100	Satpol PP
10	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Persen	N/A	60	62,5	65	67,5	70	72	Biro Hukum
11	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	N/A	58,5	59,38	60,25	61,13	62	62,7	Seluruh OPD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	N/A	3,4	3,49	3,58	3,66	3,75	3,82	Bappelitbang
13	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Poin	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
14	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Poin	N/A	0,76	0,8	0,84	0,86	0,9	0,95	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil
15	Indeks Pembangunan Statistik	Poin	1,8	2	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	Dinas Kominfo
16	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Poin	72,97	73,5	74	75	76	77	78	Dinas Perputakaan dan Arsip
17	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Persen	N/A	90	90	93	93	93	93	Sekretariat DPRD
18	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	N/A	90,50 – 92,00	92,55 – 93,00	93,10 – 93,25	93,30 – 93,25	93,50 – 93,75	94,00 – 94,25	Bappelitbang
19	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD
20	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Poin	N/A	29,8	30,05	30,3	30,85	31,35	31,75	BPSDM
21	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	79,44	79,94	80,15	80,25	80,35	80,45	80,55	Badan Kepegawaian
22	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	Bappelitbang
23	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Kategori	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Inspektorat
24	Nilai Capaian Pelaporan Kinerja (SAKIP)	Poin	N/A	72,00(BB)	72,5	73	73,5	74	74,5	Sekretariat Daerah
25	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	70,60	70,80	71,00	71,15	71,25	71,50	72,15	Bappelitbang
INDIKATOR KINERJA KUNCI										
I	Pendidikan									
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,93	10,3 - 10,33	10,43-10,46	10,56-10,59	10,69-10,72	10,83 - 10,84	10,96-10,97	Dinas Pendidikan
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,49	13,61 - 13,63	13,67-13,69	13,73-13,75	13,79-13,81	13,86 - 13,87	13,92-13,94	Dinas Pendidikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional									Dinas Pendidikan
3	a. Literasi Membaca	Poin/Skor	N/A	6,06-12,12	12,01-16,01	16,94-20,94	22,36-25,36	27,27-30,30	32,21-35,21	Dinas Pendidikan
4	b. Numerasi	Poin/Skor	N/A	0,00-3,03	1,5-4,57	3,03-6,06	4,5-7,6	6,06-9,09	7,5-10,68	Dinas Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional									
5	a. Literasi Membaca	Poin/Skor	N/A	35,99-38,49	37,37-39,88	38,76-41,26	40,15-42,65	41,53-44,03	42,92-45,42	Dinas Pendidikan
6	b. Numerasi	Poin/Skor	N/A	33,70-36,20	34,70-39,20	35,70-38,20	36,70-39,20	37,70-40,20	38,70-41,20	Dinas Pendidikan
7	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan tinggi	Persen	N/A	11,12	11,12-11,30	11,12-11,33	11,12-11,37	11,12-11,40	11,16-11,44	Dinas Pendidikan
8	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	Persen	78,59	78,59	79,4	79,975	80,55	81,125	81,7	Dinas Pendidikan
9	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus (APS)	Persen	65,84	65,84	74,38	75,6	76,82	78,04	79,26	Dinas Pendidikan
10	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	80	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
11	Indeks Pemerataan Guru	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
12	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persen	44,67	50,4	51,4	52,4	53,4	54,4	55,4	Dinas Pendidikan
II	Kesehatan									
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,9	74,01	74,18	74,36	74,54	74,72	74,9	Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Ibu	100.000/KL	68.19	65,78	58,9	55,5	52,49	49,21	46,32	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Prevalensi Stunting	Persen	22	20	18,5	17	15,5	14	12,5	Dinas Kesehatan
4	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis	Persen	71,8	90	90	90	90	90	90	Dinas Kesehatan
5	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	Persen	85	90	90	90	90	90	90	Dinas Kesehatan
6	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	74,40%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Dinas Kesehatan
7	Angka Kematian Balita	1.000/KL	NA	3.4	3.05	2.87	2.70	2.55	2.40	Dinas Kesehatan
8	Angka Kematian Bayi	1.000/KL	NA	3.28	2.94	2.77	2.61	2.46	2.32	Dinas Kesehatan
9	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Pesen	N/A	36%	46%	55%	61%	70%	80%	Dinas Kesehatan
10	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persen	70%	70%	72%	75%	78%	80%	82%	Dinas Kesehatan
11	Persentase Hipertensi dalam Pengendalian	Persen	6,65%	7%	10%	13%	16%	19%	22%	Dinas Kesehatan
12	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	Persen	N/A	65%	66%	67%	69%	75%	80%	Dinas Kesehatan
13	Persentase ibu hamil ANC (antenatal care) 6 kali sesuai standard	persen	N/A	82	84	86	88	90	92	Dinas Kesehatan
14	Persentase Wasting (Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk)	Persen	9	8	7,5	7	6,5	5	4	Dinas Kesehatan
15	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
16	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
17	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial dan	Persen	N/A	65	70	75	80	85	90	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Vaksin Imunisasi Rutin Lengkap (IRL)									
18	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Persen	N/A	3,88	3,92	4,07	4,23	4,4	4,58	Dinas Kesehatan
19	Persentase Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Alat Kesehatan serta PKRT yang memenuhi standar mutu	Persen	N/A	87	89	91	93	95	97	Dinas Kesehatan
20	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	Persen	N/A	17	19	21	23	25	27	Dinas Kesehatan
	UPTD Khusus Rumah Sakit Haji Medan									
1	Bed Occupancy Rate (BOR)	Persen	71.8	72	73	74	75	76	77	RS Haji
2	Length Of Stay (LOS)	Tempat Tidur	4 Hr	4 Hr	4 Hr	4 Hr	4 Hr	4 Hr	4 Hr	RS Haji
3	Indek Kepuasan Masyarakat	Persen	87.6	88.1	88.6	89.1	89.6	90.1	90.6	RS Haji
	UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Medan									
1	Bed Occupancy Rate (BOR)	Persen	71.8	72	73	74	75	76	77	RS Jiwa
2	Rata-rata lamanya pasien dirawat/ Average Length of stay (ALOS)	Hari	40	35	30	25	20	20	20	RS Jiwa
3	Indek Kepuasan Masyarakat	Persen	75	80	85	90	90	90	90	RS Jiwa
III	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	N/A	40,95	43,96	46,98	49,99	53	55,41	Dinas PUPR
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	7,14	10	11,25	12,5	13,75	15	15,5	Dinas PUPR
3	Persentase Peningkatan perlindungan kawasan	Persen	N/A	60,38	62,34	65,23	71,11	77,7	82,73	Dinas PUPR

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	permukiman rawan banjir									
4	Persentase Peningkatan perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	Persen	N/A	13,5	13,56	15,75	21,3	27,37	31,67	Dinas PUPR
5	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Persen	N/A	55,5	58,56	61,62	64,68	67,74	70,5	Dinas PUPR
6	Persentase Peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota	Persen	N/A	40.95	43.95	47.15	50.3	53	55	Dinas PUPR
7	Terbangunnya Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional/TPST	Unit	0	0	1	0	0	0	0	Dinas PUPR
8	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman	Persen	N/A	23.00	23.08	23.08	23.12	23.12	23.12	Dinas PUPR
9	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	N/A	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPR
10	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Persen	N/A	0	0	36,84	57,89	84,21	100	Dinas PUPR
11	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persen	N/A	50	100	100	100	100	100	Dinas PUPR
12	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persen	N/A	10.6	13.6	17.6	20.3	25.6	28	Dinas PUPR
13	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	72,75	75.84	79.17	82.49	85.49	87.17	90	Dinas PUPR
14	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persen	N/A	15,88	16,22	16,62	17,08	17,62	18,72	Dinas PUPR
15	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi	Poin	62.69	68	70	72	75	78	78	Dinas PUPR

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
IV	Perumahan Rakyat									
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	73,47	74.36	75.5	78.28	79.54	81.01	82.32	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	6	9	12	15	18	21	24	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	6	9	12	15	18	21	24	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 ha yang ditangani	Ha	57,6	19	19	19	19	19	19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (IP)	Lokasi	8	8	8	8	8	8	8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
V	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
1	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
2	Persentase penegakan hukum peraturan daerah dan kepala daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
3	Indeks Risiko Bencana	Poin	139,84	157,53	155,05	152,5	149,95	147,4	144,91	BPBD
4	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
5	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
6	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	Satpol PP
7	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	Satpol PP
9	Persentase Penanganan Pra bencana	Persen	6,1	9,1	15,1	42,4	72,7	90,9	97	BPBD
10	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	70	75	82	86	91	95	97	BPBD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persen	6,1	9,1	27,3	45,4	63,6	81,8	90,9	BPBD
12	Persentase kabupaten/kota dengan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) aktif	Persen	6,1	15,1	45,4	60,6	75	90,9	97	BPBD
13	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Laporan	N/A	N/A	4	4	4	4	4	Satpol PP
14	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Laporan	N/A	N/A	4	4	4	4	4	Satpol PP
VI	Sosial									
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Point	56,09	56,09	56,59	57,09	57,59	58,09	58,59	Dinas Sosial
2	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
3	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
4	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	Persen	91	92	92,5	94	94,5	95	95,5	Dinas Sosial

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	persen	10	12	14	16	18	20	22	Dinas Sosial
6	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	persen	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Sosial
7	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	orang	75	80	85	90	95	100	105	Dinas Sosial
8	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
9	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
10	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
11	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
12	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
13	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
14	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Poin	37,92	38,42	42,64	46,86	51,08	55,3	56,2	Dinas Sosial
15	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Poin	59,17	59,67	62,37	65,07	67,76	70,46	73,07	Dinas Sosial

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16	Indeks Peranan Sosial	Poin	50,5	51	52	53	54	55	56	
17	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	persen	0,37	0,38	0,39	0,4	0,41	0,42	0,43	Dinas Sosial
18	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	persen	0,37	0,38	0,39	0,4	0,41	0,42	0,43	Dinas Sosial
19	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
20	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	persen	59,5	60	61	62	63	64	65	Dinas Sosial
21	Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi	persen	42,5	43	44	45	46	47	48	Dinas Sosial
22	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	persen	2,77	3,27	6,54	9,82	13,09	16,36	19,09	Dinas Sosial
23	Persentase Korban Bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
24	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
25	Persentase Korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
26	Persentase tanah makam pahlawan nasional yang dikelola dengan baik	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
VII	Tenaga Kerja									
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta/Orang	81.898.862,98	84.331.740,97	86.836.889,75	89.416.456,18	92.072.650,91	94.807.750,24	97.624.098,12	Dinas Ketenagakerjaan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah tinggi	Persen	N/A	71,1	72,47	73,85	75,22	76,59	77,69	Dinas Ketenagakerjaan
3	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	49.59	51	53,25	55,5	57,75	60	62,25	Dinas Ketenagakerjaan
4	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	Unit	9	14	19	24	29	34	38	Dinas Ketenagakerjaan
5	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	41,93	43	44,85	46,7	48,55	50,4	51,88	Dinas Ketenagakerjaan
6	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persen	39,39	100	100	100	100	100	100	Dinas Ketenagakerjaan
7	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Persen	0,025	0,025	0,026	0,026	0,027	0,027	0,028	Dinas Ketenagakerjaan
8	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persen	49,85	51,76	53,53	55,17	56,70	59,35	60,16	Dinas Ketenagakerjaan
9	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	Persen	67,31	67,50	67,75	68,00	68,25	68,50	68,75	Dinas Ketenagakerjaan
10	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	orang	455.287	503.287	551.287	599.287	647.287	695.287	743.287	Dinas Ketenagakerjaan
11	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	orang	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	Dinas Ketenagakerjaan
12	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian	Persen	38,84	39,64	40,44	41,04	42,02	43		Dinas Ketenagakerjaan
13	Persentase Pekerja Informal	Persen	57,35	56,95	56,55	55,25	54,75	54		Dinas Ketenagakerjaan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
14	Persentase Kepemilikan NPWP	Persen	42,65	43,82	44,72	45,55	46,40	47		Dinas Ketenagakerjaan
15	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Persen	59,7	60	62	64	66	68	70	Dinas Ketenagakerjaan
VIII	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	91,5	91,59	91,71	91,82	91,94	92,06	92,19	Dinas P3AKB
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Persen	0,399	0,395	0,39	0,386	0,382	0,377	0,373	Dinas P3AKB
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Poin	62,5	63,7	64,9	66,2	67,6	69,1	70,7	Dinas P3AKB
4	Persentase Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Persen	1	2	2	3	3	3	3	Dinas P3AKB
5	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	12	17	37	49	68	85	100	Dinas P3AKB
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	61,72	63,65	65,57	67,50	69,42	71,35	73,27	Dinas P3AKB
7	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	82	83	85	87	90	92	95	Dinas P3AKB
8	rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan)	per 100.000	68,50	68,75	69,95	70,95	71,80	72,98	74,10	Dinas P3AKB
9	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	unit	2.66:2.66	2,66	2.7	2.65	2.6	2.5	2.1	Dinas P3AKB
10	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persen	1	2	2	3	3	3	3	Dinas P3AKB
11	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Poin/skor	12	17	37	49	68	85	100	Dinas P3AKB
12	Persentase Anak Memerlukan	Persen	61,72	63,65	65,57	67,50	69,42	71,35	73,27	Dinas P3AKB

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif									
13	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Poin/skor	82	83	85	87	90	92	95	Dinas P3AKB
14	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	per 10.000	68,50	68,75	69,95	70,95	71,80	72,98	74,10	Dinas P3AKB
XI	Pangan									
1	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undermourishment)	Persen	7,54	7,2	6,87	6,56	6,26	5,98	5,71	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
2	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	77,49	77,88	78,26	78,65	79,04	79,43	79,82	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
3	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persen	5,24	10	11	12	13	14	15	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
4	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	89,16	90,05	90,95	91,85	92,77	93,7	94,64	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
5	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	10	9	8	7	6	5	4	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
6	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen	91,5	92	92,5	93	93,5	94	94,5	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
X	Pertanahan									
1	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Santunan Tanah untuk Pembangunan									
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Direistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah Disesuaikan dengan konteks daerah	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
XI	Lingkungan Hidup									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	73,96	77,2	77,37	77,54	77,7	77,87	78,04	Dinas LH dan Kehutanan
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	61,09	75,8	76	76,2	76,4	76,6	76,8	Dinas LH dan Kehutanan
3	Indeks kualitas Udara (IKU)	Poin	92,26	82,2	82,4	82,6	82,8	83	83,2	Dinas LH dan Kehutanan
4	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	N/A	16	19	22	25	28	30,4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	N/A	45	49,75	66,5	83,25	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas LH dan Kehutanan
7	Persentase RTH	Persen	N/A	0	10	10	10	10	10	Dinas LH dan Kehutanan
8	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persen	91,67	76	76	76	76	76	76	Dinas LH dan Kehutanan
9	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Persen	67,45	69	71	72	73	74	75	Dinas LH dan Kehutanan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas LH dan Kehutanan
11	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	92,5	100	100	100	100	100	100	Dinas LH dan Kehutanan
12	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persen	66,67	67	68	69	70	71	72	Dinas LH dan Kehutanan
13	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	31,14	40	47,56	47,56	47,56	47,56	47,56	Dinas LH dan Kehutanan
XII	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Poin	N/A	0,76	0,8	0,84	0,86	0,9	0,95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	7,27	10	15	25	35	45	55	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	46,86	50	55	60	65	70	75	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil
4	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil
5	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	95,49	96,2	97	97,8	98,2	99	99,5	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil
6	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil
7	Persentase Akta Perceraian yang	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PMD, Kependudukan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Diterbitkan bagi yang Melaporkan									dan Pencatatan sipil
8	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persen	70	75	75	80	80	85	85	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil
9	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil
XIII	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Persentase Desa Mandiri	Persen	3,1	8,44	8,56	8,69	8,81	8,93	9,03	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	Indeks Desa	Poin	0,6437	0,6671	0,6799	0,685	0,6875	0,6884	0,7133	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
3	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil
4	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil
5	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	N/A	0,0094	0,0094	0,0094	0,0094	0,0094	0,0094	
6	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	Persen	N/A	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil
7	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persen	N/A	0,0243	0,0243	0,0243	0,0243	0,0243	0,0243	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil
8	Persentase Fasilitas Pemberdayaa n Lembaga	Persen	N/A	0,0243	0,0243	0,0243	0,0243	0,0243	0,0243	Dinas PMD, Kependudukan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat									dan Pencatatan sipil
9	Rate Nett Recent Migrasi		-0,49	-0,49	-0,49	-0,485	-0,485	-0,48		Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan sipil
XIV	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin/skor	60,2	61,32	62,49	63,66	64,86	66,08	67,32	Dinas P3AKB
2	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Poin	66,12	67,21	68,25	69,24	70,19	71,09	71,95	Dinas P3AKB
3	Indeks pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Poin/skor	69,79	71,04	71,96	72,66	73,22	73,67	74,33	Dinas P3AKB
4	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility rate/ TFR</i>)	Poin	2,36	2,35	2,34	2,33	2,32	2,32	2,31	Dinas P3AKB
5	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility rate (ASFR 15-19)</i>)	Angka	17,3	17,31	17,41	17,52	17,63	17,73	17,8	Dinas P3AKB
6	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas dan Mandiri	Persen	54,03	54,96	55,86	56,71	57,53	58,31	59,05	Dinas P3AKB
7	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	17,65	16,99	16,33	15,68	15,02	14,36	13,71	Dinas P3AKB
8	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi menurut Alat/ Cara KB Modern	Persen	73,79	75,3	76,67	77,91	79,04	80,06	80,98	Dinas P3AKB
9	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	52,1	54,3	56,9	59,28	61,65	64,03	67,21	Dinas P3AKB
10	Persentase kehamilan yang tidak direncanakan (PKTD)	Persen	13,69	13:13	12,61	12,12	11,67	11,24	10,8	Dinas P3AKB
11	Presentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persen	15	20	25	45	50	75	100	Dinas P3AKB
12	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Poin	81,32	82,79	84,14	85,39	86,54	87,6	88,57	Dinas P3AKB

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
13	Indeks Lansia Berdaya	Poin	60,73	61,79	62,81	63,8	64,75	65,66	66,54	Dinas P3AKB
XV	Perhubungan									
1	Rasio konektivitas	Poin	76,59	79,28	81,3	83,32	85,34	87,36	89,38	Dinas Perhubungan
2	Konektivitas Darat	Persen	75,13	77,06	78,99	80,93	82,86	84,97	86,73	Dinas Perhubungan
3	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persen	37,55	38,94	50,92	63,09	75,39	87,7	90	Dinas Perhubungan
4	Konektivitas Laut	Persen	80	84,44	86,67	88,89	91,11	93,33	95,56	Dinas Perhubungan
5	Cakupan perlintasan kereta api yang ditangani	Persen	12,5	25	37,5	50	62,5	75	87,5	Dinas Perhubungan
XVI	Komunikasi dan Informatika									
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,86	3,89	3,92	3,93	3,94	3,95	3,96	Dinas Kominfo
2	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	75	76	77	78	79	80	81	Dinas Kominfo
3	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Poin	N/A	50	51	51,5	52	52,5	53	Dinas Kominfo
4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	1,8	2	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	Dinas Kominfo
5	Indeks SPBE (terkait keamanan)	Angka	455	455	470	480	490	500	550	Dinas Kominfo
6	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi	Poin/Skor	6,04	6	6,23	6,45	6,68	6,9	7,08	Dinas Kominfo
7	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Persen	N/A	77	79	81	83	85	87	Dinas Kominfo
XVII	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
1	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	N/A	46,51	48	50	52	54	55	Dinas Koperasi, UKM
2	Rasio Volume Usaha koperasi terhadap PDRB	Persen	N/A	0,79	0,79	0,8	0,8	0,81	0,81	Dinas Koperasi, UKM
3	Proporsi Jumlah UKM terhadap UMKM	Persen	0,35	0,48	0,55	0,68	0,76	0,84	1,00	Dinas Koperasi, UKM

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	2,86	3,00	3,28	3,35	3,50	3,60	3,80	Dinas Koperasi, UKM
5	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Sertifikat	68.342	78.161	78.391	78.621	78.831	79.011	79.191	Dinas Koperasi, UKM
6	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	4,61	4,82	5,07	5,19	5,31	5,38	5,49	Dinas Koperasi, UKM
7	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	1,38	1,87	2,54	3,61	4,59	5,72	6,51	Dinas Koperasi, UKM
8	Persentase Koperasi Aktif	Persen	40,93	41,87	42,91	43,76	44,89	45,73	46,86	Dinas Koperasi, UKM
9	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Persen	0,33	0,81	1,25	1,86	2,37	2,95	3,24	Dinas Koperasi, UKM
10	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	6,26	7,43	8,69	9,27	10,42	11,36	12,48	Dinas Koperasi, UKM
11	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	15,95	17,37	19,51	21,79	23,42	25,87	27,28	Dinas Koperasi, UKM
12	Pertumbuhan Wirausaha	Persen	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,8	Dinas Koperasi, UKM
13	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persen	1,51	1,66	1,8	1,9	2,02	2,14	2,28	Dinas Koperasi, UKM
14	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	Persen	25,48	26,61	27,71	28,78	29,81	30,82	32,02	Dinas Koperasi, UKM
15	Proporsi jumlah UKM non pertanian pada Level Provinsi (%)	Persen	N/A	10,66-10,81	10,67-10,82	10,68-10,83	10,69-10,84	10,70-10,85	10,71-10,86	Dinas Koperasi, UKM
XVIII	Penanaman Modal									
1	Persentase Peningkatan Investasi	Persen	23,61	25	50	75	100	125	150	Dinas PMPTSP
2	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	28,65	29,7	29,75	29,8	29,85	29,76-30,04	29,95	Dinas PMPTSP
3	Realisasi Total terhadap target Investasi (RPJMD)	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas PMPTSP
4	Realisasi Total terhadap target Investasi (BKPM)	Persen	N/A	85	85	85	85	85	85	Dinas PMPTSP
5	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persen	N/A	53,5	54	54,5	55	55,5	56	Dinas PMPTSP
6	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas PMPTSP

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas PMPTSP
8	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas PMPTSP
9	Persentase kerjasama penanaman Modal yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas PMPTSP
XIX	Kepemudaan dan Olahraga									
1	Indeks Partisipasi Olahraga	Poin/skor	N/A	0,275	0,288	0,301	0,315	0,33	0,345	Dinas Kepemudaan dan keolahragaan
2	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Poin/skor	56,33	58,5	60,7	63	65,5	68	70,5	Dinas Kepemudaan dan keolahragaan
3	Rasio Wirausaha pemuda	Persen	N/A	0	1,5890478	1,8335167	2,0168684	2,2613372	2,4446889	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
4	Persentase Atlet yang masuk Pelatnas	Persen	N/A	12	15	18	21	24	28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
5	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	Persen	N/A	0	0,0024565	0,0030707	0,0036848	0,0042989	0,0049131	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
XX	Urusan Statistik									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	1,8	2	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	Dinas Kominfo
XXI	Urusan Persandian									
1	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Persen	N/A	40	42	44	46	48	50	Dinas Kominfo
XXII	Kebudayaan									
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin/Skor	N/A	55,44 - 55,48	55,98-56,05	56,52-56,59	57,06-57,14	57,56-57,67	58,13-58,20	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap	Persen	N/A	50	60	70	80	90	100	Dinas Kebudayaan,

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pengembangan Kebudayaan									Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persen	N/A	10	15	20	25	30	35	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persen	N/A	15	15	16	17	18	19	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persen	N/A	5	8	11	14	17	20	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6	Persentase kunjungan wisatawan ke museum	Persen	N/A	97,93	97,99	98,05	98,11	98,16	98,21	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7	Persentase pelaku industri perfilman yang tervalidasi	Persen	N/A	5	10	10	15	15	20	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
XXIII	Perpustakaan									
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	poin	62.39	69,02	69,5	70	70,5	71	71,5	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat	Nilai/poin	68,57	70	71	72	73	74	75	Dinas Perpustakaan dan Arsip
3	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	persen	N/A	20	25	30	35	40	50	Dinas Perpustakaan dan Arsip
4	Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi dibidang Perpustakaan	persen	N/A	25	30	40	50	60	70	Dinas Perpustakaan dan Arsip
XXIV	Kearsipan									
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	poin	72,97	73,5	74	75	76	77	78	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	Tingkat ketersediaan arsip	persen	82,78	84	85	86	87	88	89	Dinas Perpustakaan dan Arsip

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	persen	N/A	10	15	17	20	21	22	Dinas Perputakaan dan Arsip
4	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	persen	N/A	1	2	3	4	5	6	Dinas Perputakaan dan Arsip
5	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya	persen	N/A	10	15	20	25	30	35	Dinas Perputakaan dan Arsip
XXV	Kelautan Perikanan									
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen	101,32	101,35	102,54	103,32	104,1	105,43	105,45	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Persen	97	98	98	99	100	101	102	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persen	1,67	1,6	1.7	1.9	2	2,2	2,25	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Indeks Ekonomi Biru			50,2	50,2	50,2	50,2	59,68	59,68	Dinas Kelautan dan Perikanan
5	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	399.941	395427	410213	427103,34	435701	463078,68	476971,04	Dinas Kelautan dan Perikanan
6	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	332.310,14	340.000	342.279,00	350.836	360.484	371.298	381.509	Dinas Kelautan dan Perikanan
7	Luasan Kawasan Konservasi	Hektar	210.404	27.343,41	7703,41	1415,36	1880,91	9474,49	1292,28	Dinas Kelautan dan Perikanan
8	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Tahun	51,24	35,01	35,31	35,66	36,02	36,38	36,75	Dinas Kelautan dan Perikanan
XXVI	Pariwisata									
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan,Minum	Persen	N/A	2,42	2,5	2,58	2,65	2,73	2,79	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	N/A	5,45	5,5	5,55	5,6	5,65	5,7	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	ribu orang	250,41	300-350	365	380	395	421	445	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan mancanegara	Persen	26,32	31,78	7,58	7,04	6,58	3,99	5,67	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Nusantara	Persen	54,88	23,38	23,5	23,75	24	24,2	24,25	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Parawisata	Persen	16,67	14,29	12,5	11,11	10	9,09	8,33	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	N/A	14,97	31,97	48,98	65,99	82,99	100	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8	Persentase Pelaku Parawisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persen	N/A	35,9	48,72	61,54	74,36	87,18	100	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
XXVII	Urusan Pertanian									
1	NTP Tanaman Pangan	Poin	100,25	100,26	100,27	100,28	100,29	100,3	100,31	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
2	NTP Tanaman Holtikultura	Poin	92,81	92,82	92,83	92,84	92,85	92,86	92,87	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
3	Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)	Poin	182,87	183,05	183,24	183,42	183,6	183,79	183,97	Dinas Perkebunan dan Peternakan
4	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	Poin	95,4	95,5	95,59	95,69	95,78	95,88	95,97	Dinas Perkebunan dan Peternakan
5	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat	Persen	2,55	2,57	2,62	2,67	2,73	2,78	2,84	Dinas Perkebunan dan Peternakan
6	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persen	1,77	2,02	2,05	2,09	2,12	2,16	2,2	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Padi	Ton GKG	3.923.928	3.974.939	4.026.613	4.078.959	4.131.986	4.185.702	4.240.116	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
8	Jagung	Ton	1.948.641	1.973.973	1.999.635	2.025.630	2.051.963	2.078.639	2.105.661	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
9	Kedelai	Ton	9.082	9.200	9.320	9.441	9.564	9.688	9.814	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
	Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan			-	-	-	-	-		
10	Padi	Ton/ Ha	5,32	5,34	5,36	5,38	5,4	5,42	5,44	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
11	Jagung	Ton/ Ha	6,25	6,27	6,29	6,31	6,33	6,35	6,37	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
12	Kedelai	Ton/ Ha	1,38	1,39	1,4	1,41	1,42	1,43	1,44	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
	Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura									
13	Bawang Merah	Ton Umbi Basah	58.070	58.825	59.590	60.364	61.149	61.944	62.749	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
14	Cabai	Ton	194.593	197.123	199.685	202.281	204.911	207.575	210.273	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
15	Sayur-sayuran	Ton	1.330.765	1.348.065	1.365.590	1.383.342	1.401.326	1.419.543	1.437.997	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
16	Buah-Buahan	Ton	1.531.043	1.550.947	1.571.109	1.591.533	1.612.223	1.633.182	1.654.413	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura									Dinas Perkebunan dan Peternakan
17	Bawang Merah	Ton/ Ha	15,04	15,06	15,08	15,1	15,12	15,14	15,16	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
18	Cabai	Ton/ Ha	11,68	11,7	11,72	11,74	11,76	11,78	11,79	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
19	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Persen	-	5	5	10	10	10	10	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
20	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persen	100	95	96	97	98	99	100	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
21	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persen	100	95	96	97	98	99	100	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
22	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persen	4,2	4,25	4,3	4,35	4,4	4,45	4,5	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
23	Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	Persen	2	3	4	5	6	7	8	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
24	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat	Ton	220.289,15	226.778,78	237.524,28	248.812,52	260.678,97	273.171,63	286.303,64	Dinas Perkebunan dan Peternakan
25	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Ton	15.071,70	17.464,66	18.100,49	18.782,85	19.510,10	20.286,30	21.115,97	Dinas Perkebunan dan Peternakan
26	Cakupan Luas Lahan yang Difasilitasi Ketersediaan Prasarana Perkebunan	Ha	308	308	308	308	308	308	308	Dinas Perkebunan dan Peternakan
27	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	Persen	0,55	0,66	0,67	0,69	0,7	0,72	0,74	Dinas Perkebunan dan Peternakan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
28	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen	0,77	0,39	0,41	0,44	0,47	0,5	0,54	Dinas Perkebunan dan Peternakan
29	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persen	89	90	90	90	90	90	90	Dinas Perkebunan dan Peternakan
30	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persen	0,15	0,23	0,25	0,27	0,3	0,33	0,37	Dinas Perkebunan dan Peternakan
31	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persen	0,53	0,27	0,34	0,37	0,41	0,45	0,49	Dinas Perkebunan dan Peternakan
32	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perkebunan dan Peternakan
33	Persentase Kelompok Tani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Persen	0,58	0,47	0,56	0,62	0,69	0,77	0,84	Dinas Perkebunan dan Peternakan
XXVIII	Urusan Kehutanan									
1	Persentase Tutupan Lahan	Persen	N/A	20	20	20	20	20	20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Indeks Keanekaragaman Hayati	Poin	N/A	N/A	0,567	0,573	0,579	0,585	0,592	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	Persen	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Persen	N/A	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Persen	N/A	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	Persen	N/A	20	20	20	20	20	20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
XXIX	Urusan Energi dan SDM									
1	Porsi EBT dalam Bauran Energi	Persen	42,04	43	44	44	45	45	46	Dinas Perindag dan ESDM

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Intensitas energi primer	SBM/Rp.Milyar	81	79,4	77,64	75,88	74,12	72,36	70,6	Dinas Perindag dan ESDM
3	Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	ha	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	Dinas Perindag dan ESDM
4	Rasio Elektrifikasi	Persen	99,99	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindag dan ESDM
5	Persentase Usaha Tambang Sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar peraturan	Persen	96,3	66,56	71,35	78,51	82,3	88,5	95	Dinas Perindag dan ESDM
6	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik Bersumber dari Pembangkit EBT	Rumah Tangga		121	124	127	130	133	136	Dinas Perindag dan ESDM
7	Konsumsi listrik per kapita	kwh/kapita	1158,97	1184,21	1213,4	1244,39	1277,25	1312,09	1348,99	Dinas Perindag dan ESDM
XXX	Urusan Perdagangan									
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	18,79	19,03	19,2	19,37	19,54	19,71	19,88	Dinas Perindag dan ESDM
2	Ekspor Barang dan Jasa	Persen	12,56	16,45-16,54	16,62-16,76	16,79-16,98	16,96-17,20	17,13-17,41	17,30-17,62	Dinas Perindag dan ESDM
3	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindag dan ESDM
4	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persen	0	45	50	55	60	65	70	Dinas Perindag dan ESDM
5	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persen	4,17	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	Dinas Perindag dan ESDM
6	Nilai Ekspor Barang	Rp Miliar	153.000	182.790,8	191.207	199.623,2	208.039,5	216.455,7	224.871,9	Dinas Perindag dan ESDM
7	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Persen	77,78	81,01	84,24	87,47	90,7	93,93	97,16	Dinas Perindag dan ESDM
8	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindag dan ESDM
XXXI	Urusan Perindustrian									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	18,36	18,66	18,96	19,26	19,56	19,86	20,16	Dinas Perindag dan ESDM
2	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi	Persen	4,65	4,7	4,75	4,75	4,88	5,01	5,14	Dinas Perindag dan ESDM
3	Persentase Realisasi Investasi Persentase Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persen	28,43	28,43	32,61	37,37	42,68	48,69	55,58	Dinas Perindag dan ESDM
4	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindag dan ESDM
5	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persen	125	125	125	125	125	125	125	Dinas Perindag dan ESDM
XXXII	Urusan Transmigrasi									
1	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Persen	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	Dinas Ketenagakerjaan
2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Persen	20,25	20,25	17,72	15,19	12,66	10,13	7,59	Dinas Ketenagakerjaan
XXXIII	Unsur Sekretariat Daerah									
1	Indeks Pelayanan Publik	Poin/Skor	N/A	3,91(B)	3,92(B)	3,93(B)	3,94(B)	3,95(B)	3,96(B)	Biro Organisasi
2	Total Kredit/PDRB	Persen	N/A	25,7	27,15	28,6	30,04	31,49	32,65	Sekretariat Daerah
3	Tingkat Inflasi	Persen	2,12	2,5±1	2,5±1	2,5±1	1,61-3,72	1,4-3,7	1,4-3,7	Sekretariat Daerah
4	Nilai Capaian Pelaporan Kinerja (SAKIP)	Poin	N/A	72,00(BB)	72,5	73	73,5	74	74,5	Sekretariat Daerah
	Biro Organisasi									
1	Jumlah Kerja Sama Provinsi	Jumlah Kerjasama	N/A	20	20	21	21	22	22	Biro Organisasi
2	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Poin/Skor	N/A	82	84	86	88	90	92	Biro Organisasi
3	Nilai capaian pelaporan kinerja	Predikat	N/A	11,46	11,47	11,48	11,49	11,5	11,51	Biro Organisasi
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	N/A	89,72	89,73	89,74	89,75	89,76	89,77	Biro Organisasi
5	Nilai Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Persen	N/A	88,5	88,7	89,0	89,3	89,5	89,7	Biro Organisasi

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Biro Organisasi
7	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Biro Organisasi
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah										
1	Persentase Kerjasama Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Nilai/Skor	2,83	2,90	2,95	3,00	3,05	3,10	3,15	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Biro Kesejahteraan Rakyat										
1	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,44	0,46	0,48	0,5	0,52	0,54	0,57	Biro Kesejahteraan Rakyat
2	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	75	75	75	75	75	75	75	Biro Kesejahteraan Rakyat
3	Persentase Proposal Hibah yang ditindaklanjuti	Persen	75	75	75	75	75	75	75	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi	Persen	31,63	31,85	32,02	32,25	32,43	32,65		Biro Kesejahteraan Rakyat
Biro Hukum										
1	Indeks Reformasi Hukum	Poin/Skor	85,9	86	86	87	88	89	90	Biro Hukum
2	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Persen	86,2	86,5	86,8	87,1	87,4	87,7	88	Biro Hukum
3	Jumlah Penyelesaian Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tepat Waktu,	Produk Hukum	N/A	980	1020	1035	1050	1070	1085	Biro Hukum
4	Jumlah Produk Hukum Daerah yang diinformasikan,	Produk Hukum	N/A	30	50	55	60	70	75	Biro Hukum
5	Jumlah Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan,	Perkara	N/A	25	35	37	39	41	43	Biro Hukum
6	Jumlah Penanganan Sengketa di Luar	Kegiatan	N/A	25	33	38	43	48	53	Biro Hukum

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pengadilan dan Perlindungan HAM.									
7	Persentase penyelesaian penyusunan rancangan produk hukum daerah tepat waktu	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	Biro Hukum
Biro Perekonomian										
1	Return on Asset (ROA) BUMD	Persen	N/A	1,24	1,4225	1,605	1,7875	1,97	2,116	Biro Perekonomian
2	Aset Perbankan Syariah/PDRB	Persen	2.86	2.95	3.06	3.32	3.47	3.79	4.03	Biro Perekonomian
3	Aset Dana Pensiun/PDRB	Persen	N/A	0,13	0,1325	0,135	0,1375	0,14	0,142	Biro Perekonomian
4	Nilai Transaksi Saham per Kapita per Provinsi	Rp. Miliar	N/A	8.103.064	8.677.816	9.252.568	9.827.320	10.402.072	10.861.874	Biro Perekonomian
5	Inklusi Keuangan	Persen	N/A	97,52	97,61	97,7	97,79	97,88	97,95	Biro Perekonomian
6	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persen	N/A	28,77	30,0575	31,345	32,6325	33,92	34,95	Biro Perekonomian
7	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	Persen	N/A	2,26	2,28	2,3	2,31	2,33	2,34	Biro Perekonomian
8	Efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan Pembangunan	Persen	90	90	92	94	96	98	100	Biro Perekonomian
9	Persentase kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	Persen		100	100	100	100	100	100	Biro Perekonomian
10	Persentase pembinaan tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Persen		50	57	71	86	86	86	Biro Perekonomian
11	Persentase usulan dokumen UPTD untuk menjadi BLUD yang ditindaklanjuti	Persen		60	80	100	100	100	100	Biro Perekonomian
Biro Pengadaan Barang dan Jasa										
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai	68,66	85	85	88	89	91	91	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
2	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor	10,09	25	27	28	28	28	28	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Skor	18,57	21	22	23	23	23	23	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	Tingkat Kematangan KPBJ	Skor	40	40	40	40	40	40	40	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Biro Administrasi Pembangunan									
1	Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Biro Administrasi Pembangunan
2	Jumlah kebijakan yang di tetapkan untuk Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	dokumen		20	20	20	20	20	20	Biro Administrasi Pembangunan
3	Persentase realisasi fisik dan non fisik pada perangkat daerah yang disampaikan melalui aplikasi PRP2 Sumut	Persen		95	95	95	97	97	97	Biro Administrasi Pembangunan
	Biro Umum									
1	Persentase kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Biro Umum
2	Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprovsu	Persen	80,29	100	100	100	100	100	100	Biro Umum
3	Persentase pelayanan kerumahtanggaan pimpinan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Biro Umum
	Biro Administrasi Pimpinan									
1	Persentase fasilitasi materi pimpinan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Biro administrasi Pimpinan
2	Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Biro administrasi Pimpinan
XXXIV	Unsur Sekretariat DPRD									
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap	Persen		90	90	93	93	93	93	Sekretariat DPRD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pelayanan Sekretariat DPRD									
2	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persen	45	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
3	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persen	NA	50	50	53	53	53	55	Sekretariat DPRD
4	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
XXXV	Unsur Perencanaan									
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	90,40	90,50 – 92,00	92,55 – 93,00	93,10 – 93,25	93,30 – 93,25	93,50 – 93,75	94,00 – 94,25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
2	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	N/A	3,4	3,49	3,58	3,66	3,75	3,82	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
3	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
4	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
6	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
7	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan,

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										Penelitian dan Pengembangan
XXXVI	Unsur Keuangan									
1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD
2	Persentase Belanja Pegawai diluar tunjangan Guru yang dialokasi kan melalui TKD (Transfer Keuangan Daerah)	Persen	23	23	23	25	25	25	25	BKAD
3	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	38	38	38	40	40	40	40	BKAD
4	Persentase Realisasi Anggaran Belanja urusan wajib pelayanan dasar	Persen	92	92	92	94	96	98	98	BKAD
5	Persentase Penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	Persen	1	1	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	BKAD
6	Persentase Laporan Keuangan tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	BKAD
7	Persentase Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD/Perubahan APBD/ Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	BKAD
8	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	12	12	12	14	16	18	18	BKAD
9	Persentase Tanah Milik Pemprowsu yang disertifikasi	Persen	84,42	84,42	84,42	87,42	90	93	96	BKAD
10	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	60,43	60,93	61,93	62,68	63,43	64,18	64,68	Bapenda
11	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	N/A	1,37	1,42	1,46	1,51	1,55	1,6	Bapenda
XXXVII	Unsur Kepegawaian									
1	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	79,44	79,94	80,15	80,25	80,35	80,45	80,55	Badan Kepegawaian

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Indeks Sistem Merit	Poin	343,5	343,5	344	344	345	345	346	Badan Kepegawaian
3	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persen	100	80	80	80	80	80	80	Badan Kepegawaian
4	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	6	7	8	9	10	11	12	Badan Kepegawaian
5	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persen	78	80	81	82	83	84	85	Badan Kepegawaian
6	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai baik	Persen	89	90	91	92	93	94	95	Badan Kepegawaian
XXXVII I	Unsur Pendidikan dan Pelatihan									
1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Poin	NA	29,80	30,05	30,30	30,85	31,35	31,75	BPSDM
2	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Persen	N/A	3,88	11,11	16,66	19,44	22,22	26,66	BPSDM
3	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	Persen	N/A	6,01	11,27	15,03	18,79	25,55	26,31	BPSDM
4	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Persen	N/A	4,76	9,52	14,28	19,04	23,8	28,57	BPSDM
5	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persen	N/A	5,83	13,88	16,38	19,72	21,25	22,91	BPSDM
XXXIX	Unsur Penelitian dan Pengembangan									
1	Indeks Inovasi Daerah	Poin/Skor	59,93	57,50-60,01	58,69-60,76	59,88-61,51	61,07-62,26	62,26-63,01	63,45-63,76	Bappelitbang
2	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	Bappelitbang
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	70,60	70,80	71,00	71,15	71,25	71,50	72,15	Bappelitbang

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan Implementasi Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Bappelitbang
5	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Bappelitbang
6	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Bappelitbang
7	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Bappelitbang
XL	Unsur Pengawasan									
1	Indeks integritas Nasional	Poin/Skor	N/A	66,78	67,46	68,15	68,83	69,51	70,19	Inspektorat
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Inspektorat
3	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	80,74	82	83	84	85	86	87	Inspektorat
4	Level Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Level 3 Terdefinisi (3,0 ≤ skor < 4,0)	Inspektorat

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3 (Terintegrasi)	Level 3 (Terintegrasi)	Level 3 (Terintegrasi)	Level 3 (Terintegrasi)	Level 3 (Terintegrasi)	Level 3 (Terintegrasi)	Level 3 (Terintegrasi)	Inspektorat
6	Persentase Penyelesaian Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan BPK RI Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Persen	80,74	82	83	84	85	86	87	Inspektorat
7	Persentase Penyelesaian Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat
8	Persentase Penyelesaian Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Level	88,46	898	90	92	94	96	97	Inspektorat
9	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persen	83,47	84	85	86	87	88	89	Inspektorat
10	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	Persen	72,69	73	74	75	76	77	78	Inspektorat
XLI	Unsur Penghubung									
1	Persentase Program Pelayanan Penghubung	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penghubung
XLII	Unsur Pemerintahan Umum									
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin/Skor	80,19	80,5 - 82,46	83,08 - 84,08	84,70 - 85,70	86,32 - 87,32	87,95 - 88,95	89,57 - 90,57	Badan Kesbangpol
2	Indeks Harmoni Indonesia	Poin/Skor	N/A	-	63	64	65	66	67	Badan Kesbangpol
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin/Skor	80,88	81,2	81,5	82	82,5	83	83,5	Badan Kesbangpol
4	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	N/A	68	72	74	76	78	80	Badan Kesbangpol

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	Badan Kesbangpol
6	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	N/A	20	20	20	20	20	20	Badan Kesbangpol
7	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	Badan Kesbangpol
8	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	Badan Kesbangpol

4.3.2. Indikator Kinerja Daerah, Program, dan Pagu Indikatif untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar

Sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan sasaran pembangunan yang berfokus pada pemenuhan pelayanan dasar wajib bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok yang tidak mampu dan rentan. Pelayanan dasar tersebut dilaksanakan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dengan mengacu pada Sasaran Indikator Kinerja Daerah (IKD), program, indikator kinerja program, serta dukungan alokasi anggaran secara berkesinambungan.

Penyusunan program dan penganggaran ini dimaksudkan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan pembangunan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan perlindungan sosial masyarakat dapat tercapai. Rincian mengenai fokus pemenuhan pelayanan dasar wajib disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 6. Indikator Kinerja Daerah, Program, dan Pagu Indikatif untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar

NO	PEMENUHAN PELAYANAN DASAR	SASARAN IKD	PROGRAM	INDIKATOR	PAGU ANGGARAN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan)	- Indeks Modal Manusia - Harapan Lama Sekolah - Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional: a. Literasi Membaca b. Numerasi - Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional: a. Literasi Membaca b. Numerasi	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	1.908.115.612.285	1.534.621.601.330	1.580.660.249.370	1.628.080.056.851	1.676.922.458.557	1.727.230.132.313
				Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus (APS)						
2	Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	- Indeks Modal Manusia - Usia Harapan Hidup - Angka Kematian Ibu - Prevalensi Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Persentase ibu hamil ANC (antenatal care) 6 kali sesuai standard	393.040.668.481	513.774.259.551	523.473.459.623	546.448.158.281	570.049.824.761	596.441.597.493
				Persentase Wasting (Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk)						
				Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada						

NO	PEMENUHAN PELAYANAN DASAR	SASARAN IKD	PROGRAM	INDIKATOR	PAGU ANGGARAN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
				situasi KLB Provinsi						
				Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana						
				Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin Imunisasi Rutin Lengkap (IRL)						
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR)	- Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	68.182.271.605	98.622.000.000	21.000.000.000	200.000.000.000	99.000.000.000	1.000.000.000
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	0	17.500.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
4	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (dinas Perkim)	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	200.000.000	200.000.000	203.790.756	207.866.571	212.023.902	216.264.380

NO	PEMENUHAN PELAYANAN DASAR	SASARAN IKD	PROGRAM	INDIKATOR	PAGU ANGGARAN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni						
5	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satpol PP)	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8.166.377.644	5.347.797.458	5.347.797.458	5.347.797.458	5.347.797.458	5.347.797.458
				Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas						
				Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat						
				Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya						
6	Urusan Sosial (Dinas Sosial)	Indeks Kesejahteraan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	22.793.076.288	24.411.384.704	25.143.726.245	25.898.038.033	26.674.979.174	27.475.228.549
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya						
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi						

NO	PEMENUHAN PELAYANAN DASAR	SASARAN IKD	PROGRAM	INDIKATOR	PAGU ANGGARAN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Kebutuhan Dasarnya						
				Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya						
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya						
				Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas						
				Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia						
				Indeks Peranan Sosial						
			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	2.735.169.155	2.929.366.165	3.017.247.149	3.107.764.564	3.200.997.501	3.297.027.426

NO	PEMENUHAN PELAYANAN DASAR	SASARAN IKD	PROGRAM	INDIKATOR	PAGU ANGGARAN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Persentase masyarakat didaerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya						
				Persentase Korban bencana yang mendapatkan layananana pemulihan sosial						
	Total Pagu Anggaran Urusan Pelayanan Dasar Wajib				2.334.850.903.853	2.081.084.409.208	2.137.642.479.845	2.208.881.815.187	2.282.196.057.451	2.359.791.783.239

BAB V

PENUTUP

5.1. KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dalam lima tahun ke depan, termasuk sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029. RPJMD Tahun 2025-2029 juga dijadikan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan di Sumatera Utara untuk turut andil dalam pembangunan daerah Sumatera Utara selama kurun waktu lima tahun ke depan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing melalui kaidah pelaksanaan.

Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, dan mekanisme perubahan. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (*safeguarding*) untuk memastikan terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan cita-cita masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

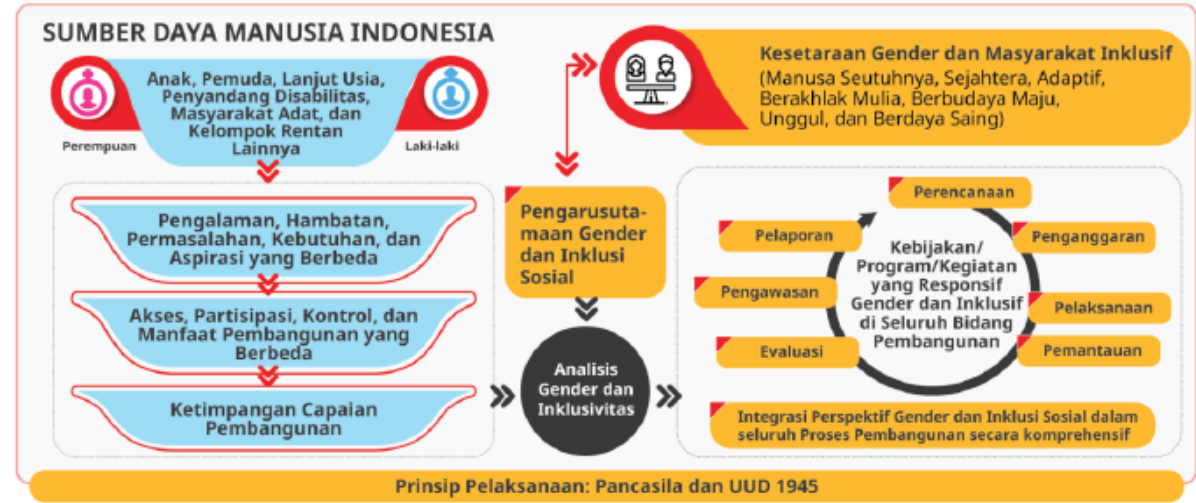
5.1.1. Pengarusutamaan Pembangunan

Dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029, diterapkan lima pengarusutamaan pembangunan sebagai prinsip dasar yang harus diintegrasikan ke dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan. Pengarusutamaan ini dimaksudkan untuk memperluas kemanfaatan pembangunan, meminimalkan dampak negatif, serta mewujudkan pemerataan dan keadilan bagi seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup. Adapun lima pengarusutamaan dimaksud meliputi: (i) Gender dan Inklusi Sosial, (ii) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), (iii) Transformasi Digital, (iv) Pembangunan Rendah Karbon, dan (v) Pembangunan Berketahanan Iklim. Seluruh pendekatan ini diimplementasikan secara konsisten tidak hanya dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi, tetapi juga melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta mendorong kolaborasi dengan dunia usaha, masyarakat sipil, dan aktor pembangunan lainnya.

i. Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial

Upaya peningkatan kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya dilaksanakan melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Inklusi Sosial. Strategi ini bertujuan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh kelompok masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sumber daya, berpartisipasi aktif dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil dan merata.

Gambar 5. 1. Pengarusutamaan Pembangunan



Sumber: Lampiran I RPJMN Tahun 2025-2029

Pelaksanaan PUG dan inklusi sosial dilakukan secara menyeluruh pada seluruh program prioritas maupun non-prioritas dengan tahapan: (a) analisis situasi ketimpangan gender dan identifikasi isu strategis dari aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM), serta aspek ketidakadilan gender seperti kekerasan, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan stereotipe berdasarkan data terpilah yang relevan; (b) analisis faktor penyebab ketimpangan gender pada tingkat keluarga, masyarakat, dan pemerintahan; serta (c) penyusunan rencana aksi dan intervensi beserta identifikasi institusi pelaksana. Untuk memastikan konvergensi pencapaian target kesetaraan gender, Pemerintah Provinsi menyelaraskan strategi dan rencana aksi daerah dengan kebijakan strategis nasional, sehingga terbangun pembangunan yang responsif gender, inklusif, dan berkeadilan.

ii. Pengarusutamaan SDGs

Pengarusutamaan SDGs dilakukan dengan mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke dalam seluruh aspek pembangunan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan mendukung percepatan pencapaian SDGs 2030 melalui beberapa langkah utama, yaitu: (a) memastikan kebijakan pembangunan provinsi sejalan dengan target SDGs; (b) mengintegrasikan sasaran dan indikator SDGs ke dalam dokumen RPJMD; (c) menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs di tingkat provinsi serta mendorong penyusunan RAD di tingkat kabupaten/kota; (d) memperkuat kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, filantropi, masyarakat sipil, akademisi, dan media dalam implementasi SDGs; (e) melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap capaian target SDGs; dan (f) mengintegrasikan prinsip inklusi sosial dengan menekankan keberpihakan pada kelompok rentan dan marginal, serta prinsip keberlanjutan lingkungan dalam seluruh program pembangunan.

iii. Transformasi Digital

Pengarusutamaan Transformasi Digital dilaksanakan dengan memastikan pemanfaatan teknologi digital secara menyeluruh dalam pembangunan daerah. Upaya yang ditempuh antara lain: (1) meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan telekomunikasi serta infrastruktur digital di seluruh wilayah; (2) mendorong pembangunan dan penguatan pusat data beserta ekosistem pendukungnya; (3) meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia digital melalui pendidikan, pelatihan, serta penguatan riset, pengembangan, dan inovasi; (4) memperluas pendataan terpadu, pemanfaatan data, serta mendorong adopsi teknologi digital, termasuk aplikasi dan *superapps*, disertai peningkatan literasi digital masyarakat; (5) memperkuat kedaulatan digital melalui peningkatan keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan penciptaan ruang digital yang sehat; (6) mendorong pertumbuhan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan lokal; serta (7) membangun tata kelola yang mendukung terciptanya ekosistem digital yang kondusif bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.

iv. Pembangunan Rendah Karbon

Pengarusutamaan Pembangunan Rendah Karbon bertujuan memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tetap sejalan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang dapat terjaga. Dalam pelaksanaannya, strategi pembangunan rendah karbon di Sumatera Utara diarahkan pada: (1) pengendalian dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor energi dan sumber daya mineral; (2) pengembangan transportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan; (3) perlindungan hutan dan lahan melalui pencegahan deforestasi serta peningkatan cadangan karbon; (4) penerapan praktik pertanian rendah karbon yang efisien dan ramah lingkungan; (5) peningkatan cadangan karbon di ekosistem pesisir dan laut (*blue carbon ecosystem*); (6) percepatan dekarbonisasi di sektor industri; (7) penguatan upaya penurunan emisi GRK dari sektor pengelolaan limbah; serta (8) peningkatan tata kelola, regulasi, dan dukungan kelembagaan untuk pencapaian target penurunan emisi GRK.

v. Pembangunan Berketahanan Iklim

Pengarusutamaan Pembangunan Berketahanan Iklim merupakan upaya integratif yang mengombinasikan adaptasi perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, serta peningkatan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi untuk memperkuat sistem pembangunan daerah agar mampu menghadapi guncangan dan dampak negatif bahaya iklim. Fokus pembangunan diarahkan pada empat sektor prioritas, yaitu sektor kelautan dan pesisir, sumber daya air, pertanian, serta kesehatan. Strategi yang ditempuh meliputi: (1) peningkatan ketahanan iklim pada wilayah pesisir dan laut; (2) pengelolaan sumber daya air yang adaptif terhadap iklim; (3) pengembangan dan penerapan praktik pertanian ramah iklim; (4) pencegahan dan pengendalian penyakit yang sensitif terhadap perubahan iklim; serta (5) penguatan tata kelola dan dukungan kelembagaan untuk mendukung pencapaian target pembangunan berketahanan iklim. Dengan langkah ini, Sumatera Utara berkomitmen mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan wilayah dalam menghadapi risiko iklim di masa depan.

5.1.2. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

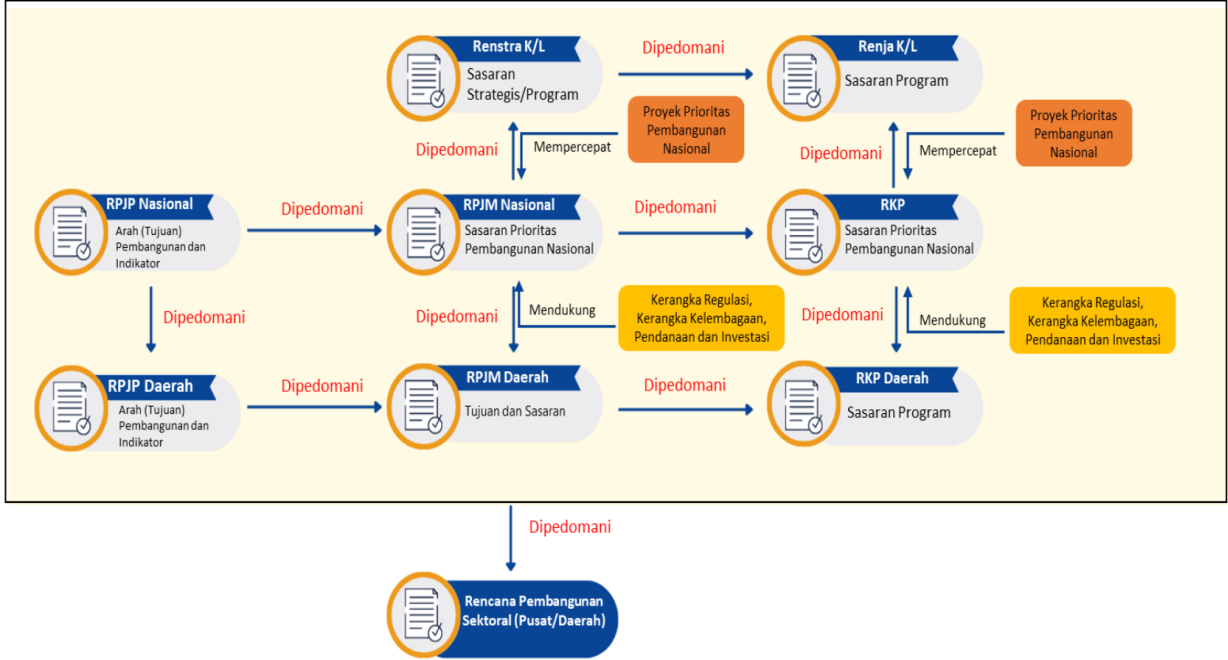
Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah provinsi, pelaku non-pemerintah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

5.1.2.1. Keterkaitan RPJMD dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat

RPJMD memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), di tingkat daerah. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah di tingkat daerah (APBD). Penekanan substansi RPJMD adalah berupa visi, misi, tujuan, sasaran, arah (tujuan) pembangunan dan indikator capaian tujuan pembangunan daerah dipedomani oleh RKPD untuk menyusun tujuan dan sasaran serta program pembangunan tahunan. Semua rencana pembangunan daerah tersebut mempedomani rencana pembangunan di tingkat nasional atau pemerintah pusat yang mana RPJPD mempedomani RPJPN, RPJM Daerah mempedomani RPJMN, dan RKP Daerah mempedomani RKP. Semua rencana sektoral mempedomani rencana pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah, dan pendek/tahunan. Keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat diperlihatkan dalam gambar berikut.

Gambar 5. 2. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Dalam rangka mempedomani dokumen perencanaan di tingkat pusat, RPJMD, beberapa hal yang diperhatikan, antara lain:

- 1) RPJMD bersifat jangka menengah sehingga memberikan arah pembangunan jangka menengah dan khusus memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang mendukung visi misi RPJMN dan Visi Indonesia Emas 2045. RPJMD menjadi rencana strategis 5 tahunan daerah.
- 2) Penyusunan RPJMD seperti penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan indikator pembangunan mempedomani arah (tujuan) pembangunan dan indikator yang tercantum dalam RPJM Nasional.
- 3) Tujuan dan sasaran pada RPJM Daerah Tingkat Provinsi berpedoman pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan pada RPJM di tingkat Nasional. Selain itu RPJM Daerah Tingkat Provinsi menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RKP, serta sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis organisasi perangkat daerah (OPD) Tingkat Provinsi.
- 4) Sasaran dan indikator strategis/program Rencana Strategis (Renstra) OPD menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada rencana kerja (Renja) OPD, sedangkan tujuan dan sasaran pada RPJM Daerah menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun sasaran program RKP Daerah.
- 5) Sasaran program RKP Daerah berpedoman pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RKP. RKP Daerah juga menjadi

pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja OPD. Indikator prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja OPD.

Pencapaian sasaran pembangunan daerah juga harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi. Sebagai upaya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah juga ditentukan sasaran program pada RPJM Daerah dan RKP Daerah. Sasaran program daerah tersebut dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran program pembangunan daerah.

5.1.2.2. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJPD, RPJM Daerah, dan RKP Daerah, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non-pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa), Belanja K/L, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan Utang Daerah, KPBU dan Non-APBN/APBD untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

5.1.3. Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata

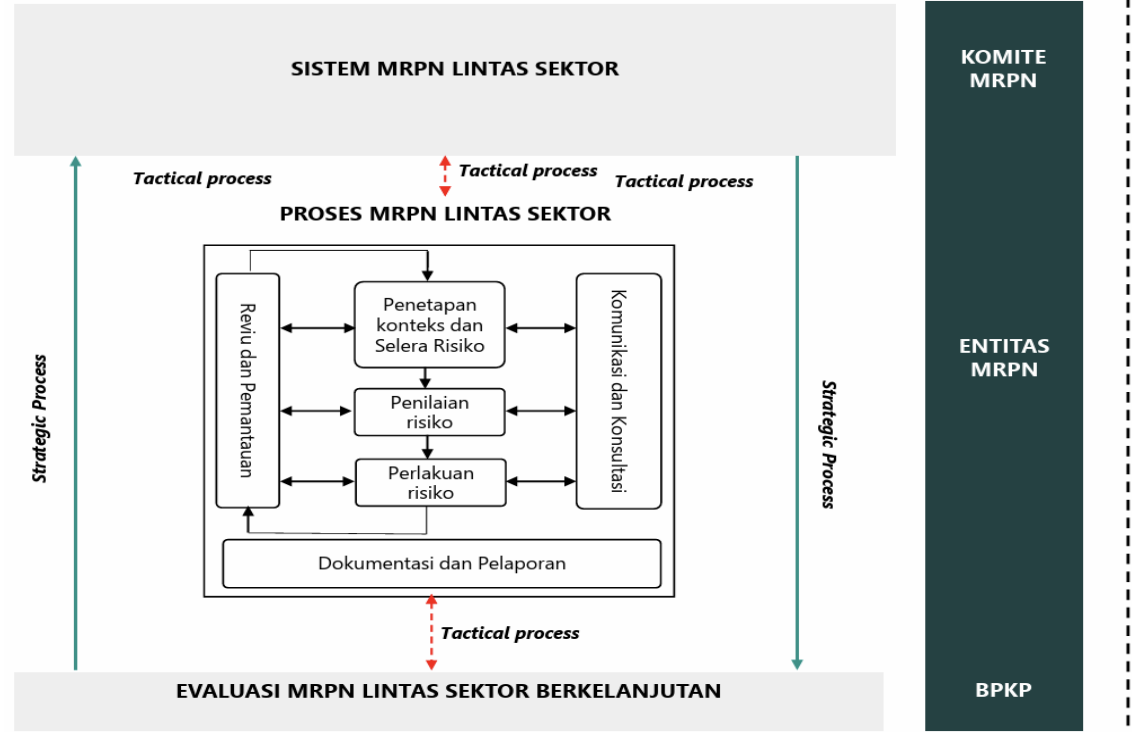
kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti (*evidence-based planning*).

Terkait dengan manajemen risiko, manajemen risiko merujuk kepada manajemen risiko pembangunan nasional (MRPN). MRPN adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan, mengendalikan dan mengelola risiko pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan dan/atau jenis risiko tertentu yang bersifat lintas sektor yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

MRPN mengkolaborasikan eksisting Manajemen Risiko Organisasi ke dalam sebuah Pengendalian Manajemen Risiko Lintas Sektor yang secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Adapun Kerangka Kerja MRPN dapat dilihat pada gambar di bawah.

Sebagai salah satu entitas MRPN, pemerintah daerah perlu menerapkan MRPN sejak tahap perencanaan pembangunan daerah. Penerapan MRPN di daerah dilakukan dengan pembentukan komite manajemen risiko dan penyusunan kebijakan manajemen risiko. Proses yang dilakukan untuk menerapkan MRPN antara lain perencanaan kinerja prioritas pembangunan, penentuan objek dan entitas MRPN, dan proses *assessment* risiko. Proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan dari manajemen risiko sangat diperlukan dalam meningkatkan probabilitas pencapaian tujuan dan mengurangi dampak merugikan pada suatu kejadian bagi entitas MRPN.

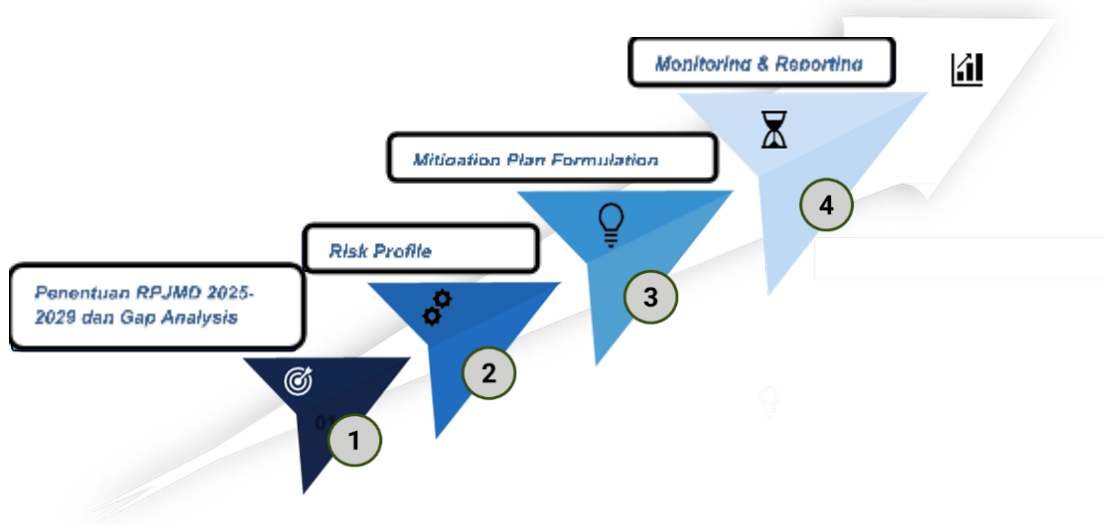
Gambar 5. 3. Kerangka Kerja MRPN



Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2024

Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 harus berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang antar periode serta menjaga sinkronisasi periodisasi dan substansi yang mengacu pada RPJPD Provinsi dan RPJM Nasional. Langkah ini sangat penting dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari visi Indonesia Emas Tahun 2045. Dalam rangka percepatan pembangunan di berbagai sektor sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, diperlukan tahapan dan integrasi manajemen risiko yang menyeluruh serta pembentukan dasar hukum yang memastikan integrasi tersebut dalam penyelenggaraan manajemen risiko. Tahapan manajemen risiko untuk membantu tercapainya target RPJMD dapat diperlihatkan dalam gambar berikut.

Gambar 5. 4. Tahapan Manajemen Risiko untuk Mencapai Target RPJMD



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Rincian penjelasan tahapan-tahapan dalam manajemen risiko di atas adalah berupa:

- 1) Penentuan RPJMD periode 2025-2029 dengan menetapkan arah kebijakan dan target yang akan dicapai pada tahun 2029. Hal ini mencakup penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan jangka menengah yang diharapkan dapat membawa Provinsi Sumatera Utara menuju pencapaian visi Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan 2045. Hal tersebut perlu dilakukan melalui *gap analysis* terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode sebelumnya. *Gap analysis* dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pencapaian yang

diharapkan dengan kinerja yang telah tercapai, sehingga langkah-langkah strategis dapat ditentukan untuk mengatasi perbedaan tersebut dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dalam RPJMD.

- 2) *Risk Profile Analysis* dilakukan dengan proses identifikasi dan *assessment* risiko. Proses identifikasi risiko mencakup pengenalan dan penilaian terhadap berbagai potensi risiko yang mungkin timbul, baik dari internal maupun eksternal, yang dapat menghambat pencapaian target dalam RPJMD periode 2025-2029. Selanjutnya, dilakukan *assessment* risiko untuk mengevaluasi kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*) dan dampak serius (*severity*) dari risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Penilaian ini membantu untuk memahami tingkat urgensi dan tingkat risiko yang harus dihadapi, sehingga tindakan pencegahan dan mitigasi yang sesuai dapat diambil dalam penyusunan RPJMD.
- 3) Penyusunan Rencana Mitigasi (*Mitigation Plan Formulation*) yang dilakukan bersama dengan Kementerian/Lembaga/Daerah terkait dalam proses perumusan rencana mitigasi. Proses ini mencakup identifikasi risiko yang diprioritaskan untuk ditangani dan menetapkan jadwal yang jelas untuk pelaksanaan rencana mitigasi. Dengan demikian, rencana mitigasi dapat disusun secara sistematis dan efektif untuk mengatasi risiko yang dihadapi dalam penyusunan RPJMD periode 2025-2029.
- 4) Melakukan *monitoring and reporting* untuk memastikan bahwa implementasi RPJMD berjalan dengan baik, memungkinkan evaluasi berkala terhadap pencapaian target, serta memastikan partisipasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembangunan daerah. Proses tersebut mencakup pemantauan secara internal terhadap implementasi RPJMD Provinsi Sumatera Utara periode 2025-2029 dan mengikutsertakan pihak eksternal, seperti lembaga pengawas, organisasi masyarakat, atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan RPJMD, sekaligus mendapatkan masukan yang diperlukan dari berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan implementasi RPJMD.

Adapun identifikasi risiko terhadap misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yaitu:

- 1) Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada pencapaian Misi 1 ***Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)***, terdapat

beberapa aspek yang menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan nasional. Program-program ini memastikan akses yang lebih baik ke pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, dan pelatihan keterampilan untuk semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, kondisi fisik, atau latar belakang sosial.

Pemuda sebagai generasi penerus bangsa akan diberikan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan potensi mereka dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, teknologi, dan kewirausahaan. Perempuan akan diberdayakan melalui berbagai program yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam ekonomi dan kehidupan sosial. Penyandang disabilitas akan diberikan akses yang setara dan inklusif untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan, dari pendidikan hingga kesempatan kerja. Pengarusutamaan gender akan menjadi prinsip utama dalam semua kebijakan dan program, memastikan bahwa setiap kebijakan mempertimbangkan dampak gender dan mendorong kesetaraan

- 2) Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada pencapaian Misi 2 ***Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah***, terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama dalam upaya memperkuat stabilitas makro ekonomi daerah dan mewujudkan Sumatera Utara sebagai pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global, diperlukan serangkaian langkah strategis yang komprehensif dan terintegrasi. Program ini mencakup pengembangan hilirisasi dan industrialisasi, peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, serta pemanfaatan energi baru terbarukan. Selain itu, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, serta integrasi ekonomi domestik dan global juga menjadi fokus utama. Tidak kalah pentingnya, pengembangan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi turut diperhatikan untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Seluruh langkah ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan serta inklusif.
- 3) Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada pencapaian Misi 3 ***Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan*** terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi, maka perlu dilakukan penyederhaan proses administrasi, mengurangi birokrasi yang

berlebihan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Dalam memastikan setiap tindakan pemerintahan dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan, sistem transparansi dan akuntabilitas akan diterapkan. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan publik. Kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi internasional akan diperkuat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kolaborasi antar lembaga pemerintah akan ditingkatkan untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan dan program.

Selain itu pelayanan publik yang berkualitas merupakan indikator penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Digitalisasi layanan publik akan dikembangkan dan diperluas untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kenyamanan bagi masyarakat. Standar layanan publik yang tinggi akan diterapkan untuk memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan pelayanan yang adil dan berkualitas. Selain itu, pusat layanan terpadu (*one-stop service*) akan didirikan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah. Menegakkan integritas dan supremasi hukum adalah dasar dari tata kelola pemerintahan yang baik. Penegakan hukum yang adil dan transparan akan dipastikan, serta program anti korupsi akan dilaksanakan dan pengawasan internal diperkuat untuk mencegah praktik korupsi. Kebijakan yang fleksibel dan adaptif akan diterapkan untuk menanggapi perubahan kebutuhan dan kondisi masyarakat, serta infrastruktur data yang kuat akan dibangun untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan adalah kunci keberhasilan

- 4) Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada pencapaian Misi 4 ***Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan*** terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama untuk mencapai program kerja melanjutkan kesinambungan pemerintah pusat dan daerah melalui pengembangan dan penataan infrastruktur yang berkualitas, estetik, dan ramah lingkungan, peran penting dari berbagai pihak sangat krusial. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan kebijakan dan regulasi yang mendukung, serta mengalokasikan anggaran yang memadai. Koordinasi yang baik antara

pemerintah pusat dan daerah akan memastikan sinergi dalam pelaksanaan program. Sektor swasta diharapkan berinvestasi dalam proyek infrastruktur, mengembangkan masyarakat inovatif, dan bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana.

Partisipasi aktif masyarakat juga sangat diperlukan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek. Lembaga masyarakat dan riset berperan dalam menyediakan riset dan pengembangan teknologi baru, serta menawarkan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dalam pengembangan potensi daerah. Pengembangan produktivitas ekonomi dapat terwujud melalui pemerataan Pembangunan dan Pembangunan konektivitas antar wilayah.

- 5) Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada pencapaian Misi 5 ***Memperkuat Ketahanan Sosial, Dan Budaya Untuk Membangun Masyarakat Sumut Yang Tangguh*** terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama dalam upaya membangun Masyarakat yang Tangguh terhadap bencana dan perubahan mencakup peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, pengembangan infrastruktur yang tahan bencana, serta pelestarian lingkungan melalui praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Dalam menjaga keharmonisan dengan lingkungan dicapai dengan memupuk toleransi antar umat beragama melalui dialog dan pendidikan multikultural, serta menjaga nilai-nilai demokrasi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat lembaga demokrasi. Mendukung pemberantasan narkoba melalui kampanye pencegahan dan penyuluhan, serta menyediakan program rehabilitasi bagi pengguna narkoba, juga menjadi tujuan utama. Upaya menurunkan angka kriminalitas dengan meningkatkan upaya penegakan hukum dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi semua.

Dengan mengidentifikasi dan merancang strategi manajemen risiko yang tepat di setiap pencapaian misi tersebut, rencana pembangunan dalam jangka menengah dapat berjalan lebih efektif serta meminimalkan risiko yang mungkin ditimbulkan. Pengendalian RPJMD dilaksanakan melalui pengendalian jangka pendek (tahunan) yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan daerah terbagi menjadi dua bagian.

- a. Pengendalian perencanaan.
 Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain sasaran program pembangunan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.
- b. Pengendalian pelaksanaan.
 Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jangka pendek (tahunan).

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja Pemerintah Daerah dan OPD terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengkoordinasikan pengendalian lintas dan internal Pemerintah Daerah dan OPD. Rincian evaluasi tahunan dan lima tahunan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5. 1. Proses Pengendalian dan Evaluasi RPJMD

Jadwal Evaluasi	Pelaksana	Metode Evaluasi	Output Evaluasi
Tahunan			
3 bulan sekali	Bappedalitbang (bersama akademisi) untuk seluruh proses evaluasi	1. Laporan dari seluruh OPD 2. Analisis gap antara target dengan Capaian IKU dan IKD 3. Survei Kepuasan Pelayanan Publik berdasarkan kinerja IKU dan atau IKD.	Rekomendasi atas hasil evaluasi dan dibahas pada Rapat Koordinasi antar OPD. Hasil Evaluasi ditindaklanjuti pada RKPD tahun berjalan dan RKPD berikutnya.
Setiap tahun dan atau sewaktu-waktu dibutuhkan	Pemerintah Provinsi dengan DPRD Provinsi	Dengar Pendapat	Rekomendasi dari DPRD Provinsi dan tindak lanjut oleh Pemerintah Provinsi.
5 Tahunan			

Jadwal Evaluasi	Pelaksana	Metode Evaluasi	Output Evaluasi
5 tahun sekali	Bappedalitbang (bersama akademisi) untuk seluruh proses evaluasi	1. Laporan 5 tahunan oleh seluruh OPD. 2. Analisis gap antara target dengan Capaian IKU dan IKD, yang dikaitkan dengan RPJPD Provinsi 3. Survei Kepuasan Pelayanan Publik Berdasarkan kinerja IKU dan atau IKD.	1. Rekomendasi atas hasil evaluasi dan dibahas pada Rapat Koordinasi antar OPD.
	Pemerintah Provinsi dengan DPRD Provinsi	Dengar Pendapat	2. Sebagai Laporan Pertanggungjawaban Gubernur di DPRD Provinsi.
	Bappedalitbang dan Seluruh OPD	1. Laporan 5 tahunan oleh seluruh OPD. 2. Analisis gap antara target dengan Capaian IKU dan IKD, yang dikaitkan dengan RPJPD Provinsi 3. Survei Kepuasan Pelayanan Publik Berdasarkan kinerja IKU dan atau IKD.	3. Tindak lanjut untuk penyusunan RPJMD dan Renstra berikutnya.

Proses pelaksanaan evaluasi kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Utara, baik tahunan maupun di akhir RPJMD, dilakukan secara terpadu dan berkolaborasi dengan pihak akademisi yang ditunjuk serta diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara. Surat Keputusan tersebut memuat tentang pembentukan Tim Pengendali Pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

Dalam mencapai misi dan tujuan pembangunan, beberapa risiko strategis atas pelaksanaan program dan kegiatan telah dipetakan. Risiko yang muncul ke depan dapat bersumber dari anggaran, kualitas SDM, pemanfaatan waktu, dan proses koordinasi serta kolaborasi antar pihak. Rincian hubungan dari risiko, dampak, probabilitas, dan bagaimana memitigasi risiko tersebut dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 5. 2. Risiko dan Rencana Mitigasi

Misi	Risiko	Dampak	Probabilitas	Rencana Mitigasi	OPD Pelaksana
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah 3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan 4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan 5. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh	1. Anggaran yang terbatas	Kurang optimalnya pelaksanaan program / kegiatan	50%	Kolaborasi dengan pihak swasta, terkait fasilitasi pendanaan (KPBU)	DPMPTSP; BKAD
				Konsultasi yang intens dengan Pemerintah Pusat	Bappedalitbang
				Inovasi pembiayaan baru (obligasi daerah, pemanfaatan CSR yang optimal)	Bappedalitbang bersama seluruh OPD
				Menggali potensi sumber-sumber penerimaan diluar pajak, seperti potensi pertambangan di Pangkalan Brandan, dan wilayah lainnya.	Bappedalitbang; Dinas Perindustrian , Perdagangan, Energi dan SDM
				serta optimalisasi pendapatan dari BUMD.	Bappedalitbang; Sekretariat Daerah; Direksi dan Komisaris BUMD
	2. Koordinasi dan Kolaborasi antar OPD terkait dan pihak eksternal	Sasaran tidak tercapai	50%	Pengendalian atas pelaksanaan RPJMD terkait koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan antar sektor dan pihak eksternal	Bappedalitbang bersama akademisi
	3. Integritas ASN	Inefisiensi dan tidak efektifnya program kegiatan dalam mencapai sasaran	50%	Penguatan pendidikan dan pelatihan ASN yang berbasis integritas dan profesionalisme pekerjaan	Badan Kepegawaian
				Memperkuat pengawasan kinerja ASN	Inspektorat dan pengawasan melekat dari atasan langsung
	4. Ketepatan jadwal pelaksanaan program/kegiatan	Kecepatan dalam pencapaian sasaran	50%	Membuat roadmap dan alokasi jadwal kegiatan	Seluruh OPD
	5. Aktivitas ekonomi terhadap kerusakan lingkungan	Kualitas lingkungan hidup yang menurun	50%	Memperkuat proses AMDAL bagi usaha-usaha berisiko tinggi dan melaksanakan monitoring usaha secara kontinu	DLH dan Kehutanan, DPMPTSP
	6. Bonus demografi dan iklim usaha	Beban demografi	50%	Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif melalui: 1. Membuat satuan tugas anti premanisme dan pungli 2. Dukungan modal bagi usaha mikro 3. Menyederhanakan Perizinan bagi usaha mikro	Bappedalitbang; Dinas Koperasi dan UKM; DPMPTSP

Misi	Risiko	Dampak	Probabilitas	Rencana Mitigasi	OPD Pelaksana
				4. Dukungan pemasaran produk ekonomi kreatif	

Integrasi Manajemen Risiko Pembangunan dalam Pengendalian dan Evaluasi RPJMD

Pengendalian dan evaluasi RPJMD tidak hanya dilaksanakan sebagai proses pemantauan pelaksanaan pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen manajemen strategis dalam memastikan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dalam konteks ini, RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025–2029 secara eksplisit mengintegrasikan prinsip-prinsip dan kerangka kerja Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023.

MRPN adalah suatu sistem pengelolaan risiko secara terkoordinasi dan lintas sektor terhadap program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, serta terhadap jenis risiko tertentu yang dapat menghambat pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah. Melalui MRPN, pendekatan manajemen risiko tidak lagi bersifat sektoral dan internal semata, tetapi juga bersifat strategis dan lintas sektor, sehingga mampu menjadi perangkat kebijakan dalam mendeteksi risiko sistemik yang berpotensi mengganggu keberhasilan pembangunan.

Dalam pelaksanaan RPJMD Sumatera Utara, MRPN diimplementasikan dengan membentuk Komite Manajemen Risiko Pembangunan Daerah, menyusun kebijakan manajemen risiko pembangunan daerah, serta menetapkan tahapan-tahapan sistematis manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, penilaian risiko (*risk assessment*), perumusan rencana mitigasi, pelaksanaan mitigasi, serta kegiatan pemantauan dan pelaporan. Semua tahapan ini dilaksanakan berbasis data dan didukung sistem elektronik terpadu, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil.

Evaluasi RPJMD dilakukan secara periodik (tahunan dan lima tahunan) dengan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD) yang telah diselaraskan dengan strategi manajemen risiko pembangunan. Hasil evaluasi juga akan dianalisis berdasarkan risk profile yang telah ditetapkan sejak awal RPJMD disusun, guna menilai efektivitas intervensi pembangunan dan merumuskan tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berjalan maupun perumusan RPJMD selanjutnya.

Dengan integrasi MRPN ini, sistem pengendalian dan evaluasi RPJMD tidak hanya berorientasi pada capaian output dan outcome semata, tetapi juga memperhitungkan ketidakpastian dan tantangan pembangunan secara proaktif. Hal ini akan memperkuat daya tahan dan fleksibilitas kebijakan pembangunan daerah dalam merespons dinamika lingkungan strategis, termasuk ketidakpastian global, perubahan iklim, krisis ekonomi, maupun risiko sosial-politik lainnya.

Kerangka Regulasi Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD

Dalam rangka mengidentifikasi dan mengatasi berbagai hambatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, diperlukan penataan regulasi yang strategis dan adaptif. Salah satu aspek penting dalam pengendalian dan evaluasi RPJMD adalah tersedianya kerangka regulasi daerah yang mendukung transformasi kebijakan secara cepat dan tepat sasaran. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu menyusun dan/atau merevisi sejumlah regulasi di tingkat daerah yang mendukung implementasi program prioritas dan pencapaian indikator kinerja utama.

Beberapa jenis regulasi daerah yang perlu disusun dan/atau disempurnakan antara lain:

1. Peraturan Daerah (Perda) tentang percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah lintas sektor, khususnya dalam hal integrasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program.
2. Peraturan Gubernur (Pergub) tentang sistem manajemen risiko pembangunan daerah yang mengadopsi prinsip dan tahapan MRPN, serta mengatur pembentukan Komite Manajemen Risiko Daerah.
3. Perda dan Pergub yang mendukung optimalisasi investasi publik dan swasta, termasuk regulasi mengenai Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), green financing, dan insentif fiskal daerah.
4. Revisi Perda mengenai pengelolaan data pembangunan dan keterbukaan informasi guna memperkuat evidence-based planning serta mendorong partisipasi masyarakat dalam siklus perencanaan-pelaksanaan-pengawasan.
5. Penyusunan regulasi yang mendorong transformasi digital dan inovasi pelayanan publik di berbagai sektor untuk mempercepat capaian reformasi birokrasi dan efisiensi pelayanan.

6. Perda atau Pergub mengenai perlindungan sosial, pengarusutamaan gender, dan penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan inklusif.

Dengan penguatan kerangka regulasi ini, maka hambatan struktural, koordinatif, maupun sektoral dalam pelaksanaan pembangunan dapat dikurangi secara signifikan, serta memastikan bahwa arah pembangunan Sumatera Utara tetap sejalan dengan tujuan strategis nasional dan visi Indonesia Emas 2045.

Integrasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah (PRKBID)

PRKBID berperan sebagai peta jalan NDC daerah, memberikan panduan dalam menyusun langkah-langkah implementasi *Nationally Determined Contribution* (NDC) di tingkat lokal dan memastikan bahwa target pengurangan emisi nasional, seperti yang ditetapkan dalam *Enhanced NDC* (ENDC) sebesar 31,89% (CM1) dan 43,20% (CM2) pada tahun 2030, tercermin dalam perencanaan daerah.

PRKBID memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

- RTRW: RPRKBID memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan tata ruang di Provinsi Sumatera Utara mendukung pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim. Misalnya, RPRKBID dapat mengarahkan pengendalian deforestasi dan pengelolaan lahan gambut, yang selaras dengan zonasi dalam RTRW.
- RPJPD (2025-2045): RPRKBID mengintegrasikan target pengurangan emisi GRK dan ketahanan iklim ke dalam visi jangka panjang daerah, sebagaimana diatur dalam RPJPD. Dokumen ini merinci strategi untuk mencapai target emisi dan mendukung pencapaian ekonomi hijau.
- RPJMD (2025-2029): RPRKBID diintegrasikan ke dalam RPJMD untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan jangka menengah mendukung aksi mitigasi dan adaptasi iklim. Hal ini mencakup sinkronisasi dengan prioritas sektor seperti energi, kehutanan, dan pengelolaan limbah.

- RUED: Dalam konteks energi, RPRKBID selaras dengan RUED untuk mempromosikan transisi energi berkelanjutan, seperti peningkatan penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi, yang berkontribusi pada pengurangan emisi sektor energi. Integrasi ini memastikan bahwa RPRKBID tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari kerangka perencanaan yang koheren dan saling mendukung.

Peta Jalan ENDC menetapkan target pengurangan emisi GRK nasional sebesar 31,89% (CM1) dan 43,20% (CM2) pada tahun 2030 dibandingkan baseline, sebagaimana diuraikan dalam dokumen ENDC. RPRKBID berfungsi sebagai turunan dari peta jalan ini di tingkat daerah, merinci aksi mitigasi spesifik untuk sektor prioritas seperti kehutanan, energi, limbah, pertanian, dan industri di Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai peta jalan NDC daerah, RPRKBID memungkinkan Provinsi Sumatera Utara untuk menyesuaikan strategi mitigasi dengan karakteristik lokal, seperti luas kawasan hutan dan potensi lahan gambut, sambil tetap berkontribusi pada target nasional. Namun, data spesifik mengenai baseline emisi GRK dan target pengurangan emisi untuk Sumatera Utara tidak tersedia dalam dokumen yang diberikan, sehingga perlu dicari rujukan tambahan untuk memperkuat analisis ini.

RPRKBID selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), yang menjadi fokus utama melalui upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain itu, RPRKBID juga mendukung:

- SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau): Melalui promosi energi terbarukan dan efisiensi energi, RPRKBID berkontribusi pada akses energi yang berkelanjutan.
- SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur): Dengan mendorong inovasi dalam teknologi rendah karbon dan infrastruktur tahan iklim, RPRKBID memperkuat ketahanan daerah terhadap perubahan iklim.

RPRKBID memastikan bahwa aksi mitigasi dan adaptasi iklim di Sumatera Utara tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi, tetapi juga mendukung pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam SDGs. Dokumen ini menjadi alat untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan daerah, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan.

Integrasi Kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial atau yang kerap disebut dengan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) merupakan elemen kunci dalam penyusunan RPRKBID, sebagaimana diwajibkan dalam SEB Nomor 2 Tahun 2024 dan GEDSI-LCDI Action Plan. GEDSI diarusutamakan untuk memastikan bahwa pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim di Provinsi Sumatera Utara inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat marginal.

Latar belakang GEDSI dalam RPRKBID didasarkan pada pengakuan bahwa perubahan iklim memiliki dampak yang tidak proporsional terhadap kelompok rentan. Misalnya, perempuan sering menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan, sementara penyandang disabilitas menghadapi tantangan mobilitas dan akses layanan. Oleh karena itu, RPRKBID mengintegrasikan GEDSI melalui:

- Kesetaraan Gender: Memastikan akses, partisipasi, serta manfaat yang didapatkan oleh perempuan dalam perencanaan dan implementasi aksi mitigasi, seperti pelatihan keterampilan di sektor energi rendah karbon atau pertanian berkelanjutan.
- Hak Penyandang Disabilitas: Menyediakan akses yang inklusif terhadap infrastruktur tahan iklim dan peluang ekonomi, sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, termasuk memastikan partisipasi serta manfaat untuk kelompok disabilitas.
- Inklusi Sosial: Melibatkan kelompok marginal, seperti masyarakat adat dan komunitas pedesaan, dalam pengambilan keputusan untuk memastikan manfaat pembangunan merata.

5.1.4. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya.

Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem

manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah dan OPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat dan daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

5.1.5. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, target RPJMD dapat dimutakhirkan melalui RKP Daerah. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

5.1.6. Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat,

transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik RPJMD Tahun 2025-2029 berprinsip “tidak ada yang tertinggal” (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat. Komunikasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan melalui Forum OPD agar OPD dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan, sedangkan komunikasi kepada pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah kabupaten dan provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora/perantau, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan.

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

5.2. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Upaya untuk mewujudkan Visi ***Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan*** memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup: (i) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi: penataan regulasi daerah, pembentukan kelembagaan daerah yang adaptif, pembentukan kelompok kerja (POKJA) kelembagaan daerah, pemanfaatan

teknologi digital dalam proses bisnis, penguatan *branding* dengan *marketing digital* dalam mempromosikan pariwisata, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*); (ii) perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerjasama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, investasi infrastruktur pariwisata dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya; (iii) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerjasama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model *private financial initiative* yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial; (iv) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri daerah, salah satunya meningkatkan UMKM Lokal dalam peningkatan ekonomi kreatif dan mendorong alih teknologi; (v) optimalisasi pemanfaatan aset melalui daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (*asset value capture*).

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik dilakukan melalui: (i) pemanfaatan instrumen pendanaan jangka menengah (antara lain: dana pensiun, asuransi, instrumen di pasar modal, dan dana abadi daerah), (ii) inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa-menyewa, jual beli, dan bagi hasil, (iii) inovasi pembiayaan untuk merespon perubahan iklim yang mencakup berbagai jenis pembiayaan hijau, biru dan sirkular, (iv) produk pembiayaan berbasis transaksi, seperti bursa karbon, bursa plastik ataupun bursa tematik lainnya, (v) serta penguatan bauran pendanaan (*blended financing*) melalui pemanfaatan dana yang bersifat katalitik seperti dana filantropi, dana sosial korporasi maupun dana keagamaan, termasuk jaminan, yang seluruhnya ditujukan untuk mengurangi risiko finansial bagi partisipasi sektor non publik dalam pembangunan daerah.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non publik perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup: (i) penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah; (ii)

penyempurnaan proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik; (iii) penyelarasan prioritas investasi publik skala daerah; (iv) modernisasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik; (v) pelibatan swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik; (vi) penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia manajemen investasi publik; dan (vii) penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik.

5.3. KESIMPULAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dokumen RPJMD menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran pokok dan arah kebijakan daerah serta indikator kinerja dan program prioritas selama kurun waktu 5 tahun yang menjawab tantangan permasalahan serta isu-isu strategis daerah sehingga dapat dicapai visi yang telah dirumuskan. RPJMD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi calon Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD berdasarkan visi misi Kepala Daerah terpilih, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara dengan periodisasi tahunan.

Dokumen ini merupakan manifestasi dari Tahap I RPJPD Provinsi Sumatera Utara, yang diarahkan pada "Penguatan Fondasi Transformasi" sebagai langkah awal untuk mewujudkan visi Sumatera Utara unggul, maju, dan berkelanjutan. Tahap pertama ini bertujuan untuk menguatkan fondasi dalam transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi makro, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Arah kebijakan pada tahap ini memastikan bahwa Sumatera Utara memiliki dasar yang kuat untuk memulai transformasi menuju pusat pengembangan bioindustri dan pariwisata global. Penekanan tahap ini memprioritaskan pembangunan layanan dasar, penguatan industri regional dan kapasitas riset, serta penciptaan struktur tata kelola yang responsif dan dinamis.

RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang berperan penting dalam keberhasilan Pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara untuk pencapaian visi dan misi daerah yaitu: ***“Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan”***. Keberhasilan tersebut perlu didukung oleh:

- (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis;
- (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah;
- (3) keberpihakan pembangunan kepada masyarakat; dan
- (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Provinsi Sumatera Utara; serta
- (5) dalam rangka menjaga keseimbangan Pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana.

Dukungan, kesungguhan, tanggung jawab, semangat gotong royong, peran aktif, serta komitmen, berbagai pihak di Sumatera Utara sangat diharapkan dalam mewujudkan daerah Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan. Terwujudnya visi dan misi pembangunan tersebut diharapkan dapat mendukung perwujudan visi pembangunan Indonesia Emas 2045.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION